

2021

Laporan Tahunan



**PENJAMINAN &
INFRASTRUKTUR**
Guarantee & Infrastructure



AKSI STRATEGIS
MENUJU
PEMULIHAN YANG LEBIH BAIK

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Referensi dan standar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (“PT PII”) tahun 2021 menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia, tempat di mana Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya. Meskipun PT PII bukan perusahaan yang tercatat di bursa efek, Laporan Tahunan ini menggunakan standar *best practice* penyusunan laporan tahunan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang dikombinasikan dengan kriteria Annual Report Award (ARA) 2018.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan. PT PII tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

Laporan Tahunan ini memuat kata “Perusahaan” atau “PT PII” yang mengacu pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Selain itu, kata “Kami” terkadang diselipkan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama, atas pertimbangan kemudahan penyebutan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Demi kemudahan, laporan tahunan ini dapat diunduh pada situs web Perusahaan dengan alamat www.ptpii.co.id.



STRATEGIC ACTIONS TOWARDS A BETTER RECOVERY

AKSI STRATEGIS MENUJU PEMULIHAN YANG LEBIH BAIK

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan semangat mendukung program percepatan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, PT PII tentunya terlibat aktif dalam berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Salah satunya melalui penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai agenda besar Pemerintah dalam mempercepat pemulihan perekonomian yang terdampak pandemic COVID-19.

Tema “Aksi Strategis Menuju Pemulihan yang Lebih Baik” memberikan gambaran upaya PT PII mengemban amanat yang diberikan dengan tujuan besar mendukung Program PEN dari Pemerintah Indonesia. Dengan pengelolaan usaha yang sekaligus dapat memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham, tahun 2021 menjadi jejak Langkah penting bagi PT PII untuk dapat memperkuat kompetensinya.



2020

Menjaga Momentum Pemulihan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memberikan pengaruh yang luar biasa kepada dinamika perekonomian dunia 2020, termasuk Indonesia. COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah, di tengah tantangan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 PT PII tetap menjaga momentum pembangunan infrastruktur dengan secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan mandatnya dalam memberikan penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur. Selain fokus pada pelaksanaan mandat utama, PT PII turut berperan serta mendukung Pemerintah dalam program penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Pada Tahun 2020, Pemerintah memberikan mandat baru dan penugasan kepada PT PII untuk berkontribusi dalam PEN.



2019

Jaga Infrastruktur untuk Indonesia Maju

Satu dekade kami lalui dengan menjalankan kegiatan usaha untuk memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur. Selama itu pula, kami senantiasa bekerja keras membangun ekosistem dan pemahaman terkait pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia melalui skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Memasuki dekade kedua, dengan mandat-mandat baru yang diberikan, merupakan saat bagi kami memantapkan langkah selanjutnya untuk semakin mengokohkan peran PT PII dalam mengawal pembangunan infrastruktur demi menjaga cita-cita bangsa untuk Indonesia maju.



2018

Dengan PT PII, Infrastruktur Jadi Teratur

Dengan alokasi risiko yang adil dan berimbang, penjaminan yang diberikan Perseroan terhadap proyek infrastruktur akan memberikan kepastian pihak swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan. Begitu juga kepastian bagi lembaga-lembaga penyedia pendanaan. Dengan demikian, peran PT PII menjadi sangat penting, yaitu membuat pembangunan infrastruktur menjadi lebih teratur.



2017

Infrastruktur Mempersatukan Bangsa Melalui Penjaminan

Memberikan kontribusi pada pembangunan infrastruktur, sesuai dengan Nawacita Pemerintah yang menginginkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Melalui kontribusi PT PII sebagai lembaga penjamin dalam pembangunan infrastruktur ini, diharapkan mampu menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

PETA SEBARAN PROYEK HINGGA TAHUN 2021

Hingga akhir tahun 2021, PT PII telah menjamin 37 proyek terdiri dari 35 proyek penjaminan skema KPBU dan pinjaman langsung (Non-KPBU), dan 2 proyek penjaminan obligasi terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memiliki total Nilai Proyek sebesar Rp357,7 triliun.





Gearing Ratio*

6,19x



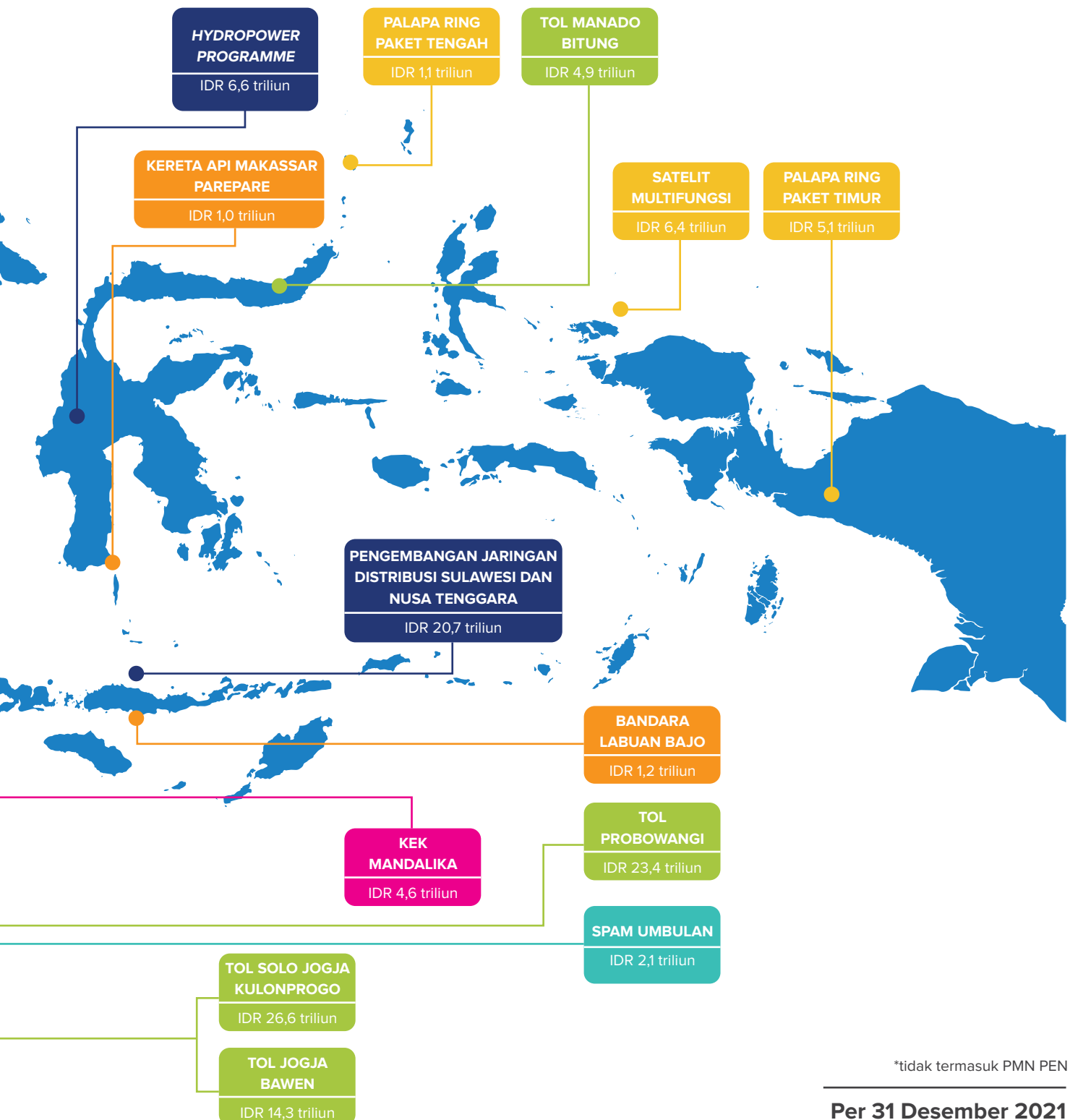
Total Nilai Proyek (IDR)

Rp357,7 Triliun



Jumlah Proyek

37 Proyek



*tidak termasuk PMN PEN

Per 31 Desember 2021

PENCAPAIAN KINERJA 2021

KINERJA OPERASIONAL



Nilai Eksposur
Penjaminan

Rp **83,3**
triliun

Total penjaminan yang dilakukan PT PII hingga akhir tahun 2021.

Jumlah Proyek

7/37 Proyek



Terdapat 4 tambahan Proyek KPBU dan 1 Proyek Direct Lending yang telah mendapatkan Penjaminan PT PII di tahun 2021 serta 2 Penjaminan BUMN dalam rangka PEN. Total proyek yang telah mendapatkan penjaminan PT PII hingga tahun 2021 adalah 37 Proyek.

Skor Penerapan
Good Corporate Governance (GCG)

89,060 Sangat Baik



Hasil assessment GCG tahun buku 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pihak independen. Assessment GCG menggunakan parameter dari Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 yang terdiri dari 6 aspek, 43 Parameter, 153 Indikator dan 568 Faktor Uji Kesesuaian.

KINERJA KEUANGAN



Beban Usaha

↓ 11,3%

dari **Rp376,7** miliar di tahun 2020 menjadi **Rp333,9** miliar di tahun 2021.



Laba Bersih Tahun Berjalan

↑ 0,8%

dari **Rp620,6** miliar di tahun 2020 menjadi **Rp625,4** miliar di tahun 2021.



Pembayaran Dividen Kepada Pemegang Saham

↑ 68,0%

dari **Rp110,8** miliar di tahun 2020 untuk dividen hasil usaha tahun 2019, menjadi **Rp186,2** miliar di tahun 2021 untuk dividen hasil usaha tahun 2020.



Jumlah Aset

↑ 4,4%

dari **Rp13,5** triliun di tahun 2020 menjadi **Rp14,1** triliun di tahun 2021.

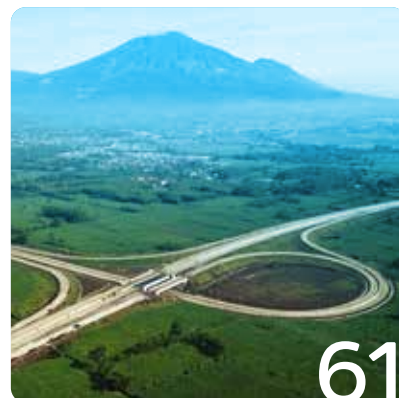
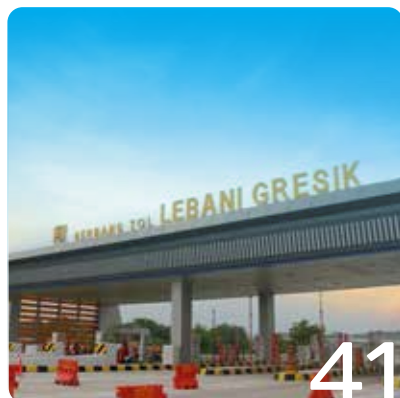
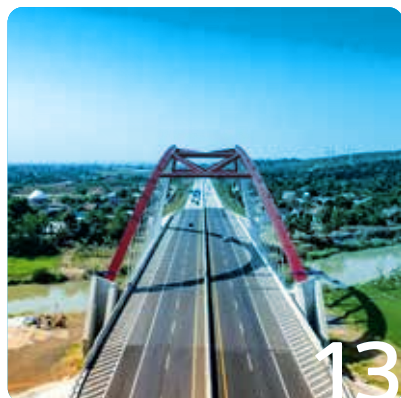


Jumlah Ekuitas

↑ 3,3%

dari **Rp13,3** triliun di tahun 2020 menjadi **Rp13,8** triliun di tahun 2021.

DAFTAR ISI



Peta Sebaran Proyek Hingga Tahun 2021	6
Pencapaian Kinerja 2021	8
Daftar Isi	10

01

Ikhtisar Kinerja

Ikhtisar Data Keuangan Penting	14
Ikhtisar Bisnis, Operasi dan Organisasi	19
Ikhtisar tentang Saham dan Aksi Korporasi	20
Informasi tentang Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, Serta Informasi Pendanaan Lainnya	21
Penghargaan dan Sertifikasi	22
Kilas Peristiwa	24

02

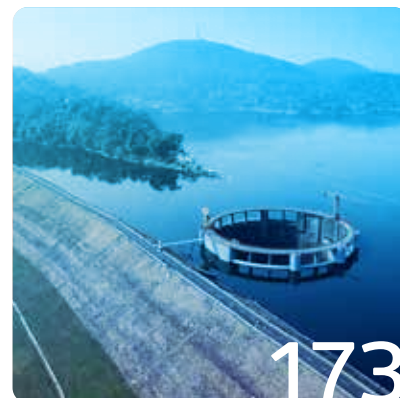
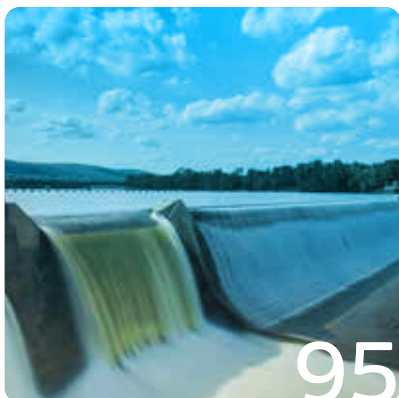
Laporan Manajemen

Laporan Dewan Komisaris	52
Laporan Direksi	60

03

Profil Perusahaan

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan	72
Riwayat Singkat Perusahaan	73
Visi, Misi, Serta Budaya dan Nilai Perusahaan	76
Makna Logo Perusahaan	78
Jejak Langkah	79
Bidang Usaha serta Produk dan Jasa	84
Wilayah Operasi	85
Struktur Organisasi	86
Susunan dan Profil Dewan Komisaris	92
Susunan dan Profil Direksi	96
Profil Deputi Direktur	101
Demografi Karyawan	102
Informasi Pemegang Saham	104
Informasi tentang Struktur Grup/Kelompok Usaha serta Entitas Anak/Entitas Asosiasi/Perusahaan Patungan/Special Purpose Vehicle	105
Informasi tentang Pencatatan Saham serta Penerbitan dan Pencatatan Obligasi/Efek Lainnya	105
Lembaga dan Profesi Penunjang	105
Informasi pada Situs Web Perusahaan	106
Pelatihan Dewan Komisaris	107
Pelatihan Direksi	109



04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tinjauan Perekonomian dan Industri	114
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	115
Aspek Pemasaran	174
Tinjauan Kinerja Keuangan	176
Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya	185
Informasi Kelangsungan Usaha	194

05

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Roadmap Pengelolaan SDM	198
Penanggung Jawab Pengelolaan SDM	199
Manajemen SDM	201
Internalisasi Budaya Kerja	211
Hubungan Industrial	212
Praktik K3	213
Rencana ke Depan	214

06

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Komitmen dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik	218
Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik	229
Sistem Pengendalian Intern	300
Manajemen Risiko	307
Perkara Penting dan Sanksi Administratif	318
Akses Data dan Informasi Perusahaan	319
Tata Kelola Teknologi Informasi	321
Kode Etik Perusahaan	325
Kebijakan Anti Gratifikasi	326
Kebijakan Anti Korupsi	328
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	329
Informasi Tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)	329
Whistleblowing System	330

07

Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan dan Rujukan Keberlanjutan

Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan	334
Rujukan Keberlanjutan	353

Laporan Keuangan Audited 2021

01

IKHTISAR KINERJA

“ Pertumbuhan bisnis yang terjaga dengan baik mencerminkan upaya PT PII untuk terus memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. ”





IKHTISAR DATA

KEUANGAN PENTING

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

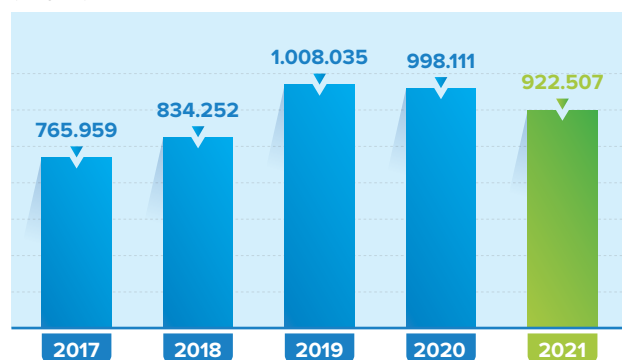
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)
Pendapatan	922.507	998.111	1.008.035	834.252	765.959	-7,6%
Beban Usaha	(333.941)	(376.687)	(413.629)	(356.787)	(313.824)	-11,3%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	588.566	621.424	594.406	477.465	452.135	-5,3%
Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan	36.836	(864)	(64.986)	(6.385)	18.334	-4.368,3%
Laba Tahun Berjalan	625.402	620.560	529.420	471.080	470.469	0,8%
Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lain Tahun berjalan	6.049	291.916	117.149	(140.702)	57.762	-97,9%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	631.451	912.476	646.568	330.378	528.230	-30,8%
Laba bersih per saham* (nilai penuh dalam Rupiah)	65.350	64.844	66.178	58.885	58.809	0,8%

*) Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah lembar saham.

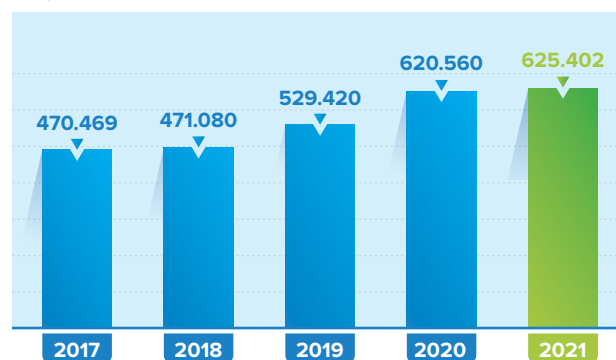
Pendapatan

(Rp-juta)



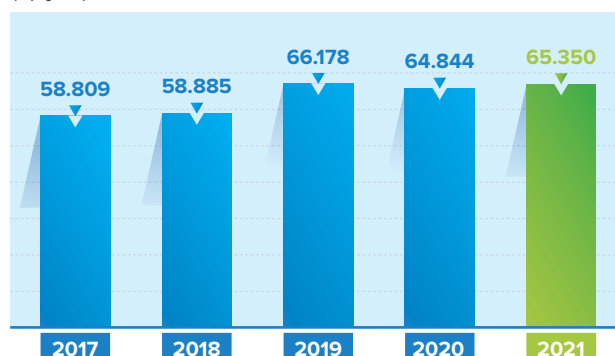
Laba Tahun Berjalan

(Rp-juta)



Laba Bersih per Saham

(Rp-juta)



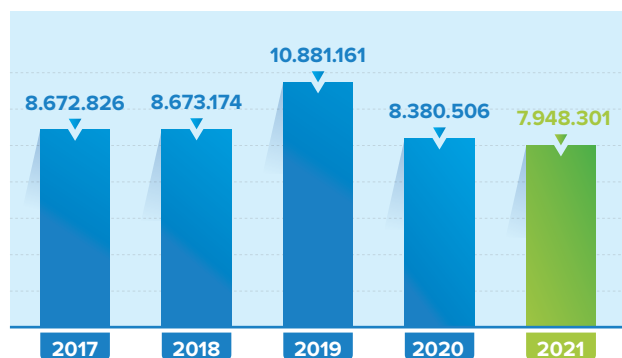
Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)
Aset						
Kas dan Setara Kas	5.893.948	4.883.893	26.809	1.699.179	1.443.048	20,7%
Investasi	7.948.301	8.380.506	10.881.161	8.673.174	8.672.826	-5,2%
Piutang Usaha	169.217	155.189	113.189	79.986	74.836	9,0%
Piutang Lainnya	10.735	12.757	12.581	8.978	6.979	-15,9%
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka	6.734	1.147	1.570	2.448	2.423	487,1%
Aset Tetap	8.141	10.606	14.499	18.776	16.267	-23,2%
Aset Hak Guna	31.433	50.293	-	-	-	-37,5%
Aset takberwujud	3.242	2.045	1.824	1.195	992	58,5%
Beban Tangguhan	7.571	19.164	26.697	43.360	41.665	-60,5%
Beban <i>Front End</i>	-	-	-	-	763	-
Pajak Dibayar dimuka	1.613	3.870	4.210	368	-	-58,3%
Aset Pajak Tangguhan	58.130	22.618	23.331	88.106	95.501	157,0%
Uang Jaminan yang Dapat Dikembalikan	5.369	5.369	5.369	5.346	5.346	0%
Jumlah Aset	14.144.434	13.547.457	11.111.240	10.620.916	10.360.646	4,4%
Liabilitas						
Utang Usaha	7.373	3.089	3.772	7.481	3.342	138,7%
Utang Pajak	4.421	3.258	2.439	4.816	3.484	35,7%
Biaya yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain	65.282	39.570	37.990	42.913	28.722	65,0%
Pendapatan Tangguhan	171.117	15.662	10.968	8.510	8.085	992,6%
Liabilitas Sewa Pembiayaan	33.504	51.094	-	-	-	-34,4%
Pinjaman Penerusan	55.127	55.127	55.127	55.127	45.276	0%
Liabilitas Imbalan Kerja	18.896	36.225	29.161	21.398	20.293	47,8%
Jumlah Liabilitas	355.720	204.025	139.457	140.245	109.202	74,4%
Ekuitas						
Modal Saham	9.570.000	9.570.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0%
Laba (Rugi) Belum Direalisasi atas Kepemilikan Aset Keuangan	300.351	298.993	6.404	(111.375)	32.356	0,5%
(Kerugian)/Keuntungan Aktuarial, Setelah Pajak	4.229	(461)	212	843	(2.186)	-1.017,4%
Saldo Laba						
Ditentukan Penggunaannya	197.499	166.471	140.000	116.446	92.922	18,6%
Belum Ditentukan Penggunaannya	3.716.635	3.308.429	2.825.167	2.474.757	2.128.352	12,3%
Jumlah Ekuitas	13.788.714	13.343.432	10.971.783	10.480.671	10.251.444	3,3%
Liabilitas dan Ekuitas						
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	14.144.434	13.547.457	11.111.240	10.620.916	10.360.646	4,4%

Investasi

(Rp-juta)



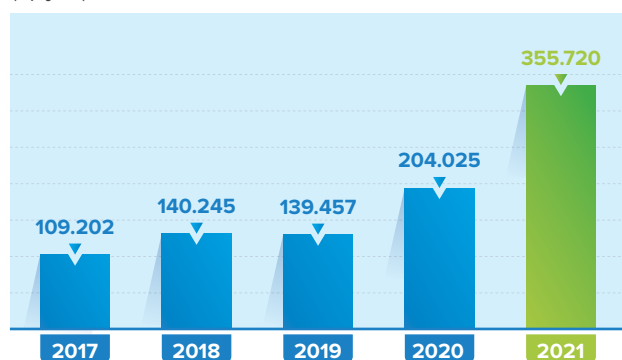
Jumlah Aset

(Rp-juta)



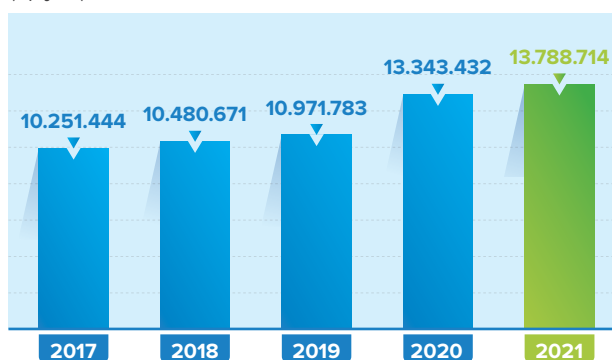
Jumlah Liabilitas

(Rp-juta)



Jumlah Ekuitas

(Rp-juta)



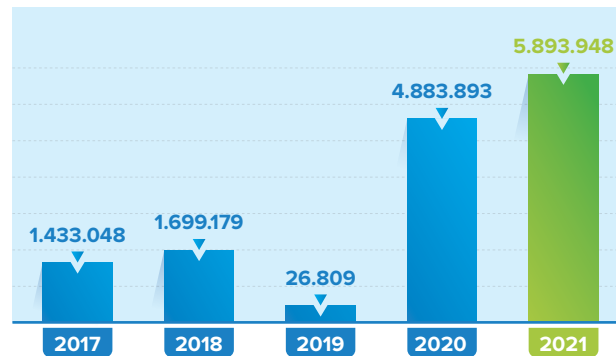
Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	788.709	616.703	578.552	502.149	467.586	27,9%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	429.422	2.788.510	(2.095.466)	(153.696)	(2.828.473)	-84,6%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(208.076)	1.451.870	(155.456)	(93.322)	908.390	-114,3%
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	1.010.055	4.857.084	(1.672.370)	256.131	1.452.497	-79,2%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	4.883.893	26.809	1.699.179	1.433.048	2.895.545	18.116,7%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	5.893.948	4.883.893	26.809	1.699.179	1.433.048	20,7%

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

(Rp-juta)



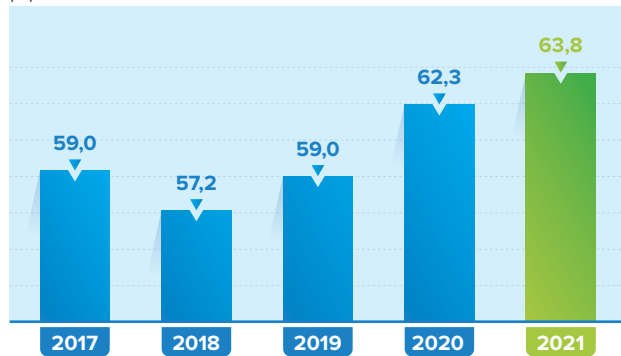
Rasio-rasio Keuangan

(dalam persen)

	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)
Rasio Profitabilitas						
Rasio Imbal Hasil Aset, atau <i>Return On Asset</i> (ROA)	4,6	5,4	4,9	4,5	5,1	-16,7%
Rasio Imbalan Ekuitas, atau <i>Return On Equity</i> (ROE)	4,6	5,5	4,9	4,5	5,1	-16,4%
Marjin Laba Operasi, atau <i>Operating Profit Margin</i> (OPM)	63,8	62,3	59,0	57,2	59,0	2,4%
Marjin Laba Bersih, atau <i>Net Profit Margin</i> (NPM)	68,0	62,0	53,0	56,0	61,4	9,7%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	37,0	38,0	41,0	43,0	41,0	-2,6%
Rasio Likuiditas						
Rasio Kas	17.959,2	28.887,8	24.678,1	18.786,9	28.457,3	-37,8%
Rasio Lancar	17.889,7	28.850,9	23.737,8	17.752,7	24.071,0	-37,3%
Rasio Solvabilitas						
Rasio Liabilitas terhadap Aset	2,5	1,5	1,3	1,3	1,0	66,7%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	2,6	1,8	1,3	1,3	1,1	44,4%
Rasio Pertumbuhan						
Pendapatan	-7,6	-1,0	20,8	8,9	-6,7	660,0%
Beban Usaha	-11,3	-8,9	15,9	13,7	-0,7	27,0%
Laba Tahun Berjalan	0,8	17,2	12,4	0,1	-6,4	-95,3%
Aset	4,4	21,9	4,6	2,5	16,1	-79,9%
Liabilitas	74,4	46,3	-0,6	28,4	8,6	60,7%
Ekuitas	3,3	21,6	4,7	2,2	16,2	-84,7%

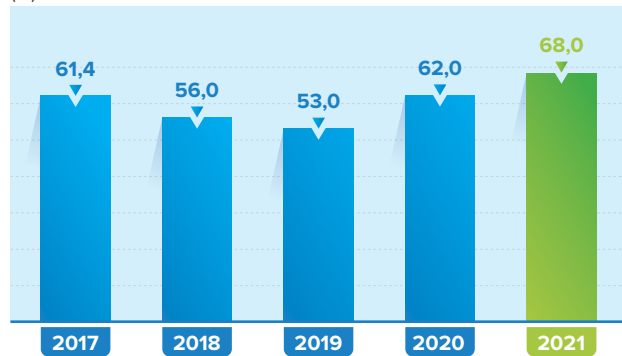
Marjin Laba Operasi, atau Operating Profit Margin (OPM)

(%)



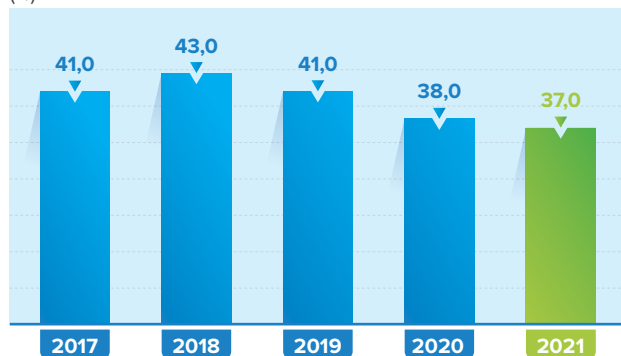
Marjin Laba Bersih, atau Net Profit Margin (NPM)

(%)



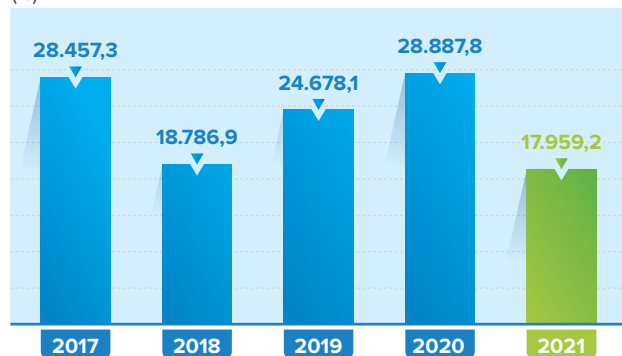
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

(%)



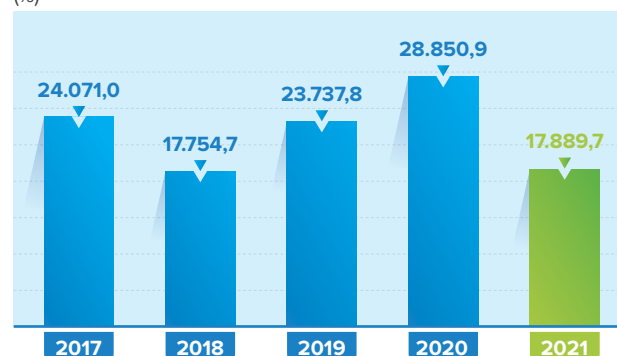
Rasio Kas

(%)



Rasio Lancar

(%)



IKHTISAR BISNIS, OPERASI DAN ORGANISASI

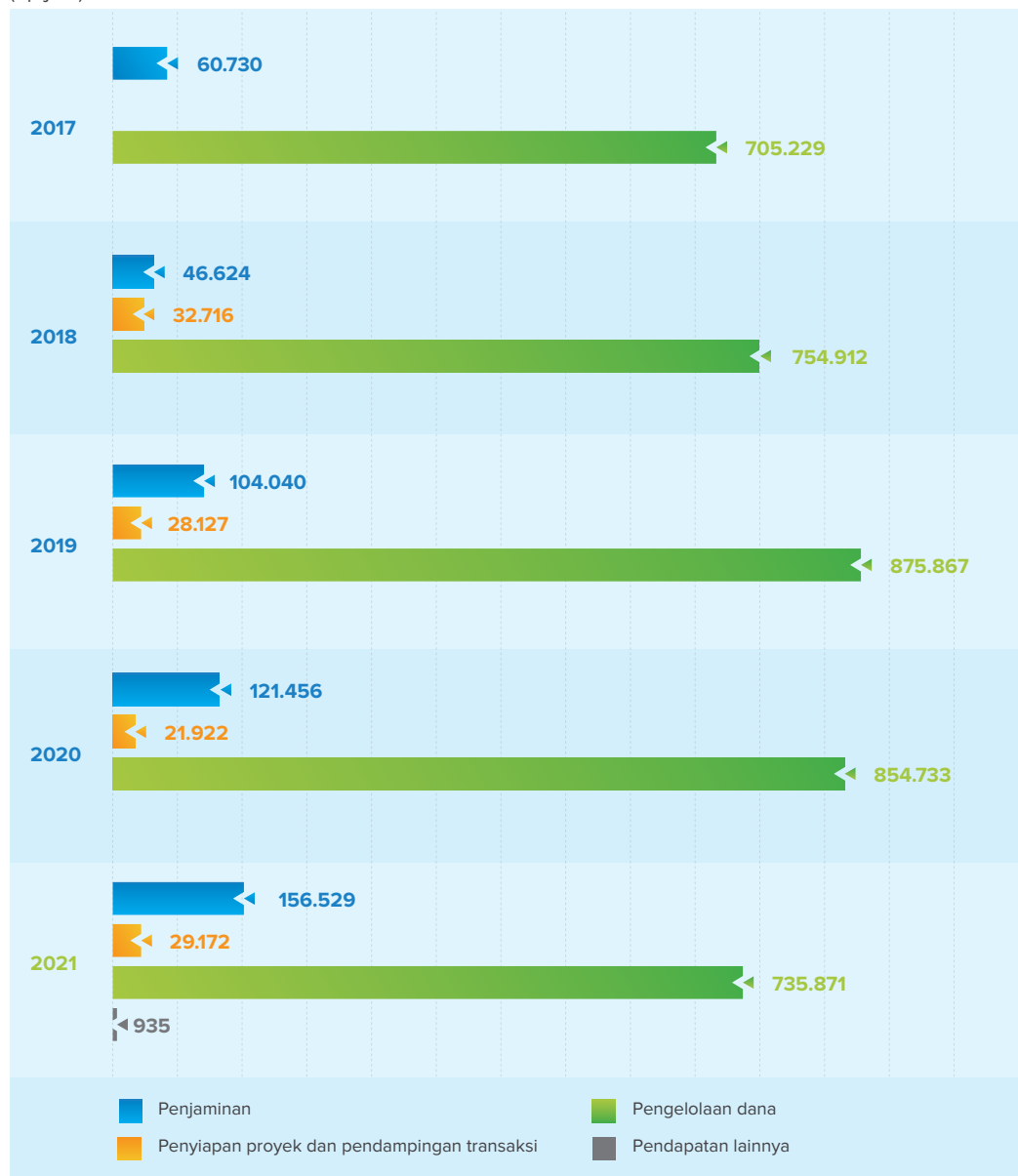
Ikhtisar Pendapatan

(dalam jutaan Rupiah)

	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)
Pendapatan						
Penjaminan	156.529	121.456	104.040	46.624	60.730	28,9%
Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi	29.172	21.922	28.127	32.716	-	33,1%
Pengelolaan Dana	735.871	854.733	875.867	754.912	705.229	-13,9%
Pendapatan Lainnya	935	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	922.507	998.111	1.008.035	834.252	765.959	-7,6%

Jumlah Pendapatan Akhir Tahun

(Rp-juta)



IKHTISAR TENTANG SAHAM DAN AKSI KORPORASI

JUMLAH SAHAM DAN INFORMASI TENTANG PENCATATAN SAHAM DI BURSA SAHAM SERTA KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK

Jumlah saham Perusahaan sebanyak 9.570.000 lembar saham, dengan kepemilikan seluruhnya atau 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan tidak melakukan penawaran umum saham dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Perusahaan juga tidak memiliki kebijakan terkait kepemilikan perorangan, baik kepemilikan oleh manajemen maupun karyawan.

DIVIDEN SAHAM

Berdasarkan RUPS Tahunan tahun buku 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2021, para pemegang saham menyetujui keputusan Penggunaan laba bersih PT PII tahun buku 2020 untuk dialokasikan cadangan laba Perusahaan sebesar Rp26.471.000.000,- dan pembagian Dividen sejumlah Rp 186.168.000.000,-

Berdasarkan RUPS Tahunan tahun buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2020, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2019 sejumlah Rp110.827.000.000,-.

Realisasi pembagian Dividen Saham tunai untuk hasil usaha tahun buku 2019 yang dibagikan di tahun 2020 dan Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2020 yang dibagikan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

	2021 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2020)	2020 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2019)
Laba Tahun Berjalan (Rp-juta)	625.402	620.560
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-juta)	186.168	110.827
Dividen Kas per Saham (Rp/lembar)	-	-
Rasio Pembagian Dividen (%)	30%	21%
Tanggal Pengumuman	23 Juni 2021	12 Juni 2020
Tanggal Pembayaran	6 Juli 2021	22 Juni 2020

INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI LAINNYA

Di sepanjang tahun 2020 dan 2021 Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

Namun demikian, di tahun 2020, terdapat aksi korporasi berupa peningkatan modal dasar dan penambahan Penyertaan Modal Negara. Pemegang saham telah meningkatkan modal dasar Perusahaan menjadi Rp20.000.000.000.000 melalui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan melalui Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 14 tanggal 19 November 2020 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077464.AH.01.02.TAHUN 2020 pada tanggal 19 November 2020. Peningkatan modal dasar ini sekaligus meningkatkan jumlah lembar saham Perusahaan sebanyak 1.570.000 lembar saham, dari sebelumnya 8.000.000 lembar saham per 31 Desember 2019 menjadi 9.570.000 lembar saham per 31 Desember 2020. Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA INFORMASI PENDANAAN LAINNYA

Hingga 31 Desember 2021 Perusahaan tidak melakukan penawaran umum surat utang pada bursa efek manapun, baik obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Perusahaan juga tidak memiliki pendanaan lainnya seperti Surat Berjangka Menengah, atau *Medium Term Notes*.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

PENGHARGAAN TAHUN 2021 BERSKALA INTERNASIONAL/REGIONAL



PPP Agency of the Year 2021

Deskripsi Penghargaan: PT PII memperoleh PPP Agency of the Year Award 2021 untuk yang ketiga kalinya sejak penyelenggaraannya di tahun 2019, untuk kategori Institution Award dari The Asset, PT PII mendapatkan pengakuan secara regional Asia Pasifik sebagai institusi yang berperan signifikan dalam memajukan implementasi PPP dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia

Pemberi Penghargaan: The Asset

Acara/Kegiatan: The Asset Triple A Awards

Tanggal Diberikan: 16 Agustus 2021



Public Initiative, GRC Awards, Risk Champion Asean Risk Awards 2021

Deskripsi Penghargaan: Pada Asean Risk Awards 2021, PT PII mendapatkan tiga kategori penghargaan, yaitu kategori Public Initiative serta runner up pada kategori GRC Awards, yang merupakan kelima kalinya diraih PT PII, dan kategori Risk Champion yang merupakan pertama kalinya di tahun ini

Pemberi Penghargaan: Enterprise Risk Management Academy

Acara/Kegiatan: Asean Risk Awards 2021

Tanggal Diberikan: 10 Desember 2021

PENGHARGAAN TAHUN 2021 BERSKALA NASIONAL



Top CSR 2021 dan Top Leader on CSR Commitment 2021

Deskripsi Penghargaan: kategori Top CSR 2021 on Star 4 dan Top Leader on CSR Commitment 2021

Pemberi Penghargaan: Majalah TopBusiness

Acara/Kegiatan: Top CSR Awards

Tanggal Diberikan: 27 April 2021



Indonesia Best CEO Awards Employee Choice`s 2021

Deskripsi Penghargaan: PT PII mendapatkan anugerah melalui Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo sebagai Best CEO Award 2021 'Employee's Choice' untuk kategori Infrastructure Support Financing yang selenggarakan oleh Iconomics.

Penilaian dilakukan melalui survei terhadap ribuan staf/karyawan berbagai industri dan kategori, dengan total responden mendekati 10.000 (kumulatif) pada awal Juni 2020 dan dilakukan melalui kuesioner online serta tanpa melakukan kuota geografis maupun jenjang jabatan.

Pemberi Penghargaan: The Iconomics

Acara/Kegiatan: The Iconomics Best CEO Awards 2021

Tanggal Diberikan: 26 Juli 2021



Top GRC Star Awards #4, The Most Committed GRC Leader 2021, dan The High Performing Corporate Secretary on GRC 2021

Deskripsi Penghargaan: PT PII kembali mendapatkan penghargaan di ajang Top GRC Awards 2021. GRC Awards tahun ini merupakan yang ketiga kalinya diterima oleh PT PII sejak tahun 2019. Penghargaan ini tentunya dicapai dengan kerja keras seluruh Insan PT PII dalam mengelola bisnis dan organisasi dengan mengedepankan *Governance, Risk & Compliance* (GRC) yang terintegrasi.

Pemberi Penghargaan: Majalah TopBusiness

Acara/Kegiatan: Top GRC Awards 2021

Tanggal Diberikan: 10 Oktober 2021



The Best Brand Image dan Special Mention Annual Report

Deskripsi Penghargaan: PT PII mendapatkan penghargaan dari The Iconomics sebagai The Best Brand Image dengan penilaian melalui *online survey* +10.000 responden berdasarkan 4 parameter yaitu *Brand Awareness* (banyaknya responden milenial yang mengetahui keberadaan PT PII di media massa/sosial), *Perceived Quality* (banyaknya responden milenial yang mengetahui persepsi kualitas dari perusahaan yang *disurvey*), *Customer Satisfaction* (Persepsi milenial terhadap kualitas layanan perusahaan dan *Social Economy Contribution* (Persepsi milenial terhadap kontribusi sosial dan ekonomi perusahaan yang *disurvey*). Selain itu PT PII juga mendapatkan penghargaan pada Corporate Communications special mention Annual Report berdasarkan penilaian dari kreativitas ide, design, kualitas eksekusi dan kesesuaian dengan tema terbaik di kategori industrinya.

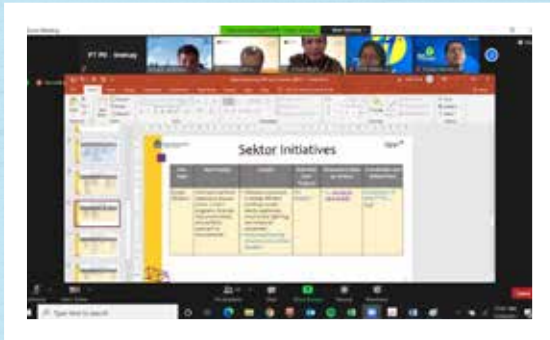
Pemberi Penghargaan: The Iconomics

Acara/Kegiatan: BUMN Awards 2021

Tanggal Diberikan: 14 Oktober 2021

KILAS PERISTIWA

JANUARI



Pembahasan *Sektor-Initiatives Working Group* dalam Kerjasama Kementerian Keuangan Indonesia - US Treasury

Berdasarkan MoU “*Strengthen Infrastructure Finance and Market Building*” yang ditandatangani pada 17 September 2020 antara US Treasury dan Menteri Keuangan Indonesia, dengan area kerjasama meliputi (a) Pengembangan pasar utang daerah yang lebih likuid untuk investasi infrastruktur, termasuk menjajaki potensi investor melalui sarana agregasi utang infrastruktur baru; (b) Perumusan dan identifikasi struktur pembiayaan yang dapat menjadi katalisator, memfasilitasi, dan mengatasi hambatan investasi sektor swasta dalam infrastruktur; (c) Mendorong inovasi dan keberlanjutan dengan berbagi “*best practice*”.

FEBRUARI



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan PT PII atas Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Kepada PT PLN untuk Pembiayaan Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Jawa Timur dan Bali

Kementerian Keuangan secara konsisten melanjutkan dukungannya untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi COVID-19, termasuk melalui proyek Jaringan Distribusi PT PLN ini sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional.

Dengan memberikan dukungan melalui penjaminan Pemerintah pada proyek ini, Kementerian Keuangan bersama dengan PT PII sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan, mendukung PT PLN dalam peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat di kawasan Jawa Timur dan Bali.



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Korporasi

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Eksekutif LPEI, Daniel James Rompas dan Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo di Kantor Pusat LPEI yang juga disaksikan secara *online*. (15 Februari 2021).

Kerja sama kedua SMV merupakan implementasi dukungan terhadap Program PEN yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional ("PP 43/2020") serta sejumlah peraturan pelaksana antara lain Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK 98/2020").

Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah untuk menggerakkan kembali roda perekonomian nasional, khususnya di sektor korporasi yang selama ini mengalami kendala akibat pandemi COVID-19.



Webinar Peran BUMN dalam Transformasi Digital UMKM dan Infrastruktur di Era Revolusi Industri 4.0

Pada (3/2) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran menggelar acara webinar dengan topik "Peran BUMN dalam Transformasi Digital UMKM dan Infrastruktur di Era Revolusi Industri 4.0" yang dilakukan secara daring.

Pada kegiatan tersebut, Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo hadir sebagai narasumber dengan memaparkan mengenai arah kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0.

Kegiatan webinar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta yang hadir mengenai konsep perkembangan UMKM dan infrastruktur serta memahi peran UMKM dalam meningkatkan penyediaan infrastruktur di era revolusi industri 4.0



Kegiatan Sosialisasi dalam Rangka Implementasi Pojok KPBUI di Kantor Wilayah DJKN Riau Sumatera Barat

Melanjutkan dari kegiatan PT PII dalam sosialisasi KPBUI di Kantor Wilayah DJKN Aceh, Jawa Tengah & DIY dan Jawa Timur pada 2020 lalu, PT PII pada (4/2) juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi KPBUI yang keempat dalam rangka implementasi Pojok KPBUI di kantor wilayah DJKN Riau Sumatera Barat secara *online* dengan narasumber yaitu dari Bappenas RI (Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun), Kementerian Keuangan (Direktur PDPPI) dan PT PII (Direktur Eksekutif Bisnis) serta dihadiri oleh Gubernur Riau & Kakanwil DJKN Riau.

Semoga kegiatan yang dilakukan ini dapat memberikan pengembangan kapasitas bagi para pemangku kepentingan guna menjalankan fungsinya secara optimal dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBUI.



Penandatanganan Perjanjian Terkait Penjaminan Pemerintah untuk Proyek dengan Skema KPBUI *Unsolicited* di Sektor Air Minum yaitu SPAM Jatiluhur I, di Auditorium Kementerian PUPR

Penandatanganan ini dilaksanakan PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dengan Kementerian PUPR sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam Perjanjian Regres dan dengan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam Perjanjian Penjaminan terkait Proyek.

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I merupakan proyek pembangunan dan pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum berkapasitas 4.750 liter/detik yang dilaksanakan dengan skema KPBUI untuk jangka waktu kerjasama sampai dengan 27,5 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial ("COD") yang akan memasok kebutuhan di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Proyek diestimasikan mampu melayani ± 380.000 Sambungan Langganan (SL).

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I adalah Proyek ke-32 yang mendapatkan skema penjaminan dari PT PII dan Proyek SPAM yang ke 5 setelah SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, SPAM Semarang Barat dan SPAM Pekanbaru.



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN dengan LPEI

SMV Kementerian Keuangan RI yaitu LPEI & PT PII yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Korporasi. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Eksekutif LPEI, Daniel James Rompas dan Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo di Kantor Pusat LPEI yang juga disaksikan secara online. Kerja sama kedua SMV merupakan implementasi dukungan terhadap Program PEN yang dituangkan dalam PP 43/2020 dan PMK 98/2020.

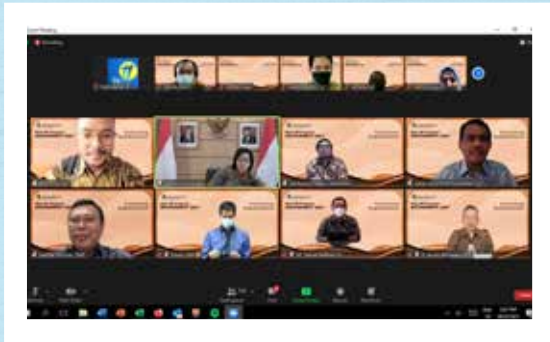
Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah untuk menggerakkan kembali roda perekonomian nasional, khususnya di sektor korporasi yang selama ini mengalami kendala akibat pandemi Covid-19



Financial Close Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) AP Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera Selatan

Melalui Penyerahan *Tombstone* dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian dengan disaksikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang dilaksanakan di Jakarta.

Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumsel ini merupakan proyek KPBU pertama di sektor Jalan Non-tol di Indonesia dan merupakan proyek KPBU pertama yang mendapatkan pendanaan Syariah. Sebagai salah satu skema pembiayaan alternatif, proyek KPBU ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk masyarakat melalui proyek infrastruktur yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi yaitu melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, jalan akses ke pelabuhan dan bandara, serta penghematan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan nilai waktu tempuh.



Kick Off Meeting Program Secondment 2021

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, serta membangun sinergisme yang lebih kuat antara Kementerian Keuangan RI dan SMV untuk pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi : magang/praktik kerja, detasering (*secondment*), pelatihan atau pertukaran pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Program ini pun sebagai upaya Kementerian Keuangan RI untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang erat, pengalaman serta pengetahuan dari seluruh unit di Kementerian Keuangan RI maupun dari SMV Kementerian Keuangan RI agar dapat menyusun dan menghasilkan kebijakan yang efisien, efektif dan tepat manfaat.



Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Ruang Lingkup yaitu Penjajakan Potensi, Pengembangan Pembangunan, Pembiayaan Sektor Perumahan dan Permukiman serta Capacity Building dan Pelatihan terkait KPBU untuk Sektor Perumahan dan Permukiman

Sebagai bentuk penguatan sinergi antar SMV Kementerian Keuangan khususnya dalam mendorong proyek-proyek berskema KPBU, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) / PT SMF sebagai (SMV) Kementerian Keuangan melaksanakan kerja sama guna mendukung Pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian PUPR dalam mengembangkan infrastruktur sektor perumahan dan permukiman melalui skema KPBU, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penyediaan hunian rumah yang terjangkau oleh masyarakat.

MARET



SMV Kemenkeu Bantu Korban Gempa Bumi Majene

SMV Kementerian Keuangan RI menggelar aksi kemanusiaan dengan memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Gempa Bumi di Majene, Sulawesi Barat

Sinergi dilakukan bersama oleh PT PII, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan PT Geodipa Energi bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Kamis (11/03)

Bantuan yang diberikan berupa bantuan instalasi air bersih, instalasi listrik, bantuan obat-obatan dan layanan kesehatan serta bantuan pemulihan trauma (*trauma healing*) pasca bencana.

Melalui bantuan ini, SMV Kemenkeu berharap kondisi masyarakat di Majene, Sulawesi Barat dapat segera pulih dan kembali seperti sediakala serta roda perekonomian dapat segera bergerak kembali.



Peresmian Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Umbulan di Pasuruan Jawa Timur

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dengan didampingi Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada hari Senin (22/03) kemarin meresmikan Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Umbulan di Pasuruan Jawa Timur. Proyek ini merupakan salah satu proyek KPBU sektor Air Minum berskala regional yang diberikan penjaminan pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/ PT PII – salah satu (SMV) Kementerian Keuangan.

Dengan kapasitas sebesar 4000 liter/detik penyaluran air bersih yang diolah dari Mata Air Umbulan di Pasuruan, Jawa Timur, SPAM Umbulan menyuplai air bersih kepada PDAM-PDAM di Kota Surabaya, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan PDAB Jawa Timur.

Selain SPAM Umbulan ini, PT PII juga telah memberikan penjaminan kepada empat proyek KPBU SPAM lainnya, yaitu SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, SPAM Semarang Barat, SPAM Pekanbaru dan SPAM Jatiluhur

APRIL



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan proyek KPBK Reservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau (Jalintim Riau)

Penandatanganan ini dilaksanakan PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dengan Kementerian PUPR sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam Perjanjian Regres dan dengan PT Adhi Jalintim Riau sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam Perjanjian Penjaminan terkait Proyek.

Sebagai informasi, Proyek ini merupakan proyek KPBK kedua di sektor Jalan Non-tol di Indonesia setelah sebelumnya telah ditandatangani perjanjian KPBK pada proyek Jalintim Sumatera Selatan pada Agustus 2020 lalu. Proyek Jalintim Riau ini mendapatkan berbagai dukungan dari Kementerian Keuangan yaitu *Project Development Facility* (PDF) yang ditugaskan kepada PT PII dan penjaminan infrastruktur dari PT PII.



Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Parahyangan

Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen kerja sama antara kedua belah pihak sekaligus kerja sama dengan UNIID yang menjadi wadah universitas-universitas di Indonesia yang secara sinergis turut mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Kerja sama antara PT PII dengan Universitas Parahyangan ini melingkupi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi.



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah untuk Proyek dengan Skema KPBU *Unsolicited* di Sektor Air Minum yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian – Serpong di Auditorium Kementerian PUPR

PT PII melaksanakan kegiatan seremonial penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk Proyek dengan skema KPBU *Unsolicited* di sektor Air Minum yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian – Serpong di Auditorium Kementerian PUPR.

Penandatanganan ini dilaksanakan PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dengan Pelaksana PT Karian Water Services yang dibentuk oleh Pemenang lelang, yaitu konsorsium K-Water dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam Perjanjian Penjaminan terkait Proyek. Kemudian dilanjutkan pada Jumat (30/04) terkait Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).

MEI



Diskusi Daring Ngobrol Tempo Bertajuk “Adaptasi Kuliah di Masa Pandemi”

Sudah satu tahun, mahasiswa terpaksa harus menjalankan pembelajaran daring atau *online* akibat pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi ini membuat banyak mahasiswa mengeluh karena merasa pembelajaran daring kurang efektif. Banyak gangguan yang membuat proses belajar-mengajar tidak maksimal.

Maka mahasiswa, dosen, dan seluruh pihak yang terlibat harus bijaksana dalam menyikapi belajar daring yang sedang berlangsung di tengah pandemi ini, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga tujuan belajar dapat tercapai.

Lalu bagaimana cara belajar agar lebih efektif dan dapat diterapkan saat pandemi ini? Guna menjawab pertanyaan besar itu, PT PII bersama Tempo menggelar diskusi daring Ngobrol Tempo bertajuk “Adaptasi Kuliah di Masa Pandemi” bersama narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Konsultan Kesehatan, dan akademisi Universitas Padjajaran

JUNI



Diskusi Daring Ngobrol Tempo dengan Tajuk “Investasi Ekonomi Digital di Masa Pandemi”

Sektor digital diproyeksikan semakin potensial untuk mendorong pemulihan ekonomi pada tahun ini. Peluang investasi di sektor ini pun masih terbuka lebar. Terlihat dari pertumbuhan informasi dan komunikasi yang tumbuh *double digit*.

Untuk memotret apa saja peluang investasi digital di masa pandemi ini PT PII bersama Tempo Media menggelar Ngobrol Tempo secara daring dengan tajuk “Investasi Ekonomi Digital di Masa Pandemi”.

Acara digelar dengan pembicara dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, PT PII, Kearney, dan Tempo



Webinar Bertajuk *Climate Change Challenge: Preparing for Indonesia's Green and Sustainable Future*

SMV Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Universitas Indonesia menyelenggarakan webinar bertajuk *Climate Change Challenge: Preparing for Indonesia's Green and Sustainable Future* untuk membahas mengenai tantangan yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini yaitu Perubahan Iklim (*Climate Change*).

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani & Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro hadir sebagai *Keynote Speaker* dalam acara ini dan menjelaskan mengenai usaha Pemerintah Indonesia dan juga Universitas Indonesia yang ikut berperan untuk mengatasi Perubahan Iklim yang sedang melanda dunia melalui berbagai kebijakan dan program.

Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo hadir sebagai panelis dan menjelaskan mengenai peran dan komitmen PT PII dalam melaksanakan mandatnya sebagai pelaksana skema penjaminan Pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur yang berkelanjutan.

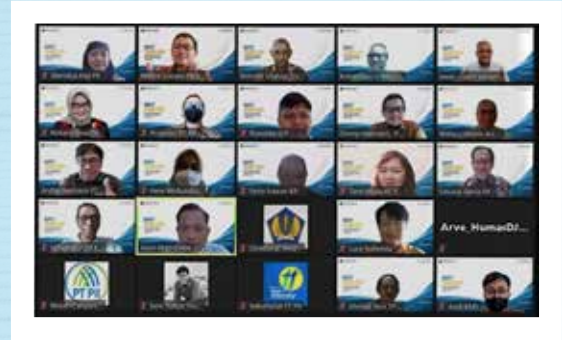


Pelatihan Petani Padi pada Sawah Tadah Hujan Karawang

PT PII mengadakan kegiatan Pelatihan Petani Padi Pada Sawah Tadah Hujan yang berlangsung di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Karawang.

Acara dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Karawang yang diwakili Dinas Pertanian, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPADI), perwakilan guru SMKN Pertanian, Kecamatan Klari, Desa Karanganyar dan 30 peserta dari kelompok tani Kecamatan Klari serta Direktur Utama PT PII yang ikut hadir dan memberikan sambutan secara *online*.

Melalui kegiatan ini, PT PII bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berharap akan tercipta sebuah terobosan baru dan pemodelan ketahanan pangan, sehingga tidak hanya dapat memenuhi target panen dan kebutuhan masyarakat, namun terlebih menjadi langkah strategis dan potensi daerah yang berkelanjutan.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Mengenai Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020

PT PII telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) mengenai persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020.

RUPST yang diselenggarakan melalui video konferensi ini membahas mengenai agenda Persetujuan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 yang mencakup Pengesahan atas Laporan Keuangan PT PII Tahun Buku 2020 dan Penetapan keputusan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.

PT PII terus berupaya dalam meningkatkan kinerja terbaik dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat.



Webinar Series dengan Topik “Peran Penjaminan Pemerintah Dalam Proyek KPBU untuk Meningkatkan Bankability”

Perkumpulan Ahli Profesional KPBU Indonesia (PAPKPBU) bersama Kemenkeu, Bappenas dan PT PII melaksanakan webinar Series dengan Topik “Peran Penjaminan Pemerintah dalam Proyek KPBU untuk Meningkatkan Bankability”.

Direktur Eksekutif Bisnis PT PII Andre Permana juga hadir sebagai pembicara dan menjelaskan mengenai Peran PT PII dalam Pelaksanaan proyek KPBU dan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia serta peranan penting PT PII sebagai SMV Kementerian Keuangan dalam melaksanakan Penjaminan Pemerintah.



Indonesia Infrastructure Roundtable Discussion (IIR) XXI dengan Tema “Strategi dan Kebijakan KPBU untuk Infrastruktur Perguruan Tinggi, Studi Kasus: Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Padjadjaran

UNIID bersama PT PII dan Universitas Padjadjaran Bandung melaksanakan Indonesia IIR XXI dengan tema “Strategi dan Kebijakan KPBU untuk Infrastruktur Perguruan Tinggi, Studi Kasus: Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Padjadjaran pada Selasa (29/6).

Ketua UNIID sekaligus Rektor Universitas Padjadjaran Ibu Rina Indiatuti dan Direktur Eksekutif Bisnis PT PII Andre Permana hadir memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Kegiatan IIR ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi dan sharing knowledge terkait strategi dan Kebijakan KPBU untuk Infrastruktur Perguruan Tinggi.

JULI



Kick Off Program Secondment Periode II 2021

Dalam rangka meningkatkan sinergi kelembagaan serta meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Keuangan RI dan SMV Kemenkeu, pada (26/7), Kemenkeu bersama PT PII melaksanakan *Kick Off Program Secondment Periode II 2021*. Selain PT PII, program *Secondment* ini juga dilaksanakan oleh SMV Kemenkeu lainnya.

Program *Secondment* ini meliputi magang/praktik kerja, detasering (*secondment*), pelatihan atau pertukaran pegawai di lingkungan Kemenkeu dan SMV Kemenkeu, dimana periode II ini akan berlangsung selama tiga bulan dari Juli hingga Oktober 2021 mendatang.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama, serta membangun sinergi yang lebih kuat antara Kementerian Keuangan RI dan SMV Kementerian Keuangan untuk pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.

AGUSTUS



Seminar nasional infrastruktur forum Infrastruktur Forum – Road to West Java Investment Summit dengan tema “Dukungan Infrastruktur Logistik untuk Peningkatan Daya Saing dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat”

Pusat Unggulan BUMN Center Universitas Padjadjaran dan Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan seminar nasional infrastruktur forum Infrastruktur Forum – *Road to “West Java Investment Summit”* dengan tema “Dukungan Infrastruktur Logistik untuk Peningkatan Daya Saing dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat” yang dilaksanakan secara daring.

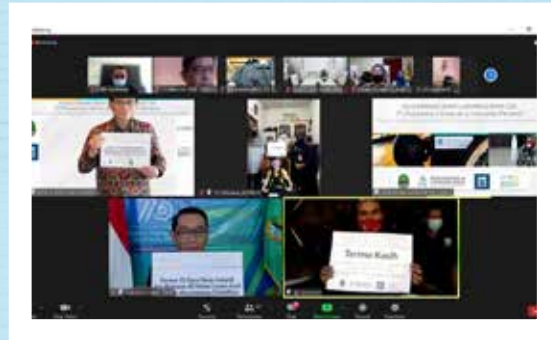
Kerjasama PT PII dengan universitas melalui kegiatan bersama dengan Unpad BUMN Center of Excellence, ITL Trisakti dan *University Network for Indonesia Infrastructure Development* (UNIID) akan terus didorong untuk membantu Pemerintah Daerah Jawa Barat dan instansi terkait dalam hal peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang skema pembiayaan kreatif dan pengembangan potensi proyek infrastruktur daerah.



Peletakan Batu Pertama (*Ground Breaking*) pada Proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah (SATRIA)

Proyek SATRIA merupakan proyek KPBU pada sektor telekomunikasi yang keempat setelah Palapa Ring (Barat, Tengah dan Timur). Peletakan batu pertama (*Ground Breaking*) pada proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah (SATRIA) merupakan simbol bahwa persiapan dan pembangunan akan segera dimulai untuk mencapai tujuan beroperasi pada akhir 2023 mendatang.

Dengan adanya dukungan Penjaminan Pemerintah dari PT PII, proyek memperoleh kepercayaan investor swasta dan pembiayaan dari berbagai lembaga pembiayaan internasional yaitu HSBC, Santander, *BPI France*, *Korean Development Bank* (KDB), dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) sehingga proyek SATRIA ini dapat dibangun untuk meningkatkan penyediaan layanan internet ke lebih dari 150.000 titik pelayanan publik khususnya seperti sekolah, rumah sakit, dan pemerintahan di daerah terpencil.



CSR Bantuan Kursi Roda Adaptif dan Modal Usaha Jawa Barat

PT PII – salah satu SMV Kementerian Keuangan melalui program tanggung jawab sosialnya pada (24/8), menyerahkan bantuan berupa kursi roda adaptif dan bantuan modal usaha bagi masyarakat penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat.

Dalam program CSR PT PII di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 12 orang penyandang disabilitas akan menerima kursi roda adaptif. Selain itu 45 orang keluarga penyandang Disabilitas menerima bantuan modal usaha kecil keluarga.

Program CSR PT PII di Provinsi Jawa Barat ini merupakan wujud kepedulian terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di provinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah dimana terdapat beberapa proyek infrastruktur yang dijamin dan didukung oleh PT PII berada.

SEPTEMBER

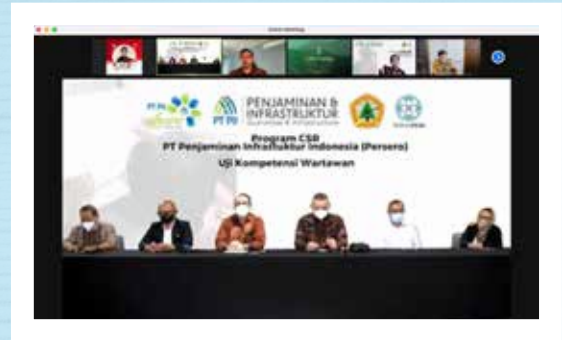


CSR Seremonial Penyerahan Bantuan Tabung Oksigen untuk Posko Tanggap Darurat COVID-19 Jakarta Selatan

Di tengah pelaksanaan PPKM Darurat dan upaya menangani COVID-19, dibutuhkan gotong royong, bahu membahu, serta upaya dari seluruh elemen masyarakat.

Oleh karena itu, PT PII berinisiatif membantu Pemerintah bekerja sama dengan *Human Initiative* dengan memberikan bantuan tabung oksigen sebanyak 40 tabung oksigen dan regulator yang akan didistribusikan untuk menunjang kebutuhan oksigen para penyintas COVID-19 yang membutuhkan di wilayah Jagakarsa Jakarta Selatan.

PT PII berharap pemberian bantuan tabung oksigen yang diberikan ini dapat bermanfaat untuk perawatan pasien COVID-19 dengan harapan semoga pandemi COVID-19 akan segera dapat dikendalikan dan ditangani secara baik dan menyeluruh.



CSR Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan

Hingga saat ini, baru sekitar 28.000 ribu wartawan yang telah mengikuti uji Kompetensi wartawan dan memiliki sertifikat wartawan profesional dari 120.000 jumlah wartawan di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, PT PII berinisiatif untuk mendorong agar semakin banyak wartawan yang tersertifikasi bekerja sama dengan Universitas Moestopo untuk menyelenggarakan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan melalui program CSR.

PT PII berharap kegiatan ini nantinya dapat menjadi akselerasi guna mempercepat semakin banyaknya wartawan profesional yang tersertifikasi.

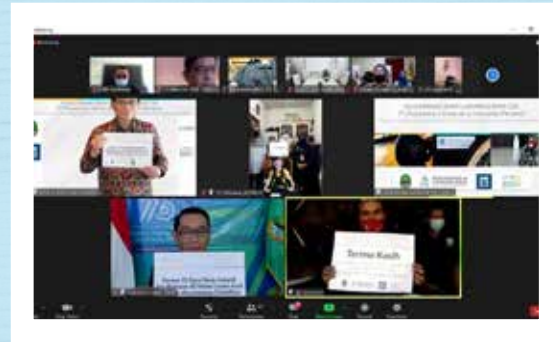


CSR Pembukaan Program Acara Pelatihan “Transformasi Kepemimpinan Perangkat Desa” Kabupaten Badung, Provinsi Bali

PT PII melaksanakan pembukaan program acara pelatihan “Transformasi Kepemimpinan Perangkat Desa” untuk para perangkat desa mulai dari pada ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah administrasi Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Program ini rencananya akan menggunakan pendekatan monitoring dan evaluasi berbasis digital, yang merupakan terobosan baru dari sebuah program pelatihan dimana pendekatan yang digunakan bukan hanya pengajaran di kelas dalam jangka waktu yang sangat terbatas, namun juga pendampingan untuk pengarahannya, *monitoring*, dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu.

Program pelatihan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari PT PII sebagai SMV Kementerian Keuangan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat terutama kepada para peserta yang dapat mempraktekkan ilmu yang diperolehnya kepada lembaga dan masyarakat di sekitarnya.



CSR Pemberdayaan Ekonomi Kreatif *Urban Farming* Kota Semarang

PT PII melaksanakan program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif *Urban Farming* untuk warga RW 04, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah.

PT PII berharap kegiatan ini dapat membangun dan menumbuhkan jiwa kemandirian finansial dan nilai tambah ekonomi warga melalui kewirausahaan dan juga bermanfaat bagi lingkungan yang lebih sehat dengan tersedianya *Green House* di wilayah tersebut.

Warga Kedungpane yang mengikuti program tersebut menyampaikan bahwa warga sangat mengapresiasi program yang dilakukan oleh PT PII ini karena dapat merasakan langsung dampak positifnya yaitu bertambahnya wawasan mengenai *Urban Farming*, pembibitan, pindah tanam, pemupukan, perawatan tanaman, pembuatan rumah kaca, demplot, sampai dengan pengenalan tanaman estetik yang dapat diterapkan di wilayah tempat tinggal mereka.

OKTOBER

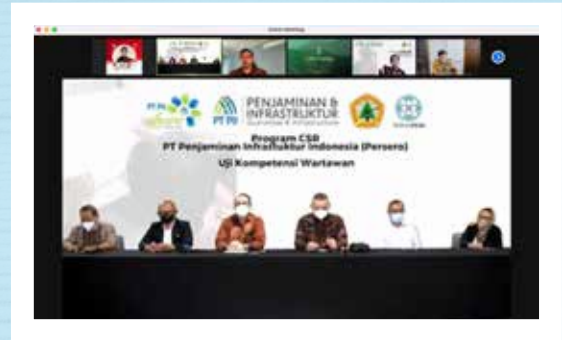


CSR Pendidikan Pelatihan Untuk Para Pendidik “Membangun Pendidikan Karakter Berbasis *Parenting*” Nusa Tenggara Timur (NTT)

PT PII – salah satu SMV Kementerian Keuangan RI – melalui program tanggung jawab sosialnya pada (18/10), melaksanakan Program CSR Pendidikan yaitu Pelatihan untuk para pendidik “Membangun Pendidikan Karakter Berbasis *Parenting*” yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

PT PII berharap program ini dapat bermanfaat dalam mempersiapkan para guru untuk mampu lebih memahami potensi posisi dirinya dari berbagai sisi, sehingga mampu menjadi pendidik yang efektif dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul dan juga menjadi guru yang paham cara menciptakan lingkungan belajar yang baik, termasuk memilih pola asuh yang digunakan (berbasis *parenting*).

Adapun program CSR ini adalah sebagai bentuk kepedulian PT PII kepada masyarakat di sekitar proyek infrastruktur Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo yang diberikan penjaminan oleh PT PII.



Audiensi PT PII dan Kementerian Keuangan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Terkait Pengembangan Infrastruktur Melalui KPBU di Jawa Tengah

PT PII dan Kementerian Keuangan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah melakukan audiensi terkait dengan terkait Pengembangan Infrastruktur melalui KPBU di Jawa Tengah.

Pertemuan yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo serta perwakilan dari Kementerian Keuangan ini juga membahas mengenai kerja sama dengan PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengembangan proyek melalui KPBU.

Semoga kerja sama yang telah terjalin ini dapat terus berjalan demi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka PEN.

NOVEMBER



Audiensi dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dan PDAM Tirta Makmur Terkait Rencana Pembangunan Proyek KPBU SPAM Regional Wosusokas Tahap II

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU, PT PII melakukan audiensi bersama dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dan PDAM Tirta Makmur terkait Rencana Pembangunan Proyek KPBU SPAM Regional Wosusokas Tahap II.

Selain itu, pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Sukoharjo, Wakil Bupati, Sekda dan Perwakilan Pemkab Sukoharjo serta PDAM Tirta Makmur ini juga membahas mengenai proyek yang dapat diberikan fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksi serta dukungan & komitmen yg diharapkan dalam mendukung proyek tersebut.



Audiensi PT PII Bersama Gubernur & DPRD DIY Terkait Persiapan Pelaksanaan PDF Proyek TPA Sampah Regional Piyungan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU, pada Senin (1/11/2021), PT PII bersama Gubernur & DPRD DIY melakukan audiensi terkait Persiapan Pelaksanaan PDF Proyek TPA Sampah Regional Piyungan.

Pertemuan ini membahas mengenai Rencana Strategis Pelaksanaan PDF Proyek KPBU Pengembangan TPA Sampah Regional Piyungan yang terletak di Kabupaten Bantul, Provinsi DIY.

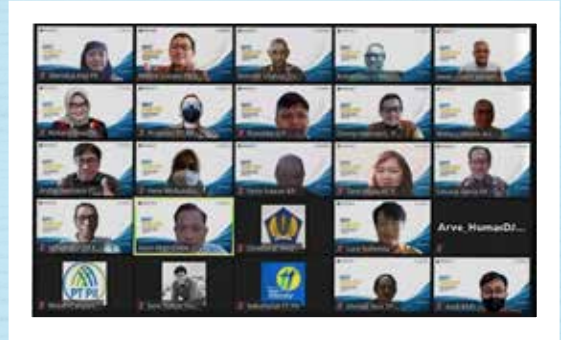
Diharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing masing pihak guna mendukung kegiatan usaha dari PT PII maupun pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dari FH UGM.



Audiensi Dengan Wakil Walikota Denpasar Terkait Pembahasan Potensi KPBUPembangunan infrastruktur di Wilayah Denpasar

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBUP, Direktur Eksekutif Bisnis PT PII, Andre Permana melakukan audiensi dengan Wakil Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Selain membahas mengenai pengenalan skema KPBUP maupun Penjaminan Pemerintah, pertemuan ini juga membahas potensi KPBUP yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Denpasar untuk berbagai sektor seperti kesehatan, konservasi energi, fasilitas perkotaan, dan SPAM.



Seremonial CSR Pelatihan Transformasi Kepemimpinan Pemerintah Desa” Untuk Para Perangkat Desa Unsur Kepala Desa/Perbekel dan BPD di Kabupaten Badung, Provinsi Bali

PT PII sebagai salah satu SMV Kementerian Keuangan RI melalui tanggung jawab sosialnya mengadakan program acara pelatihan “Transformasi Kepemimpinan Pemerintah Desa” untuk para perangkat desa unsur kepala desa/ perbekel dan BPD di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Program ini merupakan program lanjutan pada bulan September lalu yang menggunakan pendekatan monitoring dan evaluasi digital.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif sekaligus manfaat bagi para peserta agar dapat mengaplikasikan kompetensi yang telah diperoleh kepada lembaga dan masyarakat. Selain itu, secara jangka panjang, program ini diharapkan dapat menjadi wujud kolaborasi bagi PT PII dan perangkat desa dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.



Focus Group Discussion (FGD) pembahasan Regulatory Framework

PT PII - sebagai salah satu SMV Kementerian Keuangan - menyelenggarakan FGD dengan agenda utama pembahasan mengenai Regulatory Framework.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan Regulatory Framework PT PII agar mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan peraturan yang ada sekaligus menyiapkan diri untuk melaksanakan regulasi yang telah direncanakan.



Indonesia Infrastructure Roundtable PT PII Bersama Universitas Pattimura Menyenggarakan Kegiatan IIR ke-22 dengan Tema “Implementasi Konsep Integrasi Logistik Pelabuhan Ambon New Port”

Diskusi ini diisi oleh para narasumber yaitu Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPPI) Kementerian Keuangan, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Kasubdit Pengembangan Pelabuhan Kementerian Perhubungan, Bappeda Provinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dan Direktur Eksekutif Bisnis PT PII, dengan dipandu oleh Drs. Freddy R. Saragih, MPAcc sebagai moderator.

Terselenggaranya kegiatan IIR ke-22 diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan Ambon New Port melalui rekomendasi yang tepat dalam konsep integrasi logistik pelabuhan.

DESEMBER



Rapat Kerja Pimpinan ITJEN Kementerian Keuangan Memperkuat Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (GRC)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, maka dibutuhkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern (GRC) yang kuat di lingkungan Kementerian Keuangan RI selaku pengelola keuangan negara.

Sebagai bagian dari upaya penguatan GRC di lingkungan Kementerian Keuangan RI, pada Jumat (3/12), para pimpinan Itjen Kemenkeu duduk bersama untuk membahas action plan dan strategi-strategi terbaik pengawasan Itjen di tahun 2022.



Penandatanganan Perjanjian Terkait Penjaminan Pemerintah untuk Proyek dengan Skema KPBU *Unsolicited* di Sektor Jalan dan Jembatan yaitu Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa

Dengan disaksikan langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, PT PII melaksanakan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek dengan skema KPBU *unsolicited* di sektor jalan dan jembatan yaitu proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa.

Penyediaan penjaminan Pemerintah pada proyek ini, PT PII melanjutkan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan infrastruktur sektor Jalan dan Jembatan secara berkelanjutan ditambah dengan terdapat relevansi pengembangan infrastruktur dalam pandemi ini yaitu peran infrastruktur yang sangat penting sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi COVID-19, salah satunya adalah manfaat fasilitas infrastruktur pada sektor Jalan yang dapat mempersingkat waktu tempuh sebagai dorongan untuk upaya pemulihan ekonomi nasional.



Webinar “Indonesia’s Toll Road Infrastructure Competitiveness in Global Pespective”

PT PII turut serta pada kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Marga Utama Nusantara dan Bisnis Indonesia yang bertajuk “Indonesia’s Toll Road Infrastructure Competitiveness in Global Pespective”.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia, serta meningkatkan daya saing infrastruktur nasional sektor jalan tol agar mampu mencapai target pemerintah, yakni menambah panjang tol Indonesia hingga 5.103 KM di tahun 2024.

Selain itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai target tersebut dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yakni dengan menerapkan skema KPBU dan didukung oleh Penjaminan Pemerintah.



Webinar “Investalk Vol. 2 - Economic Outlook 2022”

PT PII turut serta pada kegiatan webinar “Investalk Vol. 2 - Economic Outlook 2022” yang diselenggarakan oleh salah satu SMV Kementerian Keuangan yaitu PT SMF.

Turut hadir pada acara ini yaitu Dirjen Kekayaan Negara, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kemenkeu, Direktur Utama PT PII, Direktur Utama PT SMF, Direktur Utama Geodipa, Direktur Utama PT SMI dan Direktur Eksekutif LPEI.

Kegiatan ini diharapkan dapat menginformasikan kinerja perseroan serta gambaran kondisi perekonomian di tahun 2022 kepada para investor.



Seminar Nasional Ekonomi Islam Peran Pembiayaan Syariah Infrastruktur Indonesia untuk Pencapaian SGDs

Dalam rangka mendorong ekonomi syariah di Indonesia dan juga melaksanakan pembahasan isu-isu strategis terkait kebijakan Pemerintah di sektor keuangan dalam menangani kondisi ekonomi di tengah Pandemi COVID-19, PT PII bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) menggelar Seminar Nasional Ekonomi Syariah “Peran Pembiayaan Syariah Infrastruktur Indonesia untuk Pencapaian SGDs” yang dilaksanakan di Kota Surabaya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong sinergi dalam rencana pengembangan implementasi skema KPBU dan penjaminan berbasis syariah di Indonesia.



CSR Pelatihan Pengelolaan Ikan bagi Para Nelayan di Kota Bitung, Sulawesi Utara

PT PII sebagai salah satu SMV Kementerian Keuangan melalui tanggung jawab sosialnya mengadakan kegiatan pelatihan pengelolaan ikan bagi para nelayan di kota Bitung, Sulawesi Utara.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan penanganan ikan hasil tangkapan secara baik dan benar, teknik penyimpanan dan pembongkaran ikan, teknik packing ikan untuk memelihara kesegaran dan mutu ikan, melakukan uji kompetensi penanganan ikan yang baik dan benar, serta pembinaan dan pendampingan berkelanjutan. Selain itu, para nelayan juga memperoleh sertifikasi kompetensi yang resmi dalam penanganan ikan dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi (BNSP).

Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak jangka panjang dan berkesinambungan kepada para pelaku usaha serta dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan sehingga kegiatan ekonomi di Kota Bitung dapat meningkat, termasuk aktivitas ekonomi antar kota.



Presidensi G20 Indonesia *Empowering Business Collaboration*

Dalam rangka mendiskusikan pentingnya sinergi antara Pemerintah dan Dunia Usaha dalam memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan beserta SMV Kementerian keuangan (PT PII, PT SMF, PT Geo Dipa, PT SMI, PT IIF & IAEI) menyelenggarakan pertemuan dengan para pimpinan asosiasi usaha, perusahaan multinasional dan nasional, BUMN serta perwakilan kamar dagang negara-negara mitra yaitu Joint Side Event Sherpa Track dan Finance Track Presidensi G20 Indonesia bertajuk “*Empowering Business Collaboration*”.

Kegiatan ini dilakukan untuk menjelaskan kepada dunia usaha arti penting dari Presidensi ini bagi Indonesia, terlebih di tengah upaya percepatan pemulihan ekonomi. Sebelumnya dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia telah diselenggarakan Pertemuan Pertama *Sherpa Track* G20 pada 6-8 Desember 2021 di Jakarta, dilanjutkan dengan Pertemuan Pertama Tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral (*Finance Track*) pada 9-10 Desember 2021 di Bali.



Forum GRC 2021 Penerapan GRC untuk Mendukung Transformasi Perusahaan

PT PII menggelar kegiatan tahunan Forum GRC 2021 yang diselenggarakan oleh Divisi *Internal Audit, Risk Management* dan *Corporate Secretary & Communication* dengan mengambil tema “Penerapan GRC untuk Mendukung Transformasi Perusahaan”.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman insan PT PII terkait praktik *Governance, Risk and Compliance* dengan menghadirkan Narasumber Dr. Antonius Alijoyo, *Principle of Center for Risk Management and Sustainability (CRMS)* untuk memberikan gambaran dari aspek teori, dan Bapak Eko Susetyono, SEVP Manajemen Risiko PT Pegadaian (Persero) untuk membagikan pengalaman penerapan transformasi Perusahaan.

Dengan telah dilaksanakannya Forum GRC PT PII 2021 diharapkan Insan PT PII dapat mendukung proses transformasi Perusahaan serta mengoptimalkan antara inisiatif bisnis dengan prioritas risiko, khususnya untuk menghadapi era digitalisasi dan kondisi *new-normal* pasca pandemi COVID-19.



RUPS RKAP PT PII Tahun 2022

PT PII telah melaksanakan RUPS dengan agenda yaitu Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2022, Persetujuan Kontrak Kinerja Direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2022 dan Persetujuan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2022.

Dengan arahan dan bimbingan dari pemegang saham serta kepercayaan dari *stakeholders*, PT PII berkomitmen untuk terus mengoptimalkan peran strategis sesuai dengan mandat yang diamanatkan oleh Kementerian Keuangan demi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan dalam rangka PEN.



Seremonial CSR Dukungan Alat Kesehatan Pemulihan Pandemi COVID-19 di Jawa Tengah

Di tengah pengendalian COVID-19 dan pencegahan meluasnya varian baru, PT PII sebagai salah satu SMV Kementerian Keuangan RI pada Rabu (22/12), memberikan bantuan alat kesehatan untuk pemulihan pandemi COVID-19 di Jawa Tengah.

Adapun alat kesehatan yang diserahkan merupakan Alat Bantu Pernapasan (*Ventilator*) *portable* 'Vent-I' karya anak negeri. Penyaluran alat kesehatan ini berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah dengan Rumah Sakit penerima adalah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo menerima 2 unit *ventilator*, RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo menerima 1 unit *ventilator*, RSUD Cilacap menerima 2 unit Penyaring Udara/*High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter portable*, RSUD Simo, Boyolali menerima 2 unit *HEPA filter portable*, dan RS Qim Batang menerima 2 unit *HEPA filter portable*.

Diharapkan, pemberian alat kesehatan ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berupaya yang terbaik dalam meningkatkan kualitas kesehatan bersama menuju Indonesia sehat.



Webinar “Penggunaan Hukum Publik Internasional dalam Transaksi Pinjaman dan Penjaminan dengan Lembaga Keuangan Internasional”

PT PII menyelenggarakan webinar dengan mengangkat topik “Penggunaan Hukum Publik Internasional dalam Transaksi Pinjaman dan Penjaminan dengan Lembaga Keuangan Internasional”.

Adapun webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada publik mengenai penggunaan Hukum Publik Internasional, termasuk implementasinya dalam penyelesaian sengketa dan transaksi keuangan, khususnya dalam perjanjian pinjaman dan penjaminan dengan lembaga keuangan internasional.

Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai bagaimana penggunaan hukum publik internasional, termasuk implementasinya dalam penyelesaian sengketa pada transaksi keuangan serta dapat mendukung proses bisnis yang berlangsung dalam perusahaan/instansi para peserta webinar.



Ngobras Besama Media dalam rangka HUT PT PII

PT PII melaksanakan kegiatan Ngobras Besama Media yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT PT PII ke-12 pada 29 Desember 2021. Ngobras bersama Media bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik dan media mengenai kinerja PT PII sepanjang tahun 2021 yang saat ini telah memberikan penjaminan sebanyak 37 proyek dengan total nilai investasi lebih dari 350 triliun.

Selain itu, PT PII juga memaparkan mengenai proyeksi pengembangan proyek infrastruktur dan penjaminan di tahun 2022 mendatang. Kegiatan ini juga menjadi salah satu kegiatan media relations yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara offline dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang berlaku.



02

LAPORAN MANAJEMEN

“ Menjaga amanat yang diberikan, khususnya kontribusi PT PII dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menjadikan PT PII berperan bersama-sama elemen lainnya untuk mewujudkan pemulihan bangsa pasca pandemi COVID-19. ”



ERBANG TOL LEBANI GRESIK





LAPORAN DEWAN KOMISARIS



Awan Nurmawan Nuh
Komisaris Utama



Rp83,3
Triliun



**Hingga akhir tahun 2021,
PT PII telah mencapai total
nilai penjaminan sebesar
Rp83,3 triliun.**

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, mengingat Pandemi COVID-19 yang telah kita alami dalam dua tahun terakhir. Pandemi COVID-19 sebagaimana yang kita rasakan telah memberikan dampak ke setiap aspek kehidupan, baik itu dari sisi aspek kesehatan, kehidupan sosial, maupun perekonomian.

Selanjutnya, ijin kami mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan pengelolaan usaha PT PII untuk tahun buku 2021. Laporan Dewan Komisaris ini diantaranya mencakup pengawasan terhadap implementasi strategi, penilaian kami atas kinerja Direksi, kinerja Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris, pandangan kami atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Audit Internal dan Pengelolaan Risiko, serta pandangan kami atas prospek usaha Perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI

Sepanjang tahun 2021, strategi bisnis Perusahaan diarahkan pada upaya untuk mengupayakan keberlanjutan proses dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya (fase “*deepening stage*”), sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain membangun *pipeline* proyek yang berkelanjutan, memperkuat bisnis penjaminan baik KPBU maupun penjaminan *direct lending* serta terus memperkuat peran PT PII sebagai *sovereign risk manager*, khususnya melalui manajemen risiko penjaminan yang kuat. Pada saat yang bersamaan pada tahun 2021 perusahaan juga mendapat tugas untuk membantu Pemerintah di dalam menjalankan sebagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu Program Penjaminan Korporasi dan Program Penjaminan BUMN.

Upaya Perusahaan untuk melaksanakan strategi di atas, menjadi warna yang kuat di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Wujud pelaksanaan dari tugas dan fungsi ini tercermin dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Selama tahun 2021 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan. Fungsi pengawasan ini dijalankan oleh Dewan Komisaris melalui pemberian arahan dan masukan kepada Direksi melalui rapat-rapat reguler yang diadakan minimal sebulan sekali. Dewan Komisaris bersama organ Dewan Komisaris juga mengadakan rapat rutin dengan para deputi direktur dan unit kerja terkait. Selain itu, pertemuan Dewan Komisaris dengan Direksi juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan, di luar rapat rutin bulanan, dalam hal Perusahaan menghadapi isu-isu krusial/tematik yang perlu segera diambil keputusan.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris mengadakan 13 kali rapat Dewan Komisaris dan 17 kali rapat gabungan yang dihadiri baik Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris juga memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dalam bentuk surat tertulis, jika melalui rapat tidak memungkinkan, atau Dewan Komisaris memandang pemberian nasihat dengan surat tertulis lebih efektif.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Kinerja Operasional

Berdasarkan laporan keuangan PT PII tahun 2021, Kinerja Operasional PT PII menunjukkan kinerja cukup bagus. Sampai dengan tahun 2021, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) proyek KPBU dan Non KPBU-*Direct Lending* yang perjanjian penjaminannya telah ditandatangani. Dengan nilai proyek yang dijamin mencapai Rp357,7 triliun, dan nilai maksimum penjaminan sebesar Rp83,3 triliun. Jumlah proyek ini bertambah lima proyek dibandingkan dengan jumlah proyek



yang dijamin tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) proyek. Sementara itu, sesuai mandat yang diberikan untuk juga memberikan kontribusi pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pada tahun 2021 PT PII juga telah memberikan penjaminan pada dua proyek/kegiatan. Dengan demikian terdapat 37 proyek yang telah dijamin, dengan total nilai penjaminan mencapai Rp83,3 triliun.

Dari total 37 (tiga puluh tujuh) proyek yang telah dijamin tersebut sebagian besar portofolio proyek PT PII berasal sektor Jalan yaitu sebanyak 16 proyek atau sebesar 46%, persentase ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu, yang memberikan kontribusi sebesar 47%. Dari sisi *concentration risk* hal ini cukup baik, dimana ketergantungan PT PII dari satu sektor relatif berkurang. Sektor kedua yang memberikan kontribusi terbesar adalah Sektor Ketenagalistrikan, dengan jumlah proyek mencapai 6 (enam) proyek atau 17% dari seluruh proyek yang dijamin. Berikutnya masing-masing sektor Air Minum 6 (enam) proyek atau 17%, Sektor Telekomunikasi dan Informatika 4 (empat) proyek atau 11%, Sektor Transportasi 2 (dua) proyek atau 6% dan Sektor Pariwisata sebanyak 1 (satu) proyek atau 3%. Proyek Air Minum mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun lalu, yang hanya mencapai 13%. Kenaikan ini disumbang oleh masuknya dua proyek Air Minum di dalam penjaminan di tahun 2021.

Dengan semakin banyaknya proyek yang diberikan penjaminan oleh PT PII, Dewan Komisaris sangat mendukung upaya Direksi untuk terus melakukan diversifikasi dan ekstensifikasi proyek-proyek yang dijamin oleh PT PII dengan berbagai inisiatif antara lain *new sector development* (pengelolaan limbah, jaringan gas), akselerasi dan penguatan KPBU Daerah serta perluasan aliansi dan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* dalam pengembangan ekosistem penjaminan infrastruktur.

Kinerja Keuangan

Sejalan dengan kinerja operasional di atas, kinerja keuangan PT PII juga menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Pada tahun buku 2021, Perseroan membukukan Total Pendapatan mencapai sebesar Rp922,5 miliar. Jumlah ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp998,1 miliar atau turun sebesar 7,6%. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan salah satu sumber pendapatan utama yaitu, Pendapatan Pengelolaan Dana. Pada tahun 2021 realisasi Pendapatan Pengelolaan Dana mencapai sebesar Rp735,9 miliar atau mengalami penurunan sebesar 13,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini sejalan dengan tren penurunan pada suku bunga deposito. Sementara itu pendapatan utama lainnya, yaitu Pendapatan Penjaminan mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu meningkat sebesar 28,9% dari Rp121,5 miliar yang diterima di tahun 2020.

Sementara itu, efisiensi yang dilakukan oleh Perusahaan telah menyebabkan Total Beban mengalami penurunan sebesar 11,3% dari Rp376,7 miliar ditahun 2020 menjadi Rp333,9 miliar pada tahun 2021. Penurunan Total Belanja ini mendorong kenaikan Laba Tahun Berjalan dari Rp620,6 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp625,4 miliar atau naik sebesar 0,8% pada tahun 2021. Jumlah ini tidak terlalu jauh berbeda dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham, yaitu minimal 1%. Dengan demikian realisasi Margin Laba Bersih yang dapat dicapai pada tahun 2021 adalah 68,0%. Angka ini lebih baik dari capaian angka Margin Laba Bersih pada tahun 2020 sebesar 62,0%.

Berdasarkan uraian mengenai kinerja operasional dan kinerja keuangan sebagaimana dijelaskan di atas dan hasil audit yang telah dilakukan oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), secara keseluruhan capaian kontrak kinerja korporasi adalah sebesar 97,78%. Angka capaian ini menurut Dewan Komisaris masih cukup baik di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, yang sangat mempengaruhi tidak hanya aspek kesehatan akan tetapi juga aspek sosial dan aspek ekonomi.

KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN PENILAIAN KINERJA ORGAN DEWAN KOMISARIS

Pengaturan mengenai IKU Dewan Komisaris tercantum di dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan ("PMK 88/2015"), sesuai dengan pasal tersebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah menetapkan IKU Dewan Komisaris. Secara reguler RUPS juga menerima laporan dari Dewan Komisaris atas pencapaian/realisasi dari seluruh IKU. IKU ini merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas & tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. Realisasi IKU tahun 2021 telah dilaporkan kepada RUPS melalui surat nomor S-04 /PII/DK/0122 tanggal 25 Januari 2022. Dan berdasarkan hasil *review* KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), capaian nilai IKU Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 mencapai 106,26%.

Dalam menjalankan dan mencapai IKU tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko. Sekretariat membantu Dewan Komisaris dalam penyelesaian seluruh administrasi Dewan Komisaris. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menelaah laporan keuangan Perusahaan sebelum dilaporkan ke Pemegang Saham dan *stakeholder* lainnya serta melakukan pengkajian atas aktivitas audit internal dan eksternal Perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan dan penanganan pengaduan, serta tugas-tugas lainnya sesuai penugasan yang diberikan Dewan Komisaris.

Sementara itu, Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan *monitoring* pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan GCG pada Perusahaan. Komite Pemantau Risiko juga menelaah kecukupan, kelengkapan dan efektivitas pelaksanaan prosedur manajemen risiko Perusahaan serta merekomendasikan arah kebijakan jika diperlukan serta tugas-tugas lainnya sesuai penugasan yang diberikan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris secara reguler melakukan penilaian atas efektivitas kinerja organ Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2021 organ Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. Hal ini tercermin dari pencapaian IKU secara keseluruhan yang dicapai oleh Dewan Komisaris.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan PT PII telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain aturan-aturan baku yang dimiliki sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh regulator serta implementasi praktik-praktik GCG pada setiap pengambilan keputusan strategis Perusahaan. Dewan Komisaris juga senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi serta *assessment* atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan.

Pada tahun 2021 PT PII Kembali melakukan *assessment* terhadap pelaksanaan GCG. *Assessment* dilakukan dengan bantuan BPKP dan pelaksanaannya mengacu kepada PMK 88/2015 serta KMK 505/2020.

Mengacu pada pedoman tersebut dan berdasarkan hasil *assesment* BPKP, skor implementasi GCG PT PII untuk tahun 2021 adalah sebesar 89,06 (kategori “Sangat Baik”). Dengan skor ini PT PII bisa tetap mempertahankan kategori “Sangat Baik” sebagaimana telah dicapai pada tahun sebelumnya. Dewan Komisaris berpandangan keberhasilan untuk tetap menjaga praktek penerapan GCG pada kategori ‘Sangat Baik’ menunjukkan kerja keras dan komitmen dari semua insan yang ada di PT PII baik Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Direksi untuk secara konsisten menerapkan praktek pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris telah memberikan arahan untuk senantiasa melakukan perbaikan dengan berpedoman kepada area-area yang direkomendasikan BPKP. Dewan Komisaris juga melakukan monitoring atas upaya perbaikan tersebut. Dengan penerapan GCG yang semakin baik ini diharapkan dapat makin meningkatkan kinerja dan kontribusi PT PII sesuai mandat yang telah diberikan oleh Pemegang Saham.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP AUDIT INTERNAL

Dewan Komisaris sangat memperhatikan penerapan pilar GCG melalui pemberdayaan audit internal. Dewan Komisaris melalui Komite Audit senantiasa mencermati pelaksanaan audit internal dalam rangka memberikan keyakinan atas berjalannya fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Reviu kegiatan audit internal dilakukan mulai dari penyusunan perencanaan tahunan untuk memastikan bahwa audit internal telah menerapkan *risk-based audit planning* dengan baik. Reviu juga dilakukan atas pelaksanaan audit internal dan hasilnya untuk memastikan bahwa audit internal telah menyajikan informasi yang memadai dan memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam audit. Terkait tindak lanjut, Dewan Komisaris juga melakukan pemantauan berkala sekurang-kurangnya satu kali tiap triwulan untuk memastikan rekomendasi audit internal diselesaikan secara tepat waktu.

Pada tahun 2021, audit internal telah dilakukan atas proses penjaminan Proyek KPBU Tol Semarang Demak, pengelolaan fungsi Teknologi Informasi, proses penjaminan Korporasi dan BUMN dalam rangka Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional, implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa, dan Penerapan Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Internal Tingkat Entitas Tahun 2021. Hasil audit atas fungsi-fungsi tersebut memberikan keyakinan bahwa fungsi-fungsi tersebut telah dilakukan dengan baik walaupun masih terdapat temuan dengan risiko tinggi. Dari 15 (lima belas) rekomendasi, dominasinya sebanyak 9 (sembilan) rekomendasi berupa risiko rendah, 2 (dua) rekomendasi merupakan risiko sedang, dan 4 (empat) rekomendasi risiko tinggi. Dewan Komisaris meminta Direksi agar segera menindaklanjuti semua rekomendasi secara tepat waktu dan mengambil *lesson learned* dari temuan audit tersebut untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan bisnis Perusahaan. Untuk tahun 2021, sejalan dengan praktik bisnis pada era digital dan belajar dari dampak pandemi COVID-19, Dewan Komisaris memberikan *concern* khusus terhadap hasil audit internal dan penguatan pengendalian internal pada aspek teknologi informasi. Berdasarkan evaluasi Dewan Komisaris, fungsi audit internal Perusahaan memiliki tren yang makin baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil, maupun tindak lanjut. Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, akan terus melakukan pengawasan terhadap fungsi audit internal agar secara terus menerus dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.



PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGELOLAAN RISIKO

Sepanjang tahun 2021 lingkungan bisnis dimana PT PII berada masih bergerak sangat dinamis, baik yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi maupun faktor-faktor lain seperti komitmen K/L yang menjadi PJPB yang dapat mempengaruhi pencapaian target-target Perusahaan sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemegang Saham. Oleh karena itu kematangan PT PII didalam menjalankan praktek manajemen risiko sangat menentukan bagaimana PT PII dapat mengidentifikasi semua faktor risiko tersebut dan menyiapkan strategi mitigasinya secara tepat.

Dengan latar belakang tersebut, salah satu perhatian utama dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah pengelolaan risiko. Secara reguler Dewan Komisaris atau melalui penugasan kepada Komite Pemantau Risiko melakukan pembahasan/review atas praktek manajemen risiko yang dilakukan oleh Perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain mencakup review atas nilai risiko yang dijamin serta ketersediaan kapasitas penjaminan, realisasi jumlah/persentase risiko yang dijamin yang masuk kategori 'Aman', progres proyek-proyek yang masuk dalam proses penjaminan, pemantauan atas risiko tingkat korporasi serta mitigasi yang dilakukan, program kerja dan pelaksanaannya dari divisi yang menangani program *risk management* Perusahaan serta isu-isu tematik lainnya.

Berdasarkan hasil review dan pembahasan-pembahasan pada rapat-rapat tersebut di atas, sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris menilai praktek pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Perusahaan sudah cukup baik. Tingkat risiko Perusahaan secara umum masih berada pada tingkat yang relatif 'aman' dan fungsi pengelolaan risiko masih menjalankan tugas dan fungsinya dengan cukup baik.

Pengakuan atas praktek pengelolaan risiko yang baik juga diberikan dari pihak eksternal. Hal ini tercermin dari apresiasi yang diberikan dalam ajang penghargaan *TOP GRC Awards 2021*, yaitu: *TOP GRC Awards #4 Star*, *The Most Committed GRC Leader 2021* dan *The High Performing Corporate Secretary on GRC 2021*. Sementara itu pada ajang *ASEAN Risk Award 2021*, Perusahaan juga memperoleh 3 (tiga) kategori, yaitu *Winner Risk Champion Category 1*, *Winner Public Initiative* dan *Runner up GRC Award Category 1*.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Dewan Komisaris berpandangan bahwa *Whistleblowing System* (WBS) dirancang untuk memperkuat GCG terutama

dalam memberikan saluran pengaduan bagi seluruh karyawan Perusahaan terhadap tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan non-keuangan, termasuk penurunan citra Perusahaan. WBS dirancang untuk memastikan setiap pelanggaran yang ditemukan di lingkungan Perusahaan baik eksternal maupun internal dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengganggu proses bisnis yang sedang berlangsung dan tanpa mempengaruhi citra serta reputasi Perusahaan.

Dewan Komisaris mencermati bahwa penerapan WBS telah berjalan dengan baik. Semenjak diterapkan tahun 2018, PT PII telah melakukan sosialisasi, internalisasi serta mengimplementasikan WBS. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah memiliki komitmen untuk menindaklanjuti pelanggaran yang telah diadukan, dengan tetap memastikan bahwa pihak pelapor (*whistleblower*) dengan pengaduan yang sah, baik insan Perusahaan ataupun pihak eksternal, dapat dilindungi sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk menegakkan etika, moral dan hukum. Dewan Komisaris senantiasa mendukung peningkatan efektivitas implementasi WBS, dan mendorong Manajemen agar dapat meningkatkan pengelolaan WBS sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang berintegritas dan menciptakan iklim transparansi terhadap sumber daya yang ada di Perusahaan.

Dewan Komisaris telah memberikan arahan untuk penerapan WBS dan melalui Komite Audit melakukan *monitoring* atas kegiatan pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari keanggotaan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3). Tim tersebut ditetapkan dengan surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 011/SK/PII-BOD/1220 dan Nomor KEP-07/KOM/PII/12/2020 tentang Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Selama tahun 2021, Perusahaan tidak menerima pengaduan sehingga belum ada informasi dari WBS yang perlu ditindaklanjuti.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

PT PII berkomitmen untuk berperan aktif dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan, dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ("*Corporate Social Responsibility*" atau "CSR"). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan berkeyakinan bahwa melalui pelaksanaan Program CSR, Perusahaan membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan reputasi Perusahaan. Komitmen ini dituangkan oleh Perusahaan dalam bentuk strategi bisnis yang berusaha

menciptakan manfaat bersama atau *Creating Shared Value* (CSV) yaitu *Profit, People* dan *Planet*. Oleh karena itu fokus pelaksanaan program CSR yang dilakukan mendukung proyek-proyek infrastruktur yang mendapatkan Penjaminan oleh PT PII, daerah potensial pengembangan infrastruktur, dan mendukung para *stakeholder* Perusahaan.

Selama tahun 2021, dari total dana yang telah dialokasikan sebesar Rp6 miliar, Perusahaan telah melaksanakan sebanyak 39 program CSR dengan penyerapan 88% dari alokasi anggaran CSR. Jenis kegiatan yang dibiayai dari kegiatan CSR tersebut adalah lingkungan (8%), Pemberdayaan ekonomi masyarakat (31%), Pendidikan (27%), Sosial (8%), Tanggap Darurat Bencana Alam (3%), Keagamaan (9%) serta Kesehatan (14%).

Beberapa contoh dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program CSR Pelatihan Petani sebagai Dukungan Terhadap Ketahanan Pangan Nasional.
2. Pembangunan Sentra UMKM dan Pelatihan Kewirausahaan UMKM di Mandalika.
3. Program CSR Ekonomi Masyarakat pada Produk Perikanan Skala UMKM di Sekitar Tol Semarang Demak, Jawa Tengah.
4. Program CSR Donasi Bantuan Sosial masa Pandemi COVID-19.

Memperhatikan rencana dan implementasi dari program CSR tersebut di atas, Dewan Komisaris berpandangan Perusahaan masih teguh memegang komitmen untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Beberapa arahan Dewan Komisaris terkait dengan program CSR ini juga sudah dijalankan oleh Perusahaan, yaitu (i) menjaga sustainabilitas program CSR, tercermin dari implementasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, (ii) meningkatkan sinergi dengan program sejenis yang dilakukan oleh Pemerintah seperti tercermin dalam kegiatan penanganan pandemi dan pemberdayaan UMKM serta senantiasa menjaga Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam pengelolaan CSR. Pengakuan atas komitmen tersebut juga tercermin pada penghargaan yang diterima oleh Perusahaan, yaitu *TOP CSR Awards Star 4, Top Leader on CSR Commitment 2021* serta *Nusantara CSR Awards*.

Ke depan Dewan Komisaris telah memberikan arahan untuk terus meningkatkan pengelolaan program CSR, diantaranya dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi kegiatan, koordinasi yang lebih erat dengan *stakeholder* utama agar sinergi program dapat terus dilakukan.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG TELAH DISUSUN DIREKSI

Sebagai salah satu instrumen penting di dalam pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi, pelaksanaan mandat PT PII di tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis, antara lain: kebijakan Pemerintah di bidang infrastruktur dan pemulihan ekonomi sebagaimana tertuang di dalam APBN 2022 serta dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

Pemerintah tetap menetapkan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan dan kesinambungan kinerja ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini tercermin pada APBN 2022, Kebijakan pembangunan infrastruktur menempatkan infrastruktur dasar seperti rumah sebagai prioritas. Selain infrastruktur dasar juga infrastruktur energi dan pangan, infrastruktur untuk konektivitas dan mobilitas, serta akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Mengingat bahwa infrastruktur merupakan proyek strategis yang memiliki karakteristik jangka panjang dan investasi yang tidak sedikit, skema KPBU ini merupakan solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan fiskal Pemerintah. Peluang ini telah dielaborasi kuat oleh PT PII sebagaimana tertuang di dalam RKAP 2022 yang telah disahkan oleh RUPS. Di tahun 2022, PT PII menargetkan 7 proyek KPBU yang dapat mencapai tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan, serta 4 Proyek Penjaminan Non KPBU (mencakup potensi penjaminan BUMN dalam hal penugasan Pemerintah) yang dapat mencapai tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Kinerja PT PII juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro dan pasar keuangan. Pada tahun 2022, Perusahaan menargetkan pendapatan mencapai Rp1.107 Miliar. Total Pendapatan tersebut mengalami peningkatan sejumlah 20% dibandingkan realisasi tahun 2021. Kontributor dari sumber pendapatan tersebut berasal dari (i) Pendapatan Penjaminan infrastruktur, (ii) pendapatan fasilitasi penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, (iii) pendapatan penjaminan korporasi padat karya sehubungan dengan dukungan *loss limit* dan penjaminan bersama, (iv) aktivitas pengelolaan dana PT serta (v) pendapatan lainnya (penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi PPP). Pendapatan pengelolaan dana merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Perusahaan. Oleh karena itu dinamika dari ekonomi makro dan pasar keuangan yang akan terjadi di dalam tahun 2022 merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan baik oleh Perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris sangat mendukung prospek usaha yang telah dirumuskan oleh Direksi. Dukungan tersebut diberikan dengan beberapa



pertimbangan, antara lain: kesesuaian dengan prospek ekonomi di tahun 2022, konsistensi dengan kebijakan Pemerintah, arahan pemegang saham serta pembahasan secara mendalam dengan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris meyakini bahwa target-target yang telah ditetapkan berdasarkan rumusan prospek usaha tersebut akan dapat dicapai dengan baik oleh Perusahaan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2021, komposisi Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2020, dengan demikian komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris Utama	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 205/KMK.06/2020.
Mariatul Aini	Komisaris	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 861/KMK.06/2018.
Wahyu Utomo	Komisaris	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 205/KMK.06/2020.

PENUTUP

Sebagai penutup, Dewan Komisaris menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ungkapan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan Perusahaan melalui tahun 2021 yang dinamis dan penuh tantangan dengan kinerja yang baik. Dewan Komisaris menyadari bahwa pencapaian kinerja PT PII yang baik ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan para pemangku kepentingan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, serta para pemangku kepentingan lainnya atas dukungan penuh kepada PT PII, kepada Direksi dan jajaran serta seluruh karyawan PT PII atas upaya yang telah dilakukan sehingga PT PII berhasil menjaga kinerja bisnis dan membukukan kinerja keuangan yang optimal, di tengah kondisi yang masih penuh dengan tantangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasehat selama Tahun Buku 2021, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan para Pemegang Saham yang terhormat untuk dapat menerima dan menyetujui laporan Dewan Komisaris tersebut menjadi Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021.

Jakarta, 31 Mei 2022
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Atas Nama Dewan Komisaris,

Awan Nurmawan Nuh
Komisaris Utama





LAPORAN DIREKSI

“



Muhammad Wahid Sutopo
Direktur Utama



0,8%

PT PII mampu meningkatkan laba bersihnya, dari Rp620,6 miliar di tahun 2020 menjadi Rp625,4 miliar di tahun 2021.

Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Mewakili Direksi dan seluruh jajaran PT PII, izinkan saya menyampaikan laporan kinerja Perusahaan di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang masih berlanjut di tahun 2021. Pencapaian kinerja baik operasi maupun usaha Perusahaan di tahun 2021 patut menjadi apresiasi bagi kita semua, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam keseluruhan pencapaian Perusahaan.

TANTANGAN PANDEMI COVID-19 YANG MASIH BERLANJUT

Kemunculan COVID-19 di akhir tahun 2019, yang kemudian merebak di awal tahun 2020 hingga akhirnya ditetapkan sebagai pandemi dunia oleh World Health Organization (WHO), memberikan dampak yang besar terhadap seluruh sendi kehidupan sosial dan perekonomian global. Berlanjutnya COVID-19 di tahun 2021 kemudian menciptakan serangkaian eksese atas optimisme yang sebelumnya telah tumbuh di awal tahun 2021. Kemunculan COVID-19 varian Delta di tengah tahun 2021 memberikan eskalasi ketakutan yang luar biasa terhadap masyarakat. Setelah sebelumnya Pemerintah Indonesia melonggarkan kebijakan pembatasan sosial, pada triwulan III dan IV 2021 Pemerintah kembali memperketat kegiatan masyarakat untuk mengantisipasi meluasnya COVID-19 varian Delta, yang kemudian berdampak pada menurunnya kembali roda perekonomian.

Meskipun demikian, tahun 2021 dipenuhi dengan optimisme, terutama ditopang oleh masifnya program vaksinasi massal yang diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat untuk dapat kembali normal. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia di tahun 2021 mampu menunjukkan kekuatannya untuk bangkit dan mencatat pertumbuhan sebesar 3,7%, jauh di atas tahun 2020 dengan catatan pertumbuhan ekonomi defisit 2,1%.

Masih menurut BPS, dari sisi Lapangan Usaha, sektor Jasa Kesehatan mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi sebesar 12,2%, diikuti oleh Transportasi & Pergudangan dan Pengadaan Listrik & Gas yang masing-masing mencatat pertumbuhan 7,9% dan 7,8% secara *Year-on-Year* (YoY); hanya sektor Jasa Keuangan yang mencatat defisit 2,6% (YoY), sedangkan sektor lapangan usaha lainnya mencatat pertumbuhan yang bervariasi. Dari sisi komposisi, sektor Industri dan Perdagangan berkontribusi terbesar terhadap PDB nasional, dengan kontribusi masing-masing sebesar 18,8% dan 12,7%, serta pertumbuhan masing-masing sebesar 4,9% dan 5,6% (YoY).

Kepercayaan industri untuk tumbuh juga terlihat dari *Purchasing Managers' Index* (PMI). Mengutip data Markit Economics dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2021 dari Bank Indonesia, PMI manufaktur berada pada fase ekspansi dengan indeks yang meningkat ke level yang tinggi yakni 53,5 pada Desember 2021. Meskipun sedikit melambat di akhir tahun, pertumbuhan ekspansif PMI ini menunjukkan kepercayaan diri industri terhadap pemulihan ekonomi di tahun 2021.

Pada sektor konstruksi, sebagaimana dikutip dari BPS, sektor ini mampu mencatat pertumbuhan 3,9%, jauh di atas tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar defisit 5,7%. Hal ini menunjukkan geliat pemulihan yang cukup baik, meskipun pelaku usaha pada sektor terus melakukan langkah hati-hati terkait ketidakpastian yang masih membayangi. Di sisi lain, investasi masyarakat pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berbentuk bangunan hanya tumbuh 2,5%, masih di bawah pertumbuhan seluruh PMTB sebesar 4,5% dan menjadi yang terendah dibandingkan pertumbuhan komponen lainnya pada struktur PMTB.



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2021 DAN PENCAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan *Special Mission Vehicles* (SMV) di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang menjalankan amanat dalam memberikan Penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) khususnya dalam hal penjaminan infrastruktur, Perusahaan memiliki peran untuk mendukung berbagai program Pemerintah Indonesia. Peran strategis Perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dilakukan melalui penyediaan jaminan Pemerintah atas risiko kontraktual terkait tindakan Pemerintah untuk proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta penjaminan terhadap pinjaman langsung untuk penyediaan proyek infrastruktur (*direct lending*). Peran Perusahaan mulai dari pengembangan kapasitas ekosistem, penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, evaluasi kelayakan, penjaminan, hingga pemantauan proyek menunjukkan peran nyata dan menyeluruh PT PII terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Di tahun 2020, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur ("PP 55/2020"), Pemerintah Indonesia memperluas mandat yang diberikan kepada Perusahaan, di mana maksud dan tujuan Perusahaan menjadi:

1. Memberikan Penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) di bidang infrastruktur;
2. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional; dan
3. Memberikan Penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan tersebut, lingkup kegiatan usaha Perusahaan tidak lagi terbatas pada kegiatan penjaminan dan kegiatan lain sehubungan infrastruktur, namun juga dapat memberikan Penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya yang mendukung perekonomian nasional. Selain itu, melalui Peraturan ini, Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham tunggal melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,57 triliun.

Diterbitkannya PP 55/200 tersebut serta perluasan mandat yang diberikan dan penambahan PMN kepada Perusahaan

tidak lepas dari harapan besar Pemerintah Indonesia atas pemulihan yang akan terjadi di tahun 2021, di mana Pemerintah Indonesia mendorong Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui berbagai kebijakan dan insentif kepada berbagai sektor. Setelah di akhir tahun 2020 Perusahaan mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) sehubungan dengan pelaksanaan dukungan *loss limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, mandat yang diberikan kepada Perusahaan terkait program penjaminan PEN diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.08/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK 32/2021").

Program penjaminan PEN yang diberikan oleh Perusahaan tidak lepas dari aspirasi dunia usaha untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Indonesia agar mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Di tahun 2021, Perusahaan mengawali program penjaminan PEN untuk BUMN, di mana Perusahaan memberikan Penjaminan Pemerintah atas pembiayaan pinjaman sindikasi bank maupun penerbitan obligasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Meskipun perluasan mandat yang diberikan memperkuat posisi Perusahaan, program penjaminan infrastruktur sebagai mandat utama yang diberikan tetap berjalan dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan telah menandatangani penjaminan untuk 37 proyek di mana 35 diantaranya merupakan penjaminan proyek infrastruktur berskema KPBU dan Non-KPBU serta 2 (dua) proyek terkait Program PEN. Penjaminan infrastruktur terhadap 35 proyek dilakukan atas 6 (enam) sektor, yakni ketenagalistrikan, telekomunikasi, air minum, jalan, transportasi dan kawasan dengan 28 proyek diantaranya telah efektif dijamin. Estimasi total nilai investasi proyek infrastruktur dan sehubungan dengan Program PEN dari ke-37 proyek tersebut mencapai Rp357,7 triliun dengan jumlah eksposur maksimum atas proyek yang dijamin sebesar Rp83,3 triliun. Berdasarkan jumlah eksposur maksimum atas proyek penjaminan proyek KPBU dan penjaminan pinjaman langsung (Non-KPBU) yang dijamin sebesar Rp75,6 triliun dan dengan ekuitas tanpa memperhitungkan PMN PEN menjadi sebesar Rp12,2 triliun, maka *Gearing Ratio* PT PII di akhir tahun 2021 sebesar 6,19 kali.

Strategi pengelolaan dana juga menjadi poin penting bagi kelangsungan usaha jangka panjang Perusahaan. Alokasi investasi yang dilakukan telah sesuai anggaran tahun 2021,

dengan yield atau hasil investasi di tahun 2021 sebesar Rp736 miliar. Alokasi investasi yang dilakukan PT PII telah mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.08/2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. ("PMK 95/2017")

Dengan pencapaian kinerja sebagaimana disampaikan di atas, Perusahaan mencatat pendapatan di tahun 2021 sebesar Rp922,5 miliar, sedikit di bawah tahun sebelumnya sebesar Rp998,1 miliar. Pendapatan ini dikontribusikan dari pendapatan Penjaminan sebesar Rp156,5 miliar, pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (PDF) sebesar Rp29,2 miliar, pendapatan Pengelolaan Dana sebesar Rp735,9 miliar, dan pendapatan Lainnya sebesar Rp935,3 juta. Di sisi lain, Perusahaan mampu membukukan laba bersih tahun berjalan tahun 2021 sebesar Rp625,4 miliar, tumbuh 0,8% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp620,6 miliar. Efisiensi atas beban usaha serta manfaat pajak yang diterima Perusahaan berimbas pada laba Perusahaan yang tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan Beban Usaha menghasilkan tingkat rasio BOPO sebesar 37,0%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 38,0%, sedangkan pertumbuhan laba bersih menghasilkan rasio Margin Laba Bersih sebesar 68,0%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 62,0%.

Untuk posisi keuangan tahun 2021 ditutup dengan keseimbangan Jumlah Aset dengan Liabilitas dan Ekuitas sebesar Rp14,1 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 4,4% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2020 sebesar Rp13,5 triliun. Kenaikan saldo Aset terutama dipengaruhi oleh kas dan setara kas. Sedangkan kenaikan pada Liabilitas dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan tangguhan.

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2021

Rencana kerja dan target kinerja Perusahaan tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). RKAP tahun 2021 telah disahkan melalui RUPS RKAP Tahun buku 2021 tanggal 21 Desember 2020. Berikut disampaikan pencapaian target tahun 2021.

Pencapaian Target Keuangan

Realisasi pendapatan Perusahaan mencapai 81,4%, yang terutama disebabkan pendapatan Penjaminan Dukungan *Loss Limit* yang jauh di bawah anggaran. Hal ini disebabkan pencairan pinjaman Program PEN yang dijamin oleh LPEI yang ditargetkan menerima Dukungan *Loss Limit* mencapai Rp100 triliun namun realisasinya baru mencapai sebesar Rp5,9 triliun.

Dengan beban usaha yang mampu dikelola melalui efisiensi yang cukup baik, realisasi beban usaha tahun 2021 mencatat penyerapan sebesar 97,0% terhadap anggaran. Dengan demikian, laba sebelum pajak penghasilan dan laba tahun berjalan mampu mencatat pencapaian target masing-masing sebesar 74,6% dan 95,7%.

KENDALA, TANTANGAN, DAN PENYELESAIANNYA

Pandemi COVID-19 yang berdampak besar terhadap perekonomian menciptakan kendala dan tantangan tersendiri bagi pengelolaan operasional dan usaha yang dilakukan PT PII. Dengan munculnya COVID-19 varian Delta di pertengahan tahun 2021 menyebabkan ketidakpastian yang semakin meluas, sedangkan kegiatan operasional perkantoran harus dibatasi dalam rangka mengelola penyebaran COVID-19. Meskipun demikian, adaptasi yang telah dilakukan seluruh elemen Perusahaan sejak tahun 2020 mampu menjawab sejumlah tantangan terkait pengelolaan operasional dan usaha. Pemanfaatan teknologi informasi dan *platform* digital yang semakin tersedia dengan mudah menjadi solusi terbaik bagi proses adaptasi yang dilakukan Perusahaan, khususnya dalam berhubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, Protokol Kesehatan yang tetap dijalankan dengan kesadaran tinggi menjadi kunci untuk dapat menjalankan kegiatan operasional kantor di tengah bayang-bayang pandemi COVID-19.

Selain itu, *refocusing* anggaran Pemerintah Indonesia dengan prioritas alokasi anggaran pada kesehatan serta pemulihan ekonomi berdampak pada berkurangnya anggaran bagi infrastruktur. Hal ini tentu berimbas pada kegiatan Perusahaan. Namun demikian, dengan keterlibatan Perusahaan dalam program PEN melalui perluasan mandat yang diberikan, tentunya akan memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasi dan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan.

Secara khusus, Perusahaan patut berbangga menjadi bagian dari agenda besar percepatan infrastruktur yang telah dilakukan dalam beberapa tahun belakangan. Seperti Tol Trans Jawa yang membentang di Pulau Jawa memberikan andil atas proses distribusi logistik alat-alat kesehatan di saat pandemi COVID-19 menunjukkan tren angka penyebaran yang sangat tinggi. Hal ini tentu menjadi hikmah bagi kita semua tentang pentingnya infrastruktur, baik bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, maupun di saat-saat genting seperti yang terjadi di tahun 2021.

PROSPEK DAN PROYEKSI KINERJA TAHUN 2022

Pada RKAP tahun 2022 yang telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 20 Desember 2021,



Perusahaan memroyeksikan tahun 2021 secara optimisme, meskipun terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan bercermin pada ekspek pandemi COVID-19 jangka panjang yang akan berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan dan perekonomian global dan nasional. Optimisme ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang relatif lebih baik bila dibandingkan tahun 2020. Sentimen positif dari vaksin COVID-19 serta program PEN memberikan solusi dan eskpektasi bagi pelaku di berbagai industri untuk menggerakkan roda perekonomian lebih menggeliat.

Secara khusus, kita patut mewaspadai ekspek jangka panjang atas pandemi COVID-19. Adaptasi yang telah dilakukan dalam 2 (dua) tahun terakhir tentunya akan memberikan perubahan besar, baik pada kegiatan sehari-hari, kebutuhan dan selera masyarakat, hingga model bisnis dan rantai pasokan yang dikembangkan oleh dunia usaha. Diperlukan cara pandang dan cara berpikir baru untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat agar Perusahaan mampu mengambil langkah yang tepat untuk dapat menjaga mandat yang diberikan oleh Pemerintah serta kelangsungan usahanya.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan berkomitmen untuk terus melakukan penguatan organisasi melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG). Terutama dengan statusnya sebagai BUMN dan SMV di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, Perusahaan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk melaksanakan pengelolaan operasi dan usaha dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip GCG ini terutama didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Manajemen telah mengupayakan untuk melaksanakan seluruh prinsip GCG yang dituangkan dalam skema organisasi dan perangkat kebijakan, maupun berbagai program dan kegiatan. Pada perangkat kebijakan, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun berbagai pedoman dan peraturan yang dapat memberikan batasan tanggung jawab pada setiap organ Perusahaan. Batasan ini menjadi penting agar pola hubungan antar organ dapat terjalin dengan harmonis, dan mampu mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Seperti halnya di tahun sebelumnya, Perusahaan melakukan *assessment* atau penilaian penerapan GCG tahun 2021 yang didasarkan pada KMK 505/2020, di mana penilaian ini menggunakan parameter 6 aspek, 43 Parameter, 153 Indikator dan 568 Faktor Uji Kesesuaian. Penilaian ini diharapkan mampu

memberikan gambaran tentang tingkat penerapan GCG yang telah dilakukan Perusahaan dan hal-hal rekomendasi yang dapat menjadi evaluasi dan peningkatan penerapan GCG di masa depan. Hasil penilaian GCG yang dilakukan pada tahun 2021 yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai penilai independen menunjukkan skor 89,060 dengan predikat "Sangat Baik".

Salah satu penguatan penerapan GCG yang dilakukan Perusahaan adalah perolehan Sertifikasi ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Direksi bersama Dewan Komisaris dengan arahan Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memperkuat semangat anti suap dan anti gratifikasi di lingkup Perusahaan, dimana sertifikasi ISO ini memberikan pendekatan sistemik yang terukur atas pendekatan anti suap dan anti gratifikasi.

Dengan berbagai pembenahan yang terus dilakukan, wajar kiranya jika Perusahaan memperoleh beberapa penghargaan atas perkembangan penerapan GCG yang telah dilakukan. Di tahun 2021, Perusahaan mendapatkan *Top GRC Awards 2021* yang merupakan penghargaan ketiga yang diterima oleh PT PII sejak tahun 2019. Selain itu, PT PII meraih penghargaan pada ajang *Asean Risk Award (ARA) 2021* dalam 3 (tiga) kategori penghargaan, yaitu kategori *Public Initiative* serta *Runner Up* pada kategori *GRC Awards*, yang merupakan kelima kalinya diraih PT PII, dan kategori *Risk Champion*.

Secara khusus manajemen menekankan tentang integritas sebagai kunci utama penerapan prinsip dan praktik GCG. Manajemen berkomitmen untuk terus membudayakan integritas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM. Hanya dengan integritas, organisasi Perusahaan akan dapat mencapai visinya dan menjalankan misinya dengan baik.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SERTA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Manajemen menyadari, kemajuan serta keberhasilan kinerja Perusahaan tak lepas dari dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang timbul atas kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan. Sebagai BUMN dan SMV di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, Perusahaan memiliki kewajiban untuk dapat menciptakan model bisnis dan membangun hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang dapat timbul dari ekspek kegiatan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan merumuskan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai agenda besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana telah dituangkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Fondasi utama dari rumusan program TJSL yang dilaksanakan Perusahaan terdapat pada 2 (dua) hal, yaitu pemetaan kegiatan inti dan dampaknya terhadap sosial dan lingkungan, serta upaya Perusahaan dalam membangun hubungan yang berkelanjutan agar terciptanya pertumbuhan bersama antara Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Pada aspek lingkungan, Perusahaan melakukan pemantauan secara berkala atas penggunaan listrik, bahan bakar, kertas, air, dan limbah perkantoran, dalam kegiatan operasi yang dilakukan. Kebijakan atas efektivitas penggunaan sumber daya alam terus dilakukan dengan harapan dapat menekan penggunaan sumber daya alam serta melakukan efisiensi.

Aspek pengelolaan ketenagakerjaan menjadi hal yang fundamental dalam pengembangan hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan. Manajemen personalia menjadi pilar utama dalam kegiatan operasi Perusahaan, di mana kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fondasi bagi keberhasilan Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Untuk itu, Perusahaan memperhatikan setiap aspek pemenuhan peraturan dan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan baik Hak Asasi Manusia (HAM) pegawai, promosi dan mutasi yang adil dan akuntabel, pemenuhan hak-hak, jaminan sosial dan kesehatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di area perkantoran, hingga apresiasi atas pencapaian target. Perusahaan juga mendorong setiap karyawan untuk dapat meningkatkan level kompetensinya melalui kesertaannya dalam pendidikan dan sertifikasi baik yang diselenggarakan secara internal maupun yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Aspek sosial kemasyarakatan juga tak luput bagi Perusahaan. Perusahaan secara rutin mengembangkan berbagai agenda dan program terkait sosial kemasyarakatan, baik dalam mendorong perekonomian masyarakat, program edukasi dan pendidikan, maupun program penyikapan situasi dan kondisi seperti pandemi COVID-19.

Fokus program TJSL yang dilakukan Perusahaan pada akhirnya mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Di tahun 2021, PT PII mendapatkan penghargaan pada ajang *TOP CSR Award 2021* pada kategori *Top CSR 2021 # Star 4*, serta *Top Leader on CSR Commitment 2021* yang diberikan kepada Direktur Utama Perusahaan.

INFORMASI TENTANG SUSUNAN DIREKSI

Berdasarkan KMK No. 885/KMK.06/2017, masa jabatan Sdr. Salusra Satria sebagai anggota Direksi telah berakhir pada 16 Juli 2021. Maka dari itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/KOM/PII/07/2021 tanggal 15 Juli 2021, Dewan Komisaris menunjuk Sdr. M. Wahid Sutopo untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas Sementara Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek.

Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2021

Periode 1 Januari s.d 15 Juli 2021	Periode 16 Juli s.d 31 Desember 2021	Keterangan
Muhammad Wahid Sutopo (Direktur Utama)	Muhammad Wahid Sutopo (Direktur Utama)	-
Salusra Satria (Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek)	-	Masa jabatan Salusra Satria telah berakhir, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 885/KMK.06/2017
Andre Permana (Direktur Eksekutif Bisnis)	Andre Permana (Direktur Eksekutif Bisnis)	-

Susunan Direksi

per 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019.	4 Desember 2017 s.d 3 Desember 2022	Ke-1
Andre Permana	Direktur Eksekutif Bisnis	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020.	23 Maret 2020 s.d 22 Maret 2025	Ke-1



Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022 tanggal 17 Januari 2022, Pemegang Saham memutuskan untuk mengangkat Donny Hamdani sebagai Direktur.

Dengan demikian, susunan Direksi Perusahaan per 31 Mei 2022 yang merupakan tanggal disahkannya Laporan Tahunan 2021 adalah sebagai berikut.

Susunan Direksi

per 31 Mei 2022

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019.	4 Desember 2017 s.d 3 Desember 2022	Ke-1
Andre Permana	Direktur Bisnis	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020.	23 Maret 2020 s.d 22 Maret 2025	Ke-1
Donny Hamdani	Direktur Keuangan	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022.	17 Januari 2022 s.d 16 Januari 2027	Ke-1

Penetapan jabatan Direksi sepenuhnya menjadi keputusan Pemegang Saham yang tertuang dalam RUPS.

PENUTUP

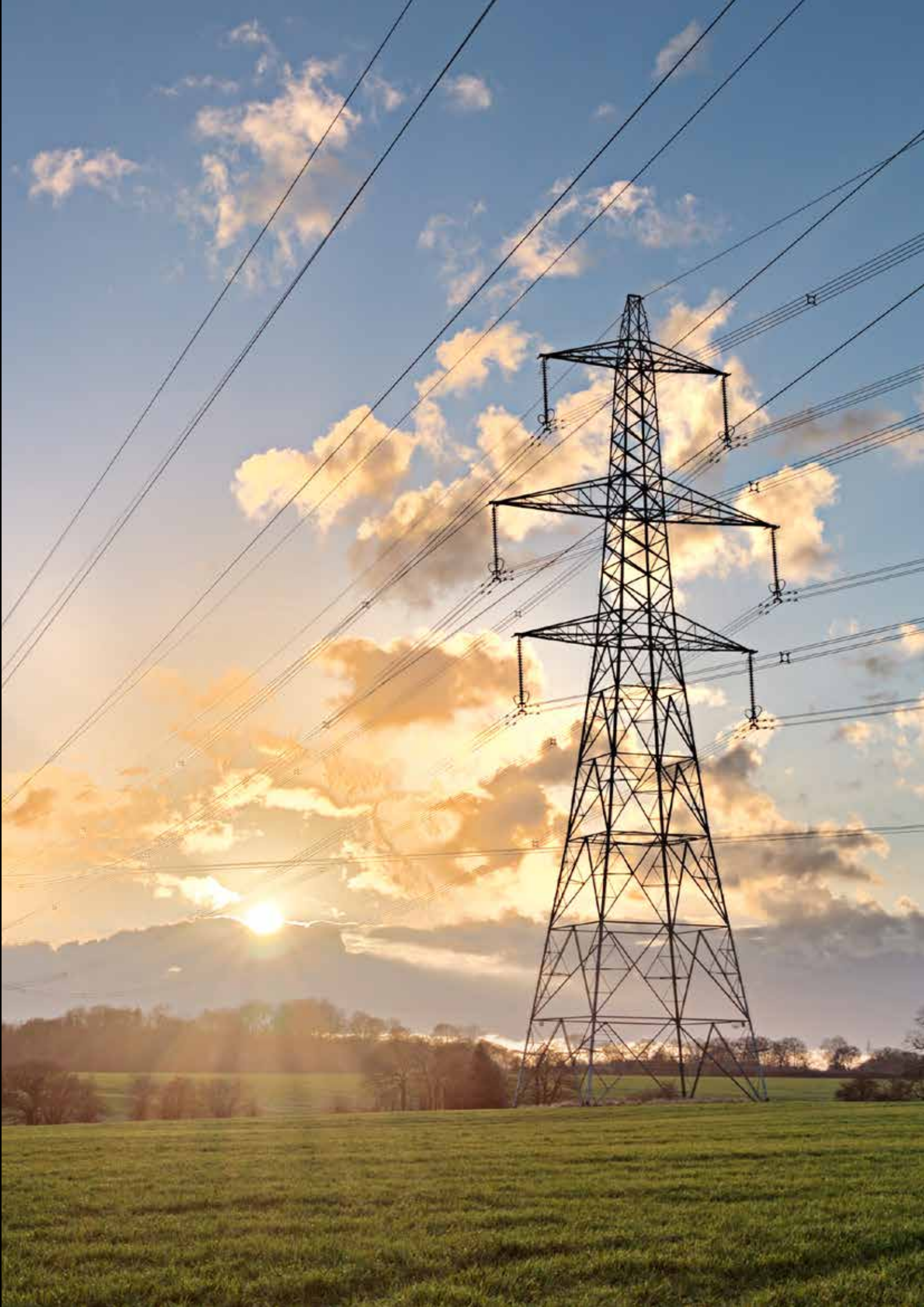
Atas seluruh tantangan yang berhasil dilalui di sepanjang tahun 2021, izinkan Direksi mengucapkan syukur dengan hasil yang telah dicapai oleh Perusahaan. Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi dan usaha Perusahaan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan selaku kuasa pemegang saham Pemerintah Indonesia. Demikian pula kepada regulator, pengguna jasa, pemasok dan mitra, Direksi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah tercipta.

Kepada seluruh pegawai PT PII, izinkan Direksi menyampaikan apresiasi atas segala kerja yang telah dilakukan di tahun 2021 yang masih diliputi dengan kewaspadaan. Semoga perjalanan di tahun 2021 dapat menjadi bukti bagi seluruh pihak, bahwa Perusahaan mampu mendedikasikan dirinya dalam pengelolaan mandat yang diberikan, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan.

Jakarta, 31 Mei 2022

Atas nama jajaran Direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)


Muhammad Wahid Sutopo
 Direktur Utama



TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Jakarta, 31 Mei 2022

DEWAN KOMISARIS



Awan Nurmawan Nuh
Komisaris Utama



Mariatul Aini
Komisaris



Wahyu Utomo
Komisaris

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Jakarta, 31 Mei 2022

DIREKSI



Muhammad Wahid Sutopo
Direktur Utama



Andre Permana
Direktur Bisnis



Donny Hamdani*
Direktur Keuangan

*Menjabat sejak tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022.

03

PROFIL PERUSAHAAN

“ Perluasan peran penjaminan yang diberikan kepada PT PII menggambarkan peran penting PT PII dalam jejak langkah Pemerintah Indonesia dalam percepatan pembangunan Indonesia. ”







INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN



Nama Perusahaan

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)



Pemegang Saham

100% milik Negara Republik Indonesia



Jenis/Badan Hukum Perusahaan

Perseroan Terbatas / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan



Sekretaris Perusahaan

Yunan Novaris Arifidianto
(EVP Corporate Secretary and Communication)



Jumlah Pegawai

143 Orang



Tanggal Pendirian

30 Desember 2009



Jaringan

1 Kantor Pusat



Kegiatan Bisnis Utama Sesuai Anggaran Dasar

- Memberikan Penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) di Bidang Infrastruktur;
- Memberikan Penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) Dalam Pembiayaan di Bidang lainnya Selain Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah; dan
- Melaksanakan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Implementasi Penjaminan Pemerintah Serta Kegiatan Lain yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Pembangunan Proyek yang Mendukung Perekonomian Nasional Baik Pusat dan Daerah



Dasar Hukum Pendirian dan Perubahan

Akta Pendirian oleh Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, No. 29 tertanggal 30 Desember 2009, Akta pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Nomor 04 tertanggal 9 Maret 2021 oleh Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.



Kantor Pusat

Capital Place, Lt 7 & 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 - Indonesia



Pencatatan di Bursa

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang belum mencatatkan saham di bursa mana pun



Telepon/Fax

Telp :021-5795 0550
Fax :021-5795 0040



Email

info@iigf.co.id



Modal Dasar

Rp20.000.000.000.000, terdiri dari 20.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham



Situs Web

www.ptpii.co.id



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp9.570.000.000.000 terdiri dari 9.570.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN



SEKILAS TENTANG PT PII

Infrastruktur merupakan fondasi kemajuan bangsa. Perbaikan infrastruktur lama dan pembangunan infrastruktur baru diperlukan untuk memacu peningkatan dan kesinambungan kinerja ekonomi nasional yang berujung pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah menjawab tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan membuka ruang bagi pihak swasta untuk turut berkontribusi mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Untuk mendukung berjalannya KPBU di Indonesia, pada 30 Desember 2009 Pemerintah mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), disingkat "PT PII" atau disebut juga "Perusahaan", yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan sebagai layanan satu pelaksana (*single window*) dalam mengevaluasi, menyusun struktur penjaminan serta pemberian jaminan bagi proyek infrastruktur berskema KPBU. Sebagai dasar pelaksanaan KPBU, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur ("PP 38/2015"). Penerapan KPBU dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengalihan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat. Penjaminan infrastruktur melalui PT PII merupakan salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah untuk memberikan kepastian kepada swasta terkait komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam pelaksanaan perjanjian KPBU. Kehadiran PT PII diharapkan mampu meningkatkan kepastian dalam perolehan pembiayaan (*financial close*) proyek melalui peningkatan kelayakan kredit atau *bankability* dari proyek-proyek KPBU, dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontingensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah.

4,4%

Total Aset Perusahaan tahun 2021 sebesar **Rp14,1 triliun, tumbuh 4,4% dari Total Aset tahun 2020 sebesar Rp13,5 triliun.**



Sebagai BUMN yang menjalankan fungsi untuk memberikan penjaminan pemerintah, PT PII dirancang untuk menjadi lembaga penjaminan yang kredibel melalui tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, *framework* yang akuntabel serta didukung dengan transparansi, profesionalisme dan independensi. Untuk menjalankan mandat utamanya dalam melakukan penjaminan infrastruktur, hingga saat ini Pemerintah telah melakukan penyertaan modal dari APBN ke PT PII sebesar Rp8 triliun. PT PII secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada APBN dan akan meningkatkan kapasitas penjaminannya melalui kerja sama dengan berbagai institusi keuangan, baik institusi multilateral (Bank Dunia, ADB, IDB, MIGA), institusi bilateral, dan lainnya.

Pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur ("PP 50/2016"), PT PII mendapatkan perluasan mandat untuk dapat memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur di luar skema KPBU. Perluasan mandat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/ atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur ("PMK 101/2018").

Selain itu, sejak 2018 PT PII juga mendapatkan penugasan dari Kementerian Keuangan dalam melakukan pendampingan atas penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek infrastruktur dengan skema KPBU yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.08/2018 yang pada tahun 2020 telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK/08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. dengan demikian, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan tidak hanya terbatas pada penjaminan, tetapi juga dapat melakukan pendampingan, baik dari tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi.

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penjaminan Pemerintah yang semakin meningkat dan dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai akibat pandemi COVID-19, pada tahun 2020 melalui PP 55/2020 dilakukan perluasan mandat kepada PT PII sehingga PT PII memiliki maksud dan tujuan untuk:

1. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur;

2. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional; dan
3. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

Perluasan mandat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan Anggaran Dasar PT PII. berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 497/KMK/06/2020 tentang Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ("KMK 497/2020"). Menteri Keuangan selaku RUPS PT PII menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT PII yang mencakup perubahan maksud dan tujuan Perusahaan, kegiatan usaha Perseroan, serta penambahan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp20 triliun. Keputusan tersebut kemudian dinyatakan dalam Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 14 tanggal 19 November 2020 serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077464.AH.01.02.TAHUN 2020 pada tanggal 19 November 2020.

Pada tahun 2020 dalam rangka mendukung Pemerintah dalam program penanggulangan dampak pandemi COVID-19 terdapat beberapa peraturan penting yang berdampak pada kegiatan usaha PT PII diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau untuk Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional ("PP 23/2020");
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional ("PP 43/2020");
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah kepada Pelaku usaha Korporasi melalui Badan usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK 98/2020");
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT PII untuk Melaksanakan Dukungan *Loss Limit* Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("KMK 523/2020"); dan

5. Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT PII dalam Melaksanakan Penjaminan Bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("KMK 522/2020").

Untuk mengimplementasikan perluasan mandat dan penugasan tersebut maka pada tahun 2020 melaksanakan serangkaian persiapan, salah satunya yaitu dengan melakukan penyesuaian Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP) yang dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 21 Desember 2020. Keputusan Pemegang Saham untuk menyetujui dan mengesahkan perubahan RKAP PT PII Tahun Buku 2020 pada RUPSLB tersebut, kemudian telah dituangkan dalam Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 20 tanggal 30 Desember 2020.

Dari sisi kapasitas keuangan, menindaklanjuti peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp20 triliun, pada tanggal 30 Desember 2020 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT PII ("PP 79/2020") yang menjadi dasar tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PII sebesar Rp1,57 triliun. Penambahan PMN tersebut merupakan bentuk dukungan kapasitas dari Pemerintah kepada PT PII dalam rangka pelaksanaan program PEN serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan pemerintah kepada PT PII. Penambahan PMN tersebut ditelaah dicatatkan sebagai modal disetor PT PII berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.06/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (Persero) PT PII ("KMK 61/2021"), yang kemudian dinyatakan dalam dinyatakan dalam Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 4 tanggal 9 Maret 2021 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Sesuai dengan uraian riwayat singkat, semenjak awal pendirian sampai dengan sekarang (2009-2021), tidak terdapat perubahan nama. Nama Perusahaan adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).





VISI, MISI, SERTA BUDAYA DAN NILAI PERUSAHAAN



VISI

Menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.



MISI

Memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang:

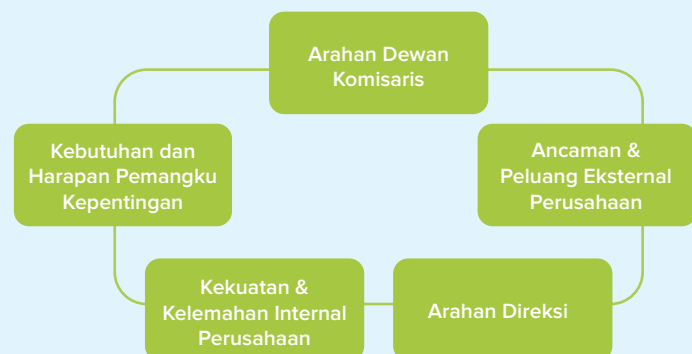
- Memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia.
- Melindungi kepentingan Pemerintah dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko kerugian suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan.



Pengesahan Manajemen Kunci atas Visi dan Misi serta Kajian Periodik Visi dan Misi

Visi dan Misi PT PII telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode 2018-2022 pada tanggal 27 Desember 2017.

Skema Penyusunan Visi dan Misi



Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian atas visi dan misi di atas, baik dalam periodik jangka pendek Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 14 Desember 2020.

NILAI-NILAI UTAMA : IN TIME

Integrity

Integritas



- Bekerja dengan standar etika tertinggi.
- Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam segala urusan.
- Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak-pihak lain.
- Menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas.
- Mentaati aturan Perusahaan.
- Bertanggung jawab dalam seluruh tindakan.

Think Big

Berpikiran Luas



- Memiliki pemikiran luas dan mutakhir.
- Mempertimbangkan berbagai alternatif untuk hasil yang lebih baik bagi Perusahaan dan bagi pemangku kepentingan.
- Menggali secara terus menerus ide-ide baru untuk perkembangan Perusahaan.
- Terbuka terhadap berbagai perkembangan yang ada di lingkungan demi hasil terbaik tanpa meninggalkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Teamwork

Kerja Sama



- Beroperasi sebagai sebuah tim.
- Memberi kontribusi keterampilan dan pengetahuan demi kepentingan tim.
- Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Mutual Trust

Saling Percaya



- Memegang teguh etika bisnis bersama seluruh komponen internal Perusahaan maupun dengan mitra Perusahaan.
- Konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan.

Excellence

Keunggulan



- Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam melaksanakan apapun yang dilakukan.
- Berusaha untuk melakukan perbaikan yang terus menerus.
- Memiliki pengetahuan mendalam guna mendukung kegiatan dan mendapatkan hasil yang melebihi harapan.

Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan

PT PII dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi budaya yang hidup dalam organisasi PT PII. Saat ini PT PII telah memiliki nilai-nilai budaya yang dikenal sebagai **InTIME**, yakni *Integrity*, *Teamwork*, *Think Big*, *Mutual Trust* dan *Excellence*.

Penerapan Budaya Perusahaan

Penerapan Budaya Perusahaan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Tata Nilai dan Budaya di lingkungan Perusahaan. Seluruh jajaran Perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang sama.



MAKNA LOGO PERUSAHAAN

BRAND/LOGO

Ide dasar logo PT PII merujuk pada kerajinan karya seni asli penduduk Indonesia, yaitu kerajinan anyaman yang merepresentasikan mandat PT PII untuk menjadi jembatan penggerak percepatan pembangunan infrastruktur.



Warna biru pada logo mengandung makna:

Trust (terpercaya), *responsibility* (tanggung jawab) dan *strength* (kekuatan). Warna tersebut merepresentasikan PT PII sebagai perusahaan yang terpercaya, bertanggung jawab dan profesional untuk mewujudkan visi PT PII menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Warna hijau pada logo mengandung makna:

Growth (pertumbuhan), *financial* (keuangan), *harmony* (keseimbangan, keselarasan) dan *environment* (lingkungan; masyarakat). Warna tersebut sejalan dengan misi PT PII untuk memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang:

1. Memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia;
2. Melindungi kepentingan Pemerintah dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel; dan
3. Meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko kerugian suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan.

JEJAK LANGKAH

2009

Pembentukan PT PII:

30 Desember 2009, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII resmi berdiri sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp 1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

2010

Peresmian Operational PT PII:

11 Mei 2010, PT PII resmi beroperasi dengan mandat menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur berskema KPBU sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Perpres No. 78/2010 dan PMK 260/2010:

Perpres No. 78/2010 tanggal 21 Desember 2010 dan PMK No. 260/2010 tanggal 31 Desember 2010 diterbitkan sebagai pedoman bagi PT PII untuk menjamin proyek infrastruktur dan mengokohkan keberadaan PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).

2011

MOU antara PT PII dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA):

24 Januari 2011, PT PII menandatangani MOU bersama Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam rangka mempromosikan investasi infrastruktur melalui berbagai kegiatan bersama.

Acuan Alokasi Risiko:

31 Maret 2011, PT PII menerbitkan Dokumen Acuan Alokasi Risiko Edisi Pertama yang berisi acuan mengenai kategori dan distribusi risiko infrastruktur yang akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur dengan skema KPBU.

Penandatanganan Penjaminan Proyek PLTU Jawa Tengah:

6 Oktober 2011, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah. Proyek ini merupakan proyek dengan skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan oleh Pemerintah dengan menggunakan fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Kementerian Keuangan RI.

2012

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan ICIEC:

20 April 2012, PT PII dan Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credits (ICIEC) menandatangani Nota Kesepahaman bersamaan dalam acara Asia Finance and Risk Mitigation Forum 2012 di Makati City, Filipina.

IIGF Institute:

Peluncuran IIGF Institute dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT PII dengan 3 (tiga) perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada tentang program peningkatan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan terhadap penyediaan infrastruktur.

2013

Peningkatan Kapitalisasi Penjaminan dan Pengakuan Peringkat Kredit:

Di awal tahun 2013 PT PII mendapatkan fasilitas pinjaman dari World Bank senilai USD25 juta dan implementasi Co-guarantee dengan MIGA senilai USD50 juta untuk peningkatan kapasitas penjaminan. Di samping itu PT PII juga mendapatkan Peringkat Kredit BBB- (*outlook stabil*) dari Fitch Rating, lembaga pemeringkat keuangan internasional, setara dengan peringkat Pemerintah Indonesia yang menunjukkan pengakuan atas kapasitas dan kinerja keuangan PT PII.

Indonesia Infrastructure Roundtable II (IRR):

28 Februari 2013, PT PII melalui IIGF Institute bersama dengan UI, ITB dan UGM menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Roundtable II dengan topik "Investasi Sektor Swasta pada Bidang Air Minum" di Kabupaten Tangerang'.



2014

Kerja Sama dengan Universitas Sriwijaya dan Universitas Hasanuddin

PT PII melalui IIGF Institute menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Sriwijaya pada 18 Agustus 2014 dan Universitas Hasanuddin pada 17 Oktober 2014 untuk kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, peningkatan kapasitas serta kemitraan dalam bina lingkungan, sosial dan masyarakat.

Seminar Nasional Infrastruktur untuk Rakyat

PT PII bekerja sama dengan UI, ITB dan UGM menyelenggarakan seminar nasional bertajuk "Infrastruktur untuk Rakyat, Kembalinya Peran Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar" sebagai bentuk sosialisasi hasil acara Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) tahun 2013-2014 yang disponsori oleh PT PII.

2015

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur diterbitkan sebagai upaya memperluas sektor proyek infrastruktur berskema KPBU yang dapat dijamin PT PII menjadi 19 sektor termasuk sektor infrastruktur sosial.

PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP)

28 Agustus 2015 peletakan batu pertama pembangunan proyek PLTU Jawa Tengah-Batang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang, PT PLN, PT PII dan investor pengembang. Proyek ini merupakan proyek KPBU sektor listrik pertama yang akan memperoleh penjaminan dari PT PII.

Pembentukan UNIID

16 Desember 2015, PT PII melalui IIGF Institute memfasilitasi pembentukan Jaringan Kerja Antar Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Infrastruktur atau University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). Pembentukan jaringan ini menjadi forum bagi para akademisi untuk berkontribusi mendorong pengembangan infrastruktur nasional.

2016

Proyek Palapa Ring Barat

29 Februari 2016, Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Barat oleh PT PII dan PT Palapa Ring Barat selaku Badan Usaha, dan antara PT PII dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). *Financial Close* Proyek Palapa Ring Barat dilaksanakan pada 25 Juli 2016.

Proyek Palapa Ring Tengah

4 Maret 2016, Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Barat dilakukan oleh PT PII dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia selaku Badan Usaha dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). *Financial Close* Proyek Palapa Ring Tengah dilaksanakan pada 29 September 2016.

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan 4 Jalan Tol

PT PII menandatangani perjanjian penjaminan 4 (empat) proyek di sektor Jalan Tol yaitu Jalan Tol Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung.

Financial Close PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW

6 Juni 2016 telah dicapai tahap *financial close* untuk proyek PLTU Batang Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 MW dengan nilai investasi sekitar USD4 miliar (±Rp52 triliun). Proyek ini telah mendapatkan penjaminan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan bersama dengan PT PII.

Proyek SPAM Umbulan

21 Juli 2016, Penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Meta Adhya Tirta dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Gubernur Jawa Timur dalam rangka menjamin Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. *Financial Close* Proyek SPAM Umbulan dilaksanakan pada 30 Desember 2016.

Sinergi Pendampingan Hukum

2 Agustus 2016, PT PII menandatangani Nota Kesepahaman dengan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk saling bersinergi dalam memberikan pendampingan hukum demi mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Perluasan Mandat PT PII

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2016 diterbitkan sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Diterbitkannya perubahan Peraturan ini memperluas mandat PT PII untuk dapat menjamin proyek-proyek infrastruktur di luar skema KPBU.



2017

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan 6 Jalan Tol

Di tahun 2017 PT PII menandatangani perjanjian penjaminan sejumlah 6 (enam) proyek Jalan Tol yaitu: (1) Cileunyi-Sumedang-Dawuan (2) Serang-Panimbang (3) Jakarta- Cikampek II Elevated (4) Krian-Legundi-Bunder-Manyar yang keempatnya ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2017, dan 2 (dua) proyek Jalan Tol lainnya yang ditandatangani pada bulan Desember 2017 yaitu (5) Probolinggo- Banyuwangi dan (6) Jakarta-Cikampek II Selatan.

Financial Close Proyek Palapa Ring Timur

29 Maret 2017, *Financial Close* Proyek Palapa Ring Timur yang melengkapi *Financial Close* Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah yang sebelumnya telah dicapai di tahun 2016.



2018

Proyek SPAM Bandar Lampung

14 Februari 2018, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dan regres proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung.

Proyek SPAM Semarang Barat

23 November 2018, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan PDA M Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat.

Pinjaman Proyek KEK Mandalika

28 Desember 2018, PT PII menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sehubungan dengan Penjaminan Pinjaman Proyek Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok.

Penugasan dan Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU

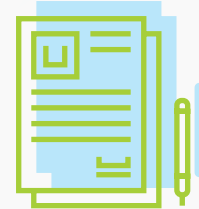
PT PII mendapatkan mandat dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU, 1) Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan, 2) Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan, 3) Jalan Lintas Timur Riau yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR, dan 4) Rumah Sakit Kanker Dharmas yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.



2019

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2020 diterbitkan yang memperluas maksud dan tujuan PT PII tidak lagi terbatas pada penjaminan pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur, namun juga mencakup penjaminan pemerintah (*sovereign guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya berdasarkan penugasan pemerintah dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat maupun daerah.



2020



Penugasan dan Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU

8 Januari 2019, Penandatanganan Perjanjian Penugasan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD Zainoel Abidin antara Dirjen PPR dengan Direktur Utama PT PII.

Proyek KPBU Kereta Api Makassar – Parepare

5 April 2019, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Celebes Railway Indonesia dan Perjanjian Regres dengan Menteri Perhubungan untuk penjaminan Proyek KPBU Kereta Api Makassar-Parepare. Proyek ini merupakan proyek KPBU pertama untuk sektor transportasi.

Proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia

3 Mei 2019, PT PII melaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dengan PT Satelit Nusantara Tiga sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan Perjanjian Regres proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).

Proyek KPBU Ruas Jalan Tol Semarang-Demak

23 September 2019, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak dan Perjanjian Regres dengan Menteri PUPR untuk penjaminan Proyek KPBU Ruas Jalan Tol Semarang-Demak.

2021

Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Kelistrikan di Jawa Timur dan Bali

Pada tanggal 10 Februari 2021 dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan PT PII atas Pinjaman Langsung (Direct Lending) dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) kepada PT PLN untuk pembiayaan proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Jawa Timur dan Bali.

Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Korporasi

Pada tanggal 16 Februari 2021 dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama terkait Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Korporasi yang dilakukan oleh Direktur Utama PT PII dan Direktur Eksekutif LPEI.

Proyek KPBUs Solicited SPAM Jaliluhur I

Pada tanggal 18 Februari 2021 dilaksanakan kegiatan seremonial penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk Proyek SPAM Jaliluhur I yang merupakan Proyek KPBUs Solicited.

Financial Close Proyek Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera Selatan.

Pada tanggal 22 Februari 2021 dilaksanakan Financial Close Proyek KPBUs Preservasi Jalintim Sumsel yang ini merupakan proyek KPBUs pertama di sektor Jalan Non-tol di Indonesia dan merupakan proyek KPBUs pertama yang mendapatkan pendanaan Syariah.

Proyek KPBUs Solicited SPAM Regional Umbulan di Pasuruan Jawa Timur

Pada tanggal 22 Maret 2021 dilaksanakan peresmian Proyek KPBUs Solicited SPAM Regional Umbulan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) dengan didampingi Menteri Keuangan RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI serta Gubernur Jawa Timur.

Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau

Pada tanggal 12 April 2021 PT PII resmi memberikan penjaminan pada Proyek KPBUs Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau yang merupakan proyek kedua di sektor jalan Non-tol di Indonesia.

Proyek KPBUs Solicited SPAM Karian – Serpong (Unsolicited)

Pada tanggal 29 April 2021 dilaksanakan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek SPAM Karian – Serpong dimana menjadi proyek ke-6 di sektor Air Minum yang diberikan penjaminan oleh PT PII.

Proyek Penggantian dan/ atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa (Unsolicited)

Pada tanggal 6 Desember 2021 dengan disaksikan langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, PT PII melaksanakan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek dengan skema KPBUs solicited di sektor jalan dan jembatan yaitu proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa.



BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MENURUT ANGGARAN DASAR DAN KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Sesuai dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk:

1. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) di bidang infrastruktur;
2. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah; dan
3. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat dan daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sesuai Anggaran Dasar, Perusahaan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

No	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar
1	Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial pemerintah dalam skema perjanjian kerja sama Pemerintah dan Badan usaha dalam proyek infrastruktur yang mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kewajiban kontinjensi Pemerintah dan meningkatkan kelayakan kredit (<i>creditworthiness</i>) proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang infrastruktur.
2	Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial pemerintah dalam proyek infrastruktur.
3	Pemberian penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat dari: • Pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan; • Penerbitan surat hutang atau obligasi dan/atau instrumen keuangan lainnya.
4	Pemberian penjaminan atas risiko gagal bayar kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat dari: • Pelaksanaan perjanjian-perjanjian dengan lembaga keuangan; • Penerbitan surat hutang/obligasi.
5	Pemberian penjaminan atas risiko finansial lainnya kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat perolehan pembiayaan atau fasilitas mitigasi risiko finansial dalam bentuk selain pinjaman dan surat utang/obligasi.
6	Pemberian penjaminan kepada pelaku usaha lainnya sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
7	Pemberian jasa konsultasi, penyediaan informasi, fasilitasi perencanaan, penyiapan, dan penyiapan kelayakan, atas proyek atau program serta hal lain terkait mitigasi risiko/pemantauan risiko dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek.
8	Kerja sama dengan pihak lain termasuk organisasi/lembaga keuangan internasional dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
9	Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
10	Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PRODUK DAN JASA YANG DIHASILKAN

1. Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur untuk Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU).
2. Penjaminan Pemerintah terhadap Pinjaman dan Penerbitan Obligasi BUMN untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur.
3. Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (*Project Development Facility*).
4. Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

20 Sektor yang Dapat Diberikan Penjaminan



Air Minum



System pengelolaan air limbah terpusat



System pengelolaan air limbah setempat



Minyak dan gas bumi dan energi terbarukan



Konservasi energi



Pariwisata



Kesehatan



Lembaga pemasyarakatan



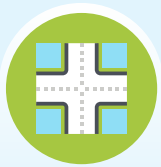
Fasilitas perkotaan



Perumahan rakyat



Transportal



Jalan



Sumber daya air dan irigasi



Telekomunikasi dan informatika



Ketenagalistrikan



System pengelolaan persampahan



Fasilitas pendidikan



Sarana dan prasarana olahraga serta kesenian



Kawasan



Bangunan Negara

GEARING RATIO

Berdasarkan jumlah eksposur maksimum atas proyek penjaminan proyek KPB dan penjaminan pinjaman langsung (Non-KPB) yang dijamin sebesar Rp75,6 triliun dan dengan ekuitas tanpa memperhitungkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi sebesar Rp 12,2 triliun, maka *Gearing Ratio* PT PII di akhir tahun 2021 sebesar 6,19x.

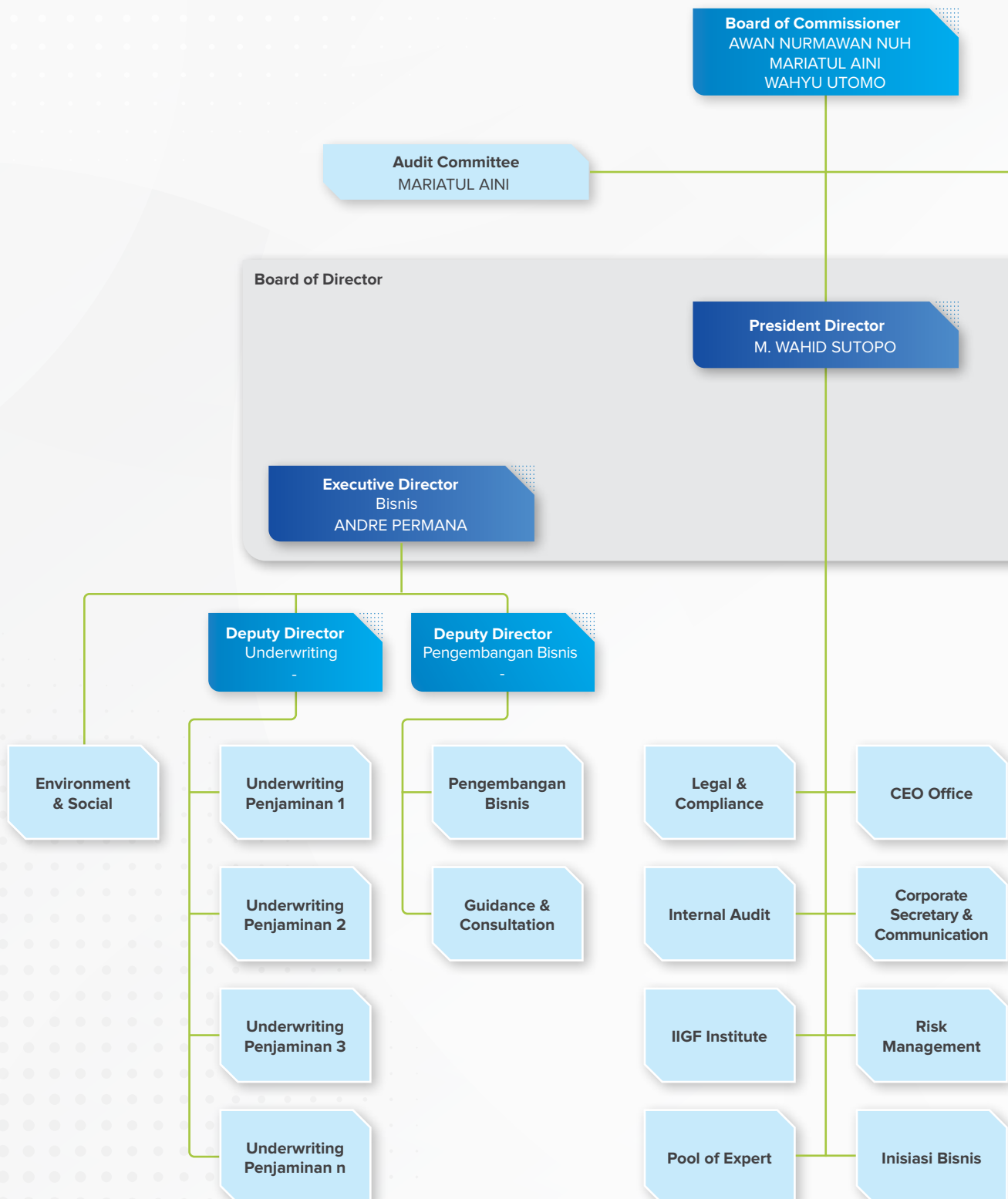
WILAYAH OPERASI

PT PII sepenuhnya beroperasi di Indonesia. Hingga akhir tahun 2021, PT PII tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, kantor cabang dan kantor perwakilan.



STRUKTUR ORGANISASI

Berikut disampaikan Struktur Organisasi PT PII yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.



Remuneration & Nomination Committee

Executive Director
Keuangan dan Penilaian Proyek
M. WAHID SUTOPO (Plt)

Deputy Director
Penilaian Proyek

Project Appraisal

Penjaminan Non-KPBU

Project Monitoring & Claim Management

Deputy Director
Keuangan
DONNY HAMDANI

Corporate Strategy & Finance

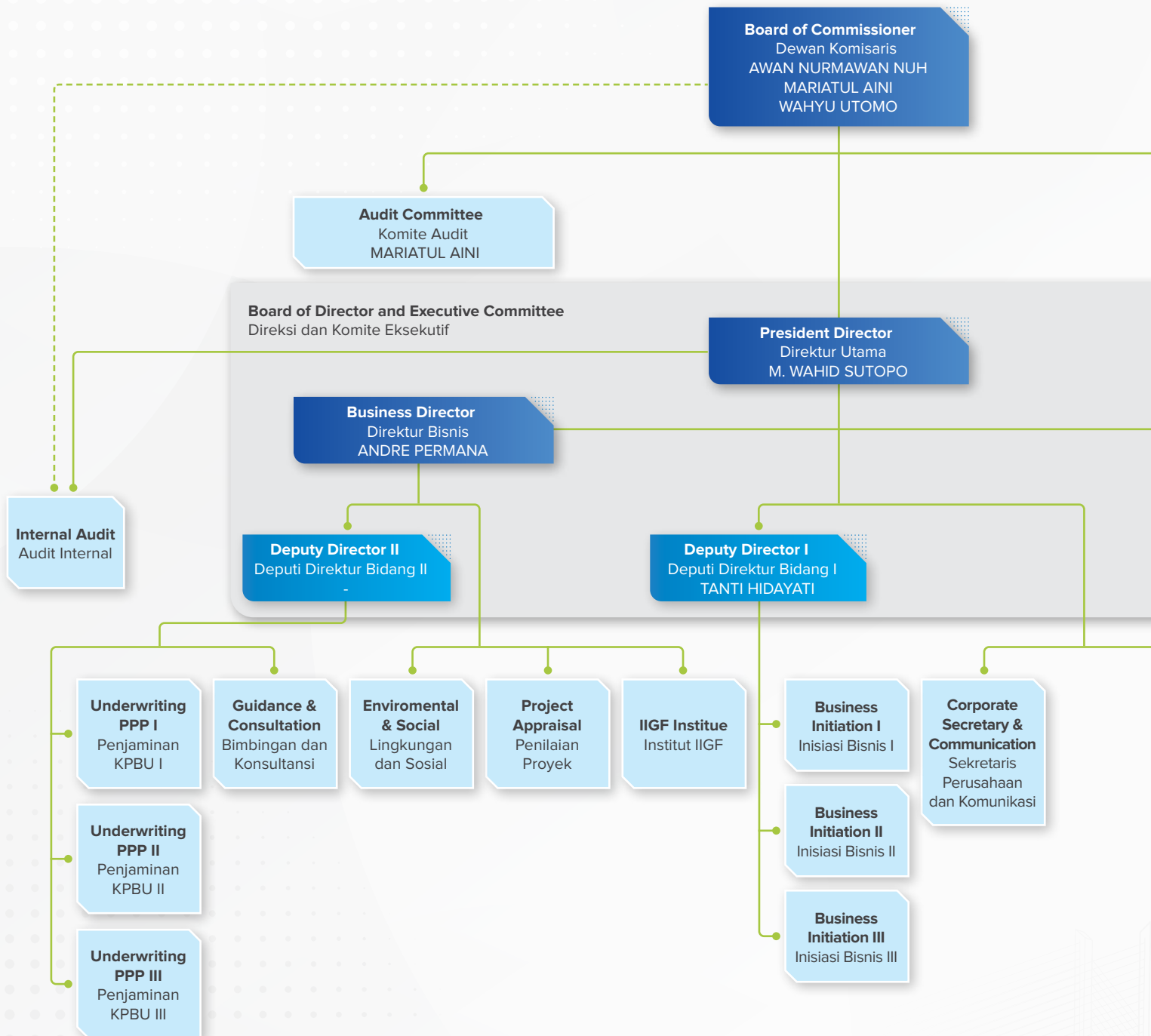
Treasury & Investment

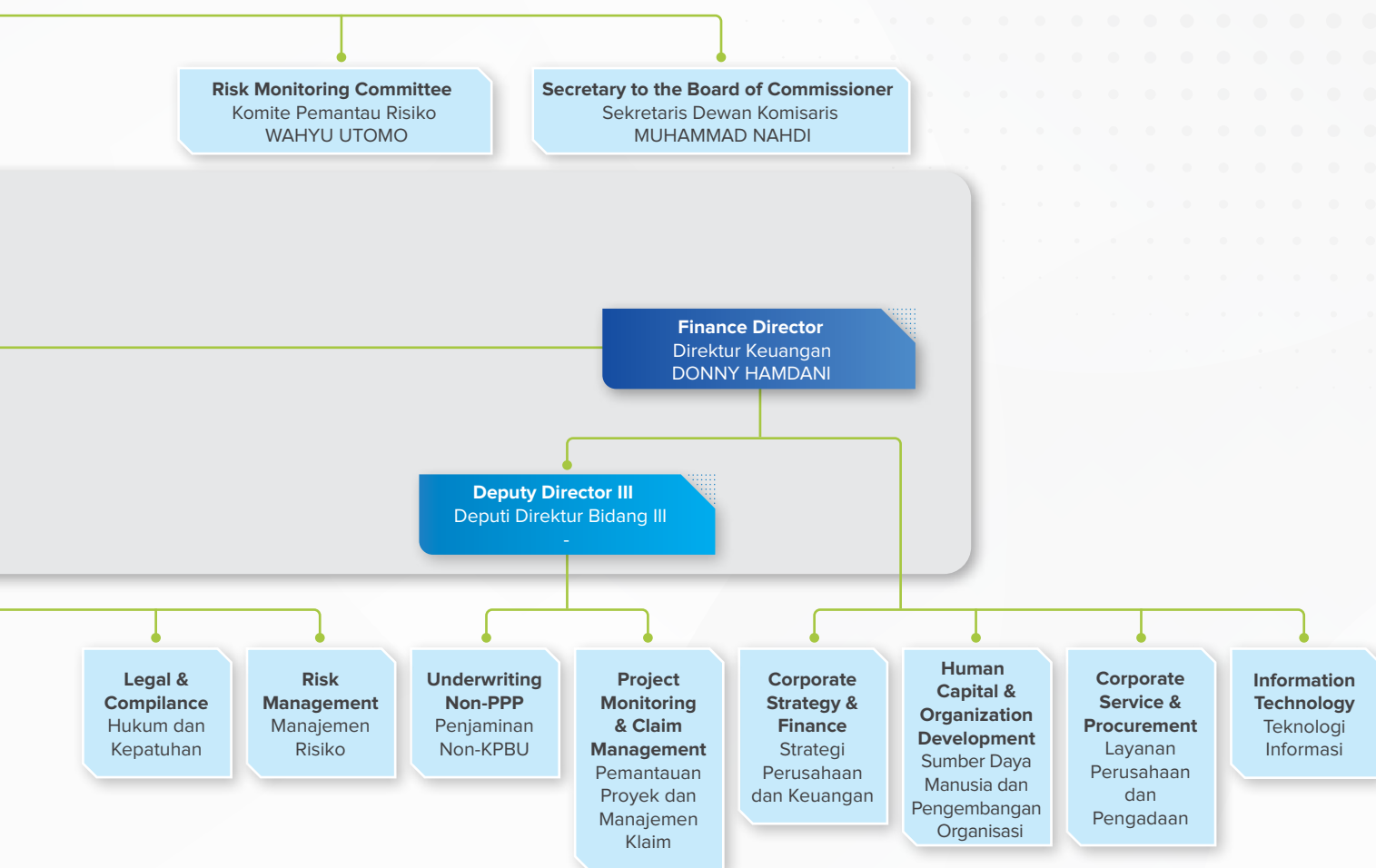
Corporate Service & Procurement

Human Capital



Berikut disampaikan Struktur Organisasi PT PII yang telah disahkan pada tanggal 18 Maret 2022.











SUSUNAN DAN PROFIL DEWAN KOMISARIS



Wahyu Utomo
Komisaris

Awan Nurmawan Nuh
Komisaris Utama

Mariatul Aini
Komisaris

"Sepanjang tahun 2021 susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan tidak mengalami perubahan."

**Awan Nurmawan Nuh**

Komisariss Utama

Periode Jabatan: 20 April 2020 s.d

19 April 2025 , Periode ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 53 tahun

Kelahiran Bandung, 26 September 1968

Domisili

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisariss Utama sejak tanggal 20 April 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 205/KMK.06/2020 untuk masa jabatan sampai dengan 20 April 2025. Jabatan ini merupakan periode ke-1. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisariss PT PII.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi

Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1992) dan *Master (S2) of Business Taxation* dari University of Southern California, Amerika Serikat (1997).

Riwayat Profesi

Pernah menjabat berbagai posisi kunci di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI antara lain sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (2009), Direktur Peraturan Perpajakan I (2011), Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (2013), Direktur Ekstensifikasi dan Penilai (2015) dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I (2016), Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan RI (2016-2021).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: -

Di luar Perusahaan: Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (2021-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisariss lainnya maupun dengan Direksi. Awan Nurmawan Nuh memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham melalui rangkap jabatan di Kementerian Keuangan.

**Mariatul Aini**

Komisaris

Periode Jabatan: 19 Agustus 2019 s.d
18 Agustus 2024, Periode ke-2

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 58 tahun

Kelahiran Jakarta, 11 Oktober 1963

Domisili

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat pertama kali sebagai anggota Komisaris sejak tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 861/ KMK.06/2018 untuk masa jabatan sampai dengan 31 Desember 2019. Kemudian diangkat kembali berdasarkan KMK No. 720/ KMK.06/2019 untuk masa jabatan sampai dengan 19 Agustus 2024. Jabatan ini merupakan periode ke-1. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris PT PII.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi

Insinyur (S1) Bidang Ilmu Tanah dari Institut Pertanian Bogor (1987), dan *Master (S2) of Business Administration* dari University of Wisconsin, Amerika Serikat (1994).

Riwayat Profesi

Pernah menjabat berbagai posisi kunci di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI antara lain sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran (2011) dan Direktur Penerimaan negara Bukan Pajak (2018). Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (2021-sekarang).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Ketua Komite Audit

Di luar Perusahaan: Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (2021-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Mariatul Aini memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham melalui rangkap jabatan di Kementerian Keuangan.

**Wahyu Utomo**

Komisaris

Periode Jabatan: 20 April 2020 s.d

19 April 2025, Periode ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 57 tahun

Kelahiran Jakarta, 11 Februari 1964

Domisili

Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 20 April 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 205/KMK.06/2020 untuk masa jabatan sampai dengan 20 April 2025. Jabatan ini merupakan periode ke-1. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris PT PII.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi

Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1987), serta *Master (S2) of Science in Regional Science* (1999) dan *PhD (S3) in Regional Science* (2002), keduanya dari Cornell University, Amerika Serikat.

Riwayat Profesi

Saat ini menjabat sebagai deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2016-sekarang) dan Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (2016-sekarang) serta beberapa jabatan lainnya. Sebelumnya pernah menjabat berbagai posisi kunci di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, di antaranya Asisten Deputi Urusan Perumahan, Pertanahan dan Kerja sama Pemerintah Swasta (2007-2014), asisten deputi urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kalimantan-Sulawesi (2005-2007), serta Kepala Bidang Desentralisasi Ekonomi (2002-2005).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Ketua Komite Pemantau Risiko

Di luar Perusahaan: Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2016-sekarang), serta Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (2016-sekarang) dan beberapa jabatan lainnya

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Wahyu Utomo memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham melalui rangkap jabatan di Kementerian Keuangan.



SUSUNAN DAN PROFIL DIREKSI



Donny Hamdani
Direktur Keuangan

Muhammad Wahid Sutopo
Direktur Utama

Andre Permana
Direktur Bisnis

“Di tahun 2021 terdapat perubahan susunan Direksi”

Berdasarkan KMK No. 885/KMK.06/2017, masa jabatan Sdr. Salusra Satria sebagai anggota Direksi telah berakhir pada 16 Juli 2021. Maka dari itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/KOM/PII/07/2021 tanggal 15 Juli 2021, Dewan Komisaris menunjuk Sdr. M. Wahid Sutopo untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas Sementara Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022 tanggal 17 Januari 2022, Pemegang Saham memutuskan untuk mengangkat Donny Hamdani sebagai Direktur Keuangan.

KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DI SEPANJANG TAHUN 2021

Perubahan Direksi di Tahun 2021

Periode 1 Januari s.d 15 Juli 2021	Periode 16 Juli s.d 31 Desember 2021	Keterangan
Muhammad Wahid Sutopo (Direktur Utama)	Muhammad Wahid Sutopo (Direktur Utama)	-
Salusra Satria (Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek)	-	Masa jabatan Salusra Satria telah usai, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 885/KMK.06/2017
Andre Permana (Direktur Eksekutif Bisnis)	Andre Permana (Direktur Eksekutif Bisnis)	-

Susunan Direksi per 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019.	4 Desember 2017 s.d 3 Desember 2022	Ke-1
Andre Permana	Direktur Eksekutif Bisnis	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020.	23 Maret 2020 s.d 22 Maret 2025	Ke-1

Susunan Direksi per 31 Mei 2022

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019.	4 Desember 2017 s.d 3 Desember 2022	Ke-1
Andre Permana	Direktur Bisnis	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020.	23 Maret 2020 s.d 22 Maret 2025	Ke-1
Donny Hamdani	Direktur Keuangan	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022.	17 Januari 2022 s.d 16 Januari 2027	Ke-1

**Muhammad Wahid Sutopo**

Direktur Utama

Periode Jabatan: 4 Desember 2017 s.d

3 Desember 2022, Periode ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 52 tahun

Kelahiran Jakarta, 17 Juni 1969

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat pertama kali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 885/KMK.06/2017 dan dialih tugaskan menjadi Direktur Utama sejak tanggal 29 November 2019 berdasarkan KMK No. 890/KMK.06/2019 untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal 4 Desember 2017. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Dewan Komisaris menunjuk Sdr. M. Wahid Sutopo (Direktur Utama), untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek PT PII dengan kewajiban, tugas, dan kewenangan yang sama, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/KOM/PII/07/2021 tanggal 15 Juli 2021.

Dewan Komisaris menunjuk kembali Direktur Utama yaitu Sdr. M. Wahid Sutopo sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek sejak tanggal 15 Agustus 2021 dengan kewajiban, kewenangan dan hak yang sama dengan Direktur Utama

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi

Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1993), dan Magister (S2) Manajemen dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI Business School), Jakarta (2002).

Riwayat Profesi

Pernah menjabat berbagai posisi kunci antara lain sebagai direktur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (2011-2017), Komisaris Utama PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (2011-2017), Komisaris Utama PT PGN ING Indonesia (2015-2016) dan Direktur Eksekutif Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017-2019) sebelum diangkat sebagai Direktur Utama PT PII.

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Plt. Direktur Eks. Keuangan & Penilaian Proyek (16 Juli 2021 sd. 16 Januari 2022)

Di luar Perusahaan: -

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, dengan Direksi lainnya maupun dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham.

**Andre Permana**

Direktur Bisnis

Periode Jabatan: 23 Maret 2020 s.d

22 Maret 2025, Periode ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 45 tahun

Kelahiran Cirebon, 31 Januari 1976

Domisili

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 23 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020 untuk masa jabatan sampai dengan 5 tahun kedepan. Jabatan ini merupakan periode ke-1. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi PT PII.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi

Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil (1998) dan Magister (S2) Teknik bidang Manajemen Proyek (2003), keduanya dari Universitas Indonesia, PhD (S3) bidang Risk Management, Project Finance. dari Nanyang Technological University, Singapura (2012).

Riwayat Profesi

Melanjutkan profesi sebelumnya yang terkait bidang konstruksi dan pengembangan proyek infrastruktur, karier profesional di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dimulai pada tahun 2010 dan pernah menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Divisi *Risk and Compliance*, Kepala Divisi *Business Development*, CEO Office dan terakhir kali menjabat sebagai *Executive Vice President Project Appraisal* sebelum diangkat sebagai Direktur PT PII.

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: -

Di luar Perusahaan: -

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, dengan Direksi lainnya maupun dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham.

**Donny Hamdani**

Direktur Keuangan

Periode Jabatan: 17 Januari 2022 s.d

16 Januari 2027, Periode ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 43 tahun

Kelahiran Jakarta, 23 September 1978

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022 untuk masa jabatan sampai dengan 5 tahun kedepan. Jabatan ini merupakan periode ke-1. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi PT PII.

Pada tahun 2021 menjabat sebagai Deputy Direktur Keuangan.

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (2000)

Riwayat Profesi

Merintis karir sebagai auditor selama 11 tahun di KAP Tanudiredja Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers). Kemudian pertama kali bergabung dengan PT PII pada tahun 2012 dan pernah menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai *Executive Vice President Corporate Strategy and Finance* dan terakhir kali menjabat sebagai Deputy Direktur Keuangan sebelum diangkat sebagai Direktur.

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: -

Di luar Perusahaan: -

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan Direksi lainnya maupun dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham.

PROFIL DEPUTI DIREKTUR



Tanti Hidayati
Deputi Direktur Bidang I

Usia	49 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Depok, Jawa Barat, Indonesia
Latar Belakang Pendidikan	Sarjana (S1) Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (1991 – 1995)



DEMOGRAFI KARYAWAN

Hingga periode 31 Desember 2021, jumlah karyawan PT PII adalah sebanyak 143 orang dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 130 orang. Dengan komposisi sebanyak 131 orang karyawan tetap dan sebanyak 12 karyawan tidak tetap. Jumlah karyawan pada tahun 2021 telah menyesuaikan kebutuhan Perusahaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi yang dimiliki dan dibutuhkan PT PII. Rincian jumlah karyawan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Jumlah Karyawan 2017-2021

(orang)



Jumlah Karyawan Berdasarkan Work Level (orang)

Work Level	2021				2020				Kenaikan (Penurunan)	
	L	P	Jumlah	Komposisi	L	P	Jumlah	Komposisi	Orang	%
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
Deputy Director	1	1	2	0,7%	1	1	2	1,5%	-	-
Executive leader	3	1	4	2,8%	3	1	4	3,1%	-	-
Senior leader	21	9	30	21,3%	17	10	27	20,8%	3	11,1%
Middle level	31	19	50	34,8%	30	14	44	33,8%	6	13,6%
Staff	23	34	57	40,4%	20	33	53	40,8%	4	7,5%
Jumlah	79	64	143	100,0%	71	59	130	100,0%	13	10,0%

L = Laki-laki / P = Perempuan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan (orang)

Level Jabatan	2021				2020				Kenaikan (Penurunan)	
	L	P	Jumlah	Komposisi	L	P	Jumlah	Komposisi	Orang	%
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
EVP	4	2	6	3,5%	4	2	6	4,6%	-	-
VP SVP	21	9	30	21,3%	17	10	27	20,8%	3	11,1%
DSM AVP	18	7	25	17,7%	17	7	24	18,5%	1	4,2%
AM-M	24	31	55	38,3%	22	24	46	35,4%	9	19,6%
Staff	12	15	27	19,2%	11	16	27	20,7%	-	-
Jumlah	79	64	143	100,0%	71	59	130	100,0%	13	10,0%

L = Laki-laki / P = Perempuan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)

Tingkat Pendidikan	2021				2020				Kenaikan (Penurunan)	
	L	P	Jumlah	Komposisi	L	P	Jumlah	Komposisi	Orang	%
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
Doktoral	3	-	3	2,1%	3	-	3	2,3%	-	-
Pasca Sarjana	38	12	50	35,5%	39	12	51	39,2%	(1)	-2,0%
Sarjana	37	48	85	59,4%	28	43	71	54,7%	14	19,7%
Diploma	1	4	5	3,5%	1	4	5	3,8%	-	-
Jumlah	79	64	143	100,0%	71	59	130	100,0%	13	10,0%

L = Laki-laki / P = Perempuan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)

Status Kepegawaian	2021				2020				Kenaikan (Penurunan)	
	L	P	Jumlah	Komposisi	L	P	Jumlah	Komposisi	Orang	%
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
Tetap	73	58	131	91,6%	61	54	112	86,2%	19	15,2%
Tidak Tetap	6	6	12	8,4 %	10	5	18	13,8%	(6)	-33,3%
Jumlah	79	64	143	100,0%	71	59	130	100,0%	10	10,0%

L = Laki-laki / P = Perempuan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (orang)

Rentang Usia	2021				2020				Kenaikan (Penurunan)	
	L	P	Jumlah	Komposisi	L	P	Jumlah	Komposisi	Orang	%
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
41 – 56 Tahun	23	8	31	21,3%	20	8	28	21,5%	3	10,7%
31 – 40 Tahun	42	33	75	52,5%	32	22	54	41,5%	21	38,9%
20 – 30 Tahun	14	23	37	26,2%	19	29	48	38%	(11)	-22,9%
Jumlah	79	64	143	100,0%	71	59	130	100,0%	13	10,0%

L = Laki-laki / P = Perempuan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin (orang)

Jenis Kelamin	2021		2020		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah	Komposisi	Jumlah	Komposisi	Orang	%
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Laki-laki	79	55,3%	71	54,6%	8	11,3%
Perempuan	64	44,7%	59	45,4%	5	8,5%
Jumlah	143	100,0%	130	100,0%	13	10,0%

“Lebih lanjut tentang pengelolaan SDM dan ketenagakerjaan oleh Perusahaan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.”



INFORMASI PEMEGANG SAHAM

Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2021 adalah 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
Negara Republik Indonesia	9.570.000 lembar	100%



100%



PENJAMINAN & INFRASTRUKTUR
Guarantee & Infrastructure

Negara Republik Indonesia

Kepemilikan Saham PT PII 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, oleh karena itu hanya terdapat 1 (satu) pemegang saham yang memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih, yakni Negara Republik Indonesia. Tidak terdapat Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, maupun pihak manapun yang memiliki saham Perusahaan, baik kepemilikan langsung maupun kepemilikan tidak langsung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kementerian Keuangan Republik Indonesia (sebagai Pemegang Saham PT PII).

Pemerintah Republik Indonesia / Kepresidenan	Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara No.3 RT.2/RW.3, Kel. Gambir Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, Indonesia
	Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 3845627 www.setneg.go.id
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Sebagai Pemegang Saham PT PII)	Kantor Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1; Jakarta Pusat 10710; Jakarta, Indonesia Telp. (62-21) 3808388, 3814324 Fax. (62-21) 3500842 Website : http://www.depkeu.go.id

INFORMASI TENTANG STRUKTUR GRUP/KELOMPOK USAHA SERTA ENTITAS ANAK/ENTITAS ASOSIASI/PERUSAHAAN PATUNGAN/SPECIAL PURPOSE VEHICLE

Hingga 31 Desember 2021, Perusahaan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, entitas Pengendalian Bersama, perusahaan patungan atau *Joint Venture Company* (JV), maupun *Special Purpose Vehicle* (SPV). Dengan demikian, Perusahaan tidak memiliki struktur grup/kelompok usaha.

INFORMASI TENTANG PENCATATAN SAHAM SERTA PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI/EFEK LAINNYA

PT PII tidak melakukan penawaran umum saham dan tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek mana pun. Hingga 31 Desember 2021, PT PII belum pernah menerbitkan efek dalam bentuk apa pun yang diperdagangkan di bursa mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Biro Administrasi Publik

PT PII per 31 Desember 2021 tidak menerbitkan saham di Bursa Efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai Biro Administrasi Publik.

Perusahaan Pemeringkat Efek

PT PII per 31 Desember 2021 tidak menerbitkan saham di Bursa Efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai Perusahaan Pemeringkat Efek.

Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)

Konsultan Hukum

Nengah Sujana & Rekan

Notaris

Arry Supratno, S.H.

Irma Devita, S.H., M.Kn.



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

PT PII memiliki situs web korporasi dengan alamat www.ptpii.co.id yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. PT PII membuat situs web tersebut sesuai dengan kebutuhan Perusahaan yang memuat informasi penting antara lain mengenai informasi pemegang saham, Kode Etik, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Laporan Tahunan, Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite, dan Satuan Pengawasan Internal. Khusus mengenai RUPS, informasi yang disajikan di situs web meliputi mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS. Situs web PT PII juga dapat ditampilkan dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Situs Perusahaan dibagi menjadi 10 bagian besar yang terdiri dari:

1. Tentang Kami
2. Tata Kelola Perusahaan
3. Whistleblowing
4. Produk
5. Berita
6. e-Procurement
7. Proyek
8. Manajemen Risiko
9. Keberlanjutan
10. IIGF Institute

Selain itu, situs Perusahaan juga memuat informasi-informasi lain yang dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan mengenai informasi yang terkait bisnis Perusahaan. Situs Perusahaan juga memuat informasi-informasi lain yang dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan mengenai informasi yang terkait bisnis PT PII. Informasi-informasi yang disajikan dalam situs diperbaharui secara berkala.

Uraian	Ketersediaan	Keterangan
Struktur grup Perusahaan dan informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	v	Ada, terdapat pada menu "Tentang PT PII"
Isi Kode Etik	v	Ada, terdapat pada menu "Manual Kebijakan Perusahaan"
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	v	Ada, terdapat pada menu "Berita dan Publikasi"
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir)	v	Ada, terdapat pada menu "Berita dan Publikasi"
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	v	Ada, terdapat pada menu "Tentang PT PII"
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	v	Ada, terdapat pada menu "Manual Kebijakan Perusahaan"

v = tersedia pada situs Perusahaan | x = belum tersedia pada situs web Perusahaan

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Dewan Komisaris sesuai Pedoman Dewan Komisaris dan *Board Manual* Perseroan melaksanakan program pelatihan yang difokuskan terutama pada aspek finansial, pengelolaan risiko, teknologi informasi, *Good Corporate Governance* dan materi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Pada tahun 2021, program pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

DATA PELAKSANAAN PELATIHAN	
Nama	Awan Nurmawan Nuh
Jabatan	Komisaris Utama
Diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan program pelatihan	
1. Webinar “Hari Anti Korupsi Sedunia”	
Penyelenggara Pelatihan	Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Hari / Tanggal Pelaksanaan	Rabu 8 Desember 2021
Lokasi Pelaksanaan	Zoom Clouds Meetings
Biaya Pelatihan	-
Poin-Poin Materi	1. Sudut pandang psikologi, sosial, pengaruh sistem, dan kebijakan mengenai korupsi 2. Penyebab korupsi, pentingnya integritas dan sistem pencegahan korupsi
DATA PELAKSANAAN PELATIHAN	
Nama	Wahyu Utomo
Jabatan	Komisaris
Diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan program pelatihan	
1. Webinar Forum Governance, Risk, and Compliance (GRC)	
Penyelenggara Pelatihan	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Hari / Tanggal Pelaksanaan	16 Desember 2021
Lokasi Pelaksanaan	Zoom Clouds Meetings
Biaya Pelatihan	-
Poin-Poin Materi	1. Peran GRC dalam transformasi Perusahaan 2. <i>Lesson to learn</i> dari keberhasilan dan kegagalan transformasi pada organisasi 3. Menilai dan meningkatkan efektivitas GRC secara berkelanjutan 4. <i>Key success factor</i> dalam implementasi GRC 5. Strategi bisnis dan GRC yang diterapkan untuk menghadapi tantangan 6. <i>Key success factor</i> dalam pelaksanaan Transformasi
2. Sharing Knowledge : Cybersecurity Awareness 2021	
Penyelenggara Pelatihan	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Hari / Tanggal Pelaksanaan	29 Maret 2021
Lokasi Pelaksanaan	Zoom Clouds Meetings
Biaya Pelatihan	-
Poin-Poin Materi	1. peningkatan <i>cyber security awareness</i> 2. perlindungan sensitivitas data 3. strategi menghindari ancaman <i>identity theft</i>



DATA PELAKSANAAN PELATIHAN

Nama	Mariatul Aini
Jabatan	Komisaris
Diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan program pelatihan	
1. Sharing Knowledge : Cybersecurity Awareness 2021	
Penyelenggara Pelatihan	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Hari / Tanggal Pelaksanaan	29 Maret 2021
Lokasi Pelaksanaan	Zoom Clouds Meetings
Biaya Pelatihan	-
Poin-Poin Materi	1. peningkatan <i>cyber security awareness</i> 2. perlindungan sensitivitas data 3. strategi menghindari ancaman <i>identity theft</i>
2. Webinar Forum Governance, Risk, and Compliance (GRC)	
Penyelenggara Pelatihan	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Hari / Tanggal Pelaksanaan	16 Desember 2021
Lokasi Pelaksanaan	Zoom Clouds Meetings
Biaya Pelatihan	-
Poin-Poin Materi	1. Peran GRC dalam transformasi Perusahaan 2. <i>Lesson to learn</i> dari keberhasilan dan kegagalan transformasi pada organisasi 3. Menilai dan meningkatkan efektivitas GRC secara berkelanjutan 4. <i>Key success factor</i> dalam implementasi GRC 5. Strategi bisnis dan GRC yang diterapkan untuk menghadapi tantangan 6. <i>Key success factor</i> dalam pelaksanaan Transformasi

Agenda Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2021

No.	Nama	Pelatihan Dalam Negeri	Pelatihan Luar Negeri
1	Awan NurmawanNuh	1. Webinar Hari Anti Korupsi Sedunia Organizer : PII Waktu : Q3	1. Southeast Asia Symposium on Domestic Resources Mobilization for COVID-19 Economy Recovery Organizer : Asian Development Bank Waktu : Q3
2	Wahyu Utomo	1. Webinar <i>Forum Governance, Risk, and Compliance (GRC)</i> Organizer : PII Waktu : Q4	1. The IIA's 2021 International Conference Organizer : IIA Waktu : Q3
3	MariatulAini	1. Sharing Knowledge : Cybersecurity Awareness 2021. Organizer : PII Waktu : Q2 2. Webinar <i>Forum Governance, Risk, and Compliance (GRC)</i> Organizer : PII Waktu : Q4	1. The IIA's 2021 International Conference Organizer : IIA Waktu : Q3

PELATIHAN DIREKSI

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Direksi sesuai *Board Manual* Perseroan, Direksi melaksanakan program pelatihan yang difokuskan terutama pada aspek finansial, pengelolaan risiko, teknologi informasi, *Good Corporate Governance* dan materi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Pada tahun 2021, program pelatihan yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut:

DATA PELAKSANAAN PELATIHAN	
Nama	M. Wahid Sutopo
Jabatan	Direktur Utama
Diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan program pelatihan	
1. Webinar “Peran BUMN Dalam Transformasi Digital UMKM Dan Penyediaan Infrastruktur Di Era Revolusi Industri 4.0”	
Penyelenggara Pelatihan	Universitas Padjadjaran
Hari/Tanggal Pelaksanaan	3 Februari 2021
Lokasi Pelaksanaan	Online
Biaya Pelatihan	-
Poin -poin Materi	a. Pembangunan Infrastruktur di Indonesia b. Tantangan Pembangunan Infrastruktur c. Strategi Pembangunan Infrastruktur d. Perkembangan Infrastruktur di era evolusi industry 4.0 e. Tantangan Industri konstruksi dalam industry 4.0
2. Time to embrace ESG and Sustainable Finance - Are you late to the party? (APAC)	
Penyelenggara Pelatihan	PricewaterhouseCoopers
Hari / Tanggal Pelaksanaan	3 Maret 2021
Lokasi Pelaksanaan	Online
Biaya Pelatihan	-
	a. Why ESG and Sustainable Finance? And why now more than ever - are you late to the party b. What do we mean by 'Net Zero' within financial services and what are some of the challenges the industry faces as it moves towards being either net zero or carbon neutral c. What are some of the key compliance considerations and requirements d. What do these changes mean for your strategy, your risk management framework and your operations e. What are some of the key considerations and practical steps which businesses should take as they integrate ESG and sustainable finance throughout the organisation f. Where are we seeing clients focus their immediate and medium/longer term efforts on ESG
3. Global Infrastructure Investment Forum 2021	
Penyelenggara Pelatihan	GIIF
Hari / Tanggal Pelaksanaan	28 – 29 Juli 2021
Lokasi Pelaksanaan	Online
Biaya Pelatihan	-
Poin-Poin Materi	a. Re-establishing the New Capital City “A Combination Modern and Indonesian Culture” b. Covid-19 as A Lesson Learned for Re-establishing the New Capital City c. Indonesia Future Infrastructure Development and Urbanization Strategy Post Covid-19, “The Role of Private Sectors and International Financial Providers” d. Redesigning Indonesia Infrastructure Development “A Combination of Current Pandemic Outbreak, A Rapid Technology Movement, and IoT” e. Redesigning Indonesia Infrastructure Development of Green Energy



DATA PELAKSANAAN PELATIHAN

4. The Role of Credit and Political Risk Insurance in Resource Mobilization in the Post COVID-19 Era

Penyelenggara Pelatihan	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)
Hari / Tanggal Pelaksanaan	19 Agustus 2021
Lokasi Pelaksanaan	Online
Biaya Pelatihan	-
Poin-Poin Materi	a. To showcase the credit and political insurance (CPRI) solutions offered by ICIEC and how they can enable recovery efforts, including vaccines procurement assistance for MCs b. To demonstrate the relative fiscal and budgetary convenience of utilizing the CPRI MCs for trade and investments projects c. To highlight the opportunities that exist in the member countries d. To showcase some of the innovative structures and initiatives adopted by ICIEC and their partners to unlock resources and support member countries during the COVID 19 PANDEMIC e. To re-emphasize the role of partnership among various development players and the private sector

DATA PELAKSANAAN PELATIHAN

Nama	Andre Permana
Jabatan	Direktur Eksekutif Bisnis
Diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan program pelatihan	
1. WAPPP Annual Congress: Next Level PPP	
Penyelenggara Pelatihan	WAPPP Annual Congress Coordinators
Hari / Tanggal Pelaksanaan	16 Juni 2021
Lokasi Pelaksanaan	Online
Biaya Pelatihan	-
Poin-Poin Materi	a. Peran PT PII sebagai Single Window untuk Sovereign Guarantee, PPP Center of Knowledge dan Infrastructure Hub yang dapat mempercepat penyediaan infrastruktur di Indonesia b. Tranformasi yang dilakukan untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi serta kesiapan PT PII untuk mendukung pemulihan c. Project pipeline
2. Workshop pengembangan Talent Tahun 2021	
Penyelenggara Pelatihan	Kementerian Keuangan
Hari / Tanggal Pelaksanaan	10 September 2021
Lokasi Pelaksanaan	Online
Biaya Pelatihan	-
Poin-Poin Materi	a. Pembekalan Materi Keuangan Negara Melalui Pembelajaran Jarak Jauh b. Workshop Pengembangan Talent c. E-Learning Cross Function d. Pengembangan Kompetensi Teknis e. Secondment pada Unit Kepatuhan Internal (UKI)

DATA PELAKSANAAN PELATIHAN

3. Webinar "Indonesia's Toll Road Infrastructure Competitiveness in Global Perspective"

Penyelenggara Pelatihan	Bisnis Indonesia
Hari / Tanggal Pelaksanaan	8 Desember 2021
Lokasi Pelaksanaan	Online
Biaya Pelatihan	-
Poin-Poin Materi	The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) targets the addition of Indonesia's toll roads to reach 5,103 kilometers by 2024. Ministry of Public Works and Public Housing also encourages all Toll Road Business Entities (BUJT) to build sustainable and strategic toll roads by 2024. In order to achieve that target, PUPR Ministry annually assesses sustainable toll roads as an effort for transformation, innovation, and toll road modernization.

4. Seminar Nasional Ekonomi Islam "Peran Pembiayaan Infrastruktur Syariah dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)"

Penyelenggara Pelatihan	IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) Indonesia
Hari / Tanggal Pelaksanaan	9 Desember 2021
Lokasi Pelaksanaan	Online
Biaya Pelatihan	-
Poin-Poin Materi	a. Peluang Pembiayaan Syariah Mendukung Pembangunan Infrastruktur dalam Pencapaian SDGs b. Inovasi Pembiayaan Perumahan Syariah untuk Mendukung Pembangunan Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan c. Inovasi Pembiayaan Syariah dalam Mendukung Kebijakan Fiskal Berkelanjutan: Perspektif Sejarah dan Modern

DATA PELAKSANAAN PELATIHAN

Nama	Donny Hamdani
Jabatan	Direktur Keuangan

Diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan program pelatihan

1. Sharing Knowledge : Cybersecurity Awareness 2021

Penyelenggara Pelatihan	PT PII
Hari / Tanggal Pelaksanaan	29 Maret 2021
Lokasi Pelaksanaan	Online
Biaya Pelatihan	-
Poin-Poin Materi	a. Pemahaman ancaman-ancaman (threats) yang ada di dunia cyber dan penggunaan teknologi b. Pembekalan sikap-sikap yang harus dibiasakan dalam menggunakan teknologi untuk menjaga keamanan data

2. ISO 37001 - SMAP

Penyelenggara Pelatihan	Risk Management PT PII
Hari / Tanggal Pelaksanaan	7 Juni 2021
Lokasi Pelaksanaan	Online
Biaya Pelatihan	-
Poin-Poin Materi	a. Pemahaman jenis dan tujuan audit berdasarkan ISO 37001 b. Materi pengelolaan internal audit yang efektif dan sistematis

04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

“ Di tengah kondisi yang masih diliputi tantangan, PT PII terus berupaya menjaga momentum pertumbuhannya yang terlihat dari laba bersih yang tetap tumbuh. ”







TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

KONDISI EKONOMI POLITIK GLOBAL

Perekonomian global mulai membaik pada tahun 2021 meski pandemi COVID-19 dengan berbagai varian masih melanda dunia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 5,9% dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai minus 3,1%. Beberapa faktor yang mempengaruhi ekonomi global adalah faktor disrupsi rantai pasok, lonjakan harga minyak, gas alam dan batubara, risiko inflasi, volatilitas pasar keuangan, serta masih berkembangnya varian baru COVID-19 yang diimbangi dengan vaksinasi COVID-19 yang menjadi *game changer* perekonomian global pada tahun 2021.

Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi negara maju mencapai 5,0% dibandingkan tahun 2020 yang bahkan tercatat sebesar minus 4,5%. Sementara pertumbuhan ekonomi negara berkembang tumbuh 6,5% dibandingkan tahun 2020 yaitu minus 2,1%. Jika dilihat lebih rinci, di tahun 2021 Amerika Serikat (AS) memiliki pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6%, Inggris mencapai 7,2%, dan Tiongkok sebesar 8,1%.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 mengalami perbaikan yakni 3,7% dibanding tahun lalu yang hanya mencapai minus 2,1%. Pada triwulan I 2021 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 0,7% namun langsung tumbuh pesat pada triwulan II yang mencapai 7,1%, kemudian terkoreksi lagi menjadi 3,5% pada triwulan III, dan kembali tumbuh 5,0% pada triwulan IV 2021.

Selain pertumbuhan ekonomi, beberapa asumsi dasar ekonomi makro tahun 2021 juga defiasi. Nilai tukar Rupiah mencapai Rp14.312 per Dolar AS dari asumsi awal Rp14.600 per Dolar AS; inflasi mencapai 1,9%, lebih rendah dari perkiraan di level 3,0%; dan tingkat suku bunga di kisaran 6,4%, lebih rendah dari asumsi awal 7,3%. Di sisi lain, harga minyak meningkat menjadi USD68,5 per barel karena *booming* komoditas dan cukup tinggi dibandingkan target USD45 per barel, sementara *lifting* minyak mencapai 662 ribu barel dari target 705 ribu barel, serta *lifting* gas 982 ribu barel dari target 1.007 ribu barel.

Walaupun belum sesuai dengan asumsi dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, seluruh kinerja ekonomi tahun 2021 menunjukkan penguatan dalam pemulihan ekonomi karena keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh Pemerintah Indonesia, serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu, Pemerintah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dan melakukan vaksinasi massal. Diperkirakan Indonesia kembali masuk ke dalam kelompok *Upper-Middle Income Countries* pada tahun 2021.

INDUSTRI KONSTRUKSI DAN INFRASTRUKTUR NASIONAL TAHUN 2021

Tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional meskipun pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia dengan berbagai varian. Dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021, sektor infrastruktur memiliki anggaran yang cukup tinggi yaitu Rp417,4 triliun, meningkat 48,4% dibandingkan tahun 2020. Pada realisasinya, belanja infrastruktur nasional di tahun 2021 mencapai Rp402,8 triliun atau 96,5% dari total anggaran. Tingginya angka belanja ini terutama disebabkan mulai menggeliatnya pembangunan infrastruktur dan vaksinasi yang meningkatkan optimisme dalam pemulihan ekonomi nasional.

Beberapa kebijakan dari Pemerintah terkait kebijakan pembangunan infrastruktur yaitu tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pasca pandemi COVID-19 melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas, fokus dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, dan permukiman) untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional, dan penyelesaian kegiatan prioritas 2020 yang tertunda.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Sejak pendiriannya pada Desember 2009, PT PII telah mendapatkan beberapa kali perluasan mandat serta penambahan penugasan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, melalui penyediaan jaminan yang dilakukan dengan proses yang akuntabel, transparan dan kredibel. Pada Tahun 2020, untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penjaminan Pemerintah yang semakin meningkat serta dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai akibat pandemi COVID-19, Pemerintah kembali memberikan perluasan mandat kepada PT PII melalui PP 55/2020. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka PT PII diberikan mandat untuk memberikan Penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional, serta untuk memberikan penjaminan Pemerintah dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

Sejalan dengan perluasan mandat dalam Anggaran Dasar dan penugasan Pemerintah kepada PT PII, pada tahun 2020 PT PII membagi bisnis Perusahaan ke dalam 4 (empat) segmen usaha, yaitu (1) Segmen Usaha Penjaminan Proyek Infrastruktur; (2) Segmen Usaha Pengelolaan Dana; (3) Segmen Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi/*Project Development Facility (PDF)*; dan (4) Segmen Usaha Penjaminan Korporasi Padat Karya.

Dalam Laporan Keuangannya, PT PII belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 tentang Segmen Operasi. Untuk dapat memberikan gambaran tentang operasi dan bisnis Perusahaan, penjelasan segmen dibagi berdasarkan struktur pendapatan, yang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu pendapatan Penjaminan; Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi; serta Pengelolaan Dana.

Segmen PT PII



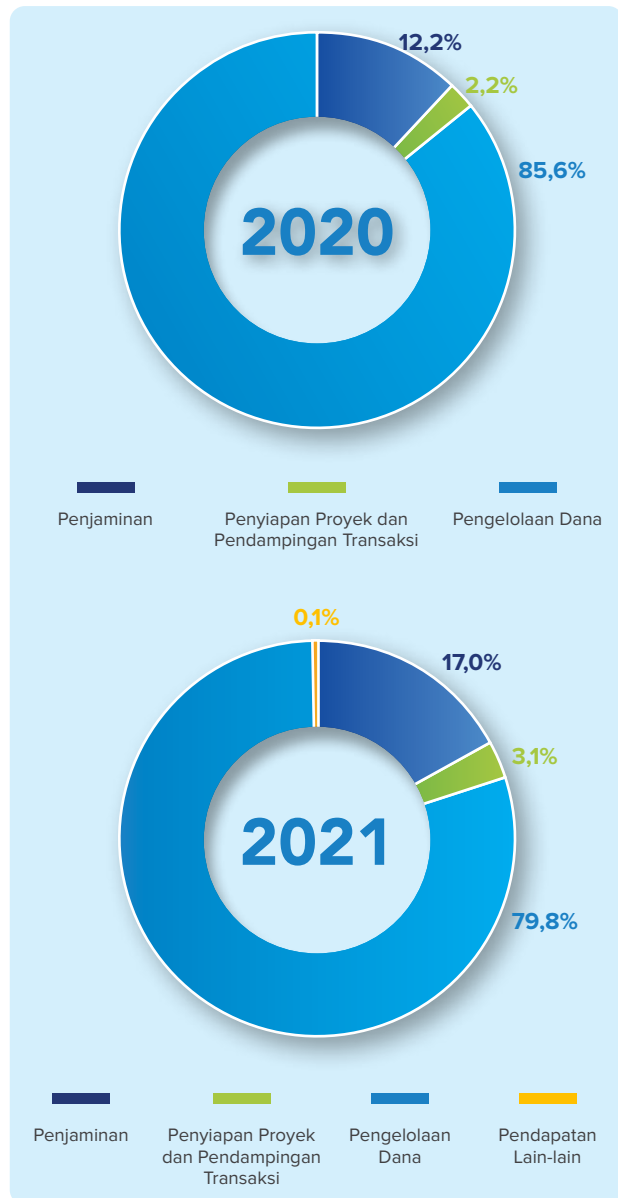
Untuk dapat memberikan gambaran awal tentang skala bisnis masing-masing segmen dan kontribusinya terhadap Perusahaan, berikut disampaikan struktur pendapatan yang menggambarkan masing-masing segmen.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Terhadap Pendapatan

Pendapatan	2021		2020		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Penjaminan	156.529	17,0%	121.456	12,2%	35.073	28,9%
Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi	29.172	3,1%	21.922	2,2%	7.250	33,1%
Pengelolaan Dana	735.871	79,8%	854.733	85,6%	(118.862)	-13,9%
Pendapatan Lain-lain	935	0,1%	-	-	935	100,0%
Jumlah Pendapatan	922.507	100,0%	998.111	100,0%	(75.604)	-7,6%



Komposisi Pendapatan Segmen Terhadap Jumlah Pendapatan



Dari tabel dan bagan di atas, terlihat bahwa pendapatan Pengelolaan Dana merupakan segmen utama PT PII dengan kontribusi mencapai 85,6% di tahun 2020 dan 79,8% di tahun 2021 terhadap pendapatan. Meskipun demikian, segmen Penjaminan merupakan bisnis inti PT PII.

Kinerja dari masing-masing segmen usaha tersebut dijabarkan pada pembahasan berikut.

SEGMENT PENJAMINAN

Segmen Penjaminan terdiri dari 2 (dua) kelompok besar kegiatan usaha, yaitu Penjaminan Infrastruktur yang terbagi ke dalam Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan Non KPBU; serta Penjaminan Non Infrastruktur yang terbagi ke dalam Penjaminan Pelaku Usaha Korporasi dan Penjaminan BUMN.

Berikut disampaikan masing-masing kegiatan usaha serta profitabilitas segmen Penjaminan.

Penjaminan Infrastruktur

Kegiatan Operasi dan Usaha Penjaminan Infrastruktur

PT PII bergerak dalam usaha pemberian penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan PP 38/2015. Penerapan KPBU dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui partisipasi pihak swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan investor dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

Pemerintah menugaskan PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk menjalankan kebijakan satu pelaksana (*Single Window Policy*) bagi Pemerintah dalam mengevaluasi proyek infrastruktur, melaksanakan penjaminan dan memproses klaim. Dalam pelaksanaan penjaminan, PT PII terlibat aktif dalam melakukan pemantauan proyek melalui *Joint Monitoring Committee (JMC)*/Tim Pemantauan Bersama dengan para pemangku kepentingan seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan dan kementerian teknis, terutama untuk memantau risiko-risiko proyek yang dialokasikan kepada PJPK. Selain itu, PT PII juga secara rutin mengadakan rapat atau mengirimkan hasil pemantauan proyek kepada PJPK atau perwakilannya sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko proyek.

PT PII bersama para *stakeholders* lain secara aktif melakukan pemantauan terhadap risiko proyek yang menimbulkan kewajiban finansial bagi PJPK, misalnya risiko penyerapan air curah oleh PDAM pada proyek SPAM Umbulan dan SPAM Kota Bandar Lampung dikarenakan keterlambatan pembangunan jaringan distribusi, risiko keterlambatan pengadaan tanah pada proyek jalan tol dikarenakan belum dapat diserahkannya tanah dari Pemerintah kepada Badan Usaha secara 100% pada batas waktu yang telah ditentukan, maupun kemungkinan adanya risiko politik pada proyek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2 Tahun 2020, terdapat 20 sektor proyek infrastruktur dengan skema KPBU yang dapat diberikan penjaminan oleh PT PII, yaitu:



Untuk memperkuat peran PT PII dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, PT PII mendapatkan perluasan mandat melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009. Dengan perluasan mandat tersebut, penjaminan pemerintah yang dilaksanakan oleh PT PII tidak lagi terbatas pada proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU. Perluasan mandat tersebut kemudian didukung dengan terbitnya PMK 101/2018 yang mulai berlaku di tahun 2018.

Penjaminan Proyek Baru

Pada tahun 2021 PT PII telah menambah 7 proyek baru yang mencapai tahap penandatanganan Perjanjian Penjaminan. Dengan demikian hingga tahun 2021 PT PII telah memberikan penjaminan untuk 37 proyek infrastruktur pada 6 sektor, meliputi:

1. Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali;
2. SPAM Regional Jatiluhur I;
3. Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau;
4. SPAM Regional Karian Serpong;
5. Penjaminan Pemerintah atas Obligasi III Tahun 2021 PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional;



6. Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
7. Jembatan *Callender Hamilton*.

Kapasitas Penjaminan

Perusahaan menyadari bahwa kemampuan modal sangat menentukan kapasitas untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek KPBU infrastruktur. Kecukupan atas kapasitas penjaminan menjadi prioritas bagi Pemerintah karena berpengaruh terhadap kredibilitas PT PII di mata investor potensial dalam pengembangan proyek infrastruktur. Kapasitas PT PII untuk melakukan penjaminan proyek-proyek infrastruktur masih sepenuhnya mengandalkan ekuitas Perusahaan berupa PMN yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disetor penuh ke dalam modal dasar Perusahaan sebesar Rp8,00 triliun untuk penjaminan proyek infrastruktur. Sederetan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) telah disuntikkan oleh Pemerintah RI ke dalam struktur permodalan PT PII guna memperkuat kapasitas penjaminan PT PII, dengan rincian sebagai berikut:

Referensi	Jumlah Modal Disetor	Akumulasi Modal PT PII	Modal Dasar
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009	Rp1 triliun	Rp1 triliun	Rp4 triliun
Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2010	Rp1 triliun	Rp2 triliun	Rp4 triliun
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2011	Rp1,5 triliun	Rp3,5 triliun	Rp4 triliun
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2012	Rp1 triliun	Rp4,5 triliun	Rp9 triliun*
Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2015	Rp1,5 triliun	Rp6 triliun	Rp9 triliun
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2017	Rp1 triliun	Rp8 triliun	Rp9 triliun
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2020	Rp1,57 triliun	Rp9,57 triliun	Rp20 triliun

*) Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Aryanti Artisari, SH, MKn No. 145 tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp9 triliun

Seiring berjalannya waktu, sesuai amanat dalam Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ("PP 78/2010"), PT PII secara bertahap mengurangi ketergantungan kepada APBN dalam meningkatkan kapasitas penjaminan, yaitu melalui kerja sama dengan institusi penjaminan lainnya, Lembaga Multilateral, dan Institusi Bilateral dengan tujuan sejenis. Diskusi intensif terus dilakukan bersama mitra terkait, termasuk penyusunan kerangka penyediaan dukungan dan penjaminan bersama Pemerintah yang lebih terintegrasi.

Untuk memperbaiki struktur modal dan meningkatkan kapasitas PT PII dalam rangka mendukung program PEN serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan Pemerintah kepada PT PII, pada tahun 2020 Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham PT PII melalui KMK 497/2020 menyetujui peningkatan modal dasar PT PII menjadi Rp20 triliun. Kemudian pada 30 Desember 2020, Pemerintah melakukan penambahan PMN kepada PT PII sebesar Rp1,6 triliun berdasarkan PP 79/2020.

Sampai dengan akhir tahun 2021, PT PII telah menjamin 37 proyek dengan estimasi nilai proyek sebesar Rp357,7 triliun yang terdiri dari penjaminan KPBU & Non KPBU sebesar Rp342 triliun, penjaminan BUMN PEN sebesar Rp9,8 triliun, dan penjaminan Korporasi PEN sebesar Rp5,9 triliun. Eksposur penjaminan atas proyek yang dijamin oleh PT PII ialah sebesar Rp83,3 triliun yang terdiri dari Eksposur KPBU & Non KPBU sebesar Rp75,6 triliun, Eksposur BUMN PEN sebesar Rp3,3 triliun, eksposur Korporasi PEN sebesar Rp4,4 triliun. Nilai ekuitas PT PII per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13,8 triliun. Dengan demikian, rasio nilai penjaminan terhadap ekuitas PT PII (*gearing ratio*) dengan tidak memperhitungkan PMN sehubungan dengan pelaksanaan penugasan PEN adalah 6,19 kali.

Ringkasan Status Proyek Penjaminan

No.	Nama Proyek	Uraian	Nilai Proyek (Rp-miliar)	Durasi Penjaminan (setelah COD)
1	Central Java Power Plant	Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara dengan kapasitas 2x1000 MW yang terletak di Desa Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	61.456	21 tahun

No.	Nama Proyek	Uraian	Nilai Proyek (Rp-miliar)	Durasi Penjaminan (setelah COD)
2	Palapa Ring Paket Barat	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian barat Indonesia yang berada di 5 Kabupaten/Kota dengan panjang kabel laut 1.711 km dan kabel darat 427 km	1.229	12 tahun
3	Palapa Ring Paket Tengah	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian tengah Indonesia yang berada di 17 kabupaten/kota dengan panjang kabel laut 1.797 km, kabel darat 1.289 km dan 7 tower	1.093	12 tahun
4	Palapa Ring Paket Timur	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian timur Indonesia yang berada di 35 Kabupaten/Kota dengan panjang kabel laut 4.508 km, kabel darat 2.379 km dan 52 tower	5.088	12 tahun
5	Jalan Tol Batang-Semarang	Terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan panjang 75 km	13.968	15 tahun
6	Jalan Tol Pandaan-Malang	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan panjang 38,48 km	6.359	15 tahun
7	Jalan Tol Manado-Bitung	Terletak di Provinsi Sulawesi Utara dengan panjang 39 km	4.948	15 tahun
8	Jalan Tol Balikpapan- Samarinda	Terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang total 97,99 km	11.889	15 tahun
9	SPAM Umbulan	Proyek penyediaan air minum dengan kapasitas air 4.000 l/ detik dan panjang pipa transmisi 92,3 km dari Umbulan ke Kab Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab Gresik	2.057	15 tahun
10	Proyek Jalan Tol Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (Jakarta - Cikampek II Elevated)	Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 36,4 km	16.233	15 tahun
11	Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan	Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 60,1 km	8.409	15 tahun
12	Jalan Tol Krian-Legundi- Bunder-Manyar	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan total panjang 38,3 km	12.930	15 tahun
13	Jalan Tol Serang- Panimbang	Terletak di Provinsi Banten dengan total 83,7 km	8.575	15 tahun
14	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan	Terletak di Provinsi Jawa Barat sepanjang 64 km	14.691	15 tahun
15	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan panjang ruas jalan sekitar 172,9 km	23.391	15 tahun
16	SPAM Lampung	Proyek penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung dengan kapasitas air 750 l/detik dan panjang pipa transmisi 22 km	750	15 tahun
17	SPAM Semarang Barat	Proyek penyediaan air minum di Kota Semarang dengan kapasitas 1.000 l/ detik	417	15 tahun
18	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Pengembangan wilayah Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang terletak di kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	4.583	35 tahun
19	Kereta Api Makassar- Parepare	Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dengan Area Layanan Sulawesi Selatan meliputi 5 Kabupaten/Kota: Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare	991	14 tahun sejak TOK2
20	Satelit Multifungsi Pemerintah	Satelit dengan teknologi HTS (<i>High Throughput Satellite</i>) dengan kapasitas 150 Gbps	6.421	12 tahun
21	<i>Hydropower Programme</i>	Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Mini Hidro yang terletak di empat provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Papua) dengan total kapasitas 195 MW	6.568	15 Tahun Sejak Pinjaman Efektif
22	Jalan Tol Semarang- Demak	Terletak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 27 km	5.441	15 tahun
23	Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo	Pengembangan Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat	1.203	14 Tahun Setelah Tanggal Efektif



No.	Nama Proyek	Uraian	Nilai Proyek (Rp-miliar)	Durasi Penjaminan (setelah COD)
24	Jalan Non Tol Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan	Terletak di sisi Timur Jalan Sumatera Selatan di Kota Palembang sepanjang 29,37 km	982	11 tahun
25	PLTP Dieng-2 & Patuha-2	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi berlokasi di Dieng Jawa Tengah dan Gunung Patuha Jawa Barat, dengan kapasitas masing-masing sebesar 55 MW.	6.938	20 tahun
26	Jalan Tol Solo-Yogyakarta- NYIA Kulonprogo	Jalan tol ini menghubungkan Kota Solo Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Kulon Progo DIY dengan panjang 96,5 km	26.637	15 tahun
27	Jalan Tol Yogyakarta-Bawen	Jalan tol ini melalui Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Sleman dengan panjang 75,82 km	14.255	15 tahun
28	Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku- Papua dengan skema <i>Result-Based Lending</i> (RBL-KMP)	Terletak di Kalimantan dan Maluku- Papua, proyek pembangunan jaringan distribusi listrik ini ditargetkan untuk menambah sambungan listrik hingga 6,7 juta pelanggan	29.873	20 tahun
29	Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan skema <i>Result-Based Lending</i> (RBL-SNT)	Terletak di Sulawesi dan Nusa Tenggara, target dari Proyek ini adalah peningkatan sambungan listrik sampai dengan 7,7 juta pelanggan	20.676	15 tahun
30	SPAM Pekanbaru	Proyek penyediaan air minum di Kota Pekanbaru dengan kapasitas 750 lpd	500	15 tahun
31	Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali	Pembangunan sistem distribusi Jaringan Tegangan Menengah, Jaringan Tegangan Rendah, trafo, dan sambungan di wilayah Jawa Timur dan Bali	16.860	20 tahun
32	SPAM Regional Jatiluhur I	Proyek penyediaan air minum Regional dari Jatiluhur dengan kapasitas 4.750 lpd ke Provinsi DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, dan Kab. Karawang	1.675	10 tahun
33	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau	526	11 tahun
34	SPAM Regional Karian Serpong	Proyek penyediaan air minum Regional dari Bendungan Karian dengan kapasitas 4.850 lpd ke Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.	2.433	15 tahun
35	Penjaminan Pemerintah atas Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2021 dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar obligasi	1.773	Seri A: 5 tahun Seri B: 7 tahun
36	Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar bunga pinjaman	8.076	3 tahun
37	Jembatan <i>Callender Hamilton</i>	Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa	2.199	10 tahun

Appraisal Penjaminan

Appraisal penjaminan dimaksudkan untuk melaksanakan suatu analisis yang komprehensif atas proyek yang akan dijamin serta menjadi dasar bagi PT PII untuk menetapkan bahwa proyek tersebut layak dari segi keuangan dan teknis sebagaimana ditetapkan dalam regulasi. *Appraisal* dilakukan atas kajian kelayakan dalam Usulan Penjaminan yang disampaikan oleh PJPK setelah dilakukan *review* kelengkapan dan kesesuaian regulasi minimum oleh divisi terkait lainnya. Proses *Appraisal* merujuk pada Kerangka Kerja *Appraisal* yang dari waktu ke waktu dapat dimutakhirkan. Berdasarkan Kerangka Kerja *Appraisal*, evaluasi kelayakan proyek dilakukan dari aspek keuangan, ekonomi, teknis, hukum, lingkungan dan sosial. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap usulan alokasi risiko proyek untuk memastikan diperolehnya nilai keuangan praktikal, dan agar risiko-risiko yang dialokasikan kepada PJPK telah dimitigasi dan/atau dipantau secara memadai, dengan merujuk kepada kapasitas PJPK. Proses *appraisal* juga memanfaatkan keahlian dari pihak-pihak yang independen dalam melakukan penilaian aspek teknis, keuangan dan lainnya. Koordinator dari proses *appraisal* penjaminan adalah Divisi *Project Appraisal* dibawah Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek.

Sampai dengan Desember 2021, terdapat 5 proyek KPBUs yang proses *appraisal*-nya telah selesai dilakukan. Pembentukan struktur penjaminan hingga penandatanganan perjanjian penjaminan dilakukan oleh Divisi *Underwriting* di bawah Direktur Eksekutif Bisnis. Sedangkan terkait penjaminan pinjaman langsung, terdapat 5 proyek yang proses *appraisal* penjaminannya telah selesai.

No	Proyek KPBUs	No	Proyek Non- KPBUs
1	Pelabuhan Anggrek	1	Pengadaan Vaksin COVID-19 PT Bio Farma (Persero) dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN
2	Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap	2	Penerbitan Obligasi III Tahun 2021 PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN
3	Jembatan Calender Hamillton	3	Pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN
4	Tol Gilimanuk - Mengwi	4	<i>Sustainable and Reliable Energy Access Program in Java (Western and Central Java)</i> (PT PLN (Persero))
5	Tol Cikunir - Ulujami	5	Penerbitan Obligasi IV dan Sukuk I Tahun 2022 PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN



PORTOFOLIO PENJAMINAN PROYEK INFRASTRUKTUR - KPBU

SEKTOR JALAN DAN JEMBATAN



Proyek Jalan Tol Batang-Semarang

Proyek Tol Batang-Semarang merupakan salah satu proyek infrastruktur jalan tol skema KPBU pertama yang diberikan penjaminan oleh Pemerintah melalui PT PII. Proyek Jalan sepanjang 75 kilometer yang menelan nilai investasi sebesar Rp14,0 triliun ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April 2016 antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan Badan Usaha Pelaksana PT Jasamarga Semarang Batang. Pada saat yang bersamaan, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Jasamarga Semarang Batang dan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Jawa Tengah
Nilai Proyek	Rp13.968 miliar
PJPK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Semarang Batang
Tahapan Proyek	Beroperasi sejak 21 Januari 2019



Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang

Proyek KPBU Jalan Tol Pandaan-Malang merupakan bagian dari rencana koridor jalan utara-selatan di Provinsi Jawa Timur sebagai kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol-Pandaan dengan panjang 38,48 km. Ruas jalan tol ini akan melalui tiga daerah penting di Jawa Timur yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Malang, sehingga ruas jalan tol ini menjadi arteri utama dari banyak alternatif ruas jalan non-tol yang menghubungkan kawasan utara dengan kawasan selatan wilayah Jawa Timur.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek ini dilaksanakan antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana PT Jasamarga Pandaan Malang. Pada saat yang bersamaan, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Jasamarga Pandaan Malang dengan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Jawa Timur
Nilai Proyek	Rp6.359 miliar
PJPK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Pandaan Malang
Tahapan Proyek	Seksi 1-3 beroperasi sejak 13 Mei 2019 Seksi 4 beroperasi sejak 30 Oktober 2019 Seksi 5 beroperasi sejak 2 April 2020



Proyek Jalan Tol Manado-Bitung

Proyek Jalan Tol Manado-Bitung terletak wilayah di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011- 2025, Pelabuhan Bitung akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor impor dari dan ke wilayah provinsi Sulawesi Utara (“PP 32/2011”)

Proyek Pembangunan Jalan Tol antara Manado-Bitung dengan nilai investasi mencapai Rp4,95 triliun dilakukan dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. Jalan tol sepanjang 39 km ini terbagi ke dalam dua seksi, yaitu Seksi I sepanjang 14 km dari Manado-Airmadidi yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam proses pembangunannya dan seksi II sepanjang 25 km yang merupakan seksi yang dibangun oleh Badan Usaha Pelaksana.

Proyek ini dikerjakan dengan skema SBOT (*Supported Build Operate Transfer*) dengan masa konsesi 40 tahun, di mana Pemerintah menyediakan bantuan berupa dukungan konstruksi untuk seksi I sepanjang 14 km untuk membuat Proyek ini layak secara finansial. Pembangunan ruas jalan tol ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu tempuh dan mengurangi risiko-risiko kecelakaan untuk wilayah Sulawesi Utara.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Sulawesi Utara
Nilai Proyek	Rp4.948 miliar
PJPK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Manado Bitung
Tahapan Proyek	Operasi Parsial Seksi 1 dan 2 A beroperasi sejak 28 September 2020



Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda terletak di wilayah administratif Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda merupakan salah satu koridor penting bagi lalu lintas pergerakan orang dan barang di Provinsi Kalimantan Timur, dan merupakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) jalan tol yang masuk ke dalam rencana sistem transportasi Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya ruas tol Balikpapan-Samarinda dapat menjadi alternatif menyelesaikan permasalahan jalur lalu lintas yang padat dan meningkatkan efisiensi waktu perjalanan. Pembangunan ruas tol ini juga diharapkan meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur dan meningkatkan layanan/akses mobilitasi bagi warga Kalimantan Timur.

Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda memiliki panjang 97,99 km ini terdiri dari 5 seksi. Konstruksi seksi 1 dan 5 merupakan tanggung jawab Pemerintah, sedangkan konstruksi seksi 2-4 merupakan tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana (PT Jasamarga Balikpapan Samarinda). Nilai proyek ini mencapai Rp11,9 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Kalimantan Timur
Nilai Proyek	Rp11.889 miliar
PJPK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
Tahapan Proyek	Seksi 2, 3 dan 4 beroperasi sejak 17 Desember 2019 Seksi 1 dan 5 beroperasi sejak Agustus 2021



Proyek Jalan Tol Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (Jakarta - Cikampek II Elevated)

Proyek jalan tol Jakarta - Cikampek II *Elevated* merupakan proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan merupakan proyek tol yang diberikan Penjaminan Pemerintah melalui PT PII sebagai pelaksana *single window policy*.

Proyek jalan tol Jakarta - Cikampek II *Elevated* memiliki panjang 36,4 km dengan nilai investasi Rp16,2 triliun. Penandatanganan Perjanjian Kerja sama proyek ini dilaksanakan antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek selaku Badan Usaha Pelaksanaan pada tanggal 5 Desember 2016. Sedangkan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek dan Perjanjian Regres antara Kementerian PUPR dengan PT PII secara bersamaan ditandatangani pada 22 Februari 2017.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Jawa Barat
Nilai Proyek	Rp16.233 miliar
PJPK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
Tahapan Proyek	Beroperasi sejak 12 Desember 2019



Proyek Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar

Proyek jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar yang terletak di Provinsi Jawa Timur ini memiliki panjang 38,3 km. Nilai investasi proyek tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar mencapai Rp12,9 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek ini dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 5 Desember 2016 antara Kementerian PUPR selaku PJKP dan PT Waskita Bumi Wira selaku Badan Usaha Pelaksana. Sedangkan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Waskita Bumi Wira dan Perjanjian Regres antara Kementerian PUPR dengan PT PII secara bersamaan ditandatangani pada 22 Februari 2017.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Jawa Timur
Nilai Proyek	Rp12.930 miliar
PJKP	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Waskita Bumi Wira
Tahapan Proyek	Operasi Parsial Seksi 1, 2 dan 3 beroperasi sejak 19 November 2020



Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang

Proyek jalan tol Serang-Panimbang terletak di Provinsi Banten sepanjang 83,7 km dengan nilai investasi sebesar Rp8,6 triliun. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020.

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian PUPR dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang, dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR ditandatangani secara bersamaan pada tanggal 22 Februari 2017.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Banten
Nilai Proyek	Rp8.575 miliar
PJPK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Wijaya Karya Serang Panimbang
Tahapan Proyek	Operasi Parsial Seksi 1 beroperasi sejak 16 November 2021



Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan yang terletak di Provinsi Jawa Barat ini memiliki panjang 60,1 km. Nilai investasi proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan mencapai Rp8,4 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian PUPR dengan PT Citra Karya Jabar Tol, Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Citra Karya Jabar Tol, dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR ditandatangani secara bersamaan pada tanggal 22 Februari 2017.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Jawa Barat
Nilai Proyek	Rp8.409 miliar
PJPK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Citra Karya Jabar Tol
Tahapan Proyek	Konstruksi



Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi

Pembangunan Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ini akan melewati 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi dengan panjang ruas jalan sekitar 172,9 km. Jalan tol ini diharapkan dapat mendorong kelancaran arus barang dan manusia dari dan ke Banyuwangi. Nilai investasi pembangunan infrastruktur jalan tol Probolinggo-Banyuwangi mencapai Rp23,4 triliun. Adapun masa durasi penjaminan adalah sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Jawa Timur
Nilai Proyek	Rp23.391 miliar
PJPK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
Tahapan Proyek	Pra-konstruksi



Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan

Proyek jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan memiliki panjang ruas 64 km dengan nilai investasi mencapai Rp14,7 triliun. Pembangunan proyek jalan tol Jakarta Cikampek II Selatan berawal di sekitar *interchange* Jatiasih, masuk ke wilayah kota Bekasi dan berakhir di sekitar interchange Sadang, Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Adapun masa durasi penjaminan adalah sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Jawa Barat
Nilai Proyek	Rp14.691 miliar
PJPK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Japek Selatan
Tahapan Proyek	Konstruksi



Proyek Jalan Tol Semarang-Demak

Proyek KPBU Jalan Tol Semarang-Demak meliputi Pembangunan dan Pengoperasian Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan Tanggul Laut. Proyek ini berlokasi di Kota Semarang hingga Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan panjang jalan tol 27 km dan nilai investasi yang ditanggung oleh Badan Usaha Pelaksana sebesar Rp5,4 triliun.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan antara Menteri PUPR dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PT PPSPD) pada tanggal 23 September 2019. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT PPSPD, dan penandatanganan Perjanjian Regres antara Kementerian PUPR dengan PT PII.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Jawa Tengah
Nilai Proyek	Rp5.441 miliar
PJPK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak
Tahapan Proyek	Konstruksi



Proyek Jalan Non Tol Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan (Jalintim Sumsel)

Pada tanggal 3 Agustus 2020 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jalintim Adhi Abipraya selaku Badan Usaha Pelaksana. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jalintim Adhi Abipraya dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

Proyek KPBUP Preservasi Jalintim Sumsel merupakan proyek KPBUP pertama di sektor Jalan Non-tol di Indonesia, serta mendapatkan penjaminan Pemerintah melalui PT PII. Ruang lingkup skema KPBUP Proyek ini meliputi Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan pada masa konstruksi serta masa layanan dan Pembiayaan Proyek oleh Badan Usaha Pelaksana.

Dengan nilai investasi sebesar Rp982 miliar, Proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, jalan akses ke pelabuhan dan bandara, serta penghematan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan nilai waktu tempuh.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Sumatera Selatan
Nilai Proyek	Rp982 miliar
PJPK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jalintim Adhi Abipraya
Tahapan Proyek	Konstruksi



Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo

Pada tanggal 9 September 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJKP dengan PT Jogjasolo Marga Makmur selaku Badan Usaha Pelaksana. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jogjasolo Marga Makmur dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR. Skema kerja sama proyek jalan tol sepanjang 96,5 km ini adalah *Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT) dengan masa konsesi selama 40 tahun sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Adapun tujuan dari dibangunnya proyek infrastruktur jalan tol ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas antara Solo, Yogyakarta, dan Kulon Progo, termasuk melayani akses Bandara NYIA Kulon Progo, di samping untuk meningkatkan pengembangan wilayah yang dilalui jalan tol dan menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
Nilai Proyek	Rp26.637 miliar
PJKP	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jogjasolo Marga Makmur
Tahapan Proyek	Konstruksi



Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen

Pada tanggal 13 November 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jogja Bawen selaku Badan Usaha Pelaksana. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jasamarga Jogja Bawen dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

Terletak di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, pembangunan jalan tol sepanjang 75,82 km ini diharapkan memberikan dampak besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Tengah dan Yogyakarta dan juga dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, terutama akses Semarang - Yogyakarta.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
Nilai Proyek	Rp14.255 miliar
PJPK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Jogja Bawen
Tahapan Proyek	Pra-Konstruksi



Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau

Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau adalah proyek proyek KPBU kedua di sektor Jalan Non-tol di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) jalan yang akan dipreservasi di Jalintim Riau dengan total seluruhnya mencapai 43 kilometer, yaitu Jalan Simpang Kayu Ara (Pekanbaru)-Batas Kabupaten Pelalawan, Jalan Batas Pelalawan-Sikijang Mati, dan Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago. Selain itu, dilakukan perbaikan 4 unit jembatan sepanjang 60 meter di Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago serta pembangunan 1 unit fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Pada 12 April 2021 telah dilakukan penandatanganan perjanjian penjaminan atas proyek Jalintim Riau setelah sebelumnya telah ditandatangani perjanjian KPBU pada proyek Jalintim Sumatera Selatan pada Agustus 2020.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Riau
Nilai Proyek	Rp555,50 miliar
PJPK	Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Adhi Jalintim Riau
Tahapan Proyek	



Proyek Jembatan Callender Hamilton

Proyek Jembatan *Callender Hamilton* merupakan proyek penggantian dan/atau duplikasi Jembatan *Callender Hamilton* (CH) di Pulau Jawa dengan lingkup penggantian 32 unit jembatan dengan panjang eksisting 2.452,9 meter untuk koridor Jalan Nasional; duplikasi tanpa penggantian jembatan terhadap 5 unit jembatan dengan panjang eksisting 485,6 meter untuk koridor Jalan Nasional; serta pengoperasian dan pemeliharaan.

Pada 6 Desember 2021 telah dilakukan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek Jembatan *Callender Hamilton* ini.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
Nilai Proyek	Rp2,20 triliun
PJPK	Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Baja Titian Utama
Tahapan Proyek	



SEKTOR TELEKOMUNIKASI



Proyek Palapa Ring adalah salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018, dan juga termasuk Proyek Prioritas Nasional. Proyek ini merupakan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Sistem Komunikasi Serat Optik ke 57 kota/kabupaten yang belum terlayani.

Proses pengadaan dibagi menjadi tiga paket yaitu, Paket Barat, Paket Tengah dan Paket Timur dengan estimasi jangkauan wilayah sepanjang 8.871 km. Proyek ini ditargetkan mampu mendistribusikan jaringan *broadband* dengan kecepatan 10Mbps di daerah pedesaan dan 20 Mbps di daerah perkotaan.

Proyek Palapa Ring Paket Barat

Penandatanganan Perjanjian proyek Palapa Ring Paket Barat dilaksanakan di Kantor Kementerian Keuangan pada tanggal 29 Februari 2016. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selaku PJKP dan PT Palapa Ring Barat selaku BUP. Pada saat yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Palapa Ring paket Barat serta Perjanjian Regres antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan PT PII. *Financial close* proyek tercapai pada 10 November 2016 dimana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku *lenders* menyalurkan kredit senilai Rp875 miliar kepada BUP.

Informasi Proyek

Lokasi	Bengkalis, Kepulauan Meranti, Natuna, Kepulauan Anambas, Lingga
Nilai Proyek	Rp1.229 miliar
PJKP	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Usaha	PT Palapa Ring Barat
Tahapan Proyek	Beroperasi sejak 2 Maret 2018

Proyek Palapa Ring Paket Tengah

Pada tanggal 4 Maret 2016, Kemenkominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia dengan nilai proyek sebesar Rp1,1 triliun. Pada kesempatan yang sama, PT PII yang merupakan pelaksanaan *single window policy* penyediaan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur juga menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Paket Tengah.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi, Provinsi Maluku, Provinsi NTT, Provinsi Papua Barat
Nilai Proyek	Rp 1.093 miliar
PJPK	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Usaha	PT Len Telekomunikasi Indonesia
Tahapan Proyek	Beroperasi sejak 21 Desember 2018

Proyek Palapa Ring Paket Timur

Pada 29 September 2016 bertempat di Istana Negara, disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Menko Perekonomian, Menko Polhukam, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Palapa Timur Telematika selaku Badan Usaha Pelaksana dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kemenkominfo selaku PJPK.

Proyek ini adalah proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional. Setelah penandatanganan tersebut, pada 29 Maret 2017 bertempat di Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan *Financial Close* Proyek Palapa Ring Paket Timur dan juga penyerahan Surat Efektif Penjaminan oleh PT PII.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat
Nilai Proyek	Rp 5.088 miliar
PJPK	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Usaha	PT Palapa Timur Telematika
Tahapan Proyek	Beroperasi sejak 29 Agustus 2019



Satelit Multifungsi Pemerintah

Pada tanggal 3 Mei 2019, penandatanganan Perjanjian Kerja sama Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah dilaksanakan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPk dan PT Satelit Nusantara Tiga selaku BUP. Pada saat yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Satelit Nusantara Tiga serta Perjanjian Regres antara Kemenkominfo dengan PT PII. Satelit Multi Fungsi merupakan proyek KPBU keempat di sektor telekomunikasi yang mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT PII setelah Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur.

Manfaat Proyek diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat luas, diantaranya untuk sektor pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan keamanan, pemerintah daerah, juga khususnya sektor keuangan untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.

Informasi Proyek

Lokasi	Tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia
Nilai Proyek	Rp6.421 miliar
PJPk	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Usaha	PT Satelit Nusantara Tiga
Tahapan Proyek	Konstruksi

SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

**PLTU Jawa Tengah/Central Java Power Plant**

Proyek PLTU Jawa Tengah merupakan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2 x 1.000 MW berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU senilai US\$4 miliar atau lebih dari Rp40 triliun tersebut akan dibangun oleh konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) dengan skema *Build Own Operate Transfer* selama masa konsesi 25 tahun. PLTU Jawa Tengah merupakan proyek infrastruktur skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan dengan memperoleh fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Pemerintah RI (Kementerian Keuangan) sesuai Perpres 78/2010.

PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT BPI selaku Badan Usaha Pelaksana serta Perjanjian Regres dengan PT PLN (Persero) sebagai PJPK pada tanggal 6 Oktober 2011. *Financial Close* proyek ini dilaksanakan di Istana Negara pada Juni 2016 yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Proyek ini merupakan langkah pemerintah untuk menyediakan kebutuhan listrik yang dibutuhkan masyarakat.

Informasi Proyek

Lokasi	Kab. Batang—Provinsi Jawa Tengah
Nilai Proyek	Rp61.456 miliar
PJPK	PT PLN (Persero)
Badan Usaha	PT Bhimasena Power Indonesia
Tahapan Proyek	Konstruksi



SEKTOR AIR MINUM



Proyek SPAM Umbulan-Jawa Timur

Untuk mengatasi krisis air dan memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mencari jalan keluar melalui pemanfaatan mata air Umbulan yang terdapat di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Mata air Umbulan dipilih karena mata air ini memproduksi 4.000 liter/detik dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk 1,8 juta jiwa di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya.

Proyek SPAM Umbulan dibangun dengan menggunakan skema KPBU antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku PJPB dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan selaku Badan Usaha Pelaksana. Nilai investasi proyek SPAM Umbulan mencapai Rp2,057 triliun dan memperoleh Dukungan Kelayakan Rp818 Miliar dari Kementerian Keuangan.

Pada 21 Juli 2016, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan dan Perjanjian Regres dengan Gubernur Jawa Timur untuk Proyek SPAM Umbulan. Proyek ini merupakan proyek sektor air dan proyek daerah pertama yang diberikan penjaminan pemerintah melalui PT PII.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi Jawa Timur
Nilai Proyek	2.057 miliar
PJPB	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Badan Usaha	PT Meta Adhya Tirta Umbulan
Tahapan Proyek	Beroperasi sejak 31 Januari 2021



Proyek SPAM Kota Bandar Lampung

Proyek SPAM Lampung diinisiasi karena Kota Bandar Lampung memerlukan peningkatan dan penyediaan air minum. PDAM Way Rilau baru melayani sekitar 20% dari total penduduk Kota Bandar Lampung yang berjumlah 193.290 penduduk. Selain rendahnya tingkat pelayanan PDAM Way Rilau, kendala kontur pada Kota Bandar Lampung yang berbukit-bukit juga mengakibatkan pendistribusian air minum belum merata. Nilai investasi proyek SPAM Kota Bandar Lampung mencapai Rp750 miliar dan memperoleh Dukungan Kelayakan Rp258,8 miliar dari Kementerian Keuangan.

Perjanjian Kerja sama antara PDAM Way Rilau selaku PJK dan PT Adhya Tirta Lampung selaku BUP telah ditandatangani pada 14 Februari 2018. Pada kesempatan yang sama, PT PII juga telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres. *Financial Close* Proyek telah tercapai pada 13 Agustus 2018 dan Proyek telah mulai beroperasi sejak 13 Agustus 2020.

Informasi Proyek

Lokasi	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Nilai Proyek	Rp750 miliar
PJK	PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung
Badan Usaha	PT Adhya Tirta Lampung
Tahapan Proyek	Beroperasi sejak 13 Agustus 2020



Proyek SPAM Semarang Barat

Proyek SPAM Semarang Barat berkapasitas 1.000 liter/detik dibangun berdasarkan skema KPBU antara Perumda Air Minum Tirta Moedal selaku PJKP dengan PT Air Semarang Barat selaku Badan Usaha. Nilai proyek SPAM Semarang Barat sebesar Rp417 miliar tanpa menggunakan Dukungan Kelayakan dari Kementerian Keuangan. Area pelayanan SPAM Semarang Barat ditargetkan untuk melayani 3 (tiga) Kecamatan yang terbagi dalam 5 (lima) zona wilayah layanan, yaitu Kecamatan Tugu (zona 1), sebagian Kecamatan Ngalian (zona 2 dan 3), serta Kecamatan Semarang Barat (zona 4 dan 5).

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan memperluas cakupan sambungan perpipaan air minum dengan penambahan Sambungan Rumah (SR) kurang lebih 37.000 SR, sehingga total SR yang dapat dilayani mencapai sekitar 71.500 SR pada tahun 2030. Banyaknya SR yang saat ini belum terlayani dikarenakan keterbatasan dana dan sumber air baku yang tersedia di dalam Kota Semarang.

PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan PDAM Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat pada 23 November 2018. Adapun *Financial Close* proyek ini dicapai pada tanggal 22 Mei 2019.

Informasi Proyek

Lokasi	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nilai Proyek	Rp417 miliar
PJKP	Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
Badan Usaha	PT Air Semarang Barat
Tahapan Proyek	Beroperasi sejak 22 Mei 2021



Proyek SPAM Pekanbaru

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru merupakan proyek pembangunan dan pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru berkapasitas 750 lpd dengan nilai *capex* sebesar Rp499 miliar. Proyek SPAM Pekanbaru merupakan proyek Rehabilitate Build Operate Transfer (RBOT) yang saat ini sedang dalam tahap Rehabilitasi dan Konstruksi.

Saat ini, Perumdam Tirta Siak Kota Pekanbaru baru dapat melayani sekitar 9,3% dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru. Proyek SPAM Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan Sambungan Langgan (SL) sebanyak ± 48.500 SL sehingga dengan pelanggan saat ini dapat mencapai kurang lebih 60.000 SL. Dengan demikian, Proyek SPAM Kota Pekanbaru dapat meningkatkan jumlah pelanggan Perumdam Kota Pekanbaru hingga hampir 4 kali lipat dari kondisi SL saat ini.

Acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Penjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek SPAM Pekanbaru dilaksanakan secara bersamaan pada 16 Desember 2020.

Informasi Proyek

Lokasi	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Nilai Proyek	Rp500 miliar
PJPK	Perumdam Tirta Siak Kota Pekanbaru
Badan Usaha	PT PP Tirta Madani
Tahapan Proyek	Konstruksi



Proyek SPAM Regional Jatiluhur I

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I merupakan proyek kerjasama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur dimana area pelayanannya akan mencakup Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Karawang. Proyek dengan kapasitas 4.750 liter/detik ini ditargetkan akan menyalurkan air minum ke 380.000 sambungan rumah.

Pada 19 Februari 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan dan untuk Proyek *unsolicited* ini telah mencapai *financial close* pada 1 April 2022 dan diberikan penjaminan oleh PT PII dimana durasi penjaminannya adalah 10 Tahun sejak COD.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang
Nilai Proyek	Rp1,67 triliun
PJPK	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pendelegasian kepada Dirjen Cipta Karya
Badan Usaha	PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur
Tahapan Proyek	Konstruksi



Proyek SPAM Regional Karian Serpong

Proyek SPAM Regional Karian Serpong merupakan proyek antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan PT Karian Water Services yang mencakup area Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Proyek penyediaan air minum Regional dari Bendungan Karian dengan kapasitas 4.600 liter/detik ini ditargetkan akan menyalurkan air minum ke 539.400 sambungan rumah.

Pada 29 April 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Penjaminan, dan untuk Perjanjian Regres ditandatangani pada 30 April 2021. Proyek SPAM Karian Serpong merupakan proyek ke-6 di sektor air minum yang diberikan penjaminan dan memiliki durasi penjaminan selama 15 tahun sejak di mana menjadi proyek ke-6 di sektor air minum yang diberikan penjaminan oleh PT PII.

Informasi Proyek

Lokasi	Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
Nilai Proyek	Rp2,43 triliun
PJPK	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pendelegasian kepada Dirjen Cipta Karya
Badan Usaha	PT Karian Water Services
Tahapan Proyek	Pra Konstruksi



SEKTOR TRANSPORTASI



Proyek Kereta Api Makassar-Parepare

Proyek Kereta Api Makassar-Parepare merupakan proyek pertama sektor transportasi di lingkup Kementerian Perhubungan RI. Proyek KPBU ini mengadopsi skema *Build Operate Transfer* (BOT) 'Bangun Guna Serah' dengan nilai investasi Rp991 miliar, dengan masa kerjasama 17 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial 1. Proyek dengan skema *Availability Payment* (AP) ini akan melayani area meliputi 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan antara PJPK dengan PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) pada tanggal 5 April 2019. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT CRI, dan penandatanganan Perjanjian Regres antara PJPK dengan PT PII.

Informasi Proyek

Lokasi	Makassar – Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan
Nilai Proyek	Rp991 miliar
PJPK	Kementerian Perhubungan
Badan Usaha	PT Celebes Railway Indonesia
Tahapan Proyek	Konstruksi



Proyek Bandar Udara Komodo Labuan Bajo

Proyek Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo merupakan proyek pengembangan Bandar Udara pertama di Indonesia yang menggunakan skema KPBU dan mendapatkan Penjaminan Pemerintah melalui PT PII.

Pengembangan Bandar Udara ini bertujuan untuk mengembangkan daerah prioritas pariwisata Labuan Bajo yang merupakan salah satu destinasi Bali Baru serta untuk memperluas konektivitas nasional dan internasional. Proyek ini berlokasi di Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai proyek mencapai Rp1,2 triliun.

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Kementerian Perhubungan dengan PT Cinta Airport Flores, Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Cinta Airport Flores serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian Perhubungan dilaksanakan pada 7 Februari 2020.

Informasi Proyek

Lokasi	Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nilai Proyek	Rp1.203 miliar
PJPK	Kementerian Perhubungan
Badan Usaha	PT Cinta Airport Flores
Tahapan Proyek	Pra-Konstruksi



PORTOFOLIO PENJAMINAN PROYEK INFRASTRUKTUR – NON KPBU

SEKTOR PARIWISATA



Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Proyek Pengembangan Kawasan Pariwisata KEK Mandalika merupakan salah satu bagian dari program pengembangan pariwisata Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar yang berkelanjutan untuk pengembangan tujuan wisata baru di wilayah Mandalika, Lombok. Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembangunan dan pengembangan infrastruktur di atas lahan seluas 1.175 Ha ini akan menerapkan konsep *eco-green* dan *event based destination*.

Proyek ini meliputi pengembangan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) antara lain: jaringan jalan, jaringan air bersih, normalisasi sungai, pengolahan air limbah, tempat pembuangan sampah, jaringan dan fasilitas listrik, dan jaringan dan fasilitas gas. Estimasi nilai investasi untuk Proyek ini adalah USD316,5 juta (Rp4,5 triliun) dengan rencana pembiayaan dari Asian Infrastructure Investment Bank sebesar USD248,4 juta.

Informasi Proyek

Lokasi	Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nilai proyek	Rp4.583 miliar
Nilai Pinjaman	USD248,4 juta
BUMN - Terjamin	Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)
Kreditur/Penerima Jaminan	Asian Infrastructure Investment Bank
Tahapan Proyek	Konstruksi

SEKTOR KETENAGALISTRIKAN



Hydropower Programme

Hydropower Programme merupakan bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2019- 2027 dan merupakan bagian dari Program 35.000 MW Pemerintah. Program ini memiliki objektif di antaranya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atas Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH). Selain itu, program ini bertujuan untuk menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) atas penggunaan bahan bakar fosil baik pada saat *base load* dan terutama pada saat beban puncak serta meningkatkan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) kepada pelanggan di sistem terkait.

Proyek ini menggunakan skema pinjaman langsung oleh PT PLN (Persero) dari KFW Bank sebesar EUR294,7 juta. Pinjaman KFW ini akan digunakan untuk pembiayaan 6 (enam) sub proyek di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PT PLN (Persero) dan KFW dilaksanakan pada tanggal 5 September 2019, bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PT PLN (Persero) serta Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dan KFW atas pinjaman langsung tersebut.

Informasi Proyek

Lokasi	Kalimantan, Sulawesi dan Papua
Nilai Proyek	Rp6.568 miliar
Nilai Pinjaman	EUR294,7 juta
BUMN - Terjamin	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)
Tahapan Proyek	Konstruksi



Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng 2 & Patuha 2

Pada 19 Agustus 2020 PT PII dan PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GeoDipa") melaksanakan penandatanganan perjanjian dengan Asian Development Bank (ADB) untuk proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2, sebagai salah satu wujud upaya penyediaan listrik melalui pendayagunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) panas bumi. Penandatanganan proyek tersebut meliputi Penandatanganan Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement* antara GeoDipa dan ADB, Penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB, dan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan GeoDipa.

Proyek ini menggunakan skema pinjaman langsung dari ADB kepada GeoDipa sebesar USD335 juta. Pinjaman ADB ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 dengan masing-masing kapasitas sebesar 55 MW dan direncanakan dapat mulai beroperasi pada tahun 2025. Penjaminan Proyek ini telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman pada 21 September 2020.

Informasi Proyek

Lokasi	Dieng & Patuha
Nilai Proyek	Rp6.938 miliar
Nilai Pinjaman	USD335 juta
BUMN - Terjamin	PT Geo Dipa Energi (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	Asian Development Bank
Tahapan Proyek	Konstruksi



Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-KMP)

Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua merupakan proyek infrastruktur dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-KMP) yang termasuk bagian dari pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan sebagai bagian dari program jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga listrik (RUPTL) PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) ("PLN") 2019-2028.

Berlokasi di Kalimantan, Maluku dan Papua, proyek ini ditargetkan untuk menambah sambungan listrik untuk 6,7 juta pelanggan. Dengan pembangunan proyek ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional khususnya di Wilayah Timur Indonesia, meningkatkan kualitas hidup di Indonesia Timur melalui penggunaan listrik berkelanjutan serta mempromosikan tenaga surya dan penggunaan energi bersih.

Pada 16 Desember 2020, PT PII dan PLN melaksanakan penandatanganan perjanjian dengan Asian Development Bank (ADB) untuk Proyek RBL-KMP. Penandatanganan perjanjian proyek tersebut meliputi penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB, dan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN. Sedangkan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PLN dengan ADB dilaksanakan pada 8 Desember 2020.

Informasi Proyek

Lokasi	Kalimantan dan Maluku-Papua
Nilai Proyek	Rp29.873 miliar
Nilai Pinjaman	USD600 juta
BUMN - Terjamin	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	Asian Development Bank
Tahapan Proyek	Konstruksi



Proyek Pengembangan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-SNT)

Pembangunan Proyek RBL-SNT yang berlokasi di Sulawesi dan Nusa Tenggara ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi dengan menjalankan program melistriki 433 desa di Wilayah Timur Indonesia, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan strategi peningkatan akses listrik melalui perluasan jaringan listrik.

Salah satu target dari Proyek ini adalah peningkatan sambungan sampai dengan 7,7 juta pelanggan dan memiliki objektif; Berkontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan dan pengembangan sosial di wilayah Indonesia Timur; Peningkatan rasio elektrifikasi dan desa berlistrik di Indonesia Timur; Meningkatkan keandalan sistem, efisiensi sistem distribusi, dan pelayanan kelistrikan; serta memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi. Selain itu, Proyek juga diharapkan dapat mendorong pencapaian target rasio elektrifikasi nasional 100% pada tahun 2021.

Pada 16 Desember 2020, PT PII dan PLN melaksanakan penandatanganan perjanjian dengan Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW") untuk proyek RBL-SNT. Penandatanganan perjanjian proyek tersebut meliputi penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII, dan KfW, dan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN. Sedangkan penandatanganan Perjanjian antara PLN dengan KfW telah dilaksanakan sebelumnya pada 8 Desember 2020.

Dengan pembiayaan sebesar USD310 juta dari KfW kepada PLN, proyek ini ditargetkan dapat meningkatkan sambungan listrik sampai dengan 7,7 juta pelanggan. Selain itu proyek ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan dan pengembangan sosial di wilayah Indonesia Timur, peningkatan rasio elektrifikasi dan desa berlistrik di Indonesia Timur, meningkatkan sistem, efisiensi sistem distribusi dan pelayanan kelistrikan, serta memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi.

Informasi Proyek

Lokasi	Sulawesi dan Nusa Tenggara
Nilai Proyek	Rp20.676 miliar
Nilai Pinjaman	USD310 juta
BUMN - Terjamin	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Tahapan Proyek	Konstruksi

Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali

Sistem kelistrikan wilayah Jawa Timur dan Bali adalah sistem yang terinterkoneksi dengan sistem Jawa-Bali untuk melayani kebutuhan listrik di Jawa Timur, Madura, dan Bali. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2019-2028, diperkirakan bahwa sampai dengan tahun 2024 akan ada penambahan pelanggan sekitar 713 ribu pelanggan dengan tambahan penjualan sebesar 13,9 TWh (TerraWatt hour). Untuk mendukung target diatas, PT PLN perlu memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan kehandalan sistem distribusi dengan penambahan jaringan ataupun uprating trafo.

Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB") berkomitmen untuk memberikan pendanaan kepada PT PLN untuk mengembangkan jaringan distribusi di wilayah Jawa Timur dan Bali, dengan total pendanaan senilai USD 310 juta yang dapat dipergunakan PT PLN untuk pembiayaan non material distribusi utama pada pembangunan jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, trafo, dan sambungan pelanggan. Kementerian Keuangan dan PT PII juga turut serta memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan pada pinjaman dari AIIB tersebut. Penandatanganan perjanjian pinjaman dan perjanjian penjaminan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021.

Informasi Proyek

Lokasi	Jawa Timur dan Bali
Nilai Proyek	Rp16.860 miliar
Nilai Pinjaman	USD310 juta
BUMN - Terjamin	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	Asian Infrastructure Investment Bank
Tahapan Proyek	Konstruksi

PENJAMINAN KORPORASI PADAT KARYA

Kegiatan Penjaminan Korporasi Padat Karya

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sejak tahun 2020 berdampak besar terhadap ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Untuk menangani dampak pandemi, Pemerintah mencanangkan berbagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk Penjaminan Pemerintah untuk Korporasi Padat Karya.

PT PII sebagai salah satu SMV Menteri keuangan, pada tahun 2020 mendapatkan perluasan mandat untuk dapat lebih berkontribusi dalam program PEN melalui skema penjaminan untuk pelaku usaha korporasi, atau juga disebut korporasi padat karya. Perluasan mandat ini telah diberikan melalui:

1. Pada tanggal 28 Juli 2020, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Pada tanggal 26 Oktober 2020 telah terbit Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2020 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional dimana Pemerintah memberikan Jaminan kepada Lembaga Keuangan dalam membiayai kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong perekonomian nasional berupa pembiayaan dalam bentuk pinjaman kepada BUMN, BUMD dan/atau Pemerintah Daerah melalui BUPI.
3. Pada tanggal 13 November 2020, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sehubungan dengan penugasan PT PII dalam skema penjaminan korporasi padat karya sebagai berikut:
 - a. KMK No. 522/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam Melaksanakan Penjaminan Bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
 - b. KMK No. 523/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Dukungan Loss Limit Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menindaklanjuti penugasan berdasarkan KMK tersebut, telah ditandatangani perjanjian kerja sama antar para pihak sebagai berikut:



1. Perjanjian Kerja Sama No. PRJ-428/PR/2020-009/PLLPEN/DRU/1120 antara Kementerian Keuangan dan Perusahaan terkait pelaksanaan penugasan pemberian dukungan *loss limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 19 November 2020.
2. Perjanjian Kerja Sama No. 565/PKS/12/2020/010/P-LLPEN/ DRU/1220 antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII sehubungan dengan pelaksanaan dukungan *loss limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 15 Desember 2020.
3. Perjanjian Kerja Sama No. PRJ-553/PR/2020-011/PPBPEN/DRU/1220 antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT PII sehubungan dengan pelaksanaan penugasan penjaminan bersama dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 23 Desember 2020.

Sebagai dukungan kapasitas dalam rangka pelaksanaan dukungan *loss limit* dan penjaminan korporasi padat karya, pada tanggal 30 Desember 2020 PT PII telah menerima tambahan PMN sebesar Rp1,6 triliun.

Di tahun 2021 telah dilakukan berbagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan maupun Perjanjian Kerjasama antara PT PII dengan pihak eksternal dalam rangka untuk memberikan relaksasi atas program penjaminan korporasi padat karya kepada pelaku usaha. Adapun perubahan-perubahan tersebut antara lain:

1. Pada tanggal 1 April 2021 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas PMK 98/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Telah dilakukan Adendum Perjanjian Kerja Sama No. PRJ-545/PR/2021-009-01/P-LLPEN/DRU/1221 antara Kementerian Keuangan dan Perusahaan terkait pelaksanaan penugasan pemberian dukungan *loss limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 13 Desember 2021.

Peran serta Fungsi PT PII dalam Skema Penjaminan Korporasi Padat Karya sesuai PMK 98/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 32/2021, yaitu sebagai berikut:

1. Verifikator data transaksi dan tagihan pembayaran IJP penjaminan. PT PII melaporkan kepada Kementerian Keuangan hasil verifikasi administratif terhadap data transaksi penjaminan dan perhitungan IJP penjaminan yang diajukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada Kementerian Keuangan.
2. Penyedia dukungan *loss limit*. Apabila terjadi klaim yang melebihi *threshold*, LPEI mengajukan klaim *loss limit* kepada PT PII. Klaim *loss limit* adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh PT PII kepada Penjamin (LPEI) sehubungan dengan dukungan *loss limit*.
3. Penyedia Penjaminan Bersama (*Co-Guarantor*). Dalam kondisi pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak berorientasi ekspor, maka Penjaminan Pemerintah akan dilakukan secara bersama oleh LPEI dan PT PII.
4. Pemantauan atas pengelolaan Regres Penjamin yang diserahkan kepada Pemerintah, yaitu dengan melakukan pemantauan intensif atas proses pemulihan hak tagih piutang penjaminan, jika terdapat pembayaran klaim penjaminan.

Produktivitas Penjaminan Korporasi Padat Karya

Selama periode Januari-Desember 2021 PT PII telah melaporkan kepada Kementerian Keuangan hasil verifikasi data transaksi dan tagihan pembayaran IJP penjaminan LPEI sebanyak 70 sertifikat penjaminan dari 65 pelaku usaha dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp5.294,2 miliar. Total tagihan IJP penjaminan LPEI yang telah diverifikasi sebesar Rp272,9 miliar dengan persetujuan atas dukungan *loss limit* yang diajukan LPEI yang telah menyerap tenaga kerja kurang lebih mencapai 68.324 orang. Atas pemberian dukungan *loss limit* ini, PT PII memperoleh IJP *loss limit* dari Kementerian Keuangan sebesar Rp84,56 miliar dan telah menyampaikan permohonan dukungan *Backstop Loss Limit* kepada Menteri Keuangan.

Disamping itu, selama periode Januari-Desember 2021 telah diberikan pula Penjaminan Bersama antara LPEI dan PT PII atas transaksi penjaminan program PEN untuk pelaku usaha yang tidak berorientasi ekspor sebanyak 19 pelaku usaha dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.858,0 miliar dan dengan total cakupan penjaminan sebesar Rp1.472,9 miliar.

Selama periode Januari-Desember 2021, seluruh pinjaman Pelaku Usaha dalam status lancar dan belum terdapat tunggakan. Tercatat selama periode Januari-Desember 2021, sebanyak 11 pelaku usaha telah melunasi pinjamannya dengan total sebesar Rp641,0 miliar dimana 6 pelaku usaha diantaranya melanjutkan program penjaminan dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp275,7miliar.

PENJAMINAN BUMN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah dimana dalam pelaksanaannya, skema penjaminan dapat dijalankan oleh langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Sebagai langkah awal pelaksanaan Program PEN, maka pada Tanggal 11 Mei 2020, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 ("PP 23/2020") tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Mengacu kepada Pasal 17 PP 23/2020 tersebut, dalam rangka penjaminan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Penjaminan, yang mana dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Selain Penjaminan Korporasi Padat Karya melalui PMK no. 98/PMK.08/2020, Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK No 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 22 Desember 2020 di mana, berdasarkan penugasan dari Kementerian Keuangan, PT PII dapat bersama dengan Kementerian Keuangan memberikan Jaminan Pemerintah kepada BUMN yang terdampak pandemi COVID-19 dan/atau mendapatkan penugasan dalam rangka program PEN.

Portfolio Penjaminan BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program PEN

1. Penjaminan Obligasi PT Waskita Karya (Persero)

Informasi Penjaminan

Nilai Obligasi	Rp 1,77 triliun
BUMN Terjamin	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Wali Amanat	PT Bank Mega Tbk.
Jangka Waktu Penjaminan	5 dan 7 tahun

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kinerja operasional dan likuiditas PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita"). Hal ini menyebabkan meningkatnya profil risiko kredit Waskita yang berdampak pada penurunan kredit oleh Lembaga pemeringkat, sehingga pihak perbankan secara bertahap mengurangi dukungan pendanaan kepada Waskita.

Untuk refinancing dan pemenuhan kebutuhan modal kerja, Waskita berencana menerbitkan obligasi. Waskita membutuhkan dukungan berupa penjaminan untuk meningkatkan peringkat obligasi sehingga dapat menarik minat investor pasar modal dan dapat mengoptimalkan penerbitan obligasi yang dilakukan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan PT PII memberikan dukungan penjaminan terhadap risiko gagal bayar atas bunga dan pokok obligasi III Waskita Karya tahun 2021. Pada tanggal 16 September 2021, ditandatangani Perjanjian Wali Amanat, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara pihak-pihak terkait.



2. Penjaminan Pinjaman PT Waskita Karya (Persero)

Informasi Penjaminan

Nilai Pinjaman	Rp 8,08 triliun
BUMN Terjamin	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Kreditur	Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank BJB
Jangka Waktu Penjaminan	3 tahun + 2 tahun (revolving loan)

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kinerja operasional dan likuiditas PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita"). Hal ini menyebabkan meningkatnya profil risiko kredit Waskita yang berdampak pada penurunan kredit oleh Lembaga pemeringkat, sehingga pihak perbankan secara bertahap mengurangi dukungan pendanaan kepada Waskita.

Untuk memperbaiki kondisi perusahaan, Waskita melakukan upaya restrukturisasi keuangan secara menyeluruh. Salah satunya adalah dengan penjaminan pemerintah atas pinjaman dan obligasi/sukuk. Waskita berencana untuk menambah modal kerja melalui pinjaman dari sindikasi Bank dalam negeri yang modalnya akan digunakan untuk membiayai 148 proyek penugasan dari Pemerintah dalam rangka program PEN.

Adapun penjaminan pemerintah dibutuhkan untuk meningkatkan kelayakan dalam rencana pinjaman dari pihak Perbankan dalam rangka penyelesaian proyek-proyek yang dikerjakan dan pemenuhan kewajiban Waskita. Jaminan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi program restrukturisasi keuangan Waskita. Perjanjian Pinjaman antara Waskita dan pihak Kreditur ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2021, sedangkan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2021.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Penjaminan

Melalui ketiga kegiatan usaha di atas, di tahun 2021 pendapatan yang diperoleh segmen penjaminan sebesar Rp156,5 miliar, meningkat sebesar Rp35,1 miliar atau 28,9% dari tahun 2020 yang sebesar Rp121,5 miliar.

Pendapatan Penjaminan

(Rp-juta)



SEGMENT USAHA PENYIAPAN PROYEK DAN PENDAMPINGAN TRANSAKSI/PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF)

Memiliki pengalaman sejak tahun 2009, PT PII telah menjalankan peran serta usaha terbaiknya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui Penjaminan Pemerintah yang diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur melalui skema KPBU. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan industri infrastruktur di Indonesia, PT PII dituntut untuk terus berinovasi dan berkembang dalam menjalankan perannya demi mencapai hasil yang optimal serta pemerataan infrastruktur di Indonesia.

Kegiatan Operasi dan Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi/Project Development Facility (PDF)

Pada tahun 2018, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan, PT PII mendapatkan kesempatan untuk menjalankan kegiatan usaha di samping memberikan jaminan pada proyek infrastruktur, yaitu dengan terlibat dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Berdasarkan peraturan tersebut, PT PII berinisiasi untuk menjalankan segmen usaha baru yakni Penyiapan dan Pendampingan Transaksi Proyek KPBU sehingga PT PII terlibat secara menyeluruh di dalam proses penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU dari hulu ke hilir. Kegiatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang dikenal sebagai *Project Development Facility* (PDF) merupakan salah satu pengembangan aktivitas kegiatan Perusahaan sesuai dengan rencana arah pengembangan Perusahaan tahun 2018-2022. Proyek-proyek yang dapat menerima fasilitas PDF adalah proyek KPBU Prioritas, Proyek KPBU Kilang Minyak, dan/atau Proyek KPBU lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan PDF dimaksud, PT PII telah menyiapkan struktur yang berorientasi pada Proyek serta menjaga independensi pengambilan keputusan di masing-masing fungsi (*Segregation of Function*) melalui pembentukan Divisi Inisiasi Bisnis. Divisi Inisiasi Bisnis didukung oleh pengawakan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan penugasan tersebut dengan berbekal pengalaman Proyek Infrastruktur selama PT PII beroperasi dan juga didukung dengan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam pengelolaan transaksi.

Melalui kegiatan PDF, PT PII terlibat sejak tahap perencanaan melalui pendampingan untuk membantu PJPK menyusun kajian pra-studi kelayakan dan dokumen lelang sebelum proyek dilaksanakan. Dari sisi transaksi proyek, PT PII mendampingi PJPK dari mulai penyiapan transaksi hingga mencapai tahap pembiayaan (*financial close*). Dengan keterlibatan PT PII sejak awal penyiapan proyek, dapat meningkatkan kepastian keberhasilan transaksi dengan pihak investor yang berujung pada kepastian pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan efisien.

Pelaksanaan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi

Hingga akhir tahun 2021, PT PII telah menerima penugasan untuk pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk 13 (tiga belas) proyek aktif, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Riau

Pada tanggal 21 Mei 2018, Kementerian Keuangan dan PT PII bersama-sama menandatangani Perjanjian Penugasan Fasilitas Pendampingan Penyiapan dan Transaksi KPBU Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera yang meliputi ruas Sumatera Selatan dan Riau. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas tersebut, maka PT PII memiliki kewajiban untuk melaksanakan tahapan-tahapan pada tahapan penyiapan dan transaksi yang diperlukan untuk memastikan proyek dapat direalisasikan.

Ruang lingkup skema KPBU Proyek ini meliputi atas Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan pada masa konstruksi serta masa layanan dan Pembiayaan Proyek oleh Badan Usaha yang ditunjuk melalui proses pengadaan yang adil dan transparan. Nilai investasi Proyek ini adalah sebesar Rp526 miliar, sedangkan sumber pengembalian Proyek ini diusulkan skema *Availability Payment* ("KPBU-AP") dengan masa periode kerja sama selama 15 tahun (termasuk 3 tahun masa konstruksi).

Manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat dapat terlihat dari adanya penurunan Biaya Operasi Kendaraan (BOK) dan Nilai Waktu dimana masyarakat mendapatkan penghematan BOK dan Nilai Waktu jika melewati ruas jalan yang telah dipelihara oleh proyek ini. Perbedaan yang paling signifikan terletak pada perbedaan kecepatan antara dengan dan tanpa proyek. Selain manfaat langsung, terdapat juga manfaat tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, seperti diantaranya penurunan harga barang, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar, berkurangnya polusi udara dan sebagainya.

Penugasan PT PII sebagai pelaksana fasilitas PDF telah selesai dengan terpenuhinya *milestone Financial Close*



dimana ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit antara PT Adhi Jalintim Riau ("AJR") dan para kreditur sindikasi untuk proyek Jalan Lintas Timur Sumatera ruas Riau pada tanggal 24 September 2021.

2. Kereta Api Makassar-Parepare

Penugasan oleh Kementerian Keuangan yang diberikan kepada PT PII atas Pendampingan Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare secara resmi ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2018. Melalui penugasan tersebut, maka PT PII memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan kepada PJPK dalam penyiapan dokumen lelang dan transaksi proyek sampai dengan tahapan *financial close* dalam pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare melalui skema KPBU.

Lokasi Proyek yang akan dibangun berada di Sulawesi Selatan yang meliputi 5 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan selaku PJPK merencanakan masa kerja sama Proyek sepanjang 17 tahun sejak Operasi Komersial Pertama. Lingkup pekerjaan calon Badan Usaha Pelaksana (BUP) adalah melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan, pembiayaan, pengoperasian, perawatan dan penyerahan (DBFOMT) aset yang dibangun, dengan nilai investasi sekitar Rp991 miliar dan pengembalian melalui skema *Availability Payment* (AP).

Dengan direalisasikannya Proyek ini, manfaat utama yang dapat dirasakan adalah peningkatan lalu lintas barang dan penumpang, pembangunan konektivitas nasional, peningkatan jumlah barang-barang yang dapat diangkut oleh kereta api sesuai dengan target RPJMN serta sebagai pemenuhan target pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km. Selain dari manfaat utama di atas, manfaat proyek ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang meliputi:

- Infrastruktur jalur kereta api yang terbangun dapat memberikan efek pengganda atas PDB, serta penyerapan peningkatan kegiatan ekonomi sehingga mendukung pemerataan di ekonomi di Pulau Sulawesi;
- Manfaat penghematan biaya dan waktu merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan dan moda transportasi lainnya atau yang belum menggunakan moda transportasi kereta api;

Dengan dibangunnya jalur kereta api Makassar- Parepare, maka secara signifikan sektor konstruksi di daerah tersebut akan mengalami peningkatan atas angka kesempatan kerja bagi masyarakat;

Pembangunan proyek ini dapat memicu munculnya sektor usaha pendukung yang juga mendorong pergerakan dan pertumbuhan permintaan barang dan jasa untuk kegiatan perdagangan dan industri eksisting.

Penugasan PT PII sebagai pelaksana fasilitas PDF Proyek Kereta Api Makassar-Parepare telah berakhir sehubungan dengan telah berhasilnya Proyek dalam memperoleh pemenuhan pembiayaan (*financial close*) yang ditandai dengan ditandatanganinya dokumen Persetujuan oleh Pemegang Saham PT Celebes Railway Indonesia yang bertindak selaku Badan Usaha Pelaksana Proyek pada tanggal 30 April 2021.

3. Pembangunan Proyek Proving Ground BPLJSKB Bekasi

Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan Keputusan Menteri No. 7 Tahun 1988 merupakan pelaksana uji tipe kendaraan bermotor. Saat ini, BPLJSKB telah diperlengkapi dengan fasilitas uji kendaraan bermotor dalam ruangan (*indoor test*) maupun di luar ruangan (*outdoor test*). BPLJSKB sudah memiliki sejumlah fasilitas peralatan uji modern dengan total 15 unit peralatan uji yang telah diakui dan mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Namun, BPLJSKB belum mempunyai fasilitas *outdoor test* yaitu *proving ground* yang mengacu kepada standard ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* (ASEAN MRA) yang mengadopsi sebagian standar *United Nation Regulation* (UNR) sebagai standar yang diakui secara regional/global.

Oleh karena kebutuhan yang telah disebutkan di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berencana untuk mengadakan kawasan *Proving Ground* Bekasi melalui skema KPBU untuk mendapatkan hasil pengujian tipe kendaraan bermotor yang lebih akurat dan mengacu kepada standar internasional hingga dapat meningkatkan keselamatan berkendara guna meminimalkan angka kecelakaan yang disebabkan oleh faktor ketidaklaikan kendaraan bermotor dan dapat mengurangi emisi yang disebabkan oleh polusi dari kendaraan bermotor. Skema KPBU dinilai tepat dengan melibatkan partisipasi Badan Usaha dalam pembangunan, pengadaan, perawatan fasilitas dan peralatan pengujian tipe kendaraan.

Informasi Proyek

PJPK	Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
Skema Proyek	<i>Design-Build-Finance-Maintain-Transfer (DBFMT) - Availability Payment</i>
Lingkup KPBU	Perencanaan (<i>design</i>), rekayasa (<i>engineering</i>), pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pembiayaan dan penyerahan kembali Fasilitas serta pelaksanaan Pekerjaan oleh BUP; dan Pemberian dan penyediaan Layanan oleh BUP kepada BPLSJKB.
Estimasi Nilai Investasi	Rp1,74 triliun
Masa Kerjasama	17 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi)
Tahapan	Prakualifikasi
Manfaat Proyek	Meningkatkan standar keselamatan kendaraan bermotor untuk kebutuhan nasional dan internasional. Menjaga kualitas udara melalui pengendalian tingkat emisi sehingga dapat meningkatkan perlindungan lingkungan di Indonesia. Menjadikan produk Indonesia akan dapat langsung diterima di ASEAN. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara dari meningkatnya ekspor.

Penugasan oleh Kementerian Keuangan yang diberikan kepada PT PII atas Pendampingan Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU Pembangunan *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi secara resmi dimulai sejak diterbitkannya KMK Penugasan pada tanggal 19 Juli 2019. Saat ini Proyek sedang memasuki tahapan prakualifikasi yang ditandai dengan telah dilakukan Pengumuman Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Proyek oleh Panitia Pengadaan pada tanggal 24 November 2021.

4. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Badung

Proyek JLS Badung bertujuan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Badung sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjiwa budaya Bali melalui sinergi pengembangan Wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan dan berlandaskan Tri Hita Karana, yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 ("Perda Badung No. 26/2013") dan RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029 sebagai acuan kebijakan penataan ruang pada Provinsi Bali. Selain manfaat atas percepatan pembangunan akan dirasakan oleh pihak publik, dengan Proyek tersebut masyarakat akan dapat merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari Proyek, yakni sebagai berikut:

- Peningkatan kesempatan kerja dimana secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan penduduk atas pendapatan yang dihasilkan dari Proyek ini;
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tersambungannya akses jalan sehingga dapat membuka daerah baru untuk tujuan pariwisata.
- Mengurangi tingkat kemiskinan; serta
- Mendukung kelancaran lalu lintas sehingga waktu tempuh antar wilayah dan mobilitas pengendara menjadi lebih singkat dan efektif, yang selanjutnya juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ini.



Informasi Proyek*

PJK	Bupati Badung
Skema Proyek	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT) - Availability Payment</i>
Lingkup KPBU	Ruang lingkup Badan Usaha Pelaksana dalam adalah sebagai berikut: • Menyusun DED untuk seluruh sarana dan prasarana jalan dalam lingkup KPBU. • Membangun sarana dan prasana jalan dalam lingkup KPBU. • Membiayai pembangunan proyek yang diperlukan terkait pekerjaan yang dilakukan. • Mengoperasikan sarana dan prasarana jalan. • Pemeliharaan sarana dan prasarana jalan. • Serah terima seluruh aset kepada PJK di akhir masa konsesi. Segmen yang menjadi ruang lingkup KPBU adalah sebagai berikut: • Segmen 2 sepanjang 6,3 km termasuk 1 km terowongan. • Segmen 4 sepanjang 5,6 km.
Estimasi Nilai Investasi	Capex: Rp2,3 triliun Opex: Rp1,2 triliun
Estimasi Masa Kerjasama	15 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi)
Tahapan	FBC Akhir

* Berdasarkan FBC Awal Jalan Lingkar Selatan Badung (2021)

Pada tanggal 16 September 2020, PT PII telah menerima Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai Penugasan PDF Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Badung. Selanjutnya tanggal 22 September 2020, Kementerian Keuangan dan PT PII bersama-sama menandatangani Perjanjian Penugasan Fasilitas Pendampingan Penyiapan dan Transaksi KPBU Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Badung. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas tersebut, maka PT PII memiliki kewajiban untuk melaksanakan tahapan-tahapan pada tahapan penyiapan dan transaksi yang diperlukan untuk memastikan Proyek dapat direalisasikan. Pada akhir tahun, tanggal 30 Desember 2020, PT PII telah menerbitkan *Confirmation to Proceed (CTP)* untuk Proyek KPBU Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung. Pada tanggal 5 November 2021 telah diselesaikan Laporan Awal FBC.

5. Pembangunan Bandar Udara Singkawang

Kota Singkawang merupakan sebuah kota di Provinsi Kalimantan Barat (kurang lebih 153 km dari Ibukota Provinsi, Kota Pontianak). Komunitasnya yang harmonis dan beragam berkontribusi pada keunikan Singkawang yang menjadikannya sebagai tujuan wisata budaya dan religi yang potensial. Selain itu, Kota Singkawang juga memiliki berbagai peluang investasi antara lain seperti industri 4.0, *logistic (hub)*, depo gas, pertanian dan budidaya perairan (akuakultur) hingga kawasan hunian.

Proyek KPBU Bandara Singkawang merupakan salah satu proyek nasional yang direncanakan dengan menggunakan skema KPBU sesuai dengan Renstra Ditjen Hubud 2020-2024 dan termasuk dalam Program Prioritas Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Rencana lokasi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi Bandar Udara Singkawang sudah tercakup pada Rencana Induk Nasional Bandar Udara dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 166 Tahun 2019 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional, dimana Proyek KPBU Bandar Udara Singkawang dikategorikan sebagai Bandar Udara Pengumpan dengan Klasifikasi 4C dan penggunaan sebagai bandar udara domestik yang kedepannya diharapkan mampu mengaktifkan pertumbuhan ekonomi dan membantu meminimalkan waktu perjalanan, karena sebagian besar masyarakat menggunakan Bandara Supadio Pontianak (PNK) untuk bepergian ke daerah masing-masing.

Informasi Proyek

PJKP	Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
Skema Proyek	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT) - User Charge</i>
Lingkup KPBU	• Menyusun DED untuk seluruh fasilitas dalam lingkup KPBU. • Membangun fasilitas lingkup KPBU untuk sisi udara, darat, termasuk fasilitas pendukung. • Membiayai seluruh dana yang diperlukan terkait pekerjaan yang dilakukan. • Mengoperasikan fasilitas bandara. • Pemeliharaan aset infrastruktur. • Serah terima seluruh aset kepada PJKP di akhir masa konsesi.
Estimasi Nilai Investasi	Rp1,67 triliun
Estimasi Masa Kerjasama	33 tahun (termasuk 3 tahun konstruksi)
Tahapan	Penyiapan KPBU - FBC Awal

Pada tanggal 31 Januari 2020, PJKP mengajukan permohonan fasilitas PDF kepada Menteri Keuangan yang kemudian disetujui pada tanggal 6 September 2020 melalui Surat Menteri Keuangan perihal persetujuan atas permohonan fasilitas PDF untuk Proyek. Proses pemberian fasilitas ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya kesepakatan induk antara Kemenkeu dan PJKP pada tanggal 23 November 2020. Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada 13 Januari 2021 yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian penugasan antara Kemenkeu dan PT PII pada 12 April 2021. Selanjutnya, perjanjian pelaksanaan fasilitas tertanggal 14 April 2021 dapat dilaksanakan antara PT PII dengan Kemenhub sebagai PJKP Proyek.

6. Pembangunan SPAM Regional Wosusokas Tahap II

Pembangunan SPAM Regional Wosusokas merupakan upaya pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam hal penyediaan air bersih bagi masyarakat dan termasuk dalam salah satu target pembangunan untuk wilayah Jawa Tengah. SPAM Regional Wosusokas sendiri terbagi ke dalam 2 (dua) tahapan, dimana Tahap I dibangun melalui APBN-Loan dan Tahap II direncanakan melalui skema KPBU. Proyek SPAM Wosusokas Tahap II rencananya akan memiliki kapasitas debit air sebesar 700 l/det dan *clear well* 2.500 m³ dengan rencana wilayah pelayanan meliputi Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Informasi lebih lanjut terkait Proyek SPAM Wosusokas Tahap II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Informasi Proyek*

PJKP	PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah
Skema Proyek	<i>Build-Operate-Transfer (BOT) - User Tariff</i>
Lingkup KPBU	• Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 700 l/det. • Pembangunan <i>clear well</i> 2.500 m³. • Pembangunan Jaringan Pipa Utama dan Jembatan Pipa.
Estimasi Nilai Investasi	Rp781 miliar
Estimasi Masa Kerjasama	20 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi)
Wilayah Pelayanan	Kab. Sukoharjo (200 l/det) Kota Surakarta (500 l/det)
Tahapan	Penyiapan KPBU - <i>Inception Report</i>

* berdasarkan DPP SPAM Regional Wosusokas (2020)

Proyek KPBU SPAM Regional Wosusokas Tahap II telah terdaftar dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah yang mengindikasikan prioritas kebutuhan akan Proyek untuk segera dilaksanakan. Saat ini Proyek termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional dimana proyek/program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha tersebut bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.



Fasilitas PDF untuk Proyek disetujui oleh Kementerian Keuangan tanggal 22 September 2020 sebagai balasan atas surat Permohonan PDF yang sebelumnya telah dikirimkan oleh PJPK ke Kementerian Keuangan tanggal 30 Juli 2020. Kemenkeu dan PJPK kemudian menandatangani kesepakatan induk pada tanggal 26 April 2021 dan diterbitkannya KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada 27 Mei 2021. Selanjutnya, perjanjian penugasan dan perjanjian pelaksanaan fasilitas masing-masing telah ditandatangani pada 26 Juli 2021 dan 30 Juli 2021 dan menjadi dasar pelaksanaan fasilitas hingga saat ini.

7. Pembangunan Rusunawa Cisaranten

Pembangunan Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung ("Rusunawa Cisaranten") merupakan upaya pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam hal penyediaan perumahan yang lebih baik bagi warga Bandung, berdasarkan kebutuhan penduduk yang terus bertambah dan untuk menutupi *backlog* masa lalu. Pembangunan Rusunawa Cisaranten direncanakan melalui skema KPBU. Informasi lebih lanjut terkait Proyek Rusunawa Cisaranten dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Informasi Proyek*

PJPK	Menteri PURR
Skema Proyek	<i>Design-Build-Finance-Maintain-Transfer</i> (DBFMT)
Lingkup KPBU	- Membangun 13 tower yang terdiri dari: 6 tower untuk rusunawa; 3 tower untuk hunian terjangkau; dan 4 tower untuk hunian komersial. - Membangun Mess Pegawai.
Estimasi Nilai Investasi	Rp1,1 triliun
Estimasi Masa Kerjasama	15 tahun (termasuk 4 tahun konstruksi)
Tahapan	Penyiapan KPBU - <i>Inception Report</i>

* berdasarkan OBC Proyek Rusunawa Cisaranten (2020)

Fasilitas PDF untuk Proyek disetujui oleh Kementerian Keuangan tanggal 5 Juli 2021 sebagai balasan atas surat Permohonan PDF yang sebelumnya telah dikirimkan oleh PJPK ke Kementerian Keuangan tanggal 30 Maret 2021. Kemenkeu dan PJPK kemudian menandatangani kesepakatan induk pada tanggal 23 September 2021 dan diterbitkannya KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada 19 Oktober 2021. Selanjutnya, perjanjian penugasan dan perjanjian pelaksanaan fasilitas masing-masing telah ditandatangani pada 13 Desember 2021 dan 14 Desember 2021 dan menjadi dasar pelaksanaan fasilitas hingga saat ini.

8. Pembangunan Rusunawa di KEK Sei Mangkei

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara merencanakan untuk mengembangkan rumah susun guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal untuk para pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan masyarakat yang akan direlokasi akibat adanya program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara atau bencana alam di kota dan kabupaten sekitar. KEK Sei Mangkei memiliki luas lahan 2002,77 Hektar yang diproyeksikan menyerap tenaga kerja sebanyak 83.304 orang sehingga dapat memberikan dampak bangkitan yang di antaranya adalah kebutuhan hunian dan fasilitas perumahan yang layak.

Penyediaan perumahan layak huni merupakan tantangan yang memerlukan uraian dan identifikasi masalah yang tepat agar fasilitas hunian yang disediakan dapat menjawab isu dan kebutuhan yang ada. Sebagai upaya mengkaji kebutuhan perumahan di KEK Sei Mangkei, maka terdapat dua hal yang perlu menjadi dasar pertimbangan yaitu proyeksi penduduk dan *backlog* perumahan atas ketersediaan layanan perumahan. Hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Simalungun dan Kawasan Penyangganya seperti (Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Siantar) mengalami kenaikan dan peningkatan setiap tahunnya, sama halnya dengan penyerapan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei yang mengalami peningkatan dikarenakan rata-rata laju pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni sebesar 17,66 %.

Informasi Proyek*

PJK	Gubernur Sumatera Utara
Skema Proyek	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)</i>
Lingkup KPBU	- Pembangunan unit rusunawa, gedung mixed use (seperti apartemen, hotel, bangunan komersial/supermarket, gedung parkir), SPBU, masjid, taman terbuka umum terpadu dan food court; - Pengoperasian dan pemeliharaan selama masa konsesi; dan - Perolehan pendanaan untuk pembangunan serta pengelolaan Proyek.
Estimasi Nilai Investasi	Rp1,13 triliun
Estimasi Masa Kerjasama	20 Tahun
Tahapan	Pra Penyiapan - Finalisasi Perjanjian Penugasan dan Pelaksanaan PDF

* berdasarkan DPP Proyek Rusunawa Sei Mangkei (2020)

Fasilitas PDF untuk Proyek disetujui oleh Kementerian Keuangan tanggal 23 Maret 2021 sebagai balasan atas surat Permohonan PDF yang sebelumnya telah dikirimkan oleh PJK kepada Kementerian Keuangan tanggal 2 Juli 2020. Kemenkeu dan PJK kemudian menandatangani kesepakatan induk pada tanggal 22 Oktober 2021 dan diterbitkannya KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada 26 November 2021.

9. Pembangunan TPAS Regional Piyungan

TPA Regional Piyungan terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, saat ini memerlukan perbaikan dan optimalisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Walaupun berbagai program telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi sampah di sumbernya, namun belum terlihat efektivitas dari upaya-upaya tersebut dalam menurunkan jumlah sampah yang masuk ke TPA Piyungan. Sementara itu, umur TPA Piyungan yang sudah melebihi umur desainnya dan sudah tidak memadai untuk menampung timbunan sampah, baik dari sisi teknologi yang sudah tertinggal maupun luasan TPA yang sudah sangat sulit untuk diperluas mengingat kawasan pemukiman yang sudah semakin mendekat di sekeliling TPA. Oleh karena itu, beban Pemerintah sebagai pengelola TPA saat ini sudah sangat berat, baik dari sisi operasional maupun pembiayaan yang bergantung pada APBD.

Uraian di atas menggarisbawahi pentingnya dilakukan pengembangan dan kebutuhan-kebutuhan inovasi dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan dengan memperhatikan ketentuan sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, pengembangan proyek ini memungkinkan mekanisme baru pengelolaan sampah di DI Yogyakarta dengan skema KPBU serta agar dapat menjadikan DI Yogyakarta sebagai model percontohan dan rujukan di Indonesia untuk keberhasilan pengelolaan sampah.

Informasi Proyek*

PJK	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Skema Proyek	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)</i>
Pengembalian Investasi	<i>Tipping Fee</i>
Estimasi Nilai Investasi	RDF + AD + SLF, sebesar Rp1,6 triliun RDF + In Vessel Compost + SLF, sebesar Rp1,5 triliun Increation + AD + SLF, sebesar Rp2,1 triliun
Estimasi Masa Kerjasama	20 Tahun
Tahapan	Pra Penyiapan - Finalisasi Perjanjian Penugasan dan Pelaksanaan PDF

* berdasarkan OBC Proyek TPAS Piyungan (2020)

Fasilitas PDF untuk Proyek disetujui oleh Kementerian Keuangan tanggal 12 Juli 2021 sebagai respon atas surat Permohonan PDF yang telah dikirimkan oleh PJK. Kemenkeu dan PJK kemudian menandatangani kesepakatan induk pada tanggal 29 November 2021 dan diterbitkannya KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada 16 Desember 2021.



10. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat

Dalam rangka mendukung upaya percepatan peningkatan konektivitas nasional dan meningkatkan daya saing logistik nasional, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan saat ini tengah menginisiasi upaya percepatan pembangunan pelabuhan baru di wilayah Tanjung Carat, Palembang, Sumatera Selatan, yang kemudian dikenal dengan nama “Terminal Tanjung Carat”. Pembangunan Terminal Tanjung Carat direncanakan melalui skema KPBU. Sebagai langkah awal yang perlu dilalui pada Tahapan Perencanaan KPBU maka disusun dokumen Studi Pendahuluan untuk melihat perlunya (kebutuhan) pelaksanaan Proyek serta potensinya untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha melalui skema KPBU. PT PII berperan sebagai “Project Advisor” Kementerian Perhubungan berhasil menyelesaikan laporan akhir studi pendahuluan untuk Rencana Pembangunan Pelabuhan New Palembang di Lokasi Tanjung Carat pada Mei 2021. Informasi lebih lanjut terkait Proyek Terminal Tanjung Carat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Informasi Proyek*

PJKP	Menteri Perhubungan
Skema Proyek	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)</i>
Lingkup KBPU	Desain dan konstruksi fasilitas infrastruktur; Penyediaan suprastruktur peralatan; Operasional dan pemeliharaan; dan Penyediaan dan pelayanan jasa terkait kepelabuhanan lainnya.
Estimasi Nilai Investasi	Rp1,45 triliun
Estimasi Masa Kerjasama	50 Tahun
Tahapan	Persiapan Fasilitas PDF

* berdasarkan Studi Pendahuluan Proyek

Pada tanggal 30 Juni 2021 PT PII telah menyampaikan Dokumen Rencana Kerja PT PII dalam pelaksanaan Fasilitas PDF Proyek Tanjung Carat kepada PDPPI Kementerian Keuangan. Dokumen ini meliputi indentifikasi lingkup dan jenis kegiatan, analisis *critical path*, indikasi *timeline*, dan kesiapan kapasitas internal PT PII sebagai BUMN pelaksana Fasilitas PDF. Dokumen ini akan memberikan informasi yang memadai untuk memahami tingkat kompleksitas Proyek dan indikasi atas hal-hal yang harus ditindaklanjuti dalam penyiapan proyek baik dari aspek hukum, teknis, maupun komersial.

Fasilitas PDF untuk Proyek disetujui oleh Kementerian Keuangan tanggal 12 Juli 2021 sebagai balasan atas surat Permohonan PDF yang sebelumnya telah dikirimkan oleh PJKP ke Kementerian Keuangan tanggal 28 Mei 2020. Sampai dengan saat ini PJKP sedang dalam proses pemenuhan Prasyarat Kesepakatan Induk.

11. Pembangunan Jaringan Gas Kota Batam

Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Indonesia dilakukan dalam upaya mendukung program pemerintah dalam mewujudkan bauran energi gas bumi hingga 33% di Tahun 2025, dan mendukung kebijakan Pemerintah dalam membangun kedaulatan dan kemandirian di bidang energi yang secara bertahap berdampak terhadap berkurangnya subsidi Pemerintah yang bersumber dari APBN. Pembangunan jaringan gas bumi ini juga untuk mewujudkan ketahanan energi nasional serta mendukung program diversifikasi energi dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, dengan pengalihan penggunaan LPG tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg.

Secara umum, jumlah konsumsi LPG bersubsidi di Kota Batam terus meningkat dari 28,991 MT pada tahun 2015 hingga 36,412 MT di tahun 2019 atau sekitar 5,0% per tahun. Peningkatan jumlah konsumsi tersebut menyebabkan subsidi LPG dari Pemerintah mengalami peningkatan dari Rp139 miliar di tahun 2019 menjadi Rp201,6 miliar di tahun 2019 atau sekitar 9,6% per tahun. Berdasarkan nilai tersebut, dapat dikatakan bahwa potensi pengembangan jaringan gas rumah tangga dengan menggunakan sumber daya nasional serta dengan adanya substitusi besaran subsidi yang diberikan Pemerintah, maka rencana pengembangan Proyek menggunakan skema KPBU adalah salah satu alternatif skema yang dapat dipertimbangkan. Berikut di bawah ini adalah ringkasan atas informasi Proyek yang akan dikembangkan:

Informasi Proyek*

PJK	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
Estimasi Nilai Investasi	Rp2,37 triliun
Cakupan Proyek	Pengembangan Opsi Bentuk KBPU: BOT. O & M, dll.
Masa Kerjasama	30 tahun
Mekanisme Pengembalian Investasi	Pengembangan Opsi: <i>User Charge.</i> <i>Availability Payment.</i>
Status Proyek	Permohonan Fasilitas PDF Kementerian Keuangan

Persetujuan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KBPU Pembangunan Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga Kota Batam telah diberikan pada tanggal 7 September 2021, hal ini merupakan balasan persetujuan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek yang sebelumnya dikirimkan pada tanggal 9 Juni 2021.

Bersama dengan Rencana Proyek KBPU Jaringan Gas Palembang (dijelaskan di bawah), PT PII telah mengirimkan Kajian Kesiapan PT PII dalam melaksanakan penugasan PDF untuk kedua kota, Batam dan Palembang, tersebut. Dalam kajian tersebut disampaikan pemahaman mengenai kebutuhan Proyek, rencana pengembangan kajian di bidang hukum, teknis, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, risiko, dukungan dan rencana tindak lanjut. Disampaikan juga mengenai rencana pengelolaan sumber daya untuk mendukung penugasan tersebut terkait rencana waktu, sumber daya manusia, dan kebutuhan sinkronisasi proyek di 2 lokasi berbeda tersebut. PT PII juga telah memasukkan kajian awal identifikasi kebutuhan regulasi sebagai upaya meminimalisir kemungkinan hambatan terhadap progress proyek bagi PJK.

12. Pembangunan Jaringan Gas Kota Palembang

Pada waktu yang bersamaan, Pemerintah juga memberikan persetujuan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KBPU Pembangunan Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga Kota Palembang pada tanggal 7 September 2021 yang merupakan juga balasan dari Surat Permohonan Pengajuan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek bersamaan dengan kota Batam pada tanggal 9 Juni 2021.

Beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan Kota Palembang sebagai salah satu kota untuk dibangun jaringan gas rumah tangga skema KBPU antara lain adalah karena dekat dengan infrastruktur jaringan pipa gas bumi existing dan terdapat potensi pasar pengguna jaringan gas.

Dengan posisinya sebagai Ibukota Sumatera Selatan dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak dan gas bumi, batubara, perkebunan kelapa sawit, karet, dan *pulp*, membuat Kota Palembang menjadi pusat perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Berikut di bawah ini adalah tabel ringkasan singkat atas Proyek yang akan dikembangkan:

PJK	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas)
Estimasi Nilai Investasi	Rp3,2 triliun
Cakupan Proyek	Pengembangan Opsi Bentuk KBPU: • BOT. • O & M, dll.
Masa Kerjasama	30 tahun
Mekanisme Pengembalian Investasi	Pengembangan Opsi: <i>User Charge.</i> <i>Availability Payment.</i>
Status Proyek	Permohonan Fasilitas PDF Kementerian Keuangan



Pelaksanaan Jasa Konsultasi (Advisory)

PT PII saat ini tengah mengupayakan pengembangan usaha di luar segmen usaha penjaminan dan PDF, yakni melalui kegiatan jasa konsultasi (*advisory*) berupa penyiapan proyek di luar fasilitas PDF. Berbekal pengalaman Perusahaan di kedua segmen usaha sebelumnya, PT PII berkeyakinan mampu mengembangkan kegiatan bisnis *advisory*. Industri *advisory* sendiri hingga saat ini dipandang memiliki daya tarik dimana masih terdapat berbagai keterbatasan pemilik proyek infrastruktur baik dari sisi teknis penyiapan maupun kapasitas dan kapabilitas sehingga pendampingan secara *end-to-end* saat diperlukan.

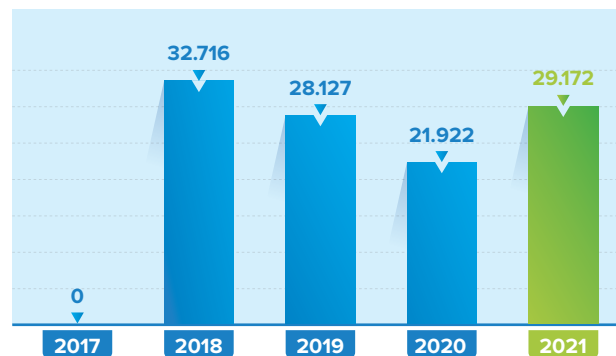
Pada tahun 2021, PT PII mulai melaksanakan kegiatan *advisory* melalui *pilot project* Pelabuhan New Palembang Tanjung Carat dimana Perusahaan berperan sebagai “*Project Advisor*” melalui skema penunjukan langsung dari Kementerian Perhubungan c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan hasil keluaran berupa dokumen Identifikasi Proyek dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kesiapan Data Dukung untuk Studi Pendahuluan Proyek. Kegiatan *advisory* Perusahaan kemudian dilanjutkan melalui pemberian jasa konsultasi untuk Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Perhubungan, dimana PT PII mendampingi penyusunan pedoman untuk Kajian Pra Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU.

Sebagai bentuk komitmen dan upaya persiapan internal Perusahaan untuk dapat terjun dalam bidang *advisory*, PT PII kemudian menyusun suatu Kajian Kesiapan, baik dari sisi kompetisi maupun kompetensi, serta identifikasi pemenuhan persyaratan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diperlukan. Dengan demikian, kedepannya PT PII diharapkan dapat melaksanakan *advisory* secara optimal.

Kinerja Keuangan Segmen Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi

Pada tahun 2021, pendapatan yang diperoleh segmen usaha penyiapan proyek dan pendampingan transaksi sebesar Rp29,2 miliar, meningkat sebesar Rp7,3 miliar atau 33,1% dari tahun 2020 yang sebesar Rp21,9 miliar.

Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
(Rp-juta)



“

Dalam penempatan dana, PT PII selalu berpedoman pada Operating Manual dan kebijakan yang telah ditetapkan, secara akuntabel dan transparan.

”

SEGMENT PENGELOLAAN DANA

Kegiatan Operasi dan Usaha Pengelolaan Dana

Dalam segmen Pengelolaan Dana, Perusahaan melakukan kegiatan penempatan dana pada instrumen keuangan yang telah ditetapkan dalam ketentuan, diantaranya instrumen investasi pasar uang, obligasi, dan reksa dana dengan bobot penempatan yang disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal dengan risiko yang terukur.

Perusahaan memiliki beberapa sumber pendapatan usaha, yaitu dari aktivitas penjaminan, penyiapan proyek dan pendampingan transaksi ("PDF"), serta dari aktivitas pengelolaan dana. Sesuai dengan bisnis inti, pendapatan Perusahaan diupayakan ke depannya sumber pendapatan usaha terbesar berasal dari aktivitas penjaminan dan PDF. Sedangkan aktivitas pengelolaan dana sebagai pendukung proses kegiatan bisnis inti. Peruntukan pengelolaan dana di samping bertujuan untuk investasi, juga berperan dalam menjaga likuiditas keuangan Perusahaan dan menjaga kapasitas penjaminan oleh Perusahaan.

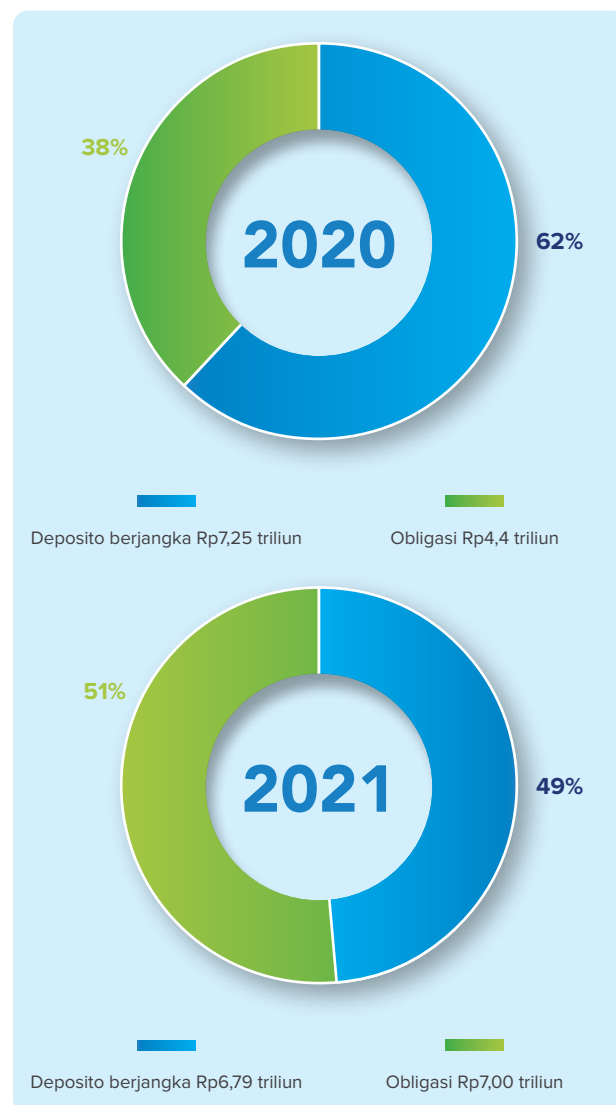
Kebijakan Strategis dan Produktivitas Pengelolaan Dana

Sebagaimana kita ketahui, tahun 2021 merupakan tahun pemulihan setelah pandemi COVID-19 yang ditetapkan pada awal Maret 2020. Bersamaan dengan tahap pemulihan pada pertengahan tahun 2021 sempat tertahan karena terjadi gelombang kedua penyebaran varian Omicron sehingga kembali dilakukan pembatasan mobilitas.

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan juga berdampak terhadap perekonomian nasional, khususnya suku bunga acuan yang masih rendah dan pertumbuhan kredit yang belum optimal. Hal ini memberikan tantangan bagi pengelolaan dana yang dilakukan PT PII di tahun 2021, sehingga untuk pengelolaan dana yang optimal diperlukan perubahan strategi pengelolaan dana melalui *reprofiling* portofolio pengelolaan dana.

Sampai akhir 2021, Perusahaan memperoleh pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp735,9 miliar dengan rata-rata tingkat pengembalian bunga sebesar 5,78%, masih lebih tinggi 226 basis poin dibandingkan BI 7D Repo Rate 3,5%.

Portofolio investasi Perusahaan sampai dengan Desember 2021 terdiri dari investasi atas deposito berjangka (49%) dan investasi atas pendapatan tetap (obligasi) (51%) dari total pengelolaan dana sebesar Rp13,8 triliun.



Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Pengelolaan Dana

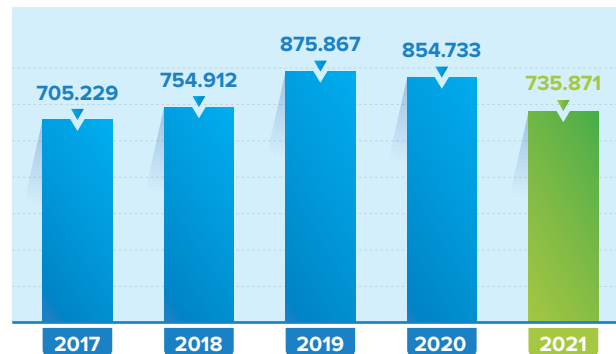
Komposisi pendapatan dari penjaminan terdiri atas pendapatan provisi dan komisi, pendapatan premi dan pendapatan penjaminan *loss limit*, sedangkan pendapatan dari PDF terdiri dari biaya pelaksanaan penugasan PDF yang telah tercapai penyelesaian dokumen keluarannya sesuai dengan kriteria penagihan dalam Kontrak Penugasan PDF ditambah *opportunity margin*. Sementara itu, pendapatan dari pengelolaan dana diperoleh dari penempatan aset keuangan Perusahaan pada berbagai instrumen investasi yang diperkenankan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam PMK No. 95/PMK.08/2017. Beban usaha Perusahaan terutama terdiri dari beban penjaminan, beban PDF, beban administrasi dan umum, serta beban pengembangan terkait dengan komunikasi dan sosialisasi bidang usaha Perusahaan.



Tahun 2021, Perusahaan membukukan pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp735,9 miliar, turun sebesar Rp118,9 miliar atau 13,9% dibandingkan pendapatan pengelolaan dana tahun 2020 sebesar Rp854,7 miliar, di tengah *trend* kenaikan/penurunan suku bunga acuan sepanjang tahun 2021 dengan *return* 6,01% bps di atas rata-rata suku bunga acuan (2020: +333 bps).

PENDAPATAN PENGELOAAN DANA

(Rp-juta)



SEGMENT LAINNYA

Selain pelaksanaan mandat utamanya PT PII juga terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman terkait penyediaan proyek infrastruktur di Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem infrastruktur, sehingga PT PII dapat mewujudkan visinya untuk menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Pengembangan Ekosistem Infrastruktur

Kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan alternatif mulai terasa dampaknya dengan meningkatnya partisipasi investor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Namun demikian, keterbatasan pengetahuan dan kapasitas para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan menjadi tantangan tersendiri untuk penyediaan infrastruktur, khususnya yang menggunakan skema alternatif seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menyadari hal tersebut, PII menjadikan upaya pengembangan ekosistem infrastruktur sebagai salah satu pilar utama kegiatan Perusahaan. Pembentukan IIGF Institute merupakan insiatif strategis PT PII dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan melalui diseminasi pemahaman, perencanaan, dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU.

Sebagai Divisi yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi *knowledge management* Perusahaan, IIGF Institute memiliki visi utama untuk menciptakan ekosistem pembangunan infrastruktur yang lebih baik sehingga dapat mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mewujudkan visi ini, IIGF Institute memiliki fokus kegiatan Edukasi, Riset, Publikasi, Advokasi Kebijakan dan *Outreach*.

Edukasi

Program edukasi bertujuan untuk mendiseminasi informasi serta meningkatkan pengetahuan pemangku kepentingan terkait dengan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pelaksanaan program edukasi terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu *Capacity Building* dan penyelenggaraan *Certified PPP Professional (CP3P)*.

Pada kegiatan *Capacity Building*, IIGF Institute bekerjasama dengan Divisi *Guidance and Consultation* yang memegang peran penting sebagai fungsi terdepan dalam berhubungan dengan PJPK dan calon PJPK. Selain dengan pihak internal, IIGF Institute juga menjadi fasilitator pelaksana *capacity building* Kantor Bersama KPBU bekerjasama dengan pihak eksternal diantaranya, dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas serta mitra akademik nasional maupun daerah yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan proyek yang direncanakan.

Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 yang menyebabkan terbatasnya mobilisasi berdampak pada cara Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Namun demikian IIGF Institute tetap aktif melaksanakan kegiatan *capacity building* dengan cara pengalihan kegiatan yang biasanya dilakukan dengan pertemuan fisik menjadi format online meeting atau webinar. Sepanjang tahun 2021 PII melalui IIGF Institute telah melaksanakan kegiatan *capacity building* sebagai berikut:

No	Instansi	Proyek	Tanggal
1	Pemerintah Kabupaten Ngawi	Ngawi <i>Planetarium Agro Park</i>	Februari 2021
2	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Sosialisasi KPB dan <i>Screening Project</i>	Februari 2021
3	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	<i>Unsolicited Light Rapid Transit</i> Jakarta (Pulo Gebang - Joglo)	Februari 2021
4	Arsip Nasional Republik Indonesia	Sosialisasi KPB	Maret 2021
5	Kantor Wilayah DJKN Aceh, Jateng-DIY, Jatim, Riau-Sumbar-Kepri, Lampung-Bengkulu	Sosialisasi KPB	April 2021
6	Badan Otorita Borobudur, Kementerian Pariwisata	Kawasan Pariwisata Terpadu Zona Otorita Borobudur	Mei 2021
7	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Mohammad Natsir Solok Provinsi Sumatera Barat	Mei 2021
8	Pemerintah Kota Samarinda	Sosialisasi KPB	Agustus 2021
9	Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur	Sosialisasi KPB	Agustus 2021

Selain kegiatan *capacity building*, untuk memastikan tercapainya peningkatan kapasitas ekosistem infrastruktur atas skema KPB melalui peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di bidang infrastruktur, sejak tahun 2019 IIGF Institute telah resmi menjadi *Accredited Training Organization (ATO)* untuk *Certified PPP Professional (CP3P)* dari *Accrediting Professional Manager Globally (APMG)*. Program CP3P merupakan program sertifikasi kompetensi KPB berstandar internasional yang dikembangkan oleh World Bank Group (WBG) bersama Asian Development Bank (ADB), European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), Islamic Development Bank (IsDB), dan Inter-American Development Bank (IDB) dan sebagian didanai oleh Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PIIAF). Program inovasi dari World Bank Group (WBG) tersebut memiliki visi bersama yaitu untuk mencapai peningkatan kinerja PPP secara global.

Adapun objektif pelaksanaan program CP3P adalah untuk membekali individu, *stakeholder*, serta para profesional mengenai *best practice* KPB level internasional sehingga diharapkan dapat menciptakan *framework* KPB yang lebih optimal, dapat meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan proyek KPB yang berkualitas, dapat meningkatkan *skill* dan kapabilitas dalam hal pendampingan penyiapan proyek serta mendapatkan peluang untuk mengembangkan bisnis pada proyek KPB.

Berdasarkan objektif tersebut, Program Sertifikasi CP3P dapat diikuti oleh kalangan umum dari berbagai disiplin ilmu ataupun sektor, terutama bagi para praktisi/profesional KPB di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Praktisi KPB, Investor, Operator dan Lembaga Keuangan, serta Konsultan (Keuangan, Hukum, dan Teknis) yang ingin memperoleh kredensial KPB yang dapat diakui secara global.

Selama tahun 2021 ATO PT PII melalui IIGF Institute telah melaksanakan kegiatan Program CP3P *Level Foundation* sebanyak 6 *batch* dengan tingkat kelulusan rata-rata 80%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Peserta	Tanggal Pelaksanaan Course	Tanggal Pelaksanaan Ujian
1	CP3P Foundation Level Batch 3 (Public Course)	9 peserta yang terdiri dari: PT PLN (Persero) PT Geodipa Energi (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PT PLN (Persero) PT Geo Dipa Energi (Persero)	31 Mei - 3 Juni 2021 Virtual (Zoom)	4 Juni 2021 Main Hall PT PII



No.	Kegiatan	Peserta	Tanggal Pelaksanaan Course	Tanggal Pelaksanaan Ujian
2	CP3P Foundation Level Secondment Kementerian Keuangan (Private Course)	37 peserta yang terdiri dari perwakilan unit Eselon I dibawah Kementerian Keuangan	27 Juli - 10 Agustus 2021 Virtual (Zoom)	13 Agustus 2021 Virtual (ALP)
3	CP3P Foundation Level Batch 4 (Public Course)	10 peserta yang terdiri dari: Kenny Wiston Law Office PT Pertamina Gas PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bank Syariah Indonesia Assegaf Hamzah & Partners	6-8 September 2021 Virtual (Zoom)	10 September 2021 Virtual (ALP)
4	CP3P Foundation Level Batch 5 (Private Course)	12 peserta dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	27-29 September 2021 Virtual (Zoom)	1 Oktober 2021 Virtual (ALP)
5	CP3P Foundation Level Batch 6 (Private Course)	11 peserta dari PT PLN (Persero)	13-15 Desember 2021 Virtual (Zoom)	21 Desember 2021 Virtual (ALP)
6	CP3P Foundation Batch 7 - Refreshment (Private Course)	5 peserta dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	22 Desember 2021 Virtual (Zoom)	27 Desember 2021 Virtual (ALP)

Hingga tahun 2021, ATO PT PII telah memiliki 7 karyawan yang memenuhi syarat sebagai *Certified Trainers*, 134 orang yang memiliki sertifikasi *CP3P Foundation Levels* melalui ATO PT PII dimana 76 orang diantaranya merupakan karyawan PT PII, serta 6 karyawan yang memiliki sertifikasi *CP3P Preparations Level*. Adanya personel bersertifikat dan ditunjang dengan pengalaman industri KPBU selama ini, PT PII melalui IIGF Institute semakin kokoh dalam membantu para pemangku kepentingan utama seperti pembuat kebijakan, pemilik proyek, investor, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempelajari lebih lanjut mengenai penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU.

Pencapaian ATO PT PII lainnya di tahun 2021 yaitu telah resmi dinyatakan *accredited* untuk menyelenggarakan Program CP3P Level *Preparation* dari APMG International pada Bulan Oktober 2021. Untuk mendukung pencapaian tersebut, ATO PT PII juga telah memiliki 1 *accredited trainer* APMG untuk Program CP3P Level *Preparation*. Seluruh pencapaian ini dalam rangka meningkatkan *brand awareness* PT PII sebagai satu-satunya ATO pelaksana Program CP3P di Indonesia dan diharapkan ATO PT PII dapat selalu menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program CP3P setiap tahunnya.

Riset dan Publikasi

Selain edukasi pemangku kepentingan, sejak tahun 2015 IIGF Institute telah melaksanakan berbagai riset yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti Kementerian dan Lembaga teknis terkait, pemilik proyek, akademisi dan universitas serta Lembaga Non-Pemerintahan. Dengan luasnya cakupan masukan dan perspektif dari beragam pihak, hasil riset diharapkan dapat menjawab berbagai macam permasalahan yang muncul dari proyek-proyek infrastruktur di berbagai sektor sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Indonesia.

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan kegiatan riset dan publikasi sebagai berikut:

1. Riset

- Penggunaan Model Keuangan *Value for Money* Kuantitatif (VfM) untuk Infrastruktur Publik di Indonesia, yang merupakan riset lintas tahun yang dijalankan oleh IIGF Institute sejak tahun 2015. *Output* riset ini berupa Panduan yang didesain untuk menjadi salah satu sumber informasi dan referensi bagi para pengambil keputusan, akademisi, serta pelaku infrastruktur secara umum terkait penghitungan VfM untuk proyek infrastruktur di Indonesia.
- Dampak Ekonomi Sosial Proyek Infrastruktur, yang dijalankan untuk memutakhirkan kembali dampak ekonomi dan sosial untuk seluruh sektor yang dijamin PT PII. Riset ini dijalankan oleh tim dari Universitas Padjadjaran sebagai salah satu realisasi dari MoU yang telah disepakati oleh PT PII dan Universitas Padjadjaran sekaligus bentuk komitmen kerja sama dengan anggota University for Infrastructure Development (UNIID).
- Penerapan Skema KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur Perumahan V 2.0. Kajian ini adalah penyempurnaan dari kajian yang diselenggarakan pada tahun 2020. Dalam kajian ini, dilakukan peninjauan dari berbagai aspek terkait kesesuaian penggunaan skema KPBU untuk sektor perumahan.

- d. Kajian Sektor Rumah Sakit Pendidikan (Studi Kasus: RSPTN Unpad). Kajian ini merupakan salah satu bentuk sumbangsih PT PII melalui IIGF Institute dalam upaya menyukseskan skema KPBU pada sektor rumah sakit. Dalam kajian ini dapat diketahui bahwa faktor regulasi dan kelembagaan memiliki peranan penting dalam penentuan PJPK. Selain itu, perhitungan VfM untuk proyek rumah sakit juga cukup kompleks.
 - e. Kajian Panduan Model Kontrak KPBU untuk Proyek Penerangan Jalan Umum. Sektor penerangan jalan umum adalah salah satu sektor yang menantang, mengingat karakteristik proyek ini yang nilainya relatif tidak sebesar sektor lain. Sudah ada beberapa proyek sektor penerangan jalan umum yang diujai oleh PT PII, akan tetapi masih sering mengalami kendala. Beberapa masalah krusial yang sering terjadi dalam sektor ini adalah kapasitas calon PJPK yang masih perlu ditingkatkan terlebih berkaitan dengan struktur proyek dan perumusan perjanjian kerja sama, terutama dalam hal penyusunan kontrak kerja sama.
2. Publikasi
- a. Penerapan Skema KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur Perumahan V 2.0. Publikasi ini merupakan upaya diseminasi hasil riset yang dilakukan oleh IIGF Institute sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sebagai salah satu referensi.
 - b. Panduan Referensi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Versi Bahasa Indonesia. Panduan ini merupakan translasi dari PPP *Guide Reference* V 3.0 yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Publikasi ini merupakan salah satu bentuk kontribusi PT PII dalam memperkaya referensi skema KPBU di Indonesia.

Advokasi Kebijakan dan Outreach

PT PII melalui IIGF Institute menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan melalui kolaborasi dengan mitra strategis di level nasional dan internasional untuk mendorong penyusunan dan implementasi kebijakan yang lebih baik antara lain, K/L (Kementerian/Lembaga), Perguruan Tinggi, Lembaga Riset dan Instansi sejenis lainnya.

Hingga tahun 2021, IIGF Institute telah menjalin kerjasama dengan 35 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang tergabung dalam *University Network for Indonesia Infrastructure Development* (UNIID), yaitu wadah untuk berbagi informasi dan pengalaman serta harmonisasi kebijakan. Melalui UNIID diharapkan dapat mengakomodir seluruh potensi yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi di bidang pembangunan dan penyediaan Infrastruktur.

Adapun kegiatan *outreach* yang dilaksanakan selama tahun 2021 antara lain:

No	Kegiatan	Topik/Tema dan Case Study	Kolaborasi Universitas	Keterangan
1	Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) 21	Optimalisasi Strategi dan Alternatif Skema Pembiayaan KPBU dalam Ruang Lingkup Perguruan Tinggi. <i>Case study</i> : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tinggi	Universitas Padjajaran	Tanggal pelaksanaan 29 Juni 2021 (<i>virtual</i>)
2	Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) 22	<i>Case study</i> : New Port Ambon	Universitas Pattimura	Tanggal pelaksanaan 29 November 2021 (<i>hybrid</i>)
3	Workshop KPBU	SDM Unggul Untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia	UNIID	Diimplementasikan dalam 4 kegiatan yang dibagi berdasarkan 4 regional wilayah yaitu: Jawa (14-16 Oktober 2021) Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua (18-20 Oktober 2021) Sumatera (25-27 Oktober 2021) Kalimantan (28 -30 Oktober 2021)
4	Audiensi Kementerian Keuangan, UNIID, dan PT PII	Upaya Menyukseskan Proyek KPBU di Daerah	USU	Tanggal Pelaksanaan Online 25 November 2021



Selain itu, terdapat kegiatan Kampus Merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Kegiatan Kampus Merdeka yang didukung oleh PT PII selama tahun 2021 yaitu:

No	Kegiatan	Topik Kegiatan	Kolaborasi Universitas	Tanggal Kegiatan
1	Seminar Nasional	Mini Seminar: Pengenalan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur di Indonesia	Universitas Parahiyangan	7 Agustus 2021
2	Webinar	Fakultas Teknik Bicara IKN	Universitas Mulawarman	27 September 2021
3	Kurikulum Ajar	Kurikulum Ajar Mata Kuliah Pembangunan Infrastruktur Indonesia	PKN STAN	2021

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Lainnya

Di tahun 2021, Perusahaan membukukan pendapatan lainnya sebesar Rp935,3 juta, dimana di tahun sebelumnya Perusahaan belum membukukan pendapatan lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan, pendapatan lainnya ini diperoleh utamanya dari penyelenggaraan pelatihan CP3P.

ASPEK PEMASARAN

Sejak tahun 2018 PT PII telah melaksanakan kegiatan pendampingan atas penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek KPBU melalui penugasan PDF dari Kementerian Keuangan. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan tidak lagi hanya terbatas pada penjaminan KPBU, tetapi juga dapat melakukan pendampingan, baik dari tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi.

Saat ini PT PII terus melanjutkan pengembangan perluasan lingkup atas kegiatan usaha dari tahun-tahun sebelumnya dengan memberikan Penjaminan Pemerintah di bidang lainnya selain infrastruktur atas penugasan Pemerintah dengan mengacu pada PP 55/2009.

PT PII juga ikut serta dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK 211/2020") dan PMK 98/2020.

Selanjutnya pada Tahun 2021, PT PII mendapat perluasan mandat untuk memberikan Penjaminan terhadap Risiko Politik yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan PSN dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan PSN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("PMK 30/2021").

STRATEGI PEMASARAN

Sepanjang tahun 2021, PT PII secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemberian pemahaman mengenai skema KPBU dan peran PT PII secara menyeluruh kepada calon PJPK dan *potential investor*.

Selain itu, Perusahaan juga memberikan pendampingan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam mempelajari, merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan proyek yang akan dibangun dengan skema KPBU sehingga dapat memastikan *pipeline* proyek berpotensi untuk dijamin.

Strategi pemasaran yang digunakan oleh Perusahaan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Kantor Bersama KPBU, calon PJPK, dan para pemangku kepentingan terkait dalam rangka pengusahaan proyek KPBU melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan *hybrid* baik secara *luring & daring (offline)* maupun secara daring (*online*) di tengah keterbatasan kondisi Pandemi COVID-19.

Dalam era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, Perusahaan juga secara aktif melaksanakan kegiatan pemasaran melalui *channel* digital dengan memanfaatkan aplikasi dan *platform* digital yang mendukung kegiatan pemasaran Perusahaan dan sosialisasi mengenai skema KPBU dan peran PT PII kepada pemangku kepentingan seperti tahun sebelumnya. Sehingga dalam kondisi Pandemi yang membatasi kegiatan secara tatap muka, Perusahaan tetap dapat melaksanakan kegiatan pemasaran yang berkelanjutan.

Untuk mendukung PJPK dalam penyiapan proyek KPBU, PT PII secara aktif telah mempertemukan kebutuhan PJPK dalam penyusunan dokumen studi dengan para lembaga ataupun donor yang dapat memberikan bantuan konsultan dalam pembuatan kajian tersebut. Dengan dibantunya PJPK dalam menyiapkan kajian tersebut, diharapkan akan meningkatkan kualitas dan kecepatan proyek secara keseluruhan.

Disisi kebutuhan akan pendanaan proyek infrastruktur, PT PII sepanjang tahun 2021 juga telah melakukan sosialisasi dan diskusi secara intens kepada *potential investor* dan perbankan. Dengan dilakukannya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para investor dan perbankan akan KPBU secara umumnya dan penjaminan infrastruktur secara khususnya sehingga dapat meningkatkan minat mereka dalam berinvestasi pada proyek infrastruktur di Indonesia dengan skema KPBU. Selain itu, PT PII terus mendukung perbaikan ekosistem dalam penerapan skema KPBU yang salah satunya dengan mengadakan forum diskusi

guna mendapatkan masukan dari investor dan perbankan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam melakukan pemetaan atas potensi Penjaminan Pemerintah, PT PII sesuai dengan bidang usaha yang dijalani Perusahaan dengan tetap mengacu kepada dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti Daftar Rencana KPBU/ PPP *Book*, dokumen perencanaan pemerintah, dokumen perencanaan dari sektor infrastruktur terkait, dan sebagainya PT PII kemudian menyusun *pipeline project* dengan kategori *long list* dan *short list projects* dan merumuskan strategi dengan melakukan analisis terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi untuk mendukung pengusahaan sesuai dengan bidang usaha yang dijalani Perusahaan hingga akhirnya ditentukan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan demi mendukung kesinambungan kinerja usaha sampai pada akhirnya menempatkan posisi Perusahaan dalam pasar Penjaminan dan Infrastruktur. Strategi pemasaran tersebut didukung dengan alokasi anggaran dan sumber daya yang efisien, sehingga Perusahaan dapat mengimplementasikan rencana dengan lebih terstruktur dan optimal.

PANGSA PASAR

Strategi *Pipeline* KBPU pada Pangsa Pasar tahun 2021, meliputi *Project Lead*, *Scanning* dan menerapkan skema *Pre-screening* terhadap potensi proyek-proyek KPBU dari berbagai sumber yang berasal dari *Short list & Long list Projects* hingga persiapan pelaksanaan *Screening Project* dengan fokus pada memastikan kelangsungan proyek yang terdampak akibat adanya pandemi, Proyek di sektor-sektor baru seperti Infrastruktur Sosial dan Proyek Pemerintah Daerah. Target Pasar Pangsa ini terdiri dari:

1. Kementerian Pusat yang telah melaksanakan proyek KPBU namun masih memiliki rencana proyek lainnya yang akan dilaksanakan dengan menerapkan skema KPBU dan berpotensi mendapat Penjaminan Pemerintah;
2. Pemerintah daerah yang belum pernah melaksanakan pengembangan proyek infrastruktur dengan menerapkan skema KPBU;
3. Pemerintah daerah yang telah Menerapkan skema KPBU namun masih memiliki rencana proyek lainnya yang berpotensi dilaksanakan dengan menerapkan skema KPBU dan mendapat Penjaminan Pemerintah.



TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Uraian mengenai kinerja keuangan di bawah ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan PT PII yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan keuangan tersebut telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat tanpa modifikasi atau laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT PII tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Bahasan kinerja keuangan PT PII untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan tahunan ini.

KINERJA KEUANGAN

Kinerja Posisi Keuangan

PT PII terus berusaha untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan menjadi modal bagi Perusahaan untuk terus berperan efektif sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk mendukung program Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Dengan prinsip tersebut, PT PII terus berupaya meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan melalui optimalisasi pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan tingkat resiko yang dapat diterima.

Pada tahun 2021, PT PII berhasil membukukan aset sebesar Rp14,1 triliun, tumbuh sebesar 4,4%. Sedangkan jumlah liabilitas selama tahun berjalan mencapai Rp355,7 miliar, naik sebesar 74,3% dan ekuitas di tahun 2021 mencapai sebesar Rp13,8 triliun atau tumbuh sebesar 3,3%.

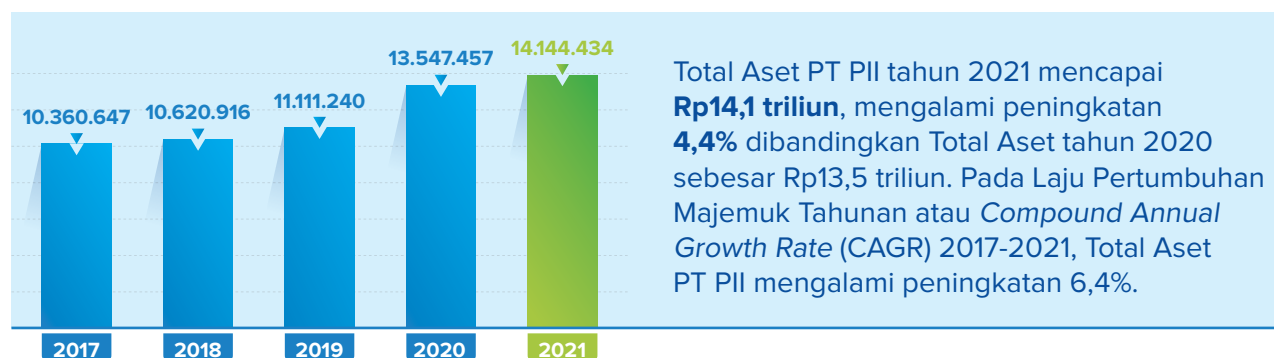
Posisi Keuangan

Posisi Keuangan Konsolidasian	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Aset	14.144.434	13.547.457	596.977	4,4%
Liabilitas	355.720	204.025	151.695	74,3%
Ekuitas	13.788.714	13.343.432	445.282	3,3%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	14.144.434	13.547.457	596.977	4,4%

ASET

Perkembangan Jumlah Aset 2017-2021

(Rp-juta)



Kinerja Aset 2020-2021

Aset	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Kas dan Setara Kas	5.893.948	4.883.893	1.010.055	20,7%
Investasi	7.948.301	8.380.506	(432.205)	-5,2%
Piutang Usaha	169.217	155.189	14.028	9,0%
Piutang Lainnya	10.735	12.757	(2.022)	-15,9%
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	6.734	1.147	5.587	487,1%
Aset Tetap	8.141	10.606	(2.465)	-23,2%
Aset Hak Guna	31.433	50.293	(18.860)	-37,5%
Aset Takberwujud	3.242	2.045	1.197	58,5%
Beban Tangguhan	7.571	19.164	(11.593)	-60,5%
Pajak Dibayar Dimuka	1.613	3.870	(2.257)	-58,3%
Aset Pajak Tangguhan	58.130	22.618	35.512	157,0%
Uang Jaminan yang Dapat Dikembalikan	5.369	5.369	-	0,0%
Jumlah Aset	14.144.434	13.547.457	596.977	4,4%

Kas dan Setara Kas

Posisi kas dan setara kas per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp5,9 triliun, meningkat 20,7% terhadap posisi kas dan setara kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp4,9 triliun. Kenaikan pada kas dan setara kas ini dipengaruhi peningkatan penerimaan pendapatan bunga atas investasi deposito, obligasi dan imbal jasa penjaminan.

Rincian kinerja kas dan setara kas dapat dilihat pada pembahasan arus kas di bagian bawah.

Investasi

Portofolio investasi Perusahaan per 31 Desember 2021 mencapai Rp7,9 triliun, menurun 5,2% terhadap posisi investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp8,4 triliun. Penurunan investasi tersebut terutama disebabkan terdapatnya perubahan signifikan dalam penempatan *time deposit* dari *long-term* (> 3 bulan) menjadi *short-term* (< 3 bulan).

Investasi 2020-2021

(Rp-juta)

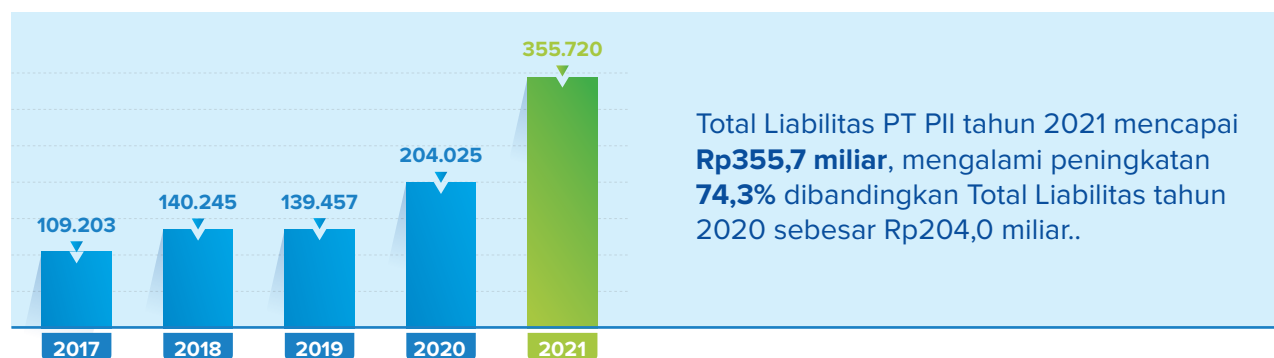




Liabilitas

Perkembangan Jumlah Liabilitas 2017-2021

(Rp-juta)



Kinerja Liabilitas 2020-2021

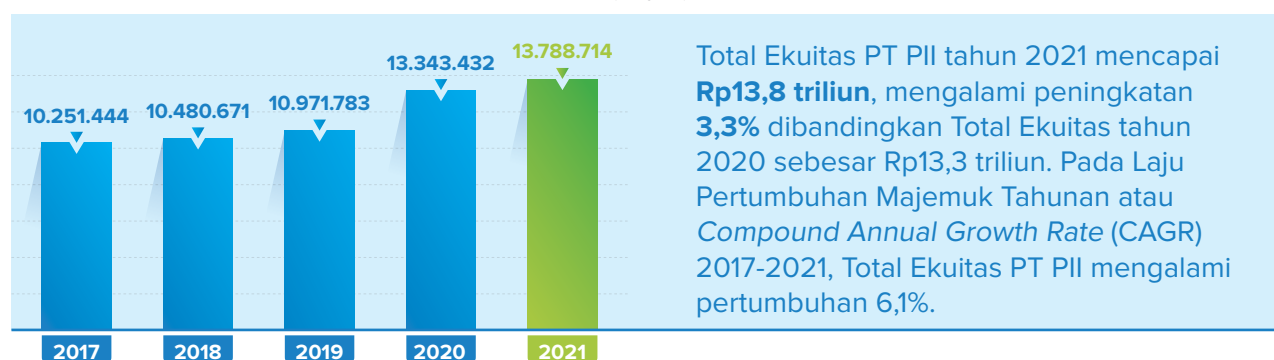
Liabilitas	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Utang Usaha	7.373	3.089	4.284	138,7%
Utang Pajak	4.421	3.258	1.163	35,7%
Biaya yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain	65.282	39.570	25.712	65,0%
Pendapatan Tangguhan	171.117	15.662	155.456	992,6%
Liabilitas Sewa Pembiayaan	33.504	51.094	(17.590)	-34,4%
Pinjaman Penerusan	55.127	55.127	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja	18.896	36.225	(17.330)	-47,8%
Jumlah Liabilitas	355.720	204.025	151.695	74,3%

Posisi liabilitas Perusahaan per 31 Desember 2021 meningkat 74,3% terhadap posisi liabilitas per 31 Desember 2020 yang utamanya disebabkan kenaikan pada pendapatan tangguhan penjaminan *loss limit* dan penjaminan bersama dalam rangka program PEN. Secara komposisi, tiga urutan terbesar komponen liabilitas Perusahaan adalah pendapatan tangguhan, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain serta pinjaman penerusan.

EKUITAS

Perkembangan Jumlah Aset 2017-2021

(Rp-juta)



Kinerja Ekuitas 2020-2021

Ekuitas	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Modal Saham	9.570.000	9.570.000	-	-
Laba Belum Direalisasi atas Kepemilikan Aset Keuangan	300.351	298.993	1.358	0,4%
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial, Setelah Pajak	4.229	(461)	4.690	-1.017,4%
Saldo Laba:				
Ditentukan Penggunaannya – Cadangan Wajib	197.499	166.471	31.028	18,6%
Belum Ditentukan Penggunaannya	3.716.635	3.308.429	408.206	12,3%
Jumlah Ekuitas	13.788.714	13.343.432	445.282	3,3%

Posisi ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2021 meningkat 3,3% terhadap posisi ekuitas per 31 Desember 2020 yang disebabkan karena adanya perbedaan antara asumsi yang digunakan pada perhitungan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi tahun ini. Secara komposisi, modal saham menjadi komponen ekuitas terbesar mencapai 69,4% dari keseluruhan jumlah ekuitas.

KINERJA LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Kinerja Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2020-2021

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pendapatan	922.507	998.111	(75.604)	-7,6%
Beban Usaha	(333.941)	(376.687)	42.746	-11,3%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	588.566	621.424	(32.858)	-5,3%
Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan	36.836	(864)	37.700	-4.363,4%
Laba Tahun Berjalan	625.402	620.560	4.842	0,8%
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak	6.049	291.916	(285.867)	-97,9%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	631.451	912.476	(281.026)	-30,8%

Pendapatan

Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bagian “Tinjauan Operasi per Segmen Usaha” dalam bab ini, pendapatan PT PII didapatkan dari pendapatan Penjaminan, pendapatan Pengelolaan Dana, dan pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi.

Kinerja Pendapatan 2020-2021

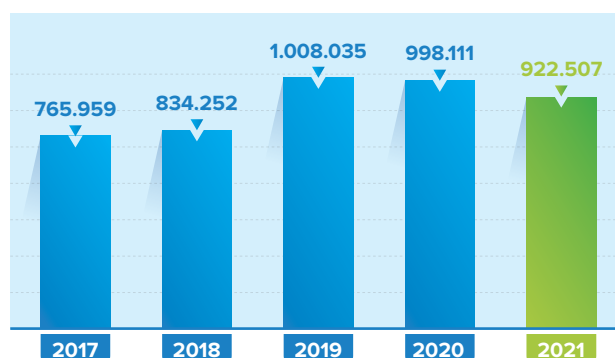
Pendapatan	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pendapatan Penjaminan	156.529	121.456	35.073	28,9%
Pendapatan Pengelolaan Dana	735.871	854.733	(118.862)	-13,9%
Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi	29.172	21.922	7.250	33,1%
Pendapatan Lainnya	935	-	935	100%
Jumlah Pendapatan	922.507	998.111	(75.604)	-7,6%



Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp922,5 miliar, turun 7,6% atau setara dengan Rp75,6 miliar terhadap pendapatan yang dibukukan pada tahun 2020 sebesar Rp998,1 miliar.

Pendapatan Penjaminan pada tahun 2021 mencapai Rp156,5 miliar, meningkat 28,9% atau setara dengan Rp35,1 miliar terhadap pendapatan Penjaminan yang dibukukan pada tahun 2020 sebesar Rp121,5 miliar, sedangkan pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada tahun 2021 mencapai Rp29,2 miliar, meningkat 33,1% atau setara dengan Rp7,2 miliar terhadap pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi yang dibukukan pada tahun 2020 sebesar Rp21,9 miliar. Sedangkan pendapatan Pengelolaan Dana pada tahun 2021 mencapai Rp735,9 miliar, mengalami penurunan 13,9% atau setara dengan Rp118,9 miliar terhadap pendapatan Pengelolaan Dana yang dibukukan pada tahun 2020 sebesar Rp854,7 miliar. Untuk Pendapatan Lainnya sebesar Rp935,3 juta di tahun 2021, dimana tidak terdapat Pendapatan Lainnya di tahun 2020.

Pendapatan 2017-2021
(Rp-juta)



Beban Usaha

Beban usaha Perusahaan terdiri atas beban penjaminan, beban administrasi dan umum, beban pengembangan usaha dan beban lainnya.

Kinerja Beban Usaha 2020-2021

Beban Usaha	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Beban Pajak Final	115.020	158.254	(43.234)	-27,3%
Umum dan Administrasi	79.437	87.025	(7.588)	-8,7%
Penjaminan	73.413	68.411	5.002	7,3%
Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi	34.094	29.706	4.388	14,8%
Pengembangan Usaha	24.592	25.401	(809)	-3,2%
Beban Bunga Pinjaman	8.452	5.964	2.488	41,7%
Penyusutan	4.427	7.650	(3.223)	-42,1%
Amortisasi	982	756	226	29,9%
(Penghasilan) Keuangan, Kotor	(6.083)	(5.863)	(220)	3,8%
Kerugian/(Keuntungan) Kurs, Bersih	4	(7)	11	-142,9%
Lain-lain	(397)	(610)	213	-34,9%
Jumlah Beban Usaha	333.941	376.687	(42.746)	-11,3%

Beban usaha Perusahaan di tahun 2021 tercatat sebesar Rp333,9 miliar, turun sebesar Rp42,7 miliar atau 11,3% terhadap beban usaha tahun 2020 sebesar Rp376,7 miliar. Penurunan beban usaha disebabkan penurunan pada beban pajak final yang utamanya karena penurunan pada pendapatan pengelolaan dana.

Beban umum dan administrasi turun 8,7% menjadi sebesar Rp79,4 miliar, mewakili 23,8% dari total beban usaha PT PII di tahun 2021. Penurunan beban umum dan administrasi terutama disebabkan utamanya masih adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi covid-19.

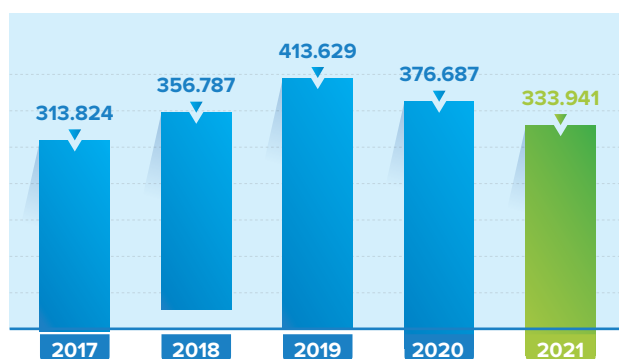
Beban pengembangan usaha turun 3,2% menjadi sebesar Rp24,6 miliar pada tahun 2021. Secara komposisi, posisi beban pengembangan usaha mewakili 7,4% dari total beban usaha PT PII di tahun 2021.

Beban pajak final, sebagai beban yang memiliki komposisi terbesar terhadap total beban usaha Perusahaan di tahun 2021 tercatat sebesar Rp115,0 miliar, turun 27,3% dari tahun 2020 sebesar Rp158,2 miliar. Penurunan beban pajak final terutama disebabkan utamanya karena penurunan pada pendapatan pengelolaan dana.

Sedangkan komponen biaya yang mengalami peningkatan adalah beban bunga pinjaman meningkat 41,7% atau sebesar Rp2,5 miliar menjadi sebesar Rp8,5 miliar dibandingkan beban bunga pinjaman tahun 2020 sebesar Rp6,0 miliar.

Beban Usaha 2017-2021

(Rp-juta)



Laba

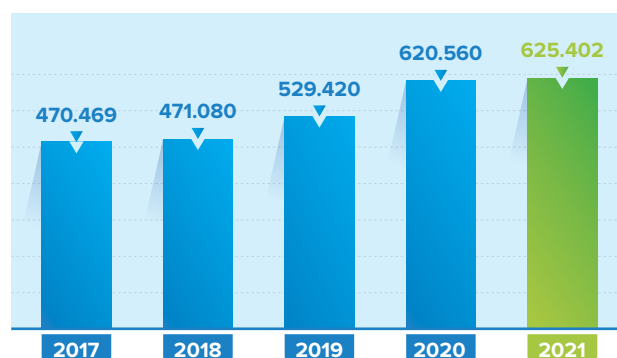
Laba sebelum pajak penghasilan didapatkan dari akumulasi pendapatan dan beban usaha. Di tahun 2021, Perusahaan mencatat penurunan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 5,3% yang utamanya disebabkan penurunan pada pendapatan pengelolaan dana yang disebabkan penurunan suku bunga rata-rata pada deposito.

Laba tahun berjalan merupakan laba bersih Perusahaan yang didapatkan dari akumulasi laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan. Di tahun 2021, Perusahaan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp625,4 miliar, meningkat 0,8% atau setara dengan Rp4,8 miliar dibandingkan laba tahun berjalan tahun 2020 sebesar Rp620,6 miliar. Kenaikan laba bersih Perusahaan disebabkan utamanya karena posisi pajak penghasilan tahunan Perusahaan pada tahun 2021 laba fiskal sedangkan tahun 2020 rugi fiskal.

Sedangkan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan merupakan akumulasi dari laba bersih Perusahaan dengan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Di tahun 2021, Perusahaan mencatat penurunan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar 97,9% yang utamanya disebabkan adanya penurunann harga pasar obligasi atas penempatan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Laba Tahun Berjalan 2017-2021

(Rp-juta)

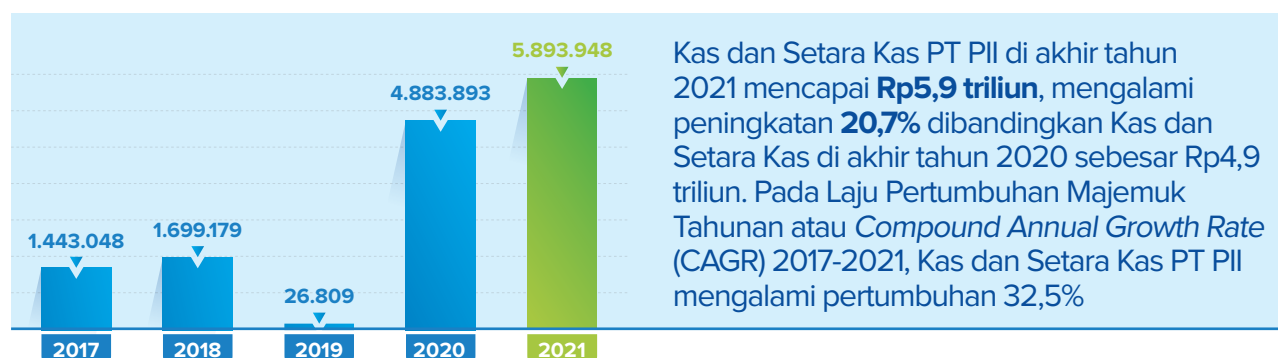




KINERJA ARUS KAS

Perkembangan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2017-2021

(Rp-juta)



Kinerja Arus Kas 2020-2021

Arus Kas	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	788.709	616.703	172.006	27,9%
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	429.422	2.788.510	(2.359.088)	-84,6%
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	(208.076)	1.451.871	(1.659.947)	-114,3%
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	1.010.055	4.857.084w	(3.847.029)	-79,2%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	4.883.893	26.809	4.857.084	18.117,4%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	5.893.948	4.883.893	1.010.055	20,7%

Arus Kas memberikan gambaran tentang jumlah pemasukan dan pengeluaran Perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kas dan Setara Kas PT PII di akhir tahun 2021 mengalami peningkatan 20,7% dibandingkan Kas dan Setara Kas di akhir tahun 2020 yang dipengaruhi oleh kenaikan arus kas dari aktivitas investasi.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kinerja Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2020-2021

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	588.566	621.424	(32.858)	-5,3%
Ditambah Unsur yang Tidak Mempengaruhi Arus Kas:				
Beban Penyusutan	4.427	7.650	(3.223)	-42,1%
Beban Amortisasi	982	756	226	29,9%
(Pendapatan)/beban penyisihan imbalan kerja Penyisihan Imbalan Kerja	(10.735)	6.908	(17.643)	-255,4%
Beban Amortisasi Aset Hak Guna	18.860	6.287	12.573	200,0%
Beban Bunga Sewa Pembiayaan	4.318	1.818	2.500	137,5%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Dalam Aset dan Liabilitas Operasi	606.418	644.843	(38.425)	-6,0%
Perubahan Dalam Aset dan Liabilitas Operasi:				
(Kenaikan)/Penurunan Aset Operasi:				
Piutang Usaha	(14.027)	(42.001)	27.974	-66,6%
Piutang Lainnya	2.022	(176)	2.198	-1.248,9%
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	(5.587)	423	(6.010)	-1.420,8%
Beban Tangguhan	11.593	7.533	4.060	53,9%
Pajak Dibayar Dimuka	2.257	340	1.917	563,8%
(Penurunan)/Kenaikan Liabilitas Operasi:				
Utang Usaha	4.283	(683)	4.966	-727,1%
Utang Pajak	1.163	819	344	42,0%
Biaya Masih Harus dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain	25.713	1.577	24.136	1.528,4%
Pembayaran Manfaat Imbalan Kerja	(582)	(666)	84	-12,6%
Pendapatan Tangguhan	155.456	4.694	150.762	3.211,8%
	182.291	(28.140)	210.431	-747,9%
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi	788.709	616.703	172.006	27,9%

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2021 sebesar Rp788,7 miliar, meningkat sebesar Rp172,0 miliar atau 27,9% terhadap arus kas dari aktivitas operasi tahun 2020 sebesar Rp616,7 miliar. Kenaikan ini disebabkan utamanya dari kenaikan pendapatan tangguhan sehubungan dengan penjaminan *loss limit* dan penjaminan bersama diterima dimuka.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kinerja Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2020-2021

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Penempatan Investasi	433.563	2.793.244	(2.359.681)	-84,5%
Pembelian Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud	(4.141)	(4.734)	593	-12,5%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	429.422	2.788.510	(2.359.088)	-84,6%

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2021 sebesar Rp429,4 miliar, turun sebesar Rp2,4 triliun atau 84,6% terhadap arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2020 sebesar Rp2,8 triliun. Hal ini terutama disebabkan terdapatnya perubahan signifikan dalam penempatan *time deposit* dari *long-term* (> 3 bulan) menjadi *short-term* (< 3 bulan).



Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kinerja Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2020-2021

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Penerimaan Modal Saham	-	1.570.000	(1.570.000)	-
Pembayaran Dividen	(186.168)	(110.827)	(75.341)	68,0%
Pembayaran Sewa	(21.908)	(7.303)	(14.605)	200,0%
Arus Kas Bersih (Digunakan Untuk)/ Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(208.076)	1.451.870	(1.659.946)	-114,3%

Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2021 sebesar Rp208,1 miliar, turun sebesar Rp1,7 triliun atau 114,3% terhadap arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada 2020 sebesar Rp1,5 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan pada tahun 2020 PT PII mendapatkan tambahan PMN sebesar Rp1,6 triliun yang merupakan kapasitas modal untuk mendukung Program PEN serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan Pemerintah.

TINJAUAN INFORMASI KEUANGAN LAINNYA

KEMAMPUAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN

PT PII memiliki beberapa rasio yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan menghasilkan laba atau keuntungan serta efisiensi yang dilakukan, sebagai berikut.

Kinerja Rasio Profitabilitas 2020-2021

Rasio Profitabilitas	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)
Rasio Imbal Hasil Aset, atau <i>Return On Asset</i> (ROA) (%)	4,6	5,4	(0,8)
Rasio Imbalan Ekuitas, atau <i>Return On Equity</i> (ROE) (%)	4,6	5,5	(0,9)
Marjin Laba Operasi, atau <i>Operating Profit Margin</i> (OPM) (%)	63,8	62,3	1,5
Marjin Laba Bersih, atau <i>Net Profit Margin</i> (NPM) (%)	68,0	62,0	6,0
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)	37,0	38,0	(1,0)

Dari rasio-rasio profitabilitas di atas, dapat terlihat bahwa meskipun pada ROA dan ROE sedikit menurun namun terdapat peningkatan pada OPM dan NPM serta BOPO yang masih terjaga.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas/utang jangka pendek berdasarkan rasio likuiditas dapat diketahui melalui Rasio Kas dan Rasio Lancar. Rasio Kas menjelaskan kemampuan Perusahaan untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya melalui kas dan setara kas (aset yang paling likuid) yang dimiliki. Rasio Lancar merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan Perusahaan untuk membayar utang dengan menggunakan aktiva lancar.

Kinerja Rasio Likuiditas 2020-2021

Rasio Likuiditas	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)
Rasio Kas (%)	17.959,2	28.887,8	(10.928,6)
Rasio Lancar (%)	17.889,7	28.850,9	(10.961,2)

Dari rasio-rasio likuiditas, tingkat likuiditas Perusahaan pada tahun 2021 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio lancar mengalami penurunan sebesar 10.961,2% menjadi 17.889,7% di tahun 2021, sedangkan rasio kas mengalami penurunan sebesar 10.928,6% menjadi 17.959,2% di tahun 2021.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki utang jangka panjang yang substansial untuk mendukung kepemilikan aset. Saldo utang jangka panjang Perusahaan berupa pinjaman penerusan senilai Rp55,1 miliar yang dipergunakan untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas dan teknis operasi Perusahaan melalui dukungan Bank Dunia (World Bank). Selebihnya adalah liabilitas imbalan kerja sebesar Rp18,9 miliar. Pokok pinjaman penerusan akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun sejak tanggal penarikan pertama dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2034. Selebihnya seluruh kegiatan untuk kepemilikan aset masih dibiayai oleh modal Perusahaan.

Tingkat kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka Panjang dapat dilihat dari rasio solvabilitas.

Kinerja Rasio Solvabilitas 2020-2021

Rasio Solvabilitas	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) 2020-2021
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%)	2,5	1,5	1,0
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)	2,6	1,8	0,8

Dengan jumlah utang jangka Panjang yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah aset yang besar, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan memiliki tingkat solvabilitas yang sangat baik. Tingkat solvabilitas berdasarkan rasio liabilitas terhadap aset dan ekuitas tahun 2021 sebesar 2,5% dan 2,6%.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG PERUSAHAAN

Hingga akhir tahun 2021, Piutang Perusahaan berasal dari piutang bunga yang berasal dari investasi dalam deposito maupun obligasi, piutang penjaminan, dan piutang PDF. Piutang Perusahaan didominasi oleh piutang penjaminan dan piutang bunga yang berasal dari investasi dalam deposito dan obligasi yang mencakup 42,5% dan 51,5% dari total piutang usaha. Perusahaan telah menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 terkait piutang usaha dan tidak material. Piutang penjaminan Perusahaan utamanya berasal dari penjaminan infrastruktur dimana 78,6% dari piutang penjaminan tersebut belum jatuh tempo sampai akhir tahun 2021. Selain itu, Perusahaan menempatkan deposito dengan mekanisme tender dan penempatan obligasi dengan memperhatikan standar yang diperbolehkan dalam Kebijakan Pengelolaan Dana dan Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.08/2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ("PMK 95/2017"). Dengan demikian, Perusahaan tidak mengalami dinamika pada tingkat kolektibilitasnya baik kolektibilitas piutang jangka pendek maupun jangka panjang.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKANNYA

Struktur Modal

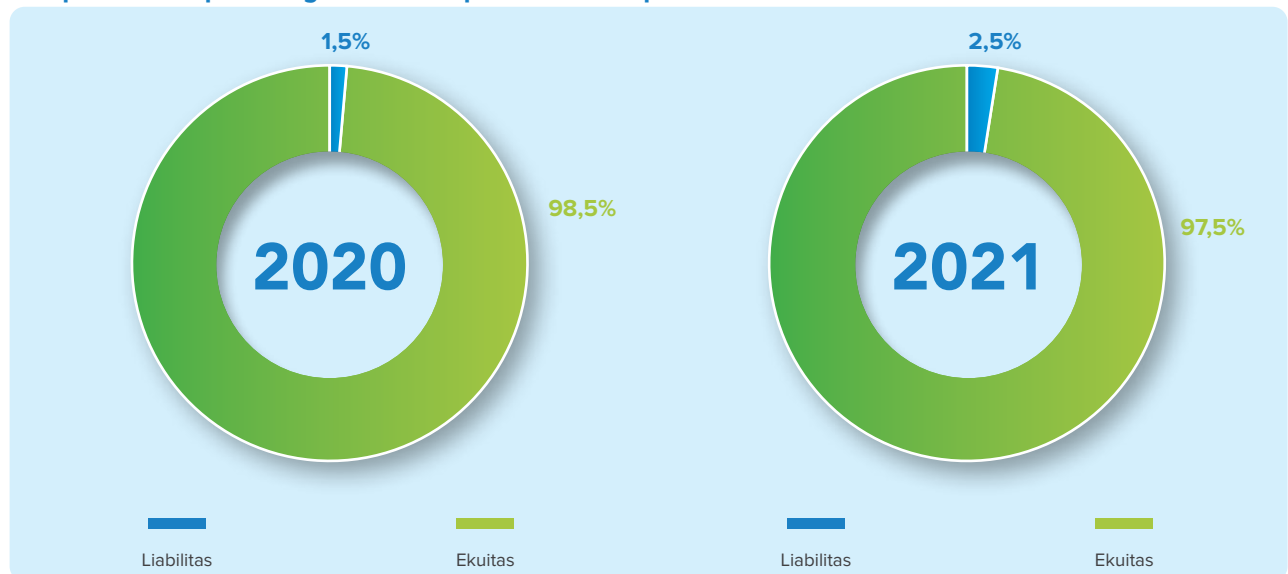
Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Perusahaan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

Aset Perusahaan saat ini sebagian besar didanai dari ekuitas Perusahaan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana peningkatan modal yang terjadi di tahun 2020, Perusahaan mendapatkan tambahan modal saham sebesar Rp1,6 triliun. Selain modal ditempatkan, Perusahaan memiliki saldo penghasilan komprehensif lainnya dan saldo laba ditahan, sehingga total ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13,8 triliun.

Struktur Modal dan Komposisinya

Struktur Modal	2021		2020		Kenaikan (Penurunan)	
	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Liabilitas	355.720	2,5%	204.025	1,5%	151.695	74,4%
Ekuitas	13.788.714	97,5%	13.343.432	98,5%	445.282	3,3%
Total	14.144.434	100,0%	13.547.457	100,0%	596.977	4,4%

Komposisi Pendapatan Segmen Terhadap Jumlah Pendapatan



“Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki komponen dalam struktur modal yang berbasis utang.”

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Kebijakan pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha saat ini dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha di masa yang akan datang serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sampai dengan akhir tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki ikatan/komitmen yang material terkait investasi barang modal.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Realisasi investasi barang modal Perusahaan di tahun 2021 sebesar Rp1,96 miliar, mengalami penurunan 47,8% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp3,76 miliar.

	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Realisasi Investasi Barang Modal	1.962	3.757	(1.795)	-47,8%

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi antara periode setelah tanggal laporan akuntan tertanggal 25 Februari 2022 sampai dengan disahkannya laporan tahunan ini per tanggal 31 Mei 2022.



PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2021 DAN PROYEKSI KINERJA TAHUN 2022

Perbandingan Laba Rugi dan Posisi Keuangan Target RKAP 2021 dan Realisasi 2021, serta Proyeksi RKAP 2022

Uraian (dalam Rp miliar)	Target RKAP 2021 *)	Realisasi 2021	Target RKAP 2022	Realisasi 2021: RKAP 2021(%)	Realisasi 2021:RKAP 2022(%)
LABA RUGI KOMPREHENSIF					
Pendapatan Usaha	1.133,48	922,51	1.106,97	81,4	83,3
Beban Usaha	(344,33)	(333,94)	379,09	97,0	(88,1)
Laba Sebelum Pajak	789,15	588,57	1.486,06	74,6	39,6
Manfaat (beban) Pajak Penghasilan	(135,83)	36,83	(125,80)	(27,1)	(29,3)
Laba Tahun Berjalan	653,32	625,40	1.360,26	95,7	46,0
Laba komprehensif tahun berjalan	659,75	631,45	605,01	95,7	104,4
POSISI KEUANGAN					
Aset	14.049,82	14.144,44	15.594,69	100,7	90,7
Liabilitas	429,43	355,72	259,78	82,8	136,9
Ekuitas	13.620,39	13.788,72	15.334,91	100,2	89,9
Total Liabilitas dan Ekuitas	14.049,82	14.144,44	15.594,69	100,7	90,7

Realisasi pendapatan usaha tahun 2021 tercapai sebesar Rp922,5 miliar atau 81,4% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2021 sebesar Rp1,13 triliun. Sedangkan untuk target RKAP 2022, PT PII memproyeksikan pendapatan usaha sebesar Rp1,11 triliun atau meningkat 20,0% dari realisasi tahun 2021.

Adapun realisasi laba tahun berjalan 2021 tercapai sebesar Rp625,40 miliar atau 95,7% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2021 sebesar Rp653,32 miliar. Sedangkan untuk target RKAP 2022, PT PII memproyeksikan laba tahun berjalan sebesar Rp1,36 triliun atau tumbuh hingga 117,5% dari realisasi tahun 2021.

Pada posisi keuangan, realisasi aset tahun 2021 tercapai sebesar Rp14,14 triliun atau 100,7% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2021 atas aset sebesar Rp14,05 triliun. Sedangkan untuk target RKAP 2022, PT PII memproyeksikan aset sebesar Rp15,59 triliun atau meningkat 10,3% dari realisasi tahun 2021. Realisasi ekuitas tercapai sebesar Rp13,79 triliun atau 100,2% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2021 atas ekuitas sebesar Rp13,62 triliun. Sedangkan untuk target RKAP 2022, PT PII memproyeksikan ekuitas sebesar Rp15,33 triliun atau tumbuh hingga 11,21% dari realisasi tahun 2021.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Dari RAPBN tahun 2022 tersebut, beberapa asumsi makro ekonomi memperlihatkan tingkat optimisme Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi diasumsikan dapat mencapai 5,0 s.d 5,5 %, inflasi mencapai 3,0%, tingkat suku bunga sebesar 6,82%, nilai tukar Rupiah mencapai Rp14.350 per Dolar AS, harga minyak USD63 per barel, lifting minyak sebesar 703 ribu barel, dan lifting gas 1.036 ribu barel.

PROSPEK USAHA

Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran Infrastruktur mencapai Rp384,8 triliun dengan beberapa kebijakan untuk mendukung target infrastruktur pada tahun 2022, antara lain penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi, prioritas pembangunan terhadap output strategis yang mendukung pemulihan ekonomi, dan penguatan sinkronisasi/integrasi pendanaan antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN/BLU/Swasta.

Selain makro ekonomi, beberapa hal juga menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi pasar tahun 2022, antara lain adanya pembangunan Ibu Kota Baru, Presidensi G20 yang dinilai akan berpengaruh terhadap persepsi pelaku ekonomi internasional, sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) yang akan terus meningkat, serta pertumbuhan populasi *middle income* yang akan menjadi tumpuan ekonomi Indonesia. Hal ini semakin menguatkan peluang dan prospek infrastruktur nasional masih akan terus bertumbuh.

Dalam rangka mendukung keberlangsungan dan prospek pengembangan infrastruktur nasional, PT PII sebagai satu – satunya institusi Penjaminan Pemerintah diharapkan dapat lebih mengembangkan bisnis inti perseroan dengan Langkah – Langkah sebagai berikut

1. Akan tetap fokus kepada pemantapan bisnis Penjaminan baik skema KPBU maupun non KPBU yang tidak hanya terkonsentrasi pada jumlah pemberian dukungan penjaminan namun meningkatkan nilai kebermanfaatan dengan menciptakan sinergi yang berkesinambungan dengan berbagai *key stakeholder*.
2. Melanjutkan pelaksanaan pemantauan aktif atas proyek-proyek yang telah efektif penjaminan guna dapat mengantisipasi serta memitigasi secara bersama-sama dengan para PJPK
3. Melaksanakan penugasan sebagai penasihat teknis & penasihat transaksi untuk para PJPK yang memiliki potensi hingga peningkatan kapasitas ekosistem termasuk pelaku usaha di sektor infrastruktur
4. Mendukung tema yang diusung oleh pemerintah dengan ikut berperan serta dalam program penjaminan korporasi sebagai program pemulihan ekonomi nasional.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan mandat baru yakni mendukung penjaminan proyek – proyek strategis nasional
6. Eksplorasi potensi pengembangan bisnis dan opsi – opsi perluasan mandat



KEBIJAKAN DIVIDEN

Dasar Kebijakan tentang Pembagian Dividen

PT PII adalah Badan Usaha Milik Negara, dimana modal ditempatkan dan disetor adalah 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham sehingga penyetoran dividen sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Republik Indonesia. Penentuan besarnya dividen yang disetorkan kepada Pemegang Saham berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan selaku RUPS dan kuasa pemegang Saham.

Pembagian Dividen yang Dilakukan di Tahun 2021, dan Kronologis Pembagian Dividen

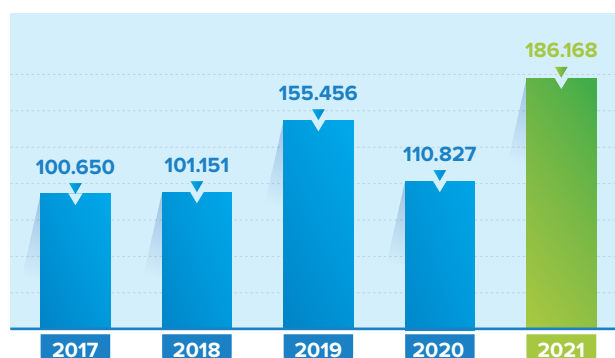
Berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2021, pemegang saham memutuskan menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2020. Manajemen telah menindaklanjuti keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tersebut dengan merealisasikan pembagian Dividen tunai sebagai berikut:

Dividen kas yang dibagikan	Rp186.168.000,-
Jumlah Saham (lembar)	9.570.000
Tanggal pengumuman	23 Juni 2021
Tanggal pembayaran	6 Juli 2021

Kronologis pembagian dan pembayaran Dividen tunai dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut,

Tahun Pembagian	Tahun Dividen	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pembayaran	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-juta)
2021	2020	23 Juni 2021	6 Juli 2021	186.168
2020	2019	12 Juni 2020	22 Juni 2020	110.827
2019	2018	23 Mei 2019	20 Juni 2019	155.456
2018	2017	23 Mei 2018	22 Juni 2018	101.151
2017	2016	26 Mei 2017	16 Juni 2017	100.650

Perkembangan Dividen Kas yang Dibagikan Tahun 2017-2021 (Rp-juta)



REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perusahaan tidak melakukan mencatatkan sahamnya di bursa saham manapun, dan tidak menerbitkan efek maupun surat utang dalam bentuk apapun yang dicatatkan di pasar modal.

INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG

Tidak terdapat informasi dan fakta material terkait investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal di sepanjang tahun 2021.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Kebijakan tentang Pihak Afiliasi/Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (revisi 2010), tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang didefinisikan antara lain:

1. Entitas di bawah pengendalian PT PII;
2. Entitas asosiasi;
3. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
4. Entitas di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam angka 3 di atas;
5. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
6. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Adapun sifat pihak berelasi antara lain:

1. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.
2. Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.
3. BUMN merupakan pihak berelasi oleh karena merupakan entitas sepengendali oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Nama Pihak Afiliasi/Berelasi yang Bertransaksi dan Sifat serta Tujuan Transaksi

Entitas	Hubungan	Sifat dan Tujuan Transaksi
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang saham	Investasi; piutang usaha; pinjaman penerusan; beban yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain; pendapatan; beban bunga.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN	Kas dan setara kas; investasi; piutang usaha; pendapatan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN	Kas dan setara kas; investasi; pendapatan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN	Kas dan setara kas; investasi; piutang usaha; pendapatan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN	Kas dan setara kas; investasi; piutang usaha; pendapatan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS	Entitas sepengendali/BUMN	Kas dan setara kas; investasi; piutang usaha; pendapatan
PT Bank BNI Syariah	Entitas sepengendali/BUMN	Kas dan setara kas; pendapatan
PT Bank Syariah Mandiri	Entitas sepengendali/BUMN	Kas dan setara kas
PT Bank Syariah Indonesia	Entitas sepengendali/BUMN	Kas dan setara kas; piutang usaha
PT Pegadaian (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; piutang usaha; pendapatan
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; piutang usaha; pendapatan
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; piutang usaha; pendapatan
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; piutang usaha; pendapatan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; piutang usaha; beban yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain; pendapatan
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; piutang usaha; pendapatan
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; piutang usaha; pendapatan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; pendapatan



Entitas	Hubungan	Sifat dan Tujuan Transaksi
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; piutang usaha; pendapatan
PT Angkasa Pura (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; pendapatan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; piutang usaha; pendapatan
PT Aneka Tambang Tbk	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; pendapatan
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; pendapatan
PT Marga Lingkar Jakarta	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; pendapatan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; pendapatan
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN	Investasi; pendapatan
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN	Piutang usaha; pendapatan
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN	Piutang usaha; pendapatan
Dewan Komisaris dan Direksi	Manajemen kunci	Kompensasi dan remunerasi

Saldo dan Transaksi Pihak Afiliasi/Berelasi

Saldo dan transaksi pihak afiliasi/berelasi di tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Persentase dari Jumlah Aset		Kenaikan (Penurunan)	
			2021 (%)	2020 (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
	(1)	(2)			(3=1-2)	(3/2)
Kas dan setara kas	3.606.569	4.060.726	25,5%	30,0%	(454.157)	-11,2%
Investasi	7.004.281	7.743.486	49,5%	57,2%	(739.205)	-9,6%
Piutang usaha	98.035	79.796	0,7%	0,6%	18.239	22,9%
Total Aset dari Pihak-pihak Berelasi	10.708.885	11.884.008	75,7%	87,7%	(1.175.123)	-9,9%
Total Aset	14.144.434	13.547.457			596.977	4,4%

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Persentase dari Jumlah Liabilitas		Kenaikan (Penurunan)	
			2021 (%)	2020 (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
	-1	-2			(3=1-2)	(3/2)
Pinjaman Penerusan	55.127	55.127	15,5%	27,0%	-	-
Beban yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	26.580	1.281	7,5%	0,6%	25.299	1.974,9%
Total Liabilitas dari Pihak-pihak Berelasi	81.707	56.408	23,0%	27,7%	25.299	44,9%
Total Liabilitas	355.720	204.025			151.695	74,4%

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Persentase dari Jumlah Pendapatan		Kenaikan (Penurunan)	
			2021 (%)	2020 (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
	(1)	(2)			(3=1-2)	(3/2)
Pendapatan dari pihak-pihak Berelasi	726.101	722.981	78,7%	72,4%	3.120	0,4%
Total Pendapatan dari Pihak-pihak Berelasi	726.101	722.981	78,7%	72,4%	3.120	0,4%
Total Pendapatan	922.507	998.111			(75.604)	-7,6%

Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Usaha	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	Persentase dari Jumlah Beban Usaha		Kenaikan (Penurunan)	
			2021 (%)	2020 (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
	(1)	(2)			(3=1-2)	(3/2)
Beban bunga	4.135	4.146	1,2%	1,1%	(11)	-0,3%
Kompensasi dan remunerasi manajemen kunci	18.624	15.415	5,6%	4,1%	3.209	20,8%
Total Beban Usaha dari Pihak-pihak Berelasi	22.759	19.561	6,8%	5,2%	3.198	16,4%
Total Beban Usaha	333.941	376.687			(42.746)	-11,4%

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi serta Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Seluruh transaksi pihak berelasi/afiliasi di atas merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Teraudit tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), Perusahaan telah mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK No. 7 (Revisi 2015).

Tidak terdapat transaksi material terkait transaksi pihak berelasi yang terjadi di tahun 2021. PT PII bukan merupakan perusahaan yang memperdagangkan ekuitasnya kepada umum. Seluruh saham PT PII dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian seluruh transaksi telah diketahui oleh pemegang saham.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penerbitan/Perubahan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berimplikasi terhadap Perusahaan di tahun 2021.

No.	Nama Peraturan	Implikasi terhadap Perusahaan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.	Sebagai dasar PT PII dalam pengaturan dan penerapan hubungan kerja antara Perusahaan dan karyawan.
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.	
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam bentuk lain dan Penentuan keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian.	Sebagai pedoman PT PII dalam pembayaran bea meterai yang terutang atas dokumen berbentuk elektronik dan ketentuan perpajakan mengenai pembayaran bea meterai, ciri umum dan ciri khusus meterai tempel, meterai dalam bentuk lain dan penentuan keabsahan meterai serta pemeteraian kemudian.
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Sebagai pedoman atau petunjuk PT PII sebagai Badan Usaha Penjamin untuk melakukan penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang ditugaskan kepada PT PII
5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.	Sebagai pedoman atau petunjuk PT PII sebagai Badan Usaha Penjamin Infrastruktur untuk melakukan penjaminan pemerintah pusat secara bersama dengan pemerintah yang ditugaskan kepada PT PII terkait Proyek Strategis Nasional.
6.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.	Sebagai dasar PT PII dalam menentukan kategori penempatan dana PT PII pada Bank Umum.
7.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua.	Sebagai dasar PT PII dalam pemberian dukungan perusahaan pada program jaminan hari tua kepada karyawan PT PII.



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2021:

- Penyesuaian tahunan PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan";
- Penyesuaian tahunan PSAK 48: "Penurunan nilai aset";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- PSAK 62: "Kontrak asuransi";
- Amendemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 110: "Akuntansi Sukuk"; dan
- PSAK 111: "Akuntansi Wa'd".

Dampak Terhadap Laporan Keuangan

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

1. Pengaruh kebijakan akuntansi baru PSAK 71

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif modifikasi dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Tidak terdapat penyesuaian pada saldo awal laba pada tanggal 1 Januari 2020 yang berasal dari perubahan cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan.

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan tidak berdampak terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 1 Januari 2021.

2. Pengaruh kebijakan akuntansi baru PSAK 72

PSAK 72 mensyaratkan Perusahaan menganalisa pengakuan pendapatan menggunakan lima langkah berdasarkan kontrak dimana pengakuan pendapatan terjadi ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Berdasarkan hasil evaluasi Perusahaan, prinsip dasar dari standar baru ini, terkait pengukuran dan waktu pengakuan pendapatan, telah sesuai dengan model dan praktik bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

3. Pengaruh kebijakan akuntansi baru PSAK 73

Sehubungan dengan penerapan PSAK 73, Perseroan sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30 "Sewa", kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang diskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2021. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perseroan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporasi Perseroan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73 "Sewa", Perseroan dapat memilih penerapan secara retrospektif modifikasi dimana aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa dan disesuaikan dengan jumlah pembayaran dimuka. Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Perseroan menerapkan cara praktis yang diizinkan oleh standar dengan cara menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa serta tidak membuat penyesuaian transisi untuk sewa yang aset dasarnya bernilai rendah dan sewa jangka pendek.

Dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2021, Perseroan tidak memiliki aset hak-guna dan liabilitas sewa sehingga tidak terdapat dampak kumulatif terhadap saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2021 dan Perseroan tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan di Tahun 2021

Sebagaimana kita ketahui, isu terkini dalam penyelenggaraan Infrastruktur di Indonesia yakni adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada keterbatasan aktivitas hingga anggaran yang dipandang dapat berpotensi mempengaruhi bisnis PT PII akibat adanya kemungkinan tidak berjalannya proyek sesuai rencana, namun dengan keterbatasan kondisi yang ada PT PII terus mendukung pengembangan infrastruktur dan pendampingan penjaminan di awal sehingga lingkup KPBU dan penjaminan yang diselenggarakan tetap bisa optimal dan diupayakan untuk tidak terlalu membebani anggaran PJPK. Selain itu, PT PII turut berperan serta melalui penjaminan untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Atas hal tersebut, tidak terdapat hal-hal yang dianggap dan berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan pada tahun 2021. Hal ini didasarkan atas metode perencanaan strategis yang digunakan Perusahaan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

Assessment Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19, Perusahaan telah melakukan penilaian atas dampak pandemi COVID-19 terhadap rencana operasi dan bisnis Perusahaan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Perusahaan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Perusahaan ataupun menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Sebagai Badan Usaha Penjamin, PT PII berperan sebagai *Risk Manager* dalam penyelenggaraan infrastruktur yang mana PT PII memiliki acuan alokasi risiko yang dapat dijadikan panduan dalam pengembangan infrastruktur. Pengelolaan risiko merupakan ruh utama PT PII sehingga bagi kelangsungan bisnis Perusahaan, tentu pengelolaan risiko menjadi hal utama. PT PII memiliki Divisi Manajemen Risiko dan membentuk tim *Risk Officer* di setiap divisi untuk mengelola dan meng-*update* risiko Perusahaan maupun risiko bisnis dalam sebuah *risk register* dalam rangka pengelolaan risiko bisnis.

Atas *assessment* yang dilakukan tersebut dan sejalan dengan tahun sebelumnya, manajemen masih meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.

05

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

“ Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan PT PII, khususnya dalam menciptakan pengelolaan operasi dan usaha yang akuntabel. ”





ROADMAP PENGELOLAAN SDM

Agar pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat berjalan dengan baik dan lebih terarah serta dapat mendukung pencapaian tujuan Perusahaan, PT PII telah menyusun *Roadmap* SDM periode 2020-2024. *Roadmap* ini merupakan kelanjutan dari *Roadmap* sebelumnya dan telah disesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Adapun *Roadmap* Pengelolaan SDM sebagai berikut:

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Fokus	Transformasi Internal		Pengembangan Berkesinambungan		Realisasi Dampak Perubahan
Tujuan	- Kesiapan fungsi SDM untuk menjalankan peran strategis - Keterlibatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).		- Pengembangan Kompetensi SDM PII (Level Managerial). - Manajemen Talenta berbasis data.	- Kompetensi SDM (Level Non-Managerial). <i>Positive employee experience.</i>	Mengukur dampak perubahan terhadap organisasi dan pencapaian bisnis.
Prioritas Program Kerja	- Pengembangan <i>Target Operating Model</i> HC dan Organisasi HC. - Ketersediaan Kebijakan dan Proses Bisnis HC (<i>end-to-end</i>). - Penyesuaian KPI guna mengakomodir mandat jangka pendek. - Pembentukan organisasi baru dengan fokus spesifik jangka pendek. - Strategi budaya organisasi. <i>Employee Engagement.</i>	- Perbaikan Manajemen Kompetensi. - Perbaikan sistem <i>Job Grading.</i> <i>Man Power Planning.</i> - Internalisasi Budaya Organisasi. - Implementasi HRIS.	- Pembuatan kurikulum pelatihan dan pengembangan level manajerial. - Asesmen dan Program Pengembangan level manajerial dan Tim HC. - HR <i>Analytics.</i> - Segmentasi Talenta.	- Pembuatan kurikulum pelatihan dan pengembangan level non-manajerial. - Asesmen dan Program Pengembangan level non-manajerial.	<i>Employer Branding.</i> <i>Impact Monitoring.</i>

Di tahun 2021 tahapan dalam *roadmap* yang sudah mulai dilakukan adalah:

1. Pembaharuan pedoman kompetensi non-teknis karyawan untuk selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan pedoman kompetensi teknis karyawan di tahun 2022
2. Penyusunan *Man Power Planning* Karyawan di tahun 2021
3. Proses penyusunan pembaharuan struktur organisasi dan struktur kepegawaian karyawan
4. Optimalisasi penggunaan HRIS dan Aplikasi Greatday dengan melengkapi seluruh data karyawan dan menjadikannya “one-stop application” terkait kepegawaian.

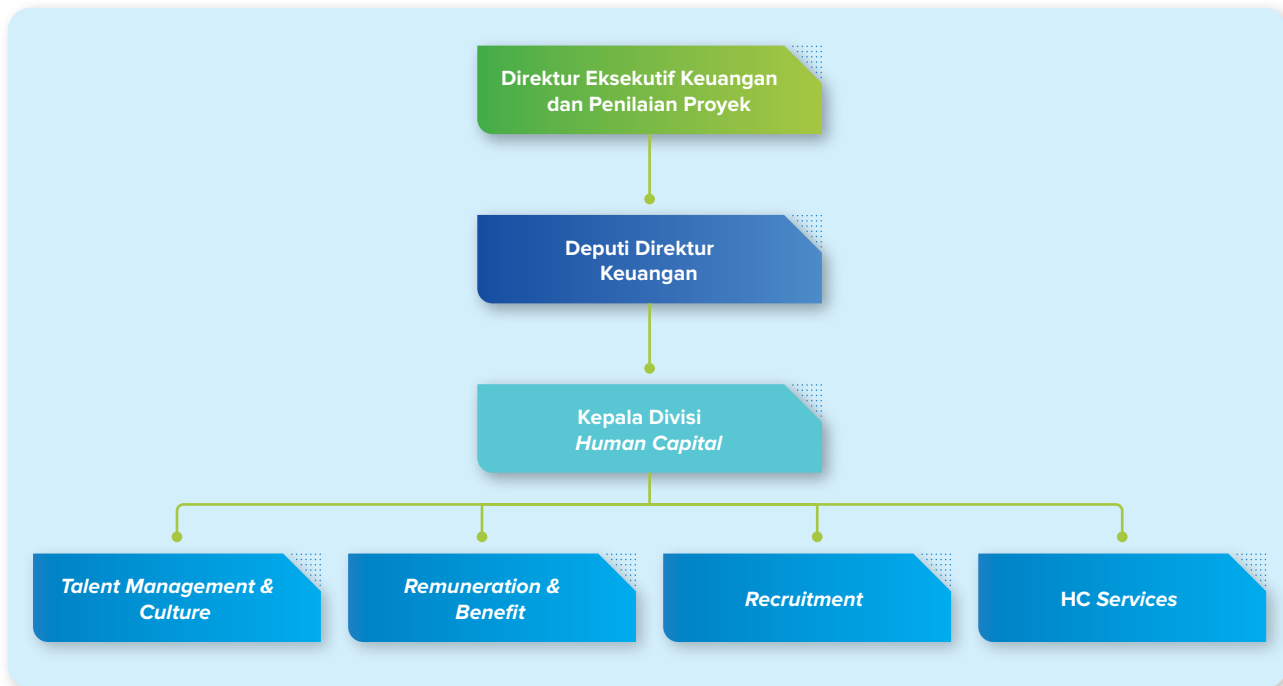


PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SDM



Menyadari akan arti penting SDM bagi Perusahaan, PT PII memberikan komitmen dan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan SDM Perusahaan. PT PII ingin memastikan pengelolaan SDM dijalankan dengan fokus yang baik agar dapat mendukung tercapainya tujuan Perusahaan.

Salah satu wujud komitmen dalam pengelolaan SDM yang baik adalah dengan membentuk divisi yang menangani khusus terkait dengan SDM yaitu Divisi *Human Capital*. Divisi *Human Capital* dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab kepada Deputy Direktur Keuangan dan Direksi.



Secara garis besar, tugas, tanggung jawab, peran dan lingkup Divisi *Human Capital* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berkontribusi aktif dalam meningkatkan optimalisasi dan produktivitas unit kerja.
2. Memastikan pemenuhan kebutuhan SDM Perusahaan melalui proses seleksi dan rekrutmen SDM yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sesuai dengan pendekatan terkini.
3. Memastikan efektivitas pelaksanaan program pengembangan berdasarkan arahan strategis organisasi sehingga program pengembangan kompetensi memenuhi kebutuhan Perusahaan maupun individu karyawan.
4. Memastikan terselenggaranya sistem penilaian kinerja yang terstruktur, objektif dan adil di seluruh unit kerja dalam organisasi.
5. Memastikan terselenggaranya sistem kompensasi dan benefit yang berlandaskan prinsip *internally fair & externally competitive*.
6. Berkontribusi dalam mencapai sasaran unit kerja yang telah ditetapkan serta melakukan pengembangan berkelanjutan setiap tahun.

Pengelolaan SDM yang dilakukan PT PII memiliki fokus pada 4 (empat) area sebagai berikut:

- **HR Services**

Fungsi dari *HR Services* di antaranya meliputi fungsi administratif dan *employee relation management*. Fungsi administratif yang dilakukan, yaitu pengelolaan data

karyawan, mempersiapkan dokumen kontrak karyawan serta mengelola sistem HRIS yang ada di Perusahaan. Fungsi *employee relation* ini bertanggung jawab untuk menciptakan suasana lingkungan kerja yang positif.

- **Remuneration and Benefit**

Remuneration and Benefit berperan besar dalam remunerasi karyawan serta benefit kesejahteraan karyawan lainnya, yang meliputi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) serta asuransi.

- **Rekrutmen**

Fungsi rekrutmen dalam Divisi *Human Capital* berperan besar dan terus menjadi fokus utama di Perusahaan seiring dengan semakin meningkatnya Bisnis PT PII serta perubahannya. Tantangan besar dalam fungsi ini adalah mendapatkan SDM yang tepat dan cepat.

- **Talent Management & Culture**

Pada fungsi ini, *Human Capital* berperan penting untuk menyelaraskan perkembangan bisnis Perusahaan dengan pengembangan SDM, baik melalui pelatihan, rotasi, mutasi serta pengembangan karir SDM Perusahaan. Pada fungsi ini juga, Divisi *Human Capital* bertanggung jawab dalam hal penilaian kinerja, pengembangan dan *job grading* serta budaya Perusahaan.



MANAJEMEN SDM

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen

Seiring dengan perubahan dan tantangan perkembangan industri, dalam menjaring SDM terbaik Perusahaan menitikberatkan pada sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas tinggi, mempunyai kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan dan memiliki kompetensi unggul sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Dalam setiap proses rekrutmen, PT PII menerapkan asas kesamaan kesempatan, kewajaran dan keterbukaan dalam proses rekrutmen dan seleksi.

Proses rekrutmen dan seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan usaha Perusahaan. Pada tahun 2021, Perusahaan telah merekrut 24 karyawan baru, baik yang berstatus *pro-hire* maupun *fresh graduates*. Karyawan-karyawan baru dari berbagai posisi tersebut ditempatkan di sejumlah divisi.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Kapabilitas karyawan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas dan kinerja. PT PII senantiasa berupaya untuk meningkatkan kompetensi karyawan dengan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal. Program pengembangan SDM disesuaikan dengan *training need analysis* setiap karyawan yang mencakup kompetensi teknis dan non teknis.

PT PII merealisasikan program pengembangan kompetensi karyawan berdasarkan Model Kompetensi (*Competency Model*) dan kesempatannya terbuka bagi setiap karyawan. Setiap karyawan berhak mengajukan diri menjadi peserta pelatihan dengan mengajukan persyaratan administrasi tertentu dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan divisi/atasan masing-masing. Pengajuan jenis pelatihan dan pengembangan yang hendak diikuti harus selaras dengan kebutuhan tugas, rencana pengembangan kompetensi dan pengembangan usaha.

PT PII menjamin tidak terjadi tindakan diskriminasi dalam memperlakukan karyawan sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja yang *excellence*.

Program pengembangan karyawan dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu *inhouse training*, *public training*, dan *knowledge sharing*. Program pengembangan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan secara merata, baik untuk kemampuan umum maupun kemampuan khusus yang diperlukan masing-masing karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama dan terbuka untuk mengikuti program pengembangan. Penanggung jawab pengembangan kompetensi karyawan adalah masing-masing karyawan dan atasan langsung yang dikoordinasikan oleh Divisi *Human Capital*.

Selama tahun 2021, PT PII telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan karyawan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Kegiatan Pelatihan	Total Peserta	Rata-rata Peserta per Pelatihan
<i>In House Training</i>	8	242	30
<i>Public Training</i>	235	496	2
<i>Knowledge Sharing</i>	43	511	12

TABEL PELAKSANAAN IN HOUSE TRAINING

No.	Judul Pelatihan
1	Awareness Training ISO 37001 : 2016
2	In-House Training level Staff – AM "Outstanding Young Professional" 2021
3	Inhouse Training Soft Competency Level M - AVP (Innovation)
4	ISO 37001 - SMAP
5	Ujian CP3P Level Foundation
6	Workshop Lanjutan Analisa Input Output Studi Kasus Proyek Infrastruktur
7	Workshop Sustainability Report Preparation and Development
8	Workshop/Training Teori dan Praktek Penggunaan Metode Input Output dalam Menghitung Dampak Ekonomi Proyek Infrastruktur

TABEL PELAKSANAAN PUBLIC TRAINING

No.	Topik Pelatihan
1	[WEBINAR] Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2021
2	"Praktik Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Komersial"
3	2021 Annual Technical Update Financial Services Accounting & Tax Webinar
4	2021 International Climate Change Conference "A Just and Affordable Transition towards Net Zero"
5	2021 Investment Guidelines
6	7 Practical Tips to Sharpen Your Critical Thinking
7	7 Strategic Tools in Strategy Formulation
8	Accounting Principles and Standards
9	Achieving Sustainable Development Goals on Water and Sanitation
10	Adaptasi Kuliah di Masa Pandemi
11	Adobe Max Conference
12	Adobe XD Conference
13	Adoption and Implementation of CSR based on ISO 26000 SR"
14	Agile Budgeting
15	Analytical Hierarchy Process (AHP) And Analytical Network Process (ANP) Method
16	APAC Macro Economic Update
17	Aspek Inventasi dan Ekonomi dari Pembangunan Infrastruktur Pada Saat Ini dan Paska Pandemi COVID 19
18	Audit Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Sesi II
19	Auditing Accounting System & Automation Plan
20	Award Project Mentoring sessions
21	Award Project Pitch Session
22	BDO Tax Talk - Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
23	Bekal Menghadapi Pemeriksaan dan Audit Pengadaan Persiapan atas Pelaksanaan Pengadaan TA 2021
24	Bekal Pemimpin 2021
25	Bimbingan Teknis KPBU Syariah – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
26	BioShare Series #3 - Pendanaan Proyek Bioenergi di Indonesia
27	Budgeting and Forecasting
28	Building a 3 Statement FM



No.	Topik Pelatihan
29	<i>Building Railway EPC Champion in Indonesia and Selective Regional Project</i>
30	<i>Business Continuity Management</i>
31	<i>Business Judgement Rule</i>
32	<i>Business Valuation Modeling</i>
33	<i>Capacity Building Model Dokumen Pengadaan sektor Penerangan Jalan Umum (PJU)</i>
34	<i>CEO Leadership in New Normal</i>
35	<i>Certified Supply Chain Analyst</i>
36	<i>Change Agent : "When The Leader Let Me Walk Alone"</i>
37	<i>Charity Webinar Series – Quantitative Data Processing with Python</i>
38	<i>CISA Review Course</i>
39	<i>CLDP PPP Webinar Series: Commercial Contracts</i>
40	<i>Climate Change and Sovereign Risk</i>
41	<i>Climate Change Challenge: Preparing for Indonesia's Green and Sustainable Future</i>
42	<i>Coaching Clinic : Investasi Pemerintah, Masih Perlu Kah?</i>
43	<i>Communications Talks : How Do SoE Handle the Media</i>
44	<i>Conflict Transformation</i>
45	<i>Corporate Tax Planning</i>
46	<i>Country Report</i>
47	<i>CP3P Foundation Level 1</i>
48	<i>Cybersecurity for Critical Urban Infrastructure</i>
49	<i>CybersecurityRed team vs Blue Team</i>
50	<i>Dashboard and Data Visualization</i>
51	<i>Deal Structure in Project Finance</i>
52	<i>Digital Construction in Indonesia's Infrastructure Project</i>
53	<i>Digitalisasi Pembayaran Nirsentuh di Sektor Jalan Tol</i>
54	<i>DJP Kelas Pajak Online "Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Pembentukan Holding dan Restrukturisasi BUMN"</i>
55	<i>Dynamic PMP® Exam Preparation</i>
56	<i>Economic Outlook 2022 Infrastruktur Fondasi Ekspansi Ekonomi - Akselerasi Pembangunan Infrastruktur 2022</i>
57	<i>E-Learning Internet Security Awareness</i>
58	<i>Elevating Together : Infrastructure New Paradigm for a Winning Future</i>
59	<i>Evaluate and Improve Your Team Performance</i>
60	<i>Executive Insight Leadership Series</i>
61	<i>Expert Meeting dengan H.E Rachel Nolan (Former Minister of Finance Australia)</i>
62	<i>Finalisasi Draft Revisi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 dan PerLKPP No 29 Tahun 2018</i>
63	<i>Financial Analysis Fundamentals</i>
64	<i>Financial Development, Digital, Transformation, and Economic Uncertainty</i>
65	<i>Financial Globalization, Capital Flows, and the Global Financial Cycle</i>
66	<i>Financial Integration in Southeast Asia</i>
67	<i>Financial Modeling</i>
68	<i>Financial modeling Project Finance & Infrastructure</i>
69	<i>Finference 2021 : Tech Talks - Digitalization To Personalization + Era After Automation</i>
70	<i>Finference 2021 : What's New On The Market Place</i>

No.	Topik Pelatihan
71	<i>Fiscal Policy Instruments and Green Development</i>
72	<i>Fitch on Indonesia 2021: Navigating a Post-Pandemic World (Part 1)</i>
73	<i>Fitch on Indonesia 2021: Navigating a Post-Pandemic World (Part 2)</i>
74	<i>Focus Group Discussion (FGD) Kebutuhan Instrumen dan Pendalaman Pasar dalam Mengelola Risiko Nilai Tukar untuk mendukung Pembiayaan Infrastruktur</i>
75	<i>Focus Group Discussion (FGD) Kelembagaan dalam Skema KPBU untuk Penyediaan Rusun SKBG</i>
76	<i>Focus Group Discussion (FGD) Pengadaan Tanah</i>
77	<i>FPA Monthly Cash Flow Forecast Model</i>
78	<i>Geothermal Project Finance</i>
79	<i>Global Infrastructure Investment Forum</i>
80	<i>Governing Sustainable Finance</i>
81	<i>GRC Series : Penerapan Digital Governance dalam Tahap Transformasi Perusahaan di Era Disrupsi</i>
82	<i>Green Infrastructure Financing in Circular Economy</i>
83	<i>Green Infrastructure Initiatives</i>
84	<i>Green investments in Renewable Energy</i>
85	<i>Greening The Economy : Sustainable Cities</i>
86	<i>Growing Infrastructure Course - Enabling & Structuring for Private Sector Participation in Finance and Innovation, Module 2</i>
87	<i>Growing Infrastructure Course - Enabling & Structuring for Private Sector Participation in Finance and Innovation, Module 3</i>
88	<i>Hire Strategy : SDM Berkualitas</i>
89	<i>How are Airport PPPs managing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)</i>
90	<i>Hubungan Kerja SPI Terhadap Komisaris dan Direksi</i>
91	<i>Improving Education Quality Through Technology and Infrastructure Development</i>
92	<i>Improving the Strategic Role of State Own Enterprise (BUMN) in Water Resource Management Towards Water, Food and Energy</i>
93	<i>Indonesia Green Summit 2021 "Membela Kepentingan Nasional Menuju Net Zero Emission 2060"</i>
94	<i>Indonesia Infrastructure Roundtable Discussion (IIR XXI) Strategi dan Kebijakan KPBU untuk Infrastruktur Perguruan Tinggi</i>
95	<i>Indonesia's Toll Road Infrastructures Competitiveness in Global Perspective</i>
96	<i>Industrial meeting dengan ADB, Worldbank dan PWC</i>
97	<i>Infrastructure Development in Asia through Singapore-Japan Company Cooperation Webinar</i>
98	<i>Infrastructure Financing STA: Alumni sharing session</i>
99	<i>Infrastructure Financing STA: Industry meetings with stakeholders</i>
100	<i>Infrastruktur Forum: Road to West Jawa Investment Summit</i>
101	<i>Innovative Infrastructure Financing Through Value Capture in Indonesia</i>
102	<i>Inovasi Komunikasi di Masa Pandemi : Tantangan Bagi Keberlanjutan Korporasi</i>
103	<i>Interaction Internal Auditor with Audit Committee and External Auditor in the New Normal</i>
104	<i>Internal Audit Back To The Future , Emerging From The Crisis</i>
105	<i>Internal Audit for Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016based on ISO 19011:2018</i>
106	<i>International Climate Change Conference (ICCC) : A just and Affordable Transition toward Net Zero</i>
107	<i>International symposium for celebration the 25th anniversary of Korea-Japan joint conference</i>
108	<i>Investor Gathering - Infrastructure Land Transportation Outlook</i>
109	<i>Invitation for Infrastructure Business Case Foundation Training</i>
110	<i>Kemenkeu Learning Week</i>
111	<i>Knowledge Sharing Sektor Persampahan</i>
112	<i>Kota Cerdas dan Inovasi Perkotaan untuk Mendukung Smart City Committee Jakarta</i>



No.	Topik Pelatihan
113	<i>Leadership in Digital Era</i>
114	Lexinar I : Perlindungan konsumen dalam transaksi online di e-commerce
115	<i>Managing Global Investigations and Corporate Fraud in The Crisis and Beyond</i>
116	Manajemen Komunikasi Era Digital : Kompleksitas Interaksi dan Kebijakan Publik
117	Manajemen Risiko Pada Pelaksanaan Rusun Bertingkat Tinggi
118	<i>Master Class: Risk Governance with Dual Certification (CERG QRGF)</i> , 4 – 5 Oktober 2021
119	<i>Mastering Behavioral Event Interview</i>
120	<i>Mastering Project Finance</i>
121	Memahami Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dan Teknik Penyelesaian Sengketa
122	Memahami Surat Edaran OJK No.16 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan
123	Mencetak SDM Tangguh di Era <i>Hibryd Workplace</i>
124	Mengelola Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan kontrak kritis, dan Pemberian Kesempatan
125	<i>Merger Start-Up Indonesia</i>
126	<i>Ministry of Finance Festival 2021 - The Future is Today</i>
127	Mitigasi Risiko dan Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Melalui Penerapan Konsep Probit Audit dan Probit Advise
128	<i>Monitoring Risiko Proyek Multi Sektor</i>
129	<i>Multilevel Water Governance</i>
130	<i>National Flagship Program "Strategic Capabilities Development for Sharia Economic & Finance Leader: Towards an Impactful Social Finance"</i>
131	<i>Nature-Based Solutions and Green Infrastructure: An Introductory Package for Beginners</i>
132	<i>Negotiation Strategies for Success</i>
133	<i>Opportunities and challenges for peaceful Indo-Pacific Region</i>
134	<i>Organizational Analysis</i>
135	<i>Pathway to Low Carbon Development for Indonesia</i>
136	Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah 2021 Berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 dan Permendagri no 77 tahun 2020
137	Pelatihan Mandiri Jarak Jauh Bidang Konstruksi : Ahli Muda Manajemen Konstruksi
138	Pelatihan Mandiri Jarak Jauh Bidang Konstruksi : Ahli Teknik Desain Jalan
139	Pelatihan Olah Data dengan Vos Viewer
140	Pelatihan Penggunaan Mendeley untuk Mengolah Referensi
141	Pelatihan Penunjang Dokumen AMDAL dan SLO Persetujuan Teknis untuk Air Limbah
142	Pelestarian Alam berbasis Ekowisata
143	Pembaharuan KUHP Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia
144	Pembekalan Perubahan Peraturan PBJ pada BPR Pemda dan BUMD Air Minum
145	Pendanaan Proyek Bioenergi di Indonesia
146	Pengelolaan Anggaran Kewajiban Pemerintah
147	Penyelesaian Sengketa Migas Melalui Arbitrase
148	Penyimpanan Energi pada NH3 sebagai salah satu solusi <i>Intermittency</i> PLTS & PLTB di Indonesia
149	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
150	Penyusunan Persetujuan Teknis Air Limbah
151	Persaingan Usaha Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Investasi di Indonesia
152	<i>Personal Communication</i> : Bukan Sekadar Kata
153	Potensi <i>Sovereign Wealth Fund (SWF)</i> dalam Pembiayaan Infra Transportasi

No.	Topik Pelatihan
154	<i>Powerpoint and Pitchbooks</i>
155	<i>PPKM Darurat, Ekonomi Melambat</i>
156	<i>PPP Contract Management</i>
157	<i>Private Financing for Infrastructure and Sustainable Growth</i>
158	<i>Professional Ethics</i>
159	<i>Project Development Routemap: International Training</i>
160	<i>Prospek Ekonomi Indonesia setelah Lepas dari Resesi</i>
161	<i>Public Finance in a Complex World</i>
162	<i>Public Private Partnership for Infrastructure</i>
163	<i>Q3 Market Outlook</i>
164	<i>Quickwin Proyek KPBU tahun 2021-2022 dengan Anggota Kantor Bersama</i>
165	<i>Rediscovering Southeast Asia Amidst Its Multi-Layered Burdens</i>
166	<i>Regulasi dan Strategi Hubungan Kerja Pasca Terbit PP No. 35/2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK Klaster Ketenagakerjaan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja</i>
167	<i>Regulatory and Accounting Session</i>
168	<i>Reinventing Piutang Negara</i>
169	<i>Risk Beyond Conference</i>
170	<i>Safely Navigating the Industry Recovery - Organisation & Change Management throughout a pandemic</i>
171	<i>SAK Entitas Privat</i>
172	<i>Scenario Sensitivity Analysis</i>
173	<i>Selecting, Recruiting, and Interviewing Employee</i>
174	<i>Self Audit Assessment (Procurement) Mitigasi Resiko dan Pencegahan Fraud Melalui Konsep Probit Audit dan Probit Advise dalam Pengadaan Barang/Jasa</i>
175	<i>Seminar Nasional Ekonomi Islam – Peran Pembiayaan Infrastruktur Syariah dalam Pencapaian SDGs</i>
176	<i>Service Leadership for Career Business</i>
177	<i>Shortcourse Australia Awards in Indonesia: Infrastructure – financing structures, instruments and incentives</i>
178	<i>Simposium Nasional Perpajakan (SNP) VIII dan Call for paper bertajuk Membangun Optimisme Pajak di Masa Pandemi</i>
179	<i>Sinergi Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (ISSD 2021)</i>
180	<i>Skema KPBU Syariah untuk Proyek Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i>
181	<i>Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Rancangan Standar Pelayanan DJPPR Tahun 2021</i>
182	<i>Startup/Ecommerce FM & Valuation</i>
183	<i>Strategi Kreatif PR di Masa Pandemi</i>
184	<i>Strategic Capabilities Development for Sharia Economic and Finance Leader - Toward and Impactful Islamic Social Finance</i>
185	<i>Strategic Planning and Effective Corporate Budgeting</i>
186	<i>Strengthening Communication Collaboration for Social Harmony</i>
187	<i>Sustainability Development Programs (SDG's) : 101 SDG</i>
188	<i>Sustainability Development Programs (SDG's) : Good Governance</i>
189	<i>Sustainability Development Programs (SDG's) : Pilar Lingkungan (Polusi)</i>
190	<i>Sustainability Development Programs (SDG's) : Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan</i>
191	<i>Sustainable Finance Dialogue: Peran dan Implementasi Sustainable Finance Menuju Transisi dan Net Zero Emission di Indonesia</i>
192	<i>Tax session</i>
193	<i>Technology Transformation in the Precast and Prestressed Concrete for Infrastructure Development towards Indonesian Economic Recovery</i>
194	<i>Tempo & UNIID “Adaptasi Kuliah di Masa Pandemi”</i>
195	<i>Tempo “Investasi Ekonomi Digital di Masa Pandemi”</i>



No.	Topik Pelatihan
196	<i>The 5 Choices to extraordinary productivity</i>
197	<i>The 7 Habits for Managers</i>
198	<i>The 7th Habits of Highly Effective People</i>
199	<i>The Commercial Law Development Program PPP Webinar: Commercial Contract</i>
200	<i>The Leader's Talk III : Accelerating Company Growth Through Data Driven Decision Making</i>
201	<i>The Role of Credit and Political Risk Insurance in Resource Mobilization in the Post COVID-19 Era</i>
202	<i>The Role of Islamic Finance in Promoting Economic Recovery: Enhancing Productivity, Financial Stability,, Sustainable and Inclusive Growth</i>
203	<i>The Ultimate Project Finance Modeling Package</i>
204	<i>Trendsetter Infrastruktur Transportasi Modern di Jakarta</i>
205	<i>Tropical Forest Restoration and Agroforestry</i>
206	<i>UITP-AFD Transport Training Programme on Funding and Private Public Partnership (PPPs)</i>
207	<i>Undangan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Pihak Eksternal Inspektorat Jenderal Tahun 2021</i>
208	<i>Understanding Data Science for Management Accountants</i>
209	<i>Urban Research Forum+: Seminar Online 2021 #1: Juni 2021</i>
210	<i>Virtual Learning Festival #3 "Be Ready for 2021: Seizing The New Normal"</i>
211	<i>WAPPP Annual Congress Next Level PPP Airmeet</i>
212	<i>WAPPP Asia Healthcare Webinar "the critical role of PPP in delivering sustainable healthcare services"</i>
213	<i>WAPPP Webinar: How are Airport PPPs managing to achieve the Sustainable Development Goals</i>
214	<i>Webinar : Vaksinasi COVID-19 "Peran Wanita dalam Sukseskan Vaksinasi COVID-19 mendukung Terwujudnya Ketahanan Keluarga Indonesia"</i>
215	<i>Webinar Adaptasi Kuliah Dimasa Pandemi</i>
216	<i>Webinar Climate Public Policy with ADB</i>
217	<i>Webinar dengan Tema Hubungan Pusat dan Daerah</i>
218	<i>Webinar Digital Contruction in Indonesia Infrastructure Project</i>
219	<i>Webinar Economic forecast and business opportunities in China 2021-2022</i>
220	<i>Webinar Hukum 2021 : Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Penyusunan Regulasi Menuju Kemenkeu Government 4.0</i>
221	<i>Webinar Hukumonline: Encouraging ASEAN Community to Promote Peace in Myanmar</i>
222	<i>Webinar K3 sebagai Pilar Menghadapi Pandemi Menuju Era New Normal</i>
223	<i>Webinar Pendanaan Proyek Bioenergi di Indonesia</i>
224	<i>Webinar Project Management MRT Jakarta - Trendsetter Infrastruktur Transportasi Modern di Jakarta</i>
225	<i>Webinar Risk Beyond : Journey to New Frontier</i>
226	<i>Webinar Risk Maturity Assessment</i>
227	<i>Webinar Teknologi Pengelolaan Sampah Terpadu di Tangerang Selatan</i>
228	<i>Webinar Women and Girls: Game Changers in Development</i>
229	<i>Whistleblowing Management System (WMS) : Apa dan Bagaimana Penerapannya yang Efektif?</i>
230	<i>WHT dan PPN</i>
231	<i>Workshop Alternatif Pembiayaan Infrastruktur SPAM Regional Dadimuria</i>
232	<i>Workshop LKPP Revisi Perlem 29 2021</i>
233	<i>Workshop penyusunan APBN KPBU</i>
234	<i>Workshop Perubahan Peraturan LKPP</i>
235	<i>Workshop UNIID - IIGF Institute Wilayah Bali NTT Maluku dan Papua</i>

TABEL PELAKSANAAN KNOWLEDGE SHARING

No.	Judul Pelatihan
1	Bedah Buku Putih Geodipa
2	<i>Capacity Building</i> KPBU Kantor Wilayah DJKN untuk 5 Titik Pojok KPBU
3	<i>CP3P Level Preparation Virtual Class</i>
4	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Arah Kebijakan, Pemetaan Potensi <i>Pipeline 2022</i> dan <i>Monitoring</i> Proyek KPBU Jalan Tol Serta <i>Site Visit</i> Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi
5	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Pembahasan <i>Regulatory Framework</i> PT PII
6	Forum GRC 2021 : Penerapan GRC untuk Mendukung Transformasi Perusahaan
7	<i>Health Talk</i> : Tetap Sehat Fisik dan Mental Selama Masa Pandemi
8	Identifikasi dan Acuan Alokasi Risiko Sektor Infra Baru (Bangunan Negara)
9	<i>Indonesia Summit</i>
10	<i>Infrastructure Business Case : International Practitioner Course and Certification</i>
11	<i>Introduction of Guarantee for Housing Completion System and Measures to Increase the Housing Supply</i>
12	Jasa <i>Managed Service</i> Sesi 1
13	Jasa <i>Managed Service</i> Sesi 2
14	Kreatif dalam Kesulitan - with Raditya Dika
15	Optimalisasi Pembayaran Nirsentuh di Sektor Jalan Tol
16	Pelatihan dan Sertifikasi Perancangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan V (<i>Certified Procurement Contract Drafter</i>)
17	Pemanfaatan Fasilitas CGIF bagi Korporasi di Indonesia
18	Pengembangan Kereta Api Makassar Parepare
19	Penggunaan Hukum Publik Internasional dalam Transaksi Pinjaman oleh BUMN
20	Penyusunan Kurikulum dan Buku Referensi Pembiayaan Infrastruktur
21	Peran Jalan Tol di Jabodetabek Dalam Mewujudkan Transportasi Perkotaan Yang Berkelanjutan
22	Persiapan Pemeriksaan Pajak dan Penyusunan Kertas Kerja
23	Ralat Durasi Pelatihan - Sosialisasi KPBU Kanwil DJKN Riau dan Pemprov Riau [Revisi Durasi]
24	<i>Refreshment</i> Skema KPBU dan Peran Pojok KPBU untuk Infrastruktur Daerah
25	<i>Seconde Secondment</i> Subtema Pengelolaan Proses Bisnis APBN
26	<i>Sharing Knowledge : Cybersecurity Awareness 2021.</i>
27	<i>Sharing knowledge</i> Kantor Bersama KPBU terkait sektor Perumahan
28	<i>Sharing Session</i> Pemanfaatan BMN melalui KSPI
29	<i>Sharing Session</i> Potensi Volume Lalu Lintas Harian ("LHR") dan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat LHR di sektor Jalan Tol
30	Sosialisasi KPBU Kanwil DJKN Riau dan Pemprov Riau
31	Sosialisasi Regulasi dan tata Cara Penjamian Kredit Modal Kerja dalam rangka Program PEN untuk Mendorong Perekonomian
32	<i>Strategy for KPI Alignment and Monitoring</i>
33	<i>Sustainable Energi Transition - DAMRI Electric Bus Project</i>
34	Transformasi Ketenagalistrikan
35	<i>Webinar</i> Penggunaan Hukum Internasional
36	<i>Webinar</i> Tranformasi Ketenagalistrikan
37	<i>Webinar: Communication and Negotiation Skills for Project Managers</i>
38	<i>Webinar: Digital Transformation through Portfolio Management</i>
39	<i>Workshop</i> Acuan Alokasi Risiko Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Tahun 2021
40	<i>Workshop</i> Identifikasi Acuan Alokasi Risiko Sektor Infrastruktur Bangunan Negara



No.	Judul Pelatihan
41	Workshop Manajemen dan Simulasi Klaim PT PII Bersama Kementerian Keuangan terkait Proyek Penjaminan Pemerintah
42	Workshop Office 365
43	Workshop Pengembangan Talent 2021

Dengan seluruh pelaksanaan program pengembangan kompetensi di atas, di tahun 2021 PT PII telah menginvestasikan untuk pendidikan dan pelatihan karyawan mencapai Rp902,04 juta, mengalami penurunan 15,7% atau setara dengan Rp167,96 juta dibandingkan tahun 2020, atau mencatat pencapaian 24,6% dibandingkan anggaran

tahun 2021. Menurunnya biaya ini karena seluruh pelatihan dilaksanakan secara online sehingga menurunkan biaya pelatihan, biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan PT PII berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan karyawan. Besaran biaya pengembangan kompetensi karyawan secara total dapat dilihat pada tabel berikut.

	Realisasi 2021 (Rp-juta)	Anggaran 2021 (Rp-juta)	Penyerapan Anggaran 2021 (%)		Realisasi 2020 (Rp-juta)	Realisasi 2020 Terhadap Realisasi 2021 (%)
	1	2	(1:2)		3	(1:3)
Investasi Pelatihan dan Pendidikan	902	3.670	24,6%		1.070	84,3%

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir

Perusahaan memberikan peluang kepada setiap karyawan untuk mengembangkan karir sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Perusahaan telah menetapkan jenjang karir yang jelas dan pasti untuk setiap posisi yang ada, baik melalui jalur fungsional maupun struktural. Tujuan pengembangan karir sebagai berikut:

1. Membantu pencapaian tujuan individu dan Perusahaan sebagai hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan dan tujuan Perusahaan.
2. Meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan.
3. Membantu karyawan memahami potensi dan keahliannya, sehingga mampu menciptakan iklim kerja positif.
4. Mengurangi *turnover*.

Dalam mempersiapkan program pengembangan karyawan, Perusahaan memperhatikan kebutuhan pengembangan yang dirasakan karyawan melalui hasil *coaching* dalam rangka penilaian karya dan evaluasi kompetensi yang memunculkan kebutuhan pelatihan sesuai kondisi operasional di lapangan. Di samping itu, PT PII menetapkan komposisi program pengembangan *hard competency* dan *soft competency* sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban.

PENILAIAN KINERJA

Secara berkala, Perusahaan melakukan penilaian kinerja berdasarkan sistem yang dimiliki dan hasilnya digunakan untuk program pengembangan, rotasi, mutasi dan promosi bagi karyawan. Proses penilaian kinerja dilakukan secara berkala menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) berbasis *Balanced Score Card* (BSC) atau lebih dikenal dengan istilah BSC KPI.

Selain itu, PT PII juga melakukan evaluasi kinerja tengah tahun yang bertujuan sebagai bentuk *monitoring* pencapaian kinerja individu, divisi dan Perusahaan.

Strategi Remunerasi dan Kebijakan Remunerasi

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan, yang salah satunya dapat dipenuhi lewat remunerasi atau kompensasi yang memadai. Pada prinsipnya, remunerasi yang sepadan selain meningkatkan keterikatan karyawan akan Perusahaan, juga mendukung laju perkembangan Perusahaan karena setiap karyawan akan bekerja secara maksimal dalam mencapai rencana kerja PT PII.

Untuk memberikan remunerasi yang kompetitif, Perusahaan telah menetapkan standar penggajian berdasarkan pemerinkatan Karyawan dan jenjang jabatan yang disandarkan kepada *remuneration survey* dalam industri sejenis dengan memperhatikan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Setiap tahun PT PII melakukan beberapa penyesuaian terkait struktur remunerasi. Struktur ini difokuskan kepada unsur kompetitif dengan eksternal dan unsur *fairness* dalam penerimaan pendapatan karyawan sesuai dengan masing-masing level dan kinerja selama ini. Komponen remunerasi terdiri atas:

1. Gaji pokok;
2. Tunjangan Tetap (tunjangan jabatan, perumahan, komunikasi dan transportasi)
3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan
4. Tunjangan Cuti Tahunan
5. Tunjangan Cuti Besar
6. Tunjangan Pakaian

Survei Keterikatan Karyawan

PT PII berkomitmen untuk terus mendapatkan input dari karyawannya melalui survei. Seperti tahun 2020 lalu, PT PII menyelenggarakan survei keterikatan karyawan untuk mengetahui tingkat keterikatan karyawan terhadap Perusahaan. Survei ini dilakukan untuk terus mengevaluasi tingkat keterikatan karyawan terhadap Perusahaan agar karyawan merasa bangga bekerja di Perusahaan, serta ingin memberikan kontribusi lebih dari apa yang diharapkan dan akan terus berkomitmen pada Perusahaan. Survei Keterikatan Karyawan tahun 2021 diikuti oleh 137 karyawan dengan hasil survei keterikatan sebesar 61%. Pengukuran Survei dilakukan secara daring dengan bantuan konsultan untuk memastikan independensi dan kerahasiaan jawaban atas survei.

Program Pensiun

Program pensiun yang dimiliki oleh PT PII adalah sebagai berikut:

1. Usia pensiun karyawan ditetapkan 56 tahun, dengan waktu kerja terakhir jatuh pada akhir bulan saat karyawan berusia 56 tahun.
2. Dalam menjaga efisiensi dan efektivitas bisnis PT PII serta memberikan kesempatan untuk pengembangan potensi diri karyawan di luar Perusahaan, maka PT PII dapat menentukan atau memberikan pensiun dini kepada karyawan atau karyawan dapat mengajukan pensiun dini sebagai aspirasi individu setelah masa kerja 10 tahun dengan usia minimal 50 tahun dengan persetujuan Direksi.
3. Pengajuan pensiun diatur dalam SK Direksi.

Program bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun

Bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun, PT PII memiliki kebijakan yang diatur dalam SK Direksi agar karyawan siap dalam menjalani masa pensiun tersebut, dalam kebijakan tersebut mencakup beberapa hal diantaranya fleksibilitas waktu kerja, pelatihan dan hak-hak serta *benefit*.

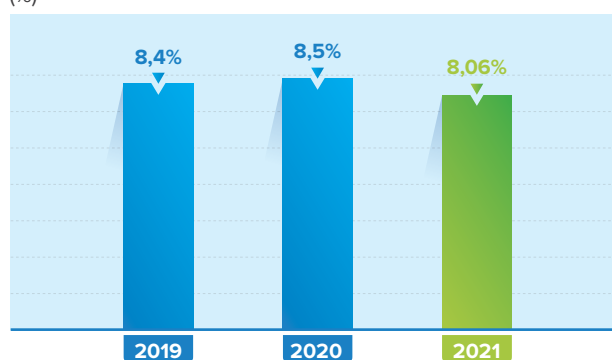
Turnover Karyawan

Tingkat *turnover* karyawan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perihal	2021	2020
Karyawan Keluar:		
Pensiun	-	3
Meninggal Dunia	1	1
Mengundurkan diri	12	6
Diberhentikan	-	-
Jumlah Karyawan	143	130
Rasio Turnover	8,06%	8,5%

Rasio Turnover 2019-2021

(%)



Upaya pengendalian *turnover* karyawan dilakukan dengan

- Meningkatkan *engagement* karyawan
- Mengupayakan jenjang dan pengembangan karir untuk setiap karyawan
- Memberikan fasilitas dan peluang yang luas untuk belajar melalui *public training* dan *scholarship*
- Memberikan fasilitas kesehatan untuk karyawan dan keluarga

BPJS Ketenagakerjaan

PT PII mengikutsertakan seluruh karyawan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.



INTERNALISASI BUDAYA KERJA



Perusahaan telah memiliki budaya kerja yang dikenal dengan InTIME. Pada tahun sebelumnya, Perusahaan melakukan revitalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang sudah ada untuk memastikan kesesuaian nilai-nilai tersebut dalam mendukung pencapaian-pencapaian Perusahaan dalam jangka panjang. Keluaran dari revitalisasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan program-program budaya yang melibatkan karyawan terpilih dari level Staf sampai *Executive Vice President* (EVP).

Kegiatan Internalisasi Budaya Kerja yang dilakukan pada tahun 2021 adalah tetap mengacu kepada nilai-nilai budaya PT PII yaitu InTIME, seperti tahun sebelumnya program budaya dalam kondisi pandemi COVID-19 masih tetap diterapkan mengacu kepada kondisi pandemi yang masih belum usai di tahun 2021. Terdapat 3 (tiga) program yang secara umum masih dijalankan yaitu hidup bersih dan sehat, meningkatkan kualitas bekerja dari rumah dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Adapun tujuan dari pelaksanaan program ini masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program budaya hidup bersih dan sehat

Program ini merupakan bentuk implementasi dari nilai budaya *Excellence* yang bertujuan untuk Meningkatkan daya imun tubuh melalui hidup bersih dan hidup sehat. Target yang ingin dicapai dari implementasi program ini yaitu 1) perbaikan perilaku individu; 2) mendorong

budaya saling mengingatkan di antara anggota tim Divisi; 3) berbagi materi dan info terkait hidup bersih dan hidup sehat.

2. Program budaya meningkatkan kualitas kerja selama bekerja dari rumah

PT PII mulai mengimplementasikan bekerja dari rumah sejak bulan Maret 2020 maka melalui program ini diharapkan setiap karyawan dapat menantang pola pikir mereka untuk tetap memberikan yang terbaik kepada Perusahaan dalam kondisi *work from home*. Target yang ingin dicapai adalah 1) perilaku positif dan produktif individu; 2) mendorong budaya saling mengingatkan di antara anggota tim Divisi; 3) senantiasa memberikan contoh kepada rekan kerja satu tim Divisi atau Divisi lainnya. Program budaya ini merupakan bentuk implementasi dari nilai budaya *Integrity*, *Excellence*, dan *Think Big*.

3. Program budaya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan

Program ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kepedulian karyawan terhadap lingkungan sekitar yang mengalami kondisi kurang baik selama masa pandemi COVID-19 dan turut serta membantu pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi dengan mendukung UMKM di sekitar mereka. Program ini merupakan bentuk implementasi dari nilai budaya *Excellence* dan *Think Big*.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

PT PII berkomitmen untuk membangun dan memelihara Hubungan Industrial yang sehat dan harmonis sebagai sebuah sistem hubungan kerja yang sehat dan konstruktif antara karyawan, PT PII dan Pemerintah (Tripartit).

Tujuan akhir pengaturan Hubungan Industrial di lingkungan PT PII adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan dan Perusahaan. Untuk itu, PT PII menempatkan karyawan sebagai mitra strategis dalam membangun dan memelihara hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja melalui komunikasi secara berkala dan berkesinambungan.

PT PII selalu berupaya menciptakan suasana kerja yang terbuka, positif dan progresif untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat dan harmonis. Beberapa pendekatan yang dilakukan adalah dengan kegiatan-kegiatan dalam bentuk *townhall meeting* yang melibatkan seluruh karyawan atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan *Senior Leaders*. Dalam kegiatan tersebut terjadi penyampaian-penyampaian pesan kepada karyawan dan memfasilitasi karyawan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya terhadap PT PII.

Pada tahun 2020 terdapat gugatan dari calon pegawai yang tidak dapat bergabung di PT PII. Kasus ini telah diupayakan suatu mediasi yang belum dapat disepakati oleh pihak penggugat sehingga pada akhir tahun 2020 berlanjut pada proses persidangan. Kemudian pada tahun 2021 pengadilan memutuskan bahwa PT PII terbukti tidak terjadi pelanggaran hukum atas kondisi tersebut.

PT PII menghargai karyawan sebagai pemangku kepentingan Perusahaan serta berkomitmen untuk memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir secara adil, wajar dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. PT PII akan secara konsisten melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan Perusahaan serta berkomitmen untuk menindaklanjuti keluhan terkait kepegawaian yang diajukan kepada Perusahaan dengan sebaik-baiknya.



PRAKTIK K3



Dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang difokuskan untuk mencapai tingkat kecelakaan nihil atau *zero accident*. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PII mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 mengatur pengendalian risiko kegiatan kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

PT PII juga memiliki dan menjalankan *Standard Operational Procedure* (SOP) Siaga Tanggap Darurat yang digunakan sebagai panduan dalam rangka meningkatkan perlindungan Insan Perusahaan dalam situasi Siaga Tanggap Darurat di Lingkungan Perusahaan. SOP tersebut juga menjelaskan proses pelaporan keadaan darurat, proses evakuasi serta jenis-jenis keadaan darurat. Adapun jenis-jenis keadaan darurat yang tercakup dalam SOP tersebut antara lain meliputi keadaan gempa, kerusakan atau gangguan sipil, kebakaran, kegagalan ventilasi, proses evakuasi gedung, serta keadaan darurat lainnya.

Perusahaan meyakini dengan penerapan SMK3 yang memadai dan kesadaran terhadap pentingnya SMK3 akan mendukung terwujudnya suasana aman dan nyaman dalam bekerja. Hal tersebut juga diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya insiden kecelakaan kerja. Selama tahun 2021, tidak terdapat insiden kecelakaan kerja.

Sehubungan dengan peningkatan kasus positif COVID-19 di tahun 2021, maka perusahaan melakukan upaya pencegahan penyebaran di PT PII adalah dengan melakukan pemantauan kesehatan karyawan setiap hari (mewajibkan karyawan untuk mengisi Formulir Pemantauan Kesehatan), menerapkan skema bekerja dari rumah, program desinfektan kantor Perusahaan secara periodik, mewajibkan karyawan untuk melakukan test PCR dan melakukan karantina setelah melakukan perjalanan dinas. Selain itu, ketika ada karyawan yang positif COVID, maka akan dilakukan pemantauan oleh dokter perusahaan dan memberikan pengobatan, serta melakukan *tracing* terhadap karyawan yang pernah kontak langsung. PT PII juga mendukung program pemerintah dengan melakukan vaksinasi kepada seluruh karyawan dan juga keluarga melalui Vaksinasi Kementerian Keuangan dan Vaksin Gotong Royong.

RENCANA KE DEPAN

Agar pengelolaan dan pengembangan SDM dapat berjalan dengan baik dan lebih terarah serta dapat mendukung pencapaian tujuan Perusahaan, berikut adalah beberapa upaya dalam pengembangan SDM ke depan yang akan dilakukan PT PII:

1. Penguatan struktur organisasi dan jenjang karir yang fleksibel dan adaptif terhadap mandat usaha;
2. Penguatan peran Divisi *Human Capital* sebagai *Business Partner* perusahaan;
3. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkompeten secara efektif dan cepat;
4. Peningkatan Kompetensi teknis maupun non-teknis secara berkelanjutan untuk dapat mencapai visi, misi, dan target perusahaan;
5. Peningkatan *engagement* karyawan melalui program-program yang sesuai dengan tuntutan, tantangan dan kondisi kerja saat ini;
6. *Talent management* dan *succession planning* yang terstruktur dan menyeluruh dengan memperhatikan kompetensi teknis dan kompetensi non-teknis bagi penguatan SDM.



06

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

“ PT PII berkomitmen untuk mewujudkan keberlanjutan, dengan fondasi utama terus tumbuh bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. ”





KOMITMEN DAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK



KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pada prinsipnya, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya GCG oleh pelaku usaha di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, atau *sustainability development*, GCG menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja Perusahaan yang berkelanjutan hingga masa-masa mendatang.

Saat ini, prinsip-prinsip penerapan GCG mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya lingkungan bisnis pada dunia usaha, dengan mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan perusahaan yang berlandaskan etika.



Bagi PT PII, penerapan GCG merupakan aspek penting dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan, mendorong pengelolaan PT PII yang profesional, transparan, dan efisien guna memenuhi kewajiban secara bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, mitra bisnis, serta masyarakat pada umumnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu memaksimalkan nilai PT PII bagi para stakeholders dalam bentuk peningkatan kinerja yang dapat diukur dari nilai Perusahaan dalam jangka panjang serta citra Perusahaan, sehingga semakin menguatkan posisi PT PII di dalam persaingan global serta pertumbuhan bisnis berkelanjutan. GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam rangka memberi keyakinan kepada seluruh *stakeholders* bahwa Perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yaitu:

- **Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)**
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.
- **Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)**
Prinsip akuntabilitas diwujudkan dalam kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ Perusahaan, bertujuan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- **Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**
Kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, termasuk pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.
- **Prinsip Kemandirian (*Independency*)**
Pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip korporasi.
- **Prinsip Kewajaran (*Fairness*)**
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dan Manfaat Penerapan GCG

Perusahaan mengimplementasikan GCG sebagai sebuah strategi fundamental dalam melakukan transformasi dan *turn around*, yang diharapkan dapat menciptakan PT PII sebagai sebuah korporasi yang berkelanjutan (*sustainable company*). Penerapan GCG pada PT PII bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan untuk membangun daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, agar dapat menjaga eksistensi dan pertumbuhan secara berkelanjutan;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien serta efektif selain juga memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ dalam Perusahaan;
3. Mengatur hubungan kerja antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya dilandasi nilai moral yang tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial yang tinggi;
5. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional;
6. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada *Stakeholders*;
7. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan;
8. Memperbaiki Budaya Kerja Perusahaan;
9. Meningkatkan citra baik Perusahaan.

Dasar Hukum Penerapan GCG

PT PII berupaya mematuhi setiap peraturan yang merupakan landasan hukum terkait implementasi GCG dan menjadi acuan PT PII yang meliputi:

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 28/PMK.06/2013 tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, dan perubahannya melalui:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 135/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 197/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
11. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).



PERKEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Upaya Memperkuat Implementasi GCG di Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, telah dilakukan berbagai inisiatif implementasi GCG, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pihak independen dalam mencapai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable governance*) antara lain mencakup:

1. Sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh karyawan PT PII, baik karyawan lama maupun karyawan baru;
2. Pembangunan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi melalui pembaharuan Pakta Integritas dan Komitmen Penerapan GCG;
3. Pelaksanaan *Assessment* GCG Tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Melakukan tindak lanjut rekomendasi atas *area of improvement* penerapan GCG berdasarkan hasil *Assessment* GCG Tahun 2020;
5. Memperkuat Sistem Pelaporan Pelanggaran dengan penyediaan berbagai *tools* yang memudahkan pelaporan;
6. Melakukan *stakeholders survey* untuk menganalisa perspektif *stakeholders* terhadap Perusahaan;
7. Melakukan *survey* kepuasan terhadap para *vendor/rekanan* PT PII;
8. Sosialisasi program pengendalian gratifikasi dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) Perusahaan;
9. Ikut serta dalam ajang penghargaan terkait GCG.

Penghargaan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Tahun 2021

1. PPP Agency of the Year 2021
2. Public Initiative, GRC Awards, Risk Champion Asean Risk Awards 2021
3. Top CSR 2021 dan Top Leader on CSR Commitment 2021
4. Indonesia Best CEO Awards Employee Choice's 2021
5. Top GRC Star Awards #4, The Most Committed GRC Leader 2021, dan The High Performing Corporate Secretary on GRC 2021
6. The Best Brand Image dan Special Mention Annual Report

STRUKTUR DAN PROSES/MEKANISME TATA KELOLA

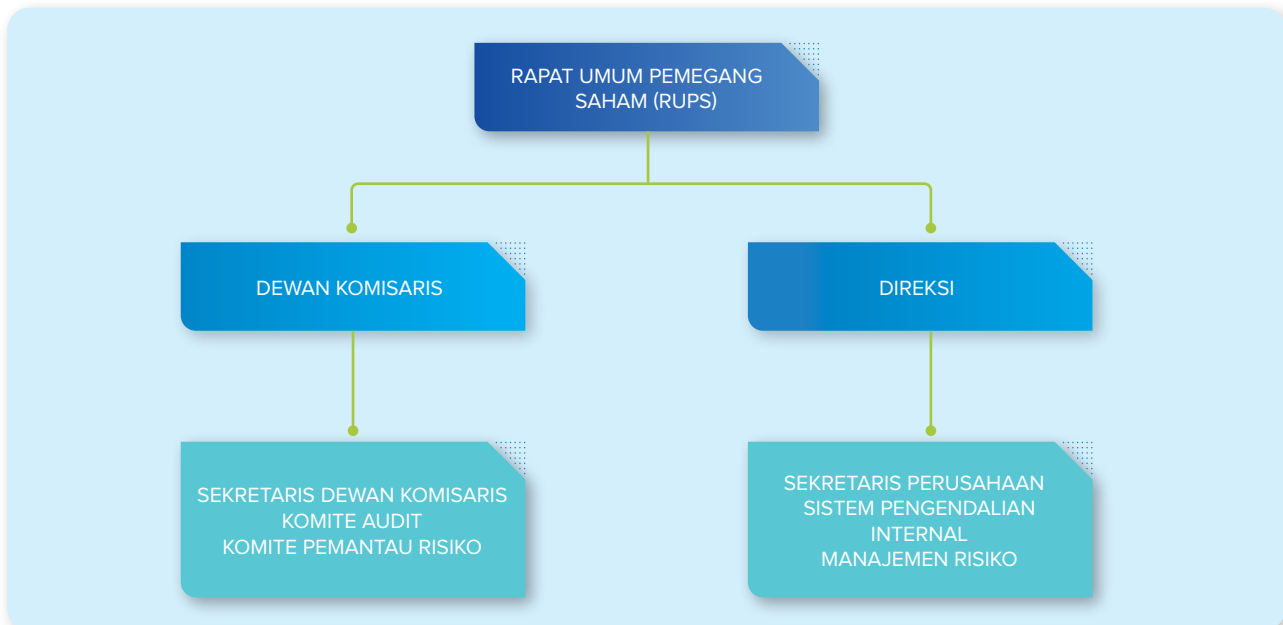
Efektivitas penerapan GCG dapat terlihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek *governance system* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Governance Structure terkait dengan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Struktur Tata Kelola Perusahaan meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Struktur Tata Kelola Perusahaan PT PII



Governance Process merupakan efektivitas proses penerapan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan sehingga menghasilkan *Governance Outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan. Dengan demikian, *Governance Outcome* merupakan hasil akhir atas penerapan *Governance Process* dan dukungan yang memadai dari *Governance Structure*.

PT PII telah menjalankan ketiga aspek *governance system* tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam setiap proses perencanaan, pengembangan, dan operasional bisnis Perusahaan. Perusahaan akan terus mengembangkan struktur dan mekanisme Tata Kelola sesuai peraturan perundang-undangan serta *best practices* yang ada. Dengan mendasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip GCG, diharapkan akan tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Proses/Mekanisme Tata Kelola tercermin dalam implementasi sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya pengaturan yang jelas. *Governance mechanism* dapat diartikan sebagai pengaturan, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.



PT PII telah memiliki pengaturan yang lengkap yang terdapat dalam:

Pedoman	Dasar Penetapan	Isi
Pedoman Tata kelola Perusahaan	- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003; - Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003; - Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2016; - Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.06/2013; - Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015; - Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015; - Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2016; - Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Kebijakan dan prosedur sebagai landasan operasional penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) oleh segenap Organ Perusahaan dan Insan Perusahaan, meliputi: - BAB I : Pendahuluan - BAB II : Organ Perusahaan - BAB III : Manajemen Risiko - BAB IV : Tata Kelola Pengendalian Internal - BAB V : Tata Kelola Informasi - BAB VI : Tata Kelola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Perusahaan - BAB VII : Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan - BAB VIII : Pengukuran dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik - BAB IX : Penutup
Pedoman Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>)	- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003; - Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009; - Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015; - Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.06/2013; - Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Tata laksana kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur mengenai pelaksanaan hubungan kerja antar Dewan Komisaris dan Direksi beserta organ di bawahnya masing-masing, meliputi: - BAB I : Pendahuluan - BAB II : Dewan Komisaris - BAB III : Direksi - BAB IV : Tata Hubungan Kerja Antar Organ Perusahaan - BAB V : Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
Pedoman Kode Etik	- Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015; - Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); - Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Pedoman GCG) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Tata aturan hubungan internal Perusahaan (organ perusahaan dan pegawai) dan hubungan dengan pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) dalam menjalankan bisnis di Perusahaan. Adapun isinya meliputi: - BAB I : Pendahuluan - BAB II : Pernyataan Nilai Perusahaan - BAB III : Pedoman Perilaku Dan Etika Bisnis Perusahaan - BAB IV : Petunjuk Pelaksanaan - BAB V : Pelaporan dan Sanksi Pelanggaran - BAB VI : Penutup
Piagam Komite Audit	- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003; - Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003; - Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005; - Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015 - Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit PT PII dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi: - BAB I : Pendahuluan - BAB II : Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang - BAB III : Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan - BAB IV : Tata Kerja dan Prosedur Kerja - BAB V : Penganggaran dan Pembiayaan - BAB VI : Penutup

Pedoman	Dasar Penetapan	Isi
Piagam Komite Pemantau Risiko	- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; - Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003; - Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005; - Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015; - Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko PT PII dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi: - BAB I : Pendahuluan - BAB II : Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang - BAB III : Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan - BAB IV : Tata Kerja dan Prosedur Kerja - BAB V : Penganggaran dan Pembiayaan - BAB VI : Penutup
Piagam Audit Internal	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009; - Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); - Surat Keputusan Direksi Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. SK-002/DIR/GEN/08/2010 tentang Operating Manual PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Prosedur operasi Audit Internal dalam menjalankan fungsinya melakukan penelaahan dan pengujian operasional PT PII sebagai organisasi bisnis, yang secara garis besar mencakup: - BAB I : Pendahuluan - BAB II : Struktur, Persyaratan, dan Independensi Auditor Internal - BAB III : Cakupan, Kewenangan, Tanggung Jawab Auditor - Bab IV : Proses Penugasan Audit Internal - Bab V : Penutup
Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran	- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001; - Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006; - Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2016; - Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i> Tahun 2008; - Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); - Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Pedoman GCG) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Merupakan pedoman yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran yang disampaikan terhadap PT PII. Isi dari Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai berikut: - BAB I : Pendahuluan - BAB II : Pelaporan Pelanggaran - BAB II : Penanganan Pelaporan Pelanggaran - BAB IV : Perlindungan Pelapor - BAB V : Sosialisasi dan Penegakan



Pedoman	Dasar Penetapan	Isi
Pedoman Gratifikasi	- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001; - Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2002; - Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2016; - Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.09/2017; - Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); - Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); - Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); - Pedoman Kode Etik PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Pedoman ini terkait dengan penerimaan dan pemberian segala bentuk gratifikasi, batasan, serta pelaporan penerimaan dan pemberian yang berlaku bagi Insan Perusahaan dan seluruh <i>stakeholders</i>. Isi dari pedoman sebagai berikut: - BAB I : Pendahuluan - BAB II : Ketentuan Umum Gratifikasi - BAB III : Penutup
Pedoman Sistem Pengendalian Internal	- Peraturan Menteri Keuangan No. 88/KMK.06/2015; - COSO <i>Internal Control – Integrated Framework</i> (2013); - Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); - Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Pedoman GCG) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Pedoman pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan di lingkungan Perusahaan, meliputi: - BAB I : Pendahuluan - BAB II : Implementasi Sistem Pengendalian Internal - BAB III : Tugas dan Tanggung Jawab

PT PII melakukan penyusunan, peninjauan dan evaluasi terhadap dokumen proses bisnis (kebijakan, pedoman, prosedur dan instruksi kerja) yang berlaku di Perusahaan secara berkala. Kebijakan disusun dengan memerhatikan metodologi, *best practices*, regulasi yang berlaku dan jika diperlukan dapat melibatkan karyawan Perusahaan untuk mendapatkan masukan melalui *focus group discussion*. Peninjauan dan evaluasi terhadap dokumen proses bisnis secara berkala bertujuan untuk penyempurnaan proses bisnis yang telah ada serta memastikan bahwa kebijakan Perusahaan telah mutakhir sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Penyiapan dokumen proses bisnis merupakan sinergi kerja dari unit bisnis yang akan melaksanakan proses bisnisnya dengan unit khusus penyiapan dokumen proses bisnis (*Organization Design*).

HASIL TATA KELOLA: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Secara berkala, Perusahaan melakukan pengukuran implementasi GCG sebagaimana diwajibkan dalam PMK 88/2015. Pengukuran implementasi GCG dimaksud bertujuan untuk:

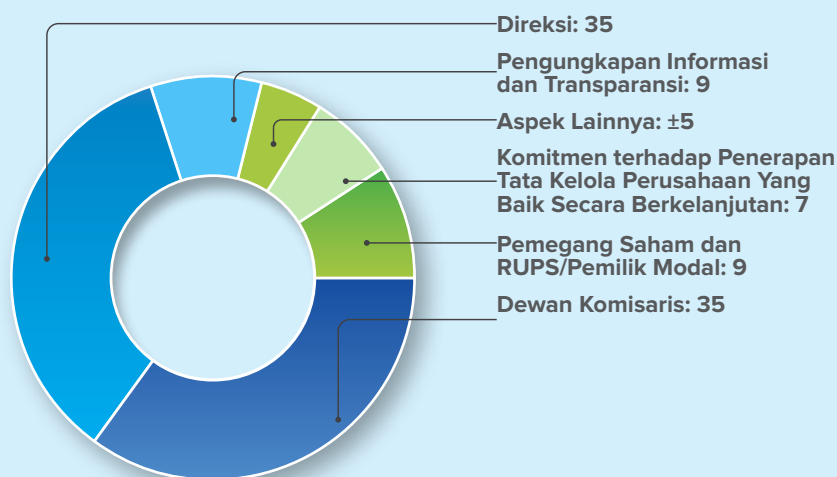
1. Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
2. Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
3. Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi Perusahaan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.
4. Mendorong pengelolaan Perusahaan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.

Kriteria Assessment GCG

Parameter *Assessment* GCG yang digunakan adalah berdasarkan parameter dari KMK 505/2020 yang terdiri dari 6 (enam) aspek, 153 Parameter, 43 Indikator dan 568 Faktor Uji Kesesuaian.

Komposisi Aspek Assessment GCG

(Keputusan Sekretaris Keuangan No. 505/KMK.06/2020)



Pihak yang Melakukan Penilaian

Pengukuran terhadap implementasi GCG dilakukan dengan 2 cara, yaitu Penilaian (*assessment*) GCG yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun oleh penilai independen dan Evaluasi (*review*) GCG yang dilakukan pada tahun berikutnya. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh Perusahaan (*self-assessment*) dimana dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen.

Pelaksanaan Assessment Penerapan GCG Tahun 2021

Adapun pelaksanaan *assessment* GCG Perusahaan untuk periode tahun buku 2021 oleh Pihak Independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan hasil *assessment* tersebut PT PII memperoleh skor 89,060 atau mencapai kualitas “SANGAT BAIK”, dengan rincian hasil dan perbandingan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter	Bobot	Capaian Tahun 2021	
		Skor	% Pencapaian
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	6,810	97,282
Pemegang Saham dan RUPS	9,00	8,362	92,907
Dewan Komisaris	35,00	32,109	91,739
Direksi	35,00	32,238	92,110
Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	8,708	96,753
Aspek Lainnya	±5,00	0,833	
Skor Keseluruhan	100,00	89,060	“Sangat Baik”
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG			“Sangat Baik”

Keterangan:

0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik



Dari hasil *Assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2021, terdapat 49 rekomendasi terhadap area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan atau *Area of Improvement* (Aoi) untuk menjadi rencana aksi perbaikan/penyempurnaannya yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait guna meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada *best practices* yang terus berkembang, sebagai berikut.

No	Penanggungjawab Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi
1	Pemegang Saham	5
2	Dewan Komisaris	24
3	Direksi	20

Pelaksanaan *Assessment* Penerapan GCG Tahun 2020

Hasil *Assessment* penerapan GCG di Perusahaan periode tahun buku 2020 oleh Pihak Independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan hasil *assessment* tersebut PT PII memperoleh skor 89,120 atau mencapai kualitas “SANGAT BAIK”, dengan rincian hasil dan perbandingan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter	Bobot	Capaian Tahun 2020	
		Skor	% Pencapaian
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	6,163	88,038
Pemegang Saham dan RUPS	9,00	8,654	96,154
Dewan Komisaris	35,00	32,483	92,807
Direksi	35,00	33,026	94,360
Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	8,794	97,716
Aspek Lainnya	5,00	0,000	
Skor Keseluruhan	100,00	89,120	“Sangat Baik”
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG		“SANGAT BAIK”	

Dari hasil *Assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2020, terdapat 59 rekomendasi terhadap area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan atau *Area of Improvement* (Aoi) untuk menjadi rencana aksi perbaikan/penyempurnaannya yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait guna meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada *best practices* yang terus berkembang, sebagai berikut.

No	Penanggungjawab Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi
1	Pemegang Saham	2
2	Dewan Komisaris	25
3	Direksi	20

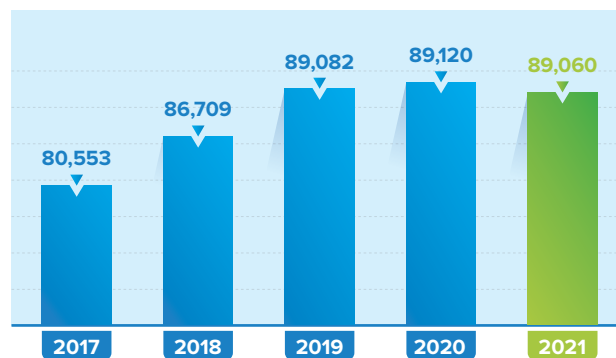
Sekilas Tentang *Assessment* Penerapan GCG di Tahun-tahun Sebelumnya

Proses *assessment* mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan perkembangan infrastruktur serta *soft structure* GCG di lingkup Perusahaan. Berikut disampaikan hasil *assessment* penerapan GCG dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tahun	Skor <i>Assessment</i> GCG	Pelaksana Penilai
2021	89,060	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2020	89,120	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2019	89,082	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2018	86,709	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2017	80,553	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Perkembangan *Assessment* Penerapan GCG PT PII 2017-2021

Perkembangan *Assessment* Penerapan GCG PT PII





STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK



PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Saham dan Pemegang Saham serta Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan dari perusahaan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan definisi yang jelas terkait peran, fungsi, hak dan kewajiban dari pemegang saham sebagai pihak yang menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan; dimana hal ini diatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebagai salah satu organ Perusahaan, RUPS memiliki fungsi sentral dalam mengambil keputusan strategis. Di samping itu, RUPS merupakan wadah perlindungan dan perlakuan kesetaraan bagi seluruh Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Perusahaan. Melalui forum RUPS, Pemegang Saham dapat menyalurkan haknya untuk menciptakan nilai optimal bagi Perusahaan, dimana hak tersebut berlaku secara adil dan proporsional berdasarkan prinsip *one share, one vote*.

Perusahaan merupakan BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Keuangan.

Struktur dan Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Desember 2021



Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
Negara Republik Indonesia	9.570.000 lembar	100%





Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Struktur Tata Kelola Perusahaan. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui RUPS, pemegang saham mengambil keputusan yang didasarkan pada kepentingan Perusahaan, serta dilakukan secara wajar dan transparan.

Kewenangan RUPS

1. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
 2. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 3. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
 4. Menyetujui dan mengesahkan atau menolak Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disusun oleh Direksi setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris.
 5. Menetapkan besaran honorarium dan fasilitas bagi Dewan Komisaris serta gaji dan fasilitas lain bagi Direksi.
 6. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.
 7. Menyetujui atau menolak transaksi-transaksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan kekayaan
- Perusahaan sebagai jaminan utang yang bernilai sebesar sama dan/atau lebih dari 50% jumlah ekuitas atau kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, seperti:
- a. Mengagunkan atau menjaminkan aktiva tetap Perusahaan untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.
 - b. Penyertaan dan/atau pelepasan penyertaan modal pada perusahaan lain, Perusahaan anak, Perusahaan patungan.
 - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan/atau pembubaran Perusahaan anak/patungan.
 8. Menyetujui atau menolak tindakan kerja sama Perusahaan dengan Badan Usaha atau entitas/pihak lain berupa penjaminan, kontrak penjaminan, kontrak manajemen, kerja sama lisensi, penyewaan aset atau kerja sama lainnya yang bernilai sama atau melebihi 50% dari nilai ekuitas Perusahaan.
 9. Menyetujui aksi korporasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 10. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
 11. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.



Jenis, Peran, dan Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham

Jenis-jenis RUPS



Terdapat 2 (dua) jenis RUPS yang diselenggarakan oleh Perusahaan, yaitu RUPS Tahunan serta RUPS Lainnya.

1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan yang terdiri dari:

- a. RUPS Tahunan untuk persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan. Perusahaan menyelenggarakan RUPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:
 - Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris.
 - Usulan penggunaan laba bersih Perusahaan.
 - Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan.
- b. RUPS Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. RUPS tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:
 - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, termasuk Proyeksi Laporan Keuangan.
 - Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perusahaan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal Panggilan RUPS tahunan.

2. RUPS Lainnya

RUPS Lainnya, atau disebut juga RUPS Luar Biasa, dapat diadakan setiap saat jika dianggap perlu oleh Direksi dan atau Komisaris dan atau Pemegang Saham.

RUPS Lainnya juga dapat dilakukan melalui mekanisme Keputusan Sirkuler, yaitu pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar mekanisme RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, penyelenggaraan RUPS Perusahaan melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

- **Penerbitan Publikasi RUPS**
Perusahaan melakukan publikasi informasi mengenai pelaksanaan RUPS pada website Perusahaan.
- **Pemanggilan dan Pengumuman RUPS**
PT PII melakukan pemanggilan RUPS yang dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS.

- **Tata Tertib**

Tata tertib pelaksanaan RUPS Perusahaan mengacu pada Akta Pendirian No. 29 Tahun 2009. Ketentuan yang tertuang dalam akta tersebut adalah:

1. RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir.
2. Seluruh risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
3. Risalah RUPS yang dibuat dengan Akta Notaris, tanda tangan dimaksud tidak diperlukan.

- **Tata Tertib Pengambilan Keputusan**

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
3. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
4. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah dan

keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

- **Ketentuan Kuorum**

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan lain.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
4. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 50% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perusahaan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan atas permohonan Perusahaan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
6. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
7. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyelenggaraan RUPS di Sepanjang Tahun 2021 dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen

RUPS TAHUNAN PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Agenda
23 Juni 2021	Dilaksanakan melalui video konferensi	1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 yang mencakup: a. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquitted de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020. 2. Penetapan keputusan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020; dan; 3. Penetapan keputusan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta pembayaran Tantiem berdasarkan kinerja Tahun Buku 2020.



RUPS TAHUNAN PERSETUJUAN RKAP TAHUN 2022

Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Agenda
20 Desember 2021	Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lantai 10 Utara Jl. Lapangan Banteng No. 2-4, Jakarta	1. Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2022. 2. Persetujuan Kontrak Kinerja Direksi dan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun Buku 2022.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan Organ Perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif dan bertindak secara independen untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas kebijakan Perusahaan, jalannya Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar serta Dewan Komisaris juga memastikan Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS serta memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 197/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan ("PMK 197/2019"), Anggaran Dasar Perusahaan, dan ketentuan lain yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai suatu *board* memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitas Dewan Komisaris. Kompetensi tersebut meliputi bidang akuntansi, keuangan, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman dan kedalaman manajerial, pengetahuan industri, pemahaman regulasi serta manajemen dan pengendalian risiko.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditetapkan lain oleh RUPS. Anggota Dewan Komisaris yang telah menduduki masa jabatan sebagaimana dimaksud, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris beranggotakan 3 (tiga) orang. Dewan Komisaris diketuai oleh seorang Komisaris Utama. Dewan Komisaris telah melakukan pembagian tugas pengawasan yang diputuskan secara internal oleh Dewan Komisaris.

Di tahun 2021 tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 sama dengan susunan sebelumnya yakni per 31 Desember 2020.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris Utama	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 205/KMK.06/2020.	20 April 2020 s.d 19 April 2025	Ke-1
Mariatul Aini	Komisaris	Diangkat pertama kali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 861/KMK.06/2018 dan diangkat kembali melalui KMK No. 720/KMK.06/2019.	19 Agustus 2019 s.d 18 Agustus 2024	Ke-2
Wahyu Utomo	Komisaris	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 205/KMK.06/2020.	20 April 2020 s.d 19 April 2025	Ke-1

Profil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Board Charter: Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki uraian pekerjaan yang dituangkan dalam Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang terakhir kali diperbarui pada tahun 2019 serta Pedoman Dewan Komisaris yang terakhir kali diperbarui pada tahun 2021. Dokumen-dokumen tersebut merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dan menjelaskan hubungan, komunikasi, dan aktivitas antara organ Perusahaan tersebut secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Pedoman tersebut dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Board Manual dan Pedoman Dewan Komisaris disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Isi *Board Manual* yang berhubungan dengan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris
3. Pedoman Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
4. Pedoman Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris
5. Rapat Dewan Komisaris
 - a. Pengertian
 - b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
6. Pedoman Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
7. Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
8. Organ Pendukung Dewan Komisaris
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko

Penganturan lanjutan dari *Board Manual* dalam Pedoman Dewan Komisaris diantaranya sebagai berikut:

1. Pedoman pelaksanaan tugas dalam memberikan persetujuan atas rancangan RJP dan RKAP
2. Pedoman pelaksanaan tugas pemberian arahan
3. Pedoman pelaksanaan tugas pengawasan
4. Tugas terkait potensi benturan kepentingan
5. Tugas terkait praktik tata kelola perusahaan yang baik Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris meliputi:

• Tugas Dewan Komisaris

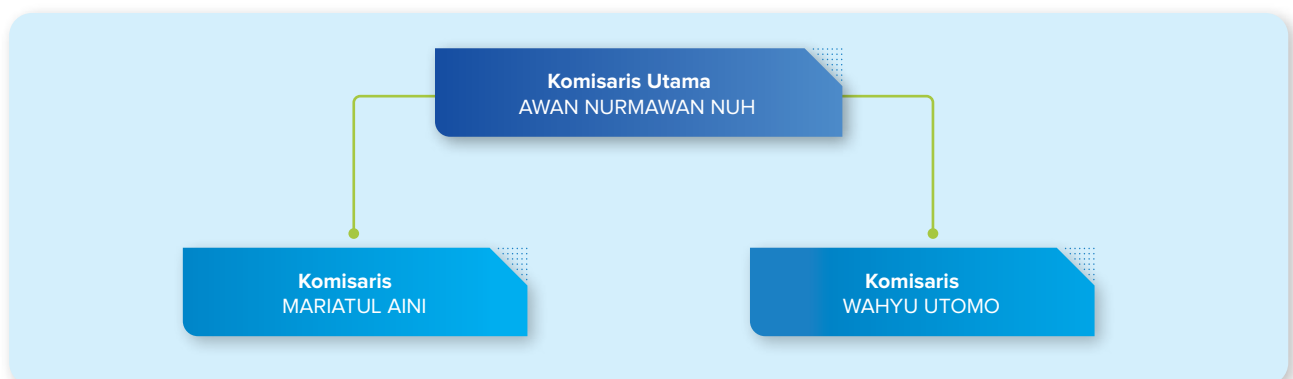
Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertugas:

- a. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.
- e. Memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak pada Perusahaan secara tepat waktu dan efisien.
- f. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan/atau hasil pemeriksaan tertentu oleh lembaga pemeriksa lainnya.
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada RUPS secara triwulanan dan/atau sewaktu waktu apabila diminta oleh RUPS.
- h. Melaporkan kepada RUPS setiap perkembangan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada Perusahaan.



- i. Menyusun pedoman pengambilan keputusan, kebijakan pengawasan, penilaian kinerja, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta melaksanakannya.
 - j. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - k. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.
 - l. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 - m. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
 - n. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- **Wewenang Dewan Komisaris**
Agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan.
 - b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
 - c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
 - d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
 - e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
 - f. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
 - g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 - h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
 - i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
 - j. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 - k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembidangan Tugas Dewan Komisaris



Dalam melakukan tugas pengawasan terhadap jalannya perusahaan, Dewan Komisaris telah melakukan pembagian tugas, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/KOM PII/04/2020 yaitu sebagai berikut:

Awan Nurmawan Nuh (Komisaris Utama)

1. Mengkoordinasikan seluruh tugas Dewan Komisaris; dan
2. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi

Mariatul Aini (Komisaris)

1. Sebagai Ketua Komite Audit;
2. Bidang *Internal Audit, Legal and Compliance, Corporate Secretary and Communication, CEO Office, IIGF Institute, Corporate Strategy & Finance, Treasury & Investment, Human Capital, and Corporate Service & Procurement*;
3. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.

Wahyu Utomo (Komisaris)

1. Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko;
2. Bidang *Guidance & Consultation, Underwriting, Environment & Social*, Inisiasi Bisnis, Manajemen Risiko Korporasi, Manajemen Risiko Proyek dan Klaim, Penilaian Proyek, dan Penjaminan non KPBU;
3. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.

Program Pengenalan Perusahaan bagi Dewan Komisaris Baru

Program pengenalan Perusahaan bagi Anggota Dewan Komisaris baru yang dilaksanakan adalah meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan.
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Di tahun 2021 Perusahaan tidak melakukan pengangkatan Dewan Komisaris baru, dengan demikian Program Pengenalan Perusahaan tidak dilakukan.



Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Program pengembangan kompetensi dimaksudkan sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung-jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Perusahaan dan memberikan nasihat strategis pada Direksi untuk kemajuan Perusahaan.

Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2021

Dalam melakukan mekanisme proses pengawasan dan pemberian arahan serta nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengurusan Perusahaan, Dewan Komisaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Perusahaan yang berlaku. Proses pengawasan ini adalah untuk memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan sehingga mampu memberikan imbal jasa yang memuaskan bagi Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan lainnya.

Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2021 meliputi:

No	Uraian Kegiatan	Tujuan	Realisasi
1	Penyusunan dan penetapan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2022	Menetapkan dan menyampaikan RKA dan RAB Dewan Komisaris Tahun 2022 sebagai bagian dari rancangan RKAP Perseroan Tahun 2022	Rancangan RAB dan RKA disusun pada bulan Agustus 2021 dan disampaikan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris No. S-32/PII/DK/0821 tanggal 20 Agustus 2021
2	Penyusunan dan penetapan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2022	Menyampaikan Rancangan Usulan IKU Dewan Komisaris Tahun 2022 kepada RUPS	Usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2022 dikirimkan kepada RUPS melalui surat Dewan Komisaris No. S-38/PII/DK/1021 tanggal 28 Oktober 2021 dan ditetapkan saat RUPS Persetujuan RKAP Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2021
3	Penelaahan dan persetujuan atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) PT PII Tahun 2022	Memberikan Tanggapan secara komprehensif atas usulan RKAP Tahun 2022 kepada Direksi dan Persetujuan Dewan Komisaris atas Rancangan RKAP 2022	Dekom telah melakukan penelaahan dan memberikan masukan perbaikan atas konsep RKAP 2022 kepada Direksi melalui surat nomor S-34/PII/DK/1020 tanggal 11 Oktober 2021 yang telah seluruhnya diakomodasi oleh Direksi. Dekom juga memberikan tanggapan atas RKAP 2022 kepada RUPS melalui surat no: S-40/PII/DK/1121 tanggal 30 November 2021. Berdasarkan hal tersebut, Dekom menyetujui Rancangan RKAP 2022 dan disampaikan kepada RUPS melalui surat nomor 878/PII/DRU/1021 tanggal 29 Oktober 2021
4	Penyampaian tanggapan Dekom kepada RUPS atas rancangan RKAP PT PII Tahun 2022	Menyampaikan tanggapan atas rancangan RKAP PT PII Tahun 2022 kepada RUPS tepat waktu	Tanggapan Dekom atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) PT PII Tahun 2022 telah disampaikan kepada RUPS melalui surat Dekom No: S-40/PII/DK/1121 tanggal 30 November 2021
5	Response atas permohonan tanggapan/penjelasan dari Direksi/RUPS	Melakukan penelaahan dan menyampaikan tanggapan atas permohonan tanggapan/penjelasan yang diterima dari Direksi/RUPS	Seluruh permohonan tanggapan/penjelasan dari Direksi/RUPS telah ditanggapi tepat waktu, paling lambat 14 hari setelah permohonan tanggapan/penjelasan dari Direksi/RUPS diterima lengkap
6	Pelaksanaan rapat rutin Bulanan Dewan Komisaris	Melakukan pengawasan dan penelaahan atas performansi laporan manajemen Perusahaan dan pembahasan isu-isu terkini secara rutin dan berkala setiap bulannya	Selama periode Tahun 2021 telah dilaksanakan rapat rutin Dewan Komisaris sebanyak 13 kali dan rapat rutin gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 17 kali
7	Pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Per-UU-an dan Perjanjian dengan Pihak Ke-3	Melakukan pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Per-UU-an dan Perjanjian dengan Pihak Ke-3	Rapat terkait kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Per-UU-an dan Perjanjian dengan Pihak Ke-3 telah dilaksanakan pada bulan September Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Tujuan	Realisasi
8	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal	Memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah diselenggarakan secara memadai	Rapat berkala dengan Divisi IA dan Divisi RM mengenai sistem pengendalian internal yang dilaksanakan setiap triwulanan
9	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan SDM dan pelaksanaannya	Memastikan bahwa kebijakan SDM telah dilaksanakan secara memadai	<i>Update progress</i> atas pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan SDM beserta pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap bulan saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda highlight laporan manajemen Perusahaan
10	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya	Memastikan bahwa kebijakan Pengadaan telah dilaksanakan secara memadai	Telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya pada bulan Juni tahun 2021
11	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan TI dan pelaksanaannya	Melakukan pengawasan dan memastikan kebijakan IT sesuai dilaksanakan	<i>Update progress</i> atas pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan TI dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap bulan saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda <i>highlight</i> laporan manajemen Perusahaan
12	Pengawasan atas efektivitas audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan terkait perusahaan	Memastikan bahwa efektivitas audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan terkait Perusahaan telah memadai	Rapat berkala setiap triwulanan dengan Divisi IA mengenai efektivitas audit eksternal dan internal dilaksanakan
13	Pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaannya	Memastikan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilaksanakan secara memadai	Rapat kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021
14	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya	Memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko telah dilaksanakan secara memadai	Rapat berkala dengan Divisi RM mengenai pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang dilaksanakan setiap triwulanan
15	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP	Melakukan pengawasan atas pelaksanaan RKAP Perusahaan tahun 2021	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan RKAP Tahun 2021 pada semester I dan semester II telah disampaikan secara tepat waktu kepada RUPS melalui surat No. S-30/PII/DK/0821 tanggal 12 Agustus 2021, perihal Laporan pengawasan RKAP periode semester I Tahun 2021, dan Surat No. S-08/PII/DK/0222 tanggal 11 Februari 2022, perihal Laporan pengawasan RKAP periode semester II Tahun 2021
16	Penelaahan pengusulan remunerasi Direksi	Perhitungan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang komprehensif	Menyampaikan Usulan atas perhitungan tantiem tahun 2020 dan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2021 kepada RUPS pada tanggal 8 Juni 2021 melalui surat No. SR-03/PII/DK/0621
17	Pemantauan kinerja Direksi	Memastikan kinerja Direksi sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	Rapat rutin gabungan Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala mengenai laporan manajemen bulanan sepanjang tahun 2021
18	Monitoring atas proyek yang telah dijamin	Memastikan pengelolaan risiko atas proyek yang telah dijamin termonitor dengan baik	Rapat berkala dengan Divisi RM mengenai pantauan risiko atas proyek yang telah dijamin yang dilaksanakan setiap triwulanan
19	Monitoring atas kegiatan IIGF Institute	Memastikan divisi IIGF Institute menjalankan program kerja sesuai dengan RKAP Tahun 2021	<i>Update progress</i> atas pengawasan kegiatan IIGF Institute dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap bulan saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda <i>highlight</i> laporan manajemen Perusahaan



No	Uraian Kegiatan	Tujuan	Realisasi
20	Evaluasi atas kegiatan CSR	Memastikan kegiatan CSR Perusahaan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	<i>Update progress</i> atas evaluasi kegiatan CSR dilakukan secara rutin setiap bulan saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda <i>highlight</i> laporan manajemen Perusahaan
21	Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Menjalankan kewajiban Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan Sesuai ketentuan PMK nomor 88/PMK.06/2015	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS secara tepat waktu setiap periode Triwulan
22	Penyampaian laporan realisasi capaian IKU Dewan Komisaris		Laporan realisasi capaian IKU Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS secara tepat waktu setiap periode Triwulan
23	Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2021 oleh BPKP	Memastikan Perusahaan melakukan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Sesuai ketentuan PMK nomor 88/PMK.06/2015	Penilaian penerapan GCG Tahun 2021 oleh BPKP telah selesai dilaksanakan berdasarkan berita acara <i>exit meeting assessment</i> atas penerapan GCG PT PII tahun 2021 dengan nilai skor keseluruhan adalah 89,060
24	Pengusulan penetapan KAP untuk audit LK tahun 2021 kepada RUPS	Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015, Laporan Keuangan Tahunan Persero diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada RUPS usulan penunjukan KAP untuk Melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk Tahun Buku 2021 melalui surat No. S-33/PII/DK/0921 tanggal 17 September 2021
25	Peningkatan kompetensi Anggota Dewan Komisaris	Meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris	Sepanjang tahun 2021 Pelatihan dan Seminar yang diikuti oleh Dewan Komisaris baik di dalam maupun luar negeri diikuti melalui virtual

Keputusan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2021

Seluruh keputusan hasil Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Notulen Rapat dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada setiap Rapat berikutnya. Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberian nasihat, antara lain melalui pemberian rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi. Sekretaris Dewan Komisaris ditugaskan untuk memonitor pelaksanaan keputusan dan rekomendasi Dewan Komisaris.

Hingga 31 Desember 2021, Dewan Komisaris mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Surat Keputusan Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2021

No.	Nomor Surat Keputusan	Tanggal	Perihal
1	KEP-01/KOM/PII/01/2021	31 Januari 2021	Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
2	KEP-02/KOM/PII/04/2021	05 April 2021	Perubahan Atas Keputusan Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Nomor KEP-06/KOM/PII/09/2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
3	KEP-03/KOM/PII/06/2021	30 Juni 2021	Pemberhentian dan Pengangkatan sebagai Staf Sekretaris Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
4	KEP-04/KOM/PII/07/2021	15 Juli 2021	Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara untuk mengisi Kekosongan Jabatan Anggota Direksi Perseroan
5	KEP-05/KOM/PII/08/2021	13 Agustus 2021	Penunjukan Kembali Direktur Utama sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

No.	Nomor Surat Keputusan	Tanggal	Perihal
6	KEP-06/KOM/PII/08/2021	27 Agustus 2021	Pedoman Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
7	No. SK-005/PII-BOD/1221 No. KEP-08/KOM/PII/12/2021	17 Desember 2021	SKB - Pengesahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Code of Good Corporate Governance</i>) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Surat Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2021

No.	Nomor Surat Keputusan	Tanggal	Perihal
1	S-01/PII/DK/0121	15 Januari 2021	Tindak Lanjut Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun Buku 2021
2	S-02/PII/DK/0121	19 Januari 2021	Tanggapan atas Usulan Indeks Kinerja (IKU) Individual Direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2021
3	S-03/PII/DK/0121	20 Januari 2021	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Individual Direksi Tahun 2021 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
4	S-04/PII/DK/0121	25 Januari 2021	Evaluasi atas RKAP Tahun 2020 dan Pelaksanaan RKAP Tahun 2021 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
5	S-05/PII/DK/0221	02 Februari 2021	Laporan Realisasi Capaian IKU Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur (Persero) Periode Triwulan IV Tahun 2020
6	S-06/PII/DK/0221	05 Februari 2021	Tanggapan atas Laporan Penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Periode Tahun 2020
7	S-07/PII/DK/0221	16 Februari 2021	Tanggapan atas Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2022 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
8	S-08/PII/DK/0221	19 Februari 2021	Evaluasi Kegiatan Audit Internal dan Pengendalian Internal PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2020
9	S-09/PII/DK/0221	26 Februari 2021	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Periode tahun 2020
10	S-10/PII/DK/0221	26 Februari 2021	Laporan Pengawasan RKAP PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Periode Semester II (Tahunan) Tahun 2020
11	S-11/PII/DK/031	01 Maret 2021	<i>Representation letter</i> audit IKU BOC tahun 2020 PWC
12	S-12/PII/DK/0421	05 April 2021	Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penjaminan Proyek Pengadaan Vaksin COVID-19
13	S-13/PII/DK/0421	12 April 2021	Penyampaian Arahan dan Rekomendasi Hasil <i>Monitoring</i> Proyek SPAM Lampung
14	S-14/PII/DK/0421	14 April 2021	Tanggapan atas Laporan Penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Periode Triwulan I Tahun 2021
15	S-15/PII/DK/0421	19 April 2021	Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021
16	S-16/PII/DK/0421	27 April 2021	Laporan Realisasi Capaian IKU Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur (Persero)/PT PII Periode Triwulan I Tahun 2021
17	S-17/PII/DK/0421	30 April 2021	Reviu atas Kegiatan Internal Audit Triwulan I Tahun 2021
18	S-18/PII/DK/0521	05 Mei 2021	Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap
19	S-19/PII/DK/0521	17 Mei 2021	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja Operasional PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2020
20	S-20/PII/DK/0521	21 Mei 2021	Reviu atas Kegiatan <i>Risk Management</i> yang berasal dari <i>Information Technology</i> (IT)
21	S-21/PII/DK/0521	21 Mei 2021	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Periode Triwulan I tahun 2021



No.	Nomor Surat Keputusan	Tanggal	Perihal
22	S-22/PII/DK/0621	30 Juni 2021	Penyampaian Salinan Keputusan Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Nomor KEP-03/KOM/PII/06/2021
23	S-23/PII/DK/0721	08 Juli 2021	Pengadaan KAP
24	S-24/PII/DK/0721	13 Juli 2021	Reviu atas Kegiatan/Pemantauan Risiko triwulan ke-2 dan Rencana Kerja Triwulan ke-3
25	S-25/PII/DK/0721	16 Juli 2021	Tanggapan atas Laporan Penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Periode Triwulan II Tahun 2021
26	S-26/PII/DK/0721	28 Juli 2021	Evaluasi atas RKAP Semester I Tahun 2021
27	S-27/PII/DK/0721	28 Juli 2021	Laporan Realisasi Capaian IKU Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Periode Triwulan II tahun 2021
28	S-28/PII/DK/0821	04 Agustus 2021	Reviu atas Kegiatan Internal Audit Triwulan II Tahun 2021
29	S-29/PII/DK/0821	12 Agustus 2021	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Periode Triwulan II Tahun 2021
30	S-30/PII/DK/0821	12 Agustus 2021	Laporan Pengawasan RKAP PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Periode Semester I Tahun 2021
31	S-31/PII/DK/0821	20 Agustus 2021	Tanggapan atas Usulan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)
32	S-32/PII/DK/0821	20 Agustus 2021	Penyampaian Rancangan RKA Dewan Komisaris PT PII Tahun Buku 2022
33	S-33/PII/DK/0921	17 September 2021	Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja Wibisana Rintis & Rekan (PwC) sebagai Auditor PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun Buku 2021
34	S-34/PII/DK/1021	11 Oktober 2021	Tanggapan atas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2022
35	S-35/PII/DK/1021	18 Oktober 2021	Tanggapan atas Laporan Penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) periode Triwulan III Tahun 2021
36	S-36/PII/DK/1021	25 Oktober 2021	Reviu atas Kegiatan Internal Audit Triwulan III Tahun 2021
37	S-37/PII/DK/1021	28 Oktober 2021	Laporan realisasi Capaian IKU Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Periode Triwulan III Tahun 2021
38	S-38/PII/DK/1021	28 Oktober 2021	Penyampaian Usulan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris PT PII tahun 2022
39	S-39/PII/DK/1121	29 November 2021	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Periode Triwulan III Tahun 2021
40	S-40/PII/DK/1121	30 November 2021	Tanggapan atas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun Buku 2022
41	S-41/PII/DK/1221	09 Desember 2021	Permintaan Pengadaan Penilai Independen untuk melakukan Penilaian Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2021
42	S-42/PII/DK/1221	31 Desember 2021	Hasil Pembahasan SOP Penyampaian, Evaluasi dan Pembayaran Klaim

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri atas 2 (dua) Komite. Komite-komite tersebut antara lain:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PT PII sesuai dengan prinsip GCG. Selama tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Audit selalu hadir dalam rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan melaksanakan rapat khusus Komite Audit sebanyak 15 (lima belas) kali serta telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Melakukan Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Komite Audit Tahun 2022;
2. Penyiapan bahan Rencana Kerja & Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022;
3. Penyiapan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2022
4. Penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2022;
5. Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP Tahun 2022;
6. Penelaahan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Audit Internal;
7. Reviu atas laporan hasil Audit Internal;
8. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal dan eksternal;
9. Penyiapan usulan bahan rapat bulanan Dewan Komisaris;
10. Penelaahan atas pengaduan terkait Perusahaan;
11. Penelaahan atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaannya;
12. Penelaahan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Per-UU-an dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga;
13. Evaluasi atas kegiatan CSR;
14. Penelaahan atas kebijakan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
15. Penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya;
16. Penelaahan atas gejala penurunan kinerja;
17. Evaluasi atas pelaksanaan RKAP;
18. Penelaahan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS;
19. Monitoring atas proyek yang telah dijamin;
20. Pemantauan atas kegiatan IIGF Institute;
21. Penelaahan atas Laporan Bulanan Manajemen ke Dewan

Komisaris/Pemantauan kinerja Direksi;

22. Penelaahan atas Laporan Manajemen Triwulanan ke RUPS;
23. Penelaahan atas Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2020;
24. Pemantauan Tindak Lanjut Pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2019;
25. Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2019 oleh BPKP;
26. Pemantauan Tindak Lanjut Pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2020;
27. Pengadaan KAP Untuk Audit LK Tahun 2021;
28. Pengusulan penetapan KAP untuk audit LK Tahun 2021 kepada RUPS;
29. Penelaahan rencana audit LK Tahun 2021 oleh KAP;
30. Pemantauan atas kemajuan pelaksanaan audit LK Tahun 2020 oleh KAP;
31. Penelaahan atas laporan hasil audit LK Tahun 2020 dari KAP;
32. Pembahasan *draft Annual Report* Tahun 2020;
33. *Self Assessment* Kinerja Komite Audit;
34. Peningkatan kompetensi Anggota Komite Audit; dan
35. Telaah atas pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam risiko manajemen Perusahaan *Enterprise Risk Management* (ERM). Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Pemantau Risiko selalu hadir dalam rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan melaksanakan rapat khusus Komite Pemantau Risiko sebanyak 12 (dua belas) kali serta telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Penyusunan RKA KPR Tahun 2022;
2. Penyiapan bahan RKA Dewan Komisaris Tahun 2022;
3. Penyiapan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2022;
4. Penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2022;
5. Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP Tahun 2022;
6. Pelaksanaan Rapat Bulanan KPR;
7. *Monitoring & Evaluasi* atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya;
8. Pembahasan gejala penurunan kinerja;
9. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP untuk aspek pengelolaan risiko;
10. Pembahasan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS;
11. Mereviu laporan manajemen bulanan dengan fokus pada aspek manajemen risiko;
12. *Monitoring* atas proyek yang telah dijamin;



13. *Monitoring* atas kegiatan IIGF Institute;
14. Penelaahan aspek risiko atas pemberian tanggapan (*response*) kepada Direksi/RUPS;
15. Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan TI dan pelaksanaannya;
16. Evaluasi atas kegiatan CSR;
17. Evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun dan dilaksanakan oleh Perusahaan;
18. Penelaahan kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dengan fokus pada aspek manajemen risiko;
19. Penelaahan rencana kerja Divisi Manajemen Risiko Tahun 2021;
20. Rapat dengan Divisi-Divisi terkait Aspek Risiko dari masing-masing Divisi;
21. Pembahasan dengan Divisi Manajemen Risiko;
22. Penelaahan atas Laporan Manajemen Risiko;
23. Penyusunan Laporan Triwulanan KPR;
24. Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2019;
25. Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2020 oleh BPKP;
26. Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2020;
27. Pembahasan draft Annual Report tahun 2020; dan
28. Peningkatan kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perusahaan. Hingga 31 Desember 2021, PT PII belum memiliki Komisaris Independen. Hal ini didasarkan pada pertimbangan dari Pemegang Saham bahwa saat ini belum diperlukan

pengangkatan Komisaris Independen di PT PII. Namun demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi yang menyebabkan benturan kepentingan sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen tanpa pengaruh dari pihak manapun.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perusahaan. Tugas utama Direksi adalah bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai visi dan misi. Direksi juga menjadi kunci bagi keberlangsungan aktivitas serta operasional Perusahaan, memastikan kinerja optimal dan nilai tambah optimal bagi Pemegang Saham. Tiap-tiap anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditetapkan lain oleh RUPS. Anggota Direksi yang telah menduduki masa jabatan sebagaimana dimaksud, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Komposisi Direksi

Direksi Perusahaan beranggotakan 3 (tiga) orang, dan semua anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2021 terdapat perubahan susunan dan komposisi keanggotaan Direksi. Dengan kronologi sebagai berikut.

Periode 1 Januari s.d 15 Juli 2021	Periode 16 Juli s.d 31 Desember 2021	Keterangan
Muhammad Wahid Sutopo (Direktur Utama)	Muhammad Wahid Sutopo (Direktur Utama)	-
Salusra Satria (Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek)	-	Masa jabatan Salusra Satria telah usai, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 885/KMK.06/2017
Andre Permana (Direktur Eksekutif Bisnis)	Andre Permana (Direktur Eksekutif Bisnis)	-

Susunan Direksi per 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019.	4 Desember 2017 s.d 3 Desember 2022	Ke-1
Andre Permana	Direktur Eksekutif Bisnis	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020.	23 Maret 2020 s.d 22 Maret 2025	Ke-1

Sementara, pada saat Laporan Tahunan 2021 ini ditandatangani dan disahkan per tanggal 31 Mei 2022, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022 tanggal 17 Januari 2022, Pemegang Saham memutuskan untuk mengangkat Donny Hamdani sebagai Direktur.

Dengan demikian, susunan Direksi Perusahaan per tanggal 31 Mei 2022 yang merupakan tanggal disahkannya Laporan Tahunan 2021 adalah sebagai berikut.

Susunan Direksi per tanggal 31 Mei 2022

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019.	4 Desember 2017 s.d 3 Desember 2022	Ke-1
Andre Permana	Direktur Bisnis	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020.	23 Maret 2020 s.d 22 Maret 2025	Ke-1
Donny Hamdani	Direktur Keuangan	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022.	17 Januari 2022 s.d 16 Januari 2027	Ke-1

Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat di bagian Profil Direksi, dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Board Manual : Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi memiliki Pedoman Tata Laksana Kerja yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan dan mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman Tata Laksana Kerja tersebut telah diperbarui dari waktu ke waktu dan terakhir kali ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Direksi No. SK002/BOD/CSC/1219 dan Dewan Komisaris No. KEP-10/KOM/PII/12/2019 tentang Pengesahan Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan *Board Manual* adalah:

1. Memberikan kejelasan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing organ Perusahaan;
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ; dan
3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Isi *Board Manual* Direksi tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pembagian Tugas Direksi
3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
4. Rapat dan Pengambilan Keputusan Direksi
5. Benturan kepentingan
6. Kekosongan jabatan dan pelimpahan wewenang
7. Pemberhentian sementara dan pengunduran diri Direksi
8. Organ Pendukung Direksi
9. Pelaporan
10. Penilaian Kinerja



Pelaksanaan *Board Manual* merupakan salah satu bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, dengan harapan akan tercipta suatu pola hubungan kerja yang harmonis dalam upaya mencapai Visi dan Misi PT PII.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

1. Direksi bertugas menjalankan segala Tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau pembatasan-pembatasan atau arahan-arahan lebih lanjut yang disepakati oleh Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat intern maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan Perusahaan yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
4. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dan tujuan dalam Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada

orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;

4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kewajiban Direksi

Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi wajib mengungkapkan:

1. Kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri beserta perubahannya; dan/atau
2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam peraturan terkait.

Tugas dan Lingkup Tanggung Jawab Direksi Perseroan sebagai berikut:

Direktur Utama

Fokus Utama adalah pencapaian tujuan organisasi:

1. Memastikan kelangsungan bisnis (Proyek-Proyek PDF) dalam jangka waktu panjang dan memastikan dukungan dalam hal transaksional yang optimal;

2. Mengembangkan program *Capacity Building* untuk pihak eksternal dalam mendukung terciptanya proyek-proyek penjaminan;
3. Menjamin terciptanya kepatuhan Hukum atas Proyek-proyek yang dijamin Perusahan.

Fokus kerja lainnya:

1. Memimpin terciptanya sinergi internal dan eksternal;
2. Memimpin pencapaian Visi dan Misi Organisasi;
3. Menciptakan tujuan-tujuan strategis

Direktur Eksekutif Keuangan & Penilaian Proyek

Fokus Utama adalah optimalisasi penilaian proyek, manajemen klaim dan Tata Kelola Keuangan.

Fokus kerja lainnya:

1. Mengembangkan sistem dan metodologi dalam hal penilaian dan pengawasan proyek;
2. Memimpin pencapaian target-target, kepatuhan dan pencatatan Keuangan yang disiplin;
3. Menciptakan unit kerja pendukung yang optimal dalam mendorong pencapaian target-target organisasi;
4. Memastikan terciptanya budaya dan kualitas SDM yang positif dan kompetitif.

Direktur Eksekutif Bisnis

Fokus Utama adalah penyusunan *pipeline* yang *sustainable*.

Fokus kerja lainnya:

1. Mengembangkan dan memimpin perencanaan dan implementasi program kerja pada tahapan awal persiapan dan skema penjaminan proyek;

2. Mengembangkan dan memimpin kerja sama *Financial* dengan *Stakeholder*;
3. Memimpin proses integrasi organisasi terkait teknologi informasi dan *Knowledge Management*.

Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru

Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru diatur dalam KMK No. 505 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada SMV. Di tahun 2021 Perusahaan tidak melakukan pengangkatan Direksi baru, dengan demikian Program Pengenalan Perusahaan tidak dilakukan.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Perusahaan merancang program untuk memberikan wawasan baru bagi Direksi untuk meningkatkan kapasitas Perusahaan dalam lingkungan usaha yang kompetitif, serta memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dalam rangka memberdayakan sumber daya yang ada dalam organisasi sehingga menjadikan Perusahaan sebagai organisasi berkinerja tinggi. Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Keputusan Direksi di Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 anggota Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, operasional bisnis, maupun aspek strategis.

TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBIJAKAN TERKAIT HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Hubungan keluarga dan kepengurusan perusahaan lain anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham selama periode tahun 2021 sebagai berikut:

Nama	Hubungan Keluarga Dengan Organ Perusahaan						Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Sebagai Dewan Komisaris		Sebagai Direksi		Sebagai Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Muhammad Wahid Sutopo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Andre Permana		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Hubungan keluarga dan kepengurusan perusahaan lain anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta Pemegang Saham selama periode tahun 2021 sebagai berikut:



Nama	Hubungan Keluarga Dengan Organ Perusahaan						Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Sebagai Dewan Komisaris		Sebagai Direksi		Sebagai Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Awan Nurmawan Nuh		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Mariatul Aini		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Wahyu Utomo		✓		✓		✓		✓		✓		✓

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan upaya untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perusahaan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan.

Saat ini, Perusahaan belum memiliki kebijakan formal dalam bentuk tertulis yang khusus mengatur tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Namun, Perusahaan memiliki kebijakan bahwa komposisi Dewan Komisaris dan Direksi wajib disusun sedemikian rupa disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan bisnis Perusahaan dan struktur organisasi sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan Perusahaan.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Kewarganegaraan	Pendidikan Terakhir	Bidang Pengalaman Kerja	Usia	Gender
Dewan Komisaris					
Awan Nurmawan Nuh (Komisaris Utama)	Indonesia	Master (S2) of Business Taxation	Pernah menjabat berbagai posisi kunci di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI antara lain sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (2009), Direktur Peraturan Perpajakan I (2011), Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (2013), Direktur Ekstensifikasi dan Penilai (2015), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I (2016), dan Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan RI (2016). Saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI (2021-sekarang).	53	Laki-laki
Mariatul Aini (Komisaris)	Indonesia	Master (S2) of Business Administration	Pernah menjabat berbagai posisi kunci di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI antara lain sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran (2011), Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (2018), dan Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI (2018). Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021-sekarang).	58	Perempuan
Wahyu Utomo (Komisaris)	Indonesia	PhD (S3) in Regional Science	Berkarir di PT Bank Bumi Daya (Persero) sejak tahun 1983, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2012), kemudian diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2012-2017).	57	Laki-laki

Nama	Kewarganegaraan	Pendidikan Terakhir	Bidang Pengalaman Kerja	Usia	Gender
Direksi					
Muhammad Wahid Sutopo (Direktur Utama)	Indonesia	Magister (S2) Manajemen	Pernah menjabat berbagai posisi kunci antara lain sebagai Direktur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (2011-2017), Komisaris Utama PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (2011-2017), Komisaris Utama PT PGN LNG Indonesia (2015-2016) dan Direktur Eksekutif Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017-2019).	52	Laki-laki
Salusra Satria (Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek)	Indonesia	Master (S2) Bidang Keuangan	Pernah menjabat berbagai posisi kunci antara lain sebagai Direktur Lembaga Penjamin Simpanan (2010-2016) dan Direktur Operasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2016-2017).	56	Laki-laki
Andre Permana (Direktur Eksekutif Bisnis)	Indonesia	Doktor (S3) bidang <i>Risk Management, Project Finance</i>	Melanjutkan profesi sebelumnya yang terkait bidang konstruksi dan pengembangan proyek infrastruktur, karier profesional di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dimulai pada tahun 2010 dan pernah menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Divisi <i>Risk and Compliance</i> , Kepala Divisi <i>Business Development</i> , CEO <i>Office</i> dan terakhir kali menjabat sebagai <i>Executive Vice President Project Appraisal</i>	45	Laki-laki

PENILAIAN PENERAPAN GCG BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan secara berkala melakukan pengukuran penerapan GCG sebagaimana diwajibkan dalam PMK 88/2015. Rincian pengukuran penerapan GCG, termasuk didalamnya pengukuran atas aspek Dewan Komisaris dan Direksi, dapat dilihat pada bagian “Hasil Tata Kelola: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik” di awal bab ini.

PENILAIAN KINERJA KORPORASI, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui Kementerian Keuangan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/ 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Berikut disampaikan realisasi pencapaian kinerja korporasi, pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2021.

Pencapaian Kinerja Korporasi Tahun 2021

Kategori Performansi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Bobot	Satuan	Target 2021	Realisasi	Capaian IKU	Nilai Kinerja
F Mandat dan Keuangan	F1 Optimalisasi nilai pemegang saham/ shareholder value	1 Margin laba bersih	5,0%	Persentase	58%	68%	116,89%	5,84%
	F2 Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang efektif	1 Penyelesaian milestone penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara tepat waktu dan leverage biaya penugasan yang optimum	7,0%	Persentase	3,75	4,00	106,67%	7,47%



Kategori Performansi		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Bobot	Satuan	Target 2021	Realisasi	Capaian IKU	Nilai Kinerja
	F3	Penjaminan yang berkelanjutan	1	Jumlah penerbitan penjaminan	15,0%	Perjanjian Penjaminan	10	7	70,00%	10,50%	
	F4	Pelaksanaan penugasan penjaminan korporasi	1	Pelaksanaan dukungan loss limit yang tepat waktu	5,0%	Persentase	100%	100%	100,00%	5,00%	
	F5	Penyediaan Penjaminan yang Prudent	1	Jumlah proyek yang diselesaikan appraisal	7,0%	Memo Evaluasi	6	10	120,00%	8,40%	
	F6	Sinergi dengan BUMN	1	Sinergi Bersama dengan BUMN	5,0%	Proyek/ Program	2	3	120,00%	6,00%	
C Stakeholders	C1	Pemahaman Stakeholders yang efektif	1	Pencapaian tingkat pemahaman PJPK dan stakeholders lainnya yang baik	5,0%	Indeks	3,75	4,18	111,47%	5,57%	
	C2	Reputasi dan tingkat kepercayaan pasar yang tinggi	1	Rating Perusahaan Sovereign	5,0%	Rating	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia	100,00%	5,00%	
P Proses Bisnis Internal	P1	Enterprise Risk Management yang kuat	1	Risiko Korporasi yang terkendali	8,0%	Persentase	7%	7,2%	102,86%	8,23%	
	P2	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik	1	Tata Kelola perusahaan yang baik (GCG score)	8,0%	GCG Score	86	89,06	103,56%	8,28%	
	P3	Pengelolaan Risiko Penjaminan yang Efektif	1	Tingkat pengendalian risiko klaim atas proyek masuk dalam kategori aman	10,0%	Persentase	91%	95%	104,04%	10,40%	
	P4	Optimalisasi dan efiesnsi penggunaan anggaran	1	BOPO	5,0%	Persentase	43%	37%	114,18%	5,71%	
L Pembelajaran & Pertumbuhan	L1	Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas	1	Peningkatan indeks engagement karyawan	5,0%	Score Engagement (absolut)	2%	-7%	0,00%	0,00%	
			2	Persentase hari pelatihan karyawan terhadap hari kerja	5,0%	Persentase	2,5%	3,4%	120,00%	6,00%	
		Teknologi informasi yang handal	1	Peningkatan IT Maturity/ Assessment Score	5,0%	IT Maturity Score	2,40	2,58	107,50%	5,38%	
					100,00%	97,78%					

Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2021

Kategori Performansi		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Bobot	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Bobot Capaian
A	Pengawasan (Bobot 60%)	A1	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	A1.1	Hasil Penilaian Independen atas Penerapan GCG pada PT PII Tahun 2021.	10%	Skor/Nilai	86	89,06	103,56%	10,36%
		A2	Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris yang Efektif	A2.1	Persentase arahan Dewan Komisaris yang ditindaklanjuti oleh Direksi	20%	%	90%	98%	109,33%	21,87%
				A2.2	Jumlah pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal	15%	%	4 kali	4 kali	100,00%	15,00%
				A2.3	Persentase pemberian tanggapan (<i>response</i>) atas permohonan persetujuan/rekomendasi dari Direksi yang tepat waktu	15%	%	95%	100%	105,26%	15,79%
B	Pelaporan (Bobot 40%)	B1	Laporan Dekom kepada RUPS yang Berkualitas	B1.1	Persentase penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang tepat waktu	10%	%	100%	108%	107,50%	10,75%
				B1.2	Persentase Penyampaian Laporan Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP yang tepat waktu.	10%	%	100%	110%	110,00%	11,00%
				B1.3	Persentase penyampaian Laporan capaian IKU Dewan Komisaris yang tepat waktu	10%	%	100%	105%	105,00%	10,50%
				B1.4	Persentase Penyampaian Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan RJP dan/atau RKAP beserta Perubahan (jika ada) yang tepat waktu.	10%	Waktu	100%	110%	110,00%	11,00%
						100,00%	106,26%				

Pencapaian Kinerja Direksi Tahun 2021

Pencapaian Kinerja Direktur Utama Tahun 2021

DIREKTUR UTAMA								
Kategori Performa	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Bobot	Satuan	Target 2021	Realisasi	Capaian	Bobot Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(4x8)
A Korporasi (75%)	F1 Optimalisasi nilai pemegang saham/ <i>shareholder value</i>	1 Marjin laba bersih	7,50%	Persentase	58%	68%	116,89	8,77%
	F2 Sinergi dengan BUMN	1 Sinergi bersama dengan BUMN	6,50%	Proyek/Program	2	3	120,00%	7,80%



DIREKTUR UTAMA									
Kategori Performa	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Bobot	Satuan	Target 2021	Realisasi	Capaian	Bobot Capaian	
	C1 Pemahaman Stakeholders yang efektif	1 Pencapaian tingkat pemahaman PJKP dan stakeholders lainnya yang baik	6,50%	Indeks	3,75	4,18	111,47%	7,25%	
	C2 Reputasi dan tingkat kepercayaan pasar yang tinggi	1 Rating Perusahaan Sovereign	6,50%	Rating	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia	100,00%	6,50%	
	P1 Enterprise Risk Management yang kuat	1 Risiko Korporasi yang terkendali	10,00%	Persentase	7%	7,2%	102,86%	10,29%	
	P2 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	1 Tata Kelola perusahaan yang baik (GCG score)	10,00%	GCG Score	86	89,06	103,56%	10,36%	
	P3 Optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran	1 BOPO	7,50%	Persentase	43%	37%	114,18%	8,56%	
	L1 Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas	1 Peningkatan indeks engagement karyawan	7,00%	Score Engagement (absolut)	2%	-7%	0,00%	0,00%	
		2 Persentase hari pelatihan karyawan terhadap hari kerja	6,50%	Persentase	2,5%	3,4%	120,00%	7,80%	
	L2 Teknologi informasi yang Handal	1 Peningkatan IT Maturity Assessment Score	7,00%	IT Maturity Score	2,40	2,58	107,50%	7,53%	
B Individu (25%)	I1 Penjaminan yang berkelanjutan	1 Jumlah penerbitan penjaminan	7,50%	Perjanjian Penjaminan	10	7	70,00%	5,25%	
	I2 Penyelesaian proyek dan pendampingan transaksi yang efektif	1 Penyelesaian milestone penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara tepat waktu dan leverage biaya penugasan yang optimum	7,50%	Indeks	3,75	4,00	106,67%	8,00%	
	I3 Keselarasan Rencana Jangka Panjang dengan Tujuan Perusahaan	1 Penyampaian Pemutakhiran RJPP kepada RUPS	5,00%	Tanggal	30-Sep-21	-	0,00%	0,00%	

DIREKTUR UTAMA								
Kategori Performa	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Bobot	Satuan	Target 2021	Realisasi	Capaian	Bobot Capaian
	I4 Pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik	1 Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Direktorat Utama	2,50%	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	86%	100%	116,28%	2,91%
		2 Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris Direktorat Utama	2,50%	Penyelesaian Arahan Komisaris	95%	97%	102,11%	2,55%
			100,00%					
								93,57%

Pencapaian Kinerja Direktur Keuangan Tahun 2021

DIREKTUR KEUANGAN										
Kategori Performansi	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Bobot	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Bobot Capaian
1	2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9=(4x8)
A Korporasi (75%)	F1	Optimalisasi nilai pemegang saham/ <i>shareholder value</i>	1	Margin laba bersih	7,50%	Persentase	58%	68%	116,89%	8,77%
	F2	Sinergi dengan BUMN	1	Sinergi bersama dengan BUMN	6,50%	Proyek/ Program	2	3	120,00%	7,80%
	C1	Pemahaman <i>Stakeholders</i> yang efektif	1	Pencapaian tingkat pemahaman PJKP dan <i>stakeholders</i> lainnya yang baik	6,50%	Indeks	3,75	4,18	111,47%	7,25%
	C2	Reputasi dan tingkat kepercayaan pasar yang tinggi	1	<i>Rating</i> Perusahaan <i>Sovereign</i>	6,50%	Rating	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia	100,00%	6,50%
	P1	<i>Enterprise Risk Management</i> yang kuat	1	Risiko Korporasi yang terkendali	10,00%	Persentase	7%	7,2%	102,86%	10,29%
	P2	Pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang Baik	1	Tata kelola perusahaan yang baik (GCG Score)	10,00%	GCG Score	86	89,06	103,56%	10,36%
	P3	Optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran	1	BOPO	7,50%	Persentase	43%	37%	114,18%	8,56%



DIREKTUR KEUANGAN											
Kategori Performansi	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bobot	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Bobot Capaian		
	L1	Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas	1	Peningkatan indeks <i>engagement</i> karyawan	7,00%	Score <i>Engagement</i> (absolut)	2%	-7%	0,00%	0,00%	
			2	Persentase hari pelatihan karyawan terhadap hari kerja	6,50%	Persentase	2,5%	3,4%	120,00%	7,80%	
	L2	Teknologi informasi yang Handal	1	Peningkatan <i>IT Maturity Assessment Score</i>	7,00%	IT Maturity Score	2,40	2,58	107,50%	7,53%	
B	Individu (25%)	I1	Penjaminan yang berkelanjutan	1	Jumlah penerbitan penjaminan Non-KPBU dan lainnya	5,00%	Perjanjian Penjaminan	3	3	100,00%	5,00%
		I2	Pelaksanaan penugasan penjaminan korporasi	1	Pelaksanaan dukungan <i>loss limit</i> yang tepat waktu	2,50%	Persentase	100%	100%	100,00%	2,50%
		I3	Penyediaan Penjaminan yang <i>Prudent</i>	1	Jumlah proyek yang diselesaikan <i>appraisal</i>	2,50%	Memo Evaluasi	6	10	120,00%	3,00%
		I4	Pengelolaan Risiko Penjaminan yang Efektif	1	Tingkat pengendalian risiko klaim atas proyek masuk dalam kategori aman	5,00%	Persentase	91%	95%	104,04%	5,20%
		I5	Pengelolaan Dana yang Optimal	1	Tingkat capaian pendapatan pengelolaan dana	2,50%	Basis poin diatas rata-rata suku bunga acuan	201	226	112,47%	2,81%

DIREKTUR KEUANGAN									
Kategori Performansi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Bobot	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Bobot Capaian	
I6	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	1	Pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku umum	2,50%	Opini	Opini wajar tanpa modifikasian	Opini wajar tanpa modifikasian	100,00%	2,50%
		2	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Direktorat Keuangan dan Penilaian Proyek	2,50%	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	86%	86%	100,00%	2,50%
		3	Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris Direktorat Keuangan dan Penilaian Proyek	2,50%	Penyelesaian Arahan Komisaris	95%	100%	105,26%	2,63%
			100,00%	101,00%					

Pencapaian Kinerja Direktur Bisnis Tahun 2021

DIREKTUR BISNIS										
Kategori Performa	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Bobot	Satuan	Target 2021	Realisasi	Capaian	Bobot Capaian
1	2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9=(4x8)
A Korporasi (75%)	F1	Optimalisasi nilai pemegang saham/ <i>shareholder value</i>	1	Margin laba bersih	7,50%	Persentase	58%	68%	116,89%	8,77%
	F2	Sinergi dengan BUMN	1	Sinergi bersama dengan BUMN	6,50%	Proyek/Program	2	3	120,00%	7,80%
	C1	Pemahaman Stakeholders yang efektif	1	Pencapaian tingkat pemahaman PJPK dan <i>stakeholders</i> lainnya yang baik	6,50%	Indeks	3,75	4,18	111.47%	7,25%
	C2	Reputasi dan tingkat kepercayaan pasar yang tinggi	1	<i>Rating</i> Perusahaan <i>Sovereign</i>	6,50%	Rating	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia	100,00%	6,50%
	P1	<i>Enterprise Risk Management</i> yang kuat	1	Risiko Korporasi yang terkendali	10,00%	Persentase	7%	7,2%	102,86%	10,29%



DIREKTUR BISNIS										
Kategori Performa	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Bobot	Satuan	Target 2021	Realisasi	Capaian	Bobot Capaian
	P2	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	1	Tata Kelola perusahaan yang baik (GCG score)	10,00%	GCG Score	86	89.06	103,56%	10,36%
	P3	Optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran	1	BOPO	7,50%	Persentase	43%	37%	114,18%	8,56%
	L1	Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas	1	Peningkatan indeks <i>engagement</i> karyawan	7,00%	Score <i>Engagement</i> (absolut)	2%	-7%	0,00%	0,00%
			2	Persentase hari pelatihan karyawan terhadap hari kerja	6,50%	Persentase	2,5%	3,4%	120,00%	7,80%
	L2	Teknologi informasi yang Handal	1	Peningkatan <i>IT Maturity Assessment Score</i>	7,00%	<i>IT Maturity Score</i>	2,40	2,58	107,50%	7,53%
	B Individu (25%)	I1	Jumlah penerbitan penjaminan KPBU dan lainnya	1	Jumlah penerbitan penjaminan	10,0%	Perjanjian Penjaminan	7	4	57,14%
	I2	Penyediaan Penjaminan Yang Prudent	1	Jumlah pernyataan ketersediaan penjaminan	5,00%	Dokumen IPA	6	4	66,67%	3,33%
	I3	Penjaminan yang efektif	1	<i>Screening Form</i> (SF) yang berhasil menjadi <i>Confirmastion To Proceed</i> (CTP)	5,0%	Penerbitan CTP	80% dari SF yang disampaikan Triwulan III 2021	100%	120,00%	6,00%
	I4	Pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik	1	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Direktorat Bisnis	2,5%	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	86%	100%	116,28%	2,91%
			2	Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris Direktorat Bisnis	2,5%	Penyelesaian Arahan Komisaris	95%	100%	105,26%	2,63%
					100,00%	95,44%				

NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

“Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan diatur secara khusus oleh pemegang saham melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.”

Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Nominasi dan pemilihan anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilakukan berdasarkan PMK 197/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Berdasarkan peraturan tersebut, persyaratan Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Syarat umum:
Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Syarat Khusus:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki integritas dan moral yang baik;
 - c. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;
 - d. Memahami masalah-masalah manajemen Persero yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang

usaha Perusahaan;

- f. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
3. Syarat Lain:
 - a. Bukan anggota partai politik, pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
 - c. Telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Persero yang bersangkutan, paling kurang 1 (satu) tahun;
 - d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
 - e. Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada Persero yang bersangkutan selama 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Secara sederhana, tahapan nominasi hingga pengangkatan Dewan Komisaris dapat disampaikan di bawah ini.





Proses nominasi dimulai dari pemberitahuan Dewan Komisaris kepada Direktur Jenderal jika terdapat Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya akan habis/selesai. Kemudian dilakukan tahapan penjurangan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan Bakal Calon yang dapat berasal dari:

1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat Struktural Pemerintah;
4. Pejabat Fungsional Pemerintah; atau
5. Orang perseorangan lain yang dianggap cakap untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.

Bakal Calon Dewan Komisaris yang berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional Kementerian Keuangan, ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri sesuai rekomendasi Tim Pertimbangan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (TPKOMWAS).

Dari Bakal Calon yang ada, dilakukan penilaian oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Kementerian Keuangan yang meliputi penilaian administratif dan wawancara. Hasil penilaian oleh Tim UKK ini kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada Menteri selaku RUPS melalui Wakil Menteri. Dalam hal Menteri tidak menyetujui hasil penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris yang diajukan, Direktur Jenderal melakukan penjurangan kembali Bakal Calon dan penilaian oleh Tim UKK.

Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris, Calon Anggota Dewan Komisaris harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir pada batas waktu tersebut. Anggota Dewan Komisaris kemudian terpilih menandatangani surat pernyataan dan pakta integritas.

Nominasi Anggota Direksi

Nominasi dan pemilihan Direksi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 135/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan

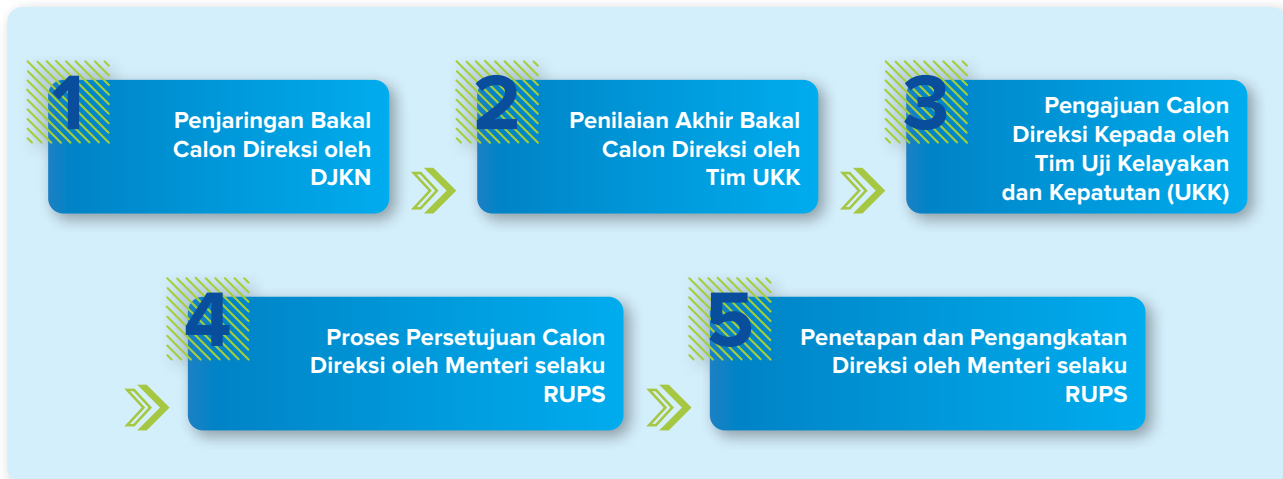
Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan ("PMK 135/2017"). Berdasarkan peraturan tersebut, persyaratan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
2. Memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Persero;
3. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan Perusahaan;
4. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya;
5. Memiliki *leadership* yang baik;
6. Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya;
7. Memiliki integritas dan moral yang baik;
8. Cakap melakukan perbuatan hukum;
9. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan;
10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.

Persyaratan lain anggota Direksi, yaitu:

1. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
2. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
3. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah, Anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi;
4. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi; atau
5. tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada Persero yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

Tahapan nominasi hingga pengangkatan Direksi dapat disampaikan di bawah ini.



Proses nominasi dimulai dari pemberitahuan Dewan Komisaris kepada Direktur Jenderal jika terdapat Direksi yang masa jabatannya akan habis/selesai. Kemudian dilakukan tahapan Uji Kelayakan dan Keputusan (“UKK”) yang meliputi penjaringan Bakal Calon oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan penilaian akhir oleh Tim UKK. Tim UKK yang diketuai oleh Wakil Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota, Direktur Jenderal sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sebagai Anggota; Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Anggota. Dalam menjalankan tugasnya, Tim UKK dapat meminta masukan dari Dewan Komisaris dan/atau pihak lain sebagai narasumber.

Penjaringan Bakal Calon bertujuan untuk mendapatkan Bakal Calon Direksi yang berasal dari:

1. Internal Perusahaan, terdiri atas anggota Direksi; dan/atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa.
2. Eksternal Perusahaan, dalam hal:
 - a. Dewan Komisaris tidak menyampaikan usulan bakal calon yang berasal dari internal kepada DJKN.
 - b. Dari hasil penilaian akhir oleh Tim UKK terhadap Bakal Calon dari internal Perusahaan tidak diperoleh calon yang memenuhi kualifikasi.

Tahapan berikutnya adalah penilaian akhir oleh Tim UKK dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Calon Direksi yang telah lolos seleksi penilaian akhir Tim UKK diajukan kepada Menteri selaku RUPS, yang kemudian akan diangkat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri selaku RUPS.



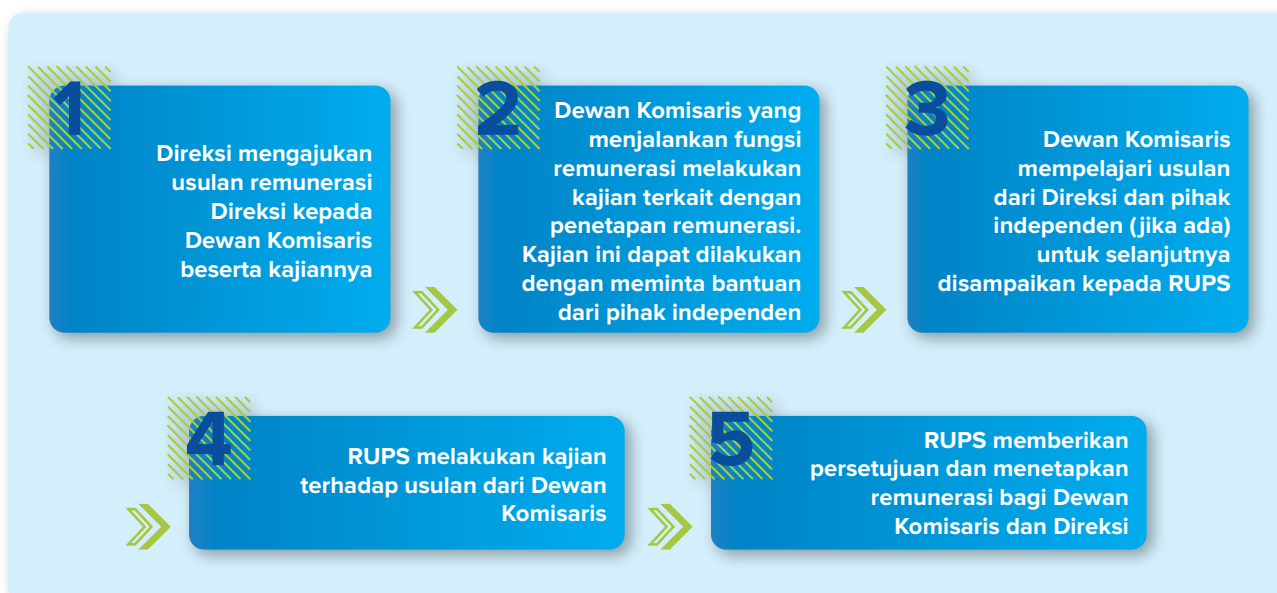
REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Merujuk pada Pasal 96 ayat (1) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Petunjuk teknis tentang kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 200/PMK.06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (PMK 200/2018”).

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Mekanisme penetapan remunerasi dapat digambarkan pada bagan di bawah ini.



Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan PMK 200/2018, struktur dan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Struktur Remunerasi Direksi
- Gaji dan/atau Honorarium; - Tunjangan; - Fasilitas; - Tantiem/Insentif Kinerja; dan - Penghasilan Lainnya	- Gaji dan/atau Honorarium; - Tunjangan - Fasilitas - Tantiem/Insentif Kinerja; dan - Penghasilan Lainnya.

Pengungkapan Indikator untuk Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan. Kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek seperti:

1. Penghasilan tahun sebelumnya.
2. Tingkat inflasi.
3. Kinerja operasi dan keuangan Perusahaan serta pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI).
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, termasuk pertimbangan atas sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.
5. Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya.
6. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan surat keputusan di atas adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Uraian	2021	2020
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris	6.196.415	4.077.725
Jumlah Remunerasi Direksi	12.427.559	11.337.156
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021	18.623.974	15.414.881

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Board Manual PT PII menjelaskan bahwa rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris termasuk rapat bersama Komite, serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris secara berkala melaksanakan rapat baik rapat internal maupun Rapat Gabungan dengan Direksi. Selama 2021, Dewan Komisaris menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat yang dilaksanakan.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris Utama	13 kali	100%
Mariatul Aini	Komisaris	13 kali	100%
Wahyu Utomo	Komisaris	13 kali	100%
Rata-rata Kehadiran			100%

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	19 Januari 2021	1. Pembahasan IKU Individual Direksi Tahun 2021 2. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen Periode Desember 2020
2	16 Februari 2021	1. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen Periode Januari 2021 2. Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2022 PT PII
3	23 Maret 2021	1. Laporan Manajemen Februari 2021 2. Persetujuan Dewan Komisaris atas penjaminan pengadaan vaksin PT Bio Farma (Persero)
4	05 April 2021	Pembahasan surat tanggapan Dekom perihal Penjaminan Bio Farma Vaksin COVID-19
5	20 April 2021	<i>Highlight</i> Laporan Manajemen Periode Maret 2021
6	21 Mei 2021	1. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode April 2021 2. <i>Update</i> Pengelolaan SDM 3. <i>Update</i> Pengelolaan IT
7	02 Juni 2021	Evaluasi Kegiatan CSR Periode Semester I Tahun 2021
8	28 Juni 2021	1. Laporan Manajemen Mei 2021 2. Update Proyek Labuan Bajo 3. Update <i>meeting</i> KA - evaluasi Kebijakan Pengadaan
9	15 Juli 2021	1. Laporan Manajemen Juni 2021 2. Penunjukan Plt. Direktur Eksekutif Keuangan & Penilaian Proyek 3. Penelaahan Laporan PMN



No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
10	18 Agustus 2021	1. Pembahasan RKAT & IKU Dekom Th 2022 2. Laporan Manajemen Periode Juli 2021 3. Revisi Pedoman Dewan Komisaris Edisi Ketiga Tahun 2021 4. Surat Direksi - Usulan Perubahan Penggunaan PMN
11	17 September 2021	Laporan Manajemen Agustus 2021
12	11 Oktober 2021	1. <i>Update</i> Hasil Rapat Teknis Terkait RKAP PT PII 2022 2. <i>Draft</i> Surat Dewan Komisaris Kepada Direksi
13	16 November 2021	Laporan Manajemen Oktober 2021

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Seperti telah disampaikan di atas, Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat dengan mengundang Direksi. Di tahun 2021, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi	Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Dewan Komisaris				
Awan Nurawan Nuh	Komisaris Utama	17	16	94%
Mariatul Aini	Komisaris	17	17	100%
Wahyu Utomo	Komisaris	17	17	100%
Direksi				
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	17	16	94%
Andre Permana	Direktur Eksekutif Bisnis	17	17	100%
Rata-rata				98%

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	26 Januari 2021	Pembahasan Laporan Manajemen Desember 2020
2	23 Februari 2021	• Pembahasan Laporan Manajemen Januari 2021; • Update Hasil <i>Assessment</i> GCG Tahun 2020.
3	8 Maret 2021	Pembahasan Kajian PMN tahun 2022 dan isu strategis lainnya
4	30 Maret 2021	Laporan Manajemen Februari 2021
5	27 April 2021	<i>Highlight</i> Laporan Manajemen Periode Maret 2021: Penambahan Pembahasan Aspek IT, SDM, Internal Audit & Manajemen Risiko
6	30 April 2021	Rapat Terbatas Dewan Komisaris dan Direksi - Pembahasan agenda korporasi
7	7 Juni 2021	Rapat Terbatas Dewan Komisaris dan Direksi - Paparan Kajian Usulan Remunerasi & Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi
8	17 Juni 2021	Persiapan RUPST
9	29 Juni 2021	• Evaluasi program kerja IIGF <i>Institute</i> ; • Evaluasi Laporan Manajemen periode Mei 2021.
10	19 Juli 2021	Laporan Manajemen periode Juni 2021
11	5 Agustus 2021	Persiapan <i>Entry Audit</i> BPK
12	19 Agustus 2021	• Usulan Perubahan Penggunaan PMN; • Laporan Manajemen periode Juli 2021.

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
13	21 September 2021	1. Pembahasan Laporan Manajemen Periode Agustus 2021: - Pembahasan terkait teknologi informasi. - Pembahasan kebijakan SDM. 2. <i>Monitoring</i> tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG Tahun 2020. 3. <i>Monitoring</i> tindak lanjut audit internal.
14	16 Oktober 2021	Pembahasan RKAP 2022
15	23 Oktober 2021	1. Laporan Manajemen Periode September 2021. 2. Evaluasi Manajemen Pengelolaan Risiko. 3. Permasalahan hubungan dengan <i>stakeholder</i> yang berdampak pada kinerja Perusahaan.
16	24 November 2021	Laporan Manajemen periode Oktober 2021
17	21 Desember 2021	1. Laporan Manajemen Periode November 2021. 2. Evaluasi Efektivitas Kegiatan CSR.

Rapat Direksi

Berdasarkan ketentuan dalam *Board Manual*, Direksi mengadakan rapat internal secara berkala sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. Direksi melaksanakan rapat internal secara berkala dan menghadiri rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi didasarkan pada asas musyawarah untuk mufakat atau dengan melakukan pemungutan suara terbanyak.

Di sepanjang tahun 2021, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 44 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

Frekuensi Kehadiran Direksi pada Rapat Internal Direksi

Direksi	Jabatan	Rapat Direksi	
		Jumlah	%
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	44	100
Salusra Satria*	Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek	22	100
Andre Permana	Direktur Eksekutif Bisnis	44	100
Rata-rata			100

Berdasarkan KMK No. 885/KMK.06/2017, masa jabatan Sdr. Salusra Satria sebagai anggota Direksi telah berakhir pada 16 Juli 2021.

Agenda Rapat Internal Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	Januari 2021	Laporan Manajemen Periode Desember 2020
2	21 Januari 2021	Rencana Kerja 2021 dan Review KPI Divisi 2020
3	Februari 2021	Laporan Manajemen Periode Januari 2021
4	5 Februari 2021	- Persetujuan Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Jawa Timur dan Bali; - Persetujuan usulan penambahan PMN Tahun Anggaran 2022.
5	10 Februari 2021	Persiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Penugasan Penjaminan Bersama dalam Rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional
6	11 Februari 2021	Persiapan Penandatanganan Perjanjian Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I.
7	25 Februari 2021	- Update Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022; - Tanggapan Amandemen PKS Proyek KPBU Satelit Multi Fungsi.
8	Maret 2021	Laporan Manajemen Periode Februari 2021
9	3 Maret 2021	Rencana Penjaminan Pinjaman Proyek Pengadaan Vaksin COVID-19 dengan Fasilitas Pinjaman ADB
10	12 Maret 2021	- Update Rencana Penjaminan Pinjaman Proyek Pengadaan Vaksin COVID-19 dengan Fasilitas Pinjaman ADB; - Update Proyek SPAM Umbulan.



No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
11	16 Maret 2021	Update Proyek KPBU Pelabuhan Patimban
12	19 Maret 2021	- Persiapan Penandatanganan Perjanjian Proyek KPBU-AP Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau; - Rencana Penggunaan PMN PP 79/2020 untuk Penjaminan Proyek Pengadaan Vaksin PT Biofarma.
13	April 2021	Laporan Manajemen Periode Maret 2021
14	12 April 2021	Pembahasan Hasil <i>Appraisal</i> Penjaminan Proyek KPBU Jalan Tol Gedebage-Tasik-Cilacap
15	23 April 2021	Persiapan Penandatanganan Perjanjian Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong
16	Mei 2021	Laporan Manajemen Periode April 2021
17	4 Mei 2021	Pembahasan Hasil <i>Appraisal</i> Penjaminan Proyek KPBU Pelabuhan Anggrek
18	11 Mei 2021	Pembahasan Hasil <i>Appraisal</i> Penjaminan Proyek KPBU-AP Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton
19	18 Mei 2021	Penerbitan <i>In-principal Approval</i> (IPA) Proyek KPBU Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap
20	Juni 2021	Laporan Manajemen Periode Mei 2021
21	10 Juni 2021	Pembahasan Penjaminan Pemerintah atas Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam Rangka Program PEN
22	17 Juni 2021	Pembahasan Lanjutan Penjaminan Pemerintah atas Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam Rangka Program PEN
23	21 Juni 2021	Penerbitan <i>In-principal Approval</i> (IPA) Proyek KPBU-AP Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton
24	Juli 2021	Laporan Manajemen Periode Juni 2021
25	16 Juli 2021	Tindak Lanjut Surat Dewan Komisaris terkait Plt. DEKP
26	21 Juli 2021	Update dan Kelanjutan Proses Penjaminan Proyek KPBU Pelabuhan Anggrek
27	Agustus 2021	Laporan Manajemen Periode Juli 2021
28	4 Agustus 2021	PAR Proyek Gilimanuk Mengwi
29	13 Agustus 2021	Tindak Lanjut Usulan Perubahan Penggunaan Tambahan PMN PT PII
30	20 Agustus 2021	Update dan Tindak Lanjut Penerbitan Obligasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Program PEN
31	September 2021	Laporan Manajemen Agustus 2021
32	13 September 2021	Rencana Penandatanganan Penjaminan Obligasi Waskita
33	21 September 2021	- Pembahasan Hasil <i>Appraisal</i> Penjaminan Proyek KPBU Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami; - Indikasi Cakupan Awal Penjaminan Proyek KPBU Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami
34	29 September 2021	Pembahasan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2022
35	Oktober 2021	Laporan Manajemen September 2021
36	1 Oktober 2021	Pembahasan Tindak Lanjut Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Program PEN
37	14 Oktober 2021	Penerbitan <i>In-Principal Approval</i> (IPA) Proyek KPBU Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami
38	28 Oktober 2021	Pembahasan Tindak Lanjut Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Program PEN
39	November 2021	Laporan Manajemen Oktober 2021
40	2 November 2021	Rencana Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman Langsung PT PLN dari ADB untuk Proyek <i>Sustainable and Reliable Energy Access Program in Java (Western and Central Java)</i> ;
41	2 November 2021	Penerbitan <i>In-Principal Approval</i> (IPA) Proyek KPBU Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
42	16 November 2021	Permohonan Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Proyek KPBU Kegiatan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa
43	Desember 2021	Laporan Manajemen Periode November 2021
44	10 Desember 2021	Rencana Penjaminan Pemerintah atas Penerbitan Obligasi dan Sukuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam Rangka Program PEN

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	26 Januari 2021	Pembahasan Laporan Manajemen Desember 2020
2	23 Februari 2021	- Pembahasan Laporan Manajemen Januari 2021; - Update Hasil <i>Assessment</i> GCG Tahun 2020.
3	8 Maret 2021	Pembahasan Kajian PMN tahun 2022 dan isu strategis lainnya
4	30 Maret 2021	Laporan Manajemen Februari 2021
5	27 April 2021	<i>Highlight</i> Laporan Manajemen Periode Maret 2021: Penambahan Pembahasan Aspek IT, SDM, Internal Audit & Manajemen Risiko
6	30 April 2021	Rapat Terbatas Dewan Komisaris dan Direksi - Pembahasan agenda korporasi
7	7 Juni 2021	Rapat Terbatas Dewan Komisaris dan Direksi - Paparan Kajian Usulan Remunerasi & Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi
8	17 Juni 2021	Persiapan RUPST
9	29 Juni 2021	- Evaluasi program kerja IIGF <i>Institute</i>; - Evaluasi Laporan Manajemen periode Mei 2021.
10	19 Juli 2021	Laporan Manajemen periode Juni 2021
11	5 Agustus 2021	Persiapan <i>Entry Audit</i> BPK
12	19 Agustus 2021	- Usulan Perubahan Penggunaan PMN; - Laporan Manajemen periode Juli 2021.
13	21 September 2021	- Pembahasan Laporan Manajemen Periode Agustus 2021: - Pembahasan terkait teknologi informasi. - Pembahasan kebijakan SDM. <i>Monitoring</i> tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG Tahun 2020. <i>Monitoring</i> tindak lanjut audit internal.
14	16 Oktober 2021	Pembahasan RKAP 2022
15	23 Oktober 2021	- Laporan Manajemen Periode September 2021. - Evaluasi Manajemen Pengelolaan Risiko. - Permasalahan hubungan dengan <i>stakeholder</i> yang berdampak pada kinerja Perusahaan.
16	24 November 2021	Laporan Manajemen periode Oktober 2021
17	21 Desember 2021	- Laporan Manajemen Periode November 2021. - Evaluasi Efektivitas Kegiatan CSR.

Frekuensi Kehadiran Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi	
		Jumlah	%
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	16	94
Andre Permana	Direktur Eksekutif Bisnis	17	100



PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali

Kepemilikan saham PT PII adalah tunggal, atau 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masing-masing organ Perusahaan bersifat independen dan tidak saling mencampuri satu sama lain. Setiap anggota Direksi dapat bertindak independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya baik secara individual maupun kolektif semata-mata demi kepentingan Perusahaan. Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan kerja sebagai organ utama tata kelola perusahaan yang masing-masing memiliki peran sebagai fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan Perusahaan.

Berikut disampaikan pengungkapan hubungan afiliasi mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan antara Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

	Hubungan Keluarga Afiliasi Antara		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemerintah Indonesia (Pemegang Saham Perusahaan)
Dewan Komisaris			
Awan Nurmawan Nuh	x	x	v
Mariatul Aini	x	x	v
Wahyu Utomo	x	x	v
Direksi			
Muhammad Wahid Sutopo	x	x	x
Salusra Satria	x	x	x
Andre Permana	x	x	x

v = terdapat adanya hubungan | x = tidak terdapat adanya hubungan

Hubungan afiliasi yang muncul pada Dewan Komisaris dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham disebabkan adanya rangkap jabatan, sebagai berikut:

1. Komisaris Utama Awan Nurmawan Nuh memiliki rangkap jabatan di Kementerian/Lembaga Negara, yaitu Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan RI (2001-sekarang).
2. Komisaris Mariatul Aini memiliki rangkap jabatan di Kementerian/Lembaga Negara, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI (2001-sekarang).
3. Komisaris Wahyu Utomo memiliki rangkap jabatan di Kementerian/Lembaga Negara, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2016-sekarang), serta Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (2016-sekarang) dan beberapa jabatan lainnya.

Rangkap jabatan di atas tidak menyalahi peraturan yang berlaku, dan telah melalui tahapan nominasi sebagaimana diatur dalam PMK 197/2019.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Dasar Pengangkatan dan Profil Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, ditunjuk seorang Sekretaris Dewan Komisaris. Pada tahun 2021, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat Muhammad Nahdi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/08/2019 yang mempunyai tugas pokok untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam kaitannya dengan pengelolaan Perusahaan.



Muhammad Nahdi

Sekretaris Dewan Komisaris
Periode Jabatan: 15 Agustus 2019 s.d
14 Agustus 2022, Periode ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun
Kelahiran Bandung, 20 Maret 1975

Domisili

Antapani, Bandung, Jawa Barat

Riwayat Pendidikan

Master (S2) of Commerce (Advanced) Program Majoring Applied Finance di Business, Economics and Law (BEL) Faculty, University of Queensland, Brisbane, Australia (2006).

Riwayat Profesi

Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Penilaian Usaha II/Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis II di Direktorat Penilaian Kekayaan Negara/Direktorat Penilaian, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2007-2012), Kepala Bidang Penilaian di Kantor Wilayah DJKN Riau-Sumatera Barat-Kepulauan Riau, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kepala Sub Direktorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam di Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Rangkap Jabatan

Saat ini Beliau juga menjabat sebagai sebagai Anggota Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPi) (2017-sekarang).



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Secara garis besar, tugas Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris;
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif, kesekretariatan dan protokoler Dewan Komisaris;
4. Mengkoordinasikan dan tindak lanjut atas permintaan dan/atau pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perusahaan dan eksternal yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
5. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran dan menyampaikan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris;
6. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Mengkoordinasikan dan tindak lanjut atas tugas lain yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite di bawah Dewan Komisaris.
7. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi;
8. Penelaahan atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya;
9. Evaluasi atas pelaksanaan RKAP;
10. Evaluasi atas kegiatan CSR;
11. Pemantauan atas kegiatan IIGF Institute;
12. Penelaahan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS;
13. *Monitoring* atas proyek yang telah dijamin;
14. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
15. Penyusunan laporan pengawasan RKAP;
16. Penyusunan laporan realisasi IKU;
17. *Monitoring* atas proyek yang telah dijamin;
18. Penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris;
19. Penyampaian tanggapan atas Laporan Tahunan 2020;
20. Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2019;
21. Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2020 oleh BPKP;
22. Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2020;
23. Pengadaan Penilai GCG Tahun 2021;
24. Reviu dan Pembaharuan Pedoman Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris;
25. Pembaharuan *Board Manual*; dan
26. Peningkatan kompetensi Sesdekomp dan Staf Sesdekomp.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Sekretaris Dewan Komisaris agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Selama tahun 2021 Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa program kerja, sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Sesdekomp Tahun 2022;
2. Penyiapan bahan Rencana Kerja & Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022;
3. Penyiapan bahan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2022;
4. Penelaahan atas usulan RKAP dan atau RJPP PT PII Tahun 2022;
5. Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP dan atau RJPP Tahun 2022;
6. Pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris;

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Audit sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali satu kali, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan Keanggotaan Komite Audit 2021

Komite Audit PT PII terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite yang merupakan Anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang anggota Komite yang berasal dari pihak independen sebagai berikut.

Susunan Komite Audit Per 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Mariatul Aini	Ketua Komite Audit/Komisaris	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/04/2020 tanggal 28 April 2020	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris	
Ahmad Ghufroon	Anggota Komite Audit/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/KOM/PII/09/2019 tanggal 30 September 2019	30 September 2019 - 29 September 2022	Ke-2
Marsiyati	Anggota Komite Audit/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/KOM/PII/06/2020 tanggal 17 Juni 2020	17 Juni 2020 - 16 Juni 2023	Ke-1

Profil masing-masing anggota Komite Audit dapat dilihat di bawah ini.

Mariatul Aini

Ketua Komite Audit/Komisaris

Profil Ketua Komite Audit Mariatul Aini dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini



Ahmad Ghufroon

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Periode Jabatan: 30 September 2019 s.d
29 September 2022, Periode ke-2

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 50 tahun
Kelahiran Pekalongan, 15 April 1971

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Magister (S2) bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (2009). Selain itu memiliki sertifikasi profesi, yaitu *Certified Enterprise Risk Governance (CERG)*, *Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*, *Certified Risk Management Professional (CRMP)*, dan *Certified Strategy Execution Professional (CSEP)*.

Riwayat Profesi

Sepanjang karirnya, selain bidang audit internal beliau berpengalaman untuk bidang penerapan *risk management*, *internal control*, *governance*, manajemen kinerja, pengadaan barang dan jasa, transformasi organisasi, serta *oversight committee*. Dalam bidang akademis, beliau juga menjadi dosen paruh waktu di Politeknik Keuangan Negara STAN untuk bidang audit internal dan audit investigasi.

Rangkap Jabatan

Saat ini menjabat sebagai Inspektur VII, Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan



Marsiyati

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Periode Jabatan: 30 September 2019 s.d
29 September 2022, Periode ke-2

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 46 tahun
Kelahiran Bogor, 24 Juni 1976

Domisili

Depok, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Magister (S2) bidang Administrasi Publik dari Institut STIAM (2010).

Riwayat Profesi

Sepanjang karirnya, beliau berpengalaman di bidang pengawasan dan pembinaan pada *Special Mission Vehicles* di bawah Kementerian Keuangan, bidang analisis investasi Pemerintah, bidang penerapan *risk management* serta manajemen kinerja.

Rangkap Jabatan

Saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Direktorat Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan

Pedoman Kerja Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan, agar memperoleh hasil dan manfaat serta dampak positif yang optimal bagi kinerja perusahaan.

Komite Audit bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan perannya, Komite Audit menjalankan fungsi sebagai penilai independent dalam memastikan efektivitas system pengendalian internal, efektivitas tugas auditor internal dan eksternal, efektivitas sistem manajemen risiko, penerapan good corporate governance, serta kegiatan lain yang masuk dalam lingkup pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan.

Anggota Komite Audit dipilih dan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari personil yang memiliki kompetensi, professional, serta berintegritas.

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan yang selaras dengan lingkup tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Perusahaan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya yaitu agar pengelolaan PT PII dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite

Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*) terdiri atas:

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan PT PII.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dengan standar audit yang berlaku, menilai kinerja dan kualitas hasil audit, dan mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor eksternal terganggu atau terbukti bahwa auditor eksternal tidak melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku.
6. Memantau pelaksanaan tindak lanjut temuan dan rekomendasi auditor eksternal yang dilakukan oleh Direksi.
7. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan, standar, dan pedoman akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas proses penyusunan laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah menyajikan secara wajar tentang kondisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta rencana jangka panjang perusahaan dengan melakukan penelaahan dan evaluasi atas laporan keuangan interim dan tahunan serta laporan manajemen periodik.
10. Melakukan penelaahan atas informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak lain dan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
12. Melakukan penelaahan dan pemeriksaan atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapor anggota Direksi, anggota atau organ Dewan Komisaris.
13. Melakukan pengawasan dan pengarahan atas pelaksanaan kerja tim investigasi pelaporan pelanggaran, atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapor anggota Direksi, anggota atau organ Dewan Komisaris.
14. Menyusun pedoman kerja Komite Audit yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris.
15. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris.
16. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit memberikan pendapat dan saran/masukan kepada Dewan Komisaris melalui kegiatan berkaitan dengan namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan penerapan sistem pengendalian internal.
2. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas piagam auditor internal.
3. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas rencana audit tahunan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit internal, serta pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
4. Menyusun kerangka acuan kerja (*term of reference*) bagi pengadaan auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.



Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bersifat mandiri serta bekerja secara profesional dan independen.

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite Audit agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit diatur sebagai berikut:

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan atau sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit ketua dan seorang anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh anggota Komite Audit yang hadir.
4. Setiap anggota Komite Audit bebas menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapa pun.
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada), dan keputusan rapat.
7. Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Di tahun 2021, Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat-rapat tersebut.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Audit	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Mariatul Aini (Ketua Komite Audit)	15	15	100%
Ahmad Ghufon (Anggota Komite Audit)	15	15	100%
Marsiyati (Anggota Komite Audit)	15	15	100%
Rata-rata			100%

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	7 Januari 2021	Rapat KA - terkait <i>Draft</i> Final Laporan Audit Proyek Pengembangan Bandar Udara Labuan Bajo dan Laporan Reviu Fungsi <i>Procurement</i> serta Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tingkat Entitas Tahun 2020 (<i>Entity Level Control</i> 2020)
2	11 Januari 2021	BPKP - <i>Entry Meeting</i> Penilaian Penerapan GCG PT PII
3	22 Januari 2021	Evaluasi Tindak Lanjut rekomendasi Audit Internal Q4 & Realisasi Proker IA Th 2020. Penelaahan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Audit Internal Tahun 2021. Evaluasi Kebijakan Sistem Pengendalian Internal.

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
4	15 Februari 2021	Agenda I: <i>Monitoring progress</i> audit LK Tahun 2020 oleh PwC (persiapan sebelum <i>clearance meeting</i>). Kebijakan akuntansi stream pendapatan baru dan <i>cost-nya</i> Agenda II: Diskusi teknis terkait surat Direksi – usulan penambahan PMN PT PII Tahun 2022
5	18 Februari 2021	<i>Monitoring progress</i> audit LK & IKU BOC BOD PT PII Tahun 2020 dengan PwC
6	24 Februari 2021	PII <i>Clearance Meeting</i> Tahun Buku 2020 (PwC)
7	23 April 2021	Evaluasi Laporan Hasil Audit dan Pemantauan Divisi IA periode Q1 2021
8	19 Mei 2021	Diskusi Tindak Lanjut Reviu Divisi IA terhadap fungsi Divisi HC
9	18 Juni 2021	Evaluasi Kebijakan Pengadaan
10	23 Juli 2021	Evaluasi RKAP periode semester I Tahun 2021
11	26 Juli 2021	Evaluasi Pelaksanaan kegiatan IA periode Q2 tahun 2021
12	27 Agustus 2021	Evaluasi AOI GCG tahun 2020 & GCG Semester 1 tahun 2021
13	17 September 2021	Pengawasan kepatuhan Direksi terhadap peraturan per-UU-an & perjanjian dengan pihak ke-3
14	13 Oktober 2021	Evaluasi Kegiatan IA periode Q3 2021
15	29 November 2021	Update Realisasi Proker Divisi IT s.d November 2021

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Rencana Kerja	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
Aspek Perencanaan			
1 Penyusunan RKA KA Tahun 2022	Juli s.d. W1 Agustus	A. 4 Agustus 2021 - Rapat Organ Agenda : Pembahasan RKAT Dekom dan Organ Tahun 2022	Surat Dekom ke Direksi: S-32/PII/DK/0821 Penyampaian rancangan RKA Dekom th 2022 - Direksi, tanggal : 20 Agustus 2021
2 Penyiapan bahan RKA Dewan Komisaris Tahun 2022	W2 & W3 Agustus	B. 18 Agustus 2021 - Rapat BOC Agenda: 1. Pembahasan RKAT & IKU Dekom Th 2022	S-38A/PII/DK/1021 Penyampaian Usulan Kontrak Kinerja Dekom PT PII Tahun 2022 - RUPS, tanggal : 28 Oktober 2021
3 Penyiapan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2022	Agustus s.d. W3 September	2. Laporan Management Periode Juli 2021 3. Revisi Pedoman Dekom edisi ketiga th 2021 4. Surat Direksi – Usulan Perubahan Penggunaan PMN	
4 Penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2022	September s.d. W3 Oktober	A. 9 Oktober 2021 - Rapat Teknis Agenda : Penelaahan usulan RKAP PT PII Th 2022 B. 11 Oktober 2021 - Rapat BOC Agenda : Update hasil rapat teknis terkait Penelaahan usulan RKAP PT PII Th 2022 dan draft surat tanggapan Dekom kepada Direksi atas RKAP 2022	Surat Dekom ke Direksi: S-34/PII/DK/1021 Tanggapan Atas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2022, tanggal : 11 Oktober 2021 Surat Dekom ke RUPS S-38/PII/DK/1121 Tanggapan Atas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
5 Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP Tahun 2022	W3 & W4 Oktober	C. 16 Oktober 2021 - Rapat BOC BOD Agenda : Pembahasan Persetujuan RKAP PT PII Th 2022	Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII Tahun Buku 2022, tanggal : 5 November 2021 S-40/PII/DK/1121 Tanggapan Atas Update Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII Tahun Buku 2022, tanggal : 30 November 2021



Uraian Kegiatan	Rencana Kerja	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
Penelaahan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Audit Internal	W4 Desember	A. 22 Januari 2021 - Rapat KA dengan IA Agenda : 1. Evaluasi Tindak Lanjut rekomendasi Audit Internal Q4 & Realisasi Proker IA Th 2020 2. Penelaahan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Audit Internal Th 2021 3. Evaluasi Kebijakan Sistem Pengendalian Internal	M-01/PII/IA/0221 Perihal : Rancangan Rencana Aktivitas Audit Internal Th 2021 Clean
Aspek Pengawasan			
7 Reviu atas laporan hasil Audit Internal	Q1, Q2, Q3, Q4	Rapat KA & IA per Triwulan : A. 22 Januari 2021 - Reviu atas laporan hasil Audit Internal Q4 th 2020 B. 23 April 2021 - Reviu atas laporan hasil Audit Internal Q1 C. 26 Juli 2021 - Reviu atas laporan hasil Audit Internal Q2 D. 13 Oktober 2021 - Reviu atas laporan hasil Audit Internal Q3	Laporan Bulanan Kinerja KA Selama Th 2021
8 Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal dan eksternal	W3 Januari, April, Juli, Oktober	Rapat KA & IA per Triwulan : A. 22 Januari 2021 - Reviu atas laporan hasil Audit Internal Q4 th 2020 B. 23 April 2021 - Reviu atas laporan hasil Audit Internal Q1 C. 26 Juli 2021 - Reviu atas laporan hasil Audit Internal Q2 D. 13 Oktober 2021 - Reviu atas laporan hasil Audit Internal Q3 Rapat KA, IA & KAP (PWC) : 18 Februari 2021 Agenda: Monitoring progress audit LK & IKU BOC BOD PT PII Th 2020 dengan PWC 24 Februari 2021 Agenda : PII Clearance Meeting Th buku 2020 (PwC)	
9 Penyiapan usulan bahan rapat bulanan Dewan Komisaris	W4 tiap bulan	Rekapitulasi Rapat KA Sepanjang Tahun 2021 (Terlampir)	
10 Penelaahan atas pengaduan terkait perusahaan	Sesuai disposisi	N/A	
11 Penelaahan atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaannya	W3 Februari	15 Februari 2021 - Rapat KA Agenda : 1. Monitoring progress audit LK Th 2020 oleh PWC (persiapan sebelum clearance meeting) 2. kebijakan akuntansi stream pendapatan baru dan costnya	
12 Penelaahan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Per-UU-an dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga	W3 November	17 September 2021 - Rapat KA Agenda : Pengawasan kepatuhan Direksi thp peraturan per-UU-an & perjanjian dgn pihak ke-3	

	Uraian Kegiatan	Rencana Kerja	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
13	Evaluasi atas kegiatan CSR	W3 Juni	2 Juni 2021 - Rapat BOC Agenda : 1. Evaluasi Kegiatan CSR periode semester I Tahun 2021	
14	Penelaahan atas kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal	W3 Februari	Rapat KA & IA per Triwulan : A. 22 Januari 2021 - Reviu atas laporan hasil Audit Internal Q4 th 2020 B. 23 April 2021 - Reviu atas laporan hasil Audit Internal Q1 C. 26 Juli 2021 - Reviu atas laporan hasil Audit Internal Q2 D. 13 Oktober 2021 - Reviu atas laporan hasil Audit Internal Q3	Memo Laporan Bulanan Kinerja KA Selama Th 2021
15	Penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya	W3 September	18 Juni 2021 - Rapat KA Agenda: Evaluasi Kebijakan Pengadaan	
16	Penelaahan atas gejala penurunan kinerja	Sesuai disposisi	N/A	Tidak ada disposisi dari Dewan Komisaris terkait gejala penurunan kinerja selama tahun 2021 Surat Dekom ke RUPS, tanggal : 17 Mei 2021 No. S-19/PII/DK/0521 Perihal : Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja Operasional PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2020
17	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP	W3 Januari, April, Juli, Oktober	Rekapitulasi Rapat KA Sepanjang Tahun 2021 (Terlampir)	Rekapitulasi atas surat tanggapan Dewan Komisaris sepanjang Tahun 2021 (Terlampir)
18	Penelaahan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS	Sesuai disposisi	Rekapitulasi Rapat BOC Sepanjang Tahun 2021 (Terlampir)	
19	Monitoring atas proyek yang telah dijamin	Sesuai Jadwal Divisi Project Monitoring	Pelaksanaan Site Visit Proyek yang telah dijamin penjaminan oleh PT PII, sepanjang tahun 2021: A. Proyek SPAM Lampung, tanggal 2-4 April 2021 B. Proyek Bandar Udara Labuan Bajo, tanggal 11-13 Juni 2021 C. Proyek Tol Cisumdawu, tanggal 15-17 Oktober 2021 D. Proyek KEK Mandalika, tanggal 22-24 Oktober 2021 E. PLTU CJPP & SPAM Semarang Barat, Tanggal 5-7 November 2021	Laporan Bulanan & laporan Tahunan KA Th 2021
20	Pemantauan atas kegiatan IIGF Institute	W3 Mei	29 Juni 2021 - Rapat Gabungan BOC BOD Agenda: 1. Evaluasi program kerja IIGF Institute 2. Evaluasi Laporan Management periode Mei 2021	Laporan Bulanan Kinerja KA Selama Th 2021



Uraian Kegiatan		Rencana Kerja	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
Aspek Pelaporan				
21	Penelaahan atas Laporan Bulanan Manajemen ke Dewan Komisaris / Pemantauan kinerja Direksi	W3 tiap bulan	Rekapitulasi Rapat KA Sepanjang Tahun 2021 (Terlampir) Rekapitulasi Rapat BOC Sepanjang Tahun 2021 (Terlampir)	Laporan Bulanan Kinerja KA Selama Th 2021
23	Penelaahan atas Laporan Manajemen Triwulanan ke RUPS	W1 Februari, Mei, Agustus, November		
	Penelaahan atas Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2020	W2 April	Rapat Teknis 18 Januari 2021 Agenda: 1. Pembahasan IKU Direksi th 2021 2. Pembahasan draft Annual Report Tahun 2020	
Aspek Penerapan GCG				
	Pemantauan Tindak Lanjut Pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2019	W2 Januari	22 Januari 2021 - Rapat KA	
	Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2019 oleh BPKP	s.d W4 Januari	11 Januari 2021 : entry meeting BPKP GCG Th 2020 18-20 Februari 2021 : rapat konsinyering pelaksanaan assesement GCG dengan BPKP 9 Maret 2021 : Exit meeting GCG BPKP th 2019	
	Pemantauan Tindak Lanjut Pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2020	W3 Juni dan W3 November	A. 27 Agustus 2021 B. 25 September 2021 Agenda : Pemantauan Tindak Lanjut Pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2020	
Aspek Audit atas Laporan Keuangan				
	Pengadaan KAP Untuk Audit LK Th 2021	April s.d. W4 Mei	18 Juni 2021 - Rapat KA dengan divisi pengadaan Agenda: Evaluasi Kebijakan Pengadaan & update pengadaan KAP Untuk Audit LK Th 2021	

Uraian Kegiatan	Rencana Kerja	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
Pengusulan penetapan KAP untuk audit LK Th 2021 kepada RUPS	W4 Juni	A. Memo KA ke Komisaris Utama Memo-10/PII/DK-KA/0721 Pengadaan KAP untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan PT PII Tahun buku 2021 , tanggal 8 Juli 2021 B. Surat Dekom ke Direksi S-23/ PII/DK/0721 Pengadaan KAP untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan PT PII Th 2021, tanggal 8 Juli 2021 C. Surat Dekom ke RUPS S-33/ PII/DK/0921 Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja Wibisana Rintis & Rekan (PwC) Sebagai Auditor PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun Buku 2021 tanggal 17 September 2021	
Penelaahan rencana audit LK Tahun 2021 oleh KAP	W4 November	Rapat Konsinyering tanggal 22 November 2021 Agenda : kick off meeting pwc th buku 2021	
Pemantauan atas kemajuan pelaksanaan audit LK Tahun 2020 oleh KAP	Januari s.d. W4 Februari	Rapat KA, IA & KAP (PWC) : 18 Februari 2021 Agenda: Monitoring progress audit LK & IKU BOC BOD PT PII Th 2020 dengan PWC	Laporan Bulanan Kinerja KA Selama Th 2021
Penelaahan atas laporan hasil audit LK Tahun 2020 dari KAP	W4 Februari	24 Februari 2021 Agenda : PII Clearance Meeting Th buku 2020 (PwC)	
Aspek Lainnya			
Pembahasan draft Annual Report Tahun 2020	Februari s.d W4 Maret	Rapat Teknis 18 Januari 2021 Agenda: 1. Pembahasan IKU Direksi th 2021 2. Pembahasan draft Annual Report Tahun 2020	
Self Assessment Kinerja Komite Audit	W3 Desember	Laporan Tahunan KA Periode Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2022	
Peningkatan kompetensi Anggota Komite Audit	Sesuai jadwal	Laporan pelatihan Komite Audit sebagaimana terlampir	
Telaah atas pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris	Sesuai disposisi	N/A	Tidak ada disposisi dari Dewan Komisaris terkait pengaduan selama tahun 2021



KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selain Komite Audit, PT PII memiliki Komite lainnya yakni Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/KOM/PII/01/2018 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko Pada PT PII tanggal 27 Januari 2018.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali satu kali, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko 2021

Komite Risiko PT PII terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite yang merupakan Anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang anggota Komite yang berasal dari pihak independen sebagai berikut:

Susunan Komite Pemantau Risiko

1Per 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Wahyu Utomo	Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/04/2020 tanggal 28 April 2020	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris	
Iqbal Islami	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/KOM/PII/01/2018 tanggal 27 Januari 2018	1 Februari 2021 s.d 31 Januari 2024	Ke-2
Ferry Irawan	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/KOM/PII/11/2019 tanggal 29 November 2019	1 Desember 2019 s.d 30 November 2022	Ke-1

Profil masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat di bawah ini.

Wahyu Utomo

Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko Wahyu Utomo dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

**Iqbal Islami**

Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen
Periode Jabatan: 1 Februari 2021 s.d
31 Januari 2024, Periode ke-2

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 57 tahun

Kelahiran Gunung Sugih, 6 Desember 1963

Domisili

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991) dan *Master (S2) of Business Administration* dalam bidang *finance* dari Case Western Reserve University, Ohio, Amerika Serikat (1994).

Riwayat Profesi

Beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan (2016-sekarang). Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko, Beliau pernah bertugas sebagai anggota Komite Audit di PT PII selama lima tahun sejak 1 November 2012 sampai dengan 30 Oktober 2017. Sebelum bertugas sebagai anggota Komite Audit di PT PII, beliau juga telah pernah bertugas sebagai anggota Komite Audit pada dua BUMN dan satu Perusahaan terbuka. Dalam bidang akademis, beliau juga tercatat sebagai Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN sejak tahun 1991. Manajemen stratejik, *finance*, *corporate governance*, manajemen risiko dan keuangan negara adalah bidang-bidang yang menjadi keahliannya.

Rangkap Jabatan

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



Ferry Irawan

Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen
Periode Jabatan: 1 Desember 2019 s.d
30 November 2022, Periode ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 46 tahun

Kelahiran Depok, 2 Februari 1975

Domisili

Depok, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan (2000), Magister (S2) (2004) dan Doktor (S3) (2006) bidang Ekonomi Moneter, seluruhnya dari Universitas Indonesia.

Riwayat Profesi

Saat ini bertugas sebagai Asisten Deputy Moneter dan Sektor Eksternal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya bertugas di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan menangani beberapa isu antara lain Analisis Fiskal, Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan/Neraca Pembayaran juga pernah bertugas pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal yang menangani isu-isu risiko fiskal serta pengelolaannya. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pengajar di Program Pasca Sarjana/Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Rangkap Jabatan

Saat ini menjabat sebagai Asisten Deputy Moneter dan Sektor Eksternal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Piagam Komite Pemantau Risiko

Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan untuk pertama kali pada tanggal 15 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/PII/KOM/03/2018 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko PT PII yang antara lain memuat latar belakang dan dasar pembentukan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, struktur dan persyaratan keanggotaan, rapat, pola kerja, pelaporan, serta masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, pengendalian intern Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur.
2. Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut.
3. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan.
4. Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan.
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko Perusahaan.
6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam Perusahaan.
7. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah diterapkan di Perusahaan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan pedoman Komite Pemantau Risiko edisi tahun 2021, komite pemantau risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk memantau dan mengevaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik khususnya yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko serta memberikan pendapat berupa saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas unit kerja Perusahaan yang membidangi manajemen risiko.
3. Melakukan reviu dan evaluasi atas laporan pelaksanaan manajemen risiko yang dibuat oleh Perusahaan.
4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Perusahaan.
5. Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku yang terkait dengan manajemen risiko.
6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Transparansi Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Pemantau Risiko di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Di tahun 2021, Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat sebanyak 14 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam rapat-rapat tersebut.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat

Komite Pemantau Risiko	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Wahyu Utomo (Ketua)	14	14	100%
Iqbal Islami (Anggota)	14	14	100%
Ferry Irawan (Anggota)	14	14	100%
Rata-rata			100%



Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	12 Januari 2021	Evaluasi kegiatan Divisi Manajemen Risiko Q4 Th 2020
2	5 Maret 2021	Proyeksi Risiko Klaim 2021 & Update program kerja divisi RM
3	10 Maret 2021	Proyek Jalan Tol Gede bage Tasikmalaya Cilacap
4	15 April 2021	1. <i>Update issue</i> terkini IT dan <i>strategy recovery</i> . 2. Kajian Proyek Jalan Tol Gede bage Tasikmalaya Cilacap dalam rangka persetujuan Dewan Komisaris.
5	21 April 2021	Evaluasi capaian kinerja Divisi RM Periode Q1 Tahun 2021
6	20 Mei 2021	<i>Progress Monitoring</i> Divisi IT
7	12 Juni 2021	<i>Site Visit</i> Proyek KPBU Bandar Udara Labuan Bajo
8	8 Juli 2021	Pembahasan Laporan Monitoring Divisi RM Periode Q2
9	27 Juli 2021	1. <i>Update</i> Penjaminan PEN (BUMN dan Penjaminan Korporasi pasca PMK 32). 2. <i>Update</i> Penjaminan BUMN Waskita Karya.
10	27 Agustus 2021	Evaluasi AOI GCG tahun 2020 & GCG Semester 1 tahun 2021
11	23 September 2021	<i>Update</i> Proyek CH Hamilton - (<i>update schedule</i> , struktur penjaminan, <i>cover</i> risiko dan nilai penjaminannya)
12	13 Oktober 2021	Evaluasi Kegiatan <i>Risk Management</i> Periode Q3 2021
13	30 November 2021	Potensi dan mitigasi klaim penjaminan sampai dengan Oktober 2021
14	30 Desember 2021	Pembahasan SOP Pembayaran Klaim

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Rencana Kerja	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan korespondensi
Aspek Perencanaan			
1 Penyusunan RKA KPR Tahun 2022	Juli s.d. W4 Agustus	A. 4 Agustus 2021 - Rapat Organ Agenda : Pembahasan RKAT Dekom dan Organ Tahun 2022 B. 18 Agustus 2021 - Rapat BOC Agenda: 1. Pembahasan RKAT & IKU Dekom Th 2022 2. Laporan Management Periode Juli 2021 3. Revisi Pedoman Dekom edisi ketiga th 2021 4. Surat Direksi – Usulan Perubahan Penggunaan PMN	Surat Dekom ke Direksi: S-32/PII/DK/0821 Penyampaian rancangan RKA Dekom th 2022 - Direksi, tanggal : 20 Agustus 2021 S-38A/PII/DK/1021 Penyampaian Usulan Kontrak Kinerja Dekom PT PII Tahun 2022 - RUPS, tanggal : 28 Oktober 2021
2 Penyiapan bahan RKA Dewan Komisaris Tahun 2022	W2 & W3 Agustus		
3 Penyiapan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2022	Agustus s.d. W3 September		

Uraian Kegiatan		Rencana Kerja	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan korespondensi
4	Penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2022	September s.d. W3 Oktober	A. 9 Oktober 2021 - Rapat Teknis Agenda : Penelaahan usulan RKAP PT PII Th 2022 B. 11 Oktober 2021 - Rapat BOC Agenda : Update hasil rapat teknis terkait Penelaahan usulan RKAP PT PII Th 2022 dan draft surat tanggapan Dekom kepada Direksi atas RKAP 2022 C. 16 Oktober 2021 - Rapat BOC BOD Agenda : Pembahasan Persetujuan RKAP PT PII Th 2022	Surat Dekom ke Direksi: S-34/PII/DK/1021 Tanggapan Atas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2022, tanggal : 11 Oktober 2021 Surat Dekom ke RUPS S-38/PII/DK/1121 Tanggapan Atas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII Tahun Buku 2022, tanggal : 5 November 2021 S-40/PII/DK/1121 Tanggapan Atas Update Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII Tahun Buku 2022, tanggal : 30 November 2021
5	Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP Tahun 2022	W3 & W4 Oktober		
Aspek Pengawasan				
6	Pelaksanaan Rapat Bulanan KPR	W3 Setiap Bulan	Sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan 14 kali Rapat KPR (Rekapitulasi Rapat tahun 2021 terlampir)	Laporan Triwulan KPR Th 2021
7	Monitoring & Evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya	Q1, Q2, Q3, Q4	Rapat KPR & Div. RM Q1 = 23 April 2020 Q2 = 9 Juli 2020 Q3 = 13 Oktober 2020 Q4 = 12 Januari 2021	
8	Pembahasan gejala penurunan kinerja	Sesuai Disposisi Dewan Komisaris	N/A	Tidak ada disposisi dari Dewan Komisaris terkait gejala penurunan kinerja selama tahun 2021 Surat Dekom ke RUPS, tanggal : 17 Mei 2021 No. S-19/PII/DK/0521 Perihal : Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja Operasional PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2020



Uraian Kegiatan	Rencana Kerja	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan korespondensi
9 Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP untuk aspek pengelolaan risiko	Q1, Q2, Q3, Q4	Sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan 14 kali Rapat KPR	Laporan Triwulan 1, 2, 3 dan 4 KPR Th 2021
10 Pembahasan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS	Sesuai Disposisi Dewan Komisaris	KPR melakukan monitoring dan pembahasan terkait beberapa proyek KPBU dan Non KPBU sepanjang 2021 sbb: 1. rapat KPR tanggal 10 Maret 2021 agenda: diskusi Proyek Jalan Tol Gede bage Tasikmalaya Cilacap 2. rapat KPR tanggal 15 April 2021 agenda: 1. Update issue terkini IT dan strategi recovery 2. Update kajian Proyek Jalan Tol Gede bage Tasikmalaya Cilacap dalam rangka persetujuan Dekom 3. Dilaksanakan site visit pada tanggal 12 Juni 2022 ke proyek KPBU Bandar Udara Labuan Bajo 4. Rapat KPR tanggal 27 Juli 2022 Agenda: 1. Update Penjaminan PEN (BUMN dan Penjaminan Korporasi pasca PMK 32) 2. Update Penjaminan BUMN Waskita Karya 5. Rapat KPR tanggal 23 September 2021 Agenda : 1. Update Proyek CH Hamilton - (update schedule, struktur penjaminan, cover risiko dan nilai penjaminannya)	Surat Dekom kepada Dirut No. S-12/PII/DK/0421 tanggal 5 April 2021 Perihal : Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penjaminan Proyek Pengadaan Vaksin Covid-19 Surat Dekom kepada Dirut No. S-18/PII/DK/0521 tanggal 3 mei 2021 Perihal : Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap

	Uraian Kegiatan	Rencana Kerja	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan korespondensi
11	Mereview laporan manajemen bulanan dengan fokus pada aspek manajemen risiko	W3 Setiap Bulan	Sepanjang tahun 2021, dilaksanakan reвью laporan manajemen bulanan dengan aspek manajemen risiko dan monitoring atas proyek yang telah dijamin dalam: 13 kali rapat dewan komisaris; 17 kali rapat gabungan dewan komisaris dan direksi; dan 14 kali rapat KPR sepanjang tahun 2021, dilaksanakan 4 kali site visit yaitu pada: 1. SPAM Lampung tanggal 2-4 April 2021 2. Bandar Udara Labuan Bajo tanggal 11-13 Juni 2021 3. Tol Cisumdawu tanggal 15-17 Oktober 2021 4. KEK Mandalika tanggal 22-24 Oktober 2021 5. CJPP tanggal 5-7 November 2021	
12	Monitoring atas proyek yang telah dijamin	Sesuai Jadwal Divisi Project Monitoring		
13	Monitoring atas kegiatan IIGF Institute	W3 Mei	29 Juni 2021 - pembahasan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Agenda: 1. Evaluasi program kerja IIGF Institute 2. Evaluasi Laporan Management periode Mei 2021	
14	Penelaahan aspek risiko atas pemberian tanggapan (response) kepada Direksi/RUPS	Sesuai Disposisi Dewan Komisaris	Sepanjang tahun 2021 terdapat 42 surat korespondensi Dewan Komisaris kepada Direksi & RUPS, yang didalamnya telah dilakukan penelaahan mengenai aspek Risiko	



Uraian Kegiatan	Rencana Kerja	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan korespondensi
15 Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan TI dan pelaksanaannya	W3 Maret	Rapat BOC tanggal 21 Mei 2021 Agenda : 1. Highlight Laporan Management periode April 2021 2. Update Pengelolaan SDM 3. Update Pengelolaan IT Rapat Gabungan BOC BOD sepanjang tahun 2021 Rapat KPR: Tanggal 15 April 2021 Agenda: 1. Update issue terkini IT dan strategi recovery 2. Kajian Proyek Jalan Tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap dalam rangka persetujuan Dekom Tanggal 20 Mei 2021 Agenda: Progress Monitoring Divisi IT	Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No. S-20/PII/DK/0521 tanggal 21 Mei 2021, Perihal : Reviu atas Kegiatan Risk Management yang berasal dari Information Technology (IT)
16 Evaluasi atas kegiatan CSR	W3 Juni	Rapat BOC tanggal 2 Juni 2021 Agenda : 1. Evaluasi Kegiatan CSR periode semester I Tahun 2021 Rapat Gabungan BOC BOD Tanggal 29 Juni 2021	
17 Evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun dan dilaksanakan oleh Perusahaan	W3 Juli	Rapat Triwulan KPR & Div. RM Q1 tanggal 21 April 2021 Agenda : Evaluasi capaian kinerja Divisi RM Periode Q1 Tahun 2021 Q2 tanggal 8 Juli 2021 Agenda : Pembahasan Laporan Monitoring divisi RM periode Q2 Q3 tanggal 13 Okt 2021 Agenda : Evaluasi Kegiatan Risk Management periode Q3 2021 Q4 Tanggal 11 Januari 2022 Agenda : Laporan Risk Management periode Q4 th 2021	Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No. S-24/PII/DK/0721 tanggal 13 Juli 2021, Perihal : Reviu atas Kegiatan/ Pemantauan Risiko triwulan ke-2 dan Rencana Kerja Triwulan ke-3
18 Penelaahan kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dengan fokus pada aspek manajemen risiko	W3 Mei		

	Uraian Kegiatan	Rencana Kerja	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan korespondensi
19	Penelaahan rencana kerja Divisi Manajemen Risiko Th 2021	W2 Des		
20	Rapat dengan Divisi-Divisi Terkait Aspek Risiko dari masing-masing Divisi	W3 pada bulan Feb, Mei, Agustus, Nov	Sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan 14 kali Rapat KPR (Rekapitulasi Rapat tahun 2021 terlampir)	Surat Dewan Komisaris kepada Direksi: (1) No. S-12/PII/DK/0421 tanggal 5 April 2021, Agenda : Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penjaminan Proyek Pengadaan Vaksin Covid-19 (2) No.S-18/PII/DK/0521 Tanggal 3 Mei 2021, Agenda: Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap
21	Pembahasan dengan Divisi Manajemen Risiko	W3 tiap bulan	Rapat Triwulan KPR & Div. RM Q1 tanggal 21 April 2021 Agenda : Evaluasi capaian kinerja Divisi RM Periode Q1 Tahun 2021 Q2 tanggal 8 Juli 2021 Agenda : Pembahasan Laporan Monitoring divisi RM periode Q2 Q3 tanggal 13 Okt 2021 Agenda : Evaluasi Kegiatan Risk Management periode Q3 2021 Q4 Tanggal 11 Januari 2022 Agenda : Laporan Risk Management periode Q4 th 2021	
22	Penelaahan atas Laporan Manajemen Risiko	W1 Februari, Mei, Agustus, November		
23	Pengawasan terhadap Implementasi penjaminan korporasi PEN dan skema penjaminan BUMN	W1 Juli	Rapat KPR tanggal 27 Juli 2021 Agenda : 1. Update Penjaminan PEN (BUMN dan Penjaminan Korporasi pasca PMK 32) 2. Update Penjaminan BUMN Waskita Karya	penelaahan tertuang dalam memo KPR No. memo-07/PII/DK-KPR/1121 tanggal 27 Oktober 2021 perihal: Laporan Triwulan III Tahun 2021

Aspek Pelaporan



Uraian Kegiatan	Rencana Kerja	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan korespondensi
24 Penyusunan Laporan Triwulanan KPR	Q1, Q2, Q3, Q4		Laporan KPR sepanjang tahun 2021 kepada Dewan Komisaris: Memo-03/PII/DK-KPR/0421 Tanggal 27 April 2021 Laporan Q1 tahun 2021 Memo-04/PII/DK-KPR/0721 Tanggal 14 Juli 2021 Laporan Q2 tahun 2021 Memo-08/PII/DK-KPR/1021 Tanggal 27 oktober 2021 Laporan Q2 tahun 2021 Memo-01/PII/DK-KPR/0122 Tanggal 21 Januari 2022 Laporan Q4 tahun 2021

Aspek Penerapan GCG

25	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2019	W2 Januari	22 Januari 2021 - bersama dengan Rapat Komite Audit	Bersama Organ Direksi
26	Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2020 oleh BPKP	Januari	11 Januari 2021 : entry meeting BPKP GCG Th 2020 18-20 Februari 2021 : rapat konsinyering pelaksanaan assesment GCG dengan BPKP 9 Maret 2021 : Exit meeting GCG BPKP th 2019	
27	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2020	W3 Juni	A. 27 Agustus 2021 B. 25 September 2021 Agenda : Pemantauan Tindak Lanjut Pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2020	

Aspek Lainnya

28	Pembahasan draf Annual Report tahun 2020	Februari & Maret	Rapat Teknis 18 Januari 2021 Agenda: 1. Pembahasan IKU Direksi th 2021 2. Pembahasan draft Annual Report Tahun 2020	Bersama Sesdekom, KPR, Corsec
29	Self Assessment Kinerja Komite Pemantau Risiko	W3 Desember	Self Assessment dilaksanakan pada 31 Desember 2021 dan 28 Januari 2022	
30	Peningkatan kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko	Sesuai Jadwal	Daftar pelatihan Komite Pemantau Risiko sebagaimana terlampir dalam daftar pelatihan Dewan Komisaris	

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

PT PII tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi secara khusus. Fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Pemegang Saham melalui Kementerian Keuangan melalui peraturan yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bagian "Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi" dan "Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi" dalam bab ini.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas utama menjaga citra Perusahaan utamanya dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dalam rangka mendukung pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam memastikan aspek keterbukaan dari Perusahaan.

Pejabat Sekretaris Perusahaan dan Dasar Pengangkatan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK - 025/DIR/HC/0821 tanggal 6 September 2021, Direksi mengangkat Yunan Novaris Arifidianto untuk menjabat Sekretaris Perusahaan.



Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1997), saat ini beliau juga sedang menjalankan program Magister (S2) Master of Business Administration di Institut Teknologi Bandung.

Riwayat Profesi

Bergabung dengan PT PII pada tahun 2013. Sebelum menjabat sebagai EVP *Corporate Secretary and Communication*, beliau merupakan SVP *Guidance and Consultation* kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai SVP *Project Legal Service*, SVP *Project Monitoring and Claim* serta SVP *Corporate Legal Service*. Beliau juga berkarir di beberapa perusahaan di antaranya menjabat sebagai *Senior Legal Counsel* PT Pertamina (Persero) (2010-2013), *Legal Manager & Corporate Secretary* PT Infokom Elektrindo member of PT Media Nusantara Citra Tbk (2006-2009), *Business Development* PT Flash Mobile/Infokom *Subsidiary Company* (2006-2009), *Legal Manager* PT Elektrindo Nusantara (2002-2006) .

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, hubungan antara Perusahaan dengan *stakeholders*, hubungan kelembagaan serta kepatuhan terhadap hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dan Legal sebagai berikut:

1. Mengelola kegiatan kesekretariatan perusahaan termasuk mengelola dokumen perusahaan;
2. Pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan penguatan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan Perusahaan;
3. Penghubung antar Organ Perusahaan;
4. Memastikan pelaksanaan pembinaan hubungan dengan pihak eksternal, termasuk lembaga pemerintah dan non pemerintah, institusi lain, pemegang saham serta *stakeholders* lainnya
5. Mengawasi kegiatan *corporate branding* di dalam maupun luar lingkungan kerja Perusahaan;

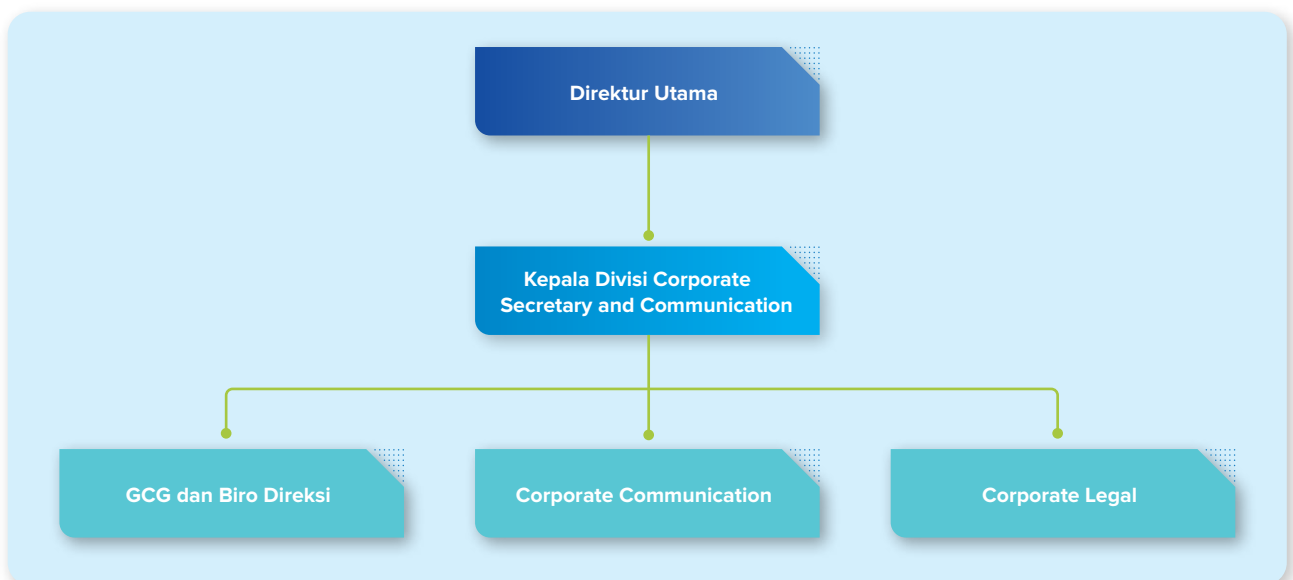


6. Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan;
7. Pemberian saran hukum kepada Perusahaan, termasuk (i) pelaksanaan penyiapan, perumusan, dan penyelesaian peraturan, perjanjian dan kerja sama perusahaan; (ii) inventarisasi dokumentasi hukum; (iii) konsultasi dan bantuan hukum untuk kepentingan perusahaan dan karyawan di dalam maupun di luar pengadilan;
8. Memimpin proses kajian peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap bisnis Perusahaan;
9. Memastikan asesmen dan mitigasi risiko telah dilakukan pada Divisi *Corporate Secretary and Communication*;
10. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Divisi *Corporate Secretary and Communication*;
11. Peningkatan kompetensi SDM Divisi *Corporate Secretary and Communication*.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan diselenggarakan oleh Divisi *Corporate Secretary and Communication* dan dipimpin oleh pejabat setingkat *Executive Vice President* yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan internal Perusahaan. Kedudukan Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Utama.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:



Program Pengembangan Kompetensi

Perusahaan mengikutsertakan personel Sekretaris Perusahaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi, untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti pejabat Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Topik Pelatihan	Penyelenggara
Yunan Novaris Arifidianto	EVP	<i>Sharing Knowledge : Cybersecurity Awareness 2021.</i>	PT PII
		<i>Mastering Project Finance</i>	Fidelitas Institute
		ISO 37001-SMAP	Risk Management
		<i>Health Talk: Tetap Sehat Fisik dan Mental Selama Masa Pandemi</i>	HC PII
		<i>Project Development Routemap: International Training</i>	Infrastructure and Projects Authority
		Kreatif dalam Kesulitan-with Raditya Dika	Human Capital
		<i>Executive Insight Leadership Series</i>	Pertamina Training and Consulting
		Forum GRC 2021: Penerapan GRC untuk Mendukung Transformasi Perusahaan	PT PII
		Penggunaan Hukum Publik Internasional dalam Transaksi Pinjaman oleh BUMN	PT PII

Uraian Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2021

Di sepanjang tahun 2021 Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan aktivitas/kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsi Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

Aktivitas/Kegiatan	Keterangan
Pengelolaan Dokumen Perusahaan	Telah dilaksanakan pengelolaan dokumen Perusahaan, termasuk dokumen hukum, daftar khusus, dan dokumen korespondensi perusahaan.
Penyelenggaraan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan: • Rapat Direksi sebanyak 44 kali • Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 17 kali • RKAP Tahun 2022 pada Tanggal 20 Desember 2021
Kewajiban Pelaporan	• Penyampaian Laporan Manajemen Bulanan kepada Dewan Komisaris • Penyampaian Laporan Realisasi RKAP Triwulanan kepada Pemegang Saham • Penyampaian Laporan Pencapaian Indikator Kerja Individual Direksi Triwulanan kepada Dewan Komisaris • Penyampaian Laporan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2020 kepada Pemegang Saham



Aktivitas/Kegiatan	Keterangan
Koordinasi Kegiatan terkait penerapan GCG	Sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan terkait penerapan GCG, diantaranya: • <i>Assessment</i> GCG Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh BPKP pada 17 Januari – 25 Februari 2022 • Pelaksanaan <i>webinar</i> terkait GRC • Penguatan perangkat Unit Pengendalian Gratifikasi dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (WBS) • <i>Monitoring</i> dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi berdasarkan hasil <i>assessment</i> GCG Tahun 2020.
Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan pemberian saran hukum kepada Perusahaan	Sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan terkait pemenuhan pemberian saran hukum kepada Perusahaan melalui: • Kajian/Analisa terhadap peraturan perundangan yang berpengaruh terhadap Perusahaan; • Pendapat hukum terhadap kondisi/isu yang dihadapi Perusahaan; • Penelaahan Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman, Perjanjian Rahasia dan Surat Keputusan Direksi; • Pembuatan Akta dan pengurusan perizinan Perusahaan.
Program meningkatkan “image” Perusahaan (<i>image building</i>) dan hubungan dengan <i>stakeholder</i>	Sepanjang tahun 2021, telah dilaksanakan kegiatan terkait komunikasi perusahaan diantaranya: • Publikasi Perusahaan melalui media massa dan media sosial; • Penguatan relasi dengan media dan <i>stakeholders</i>; • Pengelolaan strategi komunikasi Perusahaan; • Penyelenggaraan kegiatan Perusahaan dengan <i>stakeholders</i> yang mendukung penguatan citra dan reputasi Perusahaan; • Pelaksanaan <i>Stakeholder Survey</i> • Pembaruan <i>Website</i> Perusahaan
Koordinasi kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perusahaan	Sepanjang tahun 2020 Divisi <i>Corporate Secretary and Communication</i> telah menyelenggarakan kegiatan CSR yang tepat sasaran.

Keterbukaan Informasi

Untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada publik, Sekretaris Perusahaan senantiasa melakukan pelaporan kepada regulator. Setiap tahun, PT PII menyusun Laporan Tahunan yang mengacu pada kriteria *Annual Report Award* (ARA) dan secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Divisi Manajemen Risiko

Kepala Divisi Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui mekanisme internal.

Pejabat Manajemen Risiko dan Dasar Pengangkatan

Fungsi Pengelolaan Manajemen Risiko Korporat dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko dimana Direksi telah mengangkat Catur Priyoni sebagai Kepala Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan No. SK-004/DIR/HC/0220 tanggal 14 Februari 2020.



Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun

Domisili

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1997). Memiliki beberapa sertifikasi profesi antara lain Sertifikasi Praktisi dan Profesi Akuntan dari CPA Australia dan ASEAN CPA, *Certification of Audit Committee Practices (CACP)*, serta *Certification in Risk Management Assurance (CRMA)* dari *The Institute of Internal Auditors*. Selain itu, beliau terdaftar sebagai *Indonesian Chartered Accountant (CA)* di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebagai praktisi dan profesional di bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko, beliau memiliki sertifikasi *Qualified Risk Management Governance Professional (QRGP)* dari Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP-MKS) dan *Certified in Enterprise Risk Governance (CERG)* dari *Enterprise Risk Management Academy (ERMA)*.

Riwayat Profesi

Bergabung dengan PT PII sejak 1 Februari 2019 sebagai Kepala Audit Internal dan diangkat sebagai Kepala Manajemen Risiko pada 14 Februari 2020. Sebelum bergabung dengan PT PII, beliau telah menjalani profesi sebagai Kepala Audit Internal pada beberapa perusahaan asuransi joint venture yang berafiliasi internasional sebagai Kepala Audit Internal dan *Compliance Advisor* dalam waktu 8 tahun. Pada awal karirnya beliau pernah menjadi Auditor pada beberapa Akuntan Publik yang berafiliasi internasional termasuk *Big 4* selama 10 tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memimpin pengembangan kerangka kerja manajemen risiko korporat (*ERM Framework*) yang diimplementasikan melalui Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko Perusahaan yang terus dipelihara dan diperbaiki secara berkesinambungan (*Continuous Improvement*);
2. Mendukung proses pengambilan keputusan dalam pemberian penjaminan proyek infrastruktur, terutama dari aspek manajemen risiko Perusahaan;
3. Memimpin pelaksanaan proses kajian kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan dan prosedur standar Perusahaan yang berlaku;



4. Melaksanakan dokumentasi dan konsultasi proses manajemen risiko yang dilaksanakan oleh pemilik dan pengelola risiko di setiap divisi;
5. Menyusun laporan manajemen risiko secara periodik dan menyampaikannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko

Direksi menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai acuan dalam mencapai Sasaran Jangka Panjang Perusahaan yang disusun dalam suatu Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management Framework*) tahun 2021 yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 003/SK/PII-BOD/0321 tanggal 4 Maret 2021. Kerangka kerja tersebut disusun sebagai wujud komitmen dalam penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi, dalam rangka membantu organisasi dalam menghadapi tantangan dan dampak terhadap ketidakpastian, serta memberikan panduan untuk penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur dengan mengadopsi standar internasional ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines*.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Manajemen Risiko

Struktur Organisasi yang menggambarkan kedudukannya dalam organisasi Perusahaan serta menggambarkan fungsi-fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Manajemen Risiko



Fungsi Manajemen Risiko dipimpin oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Kepala Divisi Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsionalnya, Kepala Divisi Manajemen Risiko mendapatkan masukan dan arahan dari Komite Pemantau Risiko. Tim Manajemen Risiko bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Manajemen Risiko.



Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan tanggung jawab seluruh individu dan unsur-unsur yang ada di dalam organisasi sesuai dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan masing-masing. Dalam penerapannya Tata Kelola Manajemen Risiko mengadopsi Model 3 Garis (*Three Lines Model*) yang menggambarkan komitmen kepemimpinan yang tercermin dalam setiap struktur dan proses yang ada di organisasi.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di PT PII adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris (yang didukung oleh Komite Pemantau Risiko).
2. Direksi (terdiri dari Direktur Utama, Direktur Eksekutif Bisnis dan Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek).
3. Divisi Manajemen Risiko (terdiri dari Kepala Divisi Manajemen Risiko yang dibantu oleh *Manager* dan *Assistant Manager* Manajemen Risiko).
4. *Risk Owner* (Kepala Divisi/*Senior Leaders* yang bertanggungjawab sebagai pengelola risiko di masing-masing divisi).
5. *Risk Officer* (*Manager* yang melaksanakan proses manajemen risiko di masing-masing divisi).
6. Seluruh *Staff* yang mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko di unit kerja dan divisi masing-masing.

Per 31 Desember 2021, Divisi Manajemen Risiko memiliki 3 (tiga) karyawan yang bertugas pada fungsi-fungsi seperti yang telah dijelaskan pada bagan di atas.

Jabatan	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
Kepala Manajemen Risiko	S1	1
<i>Manager</i> Manajemen Risiko	S2	1
<i>Assistant Manager</i> Manajemen Risiko	S1	1
Jumlah		3



Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi diperlukan untuk membantu praktisi manajemen risiko untuk mempersiapkan diri untuk terus mengembangkan kompetensinya dalam menghadapi tuntutan perkembangan praktik manajemen risiko di industri yang dinamis. Tabel di bawah ini adalah sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Divisi Manajemen Risiko hingga akhir tahun 2021.

Level Sertifikasi	Jumlah Sertifikasi
<i>Certified in Enterprise Risk Governance (CERG)</i> dari <i>Enterprise Risk Management Academy (ERMA)</i>	1
<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i> dari Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP-MKS)	1
<i>Certification in Risk Management Assurance (CRMA)</i> dari <i>The Institute of Internal Auditors</i>	1
<i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)	1
<i>Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)</i> dari <i>Enterprise Risk Management Academy (ERMA)</i>	1
<i>Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i> dari <i>Enterprise Risk Management Academy (ERMA)</i>	1
<i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i> dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)	1
<i>Certification of Audit Committee Practices (CACP)</i> dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	1
<i>Certified Practicing Accountant (CPA)</i> dari CPA Australia	1
<i>ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA)</i> dari <i>ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee (ACPACC)</i>	1
<i>Chartered Accountant (CA)</i> dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	1

Program Pengembangan Kompetensi

Perusahaan mendorong personel Divisi Manajemen Risiko dalam kegiatan pengembangan kompetensi profesi terkait dengan profesi manajemen risiko. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Manajemen Risiko di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Divisi Manajemen Risiko sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Jenis pendidikan dan pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Catur Priyoni Kepala Divisi Manajemen Risiko	Awareness ISO 37001-SMAP	1 Maret 2021	PQM
Dimar Mohammad Manager Manajemen Risiko	Awareness ISO 37001-SMAP	1 Maret 2021	PQM
Kinanti Ajeng Lestari Assistant Manager Manajemen Risiko	Awareness ISO 37001-SMAP	1 Maret 2021	PQM
Catur Priyoni Kepala Divisi Manajemen Risiko	E-Learning Internet Security Awareness	24-27 Agustus 2021	Kementerian Keuangan
Dimar Mohammad Manager Manajemen Risiko	E-Learning Internet Security Awareness	24-27 Agustus 2021	Kementerian Keuangan
Kinanti Ajeng Lestari Assistant Manager Manajemen Risiko	E-Learning Internet Security Awareness	24-27 Agustus 2021	Kementerian Keuangan
Catur Priyoni Kepala Divisi Manajemen Risiko	Forum GRC 2021: Penerapan GRC untuk Mendukung Transformasi Perusahaan	16 Desember 2021	PT PII
Dimar Mohammad Manager Manajemen Risiko	Forum GRC 2021: Penerapan GRC untuk Mendukung Transformasi Perusahaan	16 Desember 2021	PT PII

Nama dan Jabatan	Jenis pendidikan dan pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Kinanti Ajeng Lestari <i>Assistant Manager Manajemen Risiko</i>	Forum GRC 2021: Penerapan GRC untuk Mendukung Transformasi Perusahaan	16 Desember 2021	PT PII
Catur Priyoni <i>Kepala Divisi Manajemen Risiko</i>	<i>Risk Beyond Conference</i>	8-10 Desember 2021	ERMA & CRMS
Dimar Mohammad <i>Manager Manajemen Risiko</i>	<i>Risk Beyond Conference</i>	8-10 Desember 2021	ERMA & CRMS
Kinanti Ajeng Lestari <i>Assistant Manager Manajemen Risiko</i>	<i>Risk Beyond Conference</i>	8-10 Desember 2021	ERMA & CRMS
Catur Priyoni <i>Kepala Divisi Manajemen Risiko</i>	<i>Master Class: Risk Governance with Dual Certification (CERG QRGF)</i>	4-5 Oktober 2021	CRMS dan LSP-MKS
Catur Priyoni <i>Kepala Divisi Manajemen Risiko</i>	<i>Internal Audit for Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 based on ISO 19011:2018</i>	7 Juni 2021	PQM
Catur Priyoni <i>Kepala Divisi Manajemen Risiko</i>	<i>GRC Summit 2021-Agility Amid A Chaotic World</i>	26 Agustus 2021	IRMAPA, ICoPI, PaGI, IPACA, ERMA dan Asosiasi GRC
Catur Priyoni <i>Kepala Divisi Manajemen Risiko</i>	<i>Risk Maturity Assessment</i>	5 Mei 2021	Forum Manajemen Risiko BUMN

Notes: pada bagian ini, pelatihan mencakup kepada seluruh karyawan MR. Pada bagian Profil Perusahaan, pelatihan hanya untuk Kepala MR.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen Risiko Tahun 2021

Di sepanjang tahun 2021 Divisi Manajemen Risiko telah menyelenggarakan aktivitas/kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsi Manajemen Risiko, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran Buku Acuan Alokasi Tahun 2021;
2. Melaksanakan *review* atas Dokumen Proses Bisnis PT PII;
3. Penyusunan materi dalam kepesertaan di ajang kompetisi praktik manajemen risiko dan/atau bidang GRC di tingkat nasional maupun internasional;
4. Memfasilitasi proses identifikasi, penanganan, pemantauan dan pelaporan risiko Perusahaan secara berkelanjutan dengan melibatkan *Risk Officer* dan *Risk Owner*;
5. Menyusun program penilaian atas tingkat kematangan (maturitas) penerapan Manajemen Risiko untuk mendapatkan gambaran kondisi penerapan di PT PII serta pengembangan yang diperlukan melalui penyusunan *road map* peningkatan maturitas ERM sesuai dengan sasaran jangka pendek maupun panjang Perusahaan;
6. Pengembangan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diadopsi dari ISO 37001:2016 sebagai bagian dari komitmen pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
7. Melaksanakan verifikasi atas penilaian kepatuhan (*Compliance Check*) untuk memastikan proses penjaminan telah mengikuti *Operation Manual* Perusahaan dan prosedur internal yang berlaku;
8. Melaksanakan verifikasi atas penilaian kepatuhan (*Compliance Check*) untuk memastikan proses penempatan dana investasi telah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku yaitu PMK 95/2017 dan prosedur internal; dan
9. Melakukan *review* terhadap proses pengadaan barang dan jasa telah mengikuti ketentuan dan prosedur internal yang berlaku.



AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan visi dan misinya, Audit Internal berperan sebagai mitra strategis yang profesional, independen, obyektif, bertanggung jawab dan dapat menjadi penasihat yang terpercaya (*trusted advisor*) bagi Direksi dan jajaran Manajemen dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perusahaan. Audit Internal meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan layanan asuransi dan konsultasi berbasis risiko yang dilaksanakan secara sistematis, obyektif dan independen.

Melalui layanan asuransi dan konsultasi berbasis risiko, Audit Internal diharapkan dapat mendeteksi lebih dini permasalahan dan kelemahan di dalam unit kerja dan menyampaikan informasi dan rekomendasi terkait kepada Direksi dan jajaran manajemen (*early warning system*) terutama bila terjadi penurunan atau penyimpangan terhadap kinerja dalam rangka mencapai sasaran Perusahaan khususnya pelaksanaan RKAP tahun berjalan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Pejabat Audit Internal dan Dasar Pengangkatan

Deki Santo Wibowo ditunjuk sebagai Kepala Audit Internal sejak 5 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK-004/DIR/HC/0220 dan Surat Dewan Komisaris SR-01/PII/ DK/0220.



Deki Santo Wibowo
Kepala Audit Internal
Menjabat Sejak: 5 Maret 2020

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 45 tahun

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1999). Beliau juga telah memperoleh *Certified Internal Auditor* (CIA) dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (2014), *Certified Public Accountant* (CPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011), *Enterprise Risk Management Certified Professional* (ERMCP) dari *Enterprise Risk Management Academy* (ERMA) (2013), *Certified Enterprise Risk Governance* (CERG) dari *Enterprise Risk Management Academy* (ERMA) (2017), *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL) – *Foundation Certificate* dari Pearson Vue (2019).

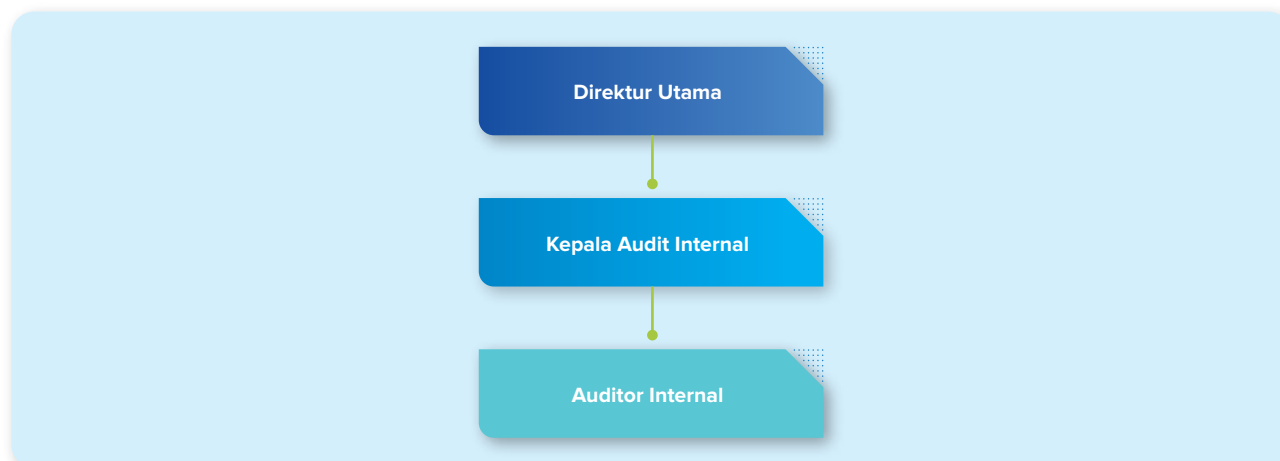
Riwayat Profesi

Sebelum menjadi Kepala Audit Internal beliau sempat menjabat sebagai Kepala Divisi *Organization Development* (OD) di PT PII. Di bidang audit dan keuangan, sebelum bergabung dengan PT PII beliau telah memiliki pengalaman kerja baik sebagai Auditor Internal maupun Auditor Eksternal selama lebih dari 20 tahun. Karir sebagai Auditor Internal ditempuhnya selama 8 tahun sebagai *ICS Compliance Head*. Sebelum berkarir sebagai Auditor Internal, beliau berkarir di beberapa Kantor Akuntan Publik dan perusahaan Tbk.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Audit Internal

Fungsi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi Audit Internal yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsionalnya, Kepala Divisi Audit Internal mendapatkan masukan dan arahan dari Komite Audit. Auditor yang duduk dalam Divisi Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Audit Internal.

Struktur Organisasi *Internal Audit* sebagai berikut:



Audit Internal bertugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan proses dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan perusahaan serta memberikan saran perbaikan sesuai dengan rencana dan program serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan. Untuk mendukung independensi dan objektivitas serta kelancaran pelaksanaan tugas, maka Audit Internal dapat berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan hasil dan proses pengawasan.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Unit *Internal Audit* didukung oleh 4 personil dengan kualitas dan kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam uraian tugasnya. Komposisi SDM *Internal Audit* berdasarkan jabatan pada akhir Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah
SVP Internal Audit	1
AVP Internal Audit	1
AM Internal Audit	1
Staff Internal Audit	1
Total	4

Piagam Audit Intern

Piagam Audit Internal terbitan ketiga disahkan pada Desember 2019 oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Piagam tersebut berdasar kepada Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK/06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pengawasan Menteri Keuangan.

Piagam Audit Internal disusun bertujuan untuk menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, dan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh fungsi Audit Internal Perusahaan yang diamanatkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan bahwa fungsi Audit Internal dapat menjalankan tugas-tugasnya secara memadai dan efektif.

Prosedur operasi Audit Internal dalam menjalankan fungsinya melakukan penelaahan dan pengujian operasional PT PII sebagai organisasi bisnis, yang secara garis besar mencakup:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Struktur, Persyaratan, dan Independensi Auditor Internal
- BAB III : Cakupan, Kewenangan, Tanggung Jawab Auditor
- Bab IV : Proses Penugasan Audit Internal
- Bab V : Penutup



SDM dan Sertifikasi Profesi

Jumlah SDM di Internal Audit sebanyak 4 (empat) orang Auditor memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Audit Internal hingga akhir tahun 2021.

Jabatan	Jumlah (orang)	Jenjang Pendidikan		
		D3/D4	S1	S2
SVP Internal Audit	1	-	1	-
AVP Internal Audit	1	-	-	1
AM Internal Audit	1	-	1	-
Staff Internal Audit	1	-	1	-
Jumlah	4	-	3	1

Program Pengembangan Kompetensi

Untuk meningkatkan kompetensi dalam hal pengetahuan dan pemahaman dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi, sepanjang 2021 Audit Internal mengikuti seminar, pendidikan dan/atau pelatihan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Audit Internal di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Audit Internal di sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Topik Pelatihan	Penyelenggara
Deki Santo Wibowo	SVP	Sharing Knowledge: Cybersecurity Awareness 2021	PT PII
		ISO 37001-SMAP	PT PQM
		Health Talk: Tetap Sehat Fisik dan Mental Selama Masa Pandemi	HC PT PII
		Kreatif dalam Kesulitan-with Raditya Dika	Human Capital
		E-Learning Internet Security Awareness	Kementerian Keuangan
		CISA Review Course	Universitas Indonesia
		Interaction Internal Auditor with Audit Committee and External Auditor in the New Normal	Perhimpunan Auditor Internal Indonesia
		Forum GRC 2021: Penerapan GRC untuk Mendukung Transformasi Perusahaan	PT PII
		Penggunaan Hukum Publik Internasional dalam Transaksi Pinjaman oleh BUMN	PT PII
Oke Darmawireja	AVP	Awareness Training ISO 37001 : 2016	PQM Consultant
		Sharing Knowledge: Cybersecurity Awareness 2021	PT PII
		ISO 37001-SMAP	PT PQM
		Health Talk: Tetap Sehat Fisik dan Mental Selama Masa Pandemi	HC PT PII
		In-House Training Soft Competency Level M-AVP (Innovation)	Human Capital
		Interaction Internal Auditor with Audit Committee and External Auditor in the New Normal	PAII
		Forum GRC 2021: Penerapan GRC untuk Mendukung Transformasi Perusahaan	PT PII

Nama	Jabatan	Topik Pelatihan	Penyelenggara
Ken Auva Maulida	AM	<i>In-House Training level Staff-AM Batch 1 "Outstanding Young Professional" 2021 (Sesi 1)</i>	<i>Daily Meaning</i>
		<i>In-House Training level Staff-AM Batch 1 "Outstanding Young Professional" 2021 (Sesi 2)</i>	<i>Daily Meaning</i>
		ISO 37001-SMAP	PT PQM
		Tempo "Investasi Ekonomi Digital di Masa Pandemi"	Tempo
		GRC Series: Penerapan <i>Digital Governance</i> dalam Tahap Transformasi Perusahaan di Era Disrupsi	Jaklingko
		Kreatif dalam Kesulitan-with Raditya Dika	<i>Human Capital</i>
		<i>E-Learning Internet Security Awareness</i>	Kementerian Keuangan
		<i>Whistleblowing Management System</i>	IIEA
		<i>Internal Audit Back To The Future, Emerging From The Crisis</i>	IIA Indonesia
		Hubungan Kerja SPI Terhadap Komisaris dan Direksi	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI)
		Forum GRC 2021: Penerapan GRC untuk Mendukung Transformasi Perusahaan	PT PII
Faisal Dita Nurulloh	Staff	<i>In-House Training level Staff-AM Batch 2 "Outstanding Young Professional" 2021 (Sesi 1)</i>	<i>Daily Meaning</i>
		<i>In-House Training level Staff-AM Batch 2 "Outstanding Young Professional" 2021 (Sesi 2)</i>	<i>Daily Meaning</i>
		<i>Sharing Knowledge: Cybersecurity Awareness 2021</i>	PT PII
		ISO 37001-SMAP	PT PQM
		Kreatif dalam Kesulitan-with Raditya Dika	Human Capital
		<i>E-Learning Internet Security Awareness</i>	Kementerian Keuangan



Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal Tahun 2021

Pada periode tahun 2021, fungsi Audit Internal telah melaksanakan 5 (lima) penugasan sesuai dengan Rencana Aktivitas Audit Internal Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Audit atas Proses Penjaminan Proyek KPBU Jalan Tol Semarang Demak
- Audit atas Pengelolaan Fungsi Teknologi Informasi
- Audit atas Proses Penjaminan Korporasi dan BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- Audit Internal atas Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada ruang lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
- Reviu atas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Tingkat Entitas

Selain tugas diatas, sepanjang tahun 2021 Audit Internal juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pendamping Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Belanja, dan Investasi pada PT PII (Persero)
 - Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK periode tahun 2021
2. Pendamping Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 - Monitoring dan evaluasi atas Pelaksanaan PMN Program PEN posisi Triwulan 1 tahun 2021
 - Penyusunan/Pemutakhiran Data Entitas Pemeriksaan

3. Pendampingan dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT PII tahun 2021 oleh Kantor Akuntan Publik.
4. Melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi audit internal maupun eksternal.
5. Melaksanakan pelaporan kegiatan audit dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit kepada Komite Audit per triwulan.
6. Melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut *Area of Improvement* (AOI) hasil *assessment* penerapan GCG tahun 2020.
7. Berperan aktif mendukung tim Sekretaris Perusahaan dalam meyakinkan kelancaran pelaksanaan evaluasi dan penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
8. Penyelenggaraan Webinar Forum GRC 2021: Penerapan GRC untuk Mendukung Transformasi Perusahaan.
9. Bertindak sebagai koordinator studi banding Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait tugas dan fungsi PT PII serta proses pemberian jaminan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema KPBU.
10. Pemutakhiran Pedoman Administrasi Audit Internal.

AUDIT EKSTERNAL/AKUNTAN PUBLIK

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan PT PII dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik



Daftar Akuntan Publik

Guna kepentingan transparansi terkait pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 28 Februari 2008, berikut disampaikan KAP Laporan Keuangan Perusahaan 6 (enam) tahun berturut-turut untuk tahun buku 2016 hingga 2021.

Daftar Akuntan Publik 2016-2021

Akuntan Publik Tahun Buku 2021

Kantor Akuntan Publik:

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers)

No. Izin: KEP-241/KM.1.2015

Akuntan Publik:

Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA

No. Izin: AP.0229

Lingkup Penugasan:

Jasa audit laporan keuangan

Jasa Lainnya:

Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris.

Biaya:

Rp865.000.000



Akuntan Publik Tahun Buku 2020

Kantor Akuntan Publik:

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
(PricewaterhouseCoopers)

No. Izin: KEP-241/KM.1.2015

Akuntan Publik:

Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA
No. Izin: AP.0229

Lingkup Penugasan:

Jasa audit laporan keuangan

Jasa Lainnya:

Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asuransi atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris.

Biaya:

Rp860.000.000

Akuntan Publik Tahun Buku 2019

Kantor Akuntan Publik:

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
(PricewaterhouseCoopers)

No. Izin: KEP-241/KM.1.2015

Akuntan Publik:

Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA

No. Izin: AP.0222

Lingkup Penugasan:

Jasa audit laporan keuangan

Jasa Lainnya:

Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asuransi atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris.

Biaya:

Rp864.000.000

Akuntan Publik Tahun Buku 2018

Kantor Akuntan Publik:

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
(PricewaterhouseCoopers)

No. Izin: KEP-241/KM.1.2015

Akuntan Publik:

Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA

No. Izin: AP.0222

Lingkup Penugasan:

Jasa audit laporan keuangan

Jasa Lainnya:

Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asuransi atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris.

Biaya:

Rp800.000.000

Akuntan Publik Tahun Buku 2017

Kantor Akuntan Publik:

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
(PricewaterhouseCoopers)

No. Izin: KEP-241/KM.1.2015

Akuntan Publik:

Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA
No. Izin: AP.0222

Lingkup Penugasan:

Jasa audit laporan keuangan

Jasa Lainnya:

Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asuransi atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris.

Biaya:

Rp674.960.000

Akuntan Publik Tahun Buku 2016

Kantor Akuntan Publik:

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
(PricewaterhouseCoopers)

No. Izin: KEP-241/KM.1.2015

Akuntan Publik:

Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA

No. Izin: AP.0222

Lingkup Penugasan:

Jasa audit laporan keuangan

Jasa Lainnya:

Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asuransi atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris.

Biaya:

Rp649.000.000

SISTEM PENGENDALIAN INTERN



Pengendalian internal Perusahaan diterapkan atas 2 (dua) aspek yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian internal atas operasional dan pelaporan keuangan Perusahaan dijalankan dengan mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)-*Internal Control Integrated Framework*. Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian.

PT PII mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)-*Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian internal yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

COSO – *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

Sepanjang tahun 2021, PT PII telah menerapkan sistem pengendalian internal yang mengacu pada COSO sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam perusahaan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Lingkungan pengendalian mempengaruhi kesadaran akan pentingnya pengendalian oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Manajemen wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen yang sehat dalam lingkungan kerjanya, diwujudkan melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal perusahaan yang efektif.



2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengenali, menelaah dan menilai pengelolaan risiko yang terkait dengan usaha dan bisnis Perusahaan. Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan dampak dari risiko yang teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan sebagai acuan dalam mengembangkan kegiatan pengendalian yang diperlukan dalam meminimalkan risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Perusahaan yang jelas dan konsisten, mengidentifikasi secara efisien dan efektif terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar Perusahaan dan terakhir melakukan analisis untuk mengetahui dampak dari risiko serta pengendalian yang diperlukan.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan Pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang ketiga. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

Kebijakan dibuat untuk mengarahkan apa yang seharusnya dikerjakan dan berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan prosedur. Prosedur adalah rangkaian urutan tindakan, dilakukan satu atau beberapa orang dengan peralatan dan waktu tertentu dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kegiatan pengendalian diselenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi Perusahaan, sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Diutamakan pada kegiatan pokok Perusahaan.
- Harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Perusahaan atau bisnis inti Perusahaan.
- Seluruh kegiatan memiliki kebijakan dan prosedur yang ditetapkan secara tertulis.
- Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan.

Kegiatan pengendalian harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan, kegiatan pengendalian terdiri atas:

- Reviu atas kinerja Perusahaan.
- Pembinaan sumber daya manusia.
- Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- Pengendalian fisik aset.

- Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
- Pemisahan fungsi.
- Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- Pencapaian yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
- Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perusahaan. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Sistem informasi dan komunikasi merupakan suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa internal serta eksternal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Perusahaan dan lainnya di seluruh perusahaan yang memerlukan dalam bentuk yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian internal dan tanggung jawab operasional.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan (*monitoring*) adalah proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal Perusahaan, termasuk fungsi Audit Internal pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, komparasi, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan

yang berkelanjutan. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, *reviu*, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal dan dilakukan dengan mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi, metodologi, dan sumber daya.

Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perusahaan. Salah satu implementasi tata kelola perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Penilaian (evaluasi) terhadap sistem pengendalian internal tingkat entitas (*Entity Level Control*) Perusahaan dijalankan oleh Audit Internal mulai 22 Oktober 2021 sampai dengan 23 Desember 2021, dengan ruang lingkup penilaian mencakup seluruh proses pengendalian tingkat entitas (*Entity Level Control*) yang terdapat di dalam lingkungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selama periode tahun 2021. Metodologi yang digunakan dalam melakukan penilaian (evaluasi) atas penerapan sistem pengendalian internal tingkat entitas adalah sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen dan data;
2. Observasi dan wawancara dengan manajemen dan karyawan;
3. Survei penerapan dengan manajemen dan karyawan.

Berdasarkan hasil penilaian (evaluasi) tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan telah dilaksanakan secara baik.

Studi Banding/Benchmarking

Dalam rangka untuk mengukur dan membandingkan kinerja terhadap aktivitas atau kegiatan serupa pada unit kerja yang sejenis pada perusahaan lain, PT PII telah mengikuti Konferensi Nasional Audit Internal yang diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors Indonesia* (IIA Indonesia). Selain itu PT PII juga aktif sebagai anggota dari Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern Badan Usaha Milik Negara (FKSPI BUMN).

Monitoring Tindak Lanjut Temuan

Divisi Audit Internal memantau dan menindaklanjuti tanggapan atas rekomendasi audit internal & eksternal melalui prosedur peninjauan dan verifikasi atas perkembangan status tindakan perbaikan yang dijalankan oleh unit kerja terkait.

Monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara obyektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan mengecek kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang disampaikan oleh unit kerja terkait.

Dokumen Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit Internal dan Eksternal didistribusikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit secara berkala setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sampai dengan akhir Triwulan IV (Q4) 2021, secara keseluruhan PT PII telah menyelesaikan 56 (lima puluh enam) rekomendasi (94,4%) dari total 59 (lima puluh sembilan) rekomendasi audit internal yang harus diselesaikan di 2021. Sedangkan untuk rekomendasi audit eksternal selama tahun 2021 tidak terdapat temuan auditor eksternal yang disampaikan kepada PT PII untuk ditindaklanjuti.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Internal Audit merupakan Satuan Pengendali Internal yang dibentuk untuk membantu Direksi untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal di PT PII telah berjalan dengan baik dan juga Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit melakukan monitoring dan evaluasi atas performansi kinerja dan proyek yang telah dijamin oleh PT PII. Selama tahun 2021, *Internal Audit* telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, *Internal Audit* telah menyelesaikan semua rencana penugasan di awal tahun 2021. Hadir dalam setiap rapat bulanan Dewan Direksi dan setiap rapat kuartalan Komite Audit serta telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Membantu Komite Audit dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut temuan auditor eksternal dan internal.
2. Melakukan pendampingan selaku koordinator audit atau penugasan lain yang dilakukan oleh auditor eksternal.
3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepanitiaan penyelenggaraan *GRC Workshop* PT PII.
4. Berpartisipasi aktif dalam persiapan Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan melakukan *self-assessment* secara internal PT PII.

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat kerugian negara di PT PII sehingga tidak terdapat kerugian negara yang memerlukan *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut.



MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan usaha PT PII dalam menjalankan fungsi sebagai penyedia dukungan fiskal kontinjen untuk proyek infrastruktur dengan skema KPBU, dan peran serta menjaga keberhasilan proyek tersebut. Seiring dengan berkembangnya usaha Perusahaan, yaitu tidak terbatas pada penjaminan, melainkan juga pendampingan proyek yang dilaksanakan melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pengelolaan risiko sangat diperlukan sebagai upaya mitigasi lebih awal dalam menyiapkan dan melakukan penstrukturan proyek serta proses *monitoring* sepanjang berjalannya proyek.

Dalam menstruktur proyek infrastruktur dengan skema KPBU, penyusunan Acuan Alokasi Risiko sangat penting dan memiliki peran yang sentral. Hal itu dapat menjadi acuan Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dalam mengalokasikan risiko kepada pihak yang tepat dan mampu mengelola risiko serta menyusun rencana mitigasi risiko dalam rangka penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dasar Kebijakan Pengelolaan Manajemen Risiko

PT PII telah memiliki standar acuan dalam penerapan manajemen risiko. Kebijakan Perusahaan terkait manajemen risiko dimaksud mengacu kepada:

1. *Operation Manual* PT PII;
2. *Enterprise Risk Management Framework* PT PII;
3. *Standard Operating Procedure (SOP) Risk Management Exercise*;
4. *International Organization for Standardization (ISO) 31000:2018 Risk Management Guidelines*;
5. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2017, Enterprise Risk Management- Integrating with Strategy and Performance*.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Manajemen Risiko

Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diadopsi oleh Perusahaan dapat digambarkan melalui penjelasan sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko berperan dalam menciptakan dan melindungi nilai Perusahaan;
2. Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari semua proses organisasi, yang harus diterapkan dalam semua aktivitas, proses dan sistem, dan dipertimbangkan dengan informasi terbaik yang tersedia dalam setiap pengambilan keputusan;

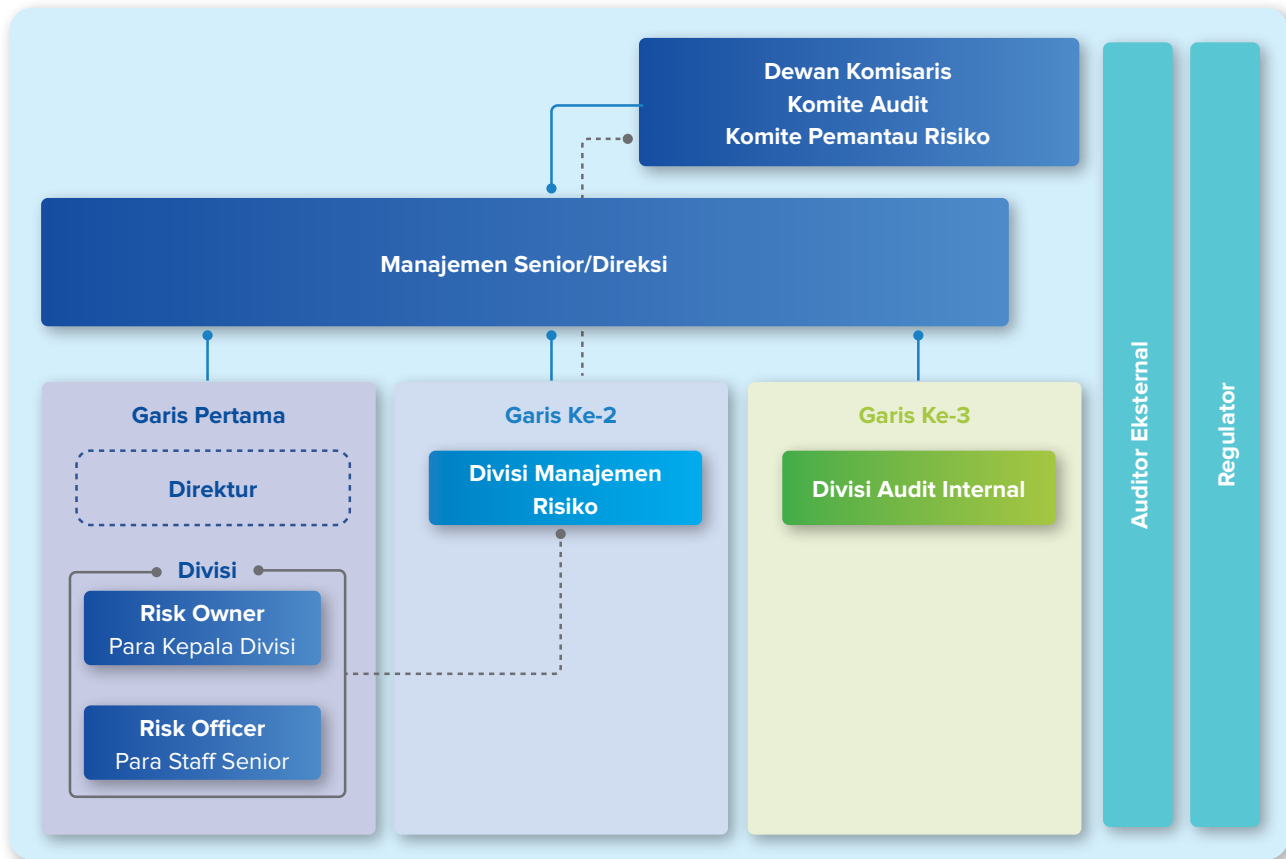
3. Manajemen Risiko adalah dinamis, berulang, responsif terhadap perubahan, dan disesuaikan sejalan dengan pencapaian tujuan Perusahaan;
4. Manajemen Risiko adalah proses yang digerakkan manusia dan budayanya yang secara inklusif dijalankan di seluruh organisasi; dan
5. Manajemen Risiko adalah penggerak untuk menciptakan organisasi yang mampu beradaptasi dan terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Pengawasan Aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi

Terkait dengan penerapan manajemen risiko, di setiap semester, Divisi Manajemen Risiko memberikan Laporan Manajemen Risiko dan Pemantauan atas perkembangan mitigasi risiko kepada Direktur Utama selaku Direksi yang membawahi Divisi Manajemen Risiko. Secara periodik PT PII menyampaikan Laporan Manajemen kepada Dewan Komisaris yang salah satu bagiannya memuat tentang manajemen risiko.

Pada bagian tersebut disampaikan progres dari kegiatan manajemen risiko, terutama terkait dengan status tindak lanjut pelaksanaan mitigasi. Dengan demikian, didapatkan gambaran komitmen dari PT PII untuk menurunkan tingkat risiko Perusahaan. Dewan Komisaris juga telah membentuk komite di bawahnya yaitu Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau penerapan manajemen risiko di Perusahaan serta memberikan masukan terhadap proses manajemen risiko. Divisi Manajemen Risiko secara berkala melakukan rapat dan diskusi bersama dengan Komite Pemantau Risiko untuk membahas penerapan dan program kerja terkait manajemen risiko dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan.

Tata kelola Manajemen Risiko Perusahaan mengadopsi Model 3 Garis (*3 Lines Model*) yang melibatkan kolaborasi dan komunikasi seluruh unsur-unsur di Perusahaan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Audit Internal, fungsi *Risk Management*, serta para *Risk Owner* dan *Risk Officer* yang berada di setiap divisi yang digambarkan dengan bagan berikut:



Tujuan dan Kerangka Kerja Penerapan Enterprise Risk Management (ERM)

Penerapan ERM bertujuan untuk:

1. Mengembangkan PT PII menjadi organisasi yang tangguh menghadapi risiko dalam mencapai visi dan misi korporasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap risiko yang melekat dalam semua aktivitas bisnis PT PII;
2. Mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh manajemen dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat dengan mempertimbangkan profil risiko/pengembalian (*risk/return*) yang ditetapkan;
3. Memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan menciptakan strategi dan proses yang bijaksana; dan
4. Meningkatkan reputasi PT PII di mata pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Pernyataan misi Manajemen Risiko menetapkan “*tone at the top*” yang membimbing kegiatan Manajemen Risiko di seluruh organisasi. Pernyataan misi berfungsi untuk mengomunikasikan visi, prinsip-prinsip dan mandat PT PII.

Misi dalam penerapan ERM adalah untuk memahami risiko utama yang dihadapi organisasi dan memfasilitasi proses Manajemen Risiko dengan menyediakan alat dan metodologi

yang tepat dalam mengelola risiko secara eksplisit. Hal ini akan mencapai pendekatan yang konsisten dalam pengelolaan risiko dalam organisasi.

Untuk mendukung pernyataan misi manajemen risiko, ERM harus mewujudkan organisasi sadar risiko melalui:

1. Pembentukan sistem manajemen berbasis risiko, yang mengelola semua risiko utama melalui praktik dalam semua kegiatan bisnis dan pengambilan keputusan;
2. Pengelolaan risiko di semua tingkat dalam organisasi;
3. Akuntabilitas yang jelas dan independensi dalam menjalankan tinjauan kepatuhan dan pemantauan seluruh kegiatan (semua pemilik proses bisnis); dan
4. Adopsi standar internasional yang diterima secara luas.

Kebijakan Perusahaan terkait manajemen risiko mengacu kepada Kerangka Manajemen Risiko dengan referensi utama yaitu ISO 31000:2018. Dokumen tersebut mendefinisikan Kerangka Manajemen Risiko Korporasi PT PII, yang meliputi:

1. Pembentukan prinsip dan standar umum bagi praktik Manajemen Risiko untuk memungkinkan pemahaman umum atas Manajemen Risiko;
2. Selera dan toleransi risiko (*risk appetite and tolerance*) yang disepakati oleh manajemen dalam menentukan ukuran tingkat risiko;



3. Mengadopsi kerangka manajemen risiko yang mendefinisikan proses manajemen risiko yang diterapkan pada bisnis secara umum;
4. Akuntabilitas dan tanggung jawab dalam implementasi Manajemen Risiko.

Kerangka ini merupakan pendekatan yang terstruktur dan konsisten untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam menghadapi risiko dan perubahan yang mempengaruhi organisasi dan merupakan pendekatan holistik untuk mengelola risiko yang dihadapi PT PII agar tetap berada dalam selera risiko Perusahaan dalam perubahan lingkungan bisnis.

Kategori Risiko

PT PII mengategorikan risiko ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Risiko Strategis, mencakup semua risiko yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan strategi.
2. Risiko Finansial, mencakup semua risiko yang terkait dengan risiko pasar dan risiko likuiditas.
3. Risiko Operasional, mencakup semua risiko yang timbul dari pelaksanaan fungsi bisnis Perusahaan.



Taksonomi risiko (menunjukkan rincian dari sumber risiko yang mungkin terjadi) dan definisi risiko bertujuan untuk memberikan definisi risiko yang jelas dan yang tercakup dalam kerangka ERM ini adalah sebagai berikut:

1. Kategori Risiko Strategis

Risiko yang timbul dari ketidakakuratan penentuan dan pelaksanaan strategi bisnis PT PII, ketidakakuratan keputusan bisnis, atau ketidakmampuan menanggapi perubahan eksternal.

a. Strategi dan Perencanaan

Risiko yang timbul dari lemahnya konteks strategi dan isu perencanaan dari PT PII yang mungkin berdampak kepada nilai-nilai strategis PT PII dan performa sebagai sebuah organisasi.

2. Kategori Risiko Keuangan

Kategori ini mengklasifikasikan risiko yang biasanya timbul karena ketidakmampuan PT PII untuk mencapai target pendapatannya, kerugian dari penempatan dana investasi, dan ketidakmampuan PT PII untuk mendapatkan pendanaan baru, baik dari kreditur atau dari pemegang saham.

Untuk yang berhubungan dengan investasi akan mengacu pada PMK 95/107.

a. Risiko Pasar (e.g. tingkat bunga, kurs)

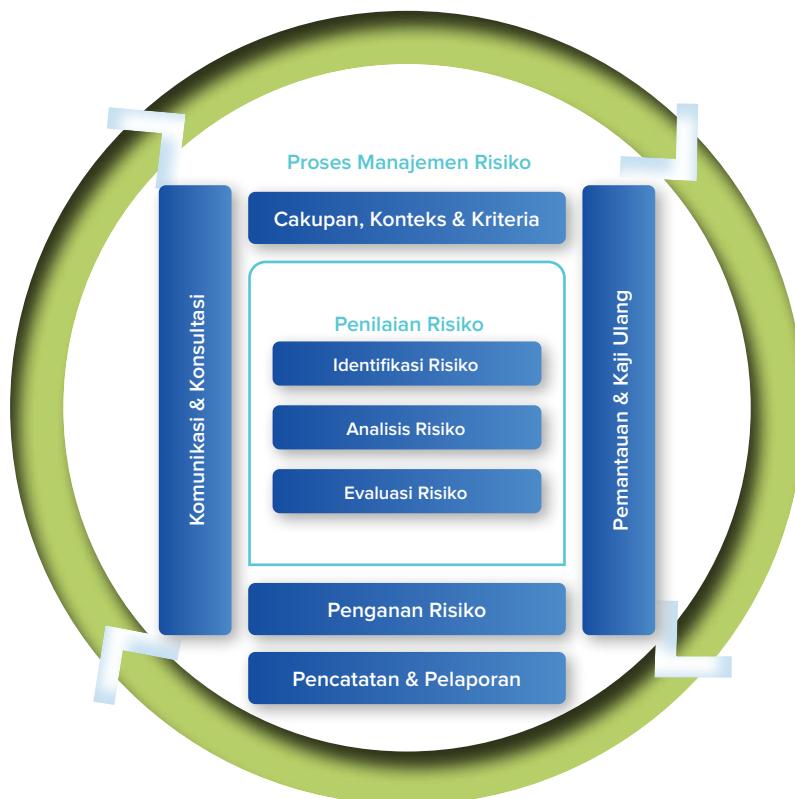
Risiko keuangan dalam sub kategori ini menggabungkan risiko yang dihasilkan dari pergerakan yang merugikan dari faktor pasar yang meliputi suku bunga dan selisih kurs serta harga ekuitas.

- b. Risiko Likuiditas dan Kredit
Risiko keuangan dalam sub kategori ini berhubungan dengan isu likuiditas dan kredit yang terkait dengan aset dan pendapatan PT PII.
3. Kategori Risiko Operasional
Risiko pada kategori ini umumnya terjadi pada pelaksanaan fungsi bisnis PT PII. Risiko ini fokus pada risiko yang timbul dari orang, sistem dan proses dimana Perusahaan beroperasi (termasuk aktivitas penyediaan penjaminan sebagai bisnis utama PT PII).
- a. Operasional Umum
Risiko pada sub kategori ini umumnya terkait dengan ketidakmampuan PT PII untuk mengoperasikan fungsi bisnisnya secara efisien, yang menyebabkan kerugian operasional dari kegiatan di luar penyediaan penjaminan.

- b. Penyediaan Penjaminan
Risiko pada sub kategori ini mengklasifikasikan risiko operasional yang terkait dengan peran PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).
- c. Hukum dan Kepatuhan
Risiko pada sub kategori ini terkait dengan ketidakpatuhan PT PII sebagai korporasi terhadap standar hukum atau regulasi yang dapat berdampak pada nilai-nilai strategis dan kinerja PT PII sebagai sebuah organisasi.

Proses Manajemen Risiko yang Berlaku di PT PII

Proses Manajemen Risiko Perusahaan menjadi bagian dari manajemen dan pengambilan keputusan serta diintegrasikan ke dalam struktur, operasi dan proses organisasi. Proses manajemen risiko mencakup penerapan yang sistematis dan berkesinambungan pada kegiatan dan proses komunikasi dan konsultasi, penentuan konteks, penilaian, penanganan, pemantauan dan kaji ulang serta pencatatan dan pelaporan risiko.





Proses Manajemen Risiko di PT PII mengadopsi ISO 31000:2018 yang secara umum bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan, Konteks dan Kriteria

Tujuan dari penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses Manajemen Risiko, sehingga penilaian dan perlakuan risiko dilaksanakan secara efektif dan relevan dengan lingkungan organisasi dan operasi Perusahaan. Secara garis besar proses bisnis PT PII yang berjalan saat ini mencakup:

- Penjaminan KPBU;
- Penjaminan Non-KPBU;
- Pendampingan Penyiapan dan Transaksi; dan
- Pengelolaan penempatan dana (investasi)

Sejalan dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan, kedepannya tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan mandate dan proses bisnis lain yang perlu dikaji dampaknya terhadap strategi, operasi dan keuangan Perusahaan.

2. Komunikasi dan Konsultasi

Dilaksanakan baik secara internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan dengan tujuan agar dapat mengelola risiko dengan baik dalam bentuk rapat berkala, rapat insidental atau *ad hoc*, *Focus Group Discussion* (FGD); dan diskusi reguler antara fungsi Manajemen Risiko dengan para *Risk Owner* dan *Risk Officer*.

3. Penilaian Risiko

Tahap ini mencakup identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang dijalankan secara sistematis dengan tujuan untuk menentukan kemungkinan dan dampak terjadinya

suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sehingga dapat dilakukan penanganan risiko secara tepat.

4. Penanganan Risiko

Tujuan dari penanganan risiko adalah untuk menentukan tindakan yang tepat yang dapat memberikan manfaat paling optimal bagi PT PII dalam menghadapi risiko yang teridentifikasi.

5. Pemantauan dan Kaji ulang Risiko

Pemantauan risiko adalah pemantauan rutin terhadap kinerja proses Manajemen Risiko atas Perencanaan dan harapan atas proses Manajemen Risiko, sedangkan kaji ulang risiko adalah peninjauan berkala atas kondisi terkini dengan fokus tertentu.

6. Pencatatan dan Pelaporan Risiko

Proses Manajemen risiko dan hasilnya harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang tepat. Pelaporan merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab mereka.

Penetapan Tingkat Risiko

Tingkat risiko sedang berarti bahwa risiko mungkin dapat diterima dengan beberapa pertimbangan tambahan mengenai manfaat yang akan diperoleh. Di bawah ini merupakan matriks tingkat risiko yang akan digunakan dalam evaluasi risiko.

Kemungkinan Risiko	Dampak Risiko Dalam Hal Materialisasi Risiko				
	Tidak Signifikan	Minor	Sedang	Mayor	Berbahaya
Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Menengah
Rendah	Rendah	Rendah	Menengah	Menengah	Menengah
Sedang	Rendah	Menengah	Menengah	Tinggi	Tinggi
Tinggi	Menengah	Menengah	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Sangat Tinggi	Menengah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Pedoman Penanganan Risiko

Penanganan Risiko merupakan kegiatan penting dalam manajemen risiko yang menentukan aktivitas selanjutnya dalam menghadapi risiko. Penentuan penanganan risiko harus dilakukan sejalan dengan selera risiko yang diterjemahkan dalam matriks tingkat risiko. Di bawah ini merupakan pedoman penanganan risiko untuk setiap tingkat risiko yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan tanggapan terhadap risiko yang teridentifikasi.

Tingkat Risiko	Penanganan Risiko
Rendah	- Menerima risiko dengan pemantauan yang konstan. - Minimal, kontrol detektif dapat ditentukan untuk risiko tersebut. - Penanganan risiko dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, bila memungkinkan.
Sedang	- Mengurangi tingkat risiko, bila dimungkinkan. - Kontrol pencegahan dapat ditentukan untuk risiko tersebut. - Jika biaya dari penanganan risiko lebih dari manfaatnya, maka terima risiko tersebut. - Penanganan risiko sepenuhnya dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, bila memungkinkan.
Tinggi	- Mengurangi tingkat risiko, bila memungkinkan. - Jika biaya dari penanganan risiko lebih dari manfaatnya, maka terima risiko tersebut. - Kontrol pencegahan dapat ditentukan untuk risiko tersebut. - Penanganan risiko sepenuhnya dilaksanakan secepatnya, bila memungkinkan. - Mensyaratkan pemantauan risiko secara bulanan.

Top Risks Manajemen Risiko Perusahaan

Dalam menjalankan usahanya, sebagai korporasi, PT PII menghadapi beberapa risiko utama, di antaranya:

1. Risiko Keamanan Siber (Cybersecurity)

Risiko ini merupakan dampak ketidakpastian yang dapat terjadi pada sistem teknologi informasi. Risiko keamanan siber berkaitan dengan hilangnya kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan informasi, data, sistem informasi atau pengendalian yang berpotensi memberikan dampak merugikan terhadap operasi organisasi dalam hal ini misi, fungsi, citra, atau reputasi serta aset, individu, organisasi lain bahkan suatu negara. Dalam menghadapi risiko ini Perusahaan melakukan langkah-langkah mitigasi antara lain:

- Melakukan migrasi proses komunikasi dan penyimpanan data divisi-divisi termasuk email ke dalam ekosistem berbasis *Cloud Computing* dengan keamanan yang lebih baik dan terintegrasi. Dengan standar SLA untuk *up-time* dari *server cloud* yang lebih tinggi dapat meningkatkan ketersediaan data yang dapat diakses oleh para pengguna.
- Melakukan proses *security hardening*, *vulnerability assessment*, *penetration test* dan remediasi dengan dukungan Pusintek Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kemananan dari segi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan aplikasis sistem teknologi informasi.
- Melakukan sosialisasi dan *awareness* berkelanjutan kepada karyawan mengenai keamanan informasi baik dilakukan di internal maupun bekerja sama dengan Pusintek Kementerian Keuangan.

2. Risiko Penyediaan Penjaminan

Dalam menjalankan peran sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), Perusahaan selalu menghadapi risiko-risiko antara lain terkait dengan klaim penjaminan dan regres, risiko-risiko yang terkait dengan proses evaluasi penjaminan dan penilaian kelayakan proyek serta risiko-risiko yang terkait dengan

keberhasilan dan efektivitas penyediaan penjaminan termasuk kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Untuk mengelola dan memitigasi risiko-risiko tersebut, Perusahaan mengembangkan suatu kerangka kerja dan metodologi proses penjaminan yang komprehensif, terstruktur dan disiplin melalui *Operation Manual* Penjaminan Infrastruktur yang didukung dengan kapasitas sumber daya baik internal maupun eksternal, infrastruktur teknologi dan proses *assurance* terhadap aspek kepatuhan dan manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja independen, dalam hal ini fungsi Manajemen Risiko dan Audit Internal. Di samping itu, dalam setiap proses penyediaan penjaminan, tim-tim yang terlibat dalam proses penjaminan juga melakukan komunikasi dan kolaborasi yang efektif dan konstruktif bersama para pemangku kepentingan yang relevan dalam proses penyediaan penjaminan termasuk melalui pengkomunikasian Rencana Mitigasi Risiko, *Key Risk Indicator* dalam wadah *Joint Monitoring Committee*. Secara keseluruhan, setiap proses penjaminan dilakukan dengan mengacu pada praktik Tata Kelola Korporasi yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang didukung dengan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris (*tone from the top*), serta pengawasan dari regulator dan auditor eksternal yang independen.

3. Risiko Operasi Dalam Kondisi Normal

Risiko ini timbul dari pelaksanaan fungsi bisnis Perusahaan yang terkait dengan penggunaan sumber daya, sistem dan proses bisnis di mana Perusahaan beroperasi, termasuk dari kegiatan penyediaan penjaminan sebagai bisnis utama Perusahaan. Dampak dari risiko operasional yang umum terjadi antara lain dapat berupa penundaan hingga penghentian proses bisnis, inefisiensi operasional dan ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, Perusahaan melakukan berbagai langkah mitigasi yang sesuai, antara lain melakukan pemilihan prioritas proyek atau pengalihan sumber



daya pelaksanaan penjaminan proyek jika diperlukan, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PJPK terkait penentuan target dan *timeline* proyek, termasuk komitmen pemenuhan/penyelesaian dokumentasi yang diperlukan, dan melaksanakan *capacity building* untuk bersinergi dan menyiapkan kapasitas PJPK dalam proses penjaminan.

4. Risiko Operasi Dalam Kondisi Pandemi COVID-19

Dalam kondisi pandemi akibat wabah COVID-19 yang berkepanjangan, Perusahaan turut terdampak ketidakpastian akibat memburuknya kondisi ekonomi nasional dan global di tengah keterbatasan mobilitas manusia dan meningkatnya ancaman penyebaran virus COVID-19 terutama dengan adanya varian-varian baru. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, selain mengandalkan program stimulus dan penyelamatan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah secara nasional, Perusahaan telah menyiapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan skenario Perencanaan Keberlanjutan Bisnis atau disebut juga dengan *Business Continuity Planning* (BCP) termasuk penggunaan teknologi informasi dalam berkomunikasi dan dokumentasi rutin dalam rangka pembatasan interaksi secara fisik dengan tetap menjaga produktivitas dan keberlangsungan bisnis. Perusahaan juga melakukan analisis *stress test* dan perhitungan proyeksi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat pandemi. Selain itu Perusahaan mengadopsi penerapan protokol kesehatan yang mengacu pada peraturan dan regulasi yang berlaku dengan mengkampanyekan kewaspadaan dan perilaku hidup sehat selama pandemi berlangsung, termasuk pemberian vaksin bagi insan Perusahaan dan keluarganya.

5. Risiko Pasar

Sebagai institusi keuangan yang mengelola dana yang sangat besar untuk mendukung kapasitas penjaminan, Perusahaan selalu memiliki eksposur Risiko Pasar yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga. Namun karena pada periode berjalan Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material maka perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional tidak berdampak signifikan terhadap laba rugi setelah pajak Perusahaan. Dari segi investasi, investasi Perusahaan terutama terdiri dari deposito dan investasi dengan pendapatan tetap dan berjangka pendek dengan kategori tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar tidak berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan bunga Perusahaan. Dari segi liabilitas keuangan, Perusahaan

memiliki pinjaman penerusan dengan suku bunga variabel yang menggunakan *SUN Benchmark* dengan tenor 20 tahun. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan bagi beban bunga Perusahaan.

6. Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas

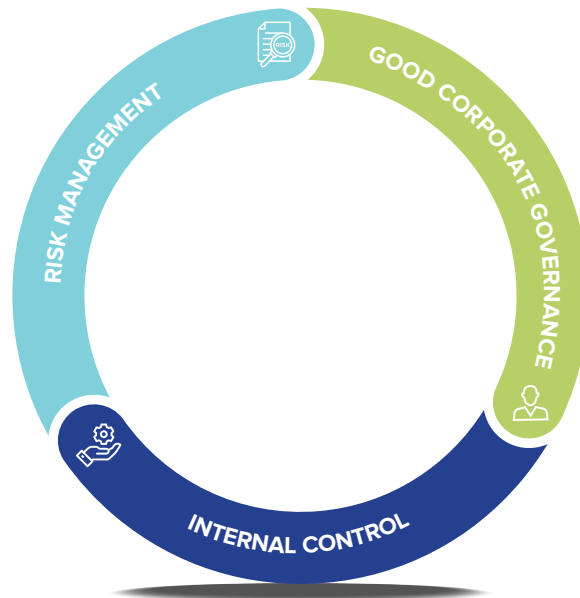
Dalam mengelola portofolio investasi yang sangat besar, Perusahaan selalu menghadapi risiko kegagalan pengembalian investasi dan kegagalan Perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo akibat gangguan arus kas dan/atau kesulitan pendanaan. Untuk memitigasi Risiko Kredit, Perusahaan menetapkan kebijakan investasi yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta mengatur mandat investasi untuk jenis, batasan alokasi, serta kriteria *counterparty* yang selektif, mengacu pada regulasi dan kebijakan yang berlaku. Untuk Risiko Likuiditas, Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan karena memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi yang dikelola dengan memantau arus kas perkiraan dan actual, serta menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan. Serta sebagai *contingency plan*, pada limit tertentu, Perusahaan akan mengupayakan dukungan bantuan likuiditas kepada Kementerian Keuangan dan/atau Lembaga Keuangan jika dibutuhkan.

Penjelasan Mengenai Sistem Manajemen Risiko yang Diterapkan Perusahaan

Pengelolaan manajemen risiko di PT PII dilakukan secara terintegrasi dengan strategi dan proses bisnis. Penerapan manajemen risiko bersifat proaktif dan memandang ke depan dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi, memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan.

Dalam menerapkan manajemen risiko PT PII menggunakan pendekatan Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management*) atau disebut juga dengan ERM, secara holistik dan terintegrasi yang disusun dalam suatu Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perusahaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan manajemen risiko di seluruh organisasi.

Selain menjalankan peran fungsi Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko PT PII juga membantu memberikan pendampingan dan konsultasi pada proses kepatuhan sebagai bagian dari implementasi GCG dan pengendalian internal.



Berbeda dengan fungsi audit internal yang ditempatkan setelah transaksi, kajian atas kepatuhan (*compliance review*) dirancang sebagai salah satu alat pengelolaan risiko sebelum transaksi dilakukan. Fungsi *compliance* bertugas untuk memastikan terpenuhinya prasyarat terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta proses penjaminan di dalam proyek. Fungsi kepatuhan memberikan peringatan lebih awal kepada manajemen dalam pengawasan aspek kepatuhan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Penjelasan Mengenai Hasil Telaah yang Dilakukan atas Sistem Manajemen Risiko Tahun 2021

Evaluasi efektivitas pelaksanaan pengelolaan risiko PT PII dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, di antaranya memasukkan aspek Manajemen Risiko dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Korporasi, audit dengan pendekatan berbasis risiko, *review* implementasi dan pemantauan dan pelaporan kepada pemangku kepentingan secara berkala. Dalam pelaksanaannya, Divisi Manajemen Risiko secara berkala melakukan evaluasi efektivitas sistem Manajemen Risiko korporat dengan memantau pergerakan tingkat risiko dalam

profil risiko Perusahaan. Hasil pemantauan tersebut akan dilihat lebih dalam lagi dengan menganalisis efektivitas rencana pengelolaan risiko yang sudah diformulasikan dan diterapkan. Hasil laporan profil risiko ini disampaikan kepada Direksi dan Komisaris secara berkala. Realisasi KPI penurunan risiko sejumlah 7,2% dari target sebesar 7,0% di tahun 2021.

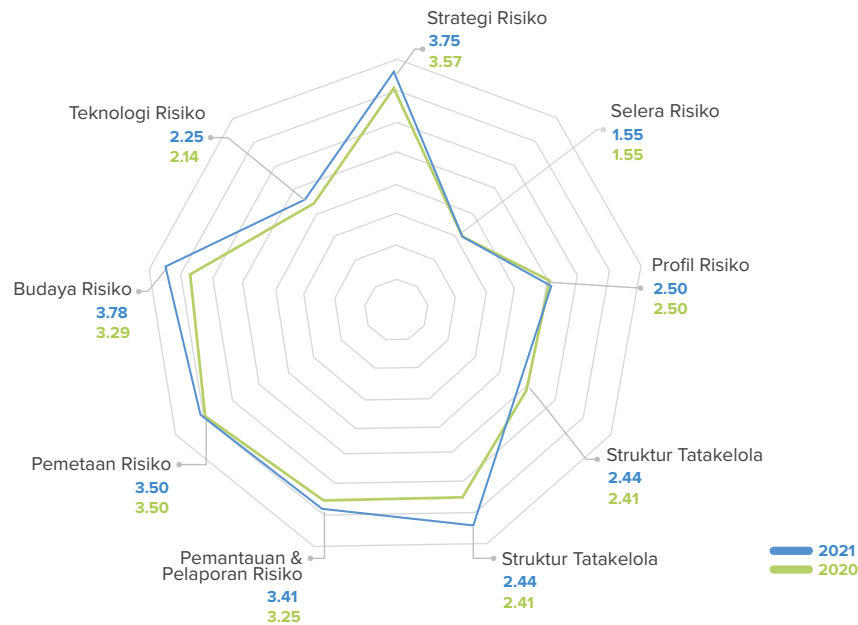
Pada tahun 2021 penurunan jumlah risiko telah mencapai target tersebut. Beberapa risiko mengalami penurunan tingkat risiko dikarenakan telah adanya kemajuan dari status pelaksanaan mitigasi risiko. Pemantauan kegiatan mitigasi risiko yang telah dilakukan akan terus dilanjutkan untuk memastikan bahwa tingkat risikonya tidak meningkat atau membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

Penilaian Maturitas Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan Penilaian Maturitas Manajemen Risiko dengan hasil sebagai berikut:



**Grafik Maturitas Manajemen Risiko
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Tahun 2021 & 2020**



Secara umum tingkat maturitas manajemen risiko korporat di PT PII untuk periode 2021 adalah *Defined* dengan nilai 3,18. Dengan tingkat kematangan tersebut, telah terdapat kerangka manajemen risiko Perusahaan yang mencakup semua risiko utama. Prinsip-prinsip manajemen risiko standar didefinisikan dan didokumentasikan, pelatihan dasar dilakukan. Proses manajemen risiko yang konsisten dengan komunikasi dan akuntabilitas ada di seluruh unit bisnis tetapi tidak semua proses telah diterapkan sepenuhnya. Kegiatan dan proses manajemen risiko telah terdefinisikan dan terstandardisasi serta menjadi bagian dari kegiatan Perusahaan.

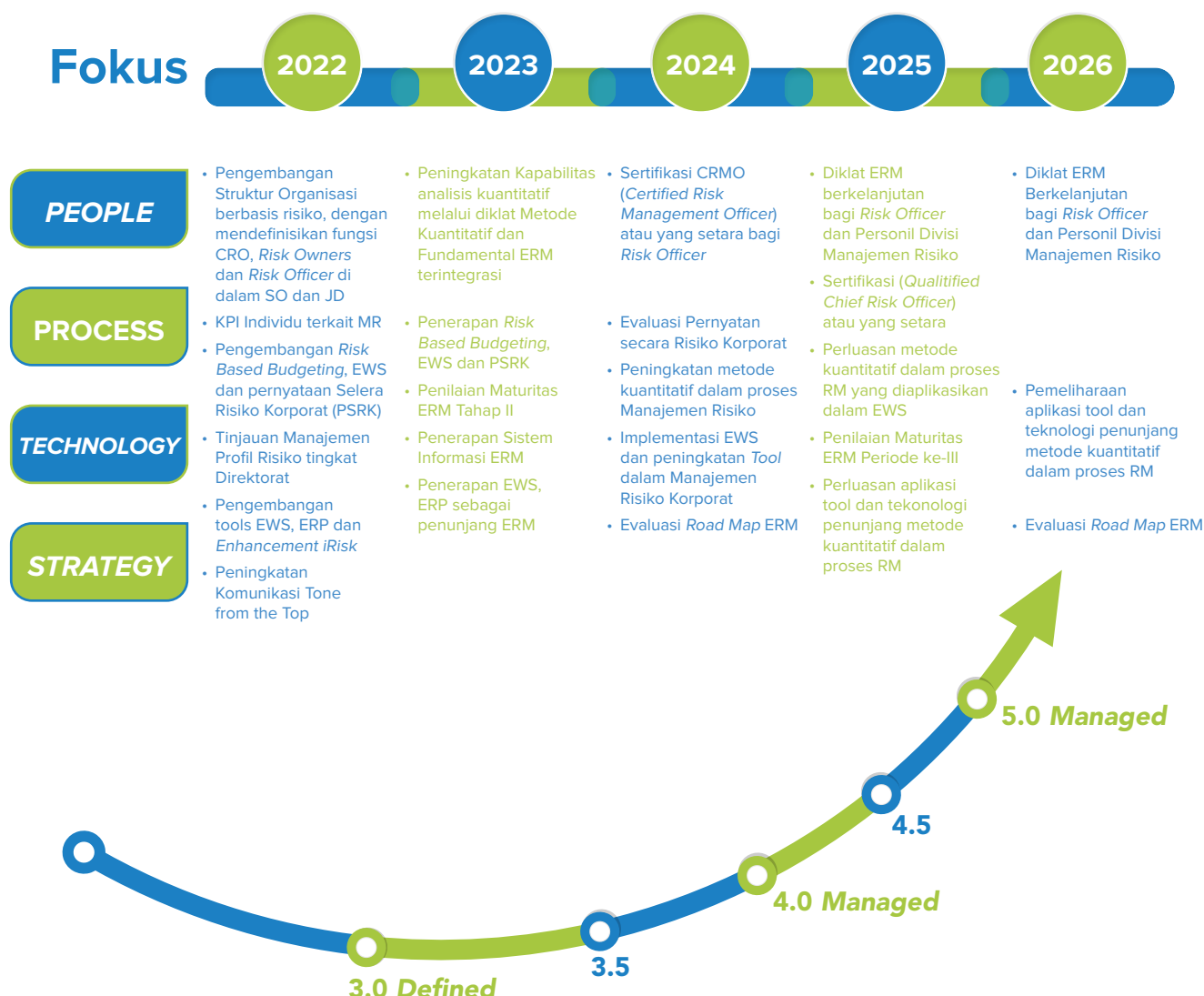
Beberapa aspek yang telah berjalan dengan baik dan perlu terus dipelihara antara lain manajemen risiko menjadi proses yang melekat dalam operasional sehari-hari, telah terdapat metodologi pemantauan dan peninjauan risiko yang formal yang memungkinkan analisis dan respons yang lebih baik untuk pengambilan keputusan pada proses bisnis utama, peta risiko yang mengindikasikan sumber risiko, pemilik risiko dan tingkat risiko pada proses-proses bisnis yang ada, yang digunakan untuk tujuan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan.

Klasifikasi Tingkat Kematangan





PETA JALAN MANAJEMEN RISIKO KORPORAT (ERM) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)-Proyeksi ke Depan



Sistem Informasi Manajemen Risiko

Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan Manajemen Risiko menggunakan aplikasi komputer berbasis web yang disebut i-RISK. Aplikasi ini digunakan untuk mengotomatisasi keseluruhan proses manajemen risiko serta menampilkan dashboard untuk keperluan analisis dan monitoring risiko. Risk Officer dan Risk Owner dapat memberikan input atas risiko pada aplikasi ini sehingga dapat mempermudah identifikasi risiko dan formulasi rencana pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Divisi serta Perusahaan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris menilai bahwa Manajemen mempunyai komitmen yang kuat dalam melaksanakan dan meningkatkan praktik manajemen risiko secara berkesinambungan serta memiliki peran strategis sebagai ring fencing pengelolaan risiko fiskal pemerintah melalui kegiatan penjaminan dan pendampingan KPBU dan Non-KPBU termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini dapat dibuktikan dari pengembangan dan penerapan Kerangka Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management Framework) di tahun 2021 yang mengacu pada ISO 31000:2018 serta perintisan dan pengembangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis SNI ISO 37001:2016 di tahun 2021. Selain dibuktikan dengan peningkatan kinerja pada pencapaian Indikator Kinerja Utama di 2021, reputasi praktik manajemen risiko yang baik juga telah terbangun dengan penganugerahan sebagai pemenang Risk Champion Award, Public Initiative dan runner up GRC Award pada ASEAN Risk Awards di tahun 2021.

Direksi berpendapat bahwa pengembangan dan penerapan praktik manajemen risiko perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan baik dari segi kapabilitas sumber daya, teknologi dan metodologi yang dikembangkan dari *best practice* seiring dengan semakin meningkatnya tantangan dan tuntutan dunia usaha termasuk harapan para pemangku kepentingan di tengah perkembangan ekonomi yang sangat dinamis dan memiliki dampak ketidakpastian yang perlu diantisipasi lebih dini. Hal ini antara lain telah diwujudkan dengan program pengembangan *Risk Officer (Risk Officer Development Program)* yang mencakup seluruh divisi serta program Penilaian Maturitas Manajemen Risiko (*Risk Maturity Assessment*) yang telah dilaksanakan di tahun 2021. *Risk Officer Development Program* dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan dan Praktek Penerapan Proses Manajemen Risiko Korporat bersama Divisi Manajemen Risiko, termasuk pelaksanaan *Risk Control Self-Assessment (RCSA)* di seluruh divisi dan program terkait pengelolaan dan pemantauan risiko secara terintegrasi. Dengan program-program tersebut, yang didampingi oleh Divisi Manajemen Risiko, diharapkan para *Risk Officer* dapat berperan secara maksimal dalam membantu para pemilik risiko (*Risk Owner*) dalam mengelola, menjalankan dan memonitor pelaksanaan proses manajemen risiko di divisi dan unit kerja masing-masing. Melalui program *Risk Maturity Assessment* telah disusun Peta Jalan (*Road Map*) peningkatan maturitas manajemen risiko Perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Peta jalan tersebut akan dievaluasi secara berkala dan disesuaikan jika diperlukan mengikuti perkembangan dan dinamika manajemen risiko Perusahaan.

Berdasarkan penerapan Proses Manajemen Risiko Korporat secara keseluruhan melalui metodologi *Risk-Control Self-Assessment (RCSA)* dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian risiko Perusahaan sebagian besar telah sepenuhnya memadai.

PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF

PERMASALAHAN HUKUM

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2021 dan/atau telah dinyatakan selesai di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Perkara yang Dihadapi Perusahaan

Selama tahun 2021 terdapat 2 (dua) Perkara Penting yaitu :

1. Gugatan yang diajukan Herman Syahroni kepada PT PII pada 7 Januari 2021 yang mana setelah melaksanakan proses persidangan, PT PII memperoleh kemenangan berdasarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 15 November 2021 memutuskan gugatan tidak diterima.
2. Permintaan Klarifikasi I oleh Ombudsman RI kepada PT PII pada 7 september 2021 perihal laporan PT Motomo Karya Persa mengenai dugaan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh SVP PT PII terkait pembayaran pekerjaan bukaan jedela di kantor PT PII. Hingga saat ini proses pemanggilan oleh Ombudsman masih berlangsung dan menunggu rekomendasi oleh Ombudsman.

Perkara yang Dihadapi Entitas Anak

Hingga 31 Desember 2020, PT PII tidak memiliki entitas anak sehingga tidak terdapat perkara hukum yang melibatkan Entitas Anak

Perkara yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2021, tidak terdapat perkara hukum yang melibatkan Dewan Komisaris yang sedang menjabat dan tidak terdapat perkara hukum yang melibatkan Direksi yang sedang menjabat.

Sanksi Administrasi dari Regulator

Hingga 31 Desember 2021, tidak terdapat sanksi administrasi yang diberikan kepada Perusahaan oleh Regulator.



AKSES DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN



Perusahaan terus mendorong pengungkapan informasi secara tepat waktu, akurat lengkap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari perwujudan prinsip transparansi informasi. Untuk itu Perusahaan menyediakan akses informasi seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan dan investor melalui situs Perusahaan di <https://ptpii.co.id/>

Akses Data dan Informasi Perusahaan disajikan dalam bentuk: Informasi pada *website* Perusahaan Perusahaan telah menyajikan informasi yang meliputi:

1. Informasi pemegang saham;
2. Isi kode etik
3. Informasi RUPS yang terdiri dari mata acara, ringkasan risalah RUPS, informasi tanggal pengumuman RUPS dan tanggal ringkasan RUPS diumumkan
4. Profil Dewan komisaris dan Direksi
5. Piagam Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite dan unit audit internal

Siaran Pers

PT PII secara aktif mempublikasikan setiap kejadian atau kegiatan penting dalam bentuk siaran pers yang tersedia di situs Perusahaan.

Sepanjang tahun 2021, PT PII telah menerbitkan 21 (dua puluh satu) siaran pers dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Judul
10 Februari 2021	Kemenkeu dan PT PII Dukung PT PLN pada Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Jawa Timur dan Bali
19 Februari 2021	PT PII Berikan Penjaminan Pemerintah pada Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur 1
22 Februari 2021	Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan telah Mencapai <i>Financial Close</i>
26 Februari 2021	PT PII dan PT SMF Melaksanakan Penandatanganan MoU terkait KPBU untuk Sektor Perumahan dan Permukiman
12 April 2021	PT PII Berikan Penjaminan pada Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Riau
3 Mei 2021	PT PII Berikan Penjaminan Pemerintah pada Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Karian-Serpong
8 Juni 2021	Dorong Ekonomi Digital dan Fasilitasi Pendidikan Tinggi Di Masa Pandemi Melalui Investasi Infrastruktur
3 Agustus 2021	Dorong Peningkatan Kapasitas SDM, PT PII Laksanakan Program <i>Secondment</i> Kementerian Keuangan Periode II 2021
13 Agustus 2021	PT PII Raih PPP <i>Agency of the Year</i> Se-Asia yang Ketiga kalinya
14 Agustus 2021	PT PII Dukung Percepatan Infrastruktur Logistik Jawa Barat Melalui Skema KPBU dan Penjaminan Pemerintah
14 Agustus 2021	PT PII Melaksanakan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Urban Farming untuk Warga Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen
18 Agustus 2021	Proyek KPBU Satelit Multifungsi Satria yang Dijamin PT PII Capai <i>Ground Breaking</i> untuk Beroperasi 2023
24 Agustus 2021	PT PII Memberikan Bantuan Kursi Roda Adaptif dan Modal Usaha untuk Masyarakat Jawa Barat
27 Agustus 2021	PT PII Memberikan Senyum Baru untuk Penderita Bibir Sumbing di Sebagian Wilayah Jabodetabek dan Sumatera
3 September 2021	Gandeng Universitas Indonesia Tekan Angka Stunting, PT PII Siapkan CSR “Bergizi dari Bumi Kami” di Labuan Bajo
10 September 2021	PT PII Berikan Pelatihan Transformasi Kepemimpinan Perangkat Desa di Kabupaten Badung, Bali
13 September 2021	Sebagai Wujud Kepedulian Lingkungan, PT PII Melaksanakan Program CSR Pemberdayaan Ekonomi Kreatif <i>Urban Farming</i>
18 Oktober 2021	PT PII Laksanakan CSR Pendidikan ‘Program Membangun Pendidikan Karakter Berbasis <i>Parenting</i> ’ di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT
21 Oktober 2021	PT PII dan IPB Dorong UMKM Perikanan di Sekitar Proyek Tol Semarang – Demak, Jawa Tengah
1 Desember 2021	Program CSR Pengelolaan Hutan <i>Mangrove</i> Berbasis Masyarakat melalui Budi Daya Udang Berkelanjutan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
6 Desember 2021	PT PII Berikan Penjaminan Pemerintah pada Proyek KPBU Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa



MEDIA MASSA

PT PII selalu memuat informasi yang perlu diketahui oleh publik sebagai bentuk transparansi bagi para pemangku kepentingan dalam surat kabar berperedaran nasional,



KONTAK PERUSAHAAN

Perseroan secara terbuka menyiapkan jalur komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui email untuk mengakomodir berbagai pertanyaan terkait PT PII dengan menghubungi:

KANTOR PUSAT

Capital Place, 7-8 Floor Jl. Gatot Subroto No.Kav 18, RT.6/
RW.1, Kuningan Barat., Kec. Mampang Prapatan., Kota
Jakarta Selatan



+62 21 5795 0550



+62 21 5795 0040



Info@iigf.co.id



[PT PII - Persero](#)



[@pii_persero](#)



[@PII_Persero](#)

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Di era digital saat ini, Teknologi Informasi (TI) sangat berperan penting untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perusahaan. Bagi Perusahaan, TI merupakan salah satu kebutuhan wajib yang perlu diperhatikan secara seksama.

Era pandemi membawa berbagai perubahan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan, dimana seluruh pekerjaan telah berbasiskan dan perlu didukung oleh Teknologi Informasi.

PT PII terus meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana TI secara berkala, khususnya keamanan penggunaan TI. Komitmen untuk menjaga *Cyber Security* menjadi tantangan yang dihadapi oleh PT PII. PT PII berkomitmen untuk menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) data sebagai hal yang semakin

krusial saat ini. Upaya memperkuat *Cyber Security* didukung oleh berbagai perangkat yang memadai di PT PII.

Melalui layanan berbasis TI, PT PII berharap mampu meningkatkan dan memudahkan proses bisnis Perusahaan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen dan semangat Perusahaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi PT PII.

Roadmap Pengelolaan Teknologi Informasi

Perusahaan telah menyusun dan menerapkan *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai acuan pengembangan TI. ITMP yang dijadikan acuan dalam pengembangan teknologi informasi serta diimplementasikan pada jangka waktu periode 2018-2023, dengan review terakhir dilakukan tahun 2021.

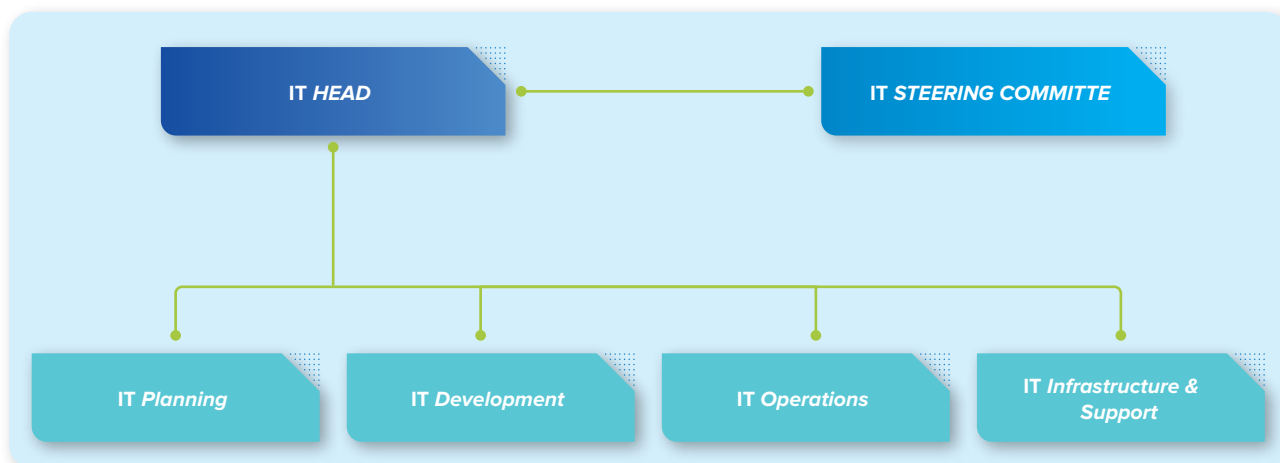
Tahapan *roadmap* pengelolaan TI Perusahaan adalah sebagai berikut:



Penanggung Jawab Pengelolaan Teknologi Informasi

Secara organisasi, pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Perusahaan berada di Divisi CSP-IT. Pengelolaan TI dilaksanakan bersama dengan Komite Pengarah TI dalam rangka implementasi ITMP. Dalam pengelolaan TI terdapat bagian-bagian yang bertanggung jawab atas berjalannya tata kelola teknologi informasi, bagian dimaksud adalah: Perencanaan TI, Pengembangan TI, Operasional TI serta bagian sarana dan pendukung.

Secara struktur organisasi, Perusahaan menetapkan Komite Pengarah TI dengan Direktur Utama sebagai *team leader* Komite Pengarah TI.



Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI sebagai berikut:

Jabatan	Deskripsi Pekerjaan
Team Leader	- Menyetujui prosedur dan kebijakan pemantauan <i>Master Plan</i> TI. - Bertanggung jawab atas penyelesaian rencana kegiatan yang tercantum dalam <i>Roadmap</i> TI. - Menyampaikan keterbukaan informasi atas nama Komite Pengarah TI.
Team Member	- Melakukan telaah untuk memastikan investasi dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan dan prioritas bisnis yang tertuang dalam <i>Master Plan</i> TI. - Memantau dan mengevaluasi efektivitas penerapan Kebijakan TI di lingkungan Perusahaan. - Melakukan <i>review</i> terhadap kinerja Tata Kelola TI secara periodik. - Memberikan persetujuan terhadap inisiatif dan rencana investasi TI untuk mendukung layanan TI kepada <i>user</i> dan <i>customer</i>. - Mengidentifikasi perwakilan yang akan ditugaskan di Komite Pengarah TI serta pihak berwenang bila ada eskalasi masalah terkait Proyek TI. - Memberikan data/informasi terkait tren TI ke depan. - Menyampaikan masalah utama terkait proyek TI maupun kemampuan para pihak dalam Proyek dalam memenuhi kewajiban kontraknya. - Menganalisis dan mengajukan kebutuhan untuk menggunakan jasa konsultan atau ahli terkait dengan Proyek TI. - Membuat anggaran tahunan Komite Pengarah TI. - Memfasilitasi penyelesaian masalah dengan pihak terkait TI.

Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Sesuai dengan IKU perusahaan, PT PII berencana melakukan implementasi ERP sebagai aplikasi terintegrasi untuk membantu operasional Perusahaan. Sebagai sebuah inisiatif yang penting dan mempengaruhi banyak proses internal, proses *assessment*, kajian *risk management*, *approval*, proses pengadaan memakan waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2021, PT PII berhasil melakukan proses *assessment* sampai proses pengadaan untuk proyek implementasi ERP (*procure to pay*) dan proyek ini ditargetkan *live* pada Q3 2022.

Dalam rangka mendukung *new ways of working*, PT PII telah mengimplementasikan platform *kolaborasi* berbasis *cloud*. Dengan platform *kolaborasi* berbasis *cloud*, insan PT PII yang dapat mengakses dokumen kerja dari mana saja dan kapan saja dengan jaminan *uptime* 99,9% dan keamanan data Perusahaan kelas dunia. Insan PT PII dapat melakukan *kolaborasi* kerja lintas divisi bahkan dengan pihak eksternal, *online meeting and conference*, *webinar*, *email*, serta penyimpanan dokumen yang *secure* dan terintegrasi.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan automasi proses bisnis internal, PT PII juga telah berhasil mengembangkan aplikasi *E-Office*. Aplikasi *E-Office* dibangun di atas *cloud secure environment* yang digunakan untuk kegiatan surat menyurat. Kedepannya aplikasi *E-Office* juga akan dikembangkan untuk automasi proses internal lainnya.

Strategi dan Kebijakan serta Pengembangan Teknologi Informasi Perusahaan Tahun 2021

PT PII mengembangkan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan memberikan nilai lebih terhadap percepatan bisnis melalui fokus dan kebijakan strategis di bidang TI. Melalui Divisi CSP-IT, Perusahaan mengelola dan mengembangkan TI yang terarah dan efektif dalam menyediakan layanan sesuai dengan standar ekspektasi dan kebutuhan Perusahaan. Di tahun 2021, PT PII telah mengembangkan strategi dan inisiasi di bidang TI sebagai berikut:

1. Strategi 1 : Memperkuat dan meningkatkan stabilitas Infrastruktur dan Sistem di IT.
2. Strategi 2 : Meningkatkan performansi IT *Operation* untuk mendukung kegiatan Perusahaan.
3. Strategi 3 : Mengembangkan kapabilitas Divisi IT sebagai *business-enabler* di Perusahaan.

Dengan fokus strategi tersebut, di sepanjang tahun 2021 Perusahaan melakukan beberapa inisiatif dari strategi tersebut yaitu :

1. Implementasi *platform* berbasis *cloud* sebagai *tools* untuk kolaborasi antar karyawan PT PII.
2. Implementasi aplikasi *E-Office* untuk membantu kegiatan surat menyurat.
3. Pengembangan Aplikasi ERP (*procure to pay*).
4. Pengembangan Aplikasi *Project Information System*.
5. Pengembangan Aplikasi *Website IIGF Institute*.
6. Memastikan kesinambungan strategi IT yang selaras dengan strategi bisnis melalui *review ITMP*.
7. Memastikan kepatuhan tata kelola proses di IT melalui *assesment IT Maturity* dengan *framework* COBIT 4.1 di tahun 2021 dan COBIT 2019 untuk tahun 2022 dan seterusnya.
8. Peningkatan IT *security* melalui implementasi fungsi *Cybersecurity*, remediasi infrastruktur dan aplikasi secara rutin, dan adopsi teknologi *cloud*.

PT PII memberikan perhatian dan prioritas yang tinggi atas integritas dan keamanan jaringan teknologi informasi Perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan Perusahaan dalam mengantisipasi terjadinya potensi kejahatan siber antara lain dengan melakukan penguatan pengamanan jaringan IT dan *monitoring* secara berkala.

Hingga saat ini, operasional bisnis PT PII tetap berjalan dengan normal dan secara aktif senantiasa dilakukan *monitoring* intensif terhadap seluruh jaringan IT Perusahaan. Berbekal pengalaman tersebut, PT PII telah melakukan perbaikan baik dari sisi infrastruktur pendukung maupun peningkatan *awareness* karyawan guna memastikan keamanan jaringan yang mendukung keberlanjutan operasional Perusahaan.

Dengan seluruh pelaksanaan kegiatan Teknologi Informasi di atas, di tahun 2021 PT PII telah menginvestasikan biaya mencapai Rp6.583.000.000, mengalami penurunan 12% atau setara dengan sebesar Rp918.000.000 dibandingkan tahun 2020, atau mencatat pencapaian 45% dibandingkan anggaran tahun 2021. Besaran investasi untuk pengembangan Teknologi Informasi dapat dilihat pada tabel berikut.

	Realisasi 2021 (Rp-juta)	Anggaran 2021 (Rp-juta)	Penyerapan Anggaran 2021 (%)		Realisasi 2020 (Rp-juta)	Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020 (%)	
	1	2	(1:2)		3	(1:3)	
Investasi Teknologi Informasi	6.583	14.596	45%	-	7.501	87%	-

Realisasi investasi pengembangan Teknologi Informasi tahun 2021 diperuntukkan bagi pengembangan teknologi informasi sesuai dengan yang telah disebutkan.

Rencana ke Depan

PT PII akan tetap menjadikan teknologi informasi sebagai *enabler* untuk mencapai tujuan Perusahaan. *Emerging technologies* seperti *cloud computing*, *digital applications*, *big data*, *process automation*, *artificial intelligence* & *machine learning* akan menjadi tema yang akan dieksplorasi lebih jauh oleh PT PII kedepannya untuk memastikan *value creation* terhadap bisnis PT PII secara umum. Selain itu PT PII juga menaruh perhatian besar terkait dengan *cybersecurity* untuk memastikan aset informasi Perusahaan dapat dilindungi dengan baik, serta terhindar dari risiko yang dapat mempengaruhi reputasi PT PII dan proses operasional.

Pengembangan IT kedepannya akan berfokus pada tiga tema strategi IT yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Fokus utama tahun 2022 dalam pengembangan IT meliputi dukungan ke Bisnis dengan melanjutkan proyek implementasi ERP dan meningkatkan kehandalan dan stabilitas layanan infrastruktur melalui proyek migrasi *server* ke *cloud*, yang didukung dengan peningkatan kerjasama layanan menggunakan skema *managed services*.



KODE ETIK PERUSAHAAN

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan membutuhkan integritas, komitmen profesionalitas dan keunggulan yang mencerminkan aspirasi Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Mitra Usaha, Pemasok (*Suppliers*), Kreditur, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Untuk itu, PT PII berkomitmen untuk melaksanakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*“Good Corporate Governance”* atau GCG”).

Untuk menunjukkan komitmen tersebut, program penerapan praktik GCG telah dicanangkan dan berbagai inisiatif telah dilakukan. Pengembangan Kode Etik PT PII merupakan salah satu elemen penting dalam kerangka penerapan praktik-praktik GCG bagi PT PII. Pedoman Kode Etik PT PII merupakan sekumpulan komitmen etika perilaku bagi PT PII sebagai Perusahaan dan segenap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang disusun dan digunakan sebagai pedoman untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan tingkah laku yang konsisten berdasarkan prinsip kesadaran etis (*ethical sensibility*), berpikir etis (*ethical reasoning*), dan berperilaku etis (*ethical conduct*) sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan.

Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan sebagai Fondasi bagi Kode Etik dan Pedoman Perilaku

PT PII dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi budaya yang hidup dalam organisasi PT PII. Saat ini PT PII telah memiliki nilai-nilai budaya yang dikenal sebagai InTIME, yakni *Integrity*, *Teamwork*, *Thinking Big*, *Mutual Trust* dan *Excellence*.

Nilai-Nilai Utama: InTIME *Integrity/Integritas*

1. Bekerja dengan standar etika tertinggi.
2. Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam segala urusan.
3. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak-pihak lain.
4. Menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas.
5. Mentaati aturan Perusahaan.
6. Bertanggung jawab dalam seluruh tindakan.

Teamwork/Kerja Sama

1. Beroperasi sebagai sebuah tim.
2. Memberi kontribusi keterampilan dan pengetahuan demi kepentingan tim.
3. Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Think Big/Berpikiran Luas

1. Memiliki pemikiran luas dan mutakhir.
2. Mempertimbangkan berbagai alternatif untuk hasil yang lebih baik bagi Perusahaan dan bagi pemangku kepentingan.
3. Menggali secara terus menerus ide-ide baru untuk perkembangan Perusahaan.
4. Terbuka terhadap berbagai perkembangan yang ada di lingkungan demi hasil terbaik tanpa meninggalkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Mutual Trust/Saling Percaya

1. Memegang teguh etika bisnis bersama seluruh komponen internal Perusahaan maupun dengan mitra Perusahaan.
2. Konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan.
3. Mempercayai dan menghormati satu sama lain dengan itikad baik untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan mitra bisnis.

Excellence/Keunggulan

1. Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam melaksanakan apapun yang dilakukan.
2. Berusaha untuk melakukan perbaikan yang terus menerus.
3. Memiliki pengetahuan mendalam guna mendukung kegiatan dan mendapatkan hasil yang melebihi harapan.

Isi Pedoman Kode Etik PT PII

Pokok pengaturan dalam Pedoman Kode Etik mencakup:

1. Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Integritas;
3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundangan;
4. Benturan Kepentingan;
5. Etika Profesional dalam Bekerja;
6. Etika dalam Berhubungan dengan Pemangku Kepentingan;
7. Keterlibatan dalam aktivitas politik;
8. Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
9. Pelaporan keuangan;
10. Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi;
11. Komitmen terhadap Perlindungan Aset Perusahaan;
12. Mekanisme penegakan Pedoman Kode Etik Perusahaan termasuk pelaporan dan sanksi atas pelanggaran.

Pengungkapan Keberlakuan Kode Etik

Kode Etik Perusahaan berlaku bagi setiap Insan Perusahaan tanpa pengecualian. Kandungan dari nilai-nilai Perusahaan selalu disosialisasikan kepada seluruh pegawai.

Setiap tahun, seluruh pegawai dan manajemen PT PII membuat pernyataan kepatuhan terhadap Kode Etik dengan menandatangani Pernyataan Kepatuhan Tahunan. Untuk karyawan yang baru direkrut akan memperoleh pedoman Kode Etik Perusahaan dan menandatangani pernyataan untuk mentaati seluruh isi Kode Etik Perusahaan.

Penegakan Kode Etik

Untuk mengawal implementasi tersebut, Perusahaan menerapkan sistem *reward* dan *punishment* secara tegas selain mewajibkan manajemen dan karyawan untuk menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap pelaksanaan Kode Etik Perusahaan.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Perusahaan menghormati hak membela diri dari Insan Perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan.

Jika melalui penyelidikan terbukti Insan Perusahaan yang dilaporkan melakukan pelanggaran, maka sanksi akan diberikan dengan menetapkan tingkat pelanggaran, sanksi pelanggaran dan pihak yang berwenang mengeksekusi sanksi, yang sesuai dengan peraturan Perusahaan atau ketentuan yang berlaku.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi yang Diberikan

Pada tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran kode etik, sehingga dengan demikian tidak terdapat sanksi yang diberikan.

KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI

PT PII senantiasa mengutamakan pengelolaan Perusahaan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. PT PII menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai GCG utamanya *integrity and transparency* kepada seluruh pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, *vendor*, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga hubungan bisnis tetap berada pada koridor etika dan prinsip-prinsip GCG serta guna mewujudkan pengelolaan bisnis Perusahaan yang bersih, sehat dan bermartabat, maka Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap pengendalian gratifikasi. Untuk mendukung hal tersebut, maka Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. SK-005/BOD/CSC/1018 dan No. KEP-10/KOM/PII/10/2018. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi Perusahaan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT PII.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pedoman gratifikasi adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Insan Perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi gratifikasi di lingkungan PT PII;
2. Sebagai bentuk tanggung jawab PT PII dalam mewujudkan pola bisnis yang sehat dan terpercaya, dengan berdasar pada pengelolaan Perusahaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;



3. Menghindari benturan kepentingan dari pihak tertentu yang diwujudkan melalui kebijakan formal; dan
4. Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman merupakan hal-hal yang terkait dengan penerimaan dan pemberian segala bentuk gratifikasi, klasifikasi tindakan gratifikasi, batasan, serta pelaporan penerimaan dan pemberian yang berlaku bagi Insan Perusahaan dan seluruh *stakeholders*.

Prinsip Dasar

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, penyusunan pedoman didasarkan oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi

Prinsip keterbukaan ini tercermin dengan adanya mekanisme pelaporan atas penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan PT PII. Mekanisme pelaporan tersebut merupakan sarana bagi Insan Perusahaan untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku Insan Perusahaan.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas diimplementasikan sebagai bentuk kewajiban dari Insan Perusahaan yang telah diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam jabatan yang diembannya, untuk tidak menerima pemberian yang tidak wajar dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya dan melaporkannya kepada fungsi yang diberikan kewenangan untuk mengelola laporan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

3. Independensi

Bagi penerima gratifikasi yang melaporkan hasil penerimaan gratifikasi, prinsip independensi ini ditunjukkan dengan sikap menolak pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

Perlindungan Pelapor

Pelapor pelanggaran gratifikasi dapat dikualifikasikan sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf (a) UU No. 30/2002. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, diwajibkan adanya perlindungan terhadap pelapor gratifikasi dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor.

Media Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada Unit Pengendali Gratifikasi melalui:

1. Website PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. Melalui surat, dengan alamat sebagai berikut:
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Gedung Capital Place, Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710;
3. E-mail: pelaporan@iigf.co.id

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Kebijakan pengendalian gratifikasi ini telah disosialisasikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan melalui kegiatan *workshop*, portal internal, dan *website* Perusahaan. Tujuan dari sosialisasi adalah memberikan *awareness* kepada seluruh Insan Perusahaan atas penerapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Laporan Pengendalian Gratifikasi 2021

Sepanjang tahun 2021, terdapat 1 (satu) laporan terkait Penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Unit Pengendali Gratifikasi. Dapat disampaikan bahwa penerimaan gratifikasi dimaksud berdasarkan ketentuan 2.3 Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT PII merupakan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Namun demikian Penerima Gratifikasi baik untuk melakukan pelaporan dan menyerahkan gratifikasi yang diterima kepada Unit Pengendali Gratifikasi. Hal ini mencerminkan bahwa PT PII telah membentuk budaya perilaku jujur sejalan dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian gratifikasi yang telah ada diharapkan dapat mencegah potensi terjadinya tindakan korupsi dan benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan.

Adapun rincian laporan pengendalian gratifikasi sebagai berikut:

Jenis Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan
Laporan Penerimaan Gratifikasi	1
Laporan Penolakan Gratifikasi	Nihil
Laporan Pemberian Gratifikasi	Nihil
Laporan Pemberian atas Permintaan Gratifikasi	Nihil

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

PT PII telah mengatur tentang kebijakan Anti Korupsi yang tertuang di dalam Kode Etik Perusahaan. Selain itu, dalam rangka mendukung penerapan Kebijakan Anti Korupsi, PT PII telah memiliki kebijakan terkait benturan kepentingan, *whistleblowing system* dan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Laporan tahunan ini.

Pada tahun 2021 dalam rangka mensosialisasikan komitmen penerapan anti korupsi dan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, PT PII mengajak dan menghimbau seluruh insan Perusahaan untuk mendukung upaya pencegahan penyuapan dengan menjalankan usaha dengan integritas tinggi serta berkomitmen untuk menjalankan prinsip 4 *No's* yaitu *No Bribery*, *No Kick Back*, *No Gifts*, dan *No Luxurious Hospitality*.





LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Kebijakan LHKPN

PT PII memiliki pedoman dalam pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diatur melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-024/DIR/COS/HR/0817 tentang Penetapan Kebijakan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Kebijakan ini mengatur mengenai pegawai Perusahaan yang wajib melaporkan harta kekayaan, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

Pengelolaan LHKPN

Pengelola pelaksanaan LHKPN di lingkungan PT PII adalah Unit Pengelola LHKPN atau disebut sebagai UPL. Koordinator UPL adalah *Senior Vice President Corporate Service* yang dibantu oleh Admin Instansi dan Admin Unit, yaitu karyawan yang ditunjuk berdasarkan surat tugas. Tugas Koordinator UPL adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan *monitoring* dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN para wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN.
2. Mengingatkan wajib lapor untuk mematuhi kewajiban penyampaian pengelolaan data wajib lapor.
3. Melakukan monitor terhadap Admin Instansi dan Admin Unit dalam melakukan pengelolaan data wajib lapor.
4. Memberikan atau melaksanakan koordinasi terkait pendampingan pengisian LHKPN bagi wajib lapor.
5. Mengusulkan pemberian sanksi hukuman disiplin bagi wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN atau terlambat menyampaikan LHKPN.

Wajib Lapor LHKPN

Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat Struktural di lingkungan PT PII yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan di tahun 2021.

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat PT PII

Nama	Jabatan	Tanggal Lapor
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris Utama	31 Desember 2021
Mariatul Aini	Komisaris	10 Februari 2022
Wahyu Utomo	Komisaris	31 Desember 2021
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	31 Desember 2021
Andre Permana	Direktur Eksekutif Bisnis	31 Desember 2021
Donny Hamdany	Direktur	30 Maret 2022

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Perusahaan tidak pernah melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP).

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sebagai rangkaian kebijakan Perusahaan dalam memberantas terjadinya praktik korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya, serta sebagai wujud komitmen manajemen terhadap implementasi tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PII tanggal 26 April 2018.

Pedoman tersebut memuat aturan dan kaidah-kaidah terkait penerapan WBS di lingkungan Perusahaan yang bertujuan:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari Pemangku Kepentingan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai.
2. Mendorong setiap Insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan/melaporkan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, hukum, standar prosedur operasi, kebijakan manajemen dan hal-hal lainnya yang dipandang dapat merugikan/membahayakan Perusahaan.
3. Meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Perusahaan apabila mekanisme pengendalian internal untuk mencegah pelanggaran tidak berjalan dengan baik.
4. Meningkatkan keyakinan kepada setiap Insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai adanya perlindungan dari hukuman, tindakan balasan dan atau perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil kepada Pelapor apabila yang bersangkutan mengungkapkan pelanggaran, dengan berdasarkan itikad baik dan bukti memadai.
5. Mendukung terwujudnya budaya keterbukaan, akuntabilitas dan integritas.
6. Meningkatkan efektivitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pengendalian internal dan kinerja pegawai maupun organisasi.

Prinsip Dasar Pelaporan

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Integritas dan Profesionalisme

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran manajemen Perusahaan harus berkomitmen dan mendukung sepenuhnya penerapan kebijakan Perusahaan mengenai sistem pelaporan pelanggaran, sehingga tidak ada kesempatan bagi Insan Perusahaan untuk melakukan pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas suatu keputusan/jabatan.

2. Kerahasiaan Data dan Asas Praduga Tak Bersalah

Perusahaan harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pelaporan dari masyarakat dan karyawan terkait dengan pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkungan Perusahaan sehingga terdapat kerahasiaan informasi dan seseorang dianggap tidak bersalah sampai terdapat bukti-bukti yang mendukung kesalahan tersebut.

3. Keadilan

Perusahaan harus sedapat mungkin bertanggung jawab dan bersikap adil terhadap pelaporan pelanggaran dan penyimpangan yang diterima oleh Perusahaan, baik menyangkut karyawan, Direksi maupun Dewan Komisaris.

4. Itikad Baik

Pengungkapan/pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari pada kehendak buruk/fitnah.

Mekanisme Penyampaian Laporan

Pelapor dapat menyampaikan dugaan Pelanggaran melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dan dikelola Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PII (Persero). Apabila pelapor menarik kembali Pelaporan yang telah dilakukan, maka Pelapor wajib memberikan alasan terkait pembatalan pelaporan tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelapor anonim (tanpa identitas).

Saluran Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan menyediakan fasilitas dan media komunikasi saluran pelaporan pelanggaran melalui:

1. *Website* di alamat: www.ptpii.co.id;
2. Surat yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dengan alamat sebagai berikut:
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Gedung Capital Place Lantai 7,
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 18,
Jakarta 12170, Indonesia;
3. *E-mail*: pelaporan@iigf.co.id.

Perlindungan Bagi Pelapor dan Terlapor

Perusahaan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua Pelapor yang menginformasikan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.



Pelapor mendapatkan perlindungan antara lain:

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiannya oleh Perusahaan.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.

Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan dan/atau diskriminasi dan/atau tekanan;
4. Intimidasi dalam segala bentuknya; dan/atau
5. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Pelapor yang tidak berkenan identitasnya dipublikasikan, dijamin kerahasiaan identitas pribadinya, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilaporkan. Dalam keadaan pelaporan sampai ke pengadilan atau kemungkinan proses hukum yang memerlukan kesaksian Pelapor, maka identitas Pelapor akan dibuka.

Sosialisasi WBS

PT PII telah melakukan sosialisasi kepada Insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam rangka memberikan pemahaman tentang WBS yang dikelola secara independen. Kebijakan WBS disosialisasikan melalui kegiatan *workshop*, portal internal, dan *website* Perusahaan.

Jumlah Laporan dan Tindak Lanjutnya Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat pelaporan atas dugaan pelanggaran yang masuk dalam kategori perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/standar terkait dan peraturan internal Perusahaan yang meliputi hal-hal sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran PT PII. Mengingat tidak adanya pelaporan atas dugaan pelanggaran yang disampaikan, maka tidak ada yang perlu ditindak lanjuti.

Uraian	2021	2020
Jumlah pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir	Nihil	Nihil
Jumlah pengaduan yang diproses pada tahun buku terakhir	Nihil	Nihil
Jumlah pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku terakhir	Nihil	Nihil
Jumlah pengaduan yang belum selesai diproses	Nihil	Nihil

07

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN **DAN RUJUKAN KEBERLANJUTAN**





TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

Pada era modern saat ini, Perusahaan dituntut untuk bersinergi bersama menjalankan fungsi *community development*. Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) merupakan suatu cara pandang Perusahaan dalam bersikap dan berperilaku saat berhadapan dengan *stakeholder*. Tujuannya adalah untuk menjaga reputasi Perusahaan yang baik, meningkatkan kompetitif serta membantu memperbaiki kualitas hidup manusia.

Pandemi COVID-19 yang menyebar di berbagai negara termasuk yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 hingga saat ini, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Perlu sinergi bersama antara Pemerintah, BUMN maupun swasta untuk meringankan beban ekonomi maupun sosial dari dampak yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19. Anggaran TJSL Perusahaan yang telah dialokasikan di tahun 2021 menjadi instrumen untuk mendukung Pemerintah dengan menyalurkan dana melalui program dari berbagai sektor kegiatan yang mencakup kesehatan, donasi sosial, hingga pemberdayaan ekonomi pada pelaku UMKM. Dalam pelaksanaan program TJSL, penting bagi Perusahaan untuk dapat memahami dan memetakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan.

Melalui implementasi program TJSL juga sebagai strategi komunikasi untuk menjalin hubungan yang baik kepada para pemangku kepentingan antara lain Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), Pemerintah Daerah, hingga masyarakat. Program TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan disampaikan melalui media komunikasi agar para pemangku kepentingan mengetahui program yang dilaksanakan sebagai bentuk komitmen untuk membangun hubungan yang positif dan juga sebagai upaya untuk menciptakan citra yang baik bagi internal maupun eksternal Perusahaan.

Kontribusi dari implementasi program TJSL yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan bentuk dukungan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan dapat terwujud pada 2030. Oleh karena itu, pelaksanaan program TJSL tidak sebatas pada pelaksanaan kegiatan yang bersifat *charity* namun dapat memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Peranan pelaksanaan program TJSL diharapkan dapat mencapai tujuan penting global yang digagas pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diikuti oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Melalui pelaksanaan program TJSL, PT PII juga berkontribusi mewujudkan tujuan sosial tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat, bebas sampah dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, *industry*, inovasi dan infrastruktur, penanganan perubahan iklim, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Kebutuhan infrastruktur oleh masyarakat yang terus berjalan walaupun di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi dasar PT PII dalam menjalankan mandatnya, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat yang dapat diperoleh dari infrastruktur yang dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat juga menjadi komitmen pelaksanaan program TJSL yang dapat memberikan manfaat bersama dan kontribusi positif untuk masyarakat dengan mengedepankan kebutuhan sosial dengan mendukung perencanaan strategi Perusahaan dengan fokus menciptakan manfaat bersama atau *Creating Shared Value* (CSV) yaitu Profit, People dan Planet.

Pelaksanaan program TJSL Perusahaan tahun 2021 melanjutkan program-program yang telah berjalan pada tahun 2020 di tengah masa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi hingga saat ini. Kinerja bisnis Perusahaan yang berkembang dengan baik dapat sejalan memberikan manfaat kepada masyarakat maupun lingkungan dengan implementasi program TJSL pada berbagai sektor baik kesehatan, lingkungan, sosial, pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, hingga tanggap darurat bencana alam. Alokasi dana TJSL juga sebagai upaya mendukung Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, PT PII telah melaksanakan total 39 program TJSL yang manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia.

DASAR PERATURAN PELAKSANAAN PROGRAM TJSL

Implementasi program TJSL yang dilakukan oleh Perusahaan menjadi kegiatan mengacu kepada regulasi Perusahaan dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
4. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. 29 tertanggal 30 Desember 2009, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 14 tertanggal 14 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-04444.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. 04 tertanggal 9 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0167178 tertanggal 16 Maret 2021;

5. Surat Keputusan Direksi No. SK-004/BOD/CSR/2015 tentang Besaran Penyaluran Dana *Sponsorship*, Donasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
6. Surat Keputusan Direksi No. 010/SK/PII-BOD/1020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
7. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

PRINSIP DASAR PELAKSANAAN TJSL

Sebagaimana tercantum pada Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, prinsip dasar pelaksanaan program TJSL yaitu:

1. Keberlanjutan (*sustainability*).
Pelaksanaan TJSL yang mempertimbangkan keberlanjutan (*sustainability*) sumber daya/program di masa mendatang. Keberlanjutan (*going concern*) ini juga dapat memberikan manfaat bagi Perusahaan dengan tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya/program di masa mendatang.
2. Akuntabilitas.
Pelaksanaan TJSL dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab sehingga dapat dijadikan sebagai sarana bagi Perusahaan untuk meningkatkan citra dan jaringan dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) serta mencegah timbulnya potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
3. Transparansi.
Seluruh pelaksanaan kegiatan TJSL bersifat terbuka dan diungkapkan dalam pelaporan kegiatan Perusahaan secara tahunan kepada pihak eksternal dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

TUJUAN PELAKSANAAN TJSL

Kegiatan TJSL yang dilaksanakan PT PII melalui perencanaan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai 3 tujuan utama yaitu :

1. Memberikan pengaruh sosial yang positif (sesuai dan bermanfaat) untuk masyarakat dan lingkungan;
2. Memperkuat reputasi Perusahaan dan menciptakan citra positif dimata pemangku kepentingan;
3. Memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Adapun fokus kegiatan TJSL PT PII kedepan yaitu menyelenggarakan program yang dapat mendukung percepatan perkembangan pembangunan masyarakat di Indonesia dalam sektor Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Program TJSL Pendidikan sebagai bentuk dukungan kepada fokus Pemerintah untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan generasi muda Indonesia mendatang dapat memiliki daya saing dan profesionalisme yang dapat diperhitungkan.

PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus program TJSL yang dilaksanakan. Sejak tahun 2019, PT PII memberikan edukasi dan pelatihan kewirausahaan bagi para pelaku usaha kecil/UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha yang telah dilakukan.

Program Ekonomi Masyarakat/UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya sekadar aktivitas yang dilakukan oleh banyak pelaku, terutama para perempuan, namun juga merupakan penggerak dan tulang punggung ekonomi ke depan.

REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM TJSL

Sejak Pemerintah mengumumkan kasus pertama kasus COVID-19 yang terkonfirmasi masuk ke wilayah Indonesia pada 2 Maret 2020, virus COVID-19 menyebar dengan cepat ke 34 provinsi di seluruh Indonesia, dan pandemi terus berlanjut hingga saat ini. Sejumlah Langkah strategi Pemerintah lakukan untuk mengontrol penyebaran dan dampak negatif dari virus ini mulai dari menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020, hingga penyesuaian regulasi dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan level 1 – level 4 dengan menyesuaikan jumlah kasus harian.

Dampak yang ditimbulkan dari pandemi yang berlangsung panjang ini mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional yang juga menyebabkan permasalahan sosial pada masyarakat, pusat perbelanjaan/pertokoan, dan perkantoraan melakukan

penutupan usaha, akibatnya banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK, dan berkurangnya pendapatan para pedagang atau pelaku usaha UMKM akibat dari wabah COVID-19.

Upaya dalam meringankan dampak buruk akibat pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi beban yang harus ditanggung Pemerintah, namun juga peranan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk berperan aktif dalam membantu Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat selama masa pandemi. Selama tahun 2021, PT PII telah melaksanakan sebanyak 39 program TJSL dengan penyerapan 88% dari alokasi anggaran TJSL. Adapun rincian penyerapan program TJSL sebagai berikut.

Besaran Penyerapan Dana TJSL



Lebih lanjut implementasi program TJSL yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 antara lain sebagai berikut:



TPB No. 1,2,3

Pelatihan Petani sebagai Dukungan Terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan nasional merupakan keadaan yang sangat penting bagi kelangsungan masyarakat Republik Indonesia. Apabila ketahanan pangan lemah, dapat dipastikan berbagai gejala sosial ekonomi dan politik akan terjadi. Karena itu bagaimanapun juga upaya memperkuat ketahanan pangan secara riil di lapangan adalah hal mutlak harus selalu di jaga. Betapa pentingnya mengetahui ketahanan pangan di tingkat petani padi sawah sebagai komponen utama penyusun ketahanan pangan di tingkat desa sampai tingkat nasional. Data ekonomi terbaru menunjukkan 'resesi sudah di depan mata'. Pengamat menilai sebaiknya pemerintah memaksimalkan bantuan pada petani sebagai yang 'paling terdampak' pada masa pandemi COVID-19. Sejak tahun 2020 Perusahaan telah menyelenggarakan program TJSL ini sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat di sekitar daerah pembangunan Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek. Program ini telah diselenggarakan pada April sampai November 2021 dengan diikuti oleh 30 peserta petani sebagai penerima manfaat.

Penerima manfaat	:	30 Petani
Alokasi biaya program	:	Rp194.000.000



TPB No. 2

Program SMV Kementerian Keuangan Peduli Korban Bencana Gempa Bumi Sulawesi Barat

Gempa dengan skala Magnitudo 5,9 SR di darat, barat laut Majene dan gempa susulan dengan lebih kuat Magnitudo 6,2 SR telah meluluhlantakkan daerah di sekitar Majene, Sulawesi Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana diketahui 18.152 jiwa terdampak, 42 meninggal, 189 luka berat, 697 luka ringan, dan 15.000 jiwa mengungsi. Gempa juga mengakibatkan 300 rumah rusak, 1 hotel rusak berat, 2 fasilitas Kesehatan rusak, 2 kantor pemerintahan rusak berat, dan longsor di 3 titik. Untuk meringankan beban warga terdampak, PT PII sebagai salah satu SMV di bawah koordinasi Kementerian Keuangan melakukan sinergi SMV peduli kepada warga terdampak bencana alam yang disalurkan 4-12 Maret 2021.

Penerima manfaat	:	+300 warga
Alokasi biaya program	:	Rp50.000.000



TPB No. 1,5,10

Pembangunan Sentra UMKM dan Pelatihan Kewirausahaan UMKM di Mandalika

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang diselenggarakan di sekitar proyek KEK Mandalika ini merupakan tahun ketiga dari program yang telah diselenggarakan pertama kali pada 2019. Program ini dilaksanakan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan manfaat kegiatan yang dirasakan masyarakat yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dan mempersiapkan kemandirian UMKM sebagai penerima manfaat.

Pada tahun 2021, program lanjutan yang dilaksanakan yaitu Pembangunan Sentra UMKM yang dapat digunakan oleh warga binaan sebagai tempat promosi dari berdagang dengan lokasi strategis dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Sentra UMKM dengan nama PIITDCafe ini merupakan program sinergi yang telah berjalan baik Bersama ITDC. Para warga pelaku UMKM juga mendapatkan pelatihan lanjutan untuk pengelolaan usaha yang lebih baik, yaitu Pelatihan kemasan, pengolahan, pengelolaan keuangan, hingga perijinan.

Penerima manfaat	:	25 peserta UMKM
Alokasi biaya program	:	Rp198.000.000 dan Rp99.000.000

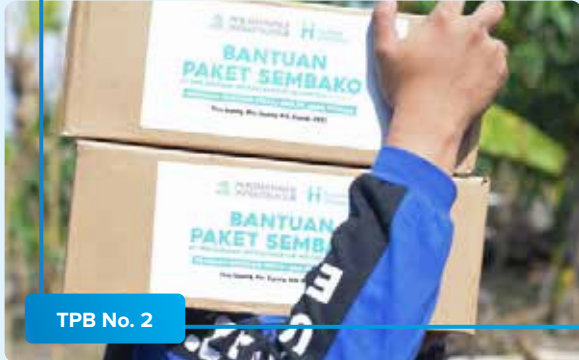


TPB No. 5,8,10

Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Transformasional untuk Perangkat Desa (BUMDES), Badung Bali

Membangun kompetensi dan prinsip kepemimpinan bagi para perangkat desa merupakan salah satu cara dalam menghadapi kondisi perubahan dan modernisasi. Hal tersebut merupakan pondasi paling dasar dari pemerintahan negara. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini karena pemerintahan desa merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, oleh karena itu SDM yang terampil memiliki peranan penting untuk pemerataan ekonomi di desa. Program ini diselenggarakan dua tahap atas antusiasme Pemerintah Daerah setempat yang sangat tinggi dan sangat mendukung dalam kegiatan ini. Kegiatan ini diikuti oleh Perangkat Desa unsur Bumdes, Kepala Desa & BPD dari 46 Desa dengan total peserta sebanyak 96 orang yang dilaksanakan pada 10-12 September dan 24-26 November 2021.

Penerima manfaat	:	96 orang Perangkat Desa (46 Desa)
Alokasi biaya program	:	Rp190.000.000 dan Rp190.000.000



TPB No. 2

Donasi Bantuan Sosial Korban Bencana Banjir di Sekitar Proyek Tol Semarang Demak

Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur di wilayah Semarang dan sekitarnya menyebabkan bencana banjir di beberapa wilayah, salah satunya yaitu di Kabupaten Demak yang merendam pemukiman di sekitar pembangunan proyek Jalan Tol Semarang Demak. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak, pada 18 Maret 2021 PT PII menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako untuk meringankan warga korban banjir.

Penerima manfaat	: 242 KK
Alokasi biaya program	: Rp50.000.000



TPB No. 1,2

Donasi Bantuan Sosial Masa Pandemi COVID-19

Sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19, Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diberlakukan sejak 3 Juli 2021 hingga saat ini di Pulau Jawa-Bali, dan akan terus diperpanjang menyesuaikan dengan perkembangan fluktuasi COVID-19.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, PT PII melaksanakan kegiatan TJSL yaitu Pembagian Paket Sembako Masa Pandemi COVID-19 kepada Masyarakat di beberapa kota dan kabupaten di antaranya di Kota Pasuruan, Kab. Way Kanan Lampung, Jabodetabek, Kota Sukabumi, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus dan bantuan sinergi bersama SMV untuk pengadaan kendaraan ambulance untuk pelayanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 di Cirebon, Jawa Barat.

Penerima manfaat	:	• 250 paket sembako untuk warga kurang mampu di Pasuruan • 175 paket sembako untuk warga kurang mampu di Kudus • Bantuan pembelian Unit Ambulan di Cirebon • 200 paket sembako untuk warga kurang mampu di Way Kanan • 150 paket sembako untuk warga kurang mampu di Sukabumi • 200 paket sembako untuk warga kurang mampu di Banyumas

Alokasi biaya program	:	• Rp66.750.000 (Pasuruan) • Rp30.000.000 (Kudus) • Rp35.000.000 (Cirebon) • Rp31.350.000 (Way Kanan) • Rp31.200.000 (Sukabumi) • Rp35.1125.000 (Banyumas)



TPB No. 3

Donasi Bantuan Operasi Celah Bibir dan Langit-langit Gratis untuk Masyarakat tidak mampu di Jabodetabek dan Area Sumatera

Angka kejadian celah bibir dan langit-langit cukup tinggi yaitu di Asia termasuk di Indonesia yaitu perbandingannya adalah 1 : 500 kelahiran. Gambaran angka kejadian kasus celah bibir dan langit-langit yang diperoleh cukup tinggi ini merupakan tantangan bagi dunia kesehatan untuk ikut mengatasi kelainan bawaan, apalagi kelainan cacat bawaan ini sering terjadi di kalangan masyarakat kurang mampu. Sebagai bentuk kepedulian anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, PT PII menyelenggarakan bantuan operasi celah bibir dan langit-langit secara gratis. Program yang diselenggarakan pada April sampai bulan Juli 2021 ini diikuti peserta anak-anak yang berasal dari Jabodetabek, Medan, Palembang, dan Lampung.

Penerima manfaat	:	36 anak-anak
Alokasi biaya program	:	Rp198.000.000



TPB No. 1

Ketahanan Ekonomi Keluarga Penyandang Disabilitas Masa Pandemi COVID-19 di Jawa Barat

Pandemi global COVID-19 yang tersebar di banyak negara termasuk di Indonesia menyebabkan penurunan tingkat perekonomian yang berdampak pada masyarakat kurang mampu, termasuk warga disabilitas. Berdasarkan survei nasional Badan Pusat Statistik (SUPAS - Survei Penduduk Antar Sensus BPS 2015), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 21,5 juta yang merupakan sekitar 8-9% dari populasi. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lokasi dimana salah satu proyek yang dijamin oleh PT PII, yaitu pembangunan jalan tol CISUMDAWU, yang melintas dari Cileunyi, Sumedang sampai Dawuan. PT PII berkomitmen untuk senantiasa memberikan manfaat kepada masyarakat, baik manfaat langsung dari keberadaan proyek, maupun manfaat tidak langsung yang kami sampaikan melalui kegiatan TJSL. Pemberian bantuan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi PT PII untuk mendukung dan membantu masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program ini telah diselenggarakan pada bulan Juni hingga bulan Agustus 2021.

Penerima manfaat	:	12 Kursi Roda Adaptif 45 keluarga disabilitas bantuan modal usaha
Alokasi biaya program	:	Rp199.812.500



TPB No. 2

Donasi Bantuan Korban Bencana Badai Siklon Tropis Seroja di NTT

Cuaca ekstrim badai siklon tropis seroja telah menyebabkan sejumlah titik di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sebagian Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami banjir bandang dan tanah longsor. Daerah yang memiliki dampak cukup besar yaitu Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Alor. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNPB mengenai dampak yang ditimbulkan dari bencana alam ini yaitu sebanyak ± 390.334 warga terdampak dengan ± 16.016 warga mengungsi, dengan total 16 Kabupaten/ Kota terdampak di wilayah NTT.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap para warga terdampak dari bencana alam ini, PT PII bersama SMV di bawah koordinasi Kementerian Keuangan melaksanakan sinergi program donasi peduli korban bencana alam di NTT. PT PII turut memberikan bantuan paket *cooking utensil kits* yang diberikan kepada masyarakat terdampak pada 5 Juni 2021.

Penerima manfaat	: 145 KK
Alokasi biaya program	: Rp50.000.000



TPB No. 1,2,3

Program Lingkungan: Urban Farming

Program *Urban Farming* sebelumnya pernah dilaksanakan Perusahaan untuk warga RW 02 Kelurahan Bambangrepep, Kecamatan Ngaliyan pada bulan Oktober-Desember 2020. Saat ini PT PII memperluas cakupan program bagi warga disekitar proyek SPAM Semarang Barat yaitu untuk warga RW 04 Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen. Diharapkan dengan program ini warga mendapatkan manfaat, baik untuk masing-masing keluarga maupun untuk lingkungan tempat tinggal warga melalui konsep ruang terbuka "hijau" untuk menyeimbangkan kualitas hidup warga di lingkungan sekitar proyek SPAM Semarang Barat.

Rangkaian program ini diawali dengan sosialisasi program yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan bagi warga untuk memperkaya wawasan mulai dari pengenalan *Urban Farming*, pembibitan, pindah tanam, pemupukan, perawatan tanaman, pembuatan rumah kaca, demplot dan pengenalan tanaman estetik.

Program *Urban Farming* ini juga dilaksanakan di area/ lingkungan di sekitar Perusahaan berada yaitu di Kelurahan Kuningan Barat.

Penerima manfaat	: Warga Kedungpane, Semarang, dan Kelurahan Kuningan Barat, Jakarta
Alokasi biaya program	: Rp213.022.770 dan Rp44.000.000



TPB No. 1,2

Donasi Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadhan 1442H/2021

Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1442H/2021 M yang datang pada bulan April, merupakan bulan yang paling ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Pada bulan suci ini menjadi waktu yang tepat untuk menabung amal karena segala kebaikan akan mendapatkan pahala yang berlipat. Oleh karena itu dalam bulan yang baik ini, karyawan PT PII dapat mengirimkan rekomendasi kegiatan keagamaan di sekitar wilayah tempat tinggalnya, seperti renovasi masjid, buka bersama, santunan lansia dan anak yatim, maupun berbagi kepada masyarakat kurang mampu akibat dampak pandemi COVID-19. Melalui kegiatan donasi berbagi kebahagiaan bulan Ramadhan 1441H ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dari lansia, anak yatim, warga kurang mampu dan rumah ibadah.

Penerima manfaat	:	36 anak-anak
Alokasi biaya program	:	Rp198.000.000



TPB No. 1,8,10

Program Ekonomi Masyarakat pada Produk Perikanan Skala UMKM di Sekitar Tol Semarang Demak, Jawa Tengah

PT PII menggelar program terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat pada produk perikanan skala UMKM di sekitar proyek Tol Semarang - Demak, Jawa Tengah. Bekerja sama dengan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK IPB University, program ini dilaksanakan melalui pelatihan keamanan pangan, pelatihan peningkatan kualitas dan cita rasa produk olahan, pelatihan teknik pengemasan dan *labeling*, pelatihan pemanfaatan media *online* untuk marketing produk perikanan dan pembinaan serta pendampingan berkelanjutan.

Sasaran dari program ini adalah para pengusaha UMKM di wilayah yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang telah diberikan penjaminan oleh PT PII, dengan penerima manfaat sebanyak 30 orang yang terdiri dari pengusaha ikan segar di lokasi binaan dan pengusaha UMKM produk olahan perikanan yaitu di daerah Kecamatan Genuk dan beberapa kecamatan lainnya seperti Pedurungan dan Gayamsari di Kota Semarang.

Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan para pelaku UMKM dalam mengembangkan kegiatan usaha pengolahan perikanan agar dapat menghasilkan produk perikanan dengan kualitas baik dan dapat menentukan metode pemasaran yang tepat sehingga dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi, serta dapat membuka lapangan kerja baru untuk pengolahan dan pemasaran produk perikanan.



Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta pelatihan diharapkan dapat men-transfer pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan, baik antar individu maupun melalui KUB (kelompok usaha bersama) yang diikutinya. Pengetahuan dalam menentukan metode pemasaran produk, diharapkan akan membuat para pelaku UMKM yang dibina akan lebih adaptif dan dapat terus memasarkan produknya secara berkesinambungan dan dapat meningkatkan volume produksinya.

Program ini diharapkan akan terus memberikan dampak jangka panjang dan berkesinambungan kepada para pelaku usaha. Oleh karena itu, kegiatan ini akan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi Jawa Tengah maupun Dinas Perikanan Kota Semarang, sehingga monitoring dan pembinaan dapat terus dilakukan dan manfaatnya dapat diberikan secara berkelanjutan. Sebagai informasi program ini merupakan salah satu Program yang dilakukan oleh PT PII bekerja sama dengan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK IPB University. Kegiatan ini diharapkan dapat menjawab tantangan usaha dan pembangunan saat ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, bagi PT PII kegiatan ini merupakan upaya untuk menerapkan konsep *sustainable development goals* yang nantinya dapat membantu PT PII dalam mengimplementasikan program-programnya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penerima manfaat	:	30 orang pelaku UMKM olahan ikan
Alokasi biaya program	:	Rp184.565.000



TPB No. 3,5

Donasi Sinergi SMV Berbagi Makanan Peduli Tenaga Kesehatan di Jabodetabek

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2021 saat ini belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Pada bulan Juli 2021, Indonesia menghadapi gelombang ke-2 infeksi COVID-19. Para tenaga kesehatan berpacu dengan waktu mengerahkan segala waktu, dan tenaga dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pasien yang membutuhkan perawatan. Atas hal tersebut para tenaga kesehatan menjadi kelelahan dan kurang nutrisi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap para tenaga kesehatan yang berjuang dalam memberikan pelayanan kepada para kesehatan, pada Oktober hingga November 2021 PT PII dan SMV dibawah koordinasi Kementerian Keuangan menyelenggarakan program SINERGI UNTUK NEGERI "Terima Kasih NAKES, Kalian Pahlawan", sebuah kegiatan mendistribusikan sebanyak 4.000 box berisi makanan kepada tenaga Kesehatan yang tersebar pada 16 rumah sakit di Jabodetabek sebagai apresiasi dan kontribusi dari masyarakat untuk para tenaga kesehatan di Jabodetabek.

Penerima manfaat	:	4.000 tenaga Kesehatan
Alokasi biaya program	:	Rp20.000.000



TPB No. 4,5

Pelatihan Jurnalisme Digital dan Sertifikasi Wartawan

Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan sesuatu di bidang kewartawanan. Hal tersebut menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi wartawan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Oleh karena itu, wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers, sebagai alat ukur profesionalitas wartawan.

Dari jumlah 120 ribu jumlah wartawan di Indonesia, hingga saat ini hanya sekitar 28 ribuan wartawan yang telah tersertifikasi kompetensi sebagai wartawan profesional. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya jumlah wartawan bersertifikat adalah biaya untuk mengikuti ujian kompetensi tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap profesi wartawan di Indonesia, PT PII melaksanakan Program Pendidikan yaitu dalam bentuk Pelatihan Jurnalisme Digital dan Sertifikasi Wartawan di Jakarta yang telah dilaksanakan pada September-Oktober 2021.

Penerima manfaat	:	80 wartawan
Alokasi biaya program	:	Rp192.000.000



TPB No. 1,2,3

Edukasi dan Kampanye Sosial untuk Menurunkan Angka Stunting

Stunting atau gagal tumbuh merupakan kondisi status gizi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak sejak awal masa kehidupan yang dipresentasikan dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur kurang dari minus dua standar deviasi berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO. *Stunting* adalah masalah multidimensional yang penyelesaiannya memerlukan kerja sama multisektoral dari pemerintah, industri, akademisi, LSM, dan tentunya seluruh masyarakat. *Stunting* membawa dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan fisik anak, imunologi, kemampuan otak untuk berpikir, serta perkembangan sosial ekonomi anak di masa mendatang.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi *stunting* tertinggi ketiga di *South-East Asian Region* setelah Timor Leste dan India. Saat ini sebanyak 270.000 anak di NTT mengalami *stunting* akibat permasalahan keamanan pangan, rendahnya makanan seimbang serta sakit berulang. Berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018, proporsi balita pendek tertinggi di Indonesia berada di provinsi NTT dengan 51,3% di tahun 2013 dan 42,6% di tahun 2018. Dari 164 desa dan 5 kelurahan di 12 Kecamatan Kabupaten Manggarai Barat, prevalensi *stunting* pada balita ada 73 desa/kelurahan (43,20%) di atas 20% atau berada di batas kategori aman.

Sebagai bentuk kepedulian permasalahan kesehatan pada sosial masyarakat di Labuan Bajo, khususnya pada anak-anak pada masa pertumbuhan, PT PII melakukan Program Edukasi dan Kampanye Sosial "Bergizi dari Bumi Kami untuk Menurunkan Angka *Stunting* di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur" pada tgl bln 2021.

Penerima manfaat	:	25 peserta wanita
Alokasi biaya program	:	Rp118.657.000



TPB No. 3

Program Kesehatan: Donasi Bantuan Tabung Oksigen untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Kondisi pandemi COVID-19 sejak 2020 hingga saat ini di Indonesia yang masih berlangsung, wabah COVID-19 semakin semakin parah dengan gelombang kedua akibat penyebaran varian delta yang masuk dan tersebar di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan akibat lonjakan pasien yang perlu penanganan medis adalah ketersediaan oksigen yang semakin langka. Menanggapi keadaan dilapangan, Perusahaan turut aktif membantu penyediaan oksigen murni dan seperangkat regulator dan troli untuk kebutuhan penanganan pasien di sekitar Jakarta Selatan. Program ini dilaksanakan pada September 2021.

Penerima manfaat	:	40 tabung oksigen murni dan regulator
Alokasi biaya program	:	Rp125.000.000



TPB No. 1,2

Donasi Hewan Qurban Idul Adha 1442 H bersama SMV Kementerian Keuangan

Dalam rangka menumbuhkan kepedulian sosial dan membangun kebersamaan serta meningkatkan kualitas ibadah qurban di lingkungan Kementerian Keuangan dan di lingkungan Perusahaan, maka dilaksanakan ibadah Qurban di Masjid Kementerian Keuangan dan di Kelurahan Kuningan Barat. PT PII sebagai SMV di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, pada Juli 2021 turut mendonasikan hewan Qurban yang kemudian akan disumbangkan kepada penerima manfaat yang terdiri pegawai *outsourse* maupun warga yang membutuhkan disekitar lingkungan Kementerian Keuangan dan Kelurahan Kuningan Barat.

Penerima manfaat	:	Fakir miskin di wilayah Kel. Kuningan Barat dan di sekitar kantor Kementerian Keuangan
Alokasi biaya program	:	Rp99.000.000



TPB No. 3

Donasi Perluasan Asrama Yatim

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peranan yang penting dalam perkembangan masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu peran penting berbagai pihak agar anak-anak khususnya anak yatim mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap Pendidikan dan pengembangan anak-anak yatim, pada Agustus PT PII mendukung donasi perluasan untuk asrama di Jakarta.

Penerima manfaat	:	Anak-anak Yatim Panti Asuhan Yayasan Daarul Rahman

Alokasi biaya program	:	Rp75.000.000



TPB No. 3

Program Kesehatan Tanggap COVID 19: Pembagian Makanan Balita, Folding Bed dan Handsanitizer, Kelurahan Kuningan Barat, Jakarta Selatan

Kelurahan Kuningan Barat berada di wilayah sekitar Perusahaan yang terdampak dari pandemi serta terdapat kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Sebagai upaya mendukung Pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke berbagai daerah, Perusahaan melakukan program ini dengan memberikan bantuan berupa makanan balita, *folding bed* dan *hand sanitizer* yang diletakkan di posko COVID-19 Kelurahan Kuningan Barat. Program ini diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan dan pencegahan virus COVID-19 khususnya di wilayah Kelurahan Kuningan Barat.

Penerima manfaat	:	1.000 warga Kuningan Barat dan 724 balita

Alokasi biaya program	:	Rp112.600.000



TPB No. 4

Program Pendidikan: Membangun Pendidikan Karakter Berbasis Parenting di Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat, NTT

PT PII meyakini bahwa pembangunan infrastruktur tentunya memerlukan dukungan lingkungan dan masyarakat sekitar. Program ini diharapkan dapat mempersiapkan para guru untuk mampu lebih memahami potensi posisi dirinya dari berbagai sisi, sehingga mampu menjadi pendidik yang efektif, menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul serta dapat menjadi guru yang paham cara mengajar untuk membentuk karakter seorang anak, dengan penerapan berbagai strategi pembelajaran dan sumber belajar serta menciptakan lingkungan belajar yang baik, termasuk memilih pola asuh yang digunakan (berbasis *parenting*).

Terdapat Proyek Bandara Komodo yang telah dijamin oleh PT PII, sebagai bentuk dukungan pada Pendidikan di Labuan Bajo, PT PII melaksanakan Program Membangun Pendidikan Karakter Berbasis *Parenting* di Kabupaten Manggarai Barat. Peserta pelatihan ini terdiri dari sekolah tingkat SD sampai dengan SMA untuk para Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling, Guru Pendidikan Jasmani, Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas dan Tenaga Pendidik lain yang berhubungan dengan sekolah.

Diharapkan dari program ini dapat meningkatkan kualitas guru dalam proses pengambilan keputusan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama waktu pembelajaran.

Penerima manfaat	: 33 guru dari 11 sekolah
Alokasi biaya program	: Rp190.600.000



TPB No. 1,5,8,10,13,15

Program Lingkungan: Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat melalui Budi Daya Udang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur juga perlu dibarengi dengan prinsip praktik yang berkelanjutan, demi kelestarian alam Indonesia dan sebagai upaya global dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, PT PII melaksanakan program Pengelolaan Hutan *Mangrove* Berbasis Masyarakat melalui Budi Daya Udang Berkelanjutan di Kampung Pegat Batumbuk, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Berau tercatat sebagai wilayah yang memiliki ekosistem *mangrove* terluas di Provinsi Kalimantan Timur melalui pendekatan SECURE (*Shrimp-Carbon Aquaculture*) yang selaras dengan upaya konservasi *mangrove*.

Dalam tahap pengelolaan tambak SECURE, masyarakat akan didampingi sekaligus diberikan informasi dan pelatihan mengenai praktik akuakultur berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam penurunan emisi *zero carbon* yang di targetkan pada 2060 mendatang. Hal inilah yang membuat PT PII terpanggil untuk mendukung Program Pengelolaan Hutan *Mangrove* Berbasis Masyarakat melalui Budi Daya Udang Berkelanjutan di Kabupaten Berau. Kemampuan *mangrove* menyerap karbon menjadikannya salah satu strategi utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan kajian solusi iklim alami, *mangrove* berkontribusi sebesar 3% terhadap target penurunan emisi nasional.

Penerima manfaat	: Lingkungan dan Masyarakat pelaku budi daya udang hutan mangrove di Kab. Berau
Alokasi biaya program	: Rp199.916.670



TPB No. 4

Program Kementerian Keuangan Mengajar 6 Tahun 2021

Kemenkeu Mengajar (KM) merupakan salah satu komunitas dibawah lingkup pengawasan Sekretaris Jenderal, dengan mengusung kegiatan mengajar selama satu hari di sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA termasuk dengan Sekolah Luar Biasa yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan dan SMV secara sukarela. Di tahun 2021 merupakan kegiatan KM yang ke-6 (enam) sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2016. Kegiatan yang telah diselenggarakan selama lima tahun berturut-turut telah diikuti oleh lebih dari 100.000 siswa dari seluruh provinsi di Indonesia, 10.000 relawan pegawai Kementerian Keuangan dan SMV.

Perusahaan turut mendukung dalam kegiatan KM 6 menjadi relawan mengajar mengenai Infrastruktur yang mudah dipahami oleh peserta pelajar serta juga berpartisipasi membagikan *goodie bag* berisi *lunch box* dengan material ramah lingkungan yang akan dibagikan kepada murid dan guru di 2 (dua) sekolah tempat PT PII mengajar, sebagai bagian dari program TJSL bidang lingkungan dan dampak positif kepada sekolah tersebut. Keterlibatan PT PII pada kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan *exposure* eksistensi PT PII atas perannya dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penerima manfaat	:	Pelajar peserta Kemenkeu Mengajar
Alokasi biaya program	:	Rp243.776.000



TPB No. 1,2

Program Sosial: Ketahanan Ekonomi Keluarga Penyandang Disabilitas Masa Pandemi COVID-19 di Sumatera Selatan

Program TJSL di Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan wujud kepedulian terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah dimana terdapat proyek Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan yang telah dijamin oleh PT PII.

Dalam program TJSL di Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak 35 orang penyandang disabilitas menerima kursi roda adaptif. Selain itu akan dilakukan pendampingan kepada penerima kursi roda adaptif tersebut untuk memastikan pengguna kursi roda menjadi lebih mandiri bergerak, dapat bersekolah, memiliki postural tubuh yang baik.

Penerima manfaat	:	35 Penyandang Disabilitas
Alokasi biaya program	:	Rp199.980.000



Pemberdayaan Nelayan dan Pengolah Ikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk Perikanan di Sekitar Tol Manado Bitung, Sulawesi Utara

Kota Bitung, Sulawesi Utara, merupakan lokasi salah satu proyek yang diberikan Penjaminan Pemerintah oleh Perusahaan, yaitu Jalan Tol Manado - Bitung. Sebagai salah satu sentra produksi perikanan di Indonesia bagian Timur, hasil tangkapan utama nelayan di Kota Bitung merupakan jenis ikan tuna, cakalang, dimana untuk jenis ikan tuna dan cakalang sebagian besar diekspor ke Jepang. Ikan tuna dan cakalang memiliki harga yang mahal ketika didaratkan dan dijual dalam kondisi segar, namun demikian kelemahan utama dari hasil tangkapan ikan adalah mudah mengalami pembusukan. Dalam mengatasi permasalahan penanganan ikan yang terjadi pada nelayan, PT PII melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Ikan bagi 25 nelayan-nelayan di Kota Bitung, mengenai penanganan ikan hasil tangkapan secara baik dan benar, teknik penyimpanan dan pembongkaran ikan, teknik packing ikan untuk memelihara kesegaran dan mutu ikan, melakukan uji kompetensi penanganan ikan secara baik dan benar serta pembinaan dan pendampingan berkelanjutan.

PT PII berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan rencana aksi global yang dituangkan dalam *Sustainable development Goals* (SDGs). Program pengolahan ikan segar ini merupakan salah satu program untuk mendukung SDGs 14 melalui penyediaan akses terhadap sumber daya kelautan dan pasar bagi nelayan kecil.

Penerima manfaat	: 25 nelayan
Alokasi biaya program	: Rp193.759.000



Program Kesehatan: Dukungan Peralatan Kesehatan Pemulihan Pandemi COVID-19 di Jawa Tengah

Dalam pengendalian COVID-19 dan pencegahan meluasnya varian baru, terdapat beberapa faktor penyebab masih tingginya angka pasien COVID-19, salah satunya adalah kurangnya fasilitas penunjang kesehatan yang diantaranya adalah *ventilator* (alat bantu pernapasan). Sebagai bentuk dukungan dalam pemulihan COVID-19, PT PII menggelar program penyerahan dukungan alat kesehatan untuk pemulihan pandemi COVID-19 di Jawa Tengah, berupa *ventilator* buatan Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad) dan YPM Salman yang dinyatakan lolos uji pada 21 April 2020. Melalui program TJSL ini diharapkan dapat membantu para pasien COVID-19 yang sedang membutuhkan dan sebagai bagian dari dukungan untuk pemulihan pandemi COVID-19 khususnya di Jawa Tengah dengan harapan akan ada banyak pasien COVID-19 maupun pasien yang bermasalah dengan paru-paru yang terbantu.

Atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah, *ventilator* ini diberikan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarno menerima 2 unit *ventilator*, RSUD Dr. Tjitrowardoyo Purworejo menerima 1 unit *ventilator*, RSUD Cilacap menerima 2 unit *HEPA filter portable*, RSUD Simo, Boyolali menerima 2 unit *HEPA filter portable*, dan RS Qim Batang menerima 2 unit *HEPA filter portable*.

Penerima manfaat	: 4 RSUD dan 1 RS Swasta di Jawa Tengah
Alokasi biaya program	: Rp150.000.000



TPB No. 4

Perbaikan Sarana Prasarana Perpustakaan SDN di Pulau Natuna

PT PII telah melaksanakan program TJSL di bidang pendidikan yaitu pemberian "Bantuan Fasilitas & Prasarana Perpustakaan SD Negeri di Pulau Natuna", berupa komputer *All in One*, meja dan kursi komputer, rak buku, karpet baca, buku bacaan dan pengecatan ulang ruang perpustakaan.

Adapun penerima bantuan ini terdiri dari 5 SD Negeri di kabupaten Natuna yaitu SD Negeri 12 Ranai, SD Negeri 11 Ranai, SD Negeri 009 Bandarsyah, SD Negeri 008 Batu Gajah dan SD Negeri 10 Batu Gajah.

Program ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan dan fasilitas sekolah di daerah tersebut agar mereka menjalankan kegiatan pembelajaran dengan memadai sehingga siswa dapat mengakses pendidikan layak dan menyelesaikan pendidikan dasar dengan baik. Program ini juga merupakan bagian dari komitmen TJSL dan sebagai upaya untuk mendukung proyek Palapa Ring, pembangunan jaringan serat optik nasional yang berada di Pulau Natuna.

Penerima manfaat	:	5 SDN di Pulau Natuna
Alokasi biaya program	:	Rp198.100.000



TPB No. 1,8,10

Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif: Pengembangan Produk *Flagship* dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Wilayah

PT PII berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan rencana aksi global yang dituangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SGDs). Program Pembinaan UMKM ini merupakan salah satu program untuk mendukung SGDs 17 melalui peran UMKM untuk dapat memperluas kesempatan kerja. Oleh karena itu, melalui kegiatan TJSL, PT PII berkomitmen untuk senantiasa memberikan manfaat kepada masyarakat karena salah satu tujuan utama dari Program ini adalah melakukan Kegiatan Pembinaan terhadap kelompok UMKM Potensial agar berubah menjadi Kelompok UMKM Naik Kelas berdasarkan *roadmap* pembinaan yang telah disiapkan.

Melalui program TJSL, PT PII menggelar Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Situbondo sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian sosial PT PII sebagai penjamin proyek Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi dimana proyek ini melalui wilayah Kota Situbondo, Jawa Timur. Program TJSL dalam pembinaan UMKM Kota Situbondo ini juga mencakup pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh para pelaku UMKM antara lain pelatihan tentang kewirausahaan, keamanan pangan dan standarisasi produk, tata kelola keuangan, tata kelola usaha dan produksi, kemasan, pemasaran dan distribusi yang diberikan kepada 14 UMKM unggulan yang terpilih. Selain itu, PT PII juga akan memilih 2 UMKM terbaik untuk diberikan fasilitas paket *packaging*, termasuk paket *logo design* UMKM dan juga pemberian kemasan baru untuk produk UMKM tersebut. Diharapkan dengan adanya pembinaan UMKM secara berkelanjutan ini, pada saat proyek Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi rampung dikerjakan, para pelaku UMKM lokal telah dapat menangkap peluang-peluang ekonomi baru. Program TJSL ini berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan juga dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo dalam melakukan kurasi UMKM di Kabupaten Situbondo.

Penerima manfaat	:	14 UMKM
Alokasi biaya program	:	Rp199.870.000



TPB No. 2

Donasi Bencana Banjir Besar Lombok Barat, NTB

Hujan lebat di sebagian wilayah pulau Lombok sejak Minggu (5/12) hingga Senin (6/12) menyebabkan banjir di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), ratusan rumah terendam, beberapa wilayah yang tergenang itu antara lain wilayah wisata Senggigi di Lombok Barat. Banjir yang menerjang dua kawasan kecamatan di Lombok Barat menyebabkan empat orang meninggal dunia dan enam lainnya luka-luka. Informasi yang disampaikan oleh Pembina Utama Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap bencana Banjir besar yang terjadi di Lombok Barat NTB, PT PII turut berpartisipasi dengan memberikan donasi berupa:

1. Selimut
2. Pakaian dan perlengkapan wanita
3. Perlengkapan balita
4. Masker & Hand Sanitizer
5. Makanan siap saji

Penerima manfaat	: Warga terdampak bencana di Kab. Lombok Barat, NTB
Alokasi biaya program	: Rp23.935.000



TPB No. 6

Program Lingkungan: Pemanenan Air Hujan dan Tempat Cuci Tangan pada TPA Jatibarang, Semarang

Pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Sementara, salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah untuk mempromosikan model ekosistem yang sehat sehingga dapat menghasilkan banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan populasi manusia, namun tetap menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Pembangunan yang gencar dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat mengakibatkan tingginya aktivitas manusia yang berpengaruh pada meningkatnya konsumsi. Dan berdampak pada bertambahnya sampah yang dihasilkan.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan sarana fisik berakhirnya suatu proses untuk menyimpan dan memusnahkan sampah dengan cara tertentu sehingga dampak negatif yang ditimbulkan kepada lingkungan dapat dikurangi. Sampah merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat karena dapat menyebabkan kotornya lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup.

TPA Jatibarang yang berlokasi di Kedungpane, Mijen, Semarang merupakan salah satu lokasi pengembangan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Proyek tersebut merupakan salah satu proyek infrastruktur potensial yang dapat dikembangkan melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, setiap harinya TPA Jatibarang mampu menampung 750-800 ton sampah.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Jatibarang, PT PII melakukan program pemanenan air hujan dan tempat cuci tangan pada masyarakat di sekitar TPA Jatibarang. Pemanenan air hujan merupakan metode kuno yang sejak dulu ramai digunakan, namun relatif baru di kalangan masyarakat Indonesia. Pemanenan air hujan adalah kegiatan menampung air hujan secara lokal dan menyimpannya melalui berbagai teknologi untuk penggunaan masa depan dan memenuhi tuntutan konsumsi manusia atau kegiatan manusia. Hal ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan air dan sanitasi agar masyarakat selalu dapat menjaga Perilaku hidup bersih dan sehat.

Penerima manfaat	: Kolektor sampah, warga sekitar TPA
Alokasi biaya program	: Rp181.709.850



TPB No. 4

Program Pendidikan: Beasiswa Prestasi di Lingkungan Kerja PT PII

PT PII melalui program pemberian bantuan beasiswa prestasi bagi anak karyawan *outsourcing* di lingkungan kerja Perusahaan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Melalui tahap proses penyaringan yang ketat seperti seleksi hasil laporan / raport, wawancara dengan calon penerima beasiswa hingga *assessment* fisik berupa kunjungan ke rumah-rumah mereka secara langsung, PT PII mendapatkan 16 anak-anak karyawan *outsourcing* seperti anak-anak *office boy*, *office girl*, *security*, *driver*, dan lainnya, dengan rincian 7 anak SD jenjang kelas 3 hingga kelas 6, 6 anak SMP jenjang kelas 7 dan 8, serta 3 anak SMA jenjang kelas 10 dan 11, yang mana mereka dipersiapkan untuk dapat menjadi anak-anak yang berprestasi dan berkarakter mandiri.

Dalam program ini, PT PII memberikan paket bantuan beasiswa yang berbeda dengan bantuan beasiswa lainnya yang pernah ada, dimana pada program ini Perusahaan tidak hanya memberikan bantuan tunai langsung selayaknya beasiswa, namun Perusahaan juga bertanggung jawab untuk meningkatkan prestasi belajar anak-anak di sekolah dengan memberikan bimbingan *online* yang dibimbing *master teacher* yang sangat berpengalaman, konsultasi pendidikan bagi anak, hingga memberikan pelayanan konsultasi bagi para orang tua siswa agar dapat membangun karakter anak-anaknya menjadi lebih kuat dan mandiri selama program ini berlangsung. PT PII peduli dengan kesejahteraan keluarga karyawan, baik internal maupun *outsourcing*. Program beasiswa ini diharapkan dapat memotivasi anak-anak karyawan *outsourcing* dalam mengukir prestasi yang lebih baik lagi dalam menggapai cita-citanya. Pada prinsipnya, di mana pun Perusahaan berada harus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya serta diharapkan beasiswa ini dapat menjadikan anak-anak yang sedang menuntut ilmu lebih semangat lagi dan bisa lebih berprestasi lagi pada semester-semester yang akan datang.

Penerima manfaat	: 16 pelajar anak karyawan <i>outsourcing</i>
Alokasi biaya program	: Rp198.256.750



TPB No. 1,4

Donasi - Santunan 5 Panti Asuhan dalam Rangka HUT PT PII ke-12

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PT PII yang ke 12, PT PII kembali melakukan kegiatan sosial berupa santunan kepada Yayasan Yatim Piatu. Kegiatan rutin setiap tahun ini pun merupakan bentuk rasa syukur atas eksistensi PT PII hingga saat ini dan sebagai bentuk kepedulian PT PII terhadap anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa, khususnya di Panti Asuhan untuk mendukung kegiatan pendidikan maupun kebutuhan pangan sehari-hari.

Program donasi ini berupa bantuan operasional panti asuhan kepada 5 Yayasan Panti Asuhan yang berada di daerah DKI Jakarta, Tangerang Selatan, Yogyakarta dan Sumatera Selatan.

Penerima manfaat	: 5 Yayasan Panti Asuhan
Alokasi biaya program	: Rp50.000.000



RUJUKAN KEBERLANJUTAN

“PT PII terus berupaya mendukung program Pemerintah Indonesia, terutama dalam menyelaraskan antara penguatan kinerja dunia usaha khususnya BUMN dengan pertumbuhan masyarakat dan lingkungan. Tak hanya program TJSL sebagaimana telah disampaikan di atas, PT PII juga mendorong penerapan keberlanjutan dalam seluruh aspek operasi dan bisnisnya; mulai dari aktivitas operasi yang mematuhi seluruh peraturan termasuk K3 dan mengindahkan dampak lingkungan, kegiatan perkantoran yang efisien terhadap penggunaan energi, membangun hubungan yang harmonis dengan karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan, tanggung jawab atas produk dan layanan jasa, hingga keberadaan PT PII dan kontribusinya bagi masyarakat.”



“Lebih lanjut tentang upaya PT PII dalam mewujudkan keberlanjutan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan tahun 2021 sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.”

LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2021

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**

LAPORAN KEUANGAN/*FINANCIAL STATEMENTS*

31 DESEMBER/*DECEMBER* 2021



**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SERTA UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Wahid Sutopo
Alamat Kantor : Capital Place Office Tower,
Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Alamat Rumah : Jalan Taman Wijaya Kusuma I
No. 2-A, RT 009, RW 002,
Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021- 5795 0550
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Donny Hamdani
Alamat Kantor : Capital Place Office Tower,
Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Alamat Rumah : Jl. Duren Sawit Blok K2/10
RT 012 RW 011, Klender,
Duren Sawit, Jakarta Timur
Nomor Telepon : 021- 5795 0550
Jabatan : Direktur Eksekutif Keuangan
dan Penilaian Proyek

menyatakan bahwa:

1. kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. semua informasi dalam laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari/February 2022

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors


Muhammad Wahid Sutopo
Direktur Utama/
President Director

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2021 AND
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021**

We, the undersigned:

1. Name : Muhammad Wahid Sutopo
Office address : Capital Place Office Tower,
7th & 8th Floor Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Residential address: Jalan Taman Wijaya Kusuma I
No. 2-A, RT 009, RW 002,
Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan
Telephone : 021- 5795 0550
Title : President Director
2. Name : Donny Hamdani
Office address : Capital Place Office Tower,
7th & 8th Floor Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Residential address: Jl. Duren Sawit Blok K2/10
RT 012 RW 011, Klender,
Duren Sawit, Jakarta Timur
Telephone : 021- 5795 0550
Title : Executive Director of Finance
and Project Valuation

declare that:

1. we are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. all information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
b. the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. we are responsible for the internal control system of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Thus this statement is made truthfully.


Donny Hamdani
Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek/
Executive Director of Finance and Project Valuation



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) as of 31 December 2021, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
25 Februari/February 2022

Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA
Izin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0229

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 1 - Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>2021</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	5,893,947,654	5	4,883,892,973	Cash and cash equivalents
Investasi	7,948,301,268	6	8,380,506,137	Investments
Piutang usaha	169,217,041	7	155,189,490	Account receivables
Piutang lainnya	10,735,297		12,757,238	Other receivables
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	6,734,223		1,147,465	Prepaid expenses and advances
Aset tetap	8,140,743	8	10,606,021	Fixed assets
Aset hak guna	31,432,826	9	50,292,522	Right-of-use assets
Aset takberwujud	3,242,322	10	2,044,984	Intangible assets
Beban tangguhan	7,570,928	11	19,163,920	Deferred expenses
Pajak dibayar dimuka	1,612,945	13a	3,869,629	Prepaid income tax
Aset pajak tangguhan	58,130,420	13d	22,617,765	Deferred tax asset
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,369,039		5,369,039	Refundable deposits
JUMLAH ASET	<u>14,144,434,706</u>		<u>13,547,457,183</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha	7,372,764	12	3,089,412	Account payables
Utang pajak	4,421,469	13b	3,258,038	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	65,281,828	14	39,569,542	Accrued expenses, provisions and other payables
Pendapatan tangguhan	171,117,254	15	15,661,694	Unearned income
Liabilitas sewa pembiayaan	33,504,325	16	51,094,380	Finance lease liabilities
Pinjaman penerusan	55,126,686	17	55,126,686	Two-step loans
Liabilitas imbalan kerja	18,895,639	18	36,225,253	Employee benefits obligation
JUMLAH LIABILITAS	<u>355,719,965</u>		<u>204,025,005</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - modal dasar, 20.000.000 lembar - ditempatkan dan disetor penuh 9.570.000 lembar, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	9,570,000,000	19	9,570,000,000	Share capital - authorised, 20,000,000 shares - issued and paid 9,570,000 shares, with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share
Laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	300,351,343		298,992,727	Unrealised gain from financial assets at fair value through other comprehensive income
Keuntungan/(kerugian) aktuarial, setelah pajak	4,228,982		(460,829)	Gain/(loss) from actuarial, net of tax
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib	197,499,338	21	166,471,338	Appropriated - statutory reserve
Belum ditentukan penggunaannya	3,716,635,078		3,308,428,942	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	<u>13,788,714,741</u>		<u>13,343,432,178</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>14,144,434,706</u>		<u>13,547,457,183</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 2 - Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>2021</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	
Pendapatan				Revenues
Pendapatan penjaminan	156,529,213	22	121,456,111	Revenue from guarantee
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	29,171,852	22	21,922,064	Revenue from project preparation and transaction advisory
Pendapatan pengelolaan dana	735,871,054	22	854,732,756	Income from investments
Pendapatan lainnya	<u>935,260</u>	22	<u>-</u>	Other income
Jumlah pendapatan	<u>922,507,379</u>		<u>998,110,931</u>	Total revenues
Beban usaha				Operating expenses
Beban pajak final	(115,019,709)	13c	(158,254,071)	Final tax expense
Umum dan administrasi	(79,436,801)	23	(87,025,041)	General and administrative
Penjaminan	(73,413,285)	23	(68,411,174)	Guarantee
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	(34,093,470)	23	(29,706,050)	Project preparation and transaction advisory
Pengembangan usaha	(24,592,371)	23	(25,401,168)	Business development
Beban bunga (termasuk beban bunga sewa pembiayaan)	(8,452,222)		(5,963,714)	Interest expense (including finance lease interest)
Penyusutan	(4,427,073)	8	(7,650,016)	Depreciation
Amortisasi	(982,412)	10	(756,105)	Amortisation
Penghasilan keuangan, kotor (Kerugian)/keuntungan	6,082,614		5,863,465	Finance income, gross Foreign exchange
kurs, bersih	(3,498)		7,459	(loss)/gain, net
Lain-lain	<u>397,562</u>		<u>609,048</u>	Others
Jumlah beban usaha	<u>(333,940,665)</u>		<u>(376,687,367)</u>	Total operating expenses
Laba sebelum pajak penghasilan	588,566,714		621,423,564	Profit before income tax
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	<u>36,835,422</u>	13c	<u>(863,242)</u>	Income tax benefit/(expense)
Laba tahun berjalan	625,402,136		620,560,322	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:				Other comprehensive income for the year:
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit and loss:
Keuntungan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	<u>1,358,616</u>		<u>292,588,861</u>	Gain from financial assets at fair value through other comprehensive income for the year
	<u>1,358,616</u>		<u>292,588,861</u>	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit and loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja	6,012,578	18	(823,508)	Remeasurement from post-employment benefits obligation
Pajak penghasilan terkait	(1,322,767)	13d	164,702	Related income tax
Dampak perubahan tarif pajak	<u>-</u>		<u>(14,142)</u>	Impact on changes in tax rates
	<u>4,689,811</u>		<u>(672,948)</u>	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	<u>6,048,427</u>		<u>291,915,913</u>	Other comprehensive income/ for the year, net of tax
Total laba komprehensif tahun berjalan	<u>631,450,563</u>		<u>912,476,235</u>	Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 3 - Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal/ Share capital	Laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ (loss) from financial assets at fair value through other comprehensive income	(Kerugian)/ keuntungan aktuarial, setelah pajak/ Actuarial (Loss)/gain, net of tax	Saldo laba/Retained earnings Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib/ Appropriated - statutory reserve	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/ Total
Saldo 1 Januari 2020	8,000,000,000	6,403,866	212,119	140,000,338	2,825,166,620	10,971,782,943
Penambahan modal	1,570,000,000	-	-	-	-	1,570,000,000
Pencadangan saldo laba	21	-	-	26,471,000	(26,471,000)	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:						
- Laba tahun berjalan		-	-	-	620,560,322	620,560,322
- Dividen	20	-	-	-	(110,827,000)	(110,827,000)
- Penghasilan komprehensif lain:						
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar		-	-	-	-	-
- Aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain		292,588,861	-	-	-	292,588,861
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja, setelah pajak		-	(672,948)	-	-	(672,948)
Saldo 31 Desember 2020	9,570,000,000	298,992,727	(460,829)	166,471,338	3,308,428,942	13,343,432,178
Pencadangan saldo laba	21	-	-	31,028,000	(31,028,000)	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:						
- Laba tahun berjalan		-	-	-	625,402,136	625,402,136
- Dividen	20	-	-	-	(186,168,000)	(186,168,000)
- Penghasilan komprehensif lain:						
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar		-	-	-	-	-
- Aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain		1,358,616	-	-	-	1,358,616
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja, setelah pajak		-	4,689,811	-	-	4,689,811
Saldo 31 Desember 2021	9,570,000,000	300,351,343	4,228,982	197,499,338	3,716,635,078	13,788,714,741

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 4 - Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Laba sebelum pajak penghasilan		588,566,714	621,423,564	Profit before income tax
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas:				Add items not affecting cash flows:
- Beban penyusutan	8	4,427,073	7,650,016	Depreciation expense -
- Beban amortisasi	10	982,412	756,105	Amortisation expense -
- (Pendapatan)/beban penyesuaian imbalan kerja	18	(10,735,478)	6,907,531	(Income)/expense from provision for employee benefits obligation
- Beban amortisasi aset hak guna	9	18,859,696	6,286,565	Right-of-use assets amortisation expense -
- Beban bunga sewa pembiayaan		<u>4,317,721</u>	<u>1,817,885</u>	Finance lease interest expense -
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		<u>606,418,138</u>	<u>644,841,666</u>	Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:				(Increase)/decrease in operating assets:
- Piutang usaha		(14,027,551)	(42,000,746)	Account receivables -
- Piutang lainnya		2,021,941	(176,349)	Other receivables -
- Biaya dibayar dimuka dan uang muka		(5,586,758)	422,641	Prepaid expenses and advances -
- Beban tangguhan		11,592,992	7,533,066	Deferred expenses -
- Pajak dibayar dimuka		2,256,684	340,235	Prepaid tax -
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi:				(Decrease)/increase in operating liabilities:
- Utang usaha		4,283,352	(682,682)	Account payables -
- Utang pajak		1,163,431	818,770	Taxes payable -
- Biaya yang masih harus dibayar, penyesuaian dan utang lain-lain		25,712,286	1,578,692	Accrued expenses, provisions and other payables
- Pembayaran manfaat imbalan kerja	18	(581,558)	(666,324)	Payment of employee benefit -
- Pendapatan tangguhan		<u>155,455,560</u>	<u>4,694,064</u>	Unearned income -
		<u>182,290,379</u>	<u>(28,138,633)</u>	
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		<u>788,708,517</u>	<u>616,703,033</u>	Net cash flow provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Penempatan investasi		433,563,485	2,793,244,028	Placement for investments
Pembelian aset tetap dan aset takberwujud	8,10	<u>(4,141,545)</u>	<u>(4,733,771)</u>	Acquisition of fixed assets and intangible assets
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi		<u>429,421,940</u>	<u>2,788,510,257</u>	Net cash flow provided from investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan modal saham	19	-	1,570,000,000	Share capital received
Pembayaran dividen	20	(186,168,000)	(110,827,000)	Dividend payment
Pembayaran sewa	27	<u>(21,907,776)</u>	<u>(7,302,592)</u>	Payment for lease
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan		<u>(208,075,776)</u>	<u>1,451,870,408</u>	Net cash flow (used in)/provided from financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas		1,010,054,681	4,857,083,698	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun		<u>4,883,892,973</u>	<u>26,809,275</u>	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas akhir tahun		<u>5,893,947,654</u>	<u>4,883,892,973</u>	Cash and cash equivalents at end of year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 14 tanggal 19 November 2020 yang memuat mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan serta perubahan modal dasar Perusahaan. Selanjutnya, perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077464.AH.01.02.TAHUN 2020 pada tanggal 19 November 2020.

Sesuai dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk:

- a) Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) di bidang infrastruktur;
- b) Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah; dan
- c) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat dan daerah.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan, antara lain:

- a) Memberikan penjaminan kewajiban finansial Pemerintah dalam skema perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ("KPBU") dalam proyek infrastruktur.
- b) Memberikan penjaminan terhadap kewajiban finansial Pemerintah di bidang infrastruktur.
- c) Memberikan penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan, dan penerbitan surat utang/obligasi.

1. GENERAL

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LLM No. 29 dated 30 December 2009. The Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010, dated 27 January 2010.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment was in accordance with Notarial Deed of Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 14 dated 19 November 2020 concerning change of the purposes and objective of the Company and change of the Company's authorised share capital. Subsequently, the amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decree No. AHU-0077464.AH.01.02.TAHUN 2020 dated 19 November 2020.

In accordance with adjustment of Article 3 of the Articles of Association, the Company's objective is to:

- a) To provide sovereign guarantees in infrastructure sectors;
- b) To provide sovereign guarantee for financing in other than infrastructure sectors based on the assignment from the Government; and
- c) To conduct activities related to the implementation of sovereign guarantees and other activities related to the implementation of project development that support the national economy both centralised and regional.

In achieving its objective, the Company may do, among others:

- a) To provide guarantee for the Government's financial obligations in the Public Private Partnership ("PPP") cooperation agreement in infrastructure projects.
- b) To provide guarantee for the Government's financial obligations in the infrastructure sector.
- c) To provide guarantees for default risk of the State-Owned Enterprises ("SOEs") based on the assignment and/or the provision set by the Minister of Finance arising from the implementation of loan agreements with financial institutions, and issuance of debt securities/bonds.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/2 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan, antara lain: (lanjutan)

- d) Memberikan penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") dan/atau pemerintah daerah berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan, dan penerbitan surat utang/obligasi.
- e) Memberikan penjaminan atas risiko finansial lainnya kepada BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat perolehan pembiayaan atau fasilitas mitigasi risiko finansial selain pinjaman dan surat utang/obligasi.
- f) Memberikan penjaminan kepada pelaku usaha lainnya sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- g) Memberikan jasa konsultasi, penyediaan informasi, fasilitas perencanaan, penyiapan, dan penilaian kelayakan, atas proyek atau program serta hal lain terkait mitigasi risiko/pemantauan risiko dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek.
- h) Kerja sama dengan pihak lain termasuk lembaga keuangan internasional dalam rangka pelaksanaan pemberian pinjaman.
- i) Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- j) Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Perusahaan merupakan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ("BUPI") yang beroperasi sebagai suatu entitas "single window" dalam melakukan proses, penilaian (*appraisal*) dan penyusunan struktur (*structuring*) untuk penjaminan yang diberikan Pemerintah Indonesia pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK"). Penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan memiliki dukungan pemenuhan kelayakan dan kapasitas oleh, bila diperlukan, Pemerintah Republik Indonesia, lembaga keuangan multilateral atau kombinasinya - untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

1. GENERAL (continued)

In achieving its objective, the Company may do, among others: (continued)

- d) To provide guarantees for default risk of the Regional Owned Enterprises based on the assignment and/or the provision set by the Minister of Finance arising from the implementation of loan agreements with financial institutions, and issuance of debt securities/bonds.*
- e) To provide guarantee for other financial risks to SOEs, Regional Owned Enterprises and/or Enterprises based on the assignment and/or provision set by the Minister of Finance arising from obtaining financing or financial risk mitigation facilities other than loan and debt securities/bonds.*
- f) To provide guarantee to other business entities in accordance with the assignments and/or provisions set by the Minister of Finance.*
- g) To provide consulting services, providing informations, planning facilities, preparation, and feasibility assessment, on project or program and other matters related to risk mitigation/risk monitoring and/or activities related to risk allocation and project financing structure.*
- h) Cooperation with other parties, including international financial institutions in implementation of guarantee provision.*
- i) Joint ventures or equity participation in other legal entities that have similar goals and objectives with the Company's.*
- j) Other activities to achieve the goals and objectives of the Company*

The Company is BUPI that operates as a "single window" entity for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided by the Government of Indonesia for infrastructure projects proposed by the Government's Contracting Agencies ("GCA"). Guarantees provided by the Company have eligibility and capacity supports by, as necessary, the Government of Indonesia ("GOI"), a multilateral financing agency or a combination thereof - for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/3 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Capital Place Office Tower, Lantai 7 dan 8, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2021
Komisaris Utama	Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	Wahyu Utomo
Komisaris	Mariatul Aini
Direktur Utama	Muhammad Wahid Sutopo
Direktur	-
Direktur	Andre Permana

1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 885/KMK.06/2017, masa jabatan berakhir pada tanggal 15 Juli 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan memiliki 143 pegawai (2020: 130 pegawai) (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Perusahaan diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 25 Februari 2022.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

1. GENERAL (continued)

The Company is domiciled in Indonesia, its office is located at Capital Place Office Tower, 7th and 8th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2010.

As at 31 December 2021 and 2020, the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors were as follows:

	2020	
Awan Nurmawan Nuh	President Commissioner	
Wahyu Utomo	Commissioners	
Mariatul Aini	Commissioners	
Muhammad Wahid Sutopo	President Director	
Salusra Satria ¹⁾	Directors	
Andre Permana	Directors	

1) Based on KMK No. 885/KMK.06/2017, term of office has ended on 15 July 2021.

As at 31 December 2021, the Company has 143 employees (2020: 130 employees) (unaudited).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Company were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 25 February 2022.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the Company's financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis. The financial statements are prepared under the historical cost convention, as modified for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/4 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat. Seluruh angka dalam mata uang selain Rupiah dinyatakan dalam jumlah penuh.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2021:

- Penyesuaian tahunan PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan";
- Penyesuaian tahunan PSAK 48: "Penurunan nilai aset";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- PSAK 62: "Kontrak asuransi";
- Amendemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 73: "Sewa";

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The cash flows statement is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of Rupiah, unless otherwise stated. Amounts in currencies other than Rupiah are stated in full amount.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting 1 January 2021:

- Annual improvement SFAS 1: "Presentation of financial statements";
- Annual improvement SFAS 48: "Asset impairment";
- Amendment of SFAS 71: "Financial instrument";
- Amendment of SFAS 55: "Financial instrument: Recognition and measurement";
- SFAS 62: "Insurance contract";
- Amendment of SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";
- Amendment of SFAS 73: "Lease";

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/5 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)**

**Perubahan pada pernyataan standar
akuntansi keuangan dan interpretasi
pernyataan standar akuntansi keuangan
(lanjutan)**

Berikut ini adalah standar akuntansi
keuangan, perubahan, dan interpretasi
standar akuntansi keuangan yang berlaku
efektif sejak 1 Januari 2021: (lanjutan)

- PSAK 110: "Akuntansi Sukuk"; dan
- PSAK 111: "Akuntansi Wa'd".

Implementasi dari standar-standar tersebut
tidak menghasilkan perubahan substansial
terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan
dan tidak memiliki dampak yang material
terhadap laporan keuangan di tahun berjalan
atau tahun sebelumnya.

b. Penjabaran mata uang asing

a. Mata uang fungsional dan penyajian

Pos-pos yang disertakan dalam laporan
keuangan Perusahaan diukur
menggunakan mata uang yang sesuai
dengan lingkungan ekonomi utama
dimana Perusahaan beroperasi ("mata
uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam
Rupiah ("Rp") yang merupakan mata
uang fungsional dan penyajian
Perusahaan.

b. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing
dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah
dengan menggunakan kurs yang berlaku
pada tanggal transaksi. Pada tanggal
pelaporan, aset dan liabilitas moneter
dalam mata uang asing dijabarkan
dalam mata uang Rupiah dengan
menggunakan kurs penutup. Kurs yang
digunakan sebagai acuan adalah kurs
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Keuntungan dan kerugian dari selisih
kurs yang timbul dari transaksi dalam
mata uang asing dan penjabaran aset
dan liabilitas moneter dalam mata uang
asing, diakui pada laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)**

**Changes to the statements of financial
accounting standards and interpretations
of financial accounting standards
(continued)**

The followings are financial accounting
standard, amendments and interpretation of
financial accounting standard which become
effective starting 1 January 2021: (continued)

- SFAS 110: "Sukuk Accounting"; and
- SFAS 111: "Wa'd Accounting"

The implementation of the above standards
did not result in substantial changes to the
Company's accounting policies and had no
material impact to the financial statements for
current year or prior financial years.

b. Foreign currency translation

a. Functional and presentation currency

Items included in the financial
statements of the Company are
measured using the currency of the
primary economic environment in which
the Company operates (the "functional
currency").

The financial statements are presented
in Rupiah ("Rp"), which is the functional
and presentation currency of the
Company.

b. Transactions and balances

Transactions denominated in foreign
currency are converted into Rupiah
using the exchange rates prevailing at
the dates of the transactions. At the
reporting date, foreign currency
monetary assets and liabilities are
translated using the closing exchange
rate prevailing at that date. Exchange
rate used as benchmark is the rate which
is issued by Bank Indonesia. Foreign
exchange gains and losses arising from
transactions in foreign currencies and
from the translation of foreign currency
monetary assets and liabilities are
recognised in the profit or loss.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/6 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, (iii) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

- (i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, investasi dalam deposito berjangka, piutang usaha, uang jaminan yang dapat dikembalikan serta investasi Perusahaan pada obligasi tertentu.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

d. Financial assets and liabilities

Financial assets

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets at fair value through profit or loss (ii) financial assets at fair value through other comprehensive income, (iii) financial assets measured at amortised cost. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial application.

- (i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading, which is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short-term. The Company has no financial assets at fair value through profit or loss.

- (ii) Financial assets measured at amortised cost

Financial assets at amortised cost are recognised initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The Company's financial assets at amortised cost comprise of cash and cash equivalents, investment in time deposits, account receivables, refundable deposits and the Company's investment in certain bonds.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/7 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

- (iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah aset keuangan non-derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan perubahan ekuitas hingga dihentikan pengakuannya. Investasi Perusahaan pada obligasi tertentu diklasifikasikan dalam kategori ini.

Penilaian pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Perusahaan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Perusahaan atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

- (iii) Financial assets at fair value through other comprehensive income

Financial assets at fair value through other comprehensive income are non-derivative financial assets that are either designated in this category or not classified in any other categories. After initial measurement, these financial assets are measured at fair value with unrealised gains or losses recognised in stockholders' equity until the financial assets are derecognised. The Company's investments in certain bonds are classified in this category.

Solely payments of principal and interest ("SPPI") assessment

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Company's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/8 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Perusahaan. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 71 harus konsisten dengan bagaimana portfolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- Bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (berdasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Perusahaan dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Perusahaan dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Perusahaan untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Company. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but not limited to:

- *How the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 71 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*
- *The risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *How managers of the business unit are compensated (based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

The Company can reclassify all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Company reasonably expect to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Company did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/9 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Staging Criteria

Aset keuangan harus dialokasikan ke salah satu dari tiga tahap penurunan nilai (tahap 1, tahap 2, tahap 3) dengan menentukan apakah terjadi penungkatan risiko kredit yang signifikan atas instrumen keuangan sejak pengakuan awal atau apakah fasilitas tersebut gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan.

Tahap 1: mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, ECL 12 bulan akan dihitung.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Business model assessment (continued)

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

Impairment of financial asset

At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Company compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Staging Criteria

Financial assets have to be allocated to one of the three impairment stages (stage 1, stage 2, stage 3) by determining whether significant increase in credit risk has occurred on financial instrument since initial recognition or whether the facility is defaulted on the reporting date.

Stage 1: includes financial instruments that have not had a significant increase in credit risk since initial recognition or that have low credit risk at the reporting date. For these assets, 12-month ECL are recognised.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/10 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Staging Criteria (lanjutan)

Tahap 2: mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali jika memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan), namun tidak memiliki bukti penurunan nilai yang obyektif. Untuk aset ini, ECL *lifetime* dihitung. ECL *lifetime* adalah kerugian kredit yang diharapkan yang dihasilkan dari semua kejadian default yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan.

Tahap 3: mencakup instrumen keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Tahap ini berisi debitor yang telah *impaired* (gagal bayar). Faktor utama dalam menentukan apakah instrumen keuangan memerlukan ECL 12 bulan (tahap 1) atau ECL *lifetime* (tahap 2) disebut dengan kriteria Peningkatan Signifikan dalam Risiko Kredit (SICR). SICR memerlukan pengkajian apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan klasifikasi liabilitas keuangan ini tidak diungkapkan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Staging Criteria (continued)

Stage 2: includes financial instruments that have had significant increase in credit risk since initial recognition (unless they have low credit risk at the reporting date) but do not have objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL are recognised. Lifetime ECL are the expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of the financial instrument.

Stage 3: includes financial instruments that have objective evidence of impairment at the reporting date. This stage has obligors that already are impaired (defaulted). The key factor in determining whether a financial instrument attracts 12-months (stage 1) or lifetime ECL (stage 2) is called by the criteria of Significant Increase in Credit Risk (SICR). SICR criteria involves assessment of whether there has been a significant increase in credit risk at each reporting date.

Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost.

At the reporting date, there are no financial liabilities classified as financial liabilities at fair value through profit or loss. Therefore, the accounting policies related to this classification are not disclosed.

Financial liabilities measured at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortised cost.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/11 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya dikurangi biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain, dan pinjaman penerusan diklasifikasikan dalam kategori ini.

**Pemberhentian pengakuan atas liabilitas
keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial liabilities (continued)

Financial liabilities measured at amortised
cost (continued)

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value minus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Account payables, accrued expenses, provisions and other payables, and two-step loans are classified in this category.

Derecognition of financial liabilities

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the statements of profit or loss.

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/12 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diamortisasi dan diakui dalam laba rugi sepanjang umur dari instrumen tersebut.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

Determination of fair value (continued)

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is amortised and recognised in profit or loss on over the life of the instrument.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/13 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input (sebagai contoh LIBOR yield curve, nilai tukar mata uang asing, volatilitas dan counterparty spreads) yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

Reklasifikasi aset keuangan

Perusahaan diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sedangkan reklasifikasi untuk liabilitas keuangan tidak diperkenankan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Perusahaan seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

Determination of fair value (continued)

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair values are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using inputs (for example, LIBOR yield curve, foreign exchange rates, volatilities and counterparty spreads) existing at the dates of the statement of financial position.

Offsetting

Financial assets and liabilities are offset, and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Reclassification of financial assets

The Company is permitted to reclassify its financial assets if the Company change its business model for managing financial assets while reclassification for financial liabilities is not permitted.

The Company will reclassify financial assets affected by changes in business models. Changes in the Company's business model objectives must have an impact before the reclassification date.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/14 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah:

- perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar);
- hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan; dan
- pengalihan aset keuangan antara bagian dari Perusahaan dengan model bisnis berbeda.

Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Perusahaan tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya

Kontrak jaminan keuangan yang dimiliki Perusahaan baik penjaminan KPBU maupun penjaminan kewajiban pembayaran BUMN (Non-KPBU) adalah dalam bentuk perjanjian penjaminan, yang mengharuskan Perusahaan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban finansial sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (untuk KPBU) maupun Perjanjian Pinjaman (untuk Non-KPBU), yang tidak dapat dipenuhi oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK") kepada Badan Usaha (untuk KPBU) atau yang tidak dapat dipenuhi oleh BUMN Terjamin kepada pemberi pinjaman (untuk Non-KPBU).

Pendapatan premi dari kontrak jaminan keuangan yang diperoleh (*recurring fee*), diamortisasi selama jangka waktu penjaminan dengan menggunakan metode garis lurus.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

**Reclassification of financial assets
(continued)**

The followings are not a change in business model:

- changes in intention relating to certain financial assets (even in situations significant changes in market conditions);
- temporary loss of certain markets for financial assets; and
- transfer of financial assets between parts of the Company with different business models.

The Company apply a prospective reclassification of the date of the reclassification. The Company does not restate profits, losses (including impairment profit or loss), or interest recognised earlier.

Financial guarantee contracts and other commitment receivables

Financial guarantee contracts that the Company has both PPP guarantees and guarantees for SOEs payment obligation (Non-PPP) is in form of guarantee agreements, which requires the Company to make payments to the Investors when Government's Contracting Agencies ("GCA") is unable to fulfill its financial obligation in accordance with the terms in a Cooperation Agreements (for PPP) or requires the Company to make payments to the lenders when guaranteed SOEs is unable to fulfill its financial obligation, in accordance with the terms in a Loan Agreements (for Non-PPP).

The guarantee fee income earned from financial guarantee contracts (*recurring fee*), is amortised over the period of guarantee using the straight line method.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/15 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

**Kontrak jaminan keuangan dan tagihan
komitmen lainnya (lanjutan)**

Kerugian kredit ekspektasian nilai atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit dihitung berdasarkan analisa spesifik untuk masing-masing risiko dalam perjanjian penjaminan. Kerugian kredit ekspektasian atas jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain.

Perusahaan memiliki perjanjian regres dengan PJPB terkait dengan penjaminan KPBU, yang akan memberikan hak tagih kepada PJPB atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Badan Usaha ("BU") akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPB kepada BU.

Perusahaan juga memiliki perjanjian regres dengan BUMN Terjamin terkait dengan penjaminan atas gagal bayar dari BUMN yang melakukan pinjaman dan/atau penerbitan obligasi untuk membiayai penyediaan infrastruktur, yang akan memberikan hak tagih kepada BUMN atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada pemberi pinjaman akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban pembayaran BUMN kepada pemberi pinjaman.

e. Investasi

Investasi terdiri dari deposito berjangka, obligasi korporasi yang diperdagangkan di pasar uang dan di bursa efek serta Obligasi Pemerintah dan reksa dana.

Obligasi Pemerintah adalah surat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dibeli dari pasar.

Perusahaan telah mengklasifikasikan investasi pada sukuk sebagai diukur pada nilai biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

**Financial guarantee contracts and other
commitment receivables (continued)**

Expected credit loss on financial guarantee contracts with credit risk are assessed based on each specific risk under the guarantee agreement. Expected credit loss on financial guarantees is recognised as other liabilities.

The Company has recourse agreement with GCA related to PPP's guarantee, which will give the Company the rights to claim or recourse back to GCA for any payment that have been made by the Company to the Investors, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors.

The Company also has recourse agreement with guaranteed SOEs related to guarantees of SOEs' loan and/or bond issuance payment defaults in financing infrastructure developments, which will give the Company the rights to claim or recourse back to SOEs for any payment that have been made by the Company to the lenders, due to inability of SOEs in fulfilling its financial obligations to the lenders.

e. Investments

Investments consist of time deposits, corporate bonds traded in the money market and at the stock exchange and Government Bonds and mutual funds.

Government bonds represent bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia purchased from the market.

The Company has classified all investment in sukuk as amortised cost in accordance with SFAS 110 "Accounting for Sukuk".

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/16 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

e. Investasi (lanjutan)

Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode jatuh tempo dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Prasarana kantor	4
Peralatan komputer	4
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	4

Nilai sisa aset dan masa manfaat aset tetap ditelaah, dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Jika aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Investments (continued)

Investment in sukuk measured at amortised cost are stated at acquisition cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity based on straight line method.

f. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives, as follows:

<i>Leasehold improvement</i>
<i>Computer equipments</i>
<i>Office equipments, furnitures and fixtures</i>

The assets residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the profit or loss.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/17 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

g. Aset takberwujud

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Aset takberwujud diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Amortisasi aset takberwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

h. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Intangible assets

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets.

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of 4 years.

h. Taxation

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity. The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the reporting date.

Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax assets is realised or the deferred income tax liability is settled.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/18 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

h. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

i. Liabilitas imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2020, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2020 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas pasti pada tanggal pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Taxation (continued)

Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretations. Where appropriate, it established provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

i. Employee benefits obligation

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they are accrued to the employees.

Pension benefits

The Company is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the Labor Law No. 11 Tahun 2020 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Labor Law No. 11 Tahun 2020 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of reporting date of Government Bonds that are denominated in the Rupiah currency in which the benefit will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/19 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

i. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun (lanjutan)

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran program pensiun baik karena diwajibkan, berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun karena Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 mengharuskan Perusahaan membayar jumlah tertentu kepada para karyawan yang telah memasuki usia pensiun yang ditentukan berdasarkan masa kerja, Perusahaan rentan terhadap kemungkinan untuk membayar kekurangan apabila iuran kumulatif kurang dari jumlah tertentu. Sebagai akibatnya untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diberlakukan seolah-olah sebagai program imbalan pasti.

Biaya jasa kini dibebankan pada saat terjadinya.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Employee benefits obligation (continued)

Pension benefits (continued)

For defined contribution plans, the Company pays contributions to pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Job creation Law No. 11 of 2010 requires an entity to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on, the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount in particular when the cumulative contributions are less than that amount. Consequently for financial reporting purposes, defined contribution plans are effectively treated as if they were defined benefit plans.

Current service costs are expensed in the prevailing period.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Past service costs arising from amendment of curtailment programs are recognised as expense in profit or loss when incurred.

Other long-term benefits

Other long-term employee benefits such as long service leave is calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. These benefits are accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan, except for remeasurements which are recognised in profit or loss.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/20 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Utang usaha dan lain-lain

Utang usaha dan lain-lain merupakan liabilitas keuangan. Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

k. Penyisihan

Provisi diakui saat Perusahaan memiliki kewajiban (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan jumlah liabilitas tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

l. Pendapatan dan beban

Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi serta pendapatan provisi dan komisi.

Pendapatan premi terdiri dari *guarantee fee* dan *processing fee*. Pendapatan dari *guarantee fee* diakui berdasarkan jangka waktu dari periode penjaminan tergantung dari pengaturan dalam kontrak. Pendapatan dari *processing fee* diakui pada saat pendapatan diperoleh.

- (i) *Guarantee fee* merupakan pendapatan yang diterima atas jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan *exposure* oleh Perusahaan.
- (ii) *Processing fee* merupakan pendapatan yang diterima atas adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin.

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari *upfront fee* dan pendapatan provisi dan komisi lainnya.

- (i) *Upfront fee* adalah pendapatan yang diterima pada saat kontrak penjaminan ditandatangani dan/atau pada saat penjaminan telah efektif, sesuai dengan kesepakatan dalam surat imbal jasa, dan tidak dapat dikembalikan.
- (ii) Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Account and other payables

Account and other payables are financial liabilities. Account and other payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

k. Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are not recognised for future operating losses.

l. Revenue and expenses

Revenue from guarantee consists of premium income, fees and commissions.

Premium income consists of *guarantee fee* and *processing fee*. Revenue from *guarantee fee* is recognised based on the duration of guarantee period depending on the arrangement in the contract. Revenue from *processing fee* is recognised when earned.

- (i) *Guarantee fee* is earned for guarantee provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposure of the Company.
- (ii) *Processing fee* is earned for services process if there is a claim submitted to the guarantor.

Fees and commissions consist of *upfront fee* and other fees and commissions.

- (i) *Upfront fee* is recognised upon signing of guarantee contract and/or the effectiveness of guarantee, in accordance with fee letter, and non-refundable.
- (ii) Other fees and commission is recognised as incurred.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/21 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

I. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan penjaminan *loss limit* merupakan *guarantee fee* yang diakui sebesar porsi margin dari imbal jasa penjaminan *loss limit* yang diterima saat diberikannya penjaminan dan diamortisasi selama periode penjaminan atau periode pelaksanaan jasa.

Pendapatan jasa dari penyiapan proyek dan pendampingan transaksi diakui ketika jasa telah dilaksanakan, kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan biaya-biaya yang terjadi dapat diukur secara handal. Pendapatan diakui sebesar biaya-biaya yang terjadi ditambah margin yang diakui untuk semua penyelesaian tahapan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pendapatan dari pendapatan bunga deposito dan investasi pendapatan tetap diakui dengan menggunakan metode bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses penjaminan, ditangguhkan terlebih dahulu dan disajikan sebagai beban tangguhan. Biaya tersebut akan dibebankan pada laporan laba rugi Perusahaan, ketika Perusahaan mengakui pendapatan penjaminan.

m. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Pada tanggal permulaan sewa Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan. Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Revenue and expenses (continued)

Revenue from loss limit guarantee service is guarantee fee which recognised at margin portion of loss limit guarantee service fees that received when the guarantee was given and are amortised during guarantee period or period of service.

Revenue from project preparation and transaction advisory is recognised when services have been rendered, where it is probable that economic benefits will flow to the Company and expenses incurred can be reliably measured. Revenue is recognised from costs incurred plus recognised margin for all the work in process up to the stage completion as agreed.

Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income are recognised using the effective interest method.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Costs that are directly related to the guarantee process will be deferred and presented as deferred charges. The costs will be expensed to the Company's profit or loss, when Company recognised revenue from guarantee.

m. Leases

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

The Company recognises a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date. The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/22 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset Hak-Guna" dan "Liabilitas sewa pembiayaan" di dalam laporan posisi keuangan.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima
- biaya langsung awal, dan
- biaya restorasi.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Leases (continued)

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company presents right-of-use assets as part of "Right of Use Asset" and "Finance lease liabilities" in the statement of financial position

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- *the amount of the initial measurement of lease liability*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received*
- *any initial direct costs, and*
- *restoration costs.*

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term leases

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/23 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang didefinisikan antara lain:

- i. perusahaan di bawah pengendalian Perusahaan;
- ii. perusahaan asosiasi;
- iii. investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
- iv. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam catatan III di atas;
- v. karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
- vi. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Faktor risiko keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

(1) Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Perusahaan dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak signifikan terhadap laba rugi setelah pajak Perusahaan untuk tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with SFAS 7 "Related Party Disclosures" which are defined, among others, as:

- i. entities under the control of the Company;
- ii. associated companies;
- iii. investors with an interest in the voting that gives them significant influence;
- iv. entities controlled by investors under note III above;
- v. key employees and family members; and
- vi. entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Financial risk factors

The main risks arising from the Company's financial instruments are market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial markets on the Company's financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

(1) Market risk

(i) Foreign currency exchange rate risk

The Company has no significant foreign exchange risks since the Company's transactions are performed using the Company's functional currency. As at 31 December 2021 and 2020, the Company has no material financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Company's functional currency will not significantly impact to the Company's current year profit after tax.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/24 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(1) Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas atau nilai wajar di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Aset Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi. Investasi Perusahaan terutama terdiri dari deposito dan investasi dengan pendapatan tetap. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan bunga Perusahaan, oleh karena deposito Perusahaan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun (jangka pendek), sementara pengelolaan dana investasi lainnya terutama merupakan investasi dengan pendapatan tetap (*fixed income*).

Lebih lanjut, perubahan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi Perusahaan karena investasi Perusahaan dikategorikan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan investasi yang diukur dengan biaya diamortisasi dengan suku bunga tetap.

Liabilitas Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah pinjaman penerusan dengan suku bunga variabel yang menggunakan SUN Benchmark dengan tenor 20 tahun. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi beban bunga Perusahaan.

(2) Risiko kredit

Perusahaan memitigasi risiko kredit dengan menetapkan kebijakan investasi yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta mengatur mandat investasi untuk jenis, batasan alokasi, serta kriteria counterparty yang selektif.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(1) Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Company's financial assets which are exposed to interest rate risk are investments. The Company's investments mostly consist of time deposit and fixed income investment. The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company's interest income, since the time deposit will mature within 1 (one) year (short-term), while most of the other investment are fixed rate investment.

Moreover, the changes in interest rate will not impact the Company's profit and loss due to the financial assets are classified as investment at fair value through other comprehensive income and investment at amortised cost with fixed interest rate.

The Company's financial liabilities which are exposed to interest rate risk are two-step loans with variable interest rate using SUN Benchmark with 20 years tenor. The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company's interest expense.

(2) Credit risk

The Company mitigates its credit risk by setting a prudent investment policy, including investment mandates for type of investment, portfolio, allocation as well as selective criteria for counterparty.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/25 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(2) Risiko kredit (lanjutan)

Deposito berjangka, deposito dan kas di bank ditempatkan pada bank-bank domestik yang memiliki reputasi yang tinggi sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
AAA	3,668,429,620	3,289,641,249
AA+	2,225,008,522	4,929,430,825
AA	<u>944,020,000</u>	<u>637,020,000</u>
	<u>6,837,458,142</u>	<u>8,856,092,074</u>

Untuk investasi yang ditempatkan pada efek hutang dengan pendapatan tetap, Perusahaan menempatkan investasinya pada surat berharga hutang di luar Pemerintah dengan peringkat investasi paling rendah AA.

Eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kas dan setara kas	5,893,438,142	4,883,342,074
Investasi	7,948,301,268	8,380,506,137
Piutang usaha	169,217,041	155,189,490
Piutang lainnya	10,735,297	12,757,238
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	<u>5,369,039</u>	<u>5,369,039</u>
	<u>14,027,060,787</u>	<u>13,437,163,978</u>

Semua aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah aset keuangan tahap 1, sehingga perusahaan tidak membentuk kerugian kredit ekspektasian. Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas *staging criteria*.

(3) Risiko likuiditas

Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(2) Credit risk (continued)

Time deposits, time deposits classified as cash and cash equivalents and cash in bank are placed with highly reputable domestic banks as follows:

	AAA
	AA+
	AA

For placement of investment in fixed income debt securities, the Company places its investments on debt securities outside Government with investment grade at the lowest of AA.

The maximum credit risk on the Company's financial assets as at 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	Cash and cash equivalents
	Investments
	Account receivables
	Other receivables
	Refundable deposits

All of the Company's financial assets as at 31 December 2021 and 2020 are stage 1, therefore the Company has provided no expected credit loss. Refer to Note 2d for the accounting policy for staging criteria.

(3) Liquidity risk

The Company has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/26 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(3) Risiko likuiditas (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain dan pinjaman penerusan yang jumlahnya tidak material terhadap aset likuid Perusahaan. Perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(3) Liquidity risk (continued)

As at 31 December 2021 and 2020, the Company's financial liabilities consist of account payables, accrued expenses, provisions, and other payables and two-step loans which are immaterial to the total Company's liquid assets. The Company is highly liquid as it has financial instruments in form of cash and cash equivalents and investments.

31 Desember/December 2021					
	Jumlah/ Total	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No maturity contract	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	7,372,764	-	7,372,764	-	Account payables
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain	65,281,828	-	39,914,312	25,367,516	Accrued expenses, provisions, and other payables
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	-	55,126,686	Two-step loans
	<u>127,781,278</u>	<u>-</u>	<u>47,287,076</u>	<u>80,494,202</u>	
31 Desember/December 2020					
	Jumlah/ Total	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No maturity contract	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	3,089,412	-	3,089,412	-	Account payables
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain	39,569,542	-	39,500,411	69,131	Accrued expenses, provisions, and other payables
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	-	55,126,686	Two-step loans
	<u>97,785,640</u>	<u>-</u>	<u>42,589,823</u>	<u>55,195,817</u>	

b. Manajemen risiko modal

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

b. Capital risk management

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/27 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Manajemen risiko modal (lanjutan)

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

c. Estimasi nilai wajar

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
Input diluar harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas Perusahaan yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2021 dan 2020.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Capital risk management (continued)

The Company periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may use internal funding to reduce debt.

c. Fair value estimation

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities; either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and
- Level 3
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following table presents the Company's asset and liabilities that are measured at fair value at 31 December 2021 and 2020.

31 Desember/December 2021						
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar						Financial assets at fair value
Investasi pada instrumen utang	6.762.411.795	-	6.762.411.795	-	6.762.411.795	Debt investments
Jumlah	6.762.411.795	-	6.762.411.795	-	6.762.411.795	Total

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/28 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas Perusahaan yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2021 dan 2020. (lanjutan)

31 Desember/December 2020						
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Tingkat 1/ <i>Level 1</i>	Tingkat 2/ <i>Level 2</i>	Tingkat 3/ <i>Level 3</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					Financial assets at fair value	
Investasi pada instrumen utang	4.080.103.547	-	4.080.103.547	-	4.080.103.547	Debt investments
Jumlah	4.080.103.547	-	4.080.103.547	-	4.080.103.547	Total

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

- (i) Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan

Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, nilai tercatat dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar (level 2 - hirarki nilai wajar).

- (ii) Investasi pada instrumen utang

Nilai wajar dari investasi pada instrumen utang ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa (level 2 - hirarki nilai wajar).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Fair value estimation (continued)

The following table presents the Company's asset and liabilities that are measured at fair value at 31 December 2021 and 2020. (continued)

Financial instrument not measured at fair values

- (i) Cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits

The fair value of cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of cash and cash equivalents, account receivables and other receivables were a reasonable approximation of its fair value (level 2 - fair value hierarchy).

- (ii) Debt investments

The fair value of debt investments are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity (level 2 - fair value hierarchy).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/29 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada
nilai wajar (lanjutan)

- (iii) Utang usaha, biaya yang masih harus
dibayar dan utang lain-lain

Nilai wajar dari utang usaha, biaya yang
masih harus dibayar dan utang lain-lain
diperkirakan adalah sebesar nilai
 tercatatnya dikarenakan sisa jatuh tempo
di bawah satu tahun (level 2 - hirarki nilai
wajar).

- (iv) Pinjaman penerusan

Nilai wajar untuk pinjaman penerusan
dengan suku bunga mengambang, nilai
 tercatatnya mendekati nilai wajarnya
(level 2 - hirarki nilai wajar).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Fair value estimation (continued)

Financial instrument not measured at fair
values (continued)

- (iii) Account payables, accrued expenses
and other liabilities

The fair value of account payables,
accrued expenses and other liabilities
are approximating their carrying
amounts since the maturity is below one
year (level 2 - fair value hierarchy).

- (iv) Two-step loans

The fair value for two-step loans with
floating interest rate, the carrying value
approximates its fair value (level 2 - fair
value hierarchy).

**4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING**

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam
rangka penyusunan laporan keuangan dimana
dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam
menentukan metodologi yang tepat untuk
penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang
berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan
liabilitas atas tahun keuangan satu tahun
kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang
diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik
yang didasarkan pada standar yang berlaku.
Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara
terus menerus dan berdasarkan pengalaman
masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan
atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat
berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen
atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang
timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan
asumsi semula.

**4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGEMENTS**

Certain estimates and assumptions are made in
the preparation of the financial statements and
these require management judgement in
determining the appropriate methodology for
valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions
that affect the reported amounts of assets and
liabilities within the next financial year. All
estimates and assumptions required in
conformity with SFAS are best estimates
undertaken in accordance with the applicable
standard. Estimates and judgements are
evaluated on a continuous basis, and are based
on past experiences and other factors, including
expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are
based on management's best knowledge of
current events and activities, actual result may
differ from those estimates and assumptions.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/30 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar karyawan dan menyesuaikan dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

b. Penyisihan atas kewajiban terkait perjanjian penjaminan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah kewajibannya atas proyek KPBU dan non-KPBU, baik dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Untuk proyek KPBU, Perusahaan memiliki hak regres kepada PJPK terkait segala pembayaran klaim yang akan dilakukan Perusahaan, akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada BU. Untuk proyek non-KPBU, Perusahaan juga memiliki hak regres kepada BUMN Terjamin terkait risiko gagal bayar BUMN Terjamin atas pinjaman yang diberikan.

**4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGEMENTS (continued)**

Key sources of estimation uncertainty:

a. Employee benefits obligation

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

b. Claim provision related to guarantee agreement

At each reporting date, the Company assess its obligations for PPP and non-PP project, in form of potential claim and/or claim on risks covered by the Company under guarantee agreements, to determine whether such liabilities should be recognised in the financial statements. For PPP project, the Company has recourse to GCA in relation with any payments that would be made by the Company, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors. For non-PPP project, the Company also has recourse to guaranteed SOEs related to risk of default of the loans.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/31 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

c. Beban tangguhan dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti objektif bahwa proyek-proyek yang dibentuk dan memiliki beban tangguhan masih dapat direalisasikan sebagai pendapatan penjaminan pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah proyek-proyek yang sedang berlangsung dapat mencapai penandatanganan perjanjian, utamanya berdasarkan kondisi terkini dan informasi resmi mengenai kelanjutan proyek yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelelangan proyek pada akhir tiap periode pelaporan.

Penyisihan penurunan nilai atas beban tangguhan dibentuk dan dibebankan dalam laporan laba rugi ketika Perusahaan mendapatkan informasi dan konfirmasi mengenai ketidakpastian atas realisasi proyek.

4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Key sources of estimation uncertainty:
(continued)

c. Deferred charges and allowance for impairment losses

The Company continually evaluates objective evidence of projects that had deferred charges could be recognised as revenues as at the end of each reporting period. The Company uses its judgement to assess whether the project will achieve financial close that are mainly based on latest conditions and existing official information about the continuity of project issued by the stakeholders in regard to the tender process at the end of each reporting period.

Provision for impairment losses on deferred expense is recorded and charged to profit and loss when the Company obtained information and confirmations about uncertainty of project realisation.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2021	2020	
Kas	509,512	550,899	Cash on hand
Bank	47,838,142	1,601,902,074	Cash in banks
Deposito	5,845,600,000	3,281,440,000	Time deposits
	<u>5,893,947,654</u>	<u>4,883,892,973</u>	

Deposito dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga 3,00% - 4,00% per tahun di 2021 (2020: 4,50% - 7,25%).

Seluruh kas dan setara kas merupakan aset keuangan dalam tahap 1 dan tidak ada mutasi antar tahap selama tahun 2021.

Kerugian kredit ekspektasian telah dihitung sesuai dengan persyaratan penurunan nilai PSAK 71, dan kerugian kredit ekspektasian tidak material.

Time deposits with original maturities of three months or less earned interest rates 3.00% - 4.00% per annum in 2021 (2020: 4.50% - 7.25%).

All cash and cash equivalents are financial assets in stage 1 and there is no movement between stages during the year 2021.

Expected credit loss has been calculated according to impairment requirements of SFAS 71, and the expected credit loss was immaterial.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/32 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Informasi terkait pihak-pihak berelasi
diungkapkan pada Catatan 24.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Information in respect of related parties is
disclosed in Note 24.

6. INVESTASI

6. INVESTMENTS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Deposito berjangka	944,020,000	3,972,750,000	Time deposits
Investasi dengan pendapatan tetap			Fixed income investments
- Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6,762,411,795	4,080,103,547	Investment at fair value through - other comprehensive income
- Investasi yang diukur pada biaya diamortisasi	189,997,846	189,929,838	Investment at amortised cost -
- Investasi diukur pada biaya perolehan	<u>51,871,627</u>	<u>137,722,752</u>	Investments at cost -
	<u>7,948,301,268</u>	<u>8,380,506,137</u>	

Seluruh investasi merupakan aset keuangan dalam tahap 1 dan tidak ada mutasi antar tahap selama tahun 2021.

All investments are financial assets in stage 1 and there is no movement between stages during the year 2021.

Kerugian kredit ekspektasian telah dihitung sesuai dengan persyaratan penurunan nilai PSAK 71, dan kerugian kredit ekspektasian tidak material.

Expected credit loss has been calculated according to impairment requirements of SFAS 71, and the expected credit loss was immaterial.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi
diungkapkan pada Catatan 24.

Information in respect of related parties is
disclosed in Note 24.

a) Deposito berjangka

a) Time deposits

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Swasta	944,020,000	637,020,000	Private banks
Pemerintah	<u>-</u>	<u>3,335,730,000</u>	State-Owned banks
	<u>944,020,000</u>	<u>3,972,750,000</u>	

Deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari tiga bulan sampai dengan satu tahun menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 4,00% - 4,50% per tahun di 2021 (2020: 5,25% - 8,00%).

Time deposits with original maturities more than three months and up to one year period earned interest rates ranging between 4.00% - 4.50% per annum in 2021 (2020: 5.25% - 8.00%).

b) Investasi dengan pendapatan tetap

b) Fixed income investments

- Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investments at fair value through other comprehensive income

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Obligasi BUMN	1,343,124,700	1,320,266,800	SOEs bonds
Obligasi Pemerintah	<u>5,419,287,095</u>	<u>2,759,836,747</u>	Government bonds
	<u>6,762,411,795</u>	<u>4,080,103,547</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/33 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

b) Investasi dengan pendapatan tetap (lanjutan)

- Investasi yang diukur pada biaya diamortisasi

Investasi pada obligasi dengan periode jatuh tempo 1 - 4 tahun dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 7,90% - 10,25% per tahun di 2021 (2020: 7,90% - 10,25%).

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Obligasi BUMN	162,000,000	162,000,000
Obligasi Pemerintah	<u>27,997,846</u>	<u>27,929,838</u>
	<u>189,997,846</u>	<u>189,929,838</u>

- Investasi diukur pada biaya perolehan

Investasi diukur pada biaya perolehan merupakan investasi pada obligasi Sukuk yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Obligasi BUMN	41,614,000	127,359,500
Obligasi Pemerintah	<u>10,257,627</u>	<u>10,363,252</u>
	<u>51,871,627</u>	<u>137,722,752</u>

6. INVESTMENTS (continued)

b) Fixed income investments (continued)

- Investments at amortised cost

Investments in bonds with 1 - 4 years maturities and earned interest rates ranging between 7.90% - 10.25% per annum in 2021 (2020: 7.90% - 10.25%).

*SOEs bonds
Government bonds*

- Investments at cost

Investments at cost represents investments in Sukuk bonds which is recorded in accordance with SFAS 110 "Accounting for Sukuk".

*SOEs bonds
Government bonds*

7. PIUTANG USAHA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bunga yang belum diterima	87,184,338	50,185,483
Penjaminan	71,882,624	92,829,098
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	<u>10,150,079</u>	<u>12,174,909</u>
	<u>169,217,041</u>	<u>155,189,490</u>

Seluruh piutang usaha merupakan aset keuangan dalam tahap 1 dan tidak ada mutasi antar tahap selama tahun 2021.

Kerugian kredit ekspektasian telah dihitung sesuai dengan persyaratan penurunan nilai PSAK 71, dan kerugian kredit ekspektasian tidak material.

Manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang usaha dapat dipulihkan, dan tidak ada cadangan kerugian yang diperlukan atas penurunan nilai piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

7. ACCOUNT RECEIVABLES

*Interest receivables
Guarantee
Project preparation and transaction advisory*

All account receivables are financial assets in stage 1 and there is no movement between stages during the year 2021.

Expected credit loss has been calculated according to impairment requirements of SFAS 71, and the expected credit loss was immaterial.

Management believes that all account receivables are recoverable, and no provision for impairment of account receivables is necessary as at 31 December 2021.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/34 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

2021						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Aset dalam penyelesaian	2,863,714	422,393	-	(3,268,713)	17,394	Construction in progress
Prasarana kantor	20,282,679	-	-	63,045	20,345,724	Leasehold improvement
Peralatan komputer	9,121,727	1,422,965	-	3,001,214	13,545,906	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	10,600,725	116,437	-	204,454	10,921,616	Office equipments, furnitures and fixtures
	42,868,845	1,961,795	-	-	44,830,640	
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Prasarana kantor	(17,122,079)	(1,747,063)	-	-	(18,869,142)	Leasehold improvement
Peralatan komputer	(5,899,777)	(1,991,512)	-	-	(7,891,289)	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(9,240,968)	(688,498)	-	-	(9,929,466)	Office equipments, furnitures and fixtures
	(32,262,824)	(4,427,073)	-	-	(36,689,897)	
Nilai buku	<u>10,606,021</u>				<u>8,140,743</u>	Net book value
2020						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Aset dalam penyelesaian	-	2,863,714	-	-	2,863,714	Construction in progress
Prasarana kantor	20,282,679	-	-	-	20,282,679	Leasehold improvement
Peralatan komputer	8,338,971	782,756	-	-	9,121,727	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	10,490,251	110,474	-	-	10,600,725	Office equipments, furnitures and fixtures
	39,111,901	3,756,944	-	-	42,868,845	
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Prasarana kantor	(12,878,194)	(4,243,885)	-	-	(17,122,079)	Leasehold improvement
Peralatan komputer	(4,552,835)	(1,346,942)	-	-	(5,899,777)	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(7,181,779)	(2,059,189)	-	-	(9,240,968)	Office equipments, furnitures and fixtures
	(24,612,808)	(7,650,016)	-	-	(32,262,824)	
Nilai buku	<u>14,499,093</u>				<u>10,606,021</u>	Net book value

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/35 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

8. FIXED ASSETS (continued)

Management believes that no impairment in fixed assets value as at 31 December 2021 and 2020.

9. ASET HAK GUNA

Perusahaan menyewa aset berupa gedung kantor yang digunakan dalam operasinya yang memiliki masa sewa selama 3 tahun yang dimulai dari tanggal 1 September 2020.

Beban amortisasi sewa gedung kantor diakui sebagai beban sewa dalam kategori beban umum dan administrasi.

9. RIGHT-OF-USE ASSETS

The Company leases asset in form of office space used for its operations that has lease period of 3 years started on 1 September 2020.

Amortisation expense of office scape lease was recognised as rental expense under general and administrative expenses.

2021				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance
Aset kepemilikan langsung:				Direct ownership assets:
Harga perolehan:				Acquisition cost:
Gedung kantor	56,579,087	-	-	56,579,087
	56,579,087	-	-	56,579,087
Akumulasi amortisasi:				Accumulated amortisation:
Gedung kantor	(6,286,565)	(18,859,696)	-	(25,146,261)
	(6,286,565)	(18,859,696)	-	(25,146,261)
Nilai buku	<u>50,292,522</u>			<u>31,432,826</u>
				Net book value
2020				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance
Aset kepemilikan langsung:				Direct ownership assets:
Harga perolehan:				Acquisition cost:
Gedung kantor	-	56,579,087	-	56,579,087
	-	56,579,087	-	56,579,087
Akumulasi amortisasi:				Accumulated amortisation:
Gedung kantor	-	(6,286,565)	-	(6,286,565)
	-	(6,286,565)	-	(6,286,565)
Nilai buku	<u>-</u>			<u>50,292,522</u>
				Net book value

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/36 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TAKBERWUJUD

10. INTANGIBLE ASSETS

2021					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
Harga perolehan:					
Aset dalam penyelesaian	82,775	2,150,230	-	(2,038,866)	194,139
Piranti lunak	7,648,688	29,520	-	2,038,866	9,717,074
	7,731,463	2,179,750	-	-	9,911,213
Akumulasi amortisasi:					
Piranti lunak	(5,686,479)	(982,412)	-	-	(6,668,891)
	(5,686,479)	(982,412)	-	-	(6,668,891)
Nilai buku	2,044,984				3,242,322
2020					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
Harga perolehan:					
Aset dalam penyelesaian	317,095	890,510	-	(1,124,830)	82,775
Piranti lunak	6,437,541	86,317	-	1,124,830	7,648,688
	6,754,636	976,827	-	-	7,731,463
Akumulasi amortisasi:					
Piranti lunak	(4,930,374)	(756,105)	-	-	(5,686,479)
	(4,930,374)	(756,105)	-	-	(5,686,479)
Nilai buku	1,824,262				2,044,984

Acquisition cost:
Construction in progress
Software
Accumulated amortisation:
Software
Net book value

Acquisition cost:
Construction in progress
Software
Accumulated amortisation:
Software
Net book value

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Management believes that no impairment in intangible assets value as at 31 December 2021 and 2020.

11. BEBAN TANGGUHAN

11. DEFERRED EXPENSES

	2021	2020	
Beban tangguhan	20,957,310	43,276,690	Deferred expenses
Penyisihan penurunan nilai	(13,386,382)	(24,112,770)	Provision for impairment
	7,570,928	19,163,920	

Beban tangguhan terutama merupakan biaya atas jasa konsultasi yang terkait langsung dengan kegiatan pemrosesan dan pengaturan penjaminan jangka panjang dan akan dibebankan pada saat pendapatan dari penjaminan tersebut diakui.

Deferred expenses mainly represent advisory costs which directly attributable to the processing and arranging activities in providing long-term guarantees and will be expensed upon the recognition of such fees.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/37 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. BEBAN TANGGUHAN (lanjutan)

Beban tangguhan juga mencakup biaya pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dan akan dibebankan ke laba rugi pada saat pendapatan dari penyiapan proyek dan pendampingan transaksi diakui.

Pada tahun 2021, Perusahaan telah menutup cadangan kerugian penurunan nilai atas beban tangguhan proyek sebesar Rp 10.726.388 untuk Proyek *Minemouth* 9 dan 10 yang sekaligus mengakui seluruh biaya atas beban tangguhan terkait karena proyek tersebut tidak lagi direncanakan oleh PJPK untuk dilanjutkan.

Kecuali untuk jumlah beban tangguhan yang telah dibentuk penyisihannya, manajemen berkeyakinan bahwa proyek-proyek terkait akan dapat mencapai penandatanganan perjanjian penjaminan. Oleh karena itu, beban tangguhan terus diakui di laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

11. DEFERRED EXPENSES (continued)

Deferred expenses also included costs for project preparation and transaction advisory and will be recognised to profit and loss upon the recognition of revenue from project preparation and transaction advisory.

In 2021, the Company had recognised deduction of allowance for impairment for deferred expenses amounting to Rp 10,726,388 for Minemouth 9 and 10 Project which also recognized all the cost for deferred expenses due to the project no longer planned to be continued by GCA.

Except for deferred expenses that has been provided with impairment provision, management believes that outstanding projects could achieve the signing of guarantee of the project. Therefore, the deferred expenses continue to be recognised in the Company's statement of financial position as at 31 December 2021 and 2020.

Management believes that the provision for impairment losses on deferred expenses is adequate.

12. UTANG USAHA

Utang usaha terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk jasa konsultasi terkait dengan penyediaan penjaminan, penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dan biaya operasional Perusahaan.

12. ACCOUNT PAYABLES

Account payables mainly represent payables for advisory related to the guarantee, project preparation and transaction advisory provision, and the Company's operational costs.

13. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lebih bayar:		
Pajak Pertambahan Nilai:		
- 2019	-	2,461,382
- 2020	-	1,408,247
- 2021	1,612,945	-
	<u>1,612,945</u>	<u>3,869,629</u>

13. TAXATION

a. Prepaid income tax

Overpayment of:
Value Added Tax:
2019 -
2020 -
2021 -

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/38 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pajak lain-lain:			Other taxes:
- Pajak Penghasilan Pasal 21	2,564,984	1,379,365	Withholding Tax Article 21 -
- Pajak Pertambahan Nilai	1,286,807	1,711,969	Value Added Tax -
- Lainnya	569,678	166,704	Others -
	<u>4,421,469</u>	<u>3,258,038</u>	

c. Manfaat/(beban) pajak penghasilan

c. Income tax benefit/(expense)

Manfaat/(beban) pajak Perusahaan terdiri dari
sebagai berikut:

*Tax benefit/(expense) of the Company
consist of the following:*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pajak tangguhan	36,835,422	(863,242)	Deferred tax
	<u>36,835,422</u>	<u>(863,242)</u>	

Rekonsiliasi antara manfaat/(beban) pajak
dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum
pajak penghasilan dengan tarif pajak yang
berlaku adalah sebagai berikut:

*A reconciliation between the tax
benefit/(expense) and the amounts
computed by applying the prevailing tax rates
to profit before income tax is as follows:*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	588,566,714	621,423,564	Profit before income tax
Beban pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	(129,484,677)	(136,713,184)	Tax calculated at applicable tax rate
Pengaruh atas:			Effects of:
- Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	163,229,807	189,331,169	Revenues subjected to - final income tax
- Rugi pajak yang dibebankan di tahun berjalan	32,333,811	(9,521,886)	Tax loss charged - in current year
- Beban yang tidak dapat diperhitungkan	(30,641,593)	(39,785,601)	Non-deductible expenses -
- Dampak perubahan tarif pajak	1,398,074	(4,173,740)	Impact of changes in tax rates -
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	<u>36,835,422</u>	<u>(863,242)</u>	Income tax benefit/(expense)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak
penghasilan dan laba yang dikenakan pajak
adalah sebagai berikut:

*A reconciliation between profit before income
tax and the Company's taxable income is as
follows:*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	588,566,714	621,423,564	Profit before income tax
Beda waktu	161,057,282	15,047,715	Timing differences
Beda tetap	139,301,540	180,843,643	Permanent differences
Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	<u>(741,953,668)</u>	<u>(860,596,221)</u>	Revenues subjected to final income tax
Laba/(rug) pajak berjalan	<u>146,971,868</u>	<u>(43,281,299)</u>	Current tax income/(loss)
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	(302,213,957)	(351,285,048)	Tax loss carry forward
Rugi pajak yang tidak bisa dikompensasi ditahun berjalan	-	92,352,390	Tax loss expired in current year
Akumulasi kerugian pajak	<u>(155,242,089)</u>	<u>(302,213,957)</u>	Accumulated tax losses

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/39 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expenses (continued)

Berikut ini adalah rincian akumulasi kerugian fiskal:

Below are details of accumulated fiscal losses:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Tahun fiskal:			<i>Fiscal year:</i>
2020	(43,281,299)	(43,281,299)	<i>2020</i>
2019	(66,727,915)	(66,727,915)	<i>2019</i>
2018	(45,232,875)	(104,418,272)	<i>2018</i>
2017	<u>-</u>	<u>(87,786,471)</u>	<i>2017</i>
	<u>(155,242,089)</u>	<u>(302,213,957)</u>	

Termasuk di dalam koreksi fiskal beda tetap adalah beban pajak sebesar Rp 115.019.709 (2020: Rp 158.254.071) yang dibayarkan atas penerimaan bunga dari deposito berjangka, pendapatan tetap dan rekening giro.

Included in the fiscal correction of the fixed difference is the tax expense of Rp 115,019,709 (2020: Rp 158,254,071) paid for interest income from time deposits, fixed income and current accounts.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajaknya.

The above corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2021 was a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Tax Return ("SPT").

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax asset

	<u>1 Januari/ January 2021</u>	<u>Dampak perubahan tarif pajak/ Impact of changes in tax rates</u>	<u>2021 Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to statements of profit or loss</u>	<u>Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity</u>	<u>31 Desember/ December 2021</u>	
Penyisihan gaji dan bonus	5,128,782	-	562,386	-	5,691,168	<i>Provision for salaries and bonus</i>
Beban penyisihan imbalan kerja	7,245,052	724,505	(2,489,748)	(1,322,767)	4,157,042	<i>Provision for employee benefits obligation</i>
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	1,960,595	196,060	(46,100)	-	2,110,555	<i>Differences between accounting and tax fixed assets net book value</i>
Pendapatan tangguhan penjaminan	2,989,305	-	3,360,495	-	6,349,800	<i>Guarantee unearned income</i>
Penyisihan penurunan nilai	4,822,555	482,255	(2,359,805)	-	2,945,005	<i>Provision for impairment</i>
Pendapatan tangguhan penjaminan <i>loss limit</i>	456,267	-	18,252,476	-	18,708,743	<i>Loss limit guarantee unearned income</i>
Estimasi komitmen dan kontijensi penjaminan <i>loss limit</i>	15,209	-	1,227,069	-	1,242,278	<i>Commitment and contingencies of loss limit guarantee revenue</i>
Pendapatan tangguhan penjaminan bersama Pelaku Usaha Korporasi	-	-	12,587,253	-	12,587,253	<i>Corporate Business Entity co-guarantee unearned income</i>
Estimasi komitmen dan kontijensi penjaminan bersama Pelaku Usaha Korporasi	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,338,576</u>	<u>-</u>	<u>4,338,576</u>	<i>Commitment and contingencies of Corporate Business Entity co-guarantee revenue</i>
	<u>22,617,765</u>	<u>1,402,820</u>	<u>35,432,602</u>	<u>(1,322,767)</u>	<u>58,130,420</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/40 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax asset (continued)

		2020				
	1 Januari/ January 2020	Dampak perubahan tarif pajak/ Impact of changes in tax rates	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statements of profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 2020	
Penyisihan gaji dan bonus	5,328,195	(639,383)	439,970	-	5,128,782	Provision for salaries and bonus
Beban penyisihan imbalan kerja	7,290,136	(1,458,027)	1,248,241	164,702	7,245,052	Provision for employee benefits obligation
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	1,942,016	(388,404)	406,983	-	1,960,595	Differences between accounting and tax fixed assets net book value
Pendapatan tangguhan penjaminan	2,741,907	(329,029)	576,427	-	2,989,305	Guarantee unearned income
Penyisihan penurunan nilai	6,028,193	(1,205,638)	-	-	4,822,555	Provision for impairment
Pendapatan tangguhan penjaminan <i>loss limit</i>	-	-	456,267	-	456,267	Loss limit guarantee unearned income
Estimasi komitmen dan kontijensi penjaminan <i>loss limit</i>	-	-	15,209	-	15,209	Commitment and contingencies of loss limit guarantee revenue
	<u>23,330,447</u>	<u>(4,020,481)</u>	<u>3,143,097</u>	<u>164,702</u>	<u>22,617,765</u>	

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On 31 March 2020, the Government issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 year 2020 which has become Law (UU) No. 2 year 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for Fiscal Year 2020 and 2021 and 20% for the Fiscal Year 2022 onwards.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

On 29 October 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements. Hence, the previously tax rate determination of 20% will be invalid after the ratification of this Law.

Pada 31 Desember 2021, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal (*tax losses carry forward*) karena ketidakpastian tersedianya penghasilan kena pajak di masa depan dimana akumulasi kerugian pajak dapat dimanfaatkan.

As at 31 December 2021, the Company does not recognise deferred assets relating to the tax losses carry forward due to uncertainty about the availability of future taxable income where the tax losses carry forward can be utilised.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/41 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak

Tahun pajak 2019

- Pajak pertambahan nilai

Pada tanggal 1 Juli 2020, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2019.

Pada tanggal 15 Desember 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2019 sebesar Rp 2.461.382, yang pembayarannya telah diterima Perusahaan pada tanggal 11 Januari 2021.

Tahun pajak 2020

- Pajak pertambahan nilai

Pada tanggal 28 Mei 2021, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2020.

Pada tanggal 20 Agustus 2021, Perusahaan menerima SKPLB Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2020 sebesar Rp 1.408.247, yang pembayarannya telah diterima Perusahaan pada tanggal 22 September 2021.

13. TAXATION (continued)

e. Tax audit

Fiscal year 2019

- Value added tax

On 1 July 2020, the Company received tax audit letter related to Value Added Tax for fiscal year 2019.

On 15 December 2020, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter which confirmed the overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2019 amounting to Rp 2,461,382, and the payment has been received by the Company on 11 January 2021.

Fiscal year 2020

- Value added tax

On 28 May 2021, the Company received tax audit letter related to Value Added Tax for fiscal year 2020.

On 20 August 2021, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter which confirmed the overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2020 amounting to Rp 1,408,247, and the payment has been received by the Company on 22 September 2021.

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR, PENYISIHAN DAN UTANG LAIN-LAIN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bonus dan gaji	25,868,945	23,312,645
Estimasi komitmen dan kontijensi penjaminan bersama Pelaku Usaha Korporasi	19,720,799	-
Beban jasa konsultasi	11,813,942	14,344,197
Estimasi komitmen dan kontijensi penjaminan <i>loss limit</i>	5,646,717	69,131
Lainnya	<u>2,231,425</u>	<u>1,843,569</u>
	<u>65,281,828</u>	<u>39,569,542</u>

14. ACCRUED EXPENSES, PROVISIONS AND OTHER PAYABLES

Bonus and salary
Commitment and contingencies
of Corporate Business
Entity co-guarantee
Advisory fees
Commitment and contingencies
of loss limit guarantee
Others

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/42 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PENDAPATAN TANGGUHAN

	2021
Penjaminan <i>loss limit</i>	85,039,740
Penjaminan bersama Pelaku Usaha Korporasi	57,214,784
Penjaminan infrastruktur	28,862,730
	<u>171,117,254</u>

Pendapatan tangguhan penjaminan infrastruktur merupakan pendapatan premi *recurring* yang diterima dimuka dan akan diakui setiap bulannya sepanjang masa pertanggungan.

Pendapatan tangguhan penjaminan bersama Pelaku Usaha Korporasi merupakan *guarantee fee* yang diakui dari margin imbal jasa penjaminan bersama berdasarkan porsi penjaminan Perusahaan yang diterima saat diberikannya penjaminan dan diamortisasi selama periode penjaminan.

Pendapatan tangguhan penjaminan *loss limit* merupakan *guarantee fee* yang diakui dari margin imbal jasa penjaminan *loss limit* yang diterima saat diberikannya penjaminan dan diamortisasi selama periode penjaminan pelaksanaan jasa.

15. UNEARNED INCOME

	2020	
	2,073,941	<i>Loss limit guarantee</i>
	-	<i>Corporate Business Entity</i>
	13,587,753	<i>co-guarantee</i>
	<u>15,661,694</u>	<i>Infrastructure guarantee</i>

Unearned income from infrastructure guarantee represents guarantee recurring income received in advance and will be recognised on monthly basis along the coverage period.

Unearned income from Corporate Business Entity co-guarantee represents guarantee fee which recognised at margin of co-guarantee service fees based on the Company's guarantee portion that received when the guarantee was given and are amortised during guarantee period.

Unearned income from loss limit guarantee represents guarantee fee which recognised at margin of loss limit guarantee service fees that received when the guarantee was given and are amortised during guarantee period of service.

16. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

Liabilitas sewa pembiayaan merupakan liabilitas sewa pembiayaan aset hak guna yang merupakan nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar dan dihitung dengan suku bunga implisit dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

	2021
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
- Tidak lebih dari 1 tahun	17,737,704
- Lebih dari 1 tahun	15,766,621
	<u>33,504,325</u>

16. FINANCE LEASE LIABILITIES

Finance lease liabilities represent lease liabilities for right-of-use assets of present value of unpaid lease payments and are calculated using the implicit interest rate of the incremental loan interest rate.

Future minimum lease payments together with the present value of the minimum lease payments for year 2021 and 2020 were as follows.

	2020	
	17,590,055	<i>The present value lease liabilities are as follows:</i>
	33,504,325	<i>Not later than 1 year -</i>
	<u>51,094,380</u>	<i>Later than 1 year -</i>

17. PINJAMAN PENERUSAN

Pada tanggal 27 Mei 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah atas dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development*.

Pinjaman penerusan adalah pinjaman yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri yaitu *World Bank*, yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman.

17. TWO-STEP LOANS

On 27 May 2013, the Company entered into a two-step loans agreement with the Government in regards to the fund provided by the International Bank for Reconstruction and Development.

Two-step loans are loans obtained by the Government from international bank which is World Bank, which are then re-loaned to the Company. The loans were recorded and payable in Rupiah based on the exchange rate at the date of drawdown.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/43 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PINJAMAN PENERUSAN (lanjutan)

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai peningkatan kapasitas penjaminan Perusahaan dan pengadaan konsultan jasa atas proyek KPBU di bidang infrastruktur. Pokok pinjaman akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2029.

Pada tanggal 22 Februari 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-1504/MK.5/2016 sebagai amandemen atas perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan pada tingkat suku bunga, yaitu menggunakan SUN *Benchmark* dengan tenor 20 tahun. Batas penarikan pinjaman penerusan telah berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Pada tanggal 19 November 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-162/MK.5/2020 sebagai amandemen kedua atas perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan jadwal pembayaran pokok pinjaman dengan masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun sejak tanggal penarikan pertama dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2034.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah akumulasi penarikan pinjaman penerusan adalah sebesar Rp 55.126.686. Pinjaman penerusan ini menggunakan SUN *Benchmark* sebagai acuan tingkat suku bunga.

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 tanggal 2 November 2020.

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuarial Kantor Konsultan Aktuarial Steven & Mourits (sebelumnya PT Dayamandiri Dharmakonsilindo) untuk masing-masing untuk tahun 2021 dan 2020 yang menggunakan metode "Projected Unit Credit", masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

17. TWO-STEP LOANS (continued)

The loans are intended for the development of underwriting capacity of the Company and procurement of service consultants on PPP in infrastructure projects. The loan principal are payable in semi-annual installments after grace period of 9 (nine) years and are due up to 2029.

On 22 February 2016, Ministry of Finance Republic of Indonesia issued a letter No. S-1504/MK.5/2016 as an amendment of loan agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between the Government of Indonesia and the Company, with the amendment of interest rate using SUN Benchmark with 20 years tenor. The loans drawdown expired on 30 April 2019.

On 19 November 2020, Ministry of Finance Republic of Indonesia issued a letter No. S-162/MK.5/2020 as second amendment of loan agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between the Government of Indonesia and the Company, with the amendment of changes in repayment schedule with grace period of 9 (nine) years starting from the first drawdown date and are due up to 2034.

As at 31 December 2021 and 2020, the withdrawal of accumulated two-step loans are amounting to Rp 55,126,686. This loan used SUN Benchmark as reference of interest rate.

The Company has complied with the covenants in the borrowing agreements above.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

The Company provides employee benefits based on the provisions of Job Creation Law No. 11/2020 dated 2 November 2020.

The following are the key matters disclosed in the actuarial report of Kantor Konsultan Aktuarial Steven & Mourits (previously PT Dayamandiri Dharmakonsilindo) for the Company's provisions year ended 2021 and 2020 for employee benefit using the "Projected Unit Credit" method, as at 31 December 2021 and 2020, respectively:

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/44 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

Liabilitas imbalan kerja diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Employee benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	14,983,249	23,902,342	<i>Pension and other post-employment benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>3,912,390</u>	<u>12,322,911</u>	<i>Other long-term benefits</i>
	<u>18,895,639</u>	<u>36,225,253</u>	

(Pendapatan)/beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net (income)/expense recognised in the profit or loss is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	(2,467,539)	5,115,587	<i>Pension and other post-employment benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>(8,267,939)</u>	<u>1,791,944</u>	<i>Other long-term benefits</i>
	<u>(10,735,478)</u>	<u>6,907,531</u>	

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan kewajiban imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in determining the post-employment benefits obligation as at 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	<i>Retirement age</i>
Tingkat diskonto	7.35%	7.40%	<i>Discount rate</i>
Tingkat mortalita	TMI 4 (2019)	TMI 4 (2019)	<i>Mortality rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	8.00%	10.00%	<i>Salary increment rate</i>
Tingkat pengunduran diri	5% sampai di usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ 5% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter	5% sampai di usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ 5% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter	<i>Resignation rate</i>

Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya

Pension and other post-employment benefits

Liabilitas imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Pension and other post-employment benefits recognised in the statements of financial position are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Liabilitas imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	14,983,249	23,902,342	<i>Pension and other post-employment benefits obligation</i>

(Pendapatan)/beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net (income)/expense recognised in the profit or loss is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Biaya jasa kini	3,340,666	3,385,462	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	1,182,293	1,418,679	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa lalu	230,140	53,747	<i>Past service cost</i>
Biaya jasa lalu - amandemen	(7,244,090)	-	<i>Past service cost - amendment</i>
Kelebihan pembayaran imbalan	<u>23,452</u>	<u>257,699</u>	<i>Excess of benefit paid</i>
	<u>(2,467,539)</u>	<u>5,115,587</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/45 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)

Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya
(lanjutan)

Pension and other post-employment benefits
(continued)

Mutasi imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya
adalah sebagai berikut:

The movement in the pension and other post-
employment benefits is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal tahun	23,902,342	18,250,946	<i>Balance at the beginning of the year</i>
(Pendapatan)/beban tahun berjalan	(2,467,539)	5,115,587	<i>Employee benefit (income)/expense charged in the current year</i>
Pengukuran kembali:			<i>Remeasurement:</i>
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(6,012,578)	823,508	<i>Loss from changes in financial assumptions</i>
Pembayaran imbalan kerja	<u>(438,976)</u>	<u>(287,699)</u>	<i>Benefit paid</i>
	<u>14,983,249</u>	<u>23,902,342</u>	

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on pension and post-employment benefits obligation are as follow:

31 Desember/December 2021				
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption		
Tingkat diskonto	1.00%	(2,360,816)	372,903	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	1,492,236	(3,302,938)	<i>Rate of salary increase in the future</i>
31 Desember/December 2020				
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption		
Tingkat diskonto	1.00%	(3,683,659)	1,770,524	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	2,771,791	(4,561,092)	<i>Rate of salary increase in the future</i>

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 13,98 tahun (2020: 16,40 tahun).

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation at 31 December 2021 is 13.98 years (2020: 16.40 years).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/46 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

**Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya
(lanjutan)**

**Pension and other post-employment benefits
(continued)**

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follow:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Kurang dari 1 tahun	1,293,939	1,362,626	<i>Less than a year</i>
1 sampai 2 tahun	1,003,346	234,273	<i>Between 1 - 2 years</i>
2 sampai 5 tahun	4,009,994	3,723,423	<i>Between 2 - 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	124,927,592	298,364,631	<i>Over than 5 years</i>

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Other long-term benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya	3,912,390	12,322,911	<i>Other long-term benefits obligation</i>

(Pendapatan)/beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net (income)/expense recognised in the profit or loss is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Biaya jasa kini	824,345	2,307,561	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	27,213	55,890	<i>Past service cost</i>
Biaya jasa lalu - amandemen	(8,318,240)	-	<i>Past service cost - amendment</i>
Beban bunga	277,528	817,524	<i>Interest cost</i>
Keuntungan aktuarial	<u>(1,078,785)</u>	<u>(1,389,031)</u>	<i>Actuarial gains</i>
	<u>(8,267,939)</u>	<u>1,791,944</u>	

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movement in the employee benefits obligation is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal tahun	12,322,911	10,909,592	<i>Balance at the beginning of the year</i>
(Pendapatan)/beban tahun berjalan	(8,267,939)	1,791,944	<i>Employee benefit (income)/expense charged in the current year</i>
Pembayaran imbalan kerja	<u>(142,582)</u>	<u>(378,625)</u>	<i>Benefit paid</i>
	<u>3,912,390</u>	<u>12,322,911</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/47 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term benefits (continued)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on other long-term benefits obligation are as follow:

31 Desember/December 2021			
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(238,902)	267,385
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	280,075	(254,586)

Discount rate
Rate of salary increase
in the future

31 Desember/December 2020			
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(766,640)	861,816
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	884,275	(801,840)

Discount rate
Rate of salary increase
in the future

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted after other long-term benefits is as follow:

	2021	2020	
Kurang dari 1 tahun	159,970	1,511,206	Less than a year
1 sampai 2 tahun	564,927	1,002,966	Between 1 - 2 years
2 sampai 5 tahun	2,021,152	5,482,044	Between 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	14,174,714	52,863,805	Over than 5 years

19. MODAL SAHAM

19. SHARE CAPITAL

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of Company's shareholder as at 31 December 2021 and 2020 is as follows:

2021 dan/and 2020			
Jumlah saham/ Number of shares	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value	
Pemerintah Republik Indonesia	9,570,000	100	9,570,000,000

Government of the
Republic of Indonesia

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/48 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pemegang saham telah meningkatkan modal dasar Perusahaan menjadi Rp 20.000.000.000 melalui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan melalui Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 14 tanggal 19 November 2020 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077464.AH.01.02.TAHUN 2020 pada tanggal 19 November 2020.

Pada tanggal 30 Desember 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp 1.570.000.000 yang telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 30 Desember 2020.

20. DIVIDEN

Pada tahun 2021, berdasarkan Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., Mkn. No. 07 tanggal 23 Juli 2021, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan pada tanggal 23 Juni 2021 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2020 sejumlah Rp 186.168.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 6 Juli 2021.

Pada tahun 2020, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H. No. 10 tanggal 12 Juni 2020, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2019 sejumlah Rp 110.827.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Juni 2020.

**21. SALDO LABA YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA - CADANGAN WAJIB**

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

19. SHARE CAPITAL (continued)

The Shareholders had increased the Company's authorised capital to Rp 20,000,000,000 by amendment of the Company's Article of Association through Notarial Deed No. 14 of Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. dated 19 November 2020 and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decree No. AHU-0077464.AH.01.02.TAHUN 2020 dated 19 November 2020.

On 30 December 2020, in accordance with Government Regulation No. 79 year 2020 regarding addition of investment on the Company's capital by Government of Indonesia, the payment for issuance of share capital amounting to Rp 1,570,000,000 had been received by the Company on 30 December 2020.

20. DIVIDEND

In 2021, based on Notarial Deed No. 07 of Irma Devita Purnamasari, S.H., Mkn. dated 23 July 2021, Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders on 23 June 2021 approved amount of dividend for 2020 amounting Rp 186,168,000 that has been paid on 6 July 2021.

In 2020, based on Notarial Deed No. 10 of Arry Supratno, S.H. dated 12 June 2020, Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders approved amount of dividend for 2019 amounting Rp 110,827,000 that has been paid on 22 June 2020.

**21. APPROPRIATED RETAINED EARNING -
STATUTORY RESERVE**

Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/49 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**21. SALDO LABA YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA - CADANGAN WAJIB
(lanjutan)**

Pada tahun 2021, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 31.028.000, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 197.499.338. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 23 Juni 2021 yang dituangkan dalam Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., Mkn. No. 07 tanggal 23 Juli 2021.

Pada tahun 2020, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 26.471.000, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 166.471.338. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan berdasarkan Surat Keterangan dari Notaris Arry Supratno, S.H. No. 11/A/Not/PT/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.

Manajemen bermaksud untuk meningkatkan cadangan tersebut di masa datang.

**21. APPROPRIATED RETAINED EARNING -
STATUTORY RESERVE (continued)**

In 2021, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 31,028,000, as the reserve balance became Rp 197,499,338. This general reserve was approved in the Circular Decision General Meeting of Shareholders on 23 June 2021 as covered by Notarial Deed No. 07 of Irma Devita Purnamasari, S.H., Mkn. on 23 July 2021.

In 2020, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 26,471,000, as the reserve balance became Rp 166,471,338. This general reserve was approved in the Circular Decision General Meeting of Shareholders based on Notarial Letter No. 11/A/Not/PT/VI/2020 of Arry Supratno, S.H. dated 15 June 2020.

Management plans to increase the general reserve in the future.

22. PENDAPATAN

22. REVENUES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pendapatan penjaminan:			Revenue from guarantee:
- Pendapatan provisi dan komisi	79,332,079	76,400,000	Fees and commission -
- Pendapatan premi	73,097,262	45,048,430	Premium income -
- Pendapatan bersama Pelaku Usaha Korporasi	3,480,141	-	Corporate Business -
- Pendapatan <i>loss limit</i>	<u>619,731</u>	<u>7,681</u>	Entity co-guarantee Loss limit -
	<u>156,529,213</u>	<u>121,456,111</u>	
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	<u>29,171,852</u>	<u>21,922,064</u>	Revenue from project preparation and transaction advisory
Pendapatan pengelolaan dana:			Income from investments:
- Deposito	320,421,547	555,222,271	Time deposits -
- Investasi dengan pendapatan tetap:			Fixed income: -
Pendapatan bunga	<u>415,449,507</u>	<u>299,510,485</u>	Interest income
	<u>735,871,054</u>	<u>854,732,756</u>	
Pendapatan lainnya	<u>935,260</u>	<u>-</u>	Income from others
	<u>922,507,379</u>	<u>998,110,931</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/50 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. PENDAPATAN (lanjutan)

Pendapatan penjaminan bersama Pelaku Usaha Korporasi yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Amortisasi pendapatan tangguhan penjaminan bersama Pelaku Usaha Korporasi	23,200,940	-
Estimasi komitmen bersama Pelaku Usaha Korporasi	<u>(19,720,799)</u>	<u>-</u>
	<u><u>3,480,141</u></u>	<u><u>-</u></u>

Pendapatan penjaminan *loss limit* yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Amortisasi pendapatan tangguhan penjaminan <i>loss limit</i>	6,197,317	76,812
Estimasi komitmen <i>loss limit</i>	<u>(5,577,586)</u>	<u>(69,131)</u>
	<u><u>619,731</u></u>	<u><u>7,681</u></u>

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

22. REVENUES (continued)

Revenue from Corporate Business Entity co-guarantee recognised in the profit or loss is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Amortisation of Corporate Business co-guarantee unearned income	-	-
Estimated Corporate Business co-guarantee commitment	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Revenue from loss limit guarantee recognised in the profit or loss is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Amortisation of loss limit guarantee unearned income	76,812	-
Estimated loss limit commitment	<u>(69,131)</u>	<u>-</u>
	<u><u>7,681</u></u>	<u><u>-</u></u>

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

23. BEBAN USAHA

Umum dan administrasi:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
- Pegawai	37,988,624	40,904,391
- Sewa	19,916,063	26,589,248
- Jasa profesional	9,154,207	7,879,206
- Outsourcing	3,891,162	4,209,949
- Perjalanan dinas	2,107,373	337,107
- Pemeliharaan	1,747,993	1,131,392
- Rapat dan konferensi	1,210,022	983,639
- Beban bina karyawan	1,178,980	1,502,881
- Pelatihan	783,297	1,071,885
- Perlengkapan kantor	544,650	1,115,535
- Transportasi	378,626	745,053
- Air dan Listrik	220,043	292,376
- Komunikasi	180,104	163,456
- Lainnya	<u>135,657</u>	<u>98,923</u>
	<u><u>79,436,801</u></u>	<u><u>87,025,041</u></u>

Penjaminan:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
- Pegawai	49,079,563	49,176,764
- Konsultan	22,466,492	17,501,120
- Rapat dan konferensi	1,053,952	393,196
- Perjalanan dinas	538,893	522,672
- Loka-karya	<u>274,385</u>	<u>817,422</u>
	<u><u>73,413,285</u></u>	<u><u>68,411,174</u></u>

23. OPERATING EXPENSES

General and administrative:

Employee cost	-
Rent	-
Professional fees	-
Outsourcing	-
Travelling	-
Maintenance	-
Meeting and conference	-
Employee development	-
Training	-
Office equipment	-
Transportation	-
Water & electricity	-
Communication	-
Others	-

Guarantee:

Employee cost	-
Consultancy	-
Meeting and conference	-
Travelling	-
Workshop	-

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/51 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. BEBAN USAHA (lanjutan)

23. OPERATING EXPENSES (continued)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi:			Project preparation and transaction advisory:
- Konsultan	17,859,223	10,560,156	Consultancy -
- Pegawai	14,300,741	18,138,131	Employee cost -
- Rapat dan konferensi	889,235	626,191	Meeting and conference -
- Loka-karya	422,860	199,956	Workshop -
- Perjalanan dinas	376,480	59,151	Travelling -
- Iklan	244,931	122,465	Advertising -
	<u>34,093,470</u>	<u>29,706,050</u>	
Pengembangan usaha:			Business development:
- Pegawai	13,538,230	15,436,317	Employee cost -
- Sumbangan sosial	5,256,272	3,539,449	Social contribution -
- IIGF Institute	2,154,046	1,539,668	IIGF Institute -
- Loka-karya	1,807,383	1,262,105	Workshop -
- Iklan dan promosi	1,070,763	2,469,837	Advertising and promotion -
- Representasi	423,340	404,506	Representation -
- Perjalanan dinas	192,352	456,233	Travelling -
- Rapat dan konferensi	149,985	293,053	Meeting and conference -
	<u>24,592,371</u>	<u>25,401,168</u>	

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION

Sifat pihak berelasi

Nature of relationship

- Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.
- Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahannya dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.
- Bank-bank BUMN dan entitas-entitas non-bank BUMN merupakan pihak berelasi oleh karena merupakan entitas sepengendalian oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi.

- The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of the Company.
- The Board of Directors are persons who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company's activities.
- SOEs banks and non-banks SOEs are related parties as those entities under common controls of the Government of the Republic of Indonesia where the Company places its investments in time deposits and bonds.

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with related parties, including the following:

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/52 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Balances arising from related parties transactions

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kas dan setara kas		
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS	1,800,000,474	596
- PT Bank Syariah Indonesia	1,350,534,607	-
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	425,008,048	1,570,137,936
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16,155,388	6,817,136
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14,870,703	11,787,582
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1,958,440,000
- PT Bank BNI Syariah	-	505,000,000
- PT Bank Syariah Mandiri	-	8,542,293
	<u>3,606,569,220</u>	<u>4,060,725,543</u>

Investasi

- Pemerintah Republik Indonesia	5,457,542,568	2,798,129,837
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	251,442,000	167,236,000
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	229,594,200	2,510,387,500
- PT Pegadaian (Persero)	193,301,900	190,366,000
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	166,560,000	157,310,000
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	159,818,000	157,290,000
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	159,645,000	156,270,000
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	112,560,000	109,588,500
- PT Pupuk Indonesia (Persero)	85,152,000	81,920,000
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	77,000,000	77,000,000
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	68,357,500	66,549,500
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30,000,000	30,000,000
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13,308,100	503,483,100
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS	-	562,000,000
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	-	136,282,500
- PT Angkasa Pura (Persero)	-	33,570,600
- PT Aneka Tambang Tbk	-	6,102,600
	<u>7,004,281,268</u>	<u>7,743,486,137</u>

Cash and cash equivalents

PT Bank Tabungan Negara -
(Persero) Tbk - UUS
PT Bank Syariah Indonesia -
PT Bank Tabungan Negara -
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia -
(Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk -
PT Bank Negara Indonesia -
(Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah -
PT Bank Syariah Mandiri -

Investments

Government of the -
Republic of Indonesia
PT Sarana Multigriya Finansial -
(Persero)
PT Bank Tabungan Negara -
(Persero) Tbk
PT Pegadaian (Persero) -
PT Pelabuhan Indonesia -
(Persero)
PT Sarana Multi Infrastruktur -
(Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk -
PT Semen Indonesia -
(Persero) Tbk
PT Pupuk Indonesia (Persero) -
PT Telekomunikasi Indonesia -
(Persero) Tbk
PT Kereta Api Indonesia -
(Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara -
(Persero)
PT Bank Negara Indonesia -
(Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara -
(Persero) Tbk - UUS
Lembaga Pembiayaan Ekspor -
Indonesia (Indonesia
Eximbank)
PT Angkasa Pura (Persero) -
PT Aneka Tambang Tbk -

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/53 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Balances arising from related parties transactions (continued)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Piutang usaha			Account receivables
- Pemerintah Republik Indonesia	82,786,577	39,690,446	Government of the - Republic of Indonesia
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	2,950,875	2,786,938	PT Pelabuhan Indonesia - (Persero)
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	2,076,000	1,022,219	PT Sarana Multigriya Finansial - (Persero)
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS	1,707,261	-	PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk - UUS
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1,658,561	14,929,475	PT Perusahaan Listrik Negara - (Persero)
- PT Geo Dipa Energi (Persero)	1,575,000	6,331,342	PT Geo Dipa Energi (Persero) -
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,033,604	7,458,398	PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	872,063	826,353	PT Sarana Multi Infrastruktur - (Persero)
- PT Bank Syariah Indonesia	779,913	-	PT Bank Syariah Indonesia -
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	756,000	714,000	PT Semen Indoneisa - (Persero) Tbk
- PT Pegadaian	464,695	438,879	PT Pegadaian -
- PT Pupuk Indonesia (Persero)	415,800	334,522	PT Pupuk Indonesia (Persero) -
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	205,400	3,754,033	PT Bank Negara Indonesia - (Persero) Tbk
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	-	573,750	Lembaga Pembiayaan Ekspor - Indonesia (Indonesia Eximbank)
- Lain-lain (dibawah Rp 500.000)	<u>753,300</u>	<u>935,701</u>	Others (below Rp 500,000) -
	<u>98,035,049</u>	<u>79,796,056</u>	
	<u>10,708,885,537</u>	<u>11,884,007,736</u>	
Persentase terhadap jumlah aset	<u>75.71%</u>	<u>87.72%</u>	Percentage of total assets
Pinjaman penerusan			Two-step loans
- Pemerintah Republik Indonesia	<u>55,126,686</u>	<u>55,126,686</u>	Government of the - Republic of Indonesia
	<u>55,126,686</u>	<u>55,126,686</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>15.50%</u>	<u>27.02%</u>	Percentage of total liabilities

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/54 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Balances arising from related parties transactions (continued)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pendapatan			Revenues
- Pemerintah Republik Indonesia	323,772,952	173,816,759	Government of the Republic of Indonesia
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	105,086,504	197,197,219	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	58,920,196	38,874,151	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	49,138,133	148,892,681	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS	36,324,736	8,689,107	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19,070,849	17,263,057	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk	16,682,940	1,322,750	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	15,481,306	12,347,396	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	13,743,000	13,725,000	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
- PT Pegadaian (Persero)	13,277,000	15,544,167	PT Pegadaian (Persero)
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12,750,000	12,750,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	12,618,278	19,072,500	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- PT Bank Syariah Indonesia	9,457,983	-	PT Bank Syariah Indonesia
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	9,450,000	9,450,000	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7,892,500	8,735,700	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
- PT Pupuk Indonesia (Persero)	6,228,444	5,501,458	PT Pupuk Indonesia (Persero)
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	5,217,500	5,217,500	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	4,387,500	10,125,000	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)
- PT Geo Dipa Energi (Persero)	3,205,605	7,370,895	PT Geo Dipa Energi (Persero)
- PT Angkasa Pura (Persero)	1,732,400	2,842,000	PT Angkasa Pura (Persero)
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1,221,919	1,227,766	Indonesia Tourism Development Corporation (Persero)
- PT Aneka Tambang Tbk	441,411	599,847	PT Aneka Tambang Tbk
- PT Bank BNI Syariah	-	9,336,331	PT Bank BNI Syariah
- PT Marga Lingkar Jakarta	-	1,274,778	PT Marga Lingkar Jakarta
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk	-	1,025,383	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	779,251	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
	<u>726,101,156</u>	<u>722,980,696</u>	
Persentase terhadap jumlah pendapatan	<u>78.71%</u>	<u>72.43%</u>	Percentage of total revenue

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/55 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Balances arising from related parties transactions (continued)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban bunga			Interest expense
- Pemerintah Republik Indonesia	<u>4,134,501</u>	<u>4,145,829</u>	Government of the - Republic of Indonesia
Persentase terhadap jumlah beban usaha	<u>1.24%</u>	<u>1.10%</u>	Percentage of total operating expense
Kompensasi dan remunerasi manajemen kunci			Compensation and remuneration of the key management personnel
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
- Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	6,196,415	4,077,725	Salary and short-term - employee benefit
Direksi			Board of Directors
- Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	<u>12,427,559</u>	<u>11,337,156</u>	Salary and short-term - employee benefit
	<u>18,623,974</u>	<u>15,414,881</u>	
Persentase terhadap jumlah beban usaha	<u>5.58%</u>	<u>4.09%</u>	Percentage of total operating expenses

25. PERJANJIAN PENTING

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Perjanjian Penjaminan

Guarantee Agreement

Hal-hal berikut adalah perjanjian penjaminan yang telah ditandatangani oleh Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2021:

The following are the guarantee agreement entered by the Company as at 31 December 2021:

KPBU

PPP

1. Proyek PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP)

1. Batang East Java Power Plant Project (CJPP)

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Perusahaan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") selaku BU.

On 6 October 2011, the Company together with the Government of the Republic of Indonesia (the "Government") entered into a guarantee agreement with PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/56 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

**1. Proyek PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP)
(lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Bhimasena berupa *arranging fee* dan *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan perolehan pembiayaan, sedangkan *processing fee* dan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 21 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya perjanjian kerja sama ("PKS") antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 6 Juni 2016, penandatangan perolehan pembiayaan proyek dilakukan antara pemberi pinjaman dan Bhimasena. Pada saat yang bersamaan, penjaminan proyek sudah efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp 300 miliar (nilai penuh) kerugian pertama yang meliputi risiko politik dan terminasi.

2. Proyek Palapa Ring Barat

Pada tanggal 29 Februari 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Palapa Ring Barat ("Palapa Barat") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Palapa Barat berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 10 November 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

**1. Batang East Java Power Plant Project
(CJPP) (continued)**

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Bhimasena in the form of arranging fee and upfront fee at the signing date and financial close date, while processing fee and guarantee are obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 21 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 6 June 2016, signing of financial close was held between lender and Bhimasena. At the same time, guarantee of the project has been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to the first loss of Rp 300 billion (full amount) covering political risk and termination.

2. Western Package Palapa Ring Project

On 29 February 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Palapa Ring Barat ("Palapa Barat") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Palapa Barat in the form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 November 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/57 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

2. Proyek Palapa Ring Barat (lanjutan)

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 310 miliar (nilai penuh) yang merupakan kewajiban finansial atas *Availability Payment*, dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disepakati oleh Palapa Barat dan PJPK.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 2 Maret 2018.

3. Proyek Palapa Ring Tengah

Pada tanggal 4 Maret 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT LEN Telekomunikasi Indonesia ("LTI") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari LTI berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 30 Desember 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 336 miliar (nilai penuh) yang merupakan kewajiban finansial atas *Availability Payment*, dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disepakati oleh LTI dan PJPK.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 21 Desember 2018.

4. Proyek Palapa Ring Timur

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Palapa Timur Telematika ("Palapa Timur") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

2. Western Package Palapa Ring Project (continued)

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 310 billion (full amount) covering the financial liability of Availability Payment, and 80% from termination cost approved by Palapa Barat and GCA.

The project operates starting on 2 March 2018.

3. Central Package Palapa Ring Project

On 4 March 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT LEN Telekomunikasi Indonesia ("LTI") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from LTI in the form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 30 December 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 336 billion (full amount) covering the financial liability of Availability Payment, and 80% from termination cost approved by LTI and GCA.

The project operates starting on 21 December 2018.

4. Eastern Package Palapa Ring Project

On 29 September 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Palapa Timur Telematika ("Palapa Timur") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/58 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

4. Proyek Palapa Ring Timur (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Palapa Timur berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 29 Maret 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 826 miliar (nilai penuh untuk sub-paket 1) dan Rp 570 miliar (nilai penuh untuk sub-paket 2) yang merupakan kewajiban finansial atas *Availability Payment*, dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disepakati oleh Palapa Timur dan PJPk.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 29 Agustus 2019.

5. Proyek Tol Batang - Semarang

Pada tanggal 27 April 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Semarang Batang ("Jasamarga Semarang Batang") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Semarang Batang berupa *upfront fee* pada saat tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

4. Eastern Package Palapa Ring Project (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Palapa Timur in the form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 29 March 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 826 billion (full amount for sub-package 1) and Rp 570 billion (full amount for sub-package 2) covering the financial liability of Availability Payment, and 80% from termination cost approved by Palapa Timur and GCA.

The project operates starting on 29 August 2019.

5. Batang - Semarang Toll Road Project

On 27 April 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Semarang Batang ("Jasamarga Semarang Batang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Semarang Batang in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/59 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

5. Proyek Tol Batang - Semarang (lanjutan)

Pada tanggal 20 Juni 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.450 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 21 Januari 2019.

6. Proyek Tol Pandaan - Malang

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Pandaan Malang ("Jasamarga Pandaan Malang") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Pandaan Malang berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 3 Oktober 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 5,6 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

Proyek ini telah beroperasi untuk seluruh seksi pada tanggal 2 April 2020.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

5. Batang - Semarang Toll Road Project (continued)

On 20 June 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,450 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

The project operates starting on 21 January 2019.

6. Pandaan - Malang Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Pandaan Malang ("Jasamarga Pandaan Malang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Pandaan Malang in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 3 October 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 5.6 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

The project operates for all sections on 2 April 2020.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/60 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

7. Proyek Tol Manado - Bitung

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Manado Bitung ("Jasamarga Manado Bitung") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Manado Bitung berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 6 Oktober 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 3,4 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

Proyek ini telah beroperasi pada bulan Juni dan September 2020 untuk sebagian seksi.

8. Proyek Tol Balikpapan - Samarinda

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("Jasamarga Balikpapan Samarinda") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Balikpapan Samarinda berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

7. Manado - Bitung Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Manado Bitung ("Jasamarga Manado Bitung") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Manado Bitung in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 6 October 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 3.4 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

The project operates on June and September 2020 for some sections.

8. Balikpapan - Samarinda Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("Jasamarga Balikpapan Samarinda") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Balikpapan Samarinda in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/61 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

8. Proyek Tol Balikpapan - Samarinda (lanjutan)

Pada tanggal 2 Desember 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 6,1 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

Proyek ini telah beroperasi untuk seluruh seksi pada tanggal 24 Agustus 2021.

9. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") Umbulan

Pada tanggal 21 Juli 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan ("Meta") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Meta berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 10 Februari 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

8. Balikpapan - Samarinda Toll Road Project (continued)

On 2 December 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 6.1 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

The project operates for all sections on 24 August 2021.

9. Water Supply System Umbulan Project

On 21 July 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Meta Adhya Tirta Umbulan ("Meta") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Meta in the form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 February 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/62 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

9. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") Umbulan (lanjutan)

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 180 miliar (nilai penuh) yang meliputi cidera janji pembayaran bulanan dan 80% atas harga pembelian proyek yang wajib dibayar oleh PJPK ke BU sesuai PKS.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 29 Januari 2021.

10. Proyek Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed (Sebelumnya Jalan Tol Jakarta - Cikampek II *Elevated*)

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek ("Jasamarga Jakarta - Cikampek *Elevated*") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Jakarta - Cikampek *Elevated* berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian penjaminan dan surat imbal jasa penjaminan. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 8 Mei 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 600 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif dan risiko politik.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 12 Desember 2019.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

9. Water Supply System Umbulan Project (continued)

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 180 billion (full amount) covering the breach of monthly payment promise and 80% of project purchase price to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

The project operates starting on 29 January 2021.

10. Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed (Previously Jakarta - Cikampek II *Elevated Tol Road*) Project

*On 22 February 2017, the Company entered into a Jalan Layang Cikampek ("Jasamarga Jakarta - Cikampek *Elevated*") as the Investor.*

*Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Jakarta - Cikampek *Elevated* in the form of upfront fee at the signing date of guarantee agreement and fee letter. Meanwhile, guarantee fee at the effective date of guarantee until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.*

On 8 May 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 600 billion (full amount) covering tariff adjustment and political risk.

The project operates starting on 12 December 2019.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/63 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

11. Proyek Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Citra Karya Jabar Tol ("Citra Karya") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Citra Karya berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 22 Februari 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 1.430 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

Proyek ini telah beroperasi pada bulan November 2020 untuk sebagian seksi.

12. Proyek Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Waskita Bumi Wira ("Waskita Bumi") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

11. Cileunyi - Sumedang - Dawuan Toll Road Project

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Citra Karya Jabar Tol ("Citra Karya") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Citra Karya in the form of upfront fee at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 22 February 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 1,430 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

The project operates on November 2020 for some sections.

12. Krian - Legundi - Bunder - Manyar Toll Road Project

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Waskita Bumi Wira ("Waskita Bumi") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/64 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

12. Proyek Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Waskita Bumi berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 11 Desember 2017, penjaminan proyek telah efektif untuk ruas Krian - Legundi - Bunder dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan. Untuk ruas Bunder-Manyar telah efektif dengan diterbitkannya Berita Acara Pengadaan Tanah pada tanggal 1 Juli 2019.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 649 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik dan keterlambatan pengadaan tanah.

Proyek ini telah beroperasi pada bulan November 2020 untuk sebagian seksi.

13. Proyek Tol Serang - Panimbang

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang ("Wika Sepang") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Wika Sepang berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

12. Krian - Legundi - Bunder - Manyar Toll Road Project (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Waskita Bumi in the form of upfront fee at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 11 December 2017, the guarantee of the project has been effective for Krian - Legundi - Bunder segment road since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled. For Bunder-Manyar segment road has been effective with issuance of Minutes of Land Acquisition on 1 July 2019.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 649 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk and delay in land acquisition.

The project operates on November 2020 for some sections.

13. Serang - Panimbang Toll Road Project

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Wijaya Karya Serang Panimbang ("Wika Sepang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Wika Sepang in the form of upfront fee at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/65 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

13. Proyek Tol Serang - Panimbang (lanjutan)

Pada tanggal 17 November 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.053 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

Pada bulan Oktober 2018, dilakukan amandemen atas nilai maksimum penjaminan dana talangan tanah sehingga estimasi maksimum nilai penjaminan proyek ini menjadi Rp 2.053 miliar (nilai penuh).

Proyek ini telah beroperasi pada bulan November 2021 untuk sebagian seksi.

14. Proyek Tol Probolinggo - Banyuwangi

Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ("Jasamarga Probowangi") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Probowangi berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 10 Juli 2020, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.281 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

13. Serang - Panimbang Toll Road Project (continued)

On 17 November 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,053 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

In October 2018, there was an amendment of land bailout fund maximum guarantee therefore the estimated maximum guarantee of the project become Rp 2,053 billion (full amount).

The project operates on November 2021 for some sections.

14. Probolinggo - Banyuwangi Toll Road Project

On 29 December 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ("Jasamarga Probowangi") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Citra Karya in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 July 2020, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,281 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/66 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

15. Proyek Tol Jakarta - Cikampek II Selatan

Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Japek Selatan ("Jasamarga Japek Selatan") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Japek Selatan berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 27 Juni 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.280 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

16. Proyek SPAM Lampung

Pada tanggal 14 Februari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Adhya Tirta Lampung ("ATL") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ATL berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

15. Jakarta - Cikampek II South Toll Road Project

On 29 December 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Japek Selatan ("Jasamarga Japek Selatan") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Japek Selatan in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 27 June 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,280 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

16. Water Supply System Lampung Project

On 14 February 2018, the Company entered into a guarantee agreement with PT Adhya Tirta Lampung ("ATL") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from ATL in the form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/67 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

16. Proyek SPAM Lampung (lanjutan)

Pada tanggal 14 Agustus 2018, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 150 miliar (nilai penuh) yang meliputi cidera janji pembayaran bulanan dan 80% atas harga pembelian proyek yang wajib dibayar oleh PJPK ke BU sesuai PKS.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 12 Agustus 2020.

17. Proyek SPAM Semarang Barat

Pada tanggal 23 November 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Air Semarang Barat ("ASB") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ASB berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 29 Mei 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 169 miliar (nilai penuh) yang meliputi biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung (termasuk bunga keterlambatan pembayaran) dan biaya pengakhiran yang ditanggung sesuai dengan perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 22 Mei 2021.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

16. Water Supply System Lampung Project (continued)

On 14 August 2018, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 150 billion (full amount) covering the breach of monthly payment promise and 80% of project purchase price to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

The project operates starting on 12 August 2020.

17. Water Supply System West Semarang Project

On 23 November 2018, the Company entered into a guarantee agreement with PT Air Semarang Barat ("ASB") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from ASB in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 29 May 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 169 billion (full amount) covering non-termination costs (including late payment interest) and termination costs in accordance with the guarantee agreement.

The project operates starting on 22 May 2021.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/68 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

18. Proyek Kereta Api Makassar - Parepare

Pada tanggal 5 April 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Celebes Railway Indonesia ("CRI") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari CRI berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 14 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 16 September 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 439 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan 70% atas biaya pengakhiran yang ditanggung yang wajib dibayar oleh PJPK ke BU sesuai PKS.

19. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah

Pada tanggal 3 Mei 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Satelit Nusantara Tiga ("SNT") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari SNT berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

18. Makassar - Parepare Railway Train Project

On 5 April 2019, the Company entered into a guarantee agreement with PT Celebes Railway Indonesia ("CRI") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from CRI in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 14 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 16 September 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 439 billion (full amount) that is non-termination costs and 70% of termination costs in to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

19. Government Multifunction Satellite Project

On 3 May 2019, the Company entered into a guarantee agreement with PT Satelit Nusantara Tiga ("SNT") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from SNT in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/69 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

19. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.670 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung mana yang lebih rendah antara Rp 7.200 miliar (nilai penuh) atau 80% atas biaya pengakhiran yang wajib dibayarkan oleh PJPk ke BU sesuai PKS.

20. Proyek Tol Semarang - Demak

Pada tanggal 23 September 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak ("PPSD") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PPSD berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 9 Januari 2020, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 5.167 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah dan terminasi.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

19. Government Multifunction Satellite Project (continued)

On 31 March 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,670 billion (full amount) that is non-termination costs and termination costs whichever is lower between Rp 7,200 billion (full amount) or 80% of termination costs in to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

20. Semarang - Demak Toll Road Project

On 23 September 2019, the Company entered into a guarantee agreement with PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak ("PPSD") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PPSD in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 9 January 2020, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 5,167 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund and termination.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/70 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

21. Proyek Bandar Udara Labuan Bajo

Pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Cinta Airport Flores ("CAF") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari CAF berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 14 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 368 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung oleh PJPK ke BU sesuai PKS.

22. Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 3 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jalintim Adhi Abipraya ("JAA") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari JAA berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 11 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

21. Labuan Bajo Airport Project

On 7 February 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Cinta Airport Flores ("CAF") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from CAF in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 14 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 368 billion (full amount) that is non-termination costs and termination costs to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

22. Preservation of The East Sumatera Cross Road at South Sumatera Province Project

On 3 August 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jalintim Adhi Abipraya ("JAA") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from JAA in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 11 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/71 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

22. Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan (lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2020, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 1.303 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung oleh PJPK ke BU sesuai PKS.

23. Proyek Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo

Pada tanggal 9 September 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jogjasolo Marga Makmur ("JMM") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari JMM berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.760 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

24. Proyek Tol Yogyakarta - Bawen

Pada tanggal 13 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Jogja Bawen ("JJB") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

22. Preservation of The East Sumatera Cross Road at South Sumatera Province Project (continued)

On 30 December 2020, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 1,303 billion (full amount) that is non-termination costs and termination costs to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

23. Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo Toll Road Project

On 9 September 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jogjasolo Marga Makmur ("JMM") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from JMM in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,760 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

24. Yogyakarta - Bawen Toll Road Project

On 13 November 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Jogja Bawen ("JJB") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/72 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

24. Proyek Tol Yogyakarta - Bawen (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari JJB berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.634 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

25. Proyek SPAM Pekanbaru

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Pembangunan Perumahan Tirta Madani ("PPTM") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PPTM berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 21 Juli 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 469 miliar (nilai penuh) yang meliputi biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung sesuai dengan perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

24. Yogyakarta - Bawen Toll Road Project (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from JJB in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,634 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

25. Water Supply System Pekanbaru Project

On 16 December 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Pembangunan Perumahan Tirta Madani ("PPTM") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PPTM in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 21 July 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 469 billion (full amount) covering non-termination costs and termination costs in accordance with the guarantee agreement.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/73 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

26. Proyek SPAM Jatiluhur I

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur ("WTJJ") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari WTJJ berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 10 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 527 miliar (nilai penuh) yang meliputi biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung sesuai dengan perjanjian penjaminan.

27. Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau

Pada tanggal 12 April 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Adhi Jalintim Riau ("AJR") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari AJR berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 11 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 5 Oktober 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

26. Water Supply System Jatiluhur I Project

On 19 February 2021, the Company entered into a guarantee agreement with PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur ("WTJJ") as the investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from WTJJ in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 10 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 527 billion (full amount) covering non-termination costs and termination costs in accordance with the guarantee agreement.

27. Preservation of The East Sumatera Cross Road at Riau Province Project

On 12 April 2021, the Company entered into a guarantee agreement with PT Adhi Jalintim Riau ("AJR") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from AJR in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 11 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 5 October 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/74 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

27. Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau (lanjutan)

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 1.303 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung oleh PJPk ke BU sesuai PKS.

28. Proyek SPAM Karian Serpong

Pada tanggal 29 April 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Karian Water Services ("KWS") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari KWS berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 610 miliar (nilai penuh) yang meliputi biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung sesuai dengan perjanjian penjaminan.

29. Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton

Pada tanggal 6 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Baja Titian Utama ("BTU") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

27. Preservation of The East Sumatera Cross Road at Riau Province Project (continued)

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 1,303 billion (full amount) that is non-termination costs and termination costs to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

28. Water Supply System Karian Serpong Project

On 29 April 2021, the Company entered into a guarantee agreement with PT Karian Water Services ("KWS") as the investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from KWS in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 610 billion (full amount) covering non-termination costs and termination costs in accordance with the guarantee agreement.

29. Replacement and/or Duplication of Callender Hamilton Bridge Project

On 6 December 2021, the Company entered into a guarantee agreement with PT Baja Titian Utama ("BTU") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/75 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

**29. Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi
Jembatan Callender Hamilton (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari BTU berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 10 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.736 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung oleh PJPk ke BU sesuai PKS.

Non-KPBU

**1. Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Mandalika**

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek pembangunan fasilitas infrastruktur pariwisata KEK Mandalika dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC") selaku BUMN terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ITDC berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 35 tahun.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

**29. Replacement and/or Duplication of
Callender Hamilton Bridge Project
(continued)**

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from BTU in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 10 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,736 billion (full amount) that is non-termination costs and termination costs to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

Non-PPP

**1. Special Economic Zone (SEZ) Mandalika
Project**

On 31 December 2018, the Company entered into a loan guarantee agreement for the construction of SEZ Mandalika tourism infrastructure facilities with Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC") as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on 28 December 2018, the Company is entitled to receive fees from ITDC in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee for 35 years.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/76 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Non-KPBU (lanjutan)

1. Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika (lanjutan)

Pada tanggal 22 Maret 2019, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai dengan 15,5% dari nilai pinjaman sebesar USD 94.392.000 (nilai penuh) beserta biaya bunga dan biaya lainnya.

2. Proyek Hydropower Programme

Pada tanggal 5 September 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek pembangunan fasilitas infrastruktur penyediaan pembangkit listrik tenaga air di wilayah Sulawesi dan lainnya dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") selaku BUMN terjamin dimana penjaminan telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 14 tahun.

Pada tanggal 5 September 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah maksimum sebesar EUR 42.099.000 (nilai penuh).

3. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng-2 dan Patuha-2

Pada tanggal 19 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng-2 dan Patuha-2 dengan PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GDE") selaku BUMN terjamin.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Non-PPP (continued)

1. Special Economic Zone (SEZ) Mandalika Project (continued)

On 22 March 2019, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to 15.5% of the principal loan amounting to USD 94,392,000 (full amount) plus interests and other charges.

2. Hydropower Programme Project

On 5 September 2019, the Company entered into a loan guarantee agreement for the infrastructure development in providing hydroelectric power plants in Sulawesi region and others with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") as the guaranteed SOE which the guarantee of the project has been effective along with the signing of the guarantee agreement.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 14 years.

On 5 September 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is at the maximum amounting to EUR 42,099,000 (full amount).

3. Dieng-2 and Patuha-2 Geothermal Power Plant Development Project

On 19 August 2020, the Company entered into a loan guarantee agreement of Dieng-2 and Patuha-2 Geothermal Power Plant Development project with PT Geo Dipa Energi ("GDE") as the guaranteed SOE.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/77 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Non-KPBU (lanjutan)

3. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng-2 dan Patuha-2 (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari GDE berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 20 tahun.

Pada tanggal 21 September 2020, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai sebesar USD 58.625.000 (nilai penuh).

4. Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-KMP)

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek RBL-KMP dengan PLN selaku BUMN Terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 20 tahun.

Pada tanggal 14 Januari 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai sebesar USD 105.000.000 (nilai penuh).

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Non-PPP (continued)

3. *Dieng-2 and Patuha-2 Geothermal Power Plant Development Project (continued)*

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from GDE in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 20 years.

On 21 September 2020 the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to USD 58,625,000 (full amount).

4. *Kalimantan and Maluku-Papua Distribution Network Development Project with Result-Based Lending Scheme (RBL-KMP)*

On 16 December 2020, the Company entered into a loan guarantee agreement of RBL-KMP project with PLN as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 20 years.

On 14 January 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to USD 105,000,000 (full amount).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/78 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Non-KPBU (lanjutan)

5. Proyek Pengembangan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-SNT)

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek RBL-SNT dengan PLN selaku BUMN terjamin dimana penjaminan telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 15 tahun.

Pada tanggal 16 Desember 2020, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai sebesar EUR 48.600.000 (nilai penuh).

6. Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali (EJB)

Pada tanggal 10 Februari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman Proyek dengan PLN selaku BUMN terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 20 tahun.

Pada tanggal 9 April 2021, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai sebesar USD 62.000.000 (nilai penuh) beserta biaya bunga dan biaya lainnya.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Non-PPP (continued)

5. *Sulawesi and Nusa Tenggara Distribution Development Project with Result-Based Lending Scheme (RBL-SNT)*

On 16 December 2020, the Company entered into a loan guarantee agreement of RBL-SNT project with PLN as the guaranteed SOE which the guarantee of the project has been effective along with the signing of the guarantee agreement.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 15 years.

On 16 December 2020, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to EUR 48,600,000 (full amount).

6. *East Java and Bali (EJB) Distribution Network Development Project*

On 10 February 2021, the Company entered into a loan guarantee agreement of EJB Project with PLN as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 20 years.

On 9 April 2021, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to USD 62,000,000 (full amount) plus interests and other charges.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/79 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Loss Limit

Pada tanggal 28 Juli 2020, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional dimana peran Perusahaan adalah memberikan dukungan *loss limit* dan dapat melaksanakan penjaminan bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank ("LPEI") sebagai Badan Usaha Penjamin yang ditunjuk Pemerintah. Berdasarkan PMK tersebut, pada tanggal 19 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI dan pada tanggal 15 Desember 2020, Perusahaan juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan LPEI terkait pelaksanaan penugasan pemberian dukungan *loss limit* dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menandatangani adendum perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI terkait pengaturan tata cara penagihan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* yang terbit untuk periode bulan Desember 2021.

Pada tanggal 1 April 2021, telah diterbitkan PMK No. 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas PMK 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional yang mengubah beberapa ketentuan terkait kriteria Korporasi yang mendapatkan pinjaman kredit modal kerja. Berdasarkan PMK tersebut, penerbitan sertifikat penjaminan telah berakhir pada tanggal 17 Desember 2021.

Berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Perusahaan memberikan dukungan *loss limit* kepada LPEI dengan batasan 90% dari akumulasi imbal jasa penjaminan *loss limit* yang diterima Perusahaan dari Pemerintah.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Loss limit

On 28 July 2020, the issuance of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Recovery Program where the role of the Company are providing loss limit supports and performing co-guarantee with Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank ("LPEI") as a guarantor of Corporate Business Entities appointed by the Government of Indonesia. In accordance with the PMK, on 19 November 2020, the Company entered into a cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance, and on 15 December 2020, the Company also entered into a cooperation agreement with LPEI regarding the implementation of the assignment to provide loss limit supports for the the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program. Furthermore, on 13 December 2021, the Company entered into an amendment of cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance regarding the procedure for collecting Loss Limit Guarantee Fees issued for the period December 2021.

On 1 April 2021, the issuance of PMK No. 32/PMK.08/2021 regarding Changes of PMK No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Recovery Program that changes several provisions related to criteria for Corporate Business Entities to obtain working capital credit loans. Based on PMK, the issuance of guarantee certificates has ended on 17 December 2021.

Based on assignment from the Government, the Company provides loss limit supports to LPEI with threshold 90% of the accumulated loss limit guarantee fees received from government.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/80 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Loss Limit (lanjutan)

Sampai dengan 31 Desember 2021, nilai pinjaman yang telah diterbitkan sertifikat penjaminannya oleh LPEI dan disetujui untuk diberikan dukungan *loss limit* oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 5,91 triliun (nilai penuh) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 4,39 triliun (nilai penuh).

Bersama Pelaku Usaha Korporasi

Pada tanggal 23 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI dan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan LPEI sehubungan dengan pelaksanaan penugasan penjaminan bersama dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2021, Perusahaan menandatangani adendum perjanjian kerja sama dengan LPEI terkait perubahan profil risiko debitur yang dapat dijamin.

Sampai dengan 31 Desember 2021, telah dilaksanakan penjaminan Bersama Pelaku Usaha Korporasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan LPEI untuk nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp 1,9 triliun (nilai penuh) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 1,5 triliun (nilai penuh), dimana porsi penjaminan Perusahaan dengan LPEI adalah 80% dan 20%.

BUMN

1. Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita")

Pada tanggal 16 September 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pelaksanaan penjaminan atas Obligasi III Waskita Karya tahun 2021 dengan Waskita dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ("Kemenkeu") dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Loss limit (continued)

As of 31 December 2021, the value of loans for which guarantee certificate has been issued by LPEI and approved for loss limit supports by the Company is Rp 5.91 trillion (full amount) with guarantee value amounting to Rp 4.39 trillion (full amount).

Corporate Business Entity Co-guarantee

On 23 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance and also on 15 February 2021 with LPEI regarding implementation of a co-guarantee assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program. Furthermore, on 9 December 2021, the Company entered into an amendment of cooperation agreement with LPEI regarding the changes in the debtor's risk profile that can be guaranteed.

As of 31 December 2021, the Corporate Business Entity co-guarantee for the National Economic Recovery Program with LPEI has been carried out with the value of loans is Rp 1,9 trillion (full amount) with guarantee value amounting to Rp 1.5 trillion (full amount), with the portion of the guarantee between the Company and LPEI is 80% and 20%.

SOEs

1. Bonds III of PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita")

On 16 September 2021, the Company entered into a guarantee implementation agreement for the 2021 Waskita Karya's Bonds III with Waskita and guarantee assignment implementation agreement with Ministry of Finance of the Republic of Indonesia ("MOF") regarding implementation of an assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/81 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

BUMN (lanjutan)

1. Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita") (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Kemenkeu berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2022 dan selanjutnya akan dibayarkan oleh Waskita sampai dengan berakhirnya penjaminan Pemerintah.

Pada tanggal 16 September 2021, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp 112 miliar (nilai penuh).

2. Pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita")

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman Waskita Karya dengan Waskita dan Kemenkeu dan juga perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kemenkeu dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Kemenkeu berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2022 dan selanjutnya akan dibayarkan oleh Waskita sampai dengan berakhirnya penjaminan Pemerintah.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp 3.231 miliar (nilai penuh).

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

SOEs (continued)

1. Bonds III of PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita") (continued)

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from MOF in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee until 31 December 2022 and then will be paid by Waskita until the end of the Government guarantee.

On 16 September 2021, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 112 billion (full amount).

2. Loans of PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita")

On 29 October 2021, the Company entered into a guarantee implementation agreement for Waskita Karya's loans with Waskita and MOF and also guarantee assignment implementation agreement with MOF regarding implementation of an assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from Kemenkeu in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee until 31 December 2022 and then will be paid by Waskita until the end of the Government guarantee.

On 29 October 2021, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 3,231 billion (full amount).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/82 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Kontijensi

Dalam penjaminan KPBU, terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah, batas akhir serah terima tanah untuk beberapa proyek jalan tol yang dijamin Perusahaan telah terlewati. Dalam hal adanya kompensasi tunai atas keterlambatan penyerahan tanah tersebut dapat diajukan oleh BU kepada PJPK 7 hari setelah diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi ("SLO"). Dalam hal PJPK tidak memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama, maka BU dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2021, estimasi potensi klaim kepada PJPK yang dapat diajukan kepada Perusahaan untuk 5 (lima) proyek adalah sebesar Rp 272,6 miliar (nilai penuh) dengan asumsi keterlambatan pengadaan tanah adalah maksimal 6 bulan (tidak diaudit).

Selain itu, terdapat risiko keterlambatan penyesuaian tarif untuk 1 (satu) proyek yang dapat mengajukan klaim ke PJPK dengan estimasi potensi klaim sebesar Rp 63,1 miliar (nilai penuh), serta risiko kegagalan pembayaran bulanan untuk 1 (satu) proyek yang dapat mengajukan klaim ke PJPK dengan estimasi potensi klaim sebesar Rp 53,7 miliar sampai dengan 31 Desember 2021 (tidak diaudit).

Dalam penjaminan Non-KPBU, jika BUMN Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban pembayar sesuai perjanjian pinjaman kepada pemberi pinjaman, Perusahaan akan mengambil alih kewajiban pembayaran tersebut sesuai dengan perjanjian penjaminan sebelum terjadinya gagal bayar BUMN Terjamin atas pinjaman yang diberikan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah menelaah kewajibannya, baik dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim aktual atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Atas penilaian tersebut, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak ada penyisihan atas klaim yang dibentuk oleh Perusahaan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Contingencies

In PPP guarantee, regarding the risk of delay in land acquisition, the due date of land acquisition for few toll road project that guaranteed by Company have passed. In case of any cash compensation incurred due to delay in these land acquisition could be submitted by the Investor to GCA 7 days after the issuance of the Operation Worthiness Certificate ("OWC"). If the GCA did not fulfill the obligation to pay cash compensation in accordance with the time limit stipulated in the cooperation agreement, the investor could submit a claim to the Company. As at 31 December 2021, the estimated potential claims to GCA for 5 (five) guaranteed projects that could be submitted to the Company is Rp 272.6 billion (full amount), assuming the delay reaches maximum limit of 6 months (unaudited).

In addition, there were risk of delay in tariff adjustments for 1 (one) project that were eligible to submit the claim to GCA with an estimated potential claims is Rp 63.1 billion (full amount), and the risk of failure in monthly payment for 1 (one) project that can submit a claim to the PJPK with an estimated potential claim of Rp 53.7 billion as at 31 December 2021 (unaudited).

In Non-PPP guarantee, if guaranteed SOEs are unable to fulfill payment obligation according to the loan agreement to the lenders, the Company will take over the payment obligations in accordance with guarantee agreement before the default of guaranteed SOEs' loan.

As at 31 December 2021 and 2020, the Company has reviewed its obligation, whether in the form of potential claims and/or actual claims over the risks borne by the Company as stipulated in the guarantee agreement, to assess whether any provision required to be recognised in the financial statements. Based on the assessment, as at 31 December 2021 and 2020, there was no provision of claims deemed necessary to be made by the Company.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/83 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Kontijensi (lanjutan)

Atas semua perjanjian penjaminan yang dimiliki di atas, Perusahaan juga menandatangani perjanjian dengan para PJKP (KPBK) atau BUMN Terjamin (Non-KPBK) dari masing-masing proyek yang mengatur tata cara pengembalian hak regres pada saat pembayaran klaim dilakukan.

Perjanjian sewa kantor dengan PT Mahkota Prima Properti

Pada tanggal 22 Agustus 2016 Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti. Periode sewa adalah untuk 4 (empat) tahun dimulai dari 1 September 2016 dan berakhir pada 31 Agustus 2020.

Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Mahkota Prima Properti. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dibayarkan setiap bulan. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti yang ditahan oleh PT Mahkota Prima Properti tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada Perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

Pada tanggal 27 Juli 2020, Perusahaan telah menandatangani perpanjangan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti untuk periode perpanjangan sewa selama 3 (tiga) tahun dimulai dari 1 September 2020 dan berakhir pada 31 Agustus 2023.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Contingencies (continued)

Upon the signing of guarantee agreements above, the Company also signed agreement with GCA (PPP) or guaranteed SOEs (Non-PPP) of each projects, which stipulates term and conditions of recourse right when the Company make any claim payment.

Rent office agreement with PT Mahkota Prima Properti

On 22 August 2016, the Company entered into a lease agreement with PT Mahkota Prima Properti. The lease period is for 4 (four) years starting from 1 September 2016 and expires on 31 August 2020.

This lease agreement covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Mahkota Prima Properti. Payment for the full amount of rent and service charges was charged monthly. In addition, the Company also paid in advance for security deposit, which is held by the PT Mahkota Prima Properti without liability to the Company for interest. All deposits will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.

On 27 July 2020, the Company entered into extension of lease agreement with PT Mahkota Prima Properti for another 3 (three) years lease period starting from 1 September 2020 and expires on 31 August 2023.

26. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas yang penting adalah sebagai berikut:

	2021
Pencadangan saldo laba	31,028,000
Perubahan nilai pasar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar	1,358,616

26. NON-CASH TRANSACTIONS

The principal non-cash transactions are as follows:

	2020
Appropriation retained earnings	26,471,000
Changes in fair value of financial assets at fair value	292,588,861

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/84 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. REKONSILIASI BERSIH	AKTIVITAS PENDANAAN	27. NET FINANCING RECONCILIATION	ACTIVITIES

Rekonsiliasi dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

Reconciliation from financing activities are as follows:

2021					
Perubahan non-kas/ Non-cash changes					
Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cashflow	Pergerakan valuta asing/ Movement of foreign exchange	Pergerakan beban transaksi/ Changes in transaction cost	Saldo akhir/ Ending balance	
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	-	55,126,686	Two-step loans
Liabilitas sewa pembayaran	51,094,380	21,907,776	(39,497,831)	33,504,325	Financial lease liabilities
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	106,221,066	21,907,776	(39,497,831)	88,631,011	Total liabilities from financing activities
2020					
Perubahan non-kas/ Non-cash changes					
Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cashflow	Pergerakan valuta asing/ Movement of foreign exchange	Pergerakan beban transaksi/ Changes in transaction cost	Saldo akhir/ Ending balance	
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	-	55,126,686	Two-step loans
Liabilitas sewa pembayaran	-	7,302,592	43,791,788	51,094,380	Financial lease liabilities
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	55,126,686	7,302,592	43,791,788	106,221,066	Total liabilities from financing activities

28. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

28. SUBSEQUENT EVENTS

a) Perubahan komposisi Dewan Direksi

Berdasarkan KMK No. 14/KMK.06/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Pemegang Saham mengangkat Donny Hamdani sebagai anggota Direksi mulai tanggal 17 Januari 2022. Susunan Direksi Perusahaan sesuai keputusan diatas menjadi sebagai berikut:

a) Changes in Board of Directors

Based on KMK No. 14/KMK.06/2022 regarding dismissal and appointment of member of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia's Board of Directors, Shareholders appointed Donny Hamdani as the Company's Board of Directors starting date 17 January 2022. The composition of the Company's Board of Directors according to the above decision were as follows:

2022		2021	
Direktur Utama	Muhammad Wahid Sutopo	Muhammad Wahid Sutopo	President Director
Direktur	Donny Hamdani	-	Directors
Direktur	Andre Permana	Andre Permana	Directors

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/85 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**28. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
NERACA (lanjutan)**

b) Perjanjian Penjaminan

KPBU

Pada tanggal 31 Januari 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Gedebage Cilacap selaku badan usaha.

28. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

b) Guarantee Agreement

PPP

On 31 January 2022, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Gedebage Cilacap as the investor.

29. INFORMASI PENTING LAINNYA

Dampak COVID-19

Sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19, Perusahaan telah melakukan penilaian atas dampak pandemi COVID-19 terhadap rencana operasi dan bisnis Perusahaan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Perusahaan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Perusahaan ataupun menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya pada tanggal 31 Desember 2021.

29. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION

COVID-19 impact

In relation to development of the COVID-19 pandemic, the Company has assessed the effects of the COVID-19 pandemic to the Company's operations and business plan. Based on the assessment, the Company does not foresee any material uncertainty that may have significant adverse impact to the Company's business and operation or may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern as at 31 December 2021.

halaman ini sengaja dikosongkan

2021

Laporan Tahunan



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Capital Place 7-8th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18
Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12710 - Indonesia
Phone : +62 21 5795 0550
Fax : +62 21 5795 0040
Email : info@iigf.co.id



www.iigf.co.id